



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

**NOMOR 8 TAHUN 2024
TANGGAL 29 JULI 2024**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

DAFTAR ISI

URAIAN		HALAMAN
NASKAH PERDA		1-10
Lampiran I	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas:	
Lampiran I.1	Ringkasan LRA menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi	11-21
Lampiran I.2	Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan	22-23
Lampiran I.3	Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan	
	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	24-32
	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	33-45
	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	46-55
	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan	56-61
	Satuan Polisi Pamong Praja	62-66
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	67-71
	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	72-80
	Dinas Pertanian Dan Pangan	81-90
	Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan Dan Perikanan	91-100
	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	101-105
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	106-110
	Dinas Komunikasi Dan Informatika	111-115
	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	116-122
	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	123-127
	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	128-132
	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	133-136
	Dinas Tenaga Kerja	137-141
	Sekretariat Daerah	142-148
	Sekretariat DPRD	149-154
	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	155-159
	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	160-166
	PPKD	167-168
	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	169-172
	Inspektorat Daerah	173-177
	Kecamatan Ayah	178-181
	Kecamatan Buayan	182-185
	Kecamatan Puring	186-189
	Kecamatan Petanahan	190-193
	Kecamatan Klirong	194-197
	Kecamatan Buluspesantren	198-201
	Kecamatan Ambal	202-205
	Kecamatan Mirit	206-209
	Kecamatan Bonorowo	210-213
	Kecamatan Prembun	214-217
	Kecamatan Padureso	218-221
	Kecamatan Kutowinangun	222-225
	Kecamatan Alian	226-229
	Kecamatan Poncowarno	230-233
	Kecamatan Kebumen	234-238
	Kecamatan Pejagoan	239-242
	Kecamatan Sruweng	243-246
	Kecamatan Adimulyo	247-250
	Kecamatan Kuwarasan	251-254
	Kecamatan Rowokele	255-258
	Kecamatan Sempor	259-262

	URAIAN	HALAMAN
	Kecamatan Gombong	263-267
	Kecamatan Karanganyar	268-272
	Kecamatan Karanggayam	273-276
	Kecamatan Sadang	277-280
	Kecamatan Karangsambung	281-284
	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	285-290
Lampiran I.4	Rekapitulasi Realisasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	291-389
Lampiran II	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	390
Lampiran III	Laporan Operasional	391-392
Lampiran IV	Laporan Perubahan Ekuitas	393
Lampiran V	Neraca	394-395
Lampiran VI	Laporan Arus Kas	396-397
Lampiran VII	Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)	398-588
Lampiran VIII	Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah	589-590
Lampiran IX	Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	591
Lampiran X	Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir	592
Lampiran XI	Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	593
Lampiran XII	Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah	594-595
Lampiran XIII	Daftar Rekapitulasi Aset Tetap	596
Lampiran XIV	Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan	597
Lampiran XV	Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya	598-599
Lampiran XVI	Daftar Dana Cadangan Daerah	600
Lampiran XVII	Daftar Kewajiban Jangka Pendek	601
Lampiran XVIII	Daftar Kewajiban Jangka Panjang	602
Lampiran XIX	Daftar Sub Kegiatan yang belum diselesaikan sampai Akhir Tahun Anggaran 2023 dan Dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran Berikutnya	603
Lampiran XX	Ikhtisar Laporan Keuangan Badan usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas:	
Lampiran XX.1	Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah	604
Lampiran XX.2	Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah	605



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesta Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

dan

BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen.

4. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama suatu periode.
5. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan yang terdiri dari saldo anggaran lebih awal, sisa lebih perhitungan anggaran/sisa kurang pembiayaan anggaran, koreksi dan saldo anggaran lebih akhir.
6. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
7. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan Laporan Operasional, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
8. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan keluar selama suatu periode, serta posisi kas pada tanggal pelaporan.
9. Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/deficit-Laporan Operasional, koreksi dan ekuitas akhir.
10. Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	: Rp 2.901.021.509.721,00
b. Belanja Daerah	: Rp 2.977.141.914.829,00
Surplus/(defisit)	: (Rp 76.120.405.108,00)
c. Pembiayaan Daerah	
- Penerimaan Pembiayaan	: Rp 283.142.890.877,98
- Pengeluaran Pembiayaan	: Rp 42.331.000.000,00
Pembiayaan Netto	: Rp 164.691.485.769,98

Pasal 4

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp44.040.071.721,00 (empat puluh empat miliar empat puluh juta tujuh puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:	
1. Anggaran pendapatan setelah perubahan	: Rp 2.856.981.438.000,00
2. Realisasi	: Rp 2.901.021.509.721,00
Selisih lebih/(kurang)	: Rp 44.040.071.721,00
b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp116.786.045.171,00) (seratus enam belas miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta empat puluh lima ribu seratus tujuh puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:	
1. Anggaran belanja setelah perubahan	: Rp 3.093.927.960.000,00
2. Realisasi	: Rp 2.977.141.914.829,00
Selisih lebih/(kurang)	: (Rp 116.786.045.171,00)
c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp160.826.116.892,00 (seratus enam puluh miliar delapan ratus dua puluh enam juta seratus enam belas ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:	
1. Surplus/defisit setelah perubahan	: (Rp 236.946.522.000,00)
2. Realisasi	: (Rp 76.120.405.108,00)
Selisih lebih/(kurang)	: Rp 160.826.116.892,00

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp134.631.122,02 (seratus tiga puluh empat juta enam ratus tiga puluh satu ribu seratus dua puluh dua koma nol dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran penerimaan pembiayaan	: Rp	283.277.522.000,00
setelah perubahan		
2. Realisasi	: Rp	283.142.890.877,98
Selisih lebih/(kurang)	: Rp	<u>134.631.122,02</u>

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp4.000.000.000,00) (empat miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pengeluaran pembiayaan	: Rp	46.331.000.000,00
setelah perubahan		
2. Realisasi	: Rp	42.331.000.000,00
Selisih lebih/(kurang)	: (Rp	<u>4.000.000.000,00)</u>

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp3.865.368.877,98 (tiga miliar delapan ratus enam puluh lima juta tiga ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh koma sembilan puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	: Rp	236.946.522.000,00
2. Realisasi	: Rp	240.811.890.877,98
Selisih lebih/(kurang)	: Rp	<u>3.865.368.877,98</u>

Pasal 5

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	: Rp	258.817.350.877,98
b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih	: Rp	258.817.350.877,98
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran	: Rp	164.691.485.769,98
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan	: Rp	0,00
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir	: Rp	<u>164.691.485.769,98</u>

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	: Rp	4.516.881.288.095,62
b. Jumlah Kewajiban	: Rp	58.789.647.975,97
c. Jumlah Ekuitas	: Rp	<u>4.458.091.640.119,65</u>

Pasal 7

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d sebagai berikut:

a. Pendapatan – Laporan Operasional	:	Rp 2.443.408.168.436,75
b. Beban	:	Rp 2.514.165.363.863,43
c. Surplus/Defisit dari Operasi	:	(Rp 70.757.195.426,68)
d. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	:	(Rp 61.892.277.453,00)
e. Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa	:	(Rp 409.940.801,00)
f. Surplus/Defisit LO	:	<u>(Rp 133.059.413.680,68)</u>

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a. Saldo Kas per 1 Januari tahun 2023	:	Rp 258.826.677.179,98
b. Arus Kas dari aktivitas operasi	:	Rp 200.684.492.551,00
c. Arus Kas dari aktivitas investasi	:	(Rp 294.810.357.659,00)
d. Arus Kas dari aktivitas pendanaan	:	Rp 0,00
e. Arus Kas dari aktivitas transitoris	:	(Rp 2.887.572,00)
f. Saldo Kas per 31 Desember 2023	:	Rp 164.697.924.499,98

Pasal 9

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	:	Rp 4.592.239.658.445,71
b. Surplus/defisit – Laporan Operasional	:	(Rp 133.059.413.680,68)
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/- Kesalahan Mendasar	:	(Rp 1.088.604.645,38)
d. Ekuitas Akhir	:	<u>Rp 4.458.091.640.119,65</u>

Pasal 10

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2023 memuat informasi secara kuantitatif dan kualitatif atas pos Laporan Keuangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas;
 - Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir Tahun Anggaran 2023 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik

Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas;

Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan usaha
Milik Daerah/Perusahaan Daerah;

Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi)
Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 29 Juli 2024

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen

pada tanggal 29 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

EDI RIAN TO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, PROVINSI JAWA
TENGAH : (8-165/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

A circular official stamp of the Secretary of the Regional Government of Kebumen is visible in the background. It contains the text 'SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN' around the perimeter and a central emblem. A blue ink signature is written over the stamp.
AKHMAD HARUN, S.H.

Pembina Tk. I

NIP 19690809 199803 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

I. UMUM

Salah satu kewenangan Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah adalah menyusun Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 194 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk mendapat persetujuan bersama.

Selanjutnya, dalam hal penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Sehingga diharapkan Pemerintah Daerah mampu menciptakan sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat, dengan tetap menaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta meninjau sistem tersebut secara terus menerus dengan tujuan mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan transparan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 217



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Tahun Anggaran 2023

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
4	PENDAPATAN DAERAH	2.856.981.438.000,00	2.901.021.509.721,00	44.040.071.721,00	101,54
4.1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	240.055.011.000,00	271.475.382.595,00	31.420.371.595,00	113,09
4.1.01	PENDIDIKAN	120.000.000,00	220.117.000,00	100.117.000,00	183,43
4.1.01.1-01.2-19.0-00.01	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	120.000.000,00	220.117.000,00	100.117.000,00	183,43
4.1.02	KESEHATAN	233.679.122.000,00	267.226.694.588,00	33.547.572.588,00	114,36
4.1.02.1-02.2-14.0-00.01	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	233.679.122.000,00	267.226.694.588,00	33.547.572.588,00	114,36
4.1.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2.337.134.000,00	1.799.698.287,00	(537.435.713,00)	77,00
4.1.03.1-03.2-10.0-00.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2.337.134.000,00	1.799.698.287,00	(537.435.713,00)	77,00
4.1.04	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	3.918.755.000,00	2.228.872.720,00	(1.689.882.280,00)	56,88
4.1.04.1-04.2-15.0-00.01	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3.918.755.000,00	2.228.872.720,00	(1.689.882.280,00)	56,88
4.2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	28.851.990.000,00	23.154.887.563,00	(5.697.102.437,00)	80,25
4.2.09	PANGAN	815.000.000,00	791.567.500,00	(23.432.500,00)	97,12
4.2.09.2-09.3-27.0-00.01	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	815.000.000,00	791.567.500,00	(23.432.500,00)	97,12
4.2.11	LINGKUNGAN HIDUP	3.458.799.400,00	2.907.596.494,00	(551.202.906,00)	84,06
4.2.11.2-11.3-28.3-25.01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.458.799.400,00	2.907.596.494,00	(551.202.906,00)	84,06
4.2.16	KOMUNIKASI & INFORMATIKA	234.347.000,00	363.279.835,00	128.932.835,00	155,02
4.2.16.2-16.2-20.2-21.01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	234.347.000,00	363.279.835,00	128.932.835,00	155,02
4.2.17	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	12.850.747.600,00	11.877.045.875,00	(973.701.725,00)	92,42
4.2.17.2-17.3-31.3-30.01	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	12.850.747.600,00	11.877.045.875,00	(973.701.725,00)	92,42
4.2.18	PENANAMAN MODAL	1.493.096.000,00	1.543.956.730,00	50.860.730,00	103,41
4.2.18.2-18.0-00.0-00.01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1.493.096.000,00	1.543.956.730,00	50.860.730,00	103,41
4.2.22	KEBUDAYAAN	10.000.000.000,00	5.671.441.129,00	(4.328.558.871,00)	56,71
4.2.22.2-22.3-26.0-00.01	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	10.000.000.000,00	5.671.441.129,00	(4.328.558.871,00)	56,71
4.3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	82.500.000,00	84.120.000,00	1.620.000,00	101,96
4.3.29	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	82.500.000,00	84.120.000,00	1.620.000,00	101,96
4.3.29.3-29.3-32.2-07.01	DINAS TENAGA KERJA	82.500.000,00	84.120.000,00	1.620.000,00	101,96
4.4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	81.900.000,00	158.132.000,00	76.232.000,00	193,08
4.4.01	SEKRETARIAT DAERAH	81.900.000,00	158.132.000,00	76.232.000,00	193,08
4.4.01.4-01.0-00.0-00.01	SEKRETARIAT DAERAH	81.900.000,00	158.132.000,00	76.232.000,00	193,08
4.5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	2.587.036.876.000,00	2.605.232.405.910,00	18.195.529.910,00	100,70
4.5.02	KEUANGAN	2.587.036.876.000,00	2.605.232.405.910,00	18.195.529.910,00	100,70



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
4.5.02.5-02.0-00.0-00.01	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	2.587.036.876.000,00	2.605.232.405.910,00	18.195.529.910,00	100,70
4.7	UNSUR KEWILAYAHAN	873.161.000,00	916.581.653,00	43.420.653,00	104,97
4.7.01	KECAMATAN	873.161.000,00	916.581.653,00	43.420.653,00	104,97
4.7.01.7-01.0-00.0-00.10	KECAMATAN PREMBUN	2.000.000,00	2.915.000,00	915.000,00	145,75
4.7.01.7-01.0-00.0-00.12	KECAMATAN KUTOWINANGUN	2.000.000,00	800.000,00	(1.200.000,00)	40,00
4.7.01.7-01.0-00.0-00.15	KECAMATAN KEBUMEN	195.656.000,00	219.672.703,00	24.016.703,00	112,27
4.7.01.7-01.0-00.0-00.21	KECAMATAN SEMPOR	1.000.000,00	1.080.000,00	80.000,00	108,00
4.7.01.7-01.0-00.0-00.22	KECAMATAN GOMBONG	272.505.000,00	266.432.400,00	(6.072.600,00)	97,77
4.7.01.7-01.0-00.0-00.23	KECAMATAN KARANGANYAR	400.000.000,00	425.681.550,00	25.681.550,00	106,42
5	BELANJA DAERAH	3.093.927.960.000,00	2.977.141.914.829,00	(116.786.045.171,00)	96,23
5.1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.868.742.687.269,00	1.809.547.276.053,00	(59.195.411.216,00)	96,83
5.1.01	PENDIDIKAN	1.012.590.375.727,00	987.998.034.935,00	(24.592.340.792,00)	97,57
5.1.01.1-01.2-19.0-00.01	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1.012.590.375.727,00	987.998.034.935,00	(24.592.340.792,00)	97,57
5.1.01.1-01.2-19.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	960.376.297.727,00	937.457.316.023,00	(22.918.981.704,00)	97,61
5.1.01.1-01.2-19.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	784.263.880.727,00	762.613.489.550,00	(21.650.391.177,00)	97,24
5.1.01.1-01.2-19.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.038.078.000,00	127.972.265.855,00	(1.065.812.145,00)	99,17
5.1.01.1-01.2-19.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	45.544.339.000,00	45.341.560.618,00	(202.778.382,00)	99,55
5.1.01.1-01.2-19.0-00.01.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.530.000.000,00	1.530.000.000,00	0,00	100,00
5.1.01.1-01.2-19.0-00.01.2	BELANJA MODAL	52.214.078.000,00	50.540.718.912,00	(1.673.359.088,00)	96,80
5.1.01.1-01.2-19.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.150.202.000,00	21.560.794.028,00	(589.407.972,00)	97,34
5.1.01.1-01.2-19.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	18.707.973.000,00	17.645.859.232,00	(1.062.113.768,00)	94,32
5.1.01.1-01.2-19.0-00.01.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	11.355.903.000,00	11.334.065.652,00	(21.837.348,00)	99,81
5.1.02	KESEHATAN	584.644.611.272,00	560.651.430.901,00	(23.993.180.371,00)	95,90
5.1.02.1-02.2-14.0-00.01	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	584.644.611.272,00	560.651.430.901,00	(23.993.180.371,00)	95,90
5.1.02.1-02.2-14.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	528.912.765.272,00	508.613.643.733,00	(20.299.121.539,00)	96,16
5.1.02.1-02.2-14.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	135.988.383.272,00	133.842.485.340,00	(2.145.897.932,00)	98,42
5.1.02.1-02.2-14.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	392.408.045.000,00	374.381.982.243,00	(18.026.062.757,00)	95,41
5.1.02.1-02.2-14.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	360.000.000,00	232.840.000,00	(127.160.000,00)	64,68
5.1.02.1-02.2-14.0-00.01.1.06	Belanja Bantuan Sosial	156.337.000,00	156.336.150,00	(850,00)	100,00
5.1.02.1-02.2-14.0-00.01.2	BELANJA MODAL	55.731.846.000,00	52.037.787.168,00	(3.694.058.832,00)	93,37
5.1.02.1-02.2-14.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.181.511.663,00	29.370.450.955,00	(2.811.060.708,00)	91,26
5.1.02.1-02.2-14.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	21.553.277.337,00	20.693.933.580,00	(859.343.757,00)	96,01
5.1.02.1-02.2-14.0-00.01.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.994.557.000,00	1.973.402.633,00	(21.154.367,00)	98,94
5.1.02.1-02.2-14.0-00.01.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	0
5.1.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	178.970.797.288,00	171.392.073.878,00	(7.578.723.410,00)	95,77
5.1.03.1-03.2-10.0-00.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	178.970.797.288,00	171.392.073.878,00	(7.578.723.410,00)	95,77
5.1.03.1-03.2-10.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	67.314.547.288,00	64.250.124.541,00	(3.064.422.747,00)	95,45
5.1.03.1-03.2-10.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	19.540.169.000,00	18.689.911.162,00	(850.257.838,00)	95,65
5.1.03.1-03.2-10.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.916.138.288,00	36.802.445.879,00	(1.113.692.409,00)	97,06
5.1.03.1-03.2-10.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	9.258.240.000,00	8.757.767.500,00	(500.472.500,00)	94,59



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.1.03.1-03.2-10.0-00.01.1.06	Belanja Bantuan Sosial	600.000.000,00	0,00	(600.000.000,00)	0
5.1.03.1-03.2-10.0-00.01.2	BELANJA MODAL	111.656.250.000,00	107.141.949.337,00	(4.514.300.663,00)	95,96
5.1.03.1-03.2-10.0-00.01.2.01	Belanja Modal Tanah	1.594.820.000,00	1.400.551.240,00	(194.268.760,00)	87,82
5.1.03.1-03.2-10.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	458.572.000,00	437.505.000,00	(21.067.000,00)	95,41
5.1.03.1-03.2-10.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.956.887.000,00	1.860.320.600,00	(96.566.400,00)	95,07
5.1.03.1-03.2-10.0-00.01.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	107.645.971.000,00	103.443.572.497,00	(4.202.398.503,00)	96,10
5.1.04	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	53.786.116.000,00	52.404.533.369,00	(1.381.582.631,00)	97,43
5.1.04.1-04.2-15.0-00.01	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	53.786.116.000,00	52.404.533.369,00	(1.381.582.631,00)	97,43
5.1.04.1-04.2-15.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	34.551.410.000,00	33.720.303.767,00	(831.106.233,00)	97,59
5.1.04.1-04.2-15.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	5.689.958.000,00	5.198.477.739,00	(491.480.261,00)	91,36
5.1.04.1-04.2-15.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.626.452.000,00	17.316.826.028,00	(309.625.972,00)	98,24
5.1.04.1-04.2-15.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	9.390.000.000,00	9.390.000.000,00	0,00	100,00
5.1.04.1-04.2-15.0-00.01.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.845.000.000,00	1.815.000.000,00	(30.000.000,00)	98,37
5.1.04.1-04.2-15.0-00.01.2	BELANJA MODAL	19.234.706.000,00	18.684.229.602,00	(550.476.398,00)	97,14
5.1.04.1-04.2-15.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.714.475.000,00	1.637.297.500,00	(77.177.500,00)	95,50
5.1.04.1-04.2-15.0-00.01.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	17.520.231.000,00	17.046.932.102,00	(473.298.898,00)	97,30
5.1.05	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	27.085.116.982,00	25.879.033.722,00	(1.206.083.260,00)	95,55
5.1.05.1-05.0-00.0-00.01	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	17.746.933.698,00	16.865.580.946,00	(881.352.752,00)	95,03
5.1.05.1-05.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	16.330.747.698,00	15.531.370.946,00	(799.376.752,00)	95,11
5.1.05.1-05.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	5.629.212.671,00	5.176.352.304,00	(452.860.367,00)	91,96
5.1.05.1-05.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.661.535.027,00	10.315.018.642,00	(346.516.385,00)	96,75
5.1.05.1-05.0-00.0-00.01.1.06	Belanja Bantuan Sosial	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00
5.1.05.1-05.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	1.416.186.000,00	1.334.210.000,00	(81.976.000,00)	94,21
5.1.05.1-05.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.416.186.000,00	1.334.210.000,00	(81.976.000,00)	94,21
5.1.05.1-05.0-00.0-00.02	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	9.338.183.284,00	9.013.452.776,00	(324.730.508,00)	96,52
5.1.05.1-05.0-00.0-00.02.1	BELANJA OPERASI	8.911.511.284,00	8.589.015.776,00	(322.495.508,00)	96,38
5.1.05.1-05.0-00.0-00.02.1.01	Belanja Pegawai	2.649.336.284,00	2.548.935.097,00	(100.401.187,00)	96,21
5.1.05.1-05.0-00.0-00.02.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.262.175.000,00	6.040.080.679,00	(222.094.321,00)	96,45
5.1.05.1-05.0-00.0-00.02.2	BELANJA MODAL	426.672.000,00	424.437.000,00	(2.235.000,00)	99,48
5.1.05.1-05.0-00.0-00.02.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	426.672.000,00	424.437.000,00	(2.235.000,00)	99,48
5.1.06	SOSIAL	11.665.670.000,00	11.222.169.248,00	(443.500.752,00)	96,20
5.1.06.1-06.2-08.0-00.01	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	11.665.670.000,00	11.222.169.248,00	(443.500.752,00)	96,20
5.1.06.1-06.2-08.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	11.577.047.000,00	11.133.828.948,00	(443.218.052,00)	96,17
5.1.06.1-06.2-08.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	3.526.883.000,00	3.230.853.071,00	(296.029.929,00)	91,61
5.1.06.1-06.2-08.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.146.158.000,00	4.096.152.404,00	(50.005.596,00)	98,79
5.1.06.1-06.2-08.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	100,00
5.1.06.1-06.2-08.0-00.01.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.829.006.000,00	3.731.823.473,00	(97.182.527,00)	97,46
5.1.06.1-06.2-08.0-00.01.2	BELANJA MODAL	88.623.000,00	88.340.300,00	(282.700,00)	99,68
5.1.06.1-06.2-08.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	88.623.000,00	88.340.300,00	(282.700,00)	99,68
5.2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	200.261.153.693,00	193.092.550.787,00	(7.168.602.906,00)	96,42



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.2.09	PANGAN	53.180.962.053,00	50.385.172.862,00	(2.795.789.191,00)	94,74
5.2.09.2-09.3-27.0-00.01	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	53.180.962.053,00	50.385.172.862,00	(2.795.789.191,00)	94,74
5.2.09.2-09.3-27.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	51.627.261.953,00	48.865.306.162,00	(2.761.955.791,00)	94,65
5.2.09.2-09.3-27.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	17.498.381.500,00	17.136.622.445,00	(361.759.055,00)	97,93
5.2.09.2-09.3-27.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.535.476.453,00	11.996.073.677,00	(539.402.776,00)	95,70
5.2.09.2-09.3-27.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	21.593.404.000,00	19.732.610.040,00	(1.860.793.960,00)	91,38
5.2.09.2-09.3-27.0-00.01.2	BELANJA MODAL	1.553.700.100,00	1.519.866.700,00	(33.833.400,00)	97,82
5.2.09.2-09.3-27.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	803.899.100,00	781.172.200,00	(22.726.900,00)	97,17
5.2.09.2-09.3-27.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	749.801.000,00	738.694.500,00	(11.106.500,00)	98,52
5.2.11	LINGKUNGAN HIDUP	33.125.485.000,00	32.496.312.567,00	(629.172.433,00)	98,10
5.2.11.2-11.3-28.3-25.01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN	33.125.485.000,00	32.496.312.567,00	(629.172.433,00)	98,10
5.2.11.2-11.3-28.3-25.01.1	BELANJA OPERASI	30.316.077.000,00	29.712.751.957,00	(603.325.043,00)	98,01
5.2.11.2-11.3-28.3-25.01.1.01	Belanja Pegawai	11.228.839.000,00	10.871.967.744,00	(356.871.256,00)	96,82
5.2.11.2-11.3-28.3-25.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.462.933.000,00	16.288.695.988,00	(174.237.012,00)	98,94
5.2.11.2-11.3-28.3-25.01.1.05	Belanja Hibah	2.624.305.000,00	2.552.088.225,00	(72.216.775,00)	97,25
5.2.11.2-11.3-28.3-25.01.2	BELANJA MODAL	2.809.408.000,00	2.783.560.610,00	(25.847.390,00)	99,08
5.2.11.2-11.3-28.3-25.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	414.403.000,00	410.757.450,00	(3.645.550,00)	99,12
5.2.11.2-11.3-28.3-25.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.076.205.000,00	2.056.619.160,00	(19.585.840,00)	99,06
5.2.11.2-11.3-28.3-25.01.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	318.800.000,00	316.184.000,00	(2.616.000,00)	99,18
5.2.12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7.501.751.682,00	7.361.853.055,00	(139.898.627,00)	98,14
5.2.12.2-12.0-00.0-00.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7.501.751.682,00	7.361.853.055,00	(139.898.627,00)	98,14
5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	6.532.973.682,00	6.424.385.055,00	(108.588.627,00)	98,34
5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	3.853.251.000,00	3.772.579.467,00	(80.671.533,00)	97,91
5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.679.722.682,00	2.651.805.588,00	(27.917.094,00)	98,96
5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	968.778.000,00	937.468.000,00	(31.310.000,00)	96,77
5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	968.778.000,00	937.468.000,00	(31.310.000,00)	96,77
5.2.13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	9.086.197.000,00	8.865.207.724,00	(220.989.276,00)	97,57
5.2.13.2-13.0-00.0-00.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	9.086.197.000,00	8.865.207.724,00	(220.989.276,00)	97,57
5.2.13.2-13.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	9.084.877.000,00	8.864.035.724,00	(220.841.276,00)	97,57
5.2.13.2-13.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	3.783.938.000,00	3.595.626.829,00	(188.311.171,00)	95,02
5.2.13.2-13.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.300.939.000,00	5.268.408.895,00	(32.530.105,00)	99,39
5.2.13.2-13.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	1.320.000,00	1.172.000,00	(148.000,00)	88,79
5.2.13.2-13.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	804.000,00	656.000,00	(148.000,00)	81,59
5.2.13.2-13.0-00.0-00.01.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	516.000,00	516.000,00	0,00	100,00
5.2.16	KOMUNIKASI & INFORMATIKA	13.937.555.000,00	13.569.869.922,00	(367.685.078,00)	97,36
5.2.16.2-16.2-20.2-21.01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	13.937.555.000,00	13.569.869.922,00	(367.685.078,00)	97,36
5.2.16.2-16.2-20.2-21.01.1	BELANJA OPERASI	12.966.423.000,00	12.619.851.922,00	(346.571.078,00)	97,33
5.2.16.2-16.2-20.2-21.01.1.01	Belanja Pegawai	3.721.108.000,00	3.527.855.691,00	(193.252.309,00)	94,81
5.2.16.2-16.2-20.2-21.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.245.315.000,00	9.091.996.231,00	(153.318.769,00)	98,34
5.2.16.2-16.2-20.2-21.01.2	BELANJA MODAL	971.132.000,00	950.018.000,00	(21.114.000,00)	97,83



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.2.16.2-16.2-20.2-21.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	971.132.000,00	950.018.000,00	(21.114.000,00)	97,83
5.2.17	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	37.620.802.850,00	36.250.726.369,00	(1.370.076.481,00)	96,36
5.2.17.2-17.3-31.3-30.01	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	37.620.802.850,00	36.250.726.369,00	(1.370.076.481,00)	96,36
5.2.17.2-17.3-31.3-30.01.1	BELANJA OPERASI	21.384.387.850,00	20.499.130.219,00	(885.257.631,00)	95,86
5.2.17.2-17.3-31.3-30.01.1.01	Belanja Pegawai	9.901.879.850,00	9.419.898.479,00	(481.981.371,00)	95,13
5.2.17.2-17.3-31.3-30.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.979.490.000,00	8.713.235.620,00	(266.254.380,00)	97,03
5.2.17.2-17.3-31.3-30.01.1.05	Belanja Hibah	611.829.000,00	593.987.220,00	(17.841.780,00)	97,08
5.2.17.2-17.3-31.3-30.01.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.891.189.000,00	1.772.008.900,00	(119.180.100,00)	93,70
5.2.17.2-17.3-31.3-30.01.2	BELANJA MODAL	16.236.415.000,00	15.751.596.150,00	(484.818.850,00)	97,01
5.2.17.2-17.3-31.3-30.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.618.306.000,00	1.577.871.650,00	(40.434.350,00)	97,50
5.2.17.2-17.3-31.3-30.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	12.817.971.000,00	12.386.224.500,00	(431.746.500,00)	96,63
5.2.17.2-17.3-31.3-30.01.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.800.138.000,00	1.787.500.000,00	(12.638.000,00)	99,30
5.2.18	PENANAMAN MODAL	4.967.700.000,00	4.773.980.765,00	(193.719.235,00)	96,10
5.2.18.2-18.0-00.0-00.01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.967.700.000,00	4.773.980.765,00	(193.719.235,00)	96,10
5.2.18.2-18.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	4.950.522.000,00	4.756.928.065,00	(193.593.935,00)	96,09
5.2.18.2-18.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	2.965.950.000,00	2.798.820.446,00	(167.129.554,00)	94,37
5.2.18.2-18.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.984.572.000,00	1.958.107.619,00	(26.464.381,00)	98,67
5.2.18.2-18.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	17.178.000,00	17.052.700,00	(125.300,00)	99,27
5.2.18.2-18.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.178.000,00	17.052.700,00	(125.300,00)	99,27
5.2.22	KEBUDAYAAN	36.696.848.773,00	35.514.665.183,00	(1.182.183.590,00)	96,78
5.2.22.2-22.3-26.0-00.01	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	36.696.848.773,00	35.514.665.183,00	(1.182.183.590,00)	96,78
5.2.22.2-22.3-26.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	16.345.582.773,00	15.613.331.354,00	(732.251.419,00)	95,52
5.2.22.2-22.3-26.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	5.512.033.273,00	5.240.904.347,00	(271.128.926,00)	95,08
5.2.22.2-22.3-26.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.167.049.500,00	7.931.927.007,00	(235.122.493,00)	97,12
5.2.22.2-22.3-26.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	2.666.500.000,00	2.440.500.000,00	(226.000.000,00)	91,52
5.2.22.2-22.3-26.0-00.01.2	BELANJA MODAL	20.351.266.000,00	19.901.333.829,00	(449.932.171,00)	97,79
5.2.22.2-22.3-26.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	175.426.000,00	173.685.000,00	(1.741.000,00)	99,01
5.2.22.2-22.3-26.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20.175.840.000,00	19.727.648.829,00	(448.191.171,00)	97,78
5.2.23	PERPUSTAKAAN	4.143.851.335,00	3.874.762.340,00	(269.088.995,00)	93,51
5.2.23.2-23.2-24.0-00.01	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	4.143.851.335,00	3.874.762.340,00	(269.088.995,00)	93,51
5.2.23.2-23.2-24.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	3.986.601.335,00	3.722.378.960,00	(264.222.375,00)	93,37
5.2.23.2-23.2-24.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	2.583.092.435,00	2.337.970.076,00	(245.122.359,00)	90,51
5.2.23.2-23.2-24.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.403.508.900,00	1.384.408.884,00	(19.100.016,00)	98,64
5.2.23.2-23.2-24.0-00.01.2	BELANJA MODAL	157.250.000,00	152.383.380,00	(4.866.620,00)	96,91
5.2.23.2-23.2-24.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.250.000,00	35.769.000,00	(1.481.000,00)	96,02
5.2.23.2-23.2-24.0-00.01.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	120.000.000,00	116.614.380,00	(3.385.620,00)	97,18
5.3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	7.230.186.000,00	7.158.219.147,00	(71.966.853,00)	99,00
5.3.29	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	7.230.186.000,00	7.158.219.147,00	(71.966.853,00)	99,00
5.3.29.3-29.3-32.2-07.01	DINAS TENAGA KERJA	7.230.186.000,00	7.158.219.147,00	(71.966.853,00)	99,00
5.3.29.3-29.3-32.2-07.01.1	BELANJA OPERASI	7.208.186.000,00	7.136.869.147,00	(71.316.853,00)	99,01



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.3.29.3-29.3-32.2-07.01.1.01	Belanja Pegawai	5.219.504.000,00	5.163.327.798,00	(56.176.202,00)	98,92
5.3.29.3-29.3-32.2-07.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.988.682.000,00	1.973.541.349,00	(15.140.651,00)	99,24
5.3.29.3-29.3-32.2-07.01.2	BELANJA MODAL	22.000.000,00	21.350.000,00	(650.000,00)	97,05
5.3.29.3-29.3-32.2-07.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.000.000,00	21.350.000,00	(650.000,00)	97,05
5.4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	112.187.540.000,00	112.947.082.492,00	(4.240.457.508,00)	96,38
5.4.01	SEKRETARIAT DAERAH	59.089.486.000,00	57.131.754.729,00	(1.957.731.271,00)	96,69
5.4.01.4-01.0-00.0-00.01	SEKRETARIAT DAERAH	59.089.486.000,00	57.131.754.729,00	(1.957.731.271,00)	96,69
5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	58.307.966.000,00	56.394.270.979,00	(1.913.695.021,00)	96,72
5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	20.598.149.000,00	19.924.139.465,00	(674.009.535,00)	96,73
5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.210.522.000,00	19.383.836.514,00	(826.685.486,00)	95,91
5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	15.501.295.000,00	15.091.295.000,00	(410.000.000,00)	97,36
5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.998.000.000,00	1.995.000.000,00	(3.000.000,00)	99,85
5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	781.520.000,00	737.483.750,00	(44.036.250,00)	94,37
5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	776.520.000,00	732.483.750,00	(44.036.250,00)	94,33
5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
5.4.02	SEKRETARIAT DPRD	58.098.054.000,00	55.815.327.763,00	(2.282.726.237,00)	96,07
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01	SEKRETARIAT DPRD	58.098.054.000,00	55.815.327.763,00	(2.282.726.237,00)	96,07
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	57.900.722.000,00	55.625.218.763,00	(2.275.503.237,00)	96,07
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	37.420.502.000,00	37.129.851.590,00	(290.650.410,00)	99,22
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.480.220.000,00	18.495.367.173,00	(1.984.852.827,00)	90,31
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	197.332.000,00	190.109.000,00	(7.223.000,00)	96,34
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	197.332.000,00	190.109.000,00	(7.223.000,00)	96,34
5.5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	779.119.359.000,00	736.880.827.294,00	(42.238.531.706,00)	94,58
5.5.01	PERENCANAAN	7.661.017.000,00	7.520.031.009,00	(140.985.991,00)	98,16
5.5.01.5-01.5-05.0-00.01	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	7.661.017.000,00	7.520.031.009,00	(140.985.991,00)	98,16
5.5.01.5-01.5-05.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	7.578.312.000,00	7.443.056.009,00	(135.255.991,00)	98,22
5.5.01.5-01.5-05.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	4.450.312.000,00	4.365.247.207,00	(85.064.793,00)	98,09
5.5.01.5-01.5-05.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.128.000.000,00	3.077.808.802,00	(50.191.198,00)	98,40
5.5.01.5-01.5-05.0-00.01.2	BELANJA MODAL	82.705.000,00	76.975.000,00	(5.730.000,00)	93,07
5.5.01.5-01.5-05.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	82.705.000,00	76.975.000,00	(5.730.000,00)	93,07
5.5.02	KEUANGAN	709.733.959.000,00	707.260.862.104,00	(2.473.096.896,00)	99,65
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	709.733.959.000,00	707.260.862.104,00	(2.473.096.896,00)	99,65
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	27.179.536.000,00	26.043.543.184,00	(1.135.992.816,00)	95,82
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	15.373.656.000,00	14.448.711.016,00	(924.944.984,00)	93,98
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.075.880.000,00	10.919.175.766,00	(156.704.234,00)	98,59
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1.04	Belanja Subsidi	730.000.000,00	675.656.402,00	(54.343.598,00)	92,56
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	3.845.312.000,00	3.832.834.500,00	(12.477.500,00)	99,68
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.845.312.000,00	3.832.834.500,00	(12.477.500,00)	99,68
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.235.728.000,00	409.940.801,00	(825.787.199,00)	33,17
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.235.728.000,00	409.940.801,00	(825.787.199,00)	33,17



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.4	BELANJA TRANSFER	677.473.383.000,00	676.974.543.619,00	(498.839.381,00)	99,93
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.4.01	Belanja Bagi Hasil	13.792.758.000,00	13.743.166.881,00	(49.591.119,00)	99,64
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	663.680.625.000,00	663.231.376.738,00	(449.248.262,00)	99,93
5.5.03	KEPEGAWAIAN	61.724.383.000,00	22.099.934.181,00	(39.624.448.819,00)	35,80
5.5.03.5-03.5-04.0-00.01	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	61.724.383.000,00	22.099.934.181,00	(39.624.448.819,00)	35,80
5.5.03.5-03.5-04.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	61.183.059.000,00	21.565.108.181,00	(39.617.950.819,00)	35,25
5.5.03.5-03.5-04.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	56.617.384.000,00	17.824.406.319,00	(38.792.977.681,00)	31,48
5.5.03.5-03.5-04.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.565.675.000,00	3.740.701.862,00	(824.973.138,00)	81,93
5.5.03.5-03.5-04.0-00.01.2	BELANJA MODAL	541.324.000,00	534.826.000,00	(6.498.000,00)	98,80
5.5.03.5-03.5-04.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	541.324.000,00	534.826.000,00	(6.498.000,00)	98,80
5.6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	10.467.450.000,00	10.293.991.283,00	(173.458.717,00)	98,34
5.6.01	INSPEKTORAT	10.467.450.000,00	10.293.991.283,00	(173.458.717,00)	98,34
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01	INSPEKTORAT DAERAH	10.467.450.000,00	10.293.991.283,00	(173.458.717,00)	98,34
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	10.269.700.000,00	10.099.358.583,00	(170.341.417,00)	98,34
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	7.696.349.000,00	7.564.084.826,00	(132.264.174,00)	98,28
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.573.351.000,00	2.535.273.757,00	(38.077.243,00)	98,52
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	197.750.000,00	194.632.700,00	(3.117.300,00)	98,42
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	118.415.000,00	115.688.700,00	(2.726.300,00)	97,70
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	79.335.000,00	78.944.000,00	(391.000,00)	99,51
5.7	UNSUR KEWILAYAHAN	77.938.926.457,00	74.539.304.697,00	(3.399.621.760,00)	95,64
5.7.01	KECAMATAN	77.938.926.457,00	74.539.304.697,00	(3.399.621.760,00)	95,64
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01	KECAMATAN AYAH	2.536.980.000,00	2.506.325.164,00	(30.654.836,00)	98,79
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	2.526.735.000,00	2.496.341.164,00	(30.393.836,00)	98,80
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	2.055.524.000,00	2.030.930.841,00	(24.593.159,00)	98,80
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	471.211.000,00	465.410.323,00	(5.800.677,00)	98,77
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	10.245.000,00	9.984.000,00	(261.000,00)	97,45
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.245.000,00	9.984.000,00	(261.000,00)	97,45
5.7.01.7-01.0-00.0-00.02	KECAMATAN BUAYAN	2.053.582.307,00	1.908.524.747,00	(145.057.560,00)	92,94
5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.1	BELANJA OPERASI	2.053.582.307,00	1.908.524.747,00	(145.057.560,00)	92,94
5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.1.01	Belanja Pegawai	1.737.067.307,00	1.595.440.379,00	(141.626.928,00)	91,85
5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.1.02	Belanja Barang dan Jasa	316.515.000,00	313.084.368,00	(3.430.632,00)	98,92
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03	KECAMATAN PURING	2.201.740.000,00	2.130.803.714,00	(70.936.286,00)	96,78
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.1	BELANJA OPERASI	2.201.740.000,00	2.130.803.714,00	(70.936.286,00)	96,78
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.1.01	Belanja Pegawai	1.821.053.000,00	1.751.410.749,00	(69.642.251,00)	96,18
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.1.02	Belanja Barang dan Jasa	380.687.000,00	379.392.965,00	(1.294.035,00)	99,66
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04	KECAMATAN PETANAHAN	2.399.214.000,00	2.321.924.873,00	(77.289.127,00)	96,78
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.1	BELANJA OPERASI	2.386.811.000,00	2.309.540.373,00	(77.270.627,00)	96,76
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.1.01	Belanja Pegawai	1.928.890.000,00	1.863.947.997,00	(64.942.003,00)	96,63
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.1.02	Belanja Barang dan Jasa	457.921.000,00	445.592.376,00	(12.328.624,00)	97,31
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.2	BELANJA MODAL	12.403.000,00	12.384.500,00	(18.500,00)	99,85



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.403.000,00	12.384.500,00	(18.500,00)	99,85
5.7.01.7-01.0-00.0-00.05	KECAMATAN KLIRONG	2.186.874.000,00	2.094.513.046,00	(92.360.954,00)	95,78
5.7.01.7-01.0-00.0-00.05.1	BELANJA OPERASI	2.186.874.000,00	2.094.513.046,00	(92.360.954,00)	95,78
5.7.01.7-01.0-00.0-00.05.1.01	Belanja Pegawai	1.801.189.000,00	1.723.945.489,00	(77.243.511,00)	95,71
5.7.01.7-01.0-00.0-00.05.1.02	Belanja Barang dan Jasa	385.685.000,00	370.567.557,00	(15.117.443,00)	96,08
5.7.01.7-01.0-00.0-00.06	KECAMATAN BULUSPESANTREN	2.403.940.735,00	2.270.476.203,00	(133.464.532,00)	94,45
5.7.01.7-01.0-00.0-00.06.1	BELANJA OPERASI	2.403.940.735,00	2.270.476.203,00	(133.464.532,00)	94,45
5.7.01.7-01.0-00.0-00.06.1.01	Belanja Pegawai	2.059.455.735,00	1.932.280.788,00	(127.174.947,00)	93,82
5.7.01.7-01.0-00.0-00.06.1.02	Belanja Barang dan Jasa	344.485.000,00	338.195.415,00	(6.289.585,00)	98,17
5.7.01.7-01.0-00.0-00.07	KECAMATAN AMBAL	2.384.940.000,00	2.254.785.274,00	(130.154.726,00)	94,54
5.7.01.7-01.0-00.0-00.07.1	BELANJA OPERASI	2.375.670.000,00	2.245.515.274,00	(130.154.726,00)	94,52
5.7.01.7-01.0-00.0-00.07.1.01	Belanja Pegawai	1.849.465.000,00	1.756.312.780,00	(93.152.220,00)	94,96
5.7.01.7-01.0-00.0-00.07.1.02	Belanja Barang dan Jasa	526.205.000,00	489.202.494,00	(37.002.506,00)	92,97
5.7.01.7-01.0-00.0-00.07.2	BELANJA MODAL	9.270.000,00	9.270.000,00	0,00	100,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.07.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.270.000,00	9.270.000,00	0,00	100,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.08	KECAMATAN MIRIT	2.322.602.000,00	2.280.723.506,00	(41.878.494,00)	98,20
5.7.01.7-01.0-00.0-00.08.1	BELANJA OPERASI	2.298.426.000,00	2.256.653.506,00	(41.772.494,00)	98,18
5.7.01.7-01.0-00.0-00.08.1.01	Belanja Pegawai	1.875.620.000,00	1.836.699.229,00	(38.920.771,00)	97,92
5.7.01.7-01.0-00.0-00.08.1.02	Belanja Barang dan Jasa	422.806.000,00	419.954.277,00	(2.851.723,00)	99,33
5.7.01.7-01.0-00.0-00.08.2	BELANJA MODAL	24.176.000,00	24.070.000,00	(106.000,00)	99,56
5.7.01.7-01.0-00.0-00.08.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.176.000,00	24.070.000,00	(106.000,00)	99,56
5.7.01.7-01.0-00.0-00.09	KECAMATAN BONOROWO	2.319.606.000,00	2.209.360.370,00	(110.245.630,00)	95,25
5.7.01.7-01.0-00.0-00.09.1	BELANJA OPERASI	2.298.353.000,00	2.188.606.370,00	(109.746.630,00)	95,22
5.7.01.7-01.0-00.0-00.09.1.01	Belanja Pegawai	1.901.568.000,00	1.799.246.669,00	(102.321.331,00)	94,62
5.7.01.7-01.0-00.0-00.09.1.02	Belanja Barang dan Jasa	396.785.000,00	389.359.701,00	(7.425.299,00)	98,13
5.7.01.7-01.0-00.0-00.09.2	BELANJA MODAL	21.253.000,00	20.754.000,00	(499.000,00)	97,65
5.7.01.7-01.0-00.0-00.09.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.253.000,00	20.754.000,00	(499.000,00)	97,65
5.7.01.7-01.0-00.0-00.10	KECAMATAN PREMBUN	2.552.043.000,00	2.500.750.846,00	(51.292.154,00)	97,99
5.7.01.7-01.0-00.0-00.10.1	BELANJA OPERASI	2.516.397.000,00	2.468.455.846,00	(47.941.154,00)	98,09
5.7.01.7-01.0-00.0-00.10.1.01	Belanja Pegawai	2.127.217.000,00	2.086.277.376,00	(40.939.624,00)	98,08
5.7.01.7-01.0-00.0-00.10.1.02	Belanja Barang dan Jasa	389.180.000,00	382.178.470,00	(7.001.530,00)	98,20
5.7.01.7-01.0-00.0-00.10.2	BELANJA MODAL	35.646.000,00	32.295.000,00	(3.351.000,00)	90,60
5.7.01.7-01.0-00.0-00.10.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.646.000,00	32.295.000,00	(3.351.000,00)	90,60
5.7.01.7-01.0-00.0-00.11	KECAMATAN PADURESO	1.876.822.000,00	1.773.814.188,00	(103.007.812,00)	94,51
5.7.01.7-01.0-00.0-00.11.1	BELANJA OPERASI	1.876.822.000,00	1.773.814.188,00	(103.007.812,00)	94,51
5.7.01.7-01.0-00.0-00.11.1.01	Belanja Pegawai	1.596.988.000,00	1.503.152.881,00	(93.835.119,00)	94,12
5.7.01.7-01.0-00.0-00.11.1.02	Belanja Barang dan Jasa	279.834.000,00	270.661.307,00	(9.172.693,00)	96,72
5.7.01.7-01.0-00.0-00.12	KECAMATAN KUTOWINANGUN	2.134.140.000,00	2.067.638.973,00	(66.501.027,00)	96,88
5.7.01.7-01.0-00.0-00.12.1	BELANJA OPERASI	2.116.810.000,00	2.050.380.873,00	(66.429.127,00)	96,86
5.7.01.7-01.0-00.0-00.12.1.01	Belanja Pegawai	1.758.342.000,00	1.698.926.495,00	(59.415.505,00)	96,62



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.7.01.7-01.0-00.0-00.12.1.02	Belanja Barang dan Jasa	358.468.000,00	351.454.378,00	(7.013.622,00)	98,04
5.7.01.7-01.0-00.0-00.12.2	BELANJA MODAL	17.330.000,00	17.258.100,00	(71.900,00)	99,59
5.7.01.7-01.0-00.0-00.12.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.330.000,00	17.258.100,00	(71.900,00)	99,59
5.7.01.7-01.0-00.0-00.13	KECAMATAN ALIAN	2.273.869.000,00	2.208.198.330,00	(65.670.670,00)	97,11
5.7.01.7-01.0-00.0-00.13.1	BELANJA OPERASI	2.263.475.000,00	2.197.837.830,00	(65.637.170,00)	97,10
5.7.01.7-01.0-00.0-00.13.1.01	Belanja Pegawai	1.869.785.000,00	1.808.115.076,00	(61.669.924,00)	96,70
5.7.01.7-01.0-00.0-00.13.1.02	Belanja Barang dan Jasa	393.690.000,00	389.722.754,00	(3.967.246,00)	98,99
5.7.01.7-01.0-00.0-00.13.2	BELANJA MODAL	10.394.000,00	10.360.500,00	(33.500,00)	99,68
5.7.01.7-01.0-00.0-00.13.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.394.000,00	10.360.500,00	(33.500,00)	99,68
5.7.01.7-01.0-00.0-00.14	KECAMATAN PONCOWARNO	2.141.837.000,00	1.996.802.712,00	(145.034.288,00)	93,23
5.7.01.7-01.0-00.0-00.14.1	BELANJA OPERASI	2.126.661.000,00	1.982.442.712,00	(144.218.288,00)	93,22
5.7.01.7-01.0-00.0-00.14.1.01	Belanja Pegawai	1.714.056.000,00	1.603.627.045,00	(110.428.955,00)	93,56
5.7.01.7-01.0-00.0-00.14.1.02	Belanja Barang dan Jasa	412.605.000,00	378.815.667,00	(33.789.333,00)	91,81
5.7.01.7-01.0-00.0-00.14.2	BELANJA MODAL	15.176.000,00	14.360.000,00	(816.000,00)	94,62
5.7.01.7-01.0-00.0-00.14.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.176.000,00	14.360.000,00	(816.000,00)	94,62
5.7.01.7-01.0-00.0-00.15	KECAMATAN KEBUMEN	10.176.656.000,00	9.934.226.041,00	(242.429.959,00)	97,62
5.7.01.7-01.0-00.0-00.15.1	BELANJA OPERASI	10.104.551.000,00	9.864.016.041,00	(240.534.959,00)	97,62
5.7.01.7-01.0-00.0-00.15.1.01	Belanja Pegawai	5.300.038.000,00	5.097.974.074,00	(202.063.926,00)	96,19
5.7.01.7-01.0-00.0-00.15.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.804.513.000,00	4.766.041.967,00	(38.471.033,00)	99,20
5.7.01.7-01.0-00.0-00.15.2	BELANJA MODAL	72.105.000,00	70.210.000,00	(1.895.000,00)	97,37
5.7.01.7-01.0-00.0-00.15.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	72.105.000,00	70.210.000,00	(1.895.000,00)	97,37
5.7.01.7-01.0-00.0-00.16	KECAMATAN PEJAGOAN	2.555.831.000,00	2.467.329.908,00	(88.501.092,00)	96,54
5.7.01.7-01.0-00.0-00.16.1	BELANJA OPERASI	2.497.027.000,00	2.409.375.408,00	(87.651.592,00)	96,49
5.7.01.7-01.0-00.0-00.16.1.01	Belanja Pegawai	2.123.381.000,00	2.043.854.540,00	(79.526.460,00)	96,25
5.7.01.7-01.0-00.0-00.16.1.02	Belanja Barang dan Jasa	373.646.000,00	365.520.868,00	(8.125.132,00)	97,83
5.7.01.7-01.0-00.0-00.16.2	BELANJA MODAL	58.804.000,00	57.954.500,00	(849.500,00)	98,56
5.7.01.7-01.0-00.0-00.16.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	58.804.000,00	57.954.500,00	(849.500,00)	98,56
5.7.01.7-01.0-00.0-00.17	KECAMATAN SRUWENG	2.272.778.000,00	2.193.769.203,00	(79.008.797,00)	96,52
5.7.01.7-01.0-00.0-00.17.1	BELANJA OPERASI	2.253.033.000,00	2.174.029.203,00	(79.003.797,00)	96,49
5.7.01.7-01.0-00.0-00.17.1.01	Belanja Pegawai	1.868.210.000,00	1.794.442.657,00	(73.767.343,00)	96,05
5.7.01.7-01.0-00.0-00.17.1.02	Belanja Barang dan Jasa	384.823.000,00	379.586.546,00	(5.236.454,00)	98,64
5.7.01.7-01.0-00.0-00.17.2	BELANJA MODAL	19.745.000,00	19.740.000,00	(5.000,00)	99,97
5.7.01.7-01.0-00.0-00.17.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.745.000,00	19.740.000,00	(5.000,00)	99,97
5.7.01.7-01.0-00.0-00.18	KECAMATAN ADIMULYO	2.509.596.000,00	2.373.035.333,00	(136.560.667,00)	94,56
5.7.01.7-01.0-00.0-00.18.1	BELANJA OPERASI	2.493.596.000,00	2.357.146.133,00	(136.449.867,00)	94,53
5.7.01.7-01.0-00.0-00.18.1.01	Belanja Pegawai	2.047.611.000,00	1.916.185.620,00	(131.425.380,00)	93,58
5.7.01.7-01.0-00.0-00.18.1.02	Belanja Barang dan Jasa	445.985.000,00	440.960.513,00	(5.024.487,00)	98,87
5.7.01.7-01.0-00.0-00.18.2	BELANJA MODAL	16.000.000,00	15.889.200,00	(110.800,00)	99,31
5.7.01.7-01.0-00.0-00.18.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.000.000,00	15.889.200,00	(110.800,00)	99,31
5.7.01.7-01.0-00.0-00.19	KECAMATAN KUWARASAN	2.459.400.600,00	2.231.175.139,00	(228.225.461,00)	90,72



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.7.01.7-01.0-00.0-00.19.1	BELANJA OPERASI	2.459.400.600,00	2.231.175.139,00	(228.225.461,00)	90,72
5.7.01.7-01.0-00.0-00.19.1.01	Belanja Pegawai	2.071.952.600,00	1.846.951.438,00	(225.001.162,00)	89,14
5.7.01.7-01.0-00.0-00.19.1.02	Belanja Barang dan Jasa	387.448.000,00	384.223.701,00	(3.224.299,00)	99,17
5.7.01.7-01.0-00.0-00.20	KECAMATAN ROWOKELE	2.365.751.000,00	2.174.905.675,00	(190.845.325,00)	91,93
5.7.01.7-01.0-00.0-00.20.1	BELANJA OPERASI	2.352.876.000,00	2.164.615.675,00	(188.260.325,00)	92,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.20.1.01	Belanja Pegawai	1.974.352.000,00	1.787.090.019,00	(187.261.981,00)	90,52
5.7.01.7-01.0-00.0-00.20.1.02	Belanja Barang dan Jasa	378.524.000,00	377.525.656,00	(998.344,00)	99,74
5.7.01.7-01.0-00.0-00.20.2	BELANJA MODAL	12.875.000,00	10.290.000,00	(2.585.000,00)	79,92
5.7.01.7-01.0-00.0-00.20.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.875.000,00	10.290.000,00	(2.585.000,00)	79,92
5.7.01.7-01.0-00.0-00.21	KECAMATAN SEMPOR	2.378.333.000,00	2.319.807.930,00	(58.525.070,00)	97,54
5.7.01.7-01.0-00.0-00.21.1	BELANJA OPERASI	2.378.333.000,00	2.319.807.930,00	(58.525.070,00)	97,54
5.7.01.7-01.0-00.0-00.21.1.01	Belanja Pegawai	2.038.420.000,00	1.983.032.269,00	(55.387.731,00)	97,28
5.7.01.7-01.0-00.0-00.21.1.02	Belanja Barang dan Jasa	339.913.000,00	336.775.661,00	(3.137.339,00)	99,08
5.7.01.7-01.0-00.0-00.22	KECAMATAN GOMBONG	5.197.651.815,00	5.041.053.928,00	(156.597.887,00)	96,99
5.7.01.7-01.0-00.0-00.22.1	BELANJA OPERASI	5.161.852.815,00	5.005.700.928,00	(156.151.887,00)	96,97
5.7.01.7-01.0-00.0-00.22.1.01	Belanja Pegawai	3.224.150.815,00	3.075.862.990,00	(148.287.825,00)	95,40
5.7.01.7-01.0-00.0-00.22.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.937.702.000,00	1.929.837.938,00	(7.864.062,00)	99,59
5.7.01.7-01.0-00.0-00.22.2	BELANJA MODAL	35.799.000,00	35.353.000,00	(446.000,00)	98,75
5.7.01.7-01.0-00.0-00.22.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.799.000,00	35.353.000,00	(446.000,00)	98,75
5.7.01.7-01.0-00.0-00.23	KECAMATAN KARANGANYAR	9.300.692.000,00	8.723.868.859,00	(576.823.141,00)	93,80
5.7.01.7-01.0-00.0-00.23.1	BELANJA OPERASI	8.866.248.000,00	8.295.983.359,00	(570.264.641,00)	93,57
5.7.01.7-01.0-00.0-00.23.1.01	Belanja Pegawai	4.991.651.000,00	4.505.524.924,00	(486.126.076,00)	90,26
5.7.01.7-01.0-00.0-00.23.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.874.597.000,00	3.790.458.435,00	(84.138.565,00)	97,83
5.7.01.7-01.0-00.0-00.23.2	BELANJA MODAL	434.444.000,00	427.885.500,00	(6.558.500,00)	98,49
5.7.01.7-01.0-00.0-00.23.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70.844.000,00	67.406.000,00	(3.438.000,00)	95,15
5.7.01.7-01.0-00.0-00.23.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	86.600.000,00	85.454.000,00	(1.146.000,00)	98,68
5.7.01.7-01.0-00.0-00.23.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	277.000.000,00	275.025.500,00	(1.974.500,00)	99,29
5.7.01.7-01.0-00.0-00.24	KECAMATAN KARANGAYAM	2.183.771.000,00	2.058.730.425,00	(125.040.575,00)	94,27
5.7.01.7-01.0-00.0-00.24.1	BELANJA OPERASI	2.183.771.000,00	2.058.730.425,00	(125.040.575,00)	94,27
5.7.01.7-01.0-00.0-00.24.1.01	Belanja Pegawai	1.742.121.000,00	1.636.260.589,00	(105.860.411,00)	93,92
5.7.01.7-01.0-00.0-00.24.1.02	Belanja Barang dan Jasa	441.650.000,00	422.469.836,00	(19.180.164,00)	95,66
5.7.01.7-01.0-00.0-00.25	KECAMATAN SADANG	2.290.266.000,00	2.162.518.369,00	(127.747.631,00)	94,42
5.7.01.7-01.0-00.0-00.25.1	BELANJA OPERASI	2.271.822.000,00	2.144.212.769,00	(127.609.231,00)	94,38
5.7.01.7-01.0-00.0-00.25.1.01	Belanja Pegawai	1.950.076.000,00	1.830.376.240,00	(119.699.760,00)	93,86
5.7.01.7-01.0-00.0-00.25.1.02	Belanja Barang dan Jasa	321.746.000,00	313.836.529,00	(7.909.471,00)	97,54
5.7.01.7-01.0-00.0-00.25.2	BELANJA MODAL	18.444.000,00	18.305.600,00	(138.400,00)	99,25
5.7.01.7-01.0-00.0-00.25.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.944.000,00	5.805.600,00	(138.400,00)	97,67
5.7.01.7-01.0-00.0-00.25.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.26	KECAMATAN KARANGSAMBUNG	2.460.010.000,00	2.334.241.941,00	(125.768.059,00)	94,89
5.7.01.7-01.0-00.0-00.26.1	BELANJA OPERASI	2.436.953.000,00	2.311.456.941,00	(125.496.059,00)	94,85



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.7.01.7-01.0-00.0-00.26.1.01	Belanja Pegawai	2.026.679.000,00	1.902.868.132,00	(123.810.868,00)	93,89
5.7.01.7-01.0-00.0-00.26.1.02	Belanja Barang dan Jasa	410.274.000,00	408.588.809,00	(1.685.191,00)	99,59
5.7.01.7-01.0-00.0-00.26.2	BELANJA MODAL	23.057.000,00	22.785.000,00	(272.000,00)	98,82
5.7.01.7-01.0-00.0-00.26.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.057.000,00	22.785.000,00	(272.000,00)	98,82
5.8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	32.980.657.581,00	32.682.663.076,00	(297.994.505,00)	99,10
5.8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	32.980.657.581,00	32.682.663.076,00	(297.994.505,00)	99,10
5.8.01.8-01.0-00.0-00.01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	32.980.657.581,00	32.682.663.076,00	(297.994.505,00)	99,10
5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	32.820.724.581,00	32.523.233.076,00	(297.491.505,00)	99,09
5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	3.070.757.581,00	2.942.189.571,00	(128.568.010,00)	95,81
5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.133.831.000,00	5.090.627.505,00	(43.203.495,00)	99,16
5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	24.616.136.000,00	24.490.416.000,00	(125.720.000,00)	99,49
5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	159.933.000,00	159.430.000,00	(503.000,00)	99,69
5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	159.933.000,00	159.430.000,00	(503.000,00)	99,69
6	PEMBIAYAAN DAERAH	329.608.522.000,00	325.473.890.877,98	(4.134.631.122,02)	98,75
6.5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	329.608.522.000,00	325.473.890.877,98	(4.134.631.122,02)	98,75
6.5.02	KEUANGAN	329.608.522.000,00	325.473.890.877,98	(4.134.631.122,02)	98,75
6.5.02.5-02.0-00.0-00.01	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	329.608.522.000,00	325.473.890.877,98	(4.134.631.122,02)	98,75
6.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	283.277.522.000,00	283.142.890.877,98	(134.631.122,02)	99,95
6.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	258.826.262.000,00	258.817.350.877,98	(8.911.122,02)	100,00
6.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1.02	Pencairan Dana Cadangan	22.351.260.000,00	22.225.540.000,00	(125.720.000,00)	99,44
6.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	0,00	100,00
6.5.02.5-02.0-00.0-00.01.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	46.331.000.000,00	42.331.000.000,00	(4.000.000.000,00)	91,37
6.5.02.5-02.0-00.0-00.01.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00	100,00
6.5.02.5-02.0-00.0-00.01.2.02	Penyertaan Modal Daerah	24.231.000.000,00	20.231.000.000,00	(4.000.000.000,00)	83,49
6.5.02.5-02.0-00.0-00.01.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	0,00	100,00

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO





PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
4	PENDAPATAN DAERAH	2.856.981.438.000,00	2.901.021.509.721,00	101,54	2.847.196.017.404,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	432.821.047.000,00	463.650.961.705,00	107,12	512.346.375.475,00
4.1.01	Pajak Daerah	133.030.000.000,00	137.222.705.502,00	103,15	129.843.875.322,00
4.1.02	Retribusi Daerah	36.368.440.000,00	28.881.046.419,00	79,41	28.375.110.419,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19.123.337.000,00	19.123.340.688,00	100,00	17.640.585.052,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	244.299.270.000,00	278.423.869.096,00	113,97	336.486.804.682,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.421.983.808.000,00	2.435.850.438.454,00	100,57	2.329.703.641.941,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.233.962.752.000,00	2.250.967.223.263,00	100,76	2.123.296.694.941,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.765.872.796.000,00	1.783.201.602.063,00	100,98	1.706.540.321.941,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	11.805.728.000,00	11.805.728.000,00	100,00	0,00
4.2.01.05	Dana Desa	456.284.228.000,00	455.959.893.200,00	99,93	416.756.373.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	188.021.056.000,00	184.883.215.191,00	98,33	206.406.947.000,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	177.268.056.000,00	174.243.934.191,00	98,29	175.763.136.000,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	10.753.000.000,00	10.639.281.000,00	98,94	30.643.811.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	2.176.583.000,00	1.520.109.562,00	69,84	5.145.999.988,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	2.176.583.000,00	1.520.109.562,00	69,84	5.145.999.988,00
5	BELANJA DAERAH	3.093.927.960.000,00	2.977.141.914.829,00	96,23	2.824.358.293.725,00
5.1	BELANJA OPERASI	2.124.708.998.900,00	2.020.914.516.871,00	95,11	1.918.270.224.061,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.226.237.772.050,00	1.153.775.444.865,00	94,09	1.142.207.137.167,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	753.610.646.850,00	726.725.182.478,00	96,43	704.907.763.493,00
5.1.04	Belanja Subsidi	730.000.000,00	675.656.402,00	92,56	313.864.348,00
5.1.05	Belanja Hibah	132.241.048.000,00	128.698.064.603,00	97,32	59.752.651.931,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	11.889.532.000,00	11.040.168.523,00	92,86	11.088.807.122,00
5.2	BELANJA MODAL	290.509.850.100,00	278.842.913.538,00	95,98	272.301.599.864,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.594.820.000,00	1.400.551.240,00	87,82	1.387.839.580,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	69.599.220.763,00	65.799.396.633,00	94,54	102.152.506.285,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	78.195.858.337,00	75.265.208.901,00	96,25	34.758.067.305,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	129.636.032.000,00	124.921.560.732,00	96,36	126.620.498.535,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	11.483.919.000,00	11.456.196.032,00	99,76	7.382.688.159,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.235.728.000,00	409.940.801,00	33,17	1.295.204.500,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.235.728.000,00	409.940.801,00	33,17	1.295.204.500,00



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
5.4	BELANJA TRANSFER	677.473.383.000,00	676.974.543.619,00	99,93	632.491.265.300,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	13.792.758.000,00	13.743.166.881,00	99,64	12.402.615.800,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	663.680.625.000,00	663.231.376.738,00	99,93	620.088.649.500,00
	SURPLUS / DEFISIT	(236.946.522.000,00)	(76.120.405.108,00)	0	22.837.723.679,00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	283.277.522.000,00	283.142.890.877,98	99,95	271.279.627.198,98
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	258.826.262.000,00	258.817.350.877,98	100,00	269.179.627.198,98
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	22.351.260.000,00	22.225.540.000,00	99,44	0,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	100,00	2.100.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	46.331.000.000,00	42.331.000.000,00	91,37	35.300.000.000,00
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	100,00	15.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	24.231.000.000,00	20.231.000.000,00	83,49	18.200.000.000,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	100,00	2.100.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	236.946.522.000,00	240.811.890.877,98	101,63	235.979.627.198,98
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	164.691.485.769,98	0	258.817.350.877,98

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO





PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
 Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1.01 PENDIDIKAN

SKPD : 1-01.2-19.0-00.01 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	120.000.000,00	220.117.000,00	100.117.000,00	183,43		
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	120.000.000,00	220.117.000,00	100.117.000,00	183,43		
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	120.000.000,00	220.117.000,00	100.117.000,00	183,43		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	1.012.590.375.727,00	987.998.034.935,00	(24.592.340.792,00)	97,57		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	772.366.456.727,00	750.653.812.267,00	(21.712.644.460,00)	97,19		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	255.319.000,00	253.439.930,00	(1.879.070,00)	99,26		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	110.540.000,00	110.151.450,00	(388.550,00)	99,65		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	110.540.000,00	110.151.450,00	(388.550,00)	99,65		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.540.000,00	110.151.450,00	(388.550,00)	99,65		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	144.779.000,00	143.288.480,00	(1.490.520,00)	98,97		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	144.779.000,00	143.288.480,00	(1.490.520,00)	98,97		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	144.779.000,00	143.288.480,00	(1.490.520,00)	98,97		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	769.116.510.727,00	747.481.377.710,00	(21.635.133.017,00)	97,19		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	768.377.040.727,00	746.756.881.450,00	(21.620.159.277,00)	97,19		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	768.377.040.727,00	746.756.881.450,00	(21.620.159.277,00)	97,19		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	768.377.040.727,00	746.756.881.450,00	(21.620.159.277,00)	97,19		
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	739.470.000,00	724.496.260,00	(14.973.740,00)	97,98		
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	739.470.000,00	724.496.260,00	(14.973.740,00)	97,98		
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	439.960.000,00	428.260.000,00	(11.700.000,00)	97,34		
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	299.510.000,00	296.236.260,00	(3.273.740,00)	98,91		
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	40.000.000,00	39.897.650,00	(102.350,00)	99,74		
01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	40.000.000,00	39.897.650,00	(102.350,00)	99,74		
01.2.03.05.5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	39.897.650,00	(102.350,00)	99,74		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.03.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	39.897.650,00	(102.350,00)	99,74		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	602.622.000,00	601.172.605,00	(1.449.395,00)	99,76		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	120.000.000,00	118.683.850,00	(1.316.150,00)	98,90		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	120.000.000,00	118.683.850,00	(1.316.150,00)	98,90		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	118.683.850,00	(1.316.150,00)	98,90		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	160.023.000,00	159.991.918,00	(31.082,00)	99,98		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	160.023.000,00	159.991.918,00	(31.082,00)	99,98		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.023.000,00	159.991.918,00	(31.082,00)	99,98		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	35.000.000,00	34.975.000,00	(25.000,00)	99,93		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	34.975.000,00	(25.000,00)	99,93		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	34.975.000,00	(25.000,00)	99,93		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130.599.000,00	130.569.837,00	(29.163,00)	99,98		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	130.599.000,00	130.569.837,00	(29.163,00)	99,98		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.599.000,00	130.569.837,00	(29.163,00)	99,98		
01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7.000.000,00	6.952.000,00	(48.000,00)	99,31		
01.2.06.10.5.1	BELANJA OPERASI	7.000.000,00	6.952.000,00	(48.000,00)	99,31		
01.2.06.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	6.952.000,00	(48.000,00)	99,31		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	583.544.000,00	567.822.500,00	(15.721.500,00)	97,31		
01.2.07.05	Pengadaan Mebel	31.788.000,00	29.440.000,00	(2.348.000,00)	92,61		
01.2.07.05.5.2	BELANJA MODAL	31.788.000,00	29.440.000,00	(2.348.000,00)	92,61		
01.2.07.05.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.788.000,00	29.440.000,00	(2.348.000,00)	92,61		
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	526.756.000,00	513.665.000,00	(13.091.000,00)	97,51		
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	526.756.000,00	513.665.000,00	(13.091.000,00)	97,51		
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	56.856.000,00	52.760.000,00	(4.096.000,00)	92,80		
01.2.07.06.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	469.900.000,00	460.905.000,00	(8.995.000,00)	98,09		
01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000,00	24.717.500,00	(282.500,00)	98,87		
01.2.07.10.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	24.717.500,00	(282.500,00)	98,87		
01.2.07.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	24.717.500,00	(282.500,00)	98,87		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	965.481.000,00	947.956.924,00	(17.524.076,00)	98,18		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	530.530.000,00	514.372.974,00	(16.157.026,00)	96,95		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	530.530.000,00	514.372.974,00	(16.157.026,00)	96,95		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	530.530.000,00	514.372.974,00	(16.157.026,00)	96,95		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	399.951.000,00	398.583.950,00	(1.367.050,00)	99,66		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	399.951.000,00	398.583.950,00	(1.367.050,00)	99,66		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	399.951.000,00	398.583.950,00	(1.367.050,00)	99,66		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	802.980.000,00	762.144.948,00	(40.835.052,00)	94,91		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	162.980.000,00	159.345.868,00	(3.634.132,00)	97,77		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	162.980.000,00	159.345.868,00	(3.634.132,00)	97,77		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	162.980.000,00	159.345.868,00	(3.634.132,00)	97,77		
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	640.000.000,00	602.799.080,00	(37.200.920,00)	94,19		
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	640.000.000,00	602.799.080,00	(37.200.920,00)	94,19		
01.2.09.09.5.1.01	Belanja Pegawai	4.470.000,00	2.920.000,00	(1.550.000,00)	65,32		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	635.530.000,00	599.879.080,00	(35.650.920,00)	94,39		
02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	221.827.858.000,00	219.210.123.544,00	(2.617.734.456,00)	98,82		
02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	123.192.759.000,00	121.377.767.156,00	(1.814.991.844,00)	98,53		
02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	6.218.602.000,00	5.903.843.672,00	(314.758.328,00)	94,94		
02.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	41.123.000,00	35.639.700,00	(5.483.300,00)	86,67		
02.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.123.000,00	35.639.700,00	(5.483.300,00)	86,67		
02.2.01.06.5.2	BELANJA MODAL	6.177.479.000,00	5.868.203.972,00	(309.275.028,00)	94,99		
02.2.01.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	15.880.000,00	(4.120.000,00)	79,40		
02.2.01.06.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.157.479.000,00	5.852.323.972,00	(305.155.028,00)	95,04		
02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	8.675.361.000,00	8.152.662.071,00	(522.698.929,00)	93,97		
02.2.01.12.5.1	BELANJA OPERASI	326.404.000,00	313.558.343,00	(12.845.657,00)	96,06		
02.2.01.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.404.000,00	58.558.343,00	(12.845.657,00)	82,01		
02.2.01.12.5.1.05	Belanja Hibah	255.000.000,00	255.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.12.5.2	BELANJA MODAL	8.348.957.000,00	7.839.103.728,00	(509.853.272,00)	93,89		
02.2.01.12.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	8.348.957.000,00	7.839.103.728,00	(509.853.272,00)	93,89		
02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	20.000.000,00	17.030.000,00	(2.970.000,00)	85,15		
02.2.01.14.5.2	BELANJA MODAL	20.000.000,00	17.030.000,00	(2.970.000,00)	85,15		
02.2.01.14.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	17.030.000,00	(2.970.000,00)	85,15		
02.2.01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1.280.000.000,00	872.837.466,00	(407.162.534,00)	68,19		
02.2.01.16.5.1	BELANJA OPERASI	25.398.000,00	22.682.466,00	(2.715.534,00)	89,31		
02.2.01.16.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.398.000,00	22.682.466,00	(2.715.534,00)	89,31		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01.16.5.2	BELANJA MODAL	1.254.602.000,00	850.155.000,00	(404.447.000,00)	67,76		
02.2.01.16.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.254.602.000,00	850.155.000,00	(404.447.000,00)	67,76		
02.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	100.000.000,00	96.972.200,00	(3.027.800,00)	96,97		
02.2.01.19.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	96.972.200,00	(3.027.800,00)	96,97		
02.2.01.19.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	96.972.200,00	(3.027.800,00)	96,97		
02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	830.000.000,00	827.756.020,00	(2.243.980,00)	99,73		
02.2.01.21.5.1	BELANJA OPERASI	830.000.000,00	827.756.020,00	(2.243.980,00)	99,73		
02.2.01.21.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	27.756.020,00	(2.243.980,00)	92,52		
02.2.01.21.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	235.000.000,00	233.542.711,00	(1.457.289,00)	99,38		
02.2.01.23.5.1	BELANJA OPERASI	235.000.000,00	233.542.711,00	(1.457.289,00)	99,38		
02.2.01.23.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	235.000.000,00	233.542.711,00	(1.457.289,00)	99,38		
02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	139.940.000,00	132.649.280,00	(7.290.720,00)	94,79		
02.2.01.24.5.1	BELANJA OPERASI	139.940.000,00	132.649.280,00	(7.290.720,00)	94,79		
02.2.01.24.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.940.000,00	132.649.280,00	(7.290.720,00)	94,79		
02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	305.000.000,00	301.620.752,00	(3.379.248,00)	98,89		
02.2.01.25.5.1	BELANJA OPERASI	305.000.000,00	301.620.752,00	(3.379.248,00)	98,89		
02.2.01.25.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	305.000.000,00	301.620.752,00	(3.379.248,00)	98,89		
02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	7.453.975.000,00	7.288.794.410,00	(165.180.590,00)	97,78		
02.2.01.26.5.1	BELANJA OPERASI	7.453.975.000,00	7.288.794.410,00	(165.180.590,00)	97,78		
02.2.01.26.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.453.975.000,00	7.288.794.410,00	(165.180.590,00)	97,78		
02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	96.206.000,00	94.617.760,00	(1.588.240,00)	98,35		
02.2.01.27.5.1	BELANJA OPERASI	96.206.000,00	94.617.760,00	(1.588.240,00)	98,35		
02.2.01.27.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.206.000,00	94.617.760,00	(1.588.240,00)	98,35		
02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	183.175.000,00	173.607.932,00	(9.567.068,00)	94,78		
02.2.01.28.5.1	BELANJA OPERASI	183.175.000,00	173.607.932,00	(9.567.068,00)	94,78		
02.2.01.28.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	183.175.000,00	173.607.932,00	(9.567.068,00)	94,78		
02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	97.655.500.000,00	97.281.832.882,00	(373.667.118,00)	99,62		
02.2.01.29.5.1	BELANJA OPERASI	76.188.493.000,00	75.840.910.823,00	(347.582.177,00)	99,54		
02.2.01.29.5.1.01	Belanja Pegawai	11.491.420.000,00	11.489.695.600,00	(1.724.400,00)	99,98		
02.2.01.29.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.022.573.000,00	58.707.122.275,00	(315.450.725,00)	99,47		
02.2.01.29.5.1.05	Belanja Hibah	5.674.500.000,00	5.644.092.948,00	(30.407.052,00)	99,46		
02.2.01.29.5.2	BELANJA MODAL	21.467.007.000,00	21.440.922.059,00	(26.084.941,00)	99,88		
02.2.01.29.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.526.758.000,00	14.512.760.678,00	(13.997.322,00)	99,90		
02.2.01.29.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.940.249.000,00	6.928.161.381,00	(12.087.619,00)	99,83		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	60.913.321.000,00	60.333.756.376,00	(579.564.624,00)	99,05		
02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.259.091.000,00	3.166.788.699,00	(92.302.301,00)	97,17		
02.2.02.12.5.1	BELANJA OPERASI	166.181.000,00	134.403.167,00	(31.777.833,00)	80,88		
02.2.02.12.5.1.01	Belanja Pegawai	3.750.000,00	3.250.000,00	(500.000,00)	86,67		
02.2.02.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	162.431.000,00	131.153.167,00	(31.277.833,00)	80,74		
02.2.02.12.5.2	BELANJA MODAL	3.092.910.000,00	3.032.385.532,00	(60.524.468,00)	98,04		
02.2.02.12.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.098.227.000,00	2.094.861.000,00	(3.366.000,00)	99,84		
02.2.02.12.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	994.683.000,00	937.524.532,00	(57.158.468,00)	94,25		
02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.040.360.000,00	2.854.830.999,00	(185.529.001,00)	93,90		
02.2.02.24.5.1	BELANJA OPERASI	11.296.000,00	10.158.999,00	(1.137.001,00)	89,93		
02.2.02.24.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.296.000,00	10.158.999,00	(1.137.001,00)	89,93		
02.2.02.24.5.2	BELANJA MODAL	3.029.064.000,00	2.844.672.000,00	(184.392.000,00)	93,91		
02.2.02.24.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.029.064.000,00	2.844.672.000,00	(184.392.000,00)	93,91		
02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	758.798.000,00	758.776.750,00	(21.250,00)	100,00		
02.2.02.32.5.1	BELANJA OPERASI	758.798.000,00	758.776.750,00	(21.250,00)	100,00		
02.2.02.32.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.798.000,00	28.776.750,00	(21.250,00)	99,93		
02.2.02.32.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	730.000.000,00	730.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	203.530.000,00	202.063.753,00	(1.466.247,00)	99,28		
02.2.02.36.5.1	BELANJA OPERASI	203.530.000,00	202.063.753,00	(1.466.247,00)	99,28		
02.2.02.36.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	203.530.000,00	202.063.753,00	(1.466.247,00)	99,28		
02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	645.140.000,00	636.784.700,00	(8.355.300,00)	98,70		
02.2.02.37.5.1	BELANJA OPERASI	645.140.000,00	636.784.700,00	(8.355.300,00)	98,70		
02.2.02.37.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	645.140.000,00	636.784.700,00	(8.355.300,00)	98,70		
02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	184.431.000,00	183.924.130,00	(506.870,00)	99,73		
02.2.02.38.5.1	BELANJA OPERASI	184.431.000,00	183.924.130,00	(506.870,00)	99,73		
02.2.02.38.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	184.431.000,00	183.924.130,00	(506.870,00)	99,73		
02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2.383.480.000,00	2.363.749.466,00	(19.730.534,00)	99,17		
02.2.02.39.5.1	BELANJA OPERASI	2.383.480.000,00	2.363.749.466,00	(19.730.534,00)	99,17		
02.2.02.39.5.1.01	Belanja Pegawai	20.820.000,00	20.820.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.39.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.362.660.000,00	2.342.929.466,00	(19.730.534,00)	99,16		
02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	112.380.000,00	107.281.000,00	(5.099.000,00)	95,46		
02.2.02.40.5.1	BELANJA OPERASI	112.380.000,00	107.281.000,00	(5.099.000,00)	95,46		
02.2.02.40.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.380.000,00	107.281.000,00	(5.099.000,00)	95,46		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1.146.511.000,00	1.145.846.024,00	(664.976,00)	99,94		
02.2.02.41.5.1	BELANJA OPERASI	1.139.279.000,00	1.138.614.024,00	(664.976,00)	99,94		
02.2.02.41.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.139.279.000,00	1.138.614.024,00	(664.976,00)	99,94		
02.2.02.41.5.2	BELANJA MODAL	7.232.000,00	7.232.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.41.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.232.000,00	7.232.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	49.179.600.000,00	48.913.710.855,00	(265.889.145,00)	99,46		
02.2.02.42.5.1	BELANJA OPERASI	41.171.107.000,00	41.052.836.234,00	(118.270.766,00)	99,71		
02.2.02.42.5.1.01	Belanja Pegawai	3.899.700.000,00	3.899.700.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.42.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.627.563.000,00	26.534.628.834,00	(92.934.166,00)	99,65		
02.2.02.42.5.1.05	Belanja Hibah	10.643.844.000,00	10.618.507.400,00	(25.336.600,00)	99,76		
02.2.02.42.5.2	BELANJA MODAL	8.008.493.000,00	7.860.874.621,00	(147.618.379,00)	98,16		
02.2.02.42.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.062.739.000,00	3.915.875.350,00	(146.863.650,00)	96,39		
02.2.02.42.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.945.754.000,00	3.944.999.271,00	(754.729,00)	99,98		
02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	34.815.205.000,00	34.659.011.239,00	(156.193.761,00)	99,55		
02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.198.764.000,00	1.182.917.899,00	(15.846.101,00)	98,68		
02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.198.764.000,00	1.182.917.899,00	(15.846.101,00)	98,68		
02.2.03.02.5.1.01	Belanja Pegawai	6.650.000,00	6.502.500,00	(147.500,00)	97,78		
02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.314.000,00	144.278.399,00	(5.035.601,00)	96,63		
02.2.03.02.5.1.05	Belanja Hibah	1.042.800.000,00	1.032.137.000,00	(10.663.000,00)	98,98		
02.2.03.06	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	629.000.000,00	615.198.000,00	(13.802.000,00)	97,81		
02.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	456.500.000,00	448.253.000,00	(8.247.000,00)	98,19		
02.2.03.06.5.1.01	Belanja Pegawai	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	0		
02.2.03.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	27.253.000,00	(747.000,00)	97,33		
02.2.03.06.5.1.05	Belanja Hibah	421.000.000,00	421.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.03.06.5.2	BELANJA MODAL	172.500.000,00	166.945.000,00	(5.555.000,00)	96,78		
02.2.03.06.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	172.500.000,00	166.945.000,00	(5.555.000,00)	96,78		
02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	836.802.000,00	828.363.600,00	(8.438.400,00)	98,99		
02.2.03.12.5.1	BELANJA OPERASI	764.802.000,00	763.563.600,00	(1.238.400,00)	99,84		
02.2.03.12.5.1.01	Belanja Pegawai	1.770.000,00	540.000,00	(1.230.000,00)	30,51		
02.2.03.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.032.000,00	3.023.600,00	(8.400,00)	99,72		
02.2.03.12.5.1.05	Belanja Hibah	760.000.000,00	760.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.03.12.5.2	BELANJA MODAL	72.000.000,00	64.800.000,00	(7.200.000,00)	90,00		
02.2.03.12.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	72.000.000,00	64.800.000,00	(7.200.000,00)	90,00		
02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	229.857.000,00	225.927.376,00	(3.929.624,00)	98,29		
02.2.03.13.5.1	BELANJA OPERASI	229.857.000,00	225.927.376,00	(3.929.624,00)	98,29		
02.2.03.13.5.1.01	Belanja Pegawai	340.000,00	340.000,00	0,00	100,00		
02.2.03.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	229.517.000,00	225.587.376,00	(3.929.624,00)	98,29		
02.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	9.630.000,00	9.529.900,00	(100.100,00)	98,96		
02.2.03.14.5.1	BELANJA OPERASI	9.630.000,00	9.529.900,00	(100.100,00)	98,96		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.03.14.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.630.000,00	9.529.900,00	(100.100,00)	98,96		
02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	10.293.208.000,00	10.198.098.064,00	(95.109.936,00)	99,08		
02.2.03.16.5.1	BELANJA OPERASI	10.293.208.000,00	10.198.098.064,00	(95.109.936,00)	99,08		
02.2.03.16.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.121.608.000,00	10.026.498.064,00	(95.109.936,00)	99,06		
02.2.03.16.5.1.05	Belanja Hibah	171.600.000,00	171.600.000,00	0,00	100,00		
02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	178.744.000,00	177.268.400,00	(1.475.600,00)	99,17		
02.2.03.17.5.1	BELANJA OPERASI	178.744.000,00	177.268.400,00	(1.475.600,00)	99,17		
02.2.03.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	178.744.000,00	177.268.400,00	(1.475.600,00)	99,17		
02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	21.439.200.000,00	21.421.708.000,00	(17.492.000,00)	99,92		
02.2.03.18.5.1	BELANJA OPERASI	21.439.200.000,00	21.421.708.000,00	(17.492.000,00)	99,92		
02.2.03.18.5.1.05	Belanja Hibah	21.439.200.000,00	21.421.708.000,00	(17.492.000,00)	99,92		
02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	2.906.573.000,00	2.839.588.773,00	(66.984.227,00)	97,70		
02.2.04.05	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	6.500.000,00	6.498.200,00	(1.800,00)	99,97		
02.2.04.05.5.1	BELANJA OPERASI	6.500.000,00	6.498.200,00	(1.800,00)	99,97		
02.2.04.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	6.498.200,00	(1.800,00)	99,97		
02.2.04.10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan	91.286.000,00	90.259.700,00	(1.026.300,00)	98,88		
02.2.04.10.5.1	BELANJA OPERASI	91.286.000,00	90.259.700,00	(1.026.300,00)	98,88		
02.2.04.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.996.000,00	72.558.200,00	(437.800,00)	99,40		
02.2.04.10.5.1.05	Belanja Hibah	18.290.000,00	17.701.500,00	(588.500,00)	96,78		
02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal/Kesetaraan	89.404.000,00	89.044.230,00	(359.770,00)	99,60		
02.2.04.12.5.1	BELANJA OPERASI	89.404.000,00	89.044.230,00	(359.770,00)	99,60		
02.2.04.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.404.000,00	89.044.230,00	(359.770,00)	99,60		
02.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	200.025.000,00	193.589.972,00	(6.435.028,00)	96,78		
02.2.04.13.5.1	BELANJA OPERASI	200.025.000,00	193.589.972,00	(6.435.028,00)	96,78		
02.2.04.13.5.1.01	Belanja Pegawai	5.880.000,00	0,00	(5.880.000,00)	0		
02.2.04.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	170.590.000,00	170.145.472,00	(444.528,00)	99,74		
02.2.04.13.5.1.05	Belanja Hibah	23.555.000,00	23.444.500,00	(110.500,00)	99,53		
02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan	165.858.000,00	165.485.671,00	(372.329,00)	99,78		
02.2.04.16.5.1	BELANJA OPERASI	165.858.000,00	165.485.671,00	(372.329,00)	99,78		
02.2.04.16.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	165.858.000,00	165.485.671,00	(372.329,00)	99,78		
02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	2.353.500.000,00	2.294.711.000,00	(58.789.000,00)	97,50		
02.2.04.17.5.1	BELANJA OPERASI	2.353.500.000,00	2.294.711.000,00	(58.789.000,00)	97,50		
02.2.04.17.5.1.05	Belanja Hibah	2.353.500.000,00	2.294.711.000,00	(58.789.000,00)	97,50		
02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	553.801.000,00	552.678.670,00	(1.122.330,00)	99,80		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	553.801.000,00	552.678.670,00	(1.122.330,00)	99,80		
02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	553.801.000,00	552.678.670,00	(1.122.330,00)	99,80		
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	553.801.000,00	552.678.670,00	(1.122.330,00)	99,80		
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	553.801.000,00	552.678.670,00	(1.122.330,00)	99,80		
03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	17.236.330.000,00	16.977.177.744,00	(259.152.256,00)	98,50		
03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	13.968.431.000,00	13.727.765.720,00	(240.665.280,00)	98,28		
03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	13.968.431.000,00	13.727.765.720,00	(240.665.280,00)	98,28		
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	13.963.141.000,00	13.722.475.720,00	(240.665.280,00)	98,28		
03.2.01.03.5.1.01	Belanja Pegawai	4.580.000,00	4.580.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.267.511.000,00	13.075.180.720,00	(192.330.280,00)	98,55		
03.2.01.03.5.1.05	Belanja Hibah	691.050.000,00	642.715.000,00	(48.335.000,00)	93,01		
03.2.01.03.5.2	BELANJA MODAL	5.290.000,00	5.290.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.03.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.290.000,00	5.290.000,00	0,00	100,00		
03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	678.958.000,00	678.516.170,00	(441.830,00)	99,93		
03.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	678.958.000,00	678.516.170,00	(441.830,00)	99,93		
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	678.958.000,00	678.516.170,00	(441.830,00)	99,93		
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	678.958.000,00	678.516.170,00	(441.830,00)	99,93		
03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	538.941.000,00	531.952.584,00	(6.988.416,00)	98,70		
03.2.03.02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	120.323.000,00	116.211.750,00	(4.111.250,00)	96,58		
03.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	120.323.000,00	116.211.750,00	(4.111.250,00)	96,58		
03.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.323.000,00	116.211.750,00	(4.111.250,00)	96,58		
03.2.03.04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	418.618.000,00	415.740.834,00	(2.877.166,00)	99,31		
03.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	418.618.000,00	415.740.834,00	(2.877.166,00)	99,31		
03.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	418.618.000,00	415.740.834,00	(2.877.166,00)	99,31		
03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	2.050.000.000,00	2.038.943.270,00	(11.056.730,00)	99,46		
03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	2.050.000.000,00	2.038.943.270,00	(11.056.730,00)	99,46		
03.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	2.050.000.000,00	2.038.943.270,00	(11.056.730,00)	99,46		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.04.02.5.1.05	Belanja Hibah	2.050.000.000,00	2.038.943.270,00	(11.056.730,00)	99,46		
04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	605.930.000,00	604.242.710,00	(1.687.290,00)	99,72		
04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	605.930.000,00	604.242.710,00	(1.687.290,00)	99,72		
04.2.01.08	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	605.930.000,00	604.242.710,00	(1.687.290,00)	99,72		
04.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	605.930.000,00	604.242.710,00	(1.687.290,00)	99,72		
04.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	605.930.000,00	604.242.710,00	(1.687.290,00)	99,72		
	SURPLUS / DEFISIT	(1.012.470.375.727,00)	(987.777.917.935,00)	24.692.457.792,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(1.012.470.375.727,00)	(987.777.917.935,00)	24.692.457.792,00	0		





PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 KESEHATAN

SKPD : 1-02.2-14.0-00.01 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	233.679.122.000,00	267.226.694.588,00	33.547.572.588,00	114,36		
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	233.679.122.000,00	267.226.694.588,00	33.547.572.588,00	114,36		
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	725.000.000,00	795.516.300,00	70.516.300,00	109,73		
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	232.954.122.000,00	266.431.178.288,00	33.477.056.288,00	114,37		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	584.644.611.272,00	560.651.430.901,00	(23.993.180.371,00)	95,90		
00	Non Program	0,00	0,00	0,00	0		
00.0.00	Non Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0		
00.0.00.00	Non Sub Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0		
00.0.00.00.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0		
00.0.00.00.5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	6.680.000,00	6.680.000,00	0		
00.0.00.00.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	-6.680.000,00	(6.680.000,00)	0		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	430.705.523.272,00	412.745.486.271,00	(17.960.037.001,00)	95,83		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75.000.000,00	74.743.500,00	(256.500,00)	99,66		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000,00	49.883.000,00	(117.000,00)	99,77		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	49.883.000,00	(117.000,00)	99,77		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.883.000,00	(117.000,00)	99,77		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.000.000,00	24.860.500,00	(139.500,00)	99,44		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	24.860.500,00	(139.500,00)	99,44		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	24.860.500,00	(139.500,00)	99,44		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	131.389.973.272,00	129.432.176.590,00	(1.957.796.682,00)	98,51		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	130.990.082.272,00	129.049.286.175,00	(1.940.796.097,00)	98,52		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	130.990.082.272,00	129.049.286.175,00	(1.940.796.097,00)	98,52		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	130.990.082.272,00	129.049.286.175,00	(1.940.796.097,00)	98,52		
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	399.891.000,00	382.890.415,00	(17.000.585,00)	95,75		
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	399.891.000,00	382.890.415,00	(17.000.585,00)	95,75		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	70.325.000,00	67.580.000,00	(2.745.000,00)	96,10		
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	329.566.000,00	315.310.415,00	(14.255.585,00)	95,67		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	45.000.000,00	44.975.000,00	(25.000,00)	99,94		
01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	45.000.000,00	44.975.000,00	(25.000,00)	99,94		
01.2.05.09.5.1	BELANJA OPERASI	45.000.000,00	44.975.000,00	(25.000,00)	99,94		
01.2.05.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	44.975.000,00	(25.000,00)	99,94		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	286.100.000,00	285.967.279,00	(132.721,00)	99,95		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35.000.000,00	34.970.600,00	(29.400,00)	99,92		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	34.970.600,00	(29.400,00)	99,92		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	34.970.600,00	(29.400,00)	99,92		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	57.500.000,00	57.500.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	57.500.000,00	57.500.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.500.000,00	57.500.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.000.000,00	49.952.460,00	(47.540,00)	99,90		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	49.952.460,00	(47.540,00)	99,90		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.952.460,00	(47.540,00)	99,90		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.600.000,00	1.585.000,00	(15.000,00)	99,06		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	1.600.000,00	1.585.000,00	(15.000,00)	99,06		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	1.585.000,00	(15.000,00)	99,06		
01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	80.000.000,00	79.964.500,00	(35.500,00)	99,96		
01.2.06.07.5.1	BELANJA OPERASI	80.000.000,00	79.964.500,00	(35.500,00)	99,96		
01.2.06.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	79.964.500,00	(35.500,00)	99,96		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.000.000,00	59.994.719,00	(5.281,00)	99,99		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	59.994.719,00	(5.281,00)	99,99		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	59.994.719,00	(5.281,00)	99,99		
01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.10.5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	290.000.000,00	285.783.000,00	(4.217.000,00)	98,55		
01.2.07.05	Pengadaan Mebel	50.000.000,00	49.980.000,00	(20.000,00)	99,96		
01.2.07.05.5.2	BELANJA MODAL	50.000.000,00	49.980.000,00	(20.000,00)	99,96		
01.2.07.05.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.000.000,00	49.980.000,00	(20.000,00)	99,96		
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	240.000.000,00	235.803.000,00	(4.197.000,00)	98,25		
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	240.000.000,00	235.803.000,00	(4.197.000,00)	98,25		
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	240.000.000,00	235.803.000,00	(4.197.000,00)	98,25		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	621.360.000,00	518.023.708,00	(103.336.292,00)	83,37		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00	2.447.500,00	(52.500,00)	97,90		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.447.500,00	(52.500,00)	97,90		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.447.500,00	(52.500,00)	97,90		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	487.660.000,00	384.634.208,00	(103.025.792,00)	78,87		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	487.660.000,00	384.634.208,00	(103.025.792,00)	78,87		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	487.660.000,00	384.634.208,00	(103.025.792,00)	78,87		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	131.200.000,00	130.942.000,00	(258.000,00)	99,80		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	131.200.000,00	130.942.000,00	(258.000,00)	99,80		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	131.200.000,00	130.942.000,00	(258.000,00)	99,80		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	490.000.000,00	487.472.495,00	(2.527.505,00)	99,48		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	200.000.000,00	198.036.495,00	(1.963.505,00)	99,02		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	198.036.495,00	(1.963.505,00)	99,02		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	198.036.495,00	(1.963.505,00)	99,02		
01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	10.000.000,00	9.950.000,00	(50.000,00)	99,50		
01.2.09.05.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.950.000,00	(50.000,00)	99,50		
01.2.09.05.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.950.000,00	(50.000,00)	99,50		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000,00	99.888.500,00	(111.500,00)	99,89		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	99.888.500,00	(111.500,00)	99,89		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	99.888.500,00	(111.500,00)	99,89		
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	180.000.000,00	179.597.500,00	(402.500,00)	99,78		
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	180.000.000,00	179.597.500,00	(402.500,00)	99,78		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.000.000,00	179.597.500,00	(402.500,00)	99,78		
01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	297.508.090.000,00	281.616.344.699,00	(15.891.745.301,00)	94,66		
01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	297.508.090.000,00	281.616.344.699,00	(15.891.745.301,00)	94,66		
01.2.10.01.5.1	BELANJA OPERASI	280.493.176.000,00	266.463.472.829,00	(14.029.703.171,00)	95,00		
01.2.10.01.5.1.01	Belanja Pegawai	605.873.000,00	572.914.000,00	(32.959.000,00)	94,56		
01.2.10.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	279.887.303.000,00	265.890.558.829,00	(13.996.744.171,00)	95,00		
01.2.10.01.5.2	BELANJA MODAL	17.014.914.000,00	15.152.871.870,00	(1.862.042.130,00)	89,06		
01.2.10.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.491.581.000,00	14.660.891.870,00	(1.830.689.130,00)	88,90		
01.2.10.01.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	440.010.000,00	413.512.000,00	(26.498.000,00)	93,98		
01.2.10.01.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	80.823.000,00	78.468.000,00	(2.355.000,00)	97,09		
01.2.10.01.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	0		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	128.128.059.000,00	123.152.323.558,00	(4.975.735.442,00)	96,12		
02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	46.349.848.000,00	44.573.349.046,00	(1.776.498.954,00)	96,17		
02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	41.760.000,00	41.687.634,00	(72.366,00)	99,83		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	41.760.000,00	41.687.634,00	(72.366,00)	99,83		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.760.000,00	41.687.634,00	(72.366,00)	99,83		
02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	7.461.000.000,00	7.216.464.269,00	(244.535.731,00)	96,72		
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	15.050.000,00	15.049.000,00	(1.000,00)	99,99		
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.050.000,00	15.049.000,00	(1.000,00)	99,99		
02.2.01.03.5.2	BELANJA MODAL	7.445.950.000,00	7.201.415.269,00	(244.534.731,00)	96,72		
02.2.01.03.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.445.950.000,00	7.201.415.269,00	(244.534.731,00)	96,72		
02.2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit	11.500.000.000,00	10.655.238.887,00	(844.761.113,00)	92,65		
02.2.01.05.2	BELANJA MODAL	11.500.000.000,00	10.655.238.887,00	(844.761.113,00)	92,65		
02.2.01.05.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.597.820.663,00	6.025.460.387,00	(572.360.276,00)	91,33		
02.2.01.05.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.902.179.337,00	4.629.778.500,00	(272.400.837,00)	94,44		
02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	6.700.908.000,00	6.443.263.916,00	(257.644.084,00)	96,16		
02.2.01.09.5.2	BELANJA MODAL	6.700.908.000,00	6.443.263.916,00	(257.644.084,00)	96,16		
02.2.01.09.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.700.908.000,00	6.443.263.916,00	(257.644.084,00)	96,16		
02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	500.180.000,00	487.347.480,00	(12.832.520,00)	97,43		
02.2.01.12.5.2	BELANJA MODAL	500.180.000,00	487.347.480,00	(12.832.520,00)	97,43		
02.2.01.12.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	500.180.000,00	487.347.480,00	(12.832.520,00)	97,43		
02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	5.783.134.000,00	5.732.380.783,00	(50.753.217,00)	99,12		
02.2.01.13.5.2	BELANJA MODAL	5.783.134.000,00	5.732.380.783,00	(50.753.217,00)	99,12		
02.2.01.13.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.869.400.000,00	3.837.446.150,00	(31.953.850,00)	99,17		
02.2.01.13.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.913.734.000,00	1.894.934.633,00	(18.799.367,00)	99,02		
02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	4.473.431.000,00	4.110.744.548,00	(362.686.452,00)	91,89		
02.2.01.14.5.2	BELANJA MODAL	4.473.431.000,00	4.110.744.548,00	(362.686.452,00)	91,89		
02.2.01.14.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.473.431.000,00	4.110.744.548,00	(362.686.452,00)	91,89		
02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	2.735.715.000,00	2.735.237.186,00	(477.814,00)	99,98		
02.2.01.16.5.1	BELANJA OPERASI	2.735.715.000,00	2.735.237.186,00	(477.814,00)	99,98		
02.2.01.16.5.1.01	Belanja Pegawai	14.188.000,00	14.187.500,00	(500,00)	100,00		
02.2.01.16.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.721.527.000,00	2.721.049.686,00	(477.314,00)	99,98		
02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	7.153.720.000,00	7.150.984.343,00	(2.735.657,00)	99,96		
02.2.01.17.5.1	BELANJA OPERASI	7.153.720.000,00	7.150.984.343,00	(2.735.657,00)	99,96		
02.2.01.17.5.1.01	Belanja Pegawai	20.275.000,00	20.275.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.133.445.000,00	7.130.709.343,00	(2.735.657,00)	99,96		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	81.567.411.000,00	78.371.100.699,00	(3.196.310.301,00)	96,08		
02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	3.368.541.000,00	3.268.202.803,00	(100.338.197,00)	97,02		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.368.541.000,00	3.268.202.803,00	(100.338.197,00)	97,02		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.368.541.000,00	3.268.202.803,00	(100.338.197,00)	97,02		
02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	88.000.000,00	87.894.200,00	(105.800,00)	99,88		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	88.000.000,00	87.894.200,00	(105.800,00)	99,88		
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.000.000,00	87.894.200,00	(105.800,00)	99,88		
02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	35.000.000,00	34.692.900,00	(307.100,00)	99,12		
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	34.692.900,00	(307.100,00)	99,12		
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	34.692.900,00	(307.100,00)	99,12		
02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	1.819.869.000,00	1.761.339.800,00	(58.529.200,00)	96,78		
02.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	1.819.869.000,00	1.761.339.800,00	(58.529.200,00)	96,78		
02.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.819.869.000,00	1.761.339.800,00	(58.529.200,00)	96,78		
02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	531.560.000,00	423.695.700,00	(107.864.300,00)	79,71		
02.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	531.560.000,00	423.695.700,00	(107.864.300,00)	79,71		
02.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	531.560.000,00	423.695.700,00	(107.864.300,00)	79,71		
02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	1.635.481.000,00	1.624.080.700,00	(11.400.300,00)	99,30		
02.2.02.06.5.1	BELANJA OPERASI	1.635.481.000,00	1.624.080.700,00	(11.400.300,00)	99,30		
02.2.02.06.5.1.01	Belanja Pegawai	2.105.000,00	2.105.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.633.376.000,00	1.621.975.700,00	(11.400.300,00)	99,30		
02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	778.940.000,00	747.422.864,00	(31.517.136,00)	95,95		
02.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	778.940.000,00	747.422.864,00	(31.517.136,00)	95,95		
02.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	778.940.000,00	747.422.864,00	(31.517.136,00)	95,95		
02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	40.000.000,00	39.972.300,00	(27.700,00)	99,93		
02.2.02.08.5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	39.972.300,00	(27.700,00)	99,93		
02.2.02.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	39.972.300,00	(27.700,00)	99,93		
02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	45.000.000,00	44.974.000,00	(26.000,00)	99,94		
02.2.02.09.5.1	BELANJA OPERASI	45.000.000,00	44.974.000,00	(26.000,00)	99,94		
02.2.02.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	44.974.000,00	(26.000,00)	99,94		
02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	279.480.000,00	264.518.223,00	(14.961.777,00)	94,65		
02.2.02.10.5.1	BELANJA OPERASI	279.480.000,00	264.518.223,00	(14.961.777,00)	94,65		
02.2.02.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	279.480.000,00	264.518.223,00	(14.961.777,00)	94,65		
02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	448.279.000,00	420.684.300,00	(27.594.700,00)	93,84		
02.2.02.11.5.1	BELANJA OPERASI	448.279.000,00	420.684.300,00	(27.594.700,00)	93,84		
02.2.02.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	448.279.000,00	420.684.300,00	(27.594.700,00)	93,84		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	513.390.000,00	501.810.508,00	(11.579.492,00)	97,74		
02.2.02.12.5.1	BELANJA OPERASI	513.390.000,00	501.810.508,00	(11.579.492,00)	97,74		
02.2.02.12.5.1.01	Belanja Pegawai	338.000,00	337.500,00	(500,00)	99,85		
02.2.02.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	513.052.000,00	501.473.008,00	(11.578.992,00)	97,74		
02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	64.079.000,00	57.998.650,00	(6.080.350,00)	90,51		
02.2.02.13.5.1	BELANJA OPERASI	64.079.000,00	57.998.650,00	(6.080.350,00)	90,51		
02.2.02.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.079.000,00	57.998.650,00	(6.080.350,00)	90,51		
02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	20.000.000,00	19.454.300,00	(545.700,00)	97,27		
02.2.02.14.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	19.454.300,00	(545.700,00)	97,27		
02.2.02.14.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.454.300,00	(545.700,00)	97,27		
02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	21.998.574.000,00	20.594.725.353,00	(1.403.848.647,00)	93,62		
02.2.02.15.5.1	BELANJA OPERASI	21.998.574.000,00	20.594.725.353,00	(1.403.848.647,00)	93,62		
02.2.02.15.5.1.01	Belanja Pegawai	4.820.000,00	3.637.500,00	(1.182.500,00)	75,47		
02.2.02.15.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.993.754.000,00	20.591.087.853,00	(1.402.666.147,00)	93,62		
02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	435.377.000,00	426.467.300,00	(8.909.700,00)	97,95		
02.2.02.16.5.1	BELANJA OPERASI	435.377.000,00	426.467.300,00	(8.909.700,00)	97,95		
02.2.02.16.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	435.377.000,00	426.467.300,00	(8.909.700,00)	97,95		
02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	792.352.000,00	745.716.643,00	(46.635.357,00)	94,11		
02.2.02.17.5.1	BELANJA OPERASI	792.352.000,00	745.716.643,00	(46.635.357,00)	94,11		
02.2.02.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	636.015.000,00	589.380.493,00	(46.634.507,00)	92,67		
02.2.02.17.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	156.337.000,00	156.336.150,00	(850,00)	100,00		
02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2.717.290.000,00	2.668.444.580,00	(48.845.420,00)	98,20		
02.2.02.18.5.1	BELANJA OPERASI	2.717.290.000,00	2.668.444.580,00	(48.845.420,00)	98,20		
02.2.02.18.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.717.290.000,00	2.668.444.580,00	(48.845.420,00)	98,20		
02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	20.000.000,00	19.678.748,00	(321.252,00)	98,39		
02.2.02.19.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	19.678.748,00	(321.252,00)	98,39		
02.2.02.19.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.678.748,00	(321.252,00)	98,39		
02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	322.780.000,00	261.439.331,00	(61.340.669,00)	81,00		
02.2.02.20.5.1	BELANJA OPERASI	322.780.000,00	261.439.331,00	(61.340.669,00)	81,00		
02.2.02.20.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	322.780.000,00	261.439.331,00	(61.340.669,00)	81,00		
02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	73.265.000,00	71.481.724,00	(1.783.276,00)	97,57		
02.2.02.21.5.1	BELANJA OPERASI	73.265.000,00	71.481.724,00	(1.783.276,00)	97,57		
02.2.02.21.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.265.000,00	71.481.724,00	(1.783.276,00)	97,57		
02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	152.200.000,00	151.928.800,00	(271.200,00)	99,82		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02.23.5.1	BELANJA OPERASI	152.200.000,00	151.928.800,00	(271.200,00)	99,82		
02.2.02.23.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	152.200.000,00	151.928.800,00	(271.200,00)	99,82		
02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	5.122.148.000,00	4.709.514.033,00	(412.633.967,00)	91,94		
02.2.02.25.5.1	BELANJA OPERASI	5.122.148.000,00	4.709.514.033,00	(412.633.967,00)	91,94		
02.2.02.25.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.122.148.000,00	4.709.514.033,00	(412.633.967,00)	91,94		
02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	34.967.431.000,00	34.323.133.657,00	(644.297.343,00)	98,16		
02.2.02.26.5.1	BELANJA OPERASI	34.967.431.000,00	34.323.133.657,00	(644.297.343,00)	98,16		
02.2.02.26.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.967.431.000,00	34.323.133.657,00	(644.297.343,00)	98,16		
02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	28.000.000,00	27.956.000,00	(44.000,00)	99,84		
02.2.02.29.5.1	BELANJA OPERASI	28.000.000,00	27.956.000,00	(44.000,00)	99,84		
02.2.02.29.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	27.956.000,00	(44.000,00)	99,84		
02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	4.930.545.000,00	4.754.164.465,00	(176.380.535,00)	96,42		
02.2.02.33.5.1	BELANJA OPERASI	4.930.545.000,00	4.754.164.465,00	(176.380.535,00)	96,42		
02.2.02.33.5.1.01	Belanja Pegawai	4.266.761.000,00	4.098.442.665,00	(168.318.335,00)	96,06		
02.2.02.33.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	663.784.000,00	655.721.800,00	(8.062.200,00)	98,79		
02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	71.895.000,00	71.811.263,00	(83.737,00)	99,88		
02.2.02.35.5.1	BELANJA OPERASI	71.895.000,00	71.811.263,00	(83.737,00)	99,88		
02.2.02.35.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.895.000,00	71.811.263,00	(83.737,00)	99,88		
02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	70.000.000,00	69.997.900,00	(2.100,00)	100,00		
02.2.02.36.5.1	BELANJA OPERASI	70.000.000,00	69.997.900,00	(2.100,00)	100,00		
02.2.02.36.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	69.997.900,00	(2.100,00)	100,00		
02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	104.000.000,00	93.674.154,00	(10.325.846,00)	90,07		
02.2.02.40.5.1	BELANJA OPERASI	104.000.000,00	93.674.154,00	(10.325.846,00)	90,07		
02.2.02.40.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.000.000,00	93.674.154,00	(10.325.846,00)	90,07		
02.2.02.41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	30.000.000,00	29.990.500,00	(9.500,00)	99,97		
02.2.02.41.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	29.990.500,00	(9.500,00)	99,97		
02.2.02.41.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	29.990.500,00	(9.500,00)	99,97		
02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	63.935.000,00	54.235.000,00	(9.700.000,00)	84,83		
02.2.02.42.5.1	BELANJA OPERASI	63.935.000,00	54.235.000,00	(9.700.000,00)	84,83		
02.2.02.42.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.935.000,00	54.235.000,00	(9.700.000,00)	84,83		
02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	30.000.000,00	29.369.202,00	(630.798,00)	97,90		
02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	30.000.000,00	29.369.202,00	(630.798,00)	97,90		
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	29.369.202,00	(630.798,00)	97,90		
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	29.369.202,00	(630.798,00)	97,90		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	180.800.000,00	178.504.611,00	(2.295.389,00)	98,73		
02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	180.800.000,00	178.504.611,00	(2.295.389,00)	98,73		
02.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	180.800.000,00	178.504.611,00	(2.295.389,00)	98,73		
02.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.800.000,00	178.504.611,00	(2.295.389,00)	98,73		
02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	715.390.000,00	660.651.702,00	(54.738.298,00)	92,35		
02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	60.000.000,00	59.941.559,00	(58.441,00)	99,90		
02.2.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	30.000.000,00	29.957.659,00	(42.341,00)	99,86		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	29.957.659,00	(42.341,00)	99,86		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	29.957.659,00	(42.341,00)	99,86		
02.2.01.10	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal	30.000.000,00	29.983.900,00	(16.100,00)	99,95		
02.2.01.10.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	29.983.900,00	(16.100,00)	99,95		
02.2.01.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	29.983.900,00	(16.100,00)	99,95		
02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	655.390.000,00	600.710.143,00	(54.679.857,00)	91,66		
02.2.02.03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	63.190.000,00	62.115.791,00	(1.074.209,00)	98,30		
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	63.190.000,00	62.115.791,00	(1.074.209,00)	98,30		
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.190.000,00	62.115.791,00	(1.074.209,00)	98,30		
02.2.02.05	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	30.000.000,00	29.993.606,00	(6.394,00)	99,98		
02.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	29.993.606,00	(6.394,00)	99,98		
02.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	29.993.606,00	(6.394,00)	99,98		
02.2.02.09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	64.200.000,00	63.760.600,00	(439.400,00)	99,32		
02.2.02.09.5.1	BELANJA OPERASI	64.200.000,00	63.760.600,00	(439.400,00)	99,32		
02.2.02.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.200.000,00	63.760.600,00	(439.400,00)	99,32		
02.2.02.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	342.000.000,00	342.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.12.5.1	BELANJA OPERASI	342.000.000,00	342.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	342.000.000,00	342.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	156.000.000,00	102.840.146,00	(53.159.854,00)	65,92		
02.2.02.13.5.1	BELANJA OPERASI	156.000.000,00	102.840.146,00	(53.159.854,00)	65,92		
02.2.02.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	156.000.000,00	102.840.146,00	(53.159.854,00)	65,92		
03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	3.402.385.000,00	3.313.798.383,00	(88.586.617,00)	97,40		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	40.000.000,00	39.829.366,00	(170.634,00)	99,57		
03.2.02.01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	40.000.000,00	39.829.366,00	(170.634,00)	99,57		
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	39.829.366,00	(170.634,00)	99,57		
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	39.829.366,00	(170.634,00)	99,57		
03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.362.385.000,00	3.273.969.017,00	(88.415.983,00)	97,37		
03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.362.385.000,00	3.273.969.017,00	(88.415.983,00)	97,37		
03.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.362.385.000,00	3.273.969.017,00	(88.415.983,00)	97,37		
03.2.03.01.5.1.01	Belanja Pegawai	7.080.000,00	0,00	(7.080.000,00)	0		
03.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.355.305.000,00	3.273.969.017,00	(81.335.983,00)	97,58		
03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	10.907.193.000,00	10.264.431.187,00	(642.761.813,00)	94,11		
03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.494.300.000,00	1.346.952.472,00	(147.347.528,00)	90,14		
03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	210.000.000,00	129.089.200,00	(80.910.800,00)	61,47		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	210.000.000,00	129.089.200,00	(80.910.800,00)	61,47		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	210.000.000,00	129.089.200,00	(80.910.800,00)	61,47		
03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	174.000.000,00	162.114.200,00	(11.885.800,00)	93,17		
03.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	174.000.000,00	162.114.200,00	(11.885.800,00)	93,17		
03.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	174.000.000,00	162.114.200,00	(11.885.800,00)	93,17		
03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	340.000.000,00	333.919.800,00	(6.080.200,00)	98,21		
03.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	340.000.000,00	333.919.800,00	(6.080.200,00)	98,21		
03.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	340.000.000,00	333.919.800,00	(6.080.200,00)	98,21		
03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	690.300.000,00	671.888.272,00	(18.411.728,00)	97,33		
03.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	690.300.000,00	671.888.272,00	(18.411.728,00)	97,33		
03.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	690.300.000,00	671.888.272,00	(18.411.728,00)	97,33		
03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	80.000.000,00	49.941.000,00	(30.059.000,00)	62,43		
03.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	80.000.000,00	49.941.000,00	(30.059.000,00)	62,43		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	49.941.000,00	(30.059.000,00)	62,43		
03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	2.688.637.000,00	2.681.643.358,00	(6.993.642,00)	99,74		
03.2.02.01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	636.000.000,00	636.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	636.000.000,00	636.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	636.000.000,00	636.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	2.052.637.000,00	2.045.643.358,00	(6.993.642,00)	99,66		
03.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	2.052.637.000,00	2.045.643.358,00	(6.993.642,00)	99,66		
03.2.02.04.5.1.01	Belanja Pegawai	2.410.000,00	3.820.000,00	1.410.000,00	158,51		
03.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.050.227.000,00	2.041.823.358,00	(8.403.642,00)	99,59		
03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	5.464.648.000,00	4.976.639.807,00	(488.008.193,00)	91,07		
03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	51.300.000,00	43.278.950,00	(8.021.050,00)	84,36		
03.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	51.300.000,00	43.278.950,00	(8.021.050,00)	84,36		
03.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.300.000,00	43.278.950,00	(8.021.050,00)	84,36		
03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	3.340.609.000,00	2.931.748.900,00	(408.860.100,00)	87,76		
03.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	3.321.559.000,00	2.913.333.900,00	(408.225.100,00)	87,71		
03.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.321.559.000,00	2.913.333.900,00	(408.225.100,00)	87,71		
03.2.03.03.5.2	BELANJA MODAL	19.050.000,00	18.415.000,00	(635.000,00)	96,67		
03.2.03.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.050.000,00	18.415.000,00	(635.000,00)	96,67		
03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	2.024.839.000,00	1.953.904.907,00	(70.934.093,00)	96,50		
03.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	45.560.000,00	28.448.492,00	(17.111.508,00)	62,44		
03.2.03.06.5.1.01	Belanja Pegawai	453.000,00	0,00	(453.000,00)	0		
03.2.03.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.107.000,00	28.448.492,00	(16.658.508,00)	63,07		
03.2.03.06.5.2	BELANJA MODAL	1.979.279.000,00	1.925.456.415,00	(53.822.585,00)	97,28		
03.2.03.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	415.229.000,00	406.840.000,00	(8.389.000,00)	97,98		
03.2.03.06.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.564.050.000,00	1.518.616.415,00	(45.433.585,00)	97,10		
03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	27.900.000,00	27.759.000,00	(141.000,00)	99,49		
03.2.03.08.5.1	BELANJA OPERASI	27.900.000,00	27.759.000,00	(141.000,00)	99,49		
03.2.03.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.900.000,00	27.759.000,00	(141.000,00)	99,49		
03.2.03.09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	20.000.000,00	19.948.050,00	(51.950,00)	99,74		
03.2.03.09.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	19.948.050,00	(51.950,00)	99,74		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.03.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.948.050,00	(51.950,00)	99,74		
03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	1.259.608.000,00	1.259.195.550,00	(412.450,00)	99,97		
03.2.04.02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	9.000.000,00	8.892.000,00	(108.000,00)	98,80		
03.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	9.000.000,00	8.892.000,00	(108.000,00)	98,80		
03.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	8.892.000,00	(108.000,00)	98,80		
03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	1.250.608.000,00	1.250.303.550,00	(304.450,00)	99,98		
03.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.250.608.000,00	1.250.303.550,00	(304.450,00)	99,98		
03.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.250.608.000,00	1.250.303.550,00	(304.450,00)	99,98		
04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	548.172.000,00	547.419.504,00	(752.496,00)	99,86		
04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	83.730.000,00	83.611.677,00	(118.323,00)	99,86		
04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	83.730.000,00	83.611.677,00	(118.323,00)	99,86		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	83.730.000,00	83.611.677,00	(118.323,00)	99,86		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.730.000,00	83.611.677,00	(118.323,00)	99,86		
04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	464.442.000,00	463.807.827,00	(634.173,00)	99,86		
04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	464.442.000,00	463.807.827,00	(634.173,00)	99,86		
04.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	464.442.000,00	463.807.827,00	(634.173,00)	99,86		
04.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	464.442.000,00	463.807.827,00	(634.173,00)	99,86		
04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	7.066.108.000,00	6.903.004.998,00	(163.103.002,00)	97,69		
04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	7.036.108.000,00	6.873.267.198,00	(162.840.802,00)	97,69		
04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Uppks)	362.000.000,00	234.058.500,00	(127.941.500,00)	64,66		
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	362.000.000,00	234.058.500,00	(127.941.500,00)	64,66		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
04.2.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	453.000,00	0,00	(453.000,00)	0		
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.547.000,00	1.218.500,00	(328.500,00)	78,77		
04.2.01.02.5.1.05	Belanja Hibah	360.000.000,00	232.840.000,00	(127.160.000,00)	64,68		
04.2.01.03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	68.554.000,00	68.477.100,00	(76.900,00)	99,89		
04.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	68.554.000,00	68.477.100,00	(76.900,00)	99,89		
04.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.554.000,00	68.477.100,00	(76.900,00)	99,89		
04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	6.552.000.000,00	6.518.456.800,00	(33.543.200,00)	99,49		
04.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	6.552.000.000,00	6.518.456.800,00	(33.543.200,00)	99,49		
04.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.552.000.000,00	6.518.456.800,00	(33.543.200,00)	99,49		
04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	53.554.000,00	52.274.798,00	(1.279.202,00)	97,61		
04.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	53.554.000,00	52.274.798,00	(1.279.202,00)	97,61		
04.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.554.000,00	52.274.798,00	(1.279.202,00)	97,61		
04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	30.000.000,00	29.737.800,00	(262.200,00)	99,13		
04.2.02.04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	30.000.000,00	29.737.800,00	(262.200,00)	99,13		
04.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	29.737.800,00	(262.200,00)	99,13		
04.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	29.737.800,00	(262.200,00)	99,13		
05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	3.171.781.000,00	3.064.315.298,00	(107.465.702,00)	96,61		
05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	100,00		
05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	70.000.000,00	69.870.000,00	(130.000,00)	99,81		
05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	70.000.000,00	69.870.000,00	(130.000,00)	99,81		
05.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
05.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00		
05.2.02.01.5.2	BELANJA MODAL	25.000.000,00	24.870.000,00	(130.000,00)	99,48		
05.2.02.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.000.000,00	24.870.000,00	(130.000,00)	99,48		
05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.036.781.000,00	2.929.445.298,00	(107.335.702,00)	96,47		
05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3.036.781.000,00	2.929.445.298,00	(107.335.702,00)	96,47		
05.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.036.781.000,00	2.929.445.298,00	(107.335.702,00)	96,47		
05.2.03.01.5.1.01	Belanja Pegawai	3.220.000,00	3.220.000,00	0,00	100,00		
05.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.033.561.000,00	2.926.225.298,00	(107.335.702,00)	96,46		
	SURPLUS / DEFISIT	(350.965.489.272,00)	(293.424.736.313,00)	57.540.752.959,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(350.965.489.272,00)	(293.424.736.313,00)	57.540.752.959,00	0		





PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1.03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

SKPD : 1-03.2-10.0-00.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	2.337.134.000,00	1.799.698.287,00	(537.435.713,00)	77,00		
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.337.134.000,00	1.799.698.287,00	(537.435.713,00)	77,00		
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	2.337.134.000,00	1.799.698.287,00	(537.435.713,00)	77,00		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	178.970.797.288,00	171.392.073.878,00	(7.578.723.410,00)	95,77		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.923.320.000,00	21.112.535.528,00	(810.784.472,00)	96,30		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	127.937.000,00	125.909.250,00	(2.027.750,00)	98,42		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	47.017.000,00	46.609.250,00	(407.750,00)	99,13		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	47.017.000,00	46.609.250,00	(407.750,00)	99,13		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.017.000,00	46.609.250,00	(407.750,00)	99,13		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80.920.000,00	79.300.000,00	(1.620.000,00)	98,00		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	80.920.000,00	79.300.000,00	(1.620.000,00)	98,00		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.920.000,00	79.300.000,00	(1.620.000,00)	98,00		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.846.570.000,00	19.073.238.240,00	(773.331.760,00)	96,10		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.107.744.000,00	18.355.538.662,00	(752.205.338,00)	96,06		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	19.107.744.000,00	18.355.538.662,00	(752.205.338,00)	96,06		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	19.107.744.000,00	18.355.538.662,00	(752.205.338,00)	96,06		
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	738.826.000,00	717.699.578,00	(21.126.422,00)	97,14		
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	738.826.000,00	717.699.578,00	(21.126.422,00)	97,14		
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	117.805.000,00	110.835.000,00	(6.970.000,00)	94,08		
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	621.021.000,00	606.864.578,00	(14.156.422,00)	97,72		
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	268.557.000,00	264.195.849,00	(4.361.151,00)	98,38		
01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	268.557.000,00	264.195.849,00	(4.361.151,00)	98,38		
01.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	264.367.000,00	260.005.849,00	(4.361.151,00)	98,35		
01.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	264.367.000,00	260.005.849,00	(4.361.151,00)	98,35		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.03.02.5.2	BELANJA MODAL	4.190.000,00	4.190.000,00	0,00	100,00		
01.2.03.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.190.000,00	4.190.000,00	0,00	100,00		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	47.983.000,00	45.185.200,00	(2.797.800,00)	94,17		
01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	47.983.000,00	45.185.200,00	(2.797.800,00)	94,17		
01.2.05.11.5.1	BELANJA OPERASI	47.983.000,00	45.185.200,00	(2.797.800,00)	94,17		
01.2.05.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.983.000,00	45.185.200,00	(2.797.800,00)	94,17		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	307.066.000,00	304.819.519,00	(2.246.481,00)	99,27		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40.100.000,00	40.063.500,00	(36.500,00)	99,91		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	40.100.000,00	40.063.500,00	(36.500,00)	99,91		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.100.000,00	40.063.500,00	(36.500,00)	99,91		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.000.000,00	59.006.900,00	(993.100,00)	98,34		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	59.006.900,00	(993.100,00)	98,34		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	59.006.900,00	(993.100,00)	98,34		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000,00	24.607.000,00	(393.000,00)	98,43		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	24.607.000,00	(393.000,00)	98,43		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	24.607.000,00	(393.000,00)	98,43		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000,00	9.996.000,00	(4.000,00)	99,96		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.996.000,00	(4.000,00)	99,96		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.996.000,00	(4.000,00)	99,96		
01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	50.000.000,00	49.975.700,00	(24.300,00)	99,95		
01.2.06.07.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	49.975.700,00	(24.300,00)	99,95		
01.2.06.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.975.700,00	(24.300,00)	99,95		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	115.000.000,00	114.214.719,00	(785.281,00)	99,32		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	115.000.000,00	114.214.719,00	(785.281,00)	99,32		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.000.000,00	114.214.719,00	(785.281,00)	99,32		
01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6.966.000,00	6.955.700,00	(10.300,00)	99,85		
01.2.06.10.5.1	BELANJA OPERASI	6.966.000,00	6.955.700,00	(10.300,00)	99,85		
01.2.06.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.966.000,00	6.955.700,00	(10.300,00)	99,85		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	450.000.000,00	428.644.300,00	(21.355.700,00)	95,25		
01.2.07.05	Pengadaan Mebel	30.000.000,00	29.530.000,00	(470.000,00)	98,43		
01.2.07.05.5.1	BELANJA OPERASI	750.000,00	730.000,00	(20.000,00)	97,33		
01.2.07.05.5.1.01	Belanja Pegawai	652.500,00	640.000,00	(12.500,00)	98,08		
01.2.07.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.500,00	90.000,00	(7.500,00)	92,31		
01.2.07.05.5.2	BELANJA MODAL	29.250.000,00	28.800.000,00	(450.000,00)	98,46		
01.2.07.05.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.250.000,00	28.800.000,00	(450.000,00)	98,46		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	420.000.000,00	399.114.300,00	(20.885.700,00)	95,03		
01.2.07.06.5.1	BELANJA OPERASI	9.993.000,00	9.719.300,00	(273.700,00)	97,26		
01.2.07.06.5.1.01	Belanja Pegawai	2.475.000,00	2.400.000,00	(75.000,00)	96,97		
01.2.07.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.518.000,00	7.319.300,00	(198.700,00)	97,36		
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	410.007.000,00	389.395.000,00	(20.612.000,00)	94,97		
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	410.007.000,00	389.395.000,00	(20.612.000,00)	94,97		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	302.583.000,00	299.156.315,00	(3.426.685,00)	98,87		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	1.988.500,00	(11.500,00)	99,43		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	1.988.500,00	(11.500,00)	99,43		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.988.500,00	(11.500,00)	99,43		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	209.583.000,00	206.273.515,00	(3.309.485,00)	98,42		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	209.583.000,00	206.273.515,00	(3.309.485,00)	98,42		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	209.583.000,00	206.273.515,00	(3.309.485,00)	98,42		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	91.000.000,00	90.894.300,00	(105.700,00)	99,88		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	91.000.000,00	90.894.300,00	(105.700,00)	99,88		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.000.000,00	90.894.300,00	(105.700,00)	99,88		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	572.624.000,00	571.386.855,00	(1.237.145,00)	99,78		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	368.260.000,00	367.915.617,00	(344.383,00)	99,91		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	368.260.000,00	367.915.617,00	(344.383,00)	99,91		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	368.260.000,00	367.915.617,00	(344.383,00)	99,91		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	74.364.000,00	74.239.238,00	(124.762,00)	99,83		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	74.364.000,00	74.239.238,00	(124.762,00)	99,83		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.364.000,00	74.239.238,00	(124.762,00)	99,83		
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	130.000.000,00	129.232.000,00	(768.000,00)	99,41		
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	130.000.000,00	129.232.000,00	(768.000,00)	99,41		
01.2.09.09.5.1.01	Belanja Pegawai	1.175.000,00	800.000,00	(375.000,00)	68,09		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	128.825.000,00	128.432.000,00	(393.000,00)	99,69		
02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	15.424.055.000,00	14.363.651.284,00	(1.060.403.716,00)	93,13		
02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	498.048.000,00	487.273.184,00	(10.774.816,00)	97,84		
02.2.01.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	55.000.000,00	53.732.500,00	(1.267.500,00)	97,70		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	55.000.000,00	53.732.500,00	(1.267.500,00)	97,70		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	965.000,00	965.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.035.000,00	52.767.500,00	(1.267.500,00)	97,65		
02.2.01.49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	352.400.000,00	347.672.300,00	(4.727.700,00)	98,66		
02.2.01.49.5.1	BELANJA OPERASI	352.400.000,00	347.672.300,00	(4.727.700,00)	98,66		
02.2.01.49.5.1.01	Belanja Pegawai	1.330.000,00	1.255.000,00	(75.000,00)	94,36		
02.2.01.49.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	351.070.000,00	346.417.300,00	(4.652.700,00)	98,67		
02.2.01.62	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek)	90.648.000,00	85.868.384,00	(4.779.616,00)	94,73		
02.2.01.62.5.1	Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	90.648.000,00	85.868.384,00	(4.779.616,00)	94,73		
02.2.01.62.5.1.02	BELANJA OPERASI	90.648.000,00	85.868.384,00	(4.779.616,00)	94,73		
02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	14.926.007.000,00	13.876.378.100,00	(1.049.628.900,00)	92,97		
02.2.02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	900.000.000,00	445.984.400,00	(454.015.600,00)	49,55		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	900.000.000,00	445.984.400,00	(454.015.600,00)	49,55		
02.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	21.625.000,00	9.780.000,00	(11.845.000,00)	45,23		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	878.375.000,00	436.204.400,00	(442.170.600,00)	49,66		
02.2.02.07	Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah	1.674.000.000,00	1.630.829.200,00	(43.170.800,00)	97,42		
02.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	3.180.000,00	3.118.500,00	(61.500,00)	98,07		
02.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.180.000,00	3.118.500,00	(61.500,00)	98,07		
02.2.02.07.5.2.04	BELANJA MODAL	1.670.820.000,00	1.627.710.700,00	(43.109.300,00)	97,42		
02.2.02.08	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.670.820.000,00	1.627.710.700,00	(43.109.300,00)	97,42		
02.2.02.08.5.1	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	250.000.000,00	236.801.515,00	(13.198.485,00)	94,72		
02.2.02.08.5.1.01	BELANJA OPERASI	625.000,00	625.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.08.5.1.02	Belanja Pegawai	625.000,00	625.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.08.5.2.04	BELANJA MODAL	249.375.000,00	236.176.515,00	(13.198.485,00)	94,71		
02.2.02.14	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	249.375.000,00	236.176.515,00	(13.198.485,00)	94,71		
02.2.02.14.5.1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	6.508.022.000,00	6.108.480.125,00	(399.541.875,00)	93,86		
02.2.02.14.5.1.01	BELANJA OPERASI	122.735.000,00	121.188.595,00	(1.546.405,00)	98,74		
02.2.02.14.5.1.02	Belanja Pegawai	4.560.000,00	4.472.500,00	(87.500,00)	98,08		
02.2.02.14.5.2.04	BELANJA MODAL	118.175.000,00	116.716.095,00	(1.458.905,00)	98,77		
02.2.02.21	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.385.287.000,00	5.987.291.530,00	(397.995.470,00)	93,77		
02.2.02.21.5.1.01	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	4.915.709.000,00	4.809.954.570,00	(105.754.430,00)	97,85		
02.2.02.21.5.1.02	BELANJA OPERASI	4.915.709.000,00	4.809.954.570,00	(105.754.430,00)	97,85		
02.2.02.26	Belanja Pegawai	35.830.000,00	17.890.500,00	(17.939.500,00)	49,93		
	Belanja Barang dan Jasa	4.879.879.000,00	4.792.064.070,00	(87.814.930,00)	98,20		
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah	57.677.000,00	55.460.500,00	(2.216.500,00)	96,16		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02.26.5.1	BELANJA OPERASI	765.000,00	664.500,00	(100.500,00)	86,86		
02.2.02.26.5.1.01	Belanja Pegawai	765.000,00	664.500,00	(100.500,00)	86,86		
02.2.02.26.5.2	BELANJA MODAL	56.912.000,00	54.796.000,00	(2.116.000,00)	96,28		
02.2.02.26.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	56.912.000,00	54.796.000,00	(2.116.000,00)	96,28		
02.2.02.28	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	620.599.000,00	588.867.790,00	(31.731.210,00)	94,89		
02.2.02.28.5.1	BELANJA OPERASI	620.599.000,00	588.867.790,00	(31.731.210,00)	94,89		
02.2.02.28.5.1.01	Belanja Pegawai	1.015.000,00	540.000,00	(475.000,00)	53,20		
02.2.02.28.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	619.584.000,00	588.327.790,00	(31.256.210,00)	94,96		
03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	11.840.213.000,00	10.908.262.842,00	(931.950.158,00)	92,13		
03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	11.840.213.000,00	10.908.262.842,00	(931.950.158,00)	92,13		
03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	8.856.976.000,00	7.976.030.890,00	(880.945.110,00)	90,05		
03.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	600.000.000,00	0,00	(600.000.000,00)	0		
03.2.01.04.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	600.000.000,00	0,00	(600.000.000,00)	0		
03.2.01.04.5.2	BELANJA MODAL	8.256.976.000,00	7.976.030.890,00	(280.945.110,00)	96,60		
03.2.01.04.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	8.256.976.000,00	7.976.030.890,00	(280.945.110,00)	96,60		
03.2.01.06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	2.500.000.000,00	2.455.623.952,00	(44.376.048,00)	98,22		
03.2.01.06.5.2	BELANJA MODAL	2.500.000.000,00	2.455.623.952,00	(44.376.048,00)	98,22		
03.2.01.06.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.500.000.000,00	2.455.623.952,00	(44.376.048,00)	98,22		
03.2.01.14	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	121.943.000,00	120.595.600,00	(1.347.400,00)	98,90		
03.2.01.14.5.1	BELANJA OPERASI	121.943.000,00	120.595.600,00	(1.347.400,00)	98,90		
03.2.01.14.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.943.000,00	120.595.600,00	(1.347.400,00)	98,90		
03.2.01.16	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	361.294.000,00	356.012.400,00	(5.281.600,00)	98,54		
03.2.01.16.5.2	BELANJA MODAL	361.294.000,00	356.012.400,00	(5.281.600,00)	98,54		
03.2.01.16.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	361.294.000,00	356.012.400,00	(5.281.600,00)	98,54		
04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	37.632.000,00	37.493.600,00	(138.400,00)	99,63		
04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	37.632.000,00	37.493.600,00	(138.400,00)	99,63		
04.2.01.01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	37.632.000,00	37.493.600,00	(138.400,00)	99,63		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	37.632.000,00	37.493.600,00	(138.400,00)	99,63		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.632.000,00	37.493.600,00	(138.400,00)	99,63		
06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	5.461.678.000,00	5.183.455.571,00	(278.222.429,00)	94,91		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.461.678.000,00	5.183.455.571,00	(278.222.429,00)	94,91		
06.2.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	2.988.013.000,00	2.945.640.441,00	(42.372.559,00)	98,58		
06.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	2.988.013.000,00	2.945.640.441,00	(42.372.559,00)	98,58		
06.2.01.09.5.1.01	Belanja Pegawai	11.240.000,00	9.140.000,00	(2.100.000,00)	81,32		
06.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.976.773.000,00	2.936.500.441,00	(40.272.559,00)	98,65		
06.2.01.12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	508.400.000,00	494.357.682,00	(14.042.318,00)	97,24		
06.2.01.12.5.1	BELANJA OPERASI	28.500.000,00	26.456.428,00	(2.043.572,00)	92,83		
06.2.01.12.5.1.01	Belanja Pegawai	515.000,00	340.000,00	(175.000,00)	66,02		
06.2.01.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.985.000,00	26.116.428,00	(1.868.572,00)	93,32		
06.2.01.12.5.2	BELANJA MODAL	479.900.000,00	467.901.254,00	(11.998.746,00)	97,50		
06.2.01.12.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	479.900.000,00	467.901.254,00	(11.998.746,00)	97,50		
06.2.01.14	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	1.580.000.000,00	1.466.153.948,00	(113.846.052,00)	92,79		
06.2.01.14.5.1	BELANJA OPERASI	147.407.000,00	139.877.492,00	(7.529.508,00)	94,89		
06.2.01.14.5.1.01	Belanja Pegawai	690.000,00	602.500,00	(87.500,00)	87,32		
06.2.01.14.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	146.717.000,00	139.274.992,00	(7.442.008,00)	94,93		
06.2.01.14.5.2	BELANJA MODAL	1.432.593.000,00	1.326.276.456,00	(106.316.544,00)	92,58		
06.2.01.14.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.432.593.000,00	1.326.276.456,00	(106.316.544,00)	92,58		
06.2.01.16	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	385.265.000,00	277.303.500,00	(107.961.500,00)	71,98		
06.2.01.16.5.1	BELANJA OPERASI	385.265.000,00	277.303.500,00	(107.961.500,00)	71,98		
06.2.01.16.5.1.01	Belanja Pegawai	6.755.000,00	4.485.000,00	(2.270.000,00)	66,40		
06.2.01.16.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	378.510.000,00	272.818.500,00	(105.691.500,00)	72,08		
08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	4.300.007.000,00	4.125.001.260,00	(175.005.740,00)	95,93		
08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	4.300.007.000,00	4.125.001.260,00	(175.005.740,00)	95,93		
08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	136.640.000,00	135.467.831,00	(1.172.169,00)	99,14		
08.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	136.640.000,00	135.467.831,00	(1.172.169,00)	99,14		
08.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.640.000,00	135.467.831,00	(1.172.169,00)	99,14		
08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	1.982.785.000,00	1.886.012.500,00	(96.772.500,00)	95,12		
08.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	25.898.000,00	25.691.900,00	(206.100,00)	99,20		
08.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.898.000,00	25.691.900,00	(206.100,00)	99,20		
08.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	1.956.887.000,00	1.860.320.600,00	(96.566.400,00)	95,07		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
08.2.01.02.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.956.887.000,00	1.860.320.600,00	(96.566.400,00)	95,07		
08.2.01.04	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	33.075.000,00	31.730.100,00	(1.344.900,00)	95,93		
08.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	33.075.000,00	31.730.100,00	(1.344.900,00)	95,93		
08.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.075.000,00	31.730.100,00	(1.344.900,00)	95,93		
08.2.01.05	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	51.500.000,00	50.056.929,00	(1.443.071,00)	97,20		
08.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	51.500.000,00	50.056.929,00	(1.443.071,00)	97,20		
08.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.500.000,00	50.056.929,00	(1.443.071,00)	97,20		
08.2.01.09	Penilikan Terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	24.380.000,00	21.998.600,00	(2.381.400,00)	90,23		
08.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	24.380.000,00	21.998.600,00	(2.381.400,00)	90,23		
08.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.380.000,00	21.998.600,00	(2.381.400,00)	90,23		
08.2.01.13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	2.071.627.000,00	1.999.735.300,00	(71.891.700,00)	96,53		
08.2.01.13.5.1	BELANJA OPERASI	2.071.627.000,00	1.999.735.300,00	(71.891.700,00)	96,53		
08.2.01.13.5.1.01	Belanja Pegawai	15.965.500,00	10.917.500,00	(5.048.000,00)	68,38		
08.2.01.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.055.661.500,00	1.988.817.800,00	(66.843.700,00)	96,75		
09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	10.088.638.000,00	9.576.434.277,00	(512.203.723,00)	94,92		
09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	10.088.638.000,00	9.576.434.277,00	(512.203.723,00)	94,92		
09.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	567.688.000,00	561.399.700,00	(6.288.300,00)	98,89		
09.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	567.688.000,00	561.399.700,00	(6.288.300,00)	98,89		
09.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	14.305.000,00	13.705.000,00	(600.000,00)	95,81		
09.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	553.383.000,00	547.694.700,00	(5.688.300,00)	98,97		
09.2.01.05	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	9.520.950.000,00	9.015.034.577,00	(505.915.423,00)	94,69		
09.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	9.520.950.000,00	9.015.034.577,00	(505.915.423,00)	94,69		
09.2.01.05.5.1.01	Belanja Pegawai	5.964.000,00	3.925.000,00	(2.039.000,00)	65,81		
09.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	256.746.000,00	253.342.077,00	(3.403.923,00)	98,67		
09.2.01.05.5.1.05	Belanja Hibah	9.258.240.000,00	8.757.767.500,00	(500.472.500,00)	94,59		
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	109.214.422.288,00	105.407.880.235,00	(3.806.542.053,00)	96,51		
10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	109.214.422.288,00	105.407.880.235,00	(3.806.542.053,00)	96,51		
10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1.195.053.000,00	1.189.569.400,00	(5.483.600,00)	99,54		
10.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.195.053.000,00	1.189.569.400,00	(5.483.600,00)	99,54		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
10.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	21.120.000,00	21.020.000,00	(100.000,00)	99,53		
10.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.173.933.000,00	1.168.549.400,00	(5.383.600,00)	99,54		
10.2.01.02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	1.594.820.000,00	1.400.551.240,00	(194.268.760,00)	87,82		
10.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	1.594.820.000,00	1.400.551.240,00	(194.268.760,00)	87,82		
10.2.01.02.5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.594.820.000,00	1.400.551.240,00	(194.268.760,00)	87,82		
10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	587.079.000,00	565.353.000,00	(21.726.000,00)	96,30		
10.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	587.079.000,00	565.353.000,00	(21.726.000,00)	96,30		
10.2.01.04.5.1.01	Belanja Pegawai	6.990.000,00	6.240.000,00	(750.000,00)	89,27		
10.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	580.089.000,00	559.113.000,00	(20.976.000,00)	96,38		
10.2.01.05	Pembangunan Jalan	10.000.000.000,00	9.690.885.500,00	(309.114.500,00)	96,91		
10.2.01.05.2	BELANJA MODAL	10.000.000.000,00	9.690.885.500,00	(309.114.500,00)	96,91		
10.2.01.05.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	10.000.000.000,00	9.690.885.500,00	(309.114.500,00)	96,91		
10.2.01.06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	29.909.079.000,00	28.914.248.221,00	(994.830.779,00)	96,67		
10.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	41.476.000,00	41.343.971,00	(132.029,00)	99,68		
10.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.476.000,00	41.343.971,00	(132.029,00)	99,68		
10.2.01.06.5.2	BELANJA MODAL	29.867.603.000,00	28.872.904.250,00	(994.698.750,00)	96,67		
10.2.01.06.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	29.867.603.000,00	28.872.904.250,00	(994.698.750,00)	96,67		
10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	37.810.211.000,00	36.474.669.750,00	(1.335.541.250,00)	96,47		
10.2.01.10.5.2	BELANJA MODAL	37.810.211.000,00	36.474.669.750,00	(1.335.541.250,00)	96,47		
10.2.01.10.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	37.810.211.000,00	36.474.669.750,00	(1.335.541.250,00)	96,47		
10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	18.203.487.288,00	17.929.658.723,00	(273.828.565,00)	98,50		
10.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	18.203.487.288,00	17.929.658.723,00	(273.828.565,00)	98,50		
10.2.01.11.5.1.01	Belanja Pegawai	150.898.000,00	105.310.000,00	(45.588.000,00)	69,79		
10.2.01.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.052.589.288,00	17.824.348.723,00	(228.240.565,00)	98,74		
10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	3.925.000.000,00	3.769.425.200,00	(155.574.800,00)	96,04		
10.2.01.12.5.2	BELANJA MODAL	3.925.000.000,00	3.769.425.200,00	(155.574.800,00)	96,04		
10.2.01.12.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.925.000.000,00	3.769.425.200,00	(155.574.800,00)	96,04		
10.2.01.17	Pelebaran Jembatan	1.000.000.000,00	971.453.100,00	(28.546.900,00)	97,15		
10.2.01.17.5.2	BELANJA MODAL	1.000.000.000,00	971.453.100,00	(28.546.900,00)	97,15		
10.2.01.17.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.000.000.000,00	971.453.100,00	(28.546.900,00)	97,15		
10.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	498.685.000,00	489.280.000,00	(9.405.000,00)	98,11		
10.2.01.19.5.1	BELANJA OPERASI	498.685.000,00	489.280.000,00	(9.405.000,00)	98,11		
10.2.01.19.5.1.01	Belanja Pegawai	3.720.000,00	3.420.000,00	(300.000,00)	91,94		
10.2.01.19.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	494.965.000,00	485.860.000,00	(9.105.000,00)	98,16		
10.2.01.20	Pemeliharaan Berkala Jembatan	3.650.000.000,00	3.176.415.000,00	(473.585.000,00)	87,03		
10.2.01.20.5.2	BELANJA MODAL	3.650.000.000,00	3.176.415.000,00	(473.585.000,00)	87,03		
10.2.01.20.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.650.000.000,00	3.176.415.000,00	(473.585.000,00)	87,03		
10.2.01.22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	841.008.000,00	836.371.101,00	(4.636.899,00)	99,45		
10.2.01.22.5.1	BELANJA OPERASI	841.008.000,00	836.371.101,00	(4.636.899,00)	99,45		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
10.2.01.22.5.1.01	Belanja Pegawai	1.870.000,00	1.280.000,00	(590.000,00)	68,45		
10.2.01.22.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	839.138.000,00	835.091.101,00	(4.046.899,00)	99,52		
11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	99.699.000,00	97.700.200,00	(1.998.800,00)	98,00		
11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	32.027.000,00	30.879.800,00	(1.147.200,00)	96,42		
11.2.01.07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	32.027.000,00	30.879.800,00	(1.147.200,00)	96,42		
11.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	32.027.000,00	30.879.800,00	(1.147.200,00)	96,42		
11.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.027.000,00	30.879.800,00	(1.147.200,00)	96,42		
11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	67.672.000,00	66.820.400,00	(851.600,00)	98,74		
11.2.02.07	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	67.672.000,00	66.820.400,00	(851.600,00)	98,74		
11.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	67.672.000,00	66.820.400,00	(851.600,00)	98,74		
11.2.02.07.5.1.01	Belanja Pegawai	1.590.000,00	1.140.000,00	(450.000,00)	71,70		
11.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.082.000,00	65.680.400,00	(401.600,00)	99,39		
12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	581.133.000,00	579.659.081,00	(1.473.919,00)	99,75		
12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	313.816.000,00	313.359.938,00	(456.062,00)	99,85		
12.2.01.01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	83.232.000,00	82.946.038,00	(285.962,00)	99,66		
12.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	83.232.000,00	82.946.038,00	(285.962,00)	99,66		
12.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.232.000,00	82.946.038,00	(285.962,00)	99,66		
12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	230.584.000,00	230.413.900,00	(170.100,00)	99,93		
12.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	230.584.000,00	230.413.900,00	(170.100,00)	99,93		
12.2.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	1.590.000,00	1.590.000,00	0,00	100,00		
12.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	228.994.000,00	228.823.900,00	(170.100,00)	99,93		
12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	91.848.000,00	91.426.709,00	(421.291,00)	99,54		
12.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	35.926.000,00	35.710.800,00	(215.200,00)	99,40		
12.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	35.926.000,00	35.710.800,00	(215.200,00)	99,40		
12.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.926.000,00	35.710.800,00	(215.200,00)	99,40		
12.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	29.622.000,00	29.499.700,00	(122.300,00)	99,59		
12.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	29.622.000,00	29.499.700,00	(122.300,00)	99,59		
12.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.622.000,00	29.499.700,00	(122.300,00)	99,59		
12.2.02.03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	26.300.000,00	26.216.209,00	(83.791,00)	99,68		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
12.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	26.300.000,00	26.216.209,00	(83.791,00)	99,68		
12.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.300.000,00	26.216.209,00	(83.791,00)	99,68		
12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	113.217.000,00	112.845.462,00	(371.538,00)	99,67		
12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	57.970.000,00	57.787.600,00	(182.400,00)	99,69		
12.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	57.970.000,00	57.787.600,00	(182.400,00)	99,69		
12.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.970.000,00	57.787.600,00	(182.400,00)	99,69		
12.2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	55.247.000,00	55.057.862,00	(189.138,00)	99,66		
12.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	55.247.000,00	55.057.862,00	(189.138,00)	99,66		
12.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.247.000,00	55.057.862,00	(189.138,00)	99,66		
12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	62.252.000,00	62.026.972,00	(225.028,00)	99,64		
12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	62.252.000,00	62.026.972,00	(225.028,00)	99,64		
12.2.04.04.5.1	BELANJA OPERASI	47.127.000,00	46.906.972,00	(220.028,00)	99,53		
12.2.04.04.5.1.01	Belanja Pegawai	390.000,00	390.000,00	0,00	100,00		
12.2.04.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.737.000,00	46.516.972,00	(220.028,00)	99,53		
12.2.04.04.5.2	BELANJA MODAL	15.125.000,00	15.120.000,00	(5.000,00)	99,97		
12.2.04.04.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.125.000,00	15.120.000,00	(5.000,00)	99,97		
	SURPLUS / DEFISIT	(176.633.663.288,00)	(169.592.375.591,00)	7.041.287.697,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(176.633.663.288,00)	(169.592.375.591,00)	7.041.287.697,00	0		





PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1.04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

SKPD : 1-04.2-15.0-00.01 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	3.918.755.000,00	2.228.872.720,00	(1.689.882.280,00)	56,88		
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.918.755.000,00	2.228.872.720,00	(1.689.882.280,00)	56,88		
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	3.905.755.000,00	2.206.555.200,00	(1.699.199.800,00)	56,49		
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	13.000.000,00	22.317.520,00	9.317.520,00	171,67		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	53.786.116.000,00	52.404.533.369,00	(1.381.582.631,00)	97,43		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.718.448.000,00	6.203.712.539,00	(514.735.461,00)	92,34		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.463.000,00	40.515.000,00	(948.000,00)	97,71		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24.367.000,00	23.488.700,00	(878.300,00)	96,40		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	24.367.000,00	23.488.700,00	(878.300,00)	96,40		
01.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	100,00		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.347.000,00	21.468.700,00	(878.300,00)	96,07		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.096.000,00	17.026.300,00	(69.700,00)	99,59		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	17.096.000,00	17.026.300,00	(69.700,00)	99,59		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.096.000,00	17.026.300,00	(69.700,00)	99,59		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.912.294.000,00	5.445.509.671,00	(466.784.329,00)	92,10		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.606.657.000,00	5.143.670.239,00	(462.986.761,00)	91,74		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	5.606.657.000,00	5.143.670.239,00	(462.986.761,00)	91,74		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	5.606.657.000,00	5.143.670.239,00	(462.986.761,00)	91,74		
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	305.637.000,00	301.839.432,00	(3.797.568,00)	98,76		
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	305.637.000,00	301.839.432,00	(3.797.568,00)	98,76		
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	23.700.000,00	23.600.000,00	(100.000,00)	99,58		
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	281.937.000,00	278.239.432,00	(3.697.568,00)	98,69		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	40.000.000,00	38.051.300,00	(1.948.700,00)	95,13		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40.000.000,00	38.051.300,00	(1.948.700,00)	95,13		
01.2.05.09.5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	38.051.300,00	(1.948.700,00)	95,13		
01.2.05.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	38.051.300,00	(1.948.700,00)	95,13		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	178.497.000,00	177.765.226,00	(731.774,00)	99,59		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.103.000,00	9.075.000,00	(28.000,00)	99,69		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	9.103.000,00	9.075.000,00	(28.000,00)	99,69		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.103.000,00	9.075.000,00	(28.000,00)	99,69		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.394.000,00	24.863.000,00	(531.000,00)	97,91		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	25.394.000,00	24.863.000,00	(531.000,00)	97,91		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.394.000,00	24.863.000,00	(531.000,00)	97,91		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.000.000,00	49.959.100,00	(40.900,00)	99,92		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	49.959.100,00	(40.900,00)	99,92		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.959.100,00	(40.900,00)	99,92		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.000.000,00	3.995.000,00	(5.000,00)	99,88		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	3.995.000,00	(5.000,00)	99,88		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	3.995.000,00	(5.000,00)	99,88		
01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	39.895.200,00	(104.800,00)	99,74		
01.2.06.07.5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	39.895.200,00	(104.800,00)	99,74		
01.2.06.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	39.895.200,00	(104.800,00)	99,74		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000,00	49.977.926,00	(22.074,00)	99,96		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	49.977.926,00	(22.074,00)	99,96		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.977.926,00	(22.074,00)	99,96		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	21.697.000,00	21.614.400,00	(82.600,00)	99,62		
01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	21.697.000,00	21.614.400,00	(82.600,00)	99,62		
01.2.07.10.5.1	BELANJA OPERASI	970.000,00	969.400,00	(600,00)	99,94		
01.2.07.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	970.000,00	969.400,00	(600,00)	99,94		
01.2.07.10.5.2	BELANJA MODAL	20.727.000,00	20.645.000,00	(82.000,00)	99,60		
01.2.07.10.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.727.000,00	20.645.000,00	(82.000,00)	99,60		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	146.414.000,00	115.191.645,00	(31.222.355,00)	78,68		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	124.414.000,00	93.271.145,00	(31.142.855,00)	74,97		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	124.414.000,00	93.271.145,00	(31.142.855,00)	74,97		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.414.000,00	93.271.145,00	(31.142.855,00)	74,97		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	19.000.000,00	18.920.500,00	(79.500,00)	99,58		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	19.000.000,00	18.920.500,00	(79.500,00)	99,58		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.000.000,00	18.920.500,00	(79.500,00)	99,58		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	378.083.000,00	365.065.297,00	(13.017.703,00)	96,56		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	212.590.000,00	202.272.297,00	(10.317.703,00)	95,15		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	212.590.000,00	202.272.297,00	(10.317.703,00)	95,15		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	212.590.000,00	202.272.297,00	(10.317.703,00)	95,15		
01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	6.693.000,00	6.550.000,00	(143.000,00)	97,86		
01.2.09.05.5.1	BELANJA OPERASI	6.693.000,00	6.550.000,00	(143.000,00)	97,86		
01.2.09.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.693.000,00	6.550.000,00	(143.000,00)	97,86		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000,00	29.991.000,00	(9.000,00)	99,97		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	29.991.000,00	(9.000,00)	99,97		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	29.991.000,00	(9.000,00)	99,97		
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	128.800.000,00	126.252.000,00	(2.548.000,00)	98,02		
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	128.800.000,00	126.252.000,00	(2.548.000,00)	98,02		
01.2.09.09.5.1.01	Belanja Pegawai	715.000,00	715.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	128.085.000,00	125.537.000,00	(2.548.000,00)	98,01		
02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	533.801.000,00	532.653.390,00	(1.147.610,00)	99,79		
02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	31.036.000,00	30.917.876,00	(118.124,00)	99,62		
02.2.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	31.036.000,00	30.917.876,00	(118.124,00)	99,62		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	31.036.000,00	30.917.876,00	(118.124,00)	99,62		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.036.000,00	30.917.876,00	(118.124,00)	99,62		
02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	502.765.000,00	501.735.514,00	(1.029.486,00)	99,80		
02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	502.765.000,00	501.735.514,00	(1.029.486,00)	99,80		
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	502.765.000,00	501.735.514,00	(1.029.486,00)	99,80		
02.2.03.01.5.1.01	Belanja Pegawai	513.000,00	512.500,00	(500,00)	99,90		
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	187.252.000,00	186.223.014,00	(1.028.986,00)	99,45		
02.2.03.01.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	315.000.000,00	315.000.000,00	0,00	100,00		
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	32.326.952.000,00	31.587.678.476,00	(739.273.524,00)	97,71		
02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	29.414.758.000,00	28.761.579.262,00	(653.178.738,00)	97,78		
02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	18.598.519.000,00	18.101.887.887,00	(496.631.113,00)	97,33		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.018.556.000,00	993.824.285,00	(24.731.715,00)	97,57		
02.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	903.000,00	562.500,00	(340.500,00)	62,29		
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.017.653.000,00	993.261.785,00	(24.391.215,00)	97,60		
02.2.02.02.5.2	BELANJA MODAL	17.579.963.000,00	17.108.063.602,00	(471.899.398,00)	97,32		
02.2.02.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	785.432.000,00	752.549.500,00	(32.882.500,00)	95,81		
02.2.02.02.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	16.794.531.000,00	16.355.514.102,00	(439.016.898,00)	97,39		
02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	10.816.239.000,00	10.659.691.375,00	(156.547.625,00)	98,55		
02.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	10.699.763.000,00	10.545.791.375,00	(153.971.625,00)	98,56		
02.2.02.04.5.1.01	Belanja Pegawai	28.260.000,00	6.107.500,00	(22.152.500,00)	21,61		
02.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.671.503.000,00	10.539.683.875,00	(131.819.125,00)	98,76		
02.2.02.04.5.2	BELANJA MODAL	116.476.000,00	113.900.000,00	(2.576.000,00)	97,79		
02.2.02.04.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	116.476.000,00	113.900.000,00	(2.576.000,00)	97,79		
02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	131.897.000,00	110.245.600,00	(21.651.400,00)	83,58		
02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	131.897.000,00	110.245.600,00	(21.651.400,00)	83,58		
02.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	131.897.000,00	110.245.600,00	(21.651.400,00)	83,58		
02.2.04.02.5.1.01	Belanja Pegawai	6.050.000,00	3.025.000,00	(3.025.000,00)	50,00		
02.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.847.000,00	107.220.600,00	(18.626.400,00)	85,20		
02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	229.773.000,00	212.277.427,00	(17.495.573,00)	92,39		
02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	160.709.000,00	144.943.238,00	(15.765.762,00)	90,19		
02.2.05.04.5.1	BELANJA OPERASI	160.709.000,00	144.943.238,00	(15.765.762,00)	90,19		
02.2.05.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.709.000,00	144.943.238,00	(15.765.762,00)	90,19		
02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	69.064.000,00	67.334.189,00	(1.729.811,00)	97,50		
02.2.05.07.5.1	BELANJA OPERASI	69.064.000,00	67.334.189,00	(1.729.811,00)	97,50		
02.2.05.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.064.000,00	67.334.189,00	(1.729.811,00)	97,50		
02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	640.515.000,00	601.553.014,00	(38.961.986,00)	93,92		
02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	640.515.000,00	601.553.014,00	(38.961.986,00)	93,92		
02.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	630.975.000,00	592.053.014,00	(38.921.986,00)	93,83		
02.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	630.975.000,00	592.053.014,00	(38.921.986,00)	93,83		
02.2.06.04.5.2	BELANJA MODAL	9.540.000,00	9.500.000,00	(40.000,00)	99,58		
02.2.06.04.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.540.000,00	9.500.000,00	(40.000,00)	99,58		
02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	20.000.000,00	17.426.660,00	(2.573.340,00)	87,13		
02.2.07.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	20.000.000,00	17.426.660,00	(2.573.340,00)	87,13		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.07.03.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	17.426.660,00	(2.573.340,00)	87,13		
02.2.07.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	17.426.660,00	(2.573.340,00)	87,13		
02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	1.738.960.000,00	1.736.970.547,00	(1.989.453,00)	99,89		
02.2.08.04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	1.738.960.000,00	1.736.970.547,00	(1.989.453,00)	99,89		
02.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	1.582.260.000,00	1.581.567.547,00	(692.453,00)	99,96		
02.2.08.04.5.1.01	Belanja Pegawai	4.420.000,00	4.420.000,00	0,00	100,00		
02.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.577.840.000,00	1.577.147.547,00	(692.453,00)	99,96		
02.2.08.04.5.2	BELANJA MODAL	156.700.000,00	155.403.000,00	(1.297.000,00)	99,17		
02.2.08.04.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	154.000.000,00	152.703.000,00	(1.297.000,00)	99,16		
02.2.08.04.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00		
02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	63.683.000,00	63.449.150,00	(233.850,00)	99,63		
02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	63.683.000,00	63.449.150,00	(233.850,00)	99,63		
02.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	63.683.000,00	63.449.150,00	(233.850,00)	99,63		
02.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.683.000,00	63.449.150,00	(233.850,00)	99,63		
02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	87.366.000,00	84.176.816,00	(3.189.184,00)	96,35		
02.2.14.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	87.366.000,00	84.176.816,00	(3.189.184,00)	96,35		
02.2.14.01.5.1	BELANJA OPERASI	87.366.000,00	84.176.816,00	(3.189.184,00)	96,35		
02.2.14.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.366.000,00	84.176.816,00	(3.189.184,00)	96,35		
03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	2.138.286.000,00	2.084.167.409,00	(54.118.591,00)	97,47		
03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	2.138.286.000,00	2.084.167.409,00	(54.118.591,00)	97,47		
03.2.02.03	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	1.935.590.000,00	1.895.817.676,00	(39.772.324,00)	97,95		
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.212.590.000,00	1.207.099.676,00	(5.490.324,00)	99,55		
03.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	4.950.000,00	3.150.000,00	(1.800.000,00)	63,64		
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.640.000,00	103.949.676,00	(3.690.324,00)	96,57		
03.2.02.03.5.1.05	Belanja Hibah	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.02.03.5.2	BELANJA MODAL	723.000.000,00	688.718.000,00	(34.282.000,00)	95,26		
03.2.02.03.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	723.000.000,00	688.718.000,00	(34.282.000,00)	95,26		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.02.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	202.696.000,00	188.349.733,00	(14.346.267,00)	92,92		
03.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	202.696.000,00	188.349.733,00	(14.346.267,00)	92,92		
03.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	202.696.000,00	188.349.733,00	(14.346.267,00)	92,92		
04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	2.130.900.000,00	2.100.372.754,00	(30.527.246,00)	98,57		
04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	2.130.900.000,00	2.100.372.754,00	(30.527.246,00)	98,57		
04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	2.104.864.000,00	2.074.403.806,00	(30.460.194,00)	98,55		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.104.864.000,00	2.074.403.806,00	(30.460.194,00)	98,55		
04.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	4.680.000,00	4.680.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	570.184.000,00	569.723.806,00	(460.194,00)	99,92		
04.2.01.01.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.530.000.000,00	1.500.000.000,00	(30.000.000,00)	98,04		
04.2.01.02	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	26.036.000,00	25.968.948,00	(67.052,00)	99,74		
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	26.036.000,00	25.968.948,00	(67.052,00)	99,74		
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.036.000,00	25.968.948,00	(67.052,00)	99,74		
05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	9.937.729.000,00	9.895.948.801,00	(41.780.199,00)	99,58		
05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	9.937.729.000,00	9.895.948.801,00	(41.780.199,00)	99,58		
05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	9.336.773.000,00	9.295.283.715,00	(41.489.285,00)	99,56		
05.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	8.708.473.000,00	8.707.283.715,00	(1.189.285,00)	99,99		
05.2.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	7.090.000,00	6.015.000,00	(1.075.000,00)	84,84		
05.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	411.383.000,00	411.268.715,00	(114.285,00)	99,97		
05.2.01.02.5.1.05	Belanja Hibah	8.290.000.000,00	8.290.000.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	628.300.000,00	588.000.000,00	(40.300.000,00)	93,59		
05.2.01.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	628.300.000,00	588.000.000,00	(40.300.000,00)	93,59		
05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	600.956.000,00	600.665.086,00	(290.914,00)	99,95		
05.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	600.956.000,00	600.665.086,00	(290.914,00)	99,95		
05.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.956.000,00	600.665.086,00	(290.914,00)	99,95		
	SURPLUS / DEFISIT	(49.867.361.000,00)	(50.175.660.649,00)	(308.299.649,00)	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(49.867.361.000,00)	(50.175.660.649,00)	(308.299.649,00)	0		





PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1.05 KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

SKPD : 1-05.0-00.0-00.01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	17.746.933.698,00	16.865.580.946,00	(881.352.752,00)	95,03		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.621.877.671,00	6.161.635.848,00	(460.241.823,00)	93,05		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.000.000,00	23.941.000,00	(59.000,00)	99,75		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.000.000,00	11.981.800,00	(18.200,00)	99,85		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	11.981.800,00	(18.200,00)	99,85		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	11.981.800,00	(18.200,00)	99,85		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.000.000,00	11.959.200,00	(40.800,00)	99,66		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	11.959.200,00	(40.800,00)	99,66		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	11.959.200,00	(40.800,00)	99,66		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.630.920.171,00	5.178.042.204,00	(452.877.967,00)	91,96		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.592.520.171,00	5.139.659.804,00	(452.860.367,00)	91,90		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	5.592.520.171,00	5.139.659.804,00	(452.860.367,00)	91,90		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	5.592.520.171,00	5.139.659.804,00	(452.860.367,00)	91,90		
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	38.400.000,00	38.382.400,00	(17.600,00)	99,95		
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	38.400.000,00	38.382.400,00	(17.600,00)	99,95		
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	18.340.000,00	18.340.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.060.000,00	20.042.400,00	(17.600,00)	99,91		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	330.892.000,00	329.232.800,00	(1.659.200,00)	99,50		
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	330.892.000,00	329.232.800,00	(1.659.200,00)	99,50		
01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	330.892.000,00	329.232.800,00	(1.659.200,00)	99,50		
01.2.05.02.5.1.01	Belanja Pegawai	1.025.000,00	1.025.000,00	0,00	100,00		
01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	329.867.000,00	328.207.800,00	(1.659.200,00)	99,50		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	115.744.000,00	114.627.953,00	(1.116.047,00)	99,04		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.600.000,00	9.562.400,00	(37.600,00)	99,61		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	9.600.000,00	9.562.400,00	(37.600,00)	99,61		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	9.562.400,00	(37.600,00)	99,61		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.400.000,00	40.387.000,00	(13.000,00)	99,97		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	40.400.000,00	40.387.000,00	(13.000,00)	99,97		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.400.000,00	40.387.000,00	(13.000,00)	99,97		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.000.000,00	11.998.500,00	(1.500,00)	99,99		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	11.998.500,00	(1.500,00)	99,99		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	11.998.500,00	(1.500,00)	99,99		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000,00	1.196.000,00	(4.000,00)	99,67		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	1.200.000,00	1.196.000,00	(4.000,00)	99,67		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.196.000,00	(4.000,00)	99,67		
01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	12.000.000,00	11.942.550,00	(57.450,00)	99,52		
01.2.06.07.5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	11.942.550,00	(57.450,00)	99,52		
01.2.06.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	11.942.550,00	(57.450,00)	99,52		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38.144.000,00	37.163.903,00	(980.097,00)	97,43		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	38.144.000,00	37.163.903,00	(980.097,00)	97,43		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.144.000,00	37.163.903,00	(980.097,00)	97,43		
01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.400.000,00	2.377.600,00	(22.400,00)	99,07		
01.2.06.10.5.1	BELANJA OPERASI	2.400.000,00	2.377.600,00	(22.400,00)	99,07		
01.2.06.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.377.600,00	(22.400,00)	99,07		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	40.000.000,00	39.957.000,00	(43.000,00)	99,89		
01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.000.000,00	39.957.000,00	(43.000,00)	99,89		
01.2.07.11.5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	39.957.000,00	(43.000,00)	99,89		
01.2.07.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	39.957.000,00	(43.000,00)	99,89		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.000.000,00	86.028.676,00	(3.971.324,00)	95,59		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.000.000,00	56.046.076,00	(3.953.924,00)	93,41		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	56.046.076,00	(3.953.924,00)	93,41		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	56.046.076,00	(3.953.924,00)	93,41		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	28.800.000,00	28.782.600,00	(17.400,00)	99,94		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	28.800.000,00	28.782.600,00	(17.400,00)	99,94		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.800.000,00	28.782.600,00	(17.400,00)	99,94		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	390.321.500,00	389.806.215,00	(515.285,00)	99,87		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	314.321.500,00	313.983.215,00	(338.285,00)	99,89		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	314.321.500,00	313.983.215,00	(338.285,00)	99,89		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	314.321.500,00	313.983.215,00	(338.285,00)	99,89		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.000.000,00	15.946.000,00	(54.000,00)	99,66		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	16.000.000,00	15.946.000,00	(54.000,00)	99,66		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	15.946.000,00	(54.000,00)	99,66		
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60.000.000,00	59.877.000,00	(123.000,00)	99,80		
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	59.877.000,00	(123.000,00)	99,80		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	59.877.000,00	(123.000,00)	99,80		
02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.832.835.027,00	7.521.297.054,00	(311.537.973,00)	96,02		
02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	7.112.619.500,00	6.828.051.791,00	(284.567.709,00)	96,00		
02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	4.350.311.500,00	4.273.854.341,00	(76.457.159,00)	98,24		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.350.311.500,00	4.273.854.341,00	(76.457.159,00)	98,24		
02.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.343.911.500,00	4.267.454.341,00	(76.457.159,00)	98,24		
02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.528.528.000,00	1.321.030.600,00	(207.497.400,00)	86,43		
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	1.528.528.000,00	1.321.030.600,00	(207.497.400,00)	86,43		
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.528.528.000,00	1.321.030.600,00	(207.497.400,00)	86,43		
02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	76.400.000,00	75.972.700,00	(427.300,00)	99,44		
02.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	76.400.000,00	75.972.700,00	(427.300,00)	99,44		
02.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.400.000,00	35.972.700,00	(427.300,00)	98,83		
02.2.01.05.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.06	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.157.380.000,00	1.157.194.150,00	(185.850,00)	99,98		
02.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	1.157.380.000,00	1.157.194.150,00	(185.850,00)	99,98		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.157.380.000,00	1.157.194.150,00	(185.850,00)	99,98		
02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	710.215.527,00	683.468.794,00	(26.746.733,00)	96,23		
02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	38.087.000,00	37.980.120,00	(106.880,00)	99,72		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	38.087.000,00	37.980.120,00	(106.880,00)	99,72		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.087.000,00	37.980.120,00	(106.880,00)	99,72		
02.2.02.02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	29.380.000,00	29.289.000,00	(91.000,00)	99,69		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	29.380.000,00	29.289.000,00	(91.000,00)	99,69		
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.380.000,00	29.289.000,00	(91.000,00)	99,69		
02.2.02.03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	642.748.527,00	616.199.674,00	(26.548.853,00)	95,87		
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	587.307.527,00	562.839.674,00	(24.467.853,00)	95,83		
02.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	3.610.000,00	3.610.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	583.697.527,00	559.229.674,00	(24.467.853,00)	95,81		
02.2.02.03.5.2	BELANJA MODAL	55.441.000,00	53.360.000,00	(2.081.000,00)	96,25		
02.2.02.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55.441.000,00	53.360.000,00	(2.081.000,00)	96,25		
02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	10.000.000,00	9.776.469,00	(223.531,00)	97,76		
02.2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	10.000.000,00	9.776.469,00	(223.531,00)	97,76		
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.776.469,00	(223.531,00)	97,76		
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.776.469,00	(223.531,00)	97,76		
04	PROGRAM Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	3.292.221.000,00	3.182.648.044,00	(109.572.956,00)	96,67		
04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.240.525.000,00	3.131.339.444,00	(109.185.556,00)	96,63		
04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.185.525.000,00	3.076.427.844,00	(109.097.156,00)	96,58		
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.824.780.000,00	1.795.577.844,00	(29.202.156,00)	98,40		
04.2.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	5.297.500,00	5.297.500,00	0,00	100,00		
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.819.482.500,00	1.790.280.344,00	(29.202.156,00)	98,40		
04.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	1.360.745.000,00	1.280.850.000,00	(79.895.000,00)	94,13		
04.2.01.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.360.745.000,00	1.280.850.000,00	(79.895.000,00)	94,13		
04.2.01.03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	55.000.000,00	54.911.600,00	(88.400,00)	99,84		
04.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	55.000.000,00	54.911.600,00	(88.400,00)	99,84		
04.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	54.911.600,00	(88.400,00)	99,84		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	21.776.000,00	21.759.600,00	(16.400,00)	99,92		
04.2.02.01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	21.776.000,00	21.759.600,00	(16.400,00)	99,92		
04.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	21.776.000,00	21.759.600,00	(16.400,00)	99,92		
04.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	100,00		
04.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.756.000,00	19.739.600,00	(16.400,00)	99,92		
04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	29.920.000,00	29.549.000,00	(371.000,00)	98,76		
04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	29.920.000,00	29.549.000,00	(371.000,00)	98,76		
04.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	29.920.000,00	29.549.000,00	(371.000,00)	98,76		
04.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.920.000,00	29.549.000,00	(371.000,00)	98,76		
	SURPLUS / DEFISIT	(17.746.933.698,00)	(16.865.580.946,00)	881.352.752,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(17.746.933.698,00)	(16.865.580.946,00)	881.352.752,00	0		





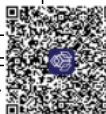
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1.05 KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

SKPD : 1-05.0-00.0-00.02 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	9.338.183.284,00	9.013.452.776,00	(324.730.508,00)	96,52		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.898.526.284,00	3.773.919.597,00	(124.606.687,00)	96,80		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.000.000,00	15.923.000,00	(77.000,00)	99,52		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.000.000,00	15.923.000,00	(77.000,00)	99,52		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	16.000.000,00	15.923.000,00	(77.000,00)	99,52		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	15.923.000,00	(77.000,00)	99,52		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.803.942.284,00	2.704.979.604,00	(98.962.680,00)	96,47		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.609.168.284,00	2.510.502.597,00	(98.665.687,00)	96,22		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.609.168.284,00	2.510.502.597,00	(98.665.687,00)	96,22		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.609.168.284,00	2.510.502.597,00	(98.665.687,00)	96,22		
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	194.774.000,00	194.477.007,00	(296.993,00)	99,85		
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	194.774.000,00	194.477.007,00	(296.993,00)	99,85		
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	17.470.000,00	17.470.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	177.304.000,00	177.007.007,00	(296.993,00)	99,83		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.05.11.5.1	BELANJA OPERASI	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.05.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	236.960.000,00	235.668.443,00	(1.291.557,00)	99,45		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.600.000,00	5.422.000,00	(178.000,00)	96,82		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	5.600.000,00	5.422.000,00	(178.000,00)	96,82		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	5.422.000,00	(178.000,00)	96,82		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48.000.000,00	47.744.650,00	(255.350,00)	99,47		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	48.000.000,00	47.744.650,00	(255.350,00)	99,47		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.000.000,00	47.744.650,00	(255.350,00)	99,47		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.200.000,00	23.122.100,00	(77.900,00)	99,66		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	23.200.000,00	23.122.100,00	(77.900,00)	99,66		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.200.000,00	23.122.100,00	(77.900,00)	99,66		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.160.000,00	2.157.000,00	(3.000,00)	99,86		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	2.160.000,00	2.157.000,00	(3.000,00)	99,86		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.160.000,00	2.157.000,00	(3.000,00)	99,86		
01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	39.447.300,00	(552.700,00)	98,62		
01.2.06.07.5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	39.447.300,00	(552.700,00)	98,62		
01.2.06.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	39.447.300,00	(552.700,00)	98,62		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	118.000.000,00	117.775.393,00	(224.607,00)	99,81		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	118.000.000,00	117.775.393,00	(224.607,00)	99,81		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.000.000,00	117.775.393,00	(224.607,00)	99,81		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.000.000,00	19.884.800,00	(115.200,00)	99,42		
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000,00	19.884.800,00	(115.200,00)	99,42		
01.2.07.06.5.1	BELANJA OPERASI	7.010.000,00	7.009.800,00	(200,00)	100,00		
01.2.07.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.010.000,00	7.009.800,00	(200,00)	100,00		
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	12.990.000,00	12.875.000,00	(115.000,00)	99,11		
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.990.000,00	12.875.000,00	(115.000,00)	99,11		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	182.373.000,00	172.954.776,00	(9.418.224,00)	94,84		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.400.000,00	2.204.000,00	(196.000,00)	91,83		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.400.000,00	2.204.000,00	(196.000,00)	91,83		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.204.000,00	(196.000,00)	91,83		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	110.000.000,00	101.193.676,00	(8.806.324,00)	91,99		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	110.000.000,00	101.193.676,00	(8.806.324,00)	91,99		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.000.000,00	101.193.676,00	(8.806.324,00)	91,99		
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.000.000,00	23.753.000,00	(247.000,00)	98,97		
01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	24.000.000,00	23.753.000,00	(247.000,00)	98,97		
01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	23.753.000,00	(247.000,00)	98,97		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	45.973.000,00	45.804.100,00	(168.900,00)	99,63		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	45.973.000,00	45.804.100,00	(168.900,00)	99,63		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.973.000,00	45.804.100,00	(168.900,00)	99,63		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	615.251.000,00	600.508.974,00	(14.742.026,00)	97,60		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	300.000.000,00	286.621.574,00	(13.378.426,00)	95,54		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	300.000.000,00	286.621.574,00	(13.378.426,00)	95,54		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	286.621.574,00	(13.378.426,00)	95,54		
01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	2.000.000,00	1.995.000,00	(5.000,00)	99,75		
01.2.09.05.5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	1.995.000,00	(5.000,00)	99,75		
01.2.09.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.995.000,00	(5.000,00)	99,75		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.000.000,00	7.995.000,00	(5.000,00)	99,94		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	8.000.000,00	7.995.000,00	(5.000,00)	99,94		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	7.995.000,00	(5.000,00)	99,94		
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	305.251.000,00	303.897.400,00	(1.353.600,00)	99,56		
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	305.251.000,00	303.897.400,00	(1.353.600,00)	99,56		
01.2.09.09.5.1.01	Belanja Pegawai	3.070.000,00	3.070.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	302.181.000,00	300.827.400,00	(1.353.600,00)	99,55		
03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	5.439.657.000,00	5.239.533.179,00	(200.123.821,00)	96,32		
03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	460.180.000,00	457.990.215,00	(2.189.785,00)	99,52		
03.2.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	75.000.000,00	74.494.500,00	(505.500,00)	99,33		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	75.000.000,00	74.494.500,00	(505.500,00)	99,33		
03.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	390.000,00	390.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.610.000,00	74.104.500,00	(505.500,00)	99,32		
03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	385.180.000,00	383.495.715,00	(1.684.285,00)	99,56		
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	157.586.000,00	156.833.715,00	(752.285,00)	99,52		
03.2.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	152.536.000,00	151.783.715,00	(752.285,00)	99,51		
03.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	227.594.000,00	226.662.000,00	(932.000,00)	99,59		
03.2.01.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	227.594.000,00	226.662.000,00	(932.000,00)	99,59		
03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.685.740.000,00	1.667.831.748,00	(17.908.252,00)	98,94		
03.2.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	50.000.000,00	49.617.400,00	(382.600,00)	99,23		
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	49.617.400,00	(382.600,00)	99,23		
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.617.400,00	(382.600,00)	99,23		
03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	100.000.000,00	98.859.000,00	(1.141.000,00)	98,86		
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	98.859.000,00	(1.141.000,00)	98,86		
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	98.859.000,00	(1.141.000,00)	98,86		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	435.740.000,00	427.277.623,00	(8.462.377,00)	98,06		
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	435.740.000,00	427.277.623,00	(8.462.377,00)	98,06		
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	435.740.000,00	427.277.623,00	(8.462.377,00)	98,06		
03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	350.000.000,00	345.955.800,00	(4.044.200,00)	98,84		
03.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	163.912.000,00	161.055.800,00	(2.856.200,00)	98,26		
03.2.02.04.5.1.01	Belanja Pegawai	830.000,00	830.000,00	0,00	100,00		
03.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	163.082.000,00	160.225.800,00	(2.856.200,00)	98,25		
03.2.02.04.5.2	BELANJA MODAL	186.088.000,00	184.900.000,00	(1.188.000,00)	99,36		
03.2.02.04.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	186.088.000,00	184.900.000,00	(1.188.000,00)	99,36		
03.2.02.05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	50.000.000,00	49.432.700,00	(567.300,00)	98,87		
03.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	49.432.700,00	(567.300,00)	98,87		
03.2.02.05.5.1.01	Belanja Pegawai	390.000,00	390.000,00	0,00	100,00		
03.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.610.000,00	49.042.700,00	(567.300,00)	98,86		
03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	400.000.000,00	397.789.125,00	(2.210.875,00)	99,45		
03.2.02.06.5.1	BELANJA OPERASI	400.000.000,00	397.789.125,00	(2.210.875,00)	99,45		
03.2.02.06.5.1.01	Belanja Pegawai	453.000,00	452.500,00	(500,00)	99,89		
03.2.02.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	399.547.000,00	397.336.625,00	(2.210.375,00)	99,45		
03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	100.000.000,00	99.409.900,00	(590.100,00)	99,41		
03.2.02.08.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	99.409.900,00	(590.100,00)	99,41		
03.2.02.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	99.409.900,00	(590.100,00)	99,41		
03.2.02.10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	200.000.000,00	199.490.200,00	(509.800,00)	99,75		
03.2.02.10.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	199.490.200,00	(509.800,00)	99,75		
03.2.02.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	199.490.200,00	(509.800,00)	99,75		
03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	2.329.237.000,00	2.167.282.545,00	(161.954.455,00)	93,05		
03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	2.029.237.000,00	1.993.671.156,00	(35.565.844,00)	98,25		
03.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	2.029.237.000,00	1.993.671.156,00	(35.565.844,00)	98,25		
03.2.03.02.5.1.01	Belanja Pegawai	6.985.000,00	5.250.000,00	(1.735.000,00)	75,16		
03.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.022.252.000,00	1.988.421.156,00	(33.830.844,00)	98,33		
03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	200.000.000,00	73.739.989,00	(126.260.011,00)	36,87		
03.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	73.739.989,00	(126.260.011,00)	36,87		
03.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	73.739.989,00	(126.260.011,00)	36,87		
03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100.000.000,00	99.871.400,00	(128.600,00)	99,87		
03.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	99.871.400,00	(128.600,00)	99,87		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	99.871.400,00	(128.600,00)	99,87		
03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	964.500.000,00	946.428.671,00	(18.071.329,00)	98,13		
03.2.04.02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	75.000.000,00	72.915.900,00	(2.084.100,00)	97,22		
03.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	75.000.000,00	72.915.900,00	(2.084.100,00)	97,22		
03.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	72.915.900,00	(2.084.100,00)	97,22		
03.2.04.03	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	75.000.000,00	74.787.700,00	(212.300,00)	99,72		
03.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	75.000.000,00	74.787.700,00	(212.300,00)	99,72		
03.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	74.787.700,00	(212.300,00)	99,72		
03.2.04.06	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	814.500.000,00	798.725.071,00	(15.774.929,00)	98,06		
03.2.04.06.5.1	BELANJA OPERASI	814.500.000,00	798.725.071,00	(15.774.929,00)	98,06		
03.2.04.06.5.1.01	Belanja Pegawai	5.530.000,00	5.530.000,00	0,00	100,00		
03.2.04.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	808.970.000,00	793.195.071,00	(15.774.929,00)	98,05		
	SURPLUS / DEFISIT	(9.338.183.284,00)	(9.013.452.776,00)	324.730.508,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(9.338.183.284,00)	(9.013.452.776,00)	324.730.508,00	0		





PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1.06 SOSIAL

SKPD : 1-06.2-08.0-00.01 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	11.665.670.000,00	11.222.169.248,00	(443.500.752,00)	96,20		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.554.504.000,00	4.241.248.848,00	(313.255.152,00)	93,12		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	87.108.000,00	85.971.500,00	(1.136.500,00)	98,70		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	67.108.000,00	66.874.800,00	(233.200,00)	99,65		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	67.108.000,00	66.874.800,00	(233.200,00)	99,65		
01.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	100,00		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.088.000,00	64.854.800,00	(233.200,00)	99,64		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000,00	19.096.700,00	(903.300,00)	95,48		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	19.096.700,00	(903.300,00)	95,48		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.096.700,00	(903.300,00)	95,48		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.563.650.000,00	3.267.437.783,00	(296.212.217,00)	91,69		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.476.413.000,00	3.180.383.071,00	(296.029.929,00)	91,48		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.476.413.000,00	3.180.383.071,00	(296.029.929,00)	91,48		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	3.476.413.000,00	3.180.383.071,00	(296.029.929,00)	91,48		
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	87.237.000,00	87.054.712,00	(182.288,00)	99,79		
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	87.237.000,00	87.054.712,00	(182.288,00)	99,79		
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.637.000,00	62.454.712,00	(182.288,00)	99,71		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	48.904.000,00	48.902.000,00	(2.000,00)	100,00		
01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	48.904.000,00	48.902.000,00	(2.000,00)	100,00		
01.2.05.11.5.1	BELANJA OPERASI	48.904.000,00	48.902.000,00	(2.000,00)	100,00		
01.2.05.11.5.1.01	Belanja Pegawai	3.220.000,00	3.220.000,00	0,00	100,00		
01.2.05.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.684.000,00	45.682.000,00	(2.000,00)	100,00		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	187.463.000,00	187.395.076,00	(67.924,00)	99,96		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.200.000,00	7.185.900,00	(14.100,00)	99,80		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	7.200.000,00	7.185.900,00	(14.100,00)	99,80		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	7.185.900,00	(14.100,00)	99,80		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.673.000,00	49.663.900,00	(9.100,00)	99,98		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	49.673.000,00	49.663.900,00	(9.100,00)	99,98		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.673.000,00	49.663.900,00	(9.100,00)	99,98		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.140.000,00	19.140.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	19.140.000,00	19.140.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.140.000,00	19.140.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.000.000,00	1.982.500,00	(17.500,00)	99,13		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	1.982.500,00	(17.500,00)	99,13		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.982.500,00	(17.500,00)	99,13		
01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	25.270.000,00	25.247.400,00	(22.600,00)	99,91		
01.2.06.07.5.1	BELANJA OPERASI	25.270.000,00	25.247.400,00	(22.600,00)	99,91		
01.2.06.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.270.000,00	25.247.400,00	(22.600,00)	99,91		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	58.776.000,00	58.773.876,00	(2.124,00)	100,00		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	58.776.000,00	58.773.876,00	(2.124,00)	100,00		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.776.000,00	58.773.876,00	(2.124,00)	100,00		
01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	25.404.000,00	25.401.500,00	(2.500,00)	99,99		
01.2.06.10.5.1	BELANJA OPERASI	22.733.000,00	22.730.500,00	(2.500,00)	99,99		
01.2.06.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.733.000,00	22.730.500,00	(2.500,00)	99,99		
01.2.06.10.5.2	BELANJA MODAL	2.671.000,00	2.671.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.10.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.671.000,00	2.671.000,00	0,00	100,00		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	74.131.000,00	73.925.000,00	(206.000,00)	99,72		
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	74.131.000,00	73.925.000,00	(206.000,00)	99,72		
01.2.07.06.5.1	BELANJA OPERASI	565.000,00	565.000,00	0,00	100,00		
01.2.07.06.5.1.01	Belanja Pegawai	565.000,00	565.000,00	0,00	100,00		
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	73.566.000,00	73.360.000,00	(206.000,00)	99,72		
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	73.566.000,00	73.360.000,00	(206.000,00)	99,72		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	249.680.000,00	237.809.463,00	(11.870.537,00)	95,25		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.079.000,00	2.071.400,00	(7.600,00)	99,63		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.079.000,00	2.071.400,00	(7.600,00)	99,63		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.079.000,00	2.071.400,00	(7.600,00)	99,63		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	142.925.000,00	131.640.663,00	(11.284.337,00)	92,10		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	142.925.000,00	131.640.663,00	(11.284.337,00)	92,10		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	142.925.000,00	131.640.663,00	(11.284.337,00)	92,10		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	104.676.000,00	104.097.400,00	(578.600,00)	99,45		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	104.676.000,00	104.097.400,00	(578.600,00)	99,45		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.676.000,00	104.097.400,00	(578.600,00)	99,45		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	343.568.000,00	339.808.026,00	(3.759.974,00)	98,91		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	144.042.000,00	140.370.826,00	(3.671.174,00)	97,45		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	144.042.000,00	140.370.826,00	(3.671.174,00)	97,45		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	144.042.000,00	140.370.826,00	(3.671.174,00)	97,45		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.526.000,00	24.468.400,00	(57.600,00)	99,77		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	24.526.000,00	24.468.400,00	(57.600,00)	99,77		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.526.000,00	24.468.400,00	(57.600,00)	99,77		
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	175.000.000,00	174.968.800,00	(31.200,00)	99,98		
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	175.000.000,00	174.968.800,00	(31.200,00)	99,98		
01.2.09.09.5.1.01	Belanja Pegawai	665.000,00	665.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	174.335.000,00	174.303.800,00	(31.200,00)	99,98		
02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	38.030.000,00	37.674.020,00	(355.980,00)	99,06		
02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	38.030.000,00	37.674.020,00	(355.980,00)	99,06		
02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	28.030.000,00	27.915.800,00	(114.200,00)	99,59		
02.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	28.030.000,00	27.915.800,00	(114.200,00)	99,59		
02.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.030.000,00	27.915.800,00	(114.200,00)	99,59		
02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	10.000.000,00	9.758.220,00	(241.780,00)	97,58		
02.2.03.05.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.758.220,00	(241.780,00)	97,58		
02.2.03.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.758.220,00	(241.780,00)	97,58		
02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	592.281.000,00	589.977.195,00	(2.303.805,00)	99,61		
02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	71.385.000,00	71.060.450,00	(324.550,00)	99,55		
02.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	71.385.000,00	71.060.450,00	(324.550,00)	99,55		
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	71.385.000,00	71.060.450,00	(324.550,00)	99,55		
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.385.000,00	71.060.450,00	(324.550,00)	99,55		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	520.896.000,00	518.916.745,00	(1.979.255,00)	99,62		
02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	520.896.000,00	518.916.745,00	(1.979.255,00)	99,62		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	520.896.000,00	518.916.745,00	(1.979.255,00)	99,62		
02.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	3.820.000,00	3.820.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	442.076.000,00	440.096.745,00	(1.979.255,00)	99,55		
02.2.02.02.5.1.05	Belanja Hibah	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	100,00		
03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	3.384.000,00	3.237.350,00	(146.650,00)	95,67		
03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	3.384.000,00	3.237.350,00	(146.650,00)	95,67		
03.2.01.01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	3.384.000,00	3.237.350,00	(146.650,00)	95,67		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.384.000,00	3.237.350,00	(146.650,00)	95,67		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.384.000,00	3.237.350,00	(146.650,00)	95,67		
03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	141.840.000,00	139.640.250,00	(2.199.750,00)	98,45		
03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	70.000.000,00	68.984.000,00	(1.016.000,00)	98,55		
03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	70.000.000,00	68.984.000,00	(1.016.000,00)	98,55		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	70.000.000,00	68.984.000,00	(1.016.000,00)	98,55		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	68.984.000,00	(1.016.000,00)	98,55		
03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	71.840.000,00	70.656.250,00	(1.183.750,00)	98,35		
03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	31.840.000,00	31.665.300,00	(174.700,00)	99,45		
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	31.840.000,00	31.665.300,00	(174.700,00)	99,45		
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.840.000,00	31.665.300,00	(174.700,00)	99,45		
03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	40.000.000,00	38.990.950,00	(1.009.050,00)	97,48		
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	38.990.950,00	(1.009.050,00)	97,48		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	38.990.950,00	(1.009.050,00)	97,48		
04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.833.139.000,00	1.827.901.786,00	(5.237.214,00)	99,71		
04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.293.253.000,00	1.289.746.350,00	(3.506.650,00)	99,73		
04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	844.145.000,00	842.637.262,00	(1.507.738,00)	99,82		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	844.145.000,00	842.637.262,00	(1.507.738,00)	99,82		
04.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.617.000,00	60.009.262,00	(607.738,00)	99,00		
04.2.01.01.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	778.878.000,00	777.978.000,00	(900.000,00)	99,88		
04.2.01.02	Penyediaan Sandang	90.000.000,00	88.825.275,00	(1.174.725,00)	98,69		
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	90.000.000,00	88.825.275,00	(1.174.725,00)	98,69		
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.926.000,00	20.779.775,00	(146.225,00)	99,30		
04.2.01.02.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	69.074.000,00	68.045.500,00	(1.028.500,00)	98,51		
04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	112.108.000,00	111.470.273,00	(637.727,00)	99,43		
04.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	112.108.000,00	111.470.273,00	(637.727,00)	99,43		
04.2.01.03.5.1.01	Belanja Pegawai	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.284.000,00	60.220.300,00	(63.700,00)	99,89		
04.2.01.03.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	51.774.000,00	51.199.973,00	(574.027,00)	98,89		
04.2.01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	190.000.000,00	189.943.640,00	(56.360,00)	99,97		
04.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	190.000.000,00	189.943.640,00	(56.360,00)	99,97		
04.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	7.943.640,00	(56.360,00)	99,30		
04.2.01.08.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	182.000.000,00	182.000.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	37.000.000,00	36.927.800,00	(72.200,00)	99,80		
04.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	37.000.000,00	36.927.800,00	(72.200,00)	99,80		
04.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.000.000,00	36.927.800,00	(72.200,00)	99,80		
04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	20.000.000,00	19.942.100,00	(57.900,00)	99,71		
04.2.01.10.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	19.942.100,00	(57.900,00)	99,71		
04.2.01.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.942.100,00	(57.900,00)	99,71		
04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	539.886.000,00	538.155.436,00	(1.730.564,00)	99,68		
04.2.02.01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00		
04.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00		
04.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00		
04.2.02.03	Penyediaan Permakanan	275.000.000,00	274.066.436,00	(933.564,00)	99,66		
04.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	275.000.000,00	274.066.436,00	(933.564,00)	99,66		
04.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	216.920.000,00	216.466.436,00	(453.564,00)	99,79		
04.2.02.03.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	58.080.000,00	57.600.000,00	(480.000,00)	99,17		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
04.2.02.04	Penyediaan Sandang	40.000.000,00	39.771.500,00	(228.500,00)	99,43		
04.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	39.771.500,00	(228.500,00)	99,43		
04.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	39.771.500,00	(228.500,00)	99,43		
04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	164.886.000,00	164.485.000,00	(401.000,00)	99,76		
04.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	156.955.000,00	156.554.000,00	(401.000,00)	99,74		
04.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	156.955.000,00	156.554.000,00	(401.000,00)	99,74		
04.2.02.07.5.2	BELANJA MODAL	7.931.000,00	7.931.000,00	0,00	100,00		
04.2.02.07.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.931.000,00	7.931.000,00	0,00	100,00		
04.2.02.14	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	40.000.000,00	39.832.500,00	(167.500,00)	99,58		
04.2.02.14.5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	39.832.500,00	(167.500,00)	99,58		
04.2.02.14.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	39.832.500,00	(167.500,00)	99,58		
04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	30.644.000,00	30.209.000,00	(435.000,00)	98,58		
04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.644.000,00	30.209.000,00	(435.000,00)	98,58		
04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30.644.000,00	30.209.000,00	(435.000,00)	98,58		
04.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	30.644.000,00	30.209.000,00	(435.000,00)	98,58		
04.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.644.000,00	30.209.000,00	(435.000,00)	98,58		
05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	3.240.994.000,00	3.136.613.405,00	(104.380.595,00)	96,78		
05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	3.240.994.000,00	3.136.613.405,00	(104.380.595,00)	96,78		
05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	212.118.000,00	210.618.029,00	(1.499.971,00)	99,29		
05.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	212.118.000,00	210.618.029,00	(1.499.971,00)	99,29		
05.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	2.115.000,00	2.115.000,00	0,00	100,00		
05.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	210.003.000,00	208.503.029,00	(1.499.971,00)	99,29		
05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	3.028.876.000,00	2.925.995.376,00	(102.880.624,00)	96,60		
05.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	3.028.876.000,00	2.925.995.376,00	(102.880.624,00)	96,60		
05.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	3.885.000,00	3.885.000,00	0,00	100,00		
05.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	335.791.000,00	327.110.376,00	(8.680.624,00)	97,41		
05.2.02.03.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.689.200.000,00	2.595.000.000,00	(94.200.000,00)	96,50		
05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	31.996.000,00	31.951.000,00	(45.000,00)	99,86		
05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	31.996.000,00	31.951.000,00	(45.000,00)	99,86		
05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	31.996.000,00	31.951.000,00	(45.000,00)	99,86		
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	31.996.000,00	31.951.000,00	(45.000,00)	99,86		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.996.000,00	31.951.000,00	(45.000,00)	99,86		
06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	779.335.000,00	772.104.610,00	(7.230.390,00)	99,07		
06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	638.276.000,00	631.760.559,00	(6.515.441,00)	98,98		
06.2.01.01	Penyediaan Makanan	206.336.000,00	205.750.311,00	(585.689,00)	99,72		
06.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	206.336.000,00	205.750.311,00	(585.689,00)	99,72		
06.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	415.000,00	415.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	205.921.000,00	205.335.311,00	(585.689,00)	99,72		
06.2.01.02	Penyediaan Sandang	90.760.000,00	89.880.250,00	(879.750,00)	99,03		
06.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	90.760.000,00	89.880.250,00	(879.750,00)	99,03		
06.2.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	415.000,00	415.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.345.000,00	89.465.250,00	(879.750,00)	99,03		
06.2.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	169.874.000,00	166.296.865,00	(3.577.135,00)	97,89		
06.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	165.419.000,00	161.918.565,00	(3.500.435,00)	97,88		
06.2.01.03.5.1.01	Belanja Pegawai	3.635.000,00	3.635.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	161.784.000,00	158.283.565,00	(3.500.435,00)	97,84		
06.2.01.03.5.2	BELANJA MODAL	4.455.000,00	4.378.300,00	(76.700,00)	98,28		
06.2.01.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.455.000,00	4.378.300,00	(76.700,00)	98,28		
06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	126.790.000,00	125.426.500,00	(1.363.500,00)	98,92		
06.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	126.790.000,00	125.426.500,00	(1.363.500,00)	98,92		
06.2.01.04.5.1.01	Belanja Pegawai	415.000,00	415.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.375.000,00	125.011.500,00	(1.363.500,00)	98,92		
06.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	44.516.000,00	44.406.633,00	(109.367,00)	99,75		
06.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	44.516.000,00	44.406.633,00	(109.367,00)	99,75		
06.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.516.000,00	44.406.633,00	(109.367,00)	99,75		
06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	141.059.000,00	140.344.051,00	(714.949,00)	99,49		
06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	43.028.000,00	42.617.951,00	(410.049,00)	99,05		
06.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	43.028.000,00	42.617.951,00	(410.049,00)	99,05		
06.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.028.000,00	42.617.951,00	(410.049,00)	99,05		
06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	98.031.000,00	97.726.100,00	(304.900,00)	99,69		
06.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	98.031.000,00	97.726.100,00	(304.900,00)	99,69		
06.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.031.000,00	97.726.100,00	(304.900,00)	99,69		
06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	142.622.000,00	140.637.600,00	(1.984.400,00)	98,61		
06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	74.932.000,00	73.469.800,00	(1.462.200,00)	98,05		
06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	74.932.000,00	73.469.800,00	(1.462.200,00)	98,05		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
06.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	74.932.000,00	73.469.800,00	(1.462.200,00)	98,05		
06.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.932.000,00	73.469.800,00	(1.462.200,00)	98,05		
06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	67.690.000,00	67.167.800,00	(522.200,00)	99,23		
06.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	67.690.000,00	67.167.800,00	(522.200,00)	99,23		
06.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	67.690.000,00	67.167.800,00	(522.200,00)	99,23		
06.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.690.000,00	67.167.800,00	(522.200,00)	99,23		
07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	100,00		
07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	100,00		
07.2.01.03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	100,00		
07.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	100,00		
07.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	100,00		
07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	262.701.000,00	256.774.184,00	(5.926.816,00)	97,74		
07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000,00	74.700.254,00	(299.746,00)	99,60		
07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	75.000.000,00	74.700.254,00	(299.746,00)	99,60		
07.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	75.000.000,00	74.700.254,00	(299.746,00)	99,60		
07.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	74.700.254,00	(299.746,00)	99,60		
07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	107.201.000,00	102.333.076,00	(4.867.924,00)	95,46		
07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	49.201.000,00	48.787.900,00	(413.100,00)	99,16		
07.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	49.201.000,00	48.787.900,00	(413.100,00)	99,16		
07.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.201.000,00	48.787.900,00	(413.100,00)	99,16		
07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	58.000.000,00	53.545.176,00	(4.454.824,00)	92,32		
07.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	58.000.000,00	53.545.176,00	(4.454.824,00)	92,32		
07.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.000.000,00	53.545.176,00	(4.454.824,00)	92,32		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	80.500.000,00	79.740.854,00	(759.146,00)	99,06		
07.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	80.500.000,00	79.740.854,00	(759.146,00)	99,06		
07.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	80.500.000,00	79.740.854,00	(759.146,00)	99,06		
07.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.500.000,00	79.740.854,00	(759.146,00)	99,06		
	SURPLUS / DEFISIT	(11.665.670.000,00)	(11.222.169.248,00)	443.500.752,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(11.665.670.000,00)	(11.222.169.248,00)	443.500.752,00	0		





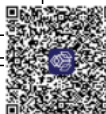
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 2.09 PANGAN

SKPD : 2-09.3-27.0-00.01 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	815.000.000,00	791.567.500,00	(23.432.500,00)	97,12		
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	815.000.000,00	791.567.500,00	(23.432.500,00)	97,12		
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	115.000.000,00	117.557.500,00	2.557.500,00	102,22		
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	700.000.000,00	674.010.000,00	(25.990.000,00)	96,29		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	53.180.962.053,00	50.385.172.862,00	(2.795.789.191,00)	94,74		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.777.974.000,00	18.420.820.022,00	(357.153.978,00)	98,10		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	172.695.000,00	162.069.015,00	(10.625.985,00)	93,85		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.602.000,00	48.847.700,00	(1.754.300,00)	96,53		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	50.602.000,00	48.847.700,00	(1.754.300,00)	96,53		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.602.000,00	48.847.700,00	(1.754.300,00)	96,53		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	122.093.000,00	113.221.315,00	(8.871.685,00)	92,73		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	122.093.000,00	113.221.315,00	(8.871.685,00)	92,73		
01.2.01.07.5.1.01	Belanja Pegawai	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00	100,00		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	119.673.000,00	110.801.315,00	(8.871.685,00)	92,59		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.459.705.000,00	17.128.717.845,00	(330.987.155,00)	98,10		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.339.376.000,00	17.010.027.445,00	(329.348.555,00)	98,10		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	17.339.376.000,00	17.010.027.445,00	(329.348.555,00)	98,10		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	17.339.376.000,00	17.010.027.445,00	(329.348.555,00)	98,10		
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	120.329.000,00	118.690.400,00	(1.638.600,00)	98,64		
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	120.329.000,00	118.690.400,00	(1.638.600,00)	98,64		
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	24.440.000,00	22.820.000,00	(1.620.000,00)	93,37		
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.889.000,00	95.870.400,00	(18.600,00)	99,98		
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.200.000,00	6.997.100,00	(202.900,00)	97,18		
01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.200.000,00	6.997.100,00	(202.900,00)	97,18		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	7.200.000,00	6.997.100,00	(202.900,00)	97,18		
01.2.03.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	6.997.100,00	(202.900,00)	97,18		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	82.230.000,00	82.041.600,00	(188.400,00)	99,77		
01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	82.230.000,00	82.041.600,00	(188.400,00)	99,77		
01.2.05.09.5.1	BELANJA OPERASI	82.230.000,00	82.041.600,00	(188.400,00)	99,77		
01.2.05.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.230.000,00	82.041.600,00	(188.400,00)	99,77		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	188.356.000,00	185.230.021,00	(3.125.979,00)	98,34		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.928.000,00	4.925.100,00	(2.900,00)	99,94		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.928.000,00	4.925.100,00	(2.900,00)	99,94		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.928.000,00	4.925.100,00	(2.900,00)	99,94		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	44.608.000,00	44.444.000,00	(164.000,00)	99,63		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	44.608.000,00	44.444.000,00	(164.000,00)	99,63		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.608.000,00	44.444.000,00	(164.000,00)	99,63		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.900.000,00	9.899.900,00	(100,00)	100,00		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	9.900.000,00	9.899.900,00	(100,00)	100,00		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.900.000,00	9.899.900,00	(100,00)	100,00		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.720.000,00	5.640.000,00	(80.000,00)	98,60		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	5.720.000,00	5.640.000,00	(80.000,00)	98,60		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.720.000,00	5.640.000,00	(80.000,00)	98,60		
01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	35.200.000,00	33.412.600,00	(1.787.400,00)	94,92		
01.2.06.07.5.1	BELANJA OPERASI	35.200.000,00	33.412.600,00	(1.787.400,00)	94,92		
01.2.06.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.200.000,00	33.412.600,00	(1.787.400,00)	94,92		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80.000.000,00	79.026.021,00	(973.979,00)	98,78		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	80.000.000,00	79.026.021,00	(973.979,00)	98,78		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	79.026.021,00	(973.979,00)	98,78		
01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8.000.000,00	7.882.400,00	(117.600,00)	98,53		
01.2.06.10.5.1	BELANJA OPERASI	8.000.000,00	7.882.400,00	(117.600,00)	98,53		
01.2.06.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	7.882.400,00	(117.600,00)	98,53		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	211.202.000,00	208.825.000,00	(2.377.000,00)	98,87		
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	152.688.000,00	150.825.000,00	(1.863.000,00)	98,78		
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	152.688.000,00	150.825.000,00	(1.863.000,00)	98,78		
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	152.688.000,00	150.825.000,00	(1.863.000,00)	98,78		
01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	58.514.000,00	58.000.000,00	(514.000,00)	99,12		
01.2.07.10.5.2	BELANJA MODAL	58.514.000,00	58.000.000,00	(514.000,00)	99,12		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.07.10.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	58.514.000,00	58.000.000,00	(514.000,00)	99,12		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	267.246.000,00	259.417.017,00	(7.828.983,00)	97,07		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.496.000,00	1.494.500,00	(1.500,00)	99,90		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.496.000,00	1.494.500,00	(1.500,00)	99,90		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.496.000,00	1.494.500,00	(1.500,00)	99,90		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	183.400.000,00	176.140.517,00	(7.259.483,00)	96,04		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	183.400.000,00	176.140.517,00	(7.259.483,00)	96,04		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	183.400.000,00	176.140.517,00	(7.259.483,00)	96,04		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	82.350.000,00	81.782.000,00	(568.000,00)	99,31		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	82.350.000,00	81.782.000,00	(568.000,00)	99,31		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.350.000,00	81.782.000,00	(568.000,00)	99,31		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	389.340.000,00	387.522.424,00	(1.817.576,00)	99,53		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	115.340.000,00	115.289.424,00	(50.576,00)	99,96		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	115.340.000,00	115.289.424,00	(50.576,00)	99,96		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.340.000,00	115.289.424,00	(50.576,00)	99,96		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	246.400.000,00	244.633.000,00	(1.767.000,00)	99,28		
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	246.400.000,00	244.633.000,00	(1.767.000,00)	99,28		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	246.400.000,00	244.633.000,00	(1.767.000,00)	99,28		
02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	40.000.000,00	39.661.300,00	(338.700,00)	99,15		
02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000,00	39.661.300,00	(338.700,00)	99,15		
02.2.01.01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	40.000.000,00	39.661.300,00	(338.700,00)	99,15		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	39.661.300,00	(338.700,00)	99,15		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	39.661.300,00	(338.700,00)	99,15		
02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	15.149.436.000,00	13.243.058.961,00	(1.906.377.039,00)	87,42		
02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	5.727.375.000,00	5.441.431.892,00	(285.943.108,00)	95,01		
02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	5.664.175.000,00	5.381.654.540,00	(282.520.460,00)	95,01		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	5.496.216.000,00	5.218.165.940,00	(278.050.060,00)	94,94		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	28.770.000,00	26.885.000,00	(1.885.000,00)	93,45		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	231.775.000,00	212.840.740,00	(18.934.260,00)	91,83		
02.2.01.01.5.1.05	Belanja Hibah	5.235.671.000,00	4.978.440.200,00	(257.230.800,00)	95,09		
02.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	167.959.000,00	163.488.600,00	(4.470.400,00)	97,34		
02.2.01.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	167.959.000,00	163.488.600,00	(4.470.400,00)	97,34		
02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	63.200.000,00	59.777.352,00	(3.422.648,00)	94,58		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	63.200.000,00	59.777.352,00	(3.422.648,00)	94,58		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.200.000,00	59.777.352,00	(3.422.648,00)	94,58		
02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	9.072.212.000,00	7.456.503.519,00	(1.615.708.481,00)	82,19		
02.2.02.01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	147.166.000,00	137.421.900,00	(9.744.100,00)	93,38		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	147.166.000,00	137.421.900,00	(9.744.100,00)	93,38		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	147.166.000,00	137.421.900,00	(9.744.100,00)	93,38		
02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	8.442.397.000,00	6.853.393.950,00	(1.589.003.050,00)	81,18		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	8.442.397.000,00	6.853.393.950,00	(1.589.003.050,00)	81,18		
02.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	39.025.000,00	15.252.500,00	(23.772.500,00)	39,08		
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.184.967.000,00	1.077.846.550,00	(107.120.450,00)	90,96		
02.2.02.02.5.1.05	Belanja Hibah	7.218.405.000,00	5.760.294.900,00	(1.458.110.100,00)	79,80		
02.2.02.03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	482.649.000,00	465.687.669,00	(16.961.331,00)	96,49		
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	448.449.000,00	437.487.669,00	(10.961.331,00)	97,56		
02.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	780.000,00	780.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	376.323.000,00	368.942.669,00	(7.380.331,00)	98,04		
02.2.02.03.5.1.05	Belanja Hibah	71.346.000,00	67.765.000,00	(3.581.000,00)	94,98		
02.2.02.03.5.2	BELANJA MODAL	34.200.000,00	28.200.000,00	(6.000.000,00)	82,46		
02.2.02.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.200.000,00	28.200.000,00	(6.000.000,00)	82,46		
02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	178.813.000,00	175.061.550,00	(3.751.450,00)	97,90		
02.2.03.01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	178.813.000,00	175.061.550,00	(3.751.450,00)	97,90		
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	178.813.000,00	175.061.550,00	(3.751.450,00)	97,90		
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	178.813.000,00	175.061.550,00	(3.751.450,00)	97,90		
02.2.04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	20.380.000,00	20.359.800,00	(20.200,00)	99,90		
02.2.04.01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	20.380.000,00	20.359.800,00	(20.200,00)	99,90		
02.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	20.380.000,00	20.359.800,00	(20.200,00)	99,90		
02.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.380.000,00	20.359.800,00	(20.200,00)	99,90		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	150.656.000,00	149.702.200,00	(953.800,00)	99,37		
02.2.05.01	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	111.716.000,00	110.846.900,00	(869.100,00)	99,22		
02.2.05.01.5.1	BELANJA OPERASI	111.716.000,00	110.846.900,00	(869.100,00)	99,22		
02.2.05.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.716.000,00	110.846.900,00	(869.100,00)	99,22		
02.2.05.03	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	38.940.000,00	38.855.300,00	(84.700,00)	99,78		
02.2.05.03.5.1	BELANJA OPERASI	38.940.000,00	38.855.300,00	(84.700,00)	99,78		
02.2.05.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.940.000,00	38.855.300,00	(84.700,00)	99,78		
03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	662.381.000,00	656.389.787,00	(5.991.213,00)	99,10		
03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	171.932.000,00	170.443.212,00	(1.488.788,00)	99,13		
03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	72.000.000,00	71.105.300,00	(894.700,00)	98,76		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	72.000.000,00	71.105.300,00	(894.700,00)	98,76		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.000.000,00	71.105.300,00	(894.700,00)	98,76		
03.2.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	99.932.000,00	99.337.912,00	(594.088,00)	99,41		
03.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	99.932.000,00	99.337.912,00	(594.088,00)	99,41		
03.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.932.000,00	99.337.912,00	(594.088,00)	99,41		
03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	244.883.000,00	242.611.975,00	(2.271.025,00)	99,07		
03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	244.883.000,00	242.611.975,00	(2.271.025,00)	99,07		
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	244.883.000,00	242.611.975,00	(2.271.025,00)	99,07		
03.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	740.000,00	740.000,00	0,00	100,00		
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	244.143.000,00	241.871.975,00	(2.271.025,00)	99,07		
03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	245.566.000,00	243.334.600,00	(2.231.400,00)	99,09		
03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	245.566.000,00	243.334.600,00	(2.231.400,00)	99,09		
03.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	245.566.000,00	243.334.600,00	(2.231.400,00)	99,09		
03.2.04.02.5.1.01	Belanja Pegawai	740.000,00	740.000,00	0,00	100,00		
03.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	137.102.000,00	135.658.600,00	(1.443.400,00)	98,95		
03.2.04.02.5.1.05	Belanja Hibah	107.724.000,00	106.936.000,00	(788.000,00)	99,27		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	12.264.532.053,00	11.930.652.125,00	(333.879.928,00)	97,28		
03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	1.586.993.053,00	1.450.480.885,00	(136.512.168,00)	91,40		
03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1.586.993.053,00	1.450.480.885,00	(136.512.168,00)	91,40		
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.586.993.053,00	1.450.480.885,00	(136.512.168,00)	91,40		
03.2.01.03.5.1.01	Belanja Pegawai	9.592.500,00	4.997.500,00	(4.595.000,00)	52,10		
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.577.400.553,00	1.445.483.385,00	(131.917.168,00)	91,64		
03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	5.173.769.000,00	5.105.885.896,00	(67.883.104,00)	98,69		
03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	763.535.000,00	760.055.100,00	(3.479.900,00)	99,54		
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	763.535.000,00	760.055.100,00	(3.479.900,00)	99,54		
03.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	4.130.000,00	4.130.000,00	0,00	100,00		
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.105.000,00	69.002.100,00	(1.102.900,00)	98,43		
03.2.02.01.5.1.05	Belanja Hibah	689.300.000,00	686.923.000,00	(2.377.000,00)	99,66		
03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	2.563.000.000,00	2.528.587.096,00	(34.412.904,00)	98,66		
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	2.563.000.000,00	2.528.587.096,00	(34.412.904,00)	98,66		
03.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	16.885.000,00	16.885.000,00	0,00	100,00		
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	131.426.000,00	128.846.700,00	(2.579.300,00)	98,04		
03.2.02.03.5.1.05	Belanja Hibah	2.414.689.000,00	2.382.855.396,00	(31.833.604,00)	98,68		
03.2.02.07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	652.889.000,00	631.272.600,00	(21.616.400,00)	96,69		
03.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	201.038.000,00	191.807.600,00	(9.230.400,00)	95,41		
03.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	201.038.000,00	191.807.600,00	(9.230.400,00)	95,41		
03.2.02.07.5.2	BELANJA MODAL	451.851.000,00	439.465.000,00	(12.386.000,00)	97,26		
03.2.02.07.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60.742.000,00	55.612.000,00	(5.130.000,00)	91,55		
03.2.02.07.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	391.109.000,00	383.853.000,00	(7.256.000,00)	98,14		
03.2.02.08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	428.345.000,00	424.087.600,00	(4.257.400,00)	99,01		
03.2.02.08.5.1	BELANJA OPERASI	2.369.000,00	2.346.100,00	(22.900,00)	99,03		
03.2.02.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.369.000,00	2.346.100,00	(22.900,00)	99,03		
03.2.02.08.5.2	BELANJA MODAL	425.976.000,00	421.741.500,00	(4.234.500,00)	99,01		
03.2.02.08.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	67.284.000,00	66.900.000,00	(384.000,00)	99,43		
03.2.02.08.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	358.692.000,00	354.841.500,00	(3.850.500,00)	98,93		
03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	766.000.000,00	761.883.500,00	(4.116.500,00)	99,46		
03.2.02.09.5.1	BELANJA OPERASI	766.000.000,00	761.883.500,00	(4.116.500,00)	99,46		
03.2.02.09.5.1.01	Belanja Pegawai	5.245.000,00	4.707.500,00	(537.500,00)	89,75		
03.2.02.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.796.000,00	54.467.000,00	(1.329.000,00)	97,62		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.02.09.5.1.05	Belanja Hibah	704.959.000,00	702.709.000,00	(2.250.000,00)	99,68		
03.2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	5.503.770.000,00	5.374.285.344,00	(129.484.656,00)	97,65		
03.2.03.01	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	5.503.770.000,00	5.374.285.344,00	(129.484.656,00)	97,65		
03.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	5.413.105.000,00	5.283.643.744,00	(129.461.256,00)	97,61		
03.2.03.01.5.1.01	Belanja Pegawai	11.215.000,00	11.215.000,00	0,00	100,00		
03.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.189.230.000,00	1.158.794.700,00	(30.435.300,00)	97,44		
03.2.03.01.5.1.05	Belanja Hibah	4.212.660.000,00	4.113.634.044,00	(99.025.956,00)	97,65		
03.2.03.01.5.2	BELANJA MODAL	90.665.000,00	90.641.600,00	(23.400,00)	99,97		
03.2.03.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	90.665.000,00	90.641.600,00	(23.400,00)	99,97		
04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	1.094.537.000,00	1.087.099.670,00	(7.437.330,00)	99,32		
04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	14.400.000,00	13.996.600,00	(403.400,00)	97,20		
04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	14.400.000,00	13.996.600,00	(403.400,00)	97,20		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	14.400.000,00	13.996.600,00	(403.400,00)	97,20		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	13.996.600,00	(403.400,00)	97,20		
04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.080.137.000,00	1.073.103.070,00	(7.033.930,00)	99,35		
04.2.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.080.137.000,00	1.073.103.070,00	(7.033.930,00)	99,35		
04.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.080.137.000,00	1.073.103.070,00	(7.033.930,00)	99,35		
04.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	6.578.000,00	6.577.500,00	(500,00)	99,99		
04.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.909.000,00	133.473.070,00	(1.435.930,00)	98,94		
04.2.02.02.5.1.05	Belanja Hibah	938.650.000,00	933.052.500,00	(5.597.500,00)	99,40		
04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	2.019.714.000,00	1.969.164.086,00	(50.549.914,00)	97,50		
04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	457.032.000,00	446.020.686,00	(11.011.314,00)	97,59		
04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	457.032.000,00	446.020.686,00	(11.011.314,00)	97,59		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	305.984.900,00	299.015.686,00	(6.969.214,00)	97,72		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	305.984.900,00	299.015.686,00	(6.969.214,00)	97,72		
04.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	151.047.100,00	147.005.000,00	(4.042.100,00)	97,32		
04.2.01.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	151.047.100,00	147.005.000,00	(4.042.100,00)	97,32		
04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	163.648.000,00	147.050.900,00	(16.597.100,00)	89,86		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
04.2.02.01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	135.408.000,00	118.853.100,00	(16.554.900,00)	87,77		
04.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	135.408.000,00	118.853.100,00	(16.554.900,00)	87,77		
04.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.408.000,00	118.853.100,00	(16.554.900,00)	87,77		
04.2.02.02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	28.240.000,00	28.197.800,00	(42.200,00)	99,85		
04.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	28.240.000,00	28.197.800,00	(42.200,00)	99,85		
04.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.240.000,00	28.197.800,00	(42.200,00)	99,85		
04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.267.660.000,00	1.247.325.500,00	(20.334.500,00)	98,40		
04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1.267.660.000,00	1.247.325.500,00	(20.334.500,00)	98,40		
04.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.246.860.000,00	1.226.825.500,00	(20.034.500,00)	98,39		
04.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.246.860.000,00	1.226.825.500,00	(20.034.500,00)	98,39		
04.2.03.02.5.2	BELANJA MODAL	20.800.000,00	20.500.000,00	(300.000,00)	98,56		
04.2.03.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.800.000,00	20.500.000,00	(300.000,00)	98,56		
04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	106.014.000,00	103.486.300,00	(2.527.700,00)	97,62		
04.2.04.01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	88.016.000,00	86.496.000,00	(1.520.000,00)	98,27		
04.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	88.016.000,00	86.496.000,00	(1.520.000,00)	98,27		
04.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.016.000,00	86.496.000,00	(1.520.000,00)	98,27		
04.2.04.04	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	17.998.000,00	16.990.300,00	(1.007.700,00)	94,40		
04.2.04.04.5.1	BELANJA OPERASI	17.998.000,00	16.990.300,00	(1.007.700,00)	94,40		
04.2.04.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.998.000,00	16.990.300,00	(1.007.700,00)	94,40		
04.2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	25.360.000,00	25.280.700,00	(79.300,00)	99,69		
04.2.05.01	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	25.360.000,00	25.280.700,00	(79.300,00)	99,69		
04.2.05.01.5.1	BELANJA OPERASI	25.360.000,00	25.280.700,00	(79.300,00)	99,69		
04.2.05.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.360.000,00	25.280.700,00	(79.300,00)	99,69		
05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	95.166.000,00	94.017.500,00	(1.148.500,00)	98,79		
05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	95.166.000,00	94.017.500,00	(1.148.500,00)	98,79		
05.2.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	66.366.000,00	65.671.700,00	(694.300,00)	98,95		
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	66.366.000,00	65.671.700,00	(694.300,00)	98,95		
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.366.000,00	65.671.700,00	(694.300,00)	98,95		
05.2.01.03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	28.800.000,00	28.345.800,00	(454.200,00)	98,42		
05.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	28.800.000,00	28.345.800,00	(454.200,00)	98,42		
05.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.800.000,00	28.345.800,00	(454.200,00)	98,42		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	591.132.000,00	561.182.620,00	(29.949.380,00)	94,93		
05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	591.132.000,00	561.182.620,00	(29.949.380,00)	94,93		
05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	527.932.000,00	499.551.560,00	(28.380.440,00)	94,62		
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	527.932.000,00	499.551.560,00	(28.380.440,00)	94,62		
05.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	4.625.000,00	4.625.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	523.307.000,00	494.926.560,00	(28.380.440,00)	94,58		
05.2.01.05	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	63.200.000,00	61.631.060,00	(1.568.940,00)	97,52		
05.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	63.200.000,00	61.631.060,00	(1.568.940,00)	97,52		
05.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.200.000,00	61.631.060,00	(1.568.940,00)	97,52		
06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	50.068.000,00	49.367.250,00	(700.750,00)	98,60		
06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	24.716.000,00	24.392.750,00	(323.250,00)	98,69		
06.2.01.02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	24.716.000,00	24.392.750,00	(323.250,00)	98,69		
06.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	24.716.000,00	24.392.750,00	(323.250,00)	98,69		
06.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.716.000,00	24.392.750,00	(323.250,00)	98,69		
06.2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	25.352.000,00	24.974.500,00	(377.500,00)	98,51		
06.2.02.01	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	25.352.000,00	24.974.500,00	(377.500,00)	98,51		
06.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	25.352.000,00	24.974.500,00	(377.500,00)	98,51		
06.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.352.000,00	24.974.500,00	(377.500,00)	98,51		
07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	2.436.022.000,00	2.333.759.541,00	(102.262.459,00)	95,80		
07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	2.436.022.000,00	2.333.759.541,00	(102.262.459,00)	95,80		
07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	1.962.800.000,00	1.871.256.265,00	(91.543.735,00)	95,34		
07.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.962.800.000,00	1.871.256.265,00	(91.543.735,00)	95,34		
07.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	3.820.000,00	3.820.000,00	0,00	100,00		
07.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.958.980.000,00	1.867.436.265,00	(91.543.735,00)	95,33		
07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	141.796.000,00	139.180.261,00	(2.615.739,00)	98,16		
07.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	141.796.000,00	139.180.261,00	(2.615.739,00)	98,16		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
07.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	141.796.000,00	139.180.261,00	(2.615.739,00)	98,16		
07.2.01.04	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	95.910.000,00	94.205.140,00	(1.704.860,00)	98,22		
07.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	95.910.000,00	94.205.140,00	(1.704.860,00)	98,22		
07.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.910.000,00	94.205.140,00	(1.704.860,00)	98,22		
07.2.01.05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	235.516.000,00	229.117.875,00	(6.398.125,00)	97,28		
07.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	235.516.000,00	229.117.875,00	(6.398.125,00)	97,28		
07.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	235.516.000,00	229.117.875,00	(6.398.125,00)	97,28		
	SURPLUS / DEFISIT	(52.365.962.053,00)	(49.593.605.362,00)	2.772.356.691,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(52.365.962.053,00)	(49.593.605.362,00)	2.772.356.691,00	0		





PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 2.11 LINGKUNGAN HIDUP

SKPD : 2-11.3-28.3-25.01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	3.458.799.400,00	2.907.596.494,00	(551.202.906,00)	84,06		
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.458.799.400,00	2.907.596.494,00	(551.202.906,00)	84,06		
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	3.328.799.400,00	2.843.396.494,00	(485.402.906,00)	85,42		
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	130.000.000,00	64.200.000,00	(65.800.000,00)	49,38		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	33.125.485.000,00	32.496.312.567,00	(629.172.433,00)	98,10		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.730.556.000,00	12.339.942.311,00	(390.613.689,00)	96,93		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	168.554.000,00	167.927.760,00	(626.240,00)	99,63		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	115.459.000,00	115.047.100,00	(411.900,00)	99,64		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	115.459.000,00	115.047.100,00	(411.900,00)	99,64		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.459.000,00	115.047.100,00	(411.900,00)	99,64		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	53.095.000,00	52.880.660,00	(214.340,00)	99,60		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	53.095.000,00	52.880.660,00	(214.340,00)	99,60		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.095.000,00	52.880.660,00	(214.340,00)	99,60		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.749.901.000,00	11.394.582.760,00	(355.318.240,00)	96,98		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.171.368.000,00	10.816.312.744,00	(355.055.256,00)	96,82		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	11.171.368.000,00	10.816.312.744,00	(355.055.256,00)	96,82		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	11.171.368.000,00	10.816.312.744,00	(355.055.256,00)	96,82		
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	578.533.000,00	578.270.016,00	(262.984,00)	99,95		
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	578.533.000,00	578.270.016,00	(262.984,00)	99,95		
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	17.925.000,00	17.925.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	560.608.000,00	560.345.016,00	(262.984,00)	99,95		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	54.838.000,00	54.508.500,00	(329.500,00)	99,40		
01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40.000.000,00	39.750.000,00	(250.000,00)	99,38		
01.2.05.09.5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	39.750.000,00	(250.000,00)	99,38		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.05.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	39.750.000,00	(250.000,00)	99,38		
01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	14.838.000,00	14.758.500,00	(79.500,00)	99,46		
01.2.05.11.5.1	BELANJA OPERASI	14.838.000,00	14.758.500,00	(79.500,00)	99,46		
01.2.05.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.838.000,00	14.758.500,00	(79.500,00)	99,46		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	174.352.000,00	174.135.076,00	(216.924,00)	99,88		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.839.000,00	7.838.000,00	(1.000,00)	99,99		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	7.839.000,00	7.838.000,00	(1.000,00)	99,99		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.839.000,00	7.838.000,00	(1.000,00)	99,99		
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.384.000,00	1.384.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.384.000,00	1.384.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.384.000,00	1.384.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	47.534.000,00	47.458.450,00	(75.550,00)	99,84		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	47.534.000,00	47.458.450,00	(75.550,00)	99,84		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.534.000,00	47.458.450,00	(75.550,00)	99,84		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.861.000,00	11.861.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	11.861.000,00	11.861.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.861.000,00	11.861.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	19.770.000,00	19.758.000,00	(12.000,00)	99,94		
01.2.06.07.5.1	BELANJA OPERASI	19.770.000,00	19.758.000,00	(12.000,00)	99,94		
01.2.06.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.770.000,00	19.758.000,00	(12.000,00)	99,94		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	83.380.000,00	83.251.626,00	(128.374,00)	99,85		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	83.380.000,00	83.251.626,00	(128.374,00)	99,85		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.380.000,00	83.251.626,00	(128.374,00)	99,85		
01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.384.000,00	1.384.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.10.5.1	BELANJA OPERASI	1.384.000,00	1.384.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.384.000,00	1.384.000,00	0,00	100,00		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	31.630.000,00	31.384.000,00	(246.000,00)	99,22		
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.630.000,00	31.384.000,00	(246.000,00)	99,22		
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	31.630.000,00	31.384.000,00	(246.000,00)	99,22		
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.630.000,00	31.384.000,00	(246.000,00)	99,22		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	342.579.000,00	309.580.721,00	(32.998.279,00)	90,37		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.977.000,00	1.970.000,00	(7.000,00)	99,65		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.977.000,00	1.970.000,00	(7.000,00)	99,65		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.977.000,00	1.970.000,00	(7.000,00)	99,65		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	274.409.000,00	241.514.721,00	(32.894.279,00)	88,01		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	274.409.000,00	241.514.721,00	(32.894.279,00)	88,01		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	274.409.000,00	241.514.721,00	(32.894.279,00)	88,01		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	66.193.000,00	66.096.000,00	(97.000,00)	99,85		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	66.193.000,00	66.096.000,00	(97.000,00)	99,85		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.193.000,00	66.096.000,00	(97.000,00)	99,85		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	208.702.000,00	207.823.494,00	(878.506,00)	99,58		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	156.912.000,00	156.134.494,00	(777.506,00)	99,50		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	156.912.000,00	156.134.494,00	(777.506,00)	99,50		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	156.912.000,00	156.134.494,00	(777.506,00)	99,50		
01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	2.444.000,00	2.410.000,00	(34.000,00)	98,61		
01.2.09.05.5.1	BELANJA OPERASI	2.444.000,00	2.410.000,00	(34.000,00)	98,61		
01.2.09.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.444.000,00	2.410.000,00	(34.000,00)	98,61		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.398.000,00	9.398.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	9.398.000,00	9.398.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.398.000,00	9.398.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	39.948.000,00	39.881.000,00	(67.000,00)	99,83		
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	39.948.000,00	39.881.000,00	(67.000,00)	99,83		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.948.000,00	39.881.000,00	(67.000,00)	99,83		
02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	342.358.000,00	332.736.963,00	(9.621.037,00)	97,19		
02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	342.358.000,00	332.736.963,00	(9.621.037,00)	97,19		
02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	39.538.000,00	39.488.748,00	(49.252,00)	99,88		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	39.538.000,00	39.488.748,00	(49.252,00)	99,88		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.538.000,00	39.488.748,00	(49.252,00)	99,88		
02.2.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	302.820.000,00	293.248.215,00	(9.571.785,00)	96,84		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	302.820.000,00	293.248.215,00	(9.571.785,00)	96,84		
02.2.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	5.235.000,00	5.235.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	297.585.000,00	288.013.215,00	(9.571.785,00)	96,78		
03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.263.719.400,00	1.247.652.807,00	(16.066.593,00)	98,73		
03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	380.836.000,00	371.454.421,00	(9.381.579,00)	97,54		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	20.294.000,00	20.245.800,00	(48.200,00)	99,76		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	20.294.000,00	20.245.800,00	(48.200,00)	99,76		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.294.000,00	20.245.800,00	(48.200,00)	99,76		
03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	15.816.000,00	15.656.100,00	(159.900,00)	98,99		
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	15.816.000,00	15.656.100,00	(159.900,00)	98,99		
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.816.000,00	15.656.100,00	(159.900,00)	98,99		
03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	344.726.000,00	335.552.521,00	(9.173.479,00)	97,34		
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	315.642.000,00	306.615.871,00	(9.026.129,00)	97,14		
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	315.642.000,00	306.615.871,00	(9.026.129,00)	97,14		
03.2.01.03.5.2	BELANJA MODAL	29.084.000,00	28.936.650,00	(147.350,00)	99,49		
03.2.01.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.084.000,00	28.936.650,00	(147.350,00)	99,49		
03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	59.340.000,00	58.915.154,00	(424.846,00)	99,28		
03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	39.570.000,00	39.444.854,00	(125.146,00)	99,68		
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	39.570.000,00	39.444.854,00	(125.146,00)	99,68		
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.570.000,00	39.444.854,00	(125.146,00)	99,68		
03.2.02.03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	19.770.000,00	19.470.300,00	(299.700,00)	98,48		
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	19.770.000,00	19.470.300,00	(299.700,00)	98,48		
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.770.000,00	19.470.300,00	(299.700,00)	98,48		
03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	823.543.400,00	817.283.232,00	(6.260.168,00)	99,24		
03.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	17.299.000,00	16.885.966,00	(413.034,00)	97,61		
03.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	17.299.000,00	16.885.966,00	(413.034,00)	97,61		
03.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.299.000,00	16.885.966,00	(413.034,00)	97,61		
03.2.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	758.798.000,00	753.623.616,00	(5.174.384,00)	99,32		
03.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	758.798.000,00	753.623.616,00	(5.174.384,00)	99,32		
03.2.03.04.5.1.01	Belanja Pegawai	2.720.000,00	2.380.000,00	(340.000,00)	87,50		
03.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	756.078.000,00	751.243.616,00	(4.834.384,00)	99,36		
03.2.03.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	47.446.400,00	46.773.650,00	(672.750,00)	98,58		
03.2.03.05.5.1	BELANJA OPERASI	47.446.400,00	46.773.650,00	(672.750,00)	98,58		
03.2.03.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.446.400,00	46.773.650,00	(672.750,00)	98,58		
03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	2.852.649.000,00	2.811.114.860,00	(41.534.140,00)	98,54		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1.941.999.000,00	1.906.635.960,00	(35.363.040,00)	98,18		
03.2.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	1.386.152.000,00	1.369.129.360,00	(17.022.640,00)	98,77		
03.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	1.386.152.000,00	1.369.129.360,00	(17.022.640,00)	98,77		
03.2.01.02.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.386.152.000,00	1.369.129.360,00	(17.022.640,00)	98,77		
03.2.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	555.847.000,00	537.506.600,00	(18.340.400,00)	96,70		
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	555.847.000,00	537.506.600,00	(18.340.400,00)	96,70		
03.2.01.03.5.1.01	Belanja Pegawai	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.582.000,00	14.551.600,00	(30.400,00)	99,79		
03.2.01.03.5.1.05	Belanja Hibah	540.015.000,00	521.705.000,00	(18.310.000,00)	96,61		
03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	77.416.000,00	77.306.200,00	(109.800,00)	99,86		
03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	27.600.000,00	27.490.200,00	(109.800,00)	99,60		
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	27.600.000,00	27.490.200,00	(109.800,00)	99,60		
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.600.000,00	27.490.200,00	(109.800,00)	99,60		
03.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	49.816.000,00	49.816.000,00	0,00	100,00		
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	49.816.000,00	49.816.000,00	0,00	100,00		
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.816.000,00	49.816.000,00	0,00	100,00		
03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	783.418.000,00	777.381.800,00	(6.036.200,00)	99,23		
03.2.03.02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	783.418.000,00	777.381.800,00	(6.036.200,00)	99,23		
03.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	768.692.000,00	762.881.800,00	(5.810.200,00)	99,24		
03.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	768.692.000,00	762.881.800,00	(5.810.200,00)	99,24		
03.2.03.02.5.2	BELANJA MODAL	14.726.000,00	14.500.000,00	(226.000,00)	98,47		
03.2.03.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.726.000,00	14.500.000,00	(226.000,00)	98,47		
03.2.04	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	49.816.000,00	49.790.900,00	(25.100,00)	99,95		
03.2.04.02	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	49.816.000,00	49.790.900,00	(25.100,00)	99,95		
03.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	49.816.000,00	49.790.900,00	(25.100,00)	99,95		
03.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.816.000,00	49.790.900,00	(25.100,00)	99,95		
04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.374.753.600,00	2.360.814.567,00	(13.939.033,00)	99,41		
04.2.01	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	2.374.753.600,00	2.360.814.567,00	(13.939.033,00)	99,41		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2.266.023.000,00	2.253.198.529,00	(12.824.471,00)	99,43		
04.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	2.266.023.000,00	2.253.198.529,00	(12.824.471,00)	99,43		
04.2.01.04.5.1.01	Belanja Pegawai	4.420.000,00	4.420.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.261.603.000,00	2.248.778.529,00	(12.824.471,00)	99,43		
04.2.01.06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	14.826.600,00	14.528.188,00	(298.412,00)	97,99		
04.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	14.826.600,00	14.528.188,00	(298.412,00)	97,99		
04.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.826.600,00	14.528.188,00	(298.412,00)	97,99		
04.2.01.07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati	93.904.000,00	93.087.850,00	(816.150,00)	99,13		
04.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	93.904.000,00	93.087.850,00	(816.150,00)	99,13		
04.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.904.000,00	93.087.850,00	(816.150,00)	99,13		
04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.092.215.000,00	3.016.078.548,00	(76.136.452,00)	97,54		
04.2.03	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	27.666.000,00	27.611.100,00	(54.900,00)	99,80		
04.2.03.02	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	27.666.000,00	27.611.100,00	(54.900,00)	99,80		
04.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	27.666.000,00	27.611.100,00	(54.900,00)	99,80		
04.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.666.000,00	27.611.100,00	(54.900,00)	99,80		
04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	3.064.549.000,00	2.988.467.448,00	(76.081.552,00)	97,52		
04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	562.055.000,00	555.493.365,00	(6.561.635,00)	98,83		
04.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	119.349.000,00	118.178.765,00	(1.170.235,00)	99,02		
04.2.04.02.5.1.01	Belanja Pegawai	1.823.000,00	1.822.500,00	(500,00)	99,97		
04.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.526.000,00	116.356.265,00	(1.169.735,00)	99,00		
04.2.04.02.5.2	BELANJA MODAL	442.706.000,00	437.314.600,00	(5.391.400,00)	98,78		
04.2.04.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	276.653.000,00	273.824.800,00	(2.828.200,00)	98,98		
04.2.04.02.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	166.053.000,00	163.489.800,00	(2.563.200,00)	98,46		
04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.981.647.000,00	1.920.096.147,00	(61.550.853,00)	96,89		
04.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.980.135.000,00	1.918.584.147,00	(61.550.853,00)	96,89		
04.2.04.03.5.1.01	Belanja Pegawai	10.760.000,00	10.565.000,00	(195.000,00)	98,19		
04.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	306.513.000,00	297.238.922,00	(9.274.078,00)	96,97		
04.2.04.03.5.1.05	Belanja Hibah	1.662.862.000,00	1.610.780.225,00	(52.081.775,00)	96,87		
04.2.04.03.5.2	BELANJA MODAL	1.512.000,00	1.512.000,00	0,00	100,00		
04.2.04.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.512.000,00	1.512.000,00	0,00	100,00		
04.2.04.04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	29.654.000,00	29.404.250,00	(249.750,00)	99,16		
04.2.04.04.5.1	BELANJA OPERASI	29.654.000,00	29.404.250,00	(249.750,00)	99,16		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
04.2.04.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.654.000,00	29.404.250,00	(249.750,00)	99,16		
04.2.04.05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	102.576.000,00	101.692.156,00	(883.844,00)	99,14		
04.2.04.05.5.1	BELANJA OPERASI	102.576.000,00	101.692.156,00	(883.844,00)	99,14		
04.2.04.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.576.000,00	101.692.156,00	(883.844,00)	99,14		
04.2.04.06	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	388.617.000,00	381.781.530,00	(6.835.470,00)	98,24		
04.2.04.06.5.1	BELANJA OPERASI	388.617.000,00	381.781.530,00	(6.835.470,00)	98,24		
04.2.04.06.5.1.01	Belanja Pegawai	415.000,00	415.000,00	0,00	100,00		
04.2.04.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	388.202.000,00	381.366.530,00	(6.835.470,00)	98,24		
05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	38.531.000,00	38.147.354,00	(383.646,00)	99,00		
05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	38.531.000,00	38.147.354,00	(383.646,00)	99,00		
05.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	22.241.000,00	21.885.254,00	(355.746,00)	98,40		
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	22.241.000,00	21.885.254,00	(355.746,00)	98,40		
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.241.000,00	21.885.254,00	(355.746,00)	98,40		
05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	16.290.000,00	16.262.100,00	(27.900,00)	99,83		
05.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	16.290.000,00	16.262.100,00	(27.900,00)	99,83		
05.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.290.000,00	16.262.100,00	(27.900,00)	99,83		
05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	53.456.000,00	52.610.400,00	(845.600,00)	98,42		
05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	53.456.000,00	52.610.400,00	(845.600,00)	98,42		
05.2.01.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	53.456.000,00	52.610.400,00	(845.600,00)	98,42		
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	53.456.000,00	52.610.400,00	(845.600,00)	98,42		
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.456.000,00	52.610.400,00	(845.600,00)	98,42		
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	69.055.000,00	68.869.614,00	(185.386,00)	99,73		
06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	69.055.000,00	68.869.614,00	(185.386,00)	99,73		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	15.820.000,00	15.816.300,00	(3.700,00)	99,98		
06.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	15.820.000,00	15.816.300,00	(3.700,00)	99,98		
06.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.820.000,00	15.816.300,00	(3.700,00)	99,98		
06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	53.235.000,00	53.053.314,00	(181.686,00)	99,66		
06.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	53.235.000,00	53.053.314,00	(181.686,00)	99,66		
06.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.235.000,00	53.053.314,00	(181.686,00)	99,66		
06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	383.464.000,00	381.371.504,00	(2.092.496,00)	99,45		
06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	63.182.000,00	63.086.969,00	(95.031,00)	99,85		
06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	63.182.000,00	63.086.969,00	(95.031,00)	99,85		
06.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	63.182.000,00	63.086.969,00	(95.031,00)	99,85		
06.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.182.000,00	63.086.969,00	(95.031,00)	99,85		
06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	320.282.000,00	318.284.535,00	(1.997.465,00)	99,38		
06.2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	63.439.000,00	63.336.455,00	(102.545,00)	99,84		
06.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	63.439.000,00	63.336.455,00	(102.545,00)	99,84		
06.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.439.000,00	63.336.455,00	(102.545,00)	99,84		
06.2.03.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	256.843.000,00	254.948.080,00	(1.894.920,00)	99,26		
06.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	256.843.000,00	254.948.080,00	(1.894.920,00)	99,26		
06.2.03.02.5.1.01	Belanja Pegawai	3.428.000,00	3.427.500,00	(500,00)	99,99		
06.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.352.000,00	10.282.580,00	(69.420,00)	99,33		
06.2.03.02.5.1.05	Belanja Hibah	243.063.000,00	241.238.000,00	(1.825.000,00)	99,25		
08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	82.043.000,00	81.814.863,00	(228.137,00)	99,72		
08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	82.043.000,00	81.814.863,00	(228.137,00)	99,72		
08.2.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	52.389.000,00	52.287.700,00	(101.300,00)	99,81		
08.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	52.389.000,00	52.287.700,00	(101.300,00)	99,81		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
08.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.389.000,00	52.287.700,00	(101.300,00)	99,81		
08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	29.654.000,00	29.527.163,00	(126.837,00)	99,57		
08.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	29.654.000,00	29.527.163,00	(126.837,00)	99,57		
08.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.654.000,00	29.527.163,00	(126.837,00)	99,57		
09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	46.656.000,00	46.453.400,00	(202.600,00)	99,57		
09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	46.656.000,00	46.453.400,00	(202.600,00)	99,57		
09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	46.656.000,00	46.453.400,00	(202.600,00)	99,57		
09.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	46.656.000,00	46.453.400,00	(202.600,00)	99,57		
09.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.656.000,00	46.453.400,00	(202.600,00)	99,57		
10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	16.464.000,00	15.179.500,00	(1.284.500,00)	92,20		
10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	16.464.000,00	15.179.500,00	(1.284.500,00)	92,20		
10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	16.464.000,00	15.179.500,00	(1.284.500,00)	92,20		
10.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	16.464.000,00	15.179.500,00	(1.284.500,00)	92,20		
10.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.464.000,00	15.179.500,00	(1.284.500,00)	92,20		
11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	9.779.565.000,00	9.703.525.876,00	(76.039.124,00)	99,22		
11.2.01	Pengelolaan Sampah	9.779.565.000,00	9.703.525.876,00	(76.039.124,00)	99,22		
11.2.01.01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	12.850.000,00	12.786.700,00	(63.300,00)	99,51		
11.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	12.850.000,00	12.786.700,00	(63.300,00)	99,51		
11.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.850.000,00	12.786.700,00	(63.300,00)	99,51		
11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	98.846.000,00	98.666.625,00	(179.375,00)	99,82		
11.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	98.846.000,00	98.666.625,00	(179.375,00)	99,82		
11.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.846.000,00	98.666.625,00	(179.375,00)	99,82		
11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	8.067.644.000,00	7.997.428.927,00	(70.215.073,00)	99,13		
11.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	8.067.644.000,00	7.997.428.927,00	(70.215.073,00)	99,13		
11.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.067.644.000,00	7.997.428.927,00	(70.215.073,00)	99,13		
11.2.01.04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	88.527.000,00	88.394.690,00	(132.310,00)	99,85		
11.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	88.527.000,00	88.394.690,00	(132.310,00)	99,85		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
11.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.527.000,00	88.394.690,00	(132.310,00)	99,85		
11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	1.511.698.000,00	1.506.248.934,00	(5.449.066,00)	99,64		
11.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	608.100.000,00	605.464.934,00	(2.635.066,00)	99,57		
11.2.01.07.5.1.01	Belanja Pegawai	9.495.000,00	8.215.000,00	(1.280.000,00)	86,52		
11.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	420.240.000,00	418.884.934,00	(1.355.066,00)	99,68		
11.2.01.07.5.1.05	Belanja Hibah	178.365.000,00	178.365.000,00	0,00	100,00		
11.2.01.07.5.2	BELANJA MODAL	903.598.000,00	900.784.000,00	(2.814.000,00)	99,69		
11.2.01.07.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60.798.000,00	60.600.000,00	(198.000,00)	99,67		
11.2.01.07.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	524.000.000,00	524.000.000,00	0,00	100,00		
11.2.01.07.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	318.800.000,00	316.184.000,00	(2.616.000,00)	99,18		
	SURPLUS / DEFISIT	(29.666.685.600,00)	(29.588.716.073,00)	77.969.527,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(29.666.685.600,00)	(29.588.716.073,00)	77.969.527,00	0		





PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 2.12 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
SKPD : 2-12.0-00.0-00.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	7.501.751.682,00	7.361.853.055,00	(139.898.627,00)	98,14		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.418.774.000,00	4.332.824.838,00	(85.949.162,00)	98,05		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.524.000,00	19.432.150,00	(91.850,00)	99,53		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.000.000,00	11.981.050,00	(18.950,00)	99,84		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	11.981.050,00	(18.950,00)	99,84		
01.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	100,00		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.980.000,00	9.961.050,00	(18.950,00)	99,81		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.524.000,00	7.451.100,00	(72.900,00)	99,03		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	7.524.000,00	7.451.100,00	(72.900,00)	99,03		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.524.000,00	7.451.100,00	(72.900,00)	99,03		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.851.166.000,00	3.770.436.580,00	(80.729.420,00)	97,90		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.819.214.000,00	3.738.546.967,00	(80.667.033,00)	97,89		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.819.214.000,00	3.738.546.967,00	(80.667.033,00)	97,89		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	3.819.214.000,00	3.738.546.967,00	(80.667.033,00)	97,89		
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	31.952.000,00	31.889.613,00	(62.387,00)	99,80		
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	31.952.000,00	31.889.613,00	(62.387,00)	99,80		
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.152.000,00	15.089.613,00	(62.387,00)	99,59		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.299.000,00	7.224.800,00	(74.200,00)	98,98		
01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7.299.000,00	7.224.800,00	(74.200,00)	98,98		
01.2.05.11.5.1	BELANJA OPERASI	7.299.000,00	7.224.800,00	(74.200,00)	98,98		
01.2.05.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.299.000,00	7.224.800,00	(74.200,00)	98,98		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	84.371.000,00	84.171.585,00	(199.415,00)	99,76		



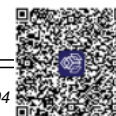
KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.433.000,00	2.423.500,00	(9.500,00)	99,61		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.433.000,00	2.423.500,00	(9.500,00)	99,61		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.433.000,00	2.423.500,00	(9.500,00)	99,61		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.560.000,00	12.520.500,00	(39.500,00)	99,69		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	12.560.000,00	12.520.500,00	(39.500,00)	99,69		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.560.000,00	12.520.500,00	(39.500,00)	99,69		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.617.000,00	22.556.900,00	(60.100,00)	99,73		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	22.617.000,00	22.556.900,00	(60.100,00)	99,73		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.617.000,00	22.556.900,00	(60.100,00)	99,73		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.756.000,00	4.730.000,00	(26.000,00)	99,45		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	4.756.000,00	4.730.000,00	(26.000,00)	99,45		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.756.000,00	4.730.000,00	(26.000,00)	99,45		
01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	19.811.000,00	19.753.500,00	(57.500,00)	99,71		
01.2.06.07.5.1	BELANJA OPERASI	19.811.000,00	19.753.500,00	(57.500,00)	99,71		
01.2.06.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.811.000,00	19.753.500,00	(57.500,00)	99,71		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18.998.000,00	18.993.185,00	(4.815,00)	99,97		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	18.998.000,00	18.993.185,00	(4.815,00)	99,97		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.998.000,00	18.993.185,00	(4.815,00)	99,97		
01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.196.000,00	3.194.000,00	(2.000,00)	99,94		
01.2.06.10.5.1	BELANJA OPERASI	3.196.000,00	3.194.000,00	(2.000,00)	99,94		
01.2.06.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.196.000,00	3.194.000,00	(2.000,00)	99,94		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	142.498.000,00	138.924.000,00	(3.574.000,00)	97,49		
01.2.07.05	Pengadaan Mebel	40.837.000,00	40.009.000,00	(828.000,00)	97,97		
01.2.07.05.5.2	BELANJA MODAL	40.837.000,00	40.009.000,00	(828.000,00)	97,97		
01.2.07.05.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.837.000,00	40.009.000,00	(828.000,00)	97,97		
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	63.296.000,00	61.475.000,00	(1.821.000,00)	97,12		
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	63.296.000,00	61.475.000,00	(1.821.000,00)	97,12		
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	63.296.000,00	61.475.000,00	(1.821.000,00)	97,12		
01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	38.365.000,00	37.440.000,00	(925.000,00)	97,59		
01.2.07.10.5.2	BELANJA MODAL	38.365.000,00	37.440.000,00	(925.000,00)	97,59		
01.2.07.10.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.365.000,00	37.440.000,00	(925.000,00)	97,59		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	124.645.000,00	123.651.727,00	(993.273,00)	99,20		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	914.000,00	910.000,00	(4.000,00)	99,56		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	914.000,00	910.000,00	(4.000,00)	99,56		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	914.000,00	910.000,00	(4.000,00)	99,56		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	62.730.000,00	61.756.027,00	(973.973,00)	98,45		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	62.730.000,00	61.756.027,00	(973.973,00)	98,45		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.730.000,00	61.756.027,00	(973.973,00)	98,45		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	61.001.000,00	60.985.700,00	(15.300,00)	99,97		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	61.001.000,00	60.985.700,00	(15.300,00)	99,97		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.001.000,00	60.985.700,00	(15.300,00)	99,97		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	189.271.000,00	188.983.996,00	(287.004,00)	99,85		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	71.918.000,00	71.803.496,00	(114.504,00)	99,84		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	71.918.000,00	71.803.496,00	(114.504,00)	99,84		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.918.000,00	71.803.496,00	(114.504,00)	99,84		
01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	6.281.000,00	6.210.000,00	(71.000,00)	98,87		
01.2.09.05.5.1	BELANJA OPERASI	6.281.000,00	6.210.000,00	(71.000,00)	98,87		
01.2.09.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.281.000,00	6.210.000,00	(71.000,00)	98,87		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	63.072.000,00	62.999.000,00	(73.000,00)	99,88		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	63.072.000,00	62.999.000,00	(73.000,00)	99,88		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.072.000,00	62.999.000,00	(73.000,00)	99,88		
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	48.000.000,00	47.971.500,00	(28.500,00)	99,94		
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	48.000.000,00	47.971.500,00	(28.500,00)	99,94		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.000.000,00	47.971.500,00	(28.500,00)	99,94		
02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1.889.168.682,00	1.864.479.350,00	(24.689.332,00)	98,69		
02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	969.102.682,00	963.448.262,00	(5.654.420,00)	99,42		
02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	546.533.000,00	541.276.150,00	(5.256.850,00)	99,04		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	546.533.000,00	541.276.150,00	(5.256.850,00)	99,04		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	546.533.000,00	541.276.150,00	(5.256.850,00)	99,04		
02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	415.689.682,00	415.364.062,00	(325.620,00)	99,92		
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	329.299.682,00	329.088.062,00	(211.620,00)	99,94		
02.2.01.04.5.1.01	Belanja Pegawai	2.820.000,00	2.820.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	326.479.682,00	326.268.062,00	(211.620,00)	99,94		
02.2.01.04.5.2	BELANJA MODAL	86.390.000,00	86.276.000,00	(114.000,00)	99,87		
02.2.01.04.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	86.390.000,00	86.276.000,00	(114.000,00)	99,87		
02.2.01.05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	6.880.000,00	6.808.050,00	(71.950,00)	98,95		
02.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	6.880.000,00	6.808.050,00	(71.950,00)	98,95		
02.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.880.000,00	6.808.050,00	(71.950,00)	98,95		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	903.266.000,00	884.403.838,00	(18.862.162,00)	97,91		
02.2.02.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	903.266.000,00	884.403.838,00	(18.862.162,00)	97,91		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	903.266.000,00	884.403.838,00	(18.862.162,00)	97,91		
02.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	3.727.000,00	3.722.500,00	(4.500,00)	99,88		
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	899.539.000,00	880.681.338,00	(18.857.662,00)	97,90		
02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	16.800.000,00	16.627.250,00	(172.750,00)	98,97		
02.2.03.05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	16.800.000,00	16.627.250,00	(172.750,00)	98,97		
02.2.03.05.5.1	BELANJA OPERASI	16.800.000,00	16.627.250,00	(172.750,00)	98,97		
02.2.03.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.800.000,00	16.627.250,00	(172.750,00)	98,97		
03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	224.153.000,00	223.249.716,00	(903.284,00)	99,60		
03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	212.953.000,00	212.117.416,00	(835.584,00)	99,61		
03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	31.612.000,00	31.460.866,00	(151.134,00)	99,52		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	31.612.000,00	31.460.866,00	(151.134,00)	99,52		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.612.000,00	31.460.866,00	(151.134,00)	99,52		
03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	181.341.000,00	180.656.550,00	(684.450,00)	99,62		
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	181.341.000,00	180.656.550,00	(684.450,00)	99,62		
03.2.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	178.921.000,00	178.236.550,00	(684.450,00)	99,62		
03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	11.200.000,00	11.132.300,00	(67.700,00)	99,40		
03.2.02.02	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	11.200.000,00	11.132.300,00	(67.700,00)	99,40		
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	11.200.000,00	11.132.300,00	(67.700,00)	99,40		
03.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	100,00		
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.190.000,00	10.122.300,00	(67.700,00)	99,34		
04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	969.656.000,00	941.299.151,00	(28.356.849,00)	97,08		
04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	53.600.000,00	53.284.918,00	(315.082,00)	99,41		
04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	53.600.000,00	53.284.918,00	(315.082,00)	99,41		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	53.600.000,00	53.284.918,00	(315.082,00)	99,41		
04.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.580.000,00	51.264.918,00	(315.082,00)	99,39		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	916.056.000,00	888.014.233,00	(28.041.767,00)	96,94		
04.2.03.03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	894.533.000,00	866.829.681,00	(27.703.319,00)	96,90		
04.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	154.643.000,00	154.561.681,00	(81.319,00)	99,95		
04.2.03.03.5.1.01	Belanja Pegawai	3.220.000,00	3.220.000,00	0,00	100,00		
04.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	151.423.000,00	151.341.681,00	(81.319,00)	99,95		
04.2.03.03.5.2	BELANJA MODAL	739.890.000,00	712.268.000,00	(27.622.000,00)	96,27		
04.2.03.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	739.890.000,00	712.268.000,00	(27.622.000,00)	96,27		
04.2.03.04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	8.236.000,00	8.090.340,00	(145.660,00)	98,23		
04.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	8.236.000,00	8.090.340,00	(145.660,00)	98,23		
04.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.236.000,00	8.090.340,00	(145.660,00)	98,23		
04.2.03.07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	13.287.000,00	13.094.212,00	(192.788,00)	98,55		
04.2.03.07.5.1	BELANJA OPERASI	13.287.000,00	13.094.212,00	(192.788,00)	98,55		
04.2.03.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.287.000,00	13.094.212,00	(192.788,00)	98,55		
	SURPLUS / DEFISIT	(7.501.751.682,00)	(7.361.853.055,00)	139.898.627,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(7.501.751.682,00)	(7.361.853.055,00)	139.898.627,00	0		





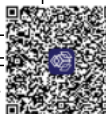
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

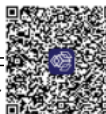
Urusan Pemerintahan : 2.13 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

SKPD : 2-13.0-00.0-00.01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	9.086.197.000,00	8.865.207.724,00	(220.989.276,00)	97,57		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.259.591.000,00	4.058.374.133,00	(201.216.867,00)	95,28		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.000.000,00	24.778.600,00	(221.400,00)	99,11		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.000.000,00	15.796.300,00	(203.700,00)	98,73		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	16.000.000,00	15.796.300,00	(203.700,00)	98,73		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	15.796.300,00	(203.700,00)	98,73		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.000.000,00	8.982.300,00	(17.700,00)	99,80		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	9.000.000,00	8.982.300,00	(17.700,00)	99,80		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	8.982.300,00	(17.700,00)	99,80		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.778.397.000,00	3.590.056.229,00	(188.340.771,00)	95,02		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.750.518.000,00	3.562.241.829,00	(188.276.171,00)	94,98		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.750.518.000,00	3.562.241.829,00	(188.276.171,00)	94,98		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	3.750.518.000,00	3.562.241.829,00	(188.276.171,00)	94,98		
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	27.879.000,00	27.814.400,00	(64.600,00)	99,77		
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	27.879.000,00	27.814.400,00	(64.600,00)	99,77		
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.679.000,00	12.614.400,00	(64.600,00)	99,49		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	137.853.000,00	137.665.500,00	(187.500,00)	99,86		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.557.000,00	6.553.500,00	(3.500,00)	99,95		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	6.557.000,00	6.553.500,00	(3.500,00)	99,95		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.557.000,00	6.553.500,00	(3.500,00)	99,95		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.000.000,00	39.982.000,00	(18.000,00)	99,96		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	39.982.000,00	(18.000,00)	99,96		



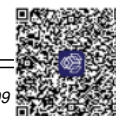
KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	39.982.000,00	(18.000,00)	99,96		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.000.000,00	12.998.000,00	(2.000,00)	99,98		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	13.000.000,00	12.998.000,00	(2.000,00)	99,98		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	12.998.000,00	(2.000,00)	99,98		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.236.000,00	1.236.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	720.000,00	720.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	720.000,00	720.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.06.5.2	BELANJA MODAL	516.000,00	516.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.06.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	516.000,00	516.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	27.000.000,00	26.932.100,00	(67.900,00)	99,75		
01.2.06.07.5.1	BELANJA OPERASI	27.000.000,00	26.932.100,00	(67.900,00)	99,75		
01.2.06.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	26.932.100,00	(67.900,00)	99,75		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	43.000.000,00	42.916.500,00	(83.500,00)	99,81		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	43.000.000,00	42.916.500,00	(83.500,00)	99,81		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.000.000,00	42.916.500,00	(83.500,00)	99,81		
01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7.060.000,00	7.047.400,00	(12.600,00)	99,82		
01.2.06.10.5.1	BELANJA OPERASI	7.060.000,00	7.047.400,00	(12.600,00)	99,82		
01.2.06.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.060.000,00	7.047.400,00	(12.600,00)	99,82		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	143.048.000,00	135.869.720,00	(7.178.280,00)	94,98		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.648.000,00	1.480.000,00	(168.000,00)	89,81		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.648.000,00	1.480.000,00	(168.000,00)	89,81		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.648.000,00	1.480.000,00	(168.000,00)	89,81		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	81.000.000,00	73.999.920,00	(7.000.080,00)	91,36		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	81.000.000,00	73.999.920,00	(7.000.080,00)	91,36		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.000.000,00	73.999.920,00	(7.000.080,00)	91,36		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60.400.000,00	60.389.800,00	(10.200,00)	99,98		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	60.400.000,00	60.389.800,00	(10.200,00)	99,98		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.400.000,00	60.389.800,00	(10.200,00)	99,98		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	175.293.000,00	170.004.084,00	(5.288.916,00)	96,98		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	116.253.000,00	111.430.084,00	(4.822.916,00)	95,85		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	116.253.000,00	111.430.084,00	(4.822.916,00)	95,85		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.253.000,00	111.430.084,00	(4.822.916,00)	95,85		
01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.05.5.1	BELANJA OPERASI	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.09.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	51.040.000,00	50.574.000,00	(466.000,00)	99,09		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	51.040.000,00	50.574.000,00	(466.000,00)	99,09		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.040.000,00	50.574.000,00	(466.000,00)	99,09		
02	PROGRAM PENATAAN DESA	31.000.000,00	30.927.000,00	(73.000,00)	99,76		
02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	31.000.000,00	30.927.000,00	(73.000,00)	99,76		
02.2.01.01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	31.000.000,00	30.927.000,00	(73.000,00)	99,76		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	31.000.000,00	30.927.000,00	(73.000,00)	99,76		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.000.000,00	30.927.000,00	(73.000,00)	99,76		
03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	1.871.496.000,00	1.860.451.568,00	(11.044.432,00)	99,41		
03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	1.871.496.000,00	1.860.451.568,00	(11.044.432,00)	99,41		
03.2.01.01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	27.000.000,00	26.915.090,00	(84.910,00)	99,69		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	27.000.000,00	26.915.090,00	(84.910,00)	99,69		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	26.915.090,00	(84.910,00)	99,69		
03.2.01.02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	1.744.496.000,00	1.733.686.890,00	(10.809.110,00)	99,38		
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.743.692.000,00	1.733.030.890,00	(10.661.110,00)	99,39		
03.2.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	11.385.000,00	11.350.000,00	(35.000,00)	99,69		
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.732.307.000,00	1.721.680.890,00	(10.626.110,00)	99,39		
03.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	804.000,00	656.000,00	(148.000,00)	81,59		
03.2.01.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	804.000,00	656.000,00	(148.000,00)	81,59		
03.2.01.03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	100.000.000,00	99.849.588,00	(150.412,00)	99,85		
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	99.849.588,00	(150.412,00)	99,85		
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	99.849.588,00	(150.412,00)	99,85		
04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	797.147.000,00	795.728.947,00	(1.418.053,00)	99,82		
04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	797.147.000,00	795.728.947,00	(1.418.053,00)	99,82		
04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	100.000.000,00	99.961.858,00	(38.142,00)	99,96		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	99.961.858,00	(38.142,00)	99,96		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	99.961.858,00	(38.142,00)	99,96		
04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	20.000.000,00	19.978.125,00	(21.875,00)	99,89		
04.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	19.978.125,00	(21.875,00)	99,89		
04.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.978.125,00	(21.875,00)	99,89		
04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	72.000.000,00	71.873.000,00	(127.000,00)	99,82		
04.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	72.000.000,00	71.873.000,00	(127.000,00)	99,82		
04.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.000.000,00	71.873.000,00	(127.000,00)	99,82		
04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	82.464.000,00	82.329.600,00	(134.400,00)	99,84		
04.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	82.464.000,00	82.329.600,00	(134.400,00)	99,84		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
04.2.01.05.5.1.01	Belanja Pegawai	2.415.000,00	2.415.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.049.000,00	79.914.600,00	(134.400,00)	99,83		
04.2.01.06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	18.000.000,00	17.928.700,00	(71.300,00)	99,60		
04.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	18.000.000,00	17.928.700,00	(71.300,00)	99,60		
04.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	17.928.700,00	(71.300,00)	99,60		
04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	40.000.000,00	39.977.400,00	(22.600,00)	99,94		
04.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	39.977.400,00	(22.600,00)	99,94		
04.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	39.977.400,00	(22.600,00)	99,94		
04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	135.000.000,00	134.565.100,00	(434.900,00)	99,68		
04.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	135.000.000,00	134.565.100,00	(434.900,00)	99,68		
04.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.000.000,00	134.565.100,00	(434.900,00)	99,68		
04.2.01.10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	14.000.000,00	13.756.000,00	(244.000,00)	98,26		
04.2.01.10.5.1	BELANJA OPERASI	14.000.000,00	13.756.000,00	(244.000,00)	98,26		
04.2.01.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	13.756.000,00	(244.000,00)	98,26		
04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	98.683.000,00	98.666.532,00	(16.468,00)	99,98		
04.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	98.683.000,00	98.666.532,00	(16.468,00)	99,98		
04.2.01.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.683.000,00	98.666.532,00	(16.468,00)	99,98		
04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	68.000.000,00	67.889.320,00	(110.680,00)	99,84		
04.2.01.13.5.1	BELANJA OPERASI	68.000.000,00	67.889.320,00	(110.680,00)	99,84		
04.2.01.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.000.000,00	67.889.320,00	(110.680,00)	99,84		
04.2.01.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	35.000.000,00	34.937.900,00	(62.100,00)	99,82		
04.2.01.14.5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	34.937.900,00	(62.100,00)	99,82		
04.2.01.14.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	34.937.900,00	(62.100,00)	99,82		
04.2.01.17	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	114.000.000,00	113.865.412,00	(134.588,00)	99,88		
04.2.01.17.5.1	BELANJA OPERASI	114.000.000,00	113.865.412,00	(134.588,00)	99,88		
04.2.01.17.5.1.01	Belanja Pegawai	4.420.000,00	4.420.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.580.000,00	109.445.412,00	(134.588,00)	99,88		
05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.126.963.000,00	2.119.726.076,00	(7.236.924,00)	99,66		
05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.126.963.000,00	2.119.726.076,00	(7.236.924,00)	99,66		
05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	85.000.000,00	84.671.200,00	(328.800,00)	99,61		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
05.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	85.000.000,00	84.671.200,00	(328.800,00)	99,61		
05.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.000.000,00	84.671.200,00	(328.800,00)	99,61		
05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	15.636.000,00	15.563.300,00	(72.700,00)	99,54		
05.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	15.636.000,00	15.563.300,00	(72.700,00)	99,54		
05.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.636.000,00	15.563.300,00	(72.700,00)	99,54		
05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	11.000.000,00	10.945.000,00	(55.000,00)	99,50		
05.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	11.000.000,00	10.945.000,00	(55.000,00)	99,50		
05.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	10.945.000,00	(55.000,00)	99,50		
05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	55.327.000,00	55.266.300,00	(60.700,00)	99,89		
05.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	55.327.000,00	55.266.300,00	(60.700,00)	99,89		
05.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.327.000,00	55.266.300,00	(60.700,00)	99,89		
05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.960.000.000,00	1.953.280.276,00	(6.719.724,00)	99,66		
05.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	1.960.000.000,00	1.953.280.276,00	(6.719.724,00)	99,66		
05.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.960.000.000,00	1.953.280.276,00	(6.719.724,00)	99,66		
	SURPLUS / DEFISIT	(9.086.197.000,00)	(8.865.207.724,00)	220.989.276,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(9.086.197.000,00)	(8.865.207.724,00)	220.989.276,00	0		





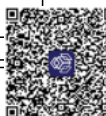
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 2.16 KOMUNIKASI & INFORMATIKA

SKPD : 2-16.2-20.2-21.01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	234.347.000,00	363.279.835,00	128.932.835,00	155,02		
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	234.347.000,00	363.279.835,00	128.932.835,00	155,02		
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	234.347.000,00	363.279.835,00	128.932.835,00	155,02		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	13.937.555.000,00	13.569.869.922,00	(367.685.078,00)	97,36		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.962.087.000,00	4.714.602.927,00	(247.484.073,00)	95,01		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.000.000,00	31.539.400,00	(460.600,00)	98,56		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.200.000,00	18.966.300,00	(233.700,00)	98,78		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	19.200.000,00	18.966.300,00	(233.700,00)	98,78		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.200.000,00	18.966.300,00	(233.700,00)	98,78		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.800.000,00	12.573.100,00	(226.900,00)	98,23		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	12.800.000,00	12.573.100,00	(226.900,00)	98,23		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.800.000,00	12.573.100,00	(226.900,00)	98,23		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.816.076.000,00	3.620.000.326,00	(196.075.674,00)	94,86		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.683.693.000,00	3.491.570.691,00	(192.122.309,00)	94,78		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.683.693.000,00	3.491.570.691,00	(192.122.309,00)	94,78		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	3.683.693.000,00	3.491.570.691,00	(192.122.309,00)	94,78		
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	132.383.000,00	128.429.635,00	(3.953.365,00)	97,01		
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	132.383.000,00	128.429.635,00	(3.953.365,00)	97,01		
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	17.530.000,00	17.530.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.853.000,00	110.899.635,00	(3.953.365,00)	96,56		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	217.600.000,00	213.468.900,00	(4.131.100,00)	98,10		
01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200.000.000,00	196.531.500,00	(3.468.500,00)	98,27		
01.2.05.10.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	196.531.500,00	(3.468.500,00)	98,27		
01.2.05.10.5.1.01	Belanja Pegawai	1.815.000,00	1.815.000,00	0,00	100,00		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.05.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	198.185.000,00	194.716.500,00	(3.468.500,00)	98,25		
01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	17.600.000,00	16.937.400,00	(662.600,00)	96,24		
01.2.05.11.5.1	BELANJA OPERASI	17.600.000,00	16.937.400,00	(662.600,00)	96,24		
01.2.05.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.600.000,00	16.937.400,00	(662.600,00)	96,24		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	104.000.000,00	103.598.922,00	(401.078,00)	99,61		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000,00	3.945.000,00	(55.000,00)	98,63		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	3.945.000,00	(55.000,00)	98,63		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	3.945.000,00	(55.000,00)	98,63		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.000.000,00	27.906.900,00	(93.100,00)	99,67		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	28.000.000,00	27.906.900,00	(93.100,00)	99,67		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	27.906.900,00	(93.100,00)	99,67		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.000.000,00	11.999.200,00	(800,00)	99,99		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	11.999.200,00	(800,00)	99,99		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	11.999.200,00	(800,00)	99,99		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.000.000,00	8.836.500,00	(163.500,00)	98,18		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	9.000.000,00	8.836.500,00	(163.500,00)	98,18		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	8.836.500,00	(163.500,00)	98,18		
01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	16.000.000,00	15.913.000,00	(87.000,00)	99,46		
01.2.06.07.5.1	BELANJA OPERASI	16.000.000,00	15.913.000,00	(87.000,00)	99,46		
01.2.06.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	15.913.000,00	(87.000,00)	99,46		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35.000.000,00	34.998.322,00	(1.678,00)	100,00		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	34.998.322,00	(1.678,00)	100,00		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	34.998.322,00	(1.678,00)	100,00		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.000.000,00	93.838.000,00	(6.162.000,00)	93,84		
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	80.000.000,00	74.140.000,00	(5.860.000,00)	92,68		
01.2.07.06.5.1	BELANJA OPERASI	490.000,00	490.000,00	0,00	100,00		
01.2.07.06.5.1.01	Belanja Pegawai	490.000,00	490.000,00	0,00	100,00		
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	79.510.000,00	73.650.000,00	(5.860.000,00)	92,63		
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	79.510.000,00	73.650.000,00	(5.860.000,00)	92,63		
01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000,00	19.698.000,00	(302.000,00)	98,49		
01.2.07.10.5.1	BELANJA OPERASI	1.330.000,00	1.323.000,00	(7.000,00)	99,47		
01.2.07.10.5.1.01	Belanja Pegawai	390.000,00	390.000,00	0,00	100,00		
01.2.07.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	940.000,00	933.000,00	(7.000,00)	99,26		
01.2.07.10.5.2	BELANJA MODAL	18.670.000,00	18.375.000,00	(295.000,00)	98,42		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.07.10.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.670.000,00	18.375.000,00	(295.000,00)	98,42		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	507.411.000,00	473.461.300,00	(33.949.700,00)	93,31		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.600.000,00	1.485.000,00	(115.000,00)	92,81		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.600.000,00	1.485.000,00	(115.000,00)	92,81		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	1.485.000,00	(115.000,00)	92,81		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	429.213.000,00	395.384.500,00	(33.828.500,00)	92,12		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	429.213.000,00	395.384.500,00	(33.828.500,00)	92,12		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	429.213.000,00	395.384.500,00	(33.828.500,00)	92,12		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	76.598.000,00	76.591.800,00	(6.200,00)	99,99		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	76.598.000,00	76.591.800,00	(6.200,00)	99,99		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.598.000,00	76.591.800,00	(6.200,00)	99,99		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	185.000.000,00	178.696.079,00	(6.303.921,00)	96,59		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	112.000.000,00	106.193.079,00	(5.806.921,00)	94,82		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	112.000.000,00	106.193.079,00	(5.806.921,00)	94,82		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.000.000,00	106.193.079,00	(5.806.921,00)	94,82		
01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	2.000.000,00	1.996.800,00	(3.200,00)	99,84		
01.2.09.05.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	1.996.800,00	(3.200,00)	99,84		
01.2.09.05.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.996.800,00	(3.200,00)	99,84		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	51.000.000,00	50.506.200,00	(493.800,00)	99,03		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	51.000.000,00	50.506.200,00	(493.800,00)	99,03		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.000.000,00	50.506.200,00	(493.800,00)	99,03		
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00		
02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	5.656.843.000,00	5.576.658.357,00	(80.184.643,00)	98,58		
02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.656.843.000,00	5.576.658.357,00	(80.184.643,00)	98,58		
02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	4.098.794.000,00	4.033.083.096,00	(65.710.904,00)	98,40		
02.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	3.932.391.000,00	3.867.492.596,00	(64.898.404,00)	98,35		
02.2.01.05.5.1.01	Belanja Pegawai	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.927.141.000,00	3.862.242.596,00	(64.898.404,00)	98,35		
02.2.01.05.5.2	BELANJA MODAL	166.403.000,00	165.590.500,00	(812.500,00)	99,51		
02.2.01.05.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	166.403.000,00	165.590.500,00	(812.500,00)	99,51		
02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	778.049.000,00	769.537.114,00	(8.511.886,00)	98,91		
02.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	726.909.000,00	718.932.114,00	(7.976.886,00)	98,90		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01.06.5.1.01	Belanja Pegawai	340.000,00	340.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	726.569.000,00	718.592.114,00	(7.976.886,00)	98,90		
02.2.01.06.5.2	BELANJA MODAL	51.140.000,00	50.605.000,00	(535.000,00)	98,95		
02.2.01.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51.140.000,00	50.605.000,00	(535.000,00)	98,95		
02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	780.000.000,00	774.038.147,00	(5.961.853,00)	99,24		
02.2.01.12.5.1	BELANJA OPERASI	780.000.000,00	774.038.147,00	(5.961.853,00)	99,24		
02.2.01.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	780.000.000,00	774.038.147,00	(5.961.853,00)	99,24		
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	83.500.000,00	78.746.933,00	(4.753.067,00)	94,31		
02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	83.500.000,00	78.746.933,00	(4.753.067,00)	94,31		
02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	83.500.000,00	78.746.933,00	(4.753.067,00)	94,31		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	83.500.000,00	78.746.933,00	(4.753.067,00)	94,31		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.500.000,00	78.746.933,00	(4.753.067,00)	94,31		
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	174.000.000,00	171.259.307,00	(2.740.693,00)	98,42		
02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	174.000.000,00	171.259.307,00	(2.740.693,00)	98,42		
02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	33.000.000,00	31.771.339,00	(1.228.661,00)	96,28		
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	33.000.000,00	31.771.339,00	(1.228.661,00)	96,28		
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	31.771.339,00	(1.228.661,00)	96,28		
02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	141.000.000,00	139.487.968,00	(1.512.032,00)	98,93		
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	141.000.000,00	139.487.968,00	(1.512.032,00)	98,93		
02.2.01.04.5.1.01	Belanja Pegawai	1.330.000,00	1.330.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.670.000,00	138.157.968,00	(1.512.032,00)	98,92		
03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	3.061.125.000,00	3.028.602.398,00	(32.522.602,00)	98,94		
03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.370.383.000,00	2.341.027.782,00	(29.355.218,00)	98,76		
03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2.370.383.000,00	2.341.027.782,00	(29.355.218,00)	98,76		
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.714.974.000,00	1.699.230.282,00	(15.743.718,00)	99,08		
03.2.01.03.5.1.01	Belanja Pegawai	8.740.000,00	7.610.000,00	(1.130.000,00)	87,07		
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.706.234.000,00	1.691.620.282,00	(14.613.718,00)	99,14		
03.2.01.03.5.2	BELANJA MODAL	655.409.000,00	641.797.500,00	(13.611.500,00)	97,92		
03.2.01.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	655.409.000,00	641.797.500,00	(13.611.500,00)	97,92		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	690.742.000,00	687.574.616,00	(3.167.384,00)	99,54		
03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	650.742.000,00	648.783.016,00	(1.958.984,00)	99,70		
03.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	650.742.000,00	648.783.016,00	(1.958.984,00)	99,70		
03.2.02.07.5.1.01	Belanja Pegawai	1.530.000,00	1.530.000,00	0,00	100,00		
03.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	649.212.000,00	647.253.016,00	(1.958.984,00)	99,70		
03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	40.000.000,00	38.791.600,00	(1.208.400,00)	96,98		
03.2.02.10.5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	38.791.600,00	(1.208.400,00)	96,98		
03.2.02.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	38.791.600,00	(1.208.400,00)	96,98		
	SURPLUS / DEFISIT	(13.703.208.000,00)	(13.206.590.087,00)	496.617.913,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(13.703.208.000,00)	(13.206.590.087,00)	496.617.913,00	0		





PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 2.17 KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

SKPD : 2-17.3-31.3-30.01 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	12.850.747.600,00	11.877.045.875,00	(973.701.725,00)	92,42		
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12.850.747.600,00	11.877.045.875,00	(973.701.725,00)	92,42		
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	12.850.747.600,00	11.877.045.875,00	(973.701.725,00)	92,42		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	37.620.802.850,00	36.250.726.369,00	(1.370.076.481,00)	96,36		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.050.281.850,00	10.431.303.699,00	(618.978.151,00)	94,40		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48.554.000,00	48.021.425,00	(532.575,00)	98,90		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	33.554.000,00	33.332.775,00	(221.225,00)	99,34		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	33.554.000,00	33.332.775,00	(221.225,00)	99,34		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.554.000,00	33.332.775,00	(221.225,00)	99,34		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000,00	14.688.650,00	(311.350,00)	97,92		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	14.688.650,00	(311.350,00)	97,92		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.688.650,00	(311.350,00)	97,92		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.934.024.850,00	9.453.701.962,00	(480.322.888,00)	95,16		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.836.916.850,00	9.358.265.979,00	(478.650.871,00)	95,13		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	9.836.916.850,00	9.358.265.979,00	(478.650.871,00)	95,13		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	9.836.916.850,00	9.358.265.979,00	(478.650.871,00)	95,13		
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	97.108.000,00	95.435.983,00	(1.672.017,00)	98,28		
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	97.108.000,00	95.435.983,00	(1.672.017,00)	98,28		
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	36.340.000,00	35.440.000,00	(900.000,00)	97,52		
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.768.000,00	59.995.983,00	(772.017,00)	98,73		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	35.000.000,00	34.499.500,00	(500.500,00)	98,57		
01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	35.000.000,00	34.499.500,00	(500.500,00)	98,57		
01.2.05.09.5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	34.499.500,00	(500.500,00)	98,57		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.05.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	34.499.500,00	(500.500,00)	98,57		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	179.600.000,00	177.304.270,00	(2.295.730,00)	98,72		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000,00	19.655.350,00	(344.650,00)	98,28		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	19.655.350,00	(344.650,00)	98,28		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.655.350,00	(344.650,00)	98,28		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	15.000.000,00	14.984.200,00	(15.800,00)	99,89		
01.2.06.07.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	14.984.200,00	(15.800,00)	99,89		
01.2.06.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.984.200,00	(15.800,00)	99,89		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48.000.000,00	46.465.220,00	(1.534.780,00)	96,80		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	48.000.000,00	46.465.220,00	(1.534.780,00)	96,80		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.000.000,00	46.465.220,00	(1.534.780,00)	96,80		
01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.000.000,00	3.599.500,00	(400.500,00)	89,99		
01.2.06.10.5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	3.599.500,00	(400.500,00)	89,99		
01.2.06.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	3.599.500,00	(400.500,00)	89,99		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.000.000,00	19.575.000,00	(425.000,00)	97,88		
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000,00	19.575.000,00	(425.000,00)	97,88		
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	20.000.000,00	19.575.000,00	(425.000,00)	97,88		
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	19.575.000,00	(425.000,00)	97,88		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	650.395.000,00	515.912.945,00	(134.482.055,00)	79,32		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	2.690.000,00	(310.000,00)	89,67		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	2.690.000,00	(310.000,00)	89,67		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.690.000,00	(310.000,00)	89,67		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	623.395.000,00	489.274.545,00	(134.120.455,00)	78,49		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	623.395.000,00	489.274.545,00	(134.120.455,00)	78,49		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	623.395.000,00	489.274.545,00	(134.120.455,00)	78,49		
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.000.000,00	7.948.400,00	(51.600,00)	99,36		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	8.000.000,00	7.948.400,00	(51.600,00)	99,36		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	7.948.400,00	(51.600,00)	99,36		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	182.708.000,00	182.288.597,00	(419.403,00)	99,77		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	142.708.000,00	142.687.197,00	(20.803,00)	99,99		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	142.708.000,00	142.687.197,00	(20.803,00)	99,99		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	142.708.000,00	142.687.197,00	(20.803,00)	99,99		
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.000.000,00	39.601.400,00	(398.600,00)	99,00		
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	39.601.400,00	(398.600,00)	99,00		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	39.601.400,00	(398.600,00)	99,00		
02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.118.500.000,00	1.109.864.013,00	(8.635.987,00)	99,23		
02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1.118.500.000,00	1.109.864.013,00	(8.635.987,00)	99,23		
02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	55.500.000,00	54.894.322,00	(605.678,00)	98,91		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	55.500.000,00	54.894.322,00	(605.678,00)	98,91		
02.2.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	740.000,00	740.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.553.000,00	7.429.322,00	(123.678,00)	98,36		
02.2.01.02.5.1.05	Belanja Hibah	47.207.000,00	46.725.000,00	(482.000,00)	98,98		
02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	137.000.000,00	136.045.608,00	(954.392,00)	99,30		
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	137.000.000,00	136.045.608,00	(954.392,00)	99,30		
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	137.000.000,00	136.045.608,00	(954.392,00)	99,30		
02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	96.000.000,00	93.748.215,00	(2.251.785,00)	97,65		
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	96.000.000,00	93.748.215,00	(2.251.785,00)	97,65		
02.2.01.04.5.1.01	Belanja Pegawai	540.000,00	540.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.731.000,00	67.573.215,00	(2.157.785,00)	96,91		
02.2.01.04.5.1.05	Belanja Hibah	25.729.000,00	25.635.000,00	(94.000,00)	99,63		
02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	830.000.000,00	825.175.868,00	(4.824.132,00)	99,42		
02.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	117.407.000,00	114.099.368,00	(3.307.632,00)	97,18		
02.2.01.05.5.1.01	Belanja Pegawai	3.220.000,00	3.220.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.187.000,00	110.879.368,00	(3.307.632,00)	97,10		
02.2.01.05.5.2	BELANJA MODAL	712.593.000,00	711.076.500,00	(1.516.500,00)	99,79		
02.2.01.05.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	712.593.000,00	711.076.500,00	(1.516.500,00)	99,79		



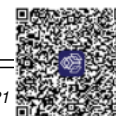
KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	20.000.000,00	19.874.700,00	(125.300,00)	99,37		
03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	20.000.000,00	19.874.700,00	(125.300,00)	99,37		
03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000,00	19.874.700,00	(125.300,00)	99,37		
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	19.874.700,00	(125.300,00)	99,37		
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.874.700,00	(125.300,00)	99,37		
03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	19.333.696.000,00	18.809.503.612,00	(524.192.388,00)	97,29		
03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	18.377.407.000,00	17.874.023.155,00	(503.383.845,00)	97,26		
03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	16.172.707.000,00	15.676.804.713,00	(495.902.287,00)	96,93		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	769.491.000,00	755.156.713,00	(14.334.287,00)	98,14		
03.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	8.723.000,00	8.722.500,00	(500,00)	99,99		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	760.768.000,00	746.434.213,00	(14.333.787,00)	98,12		
03.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	15.403.216.000,00	14.921.648.000,00	(481.568.000,00)	96,87		
03.2.01.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.497.700.000,00	1.459.000.000,00	(38.700.000,00)	97,42		
03.2.01.01.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	12.105.378.000,00	11.675.148.000,00	(430.230.000,00)	96,45		
03.2.01.01.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.800.138.000,00	1.787.500.000,00	(12.638.000,00)	99,30		
03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	2.204.700.000,00	2.197.218.442,00	(7.481.558,00)	99,66		
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	2.204.700.000,00	2.197.218.442,00	(7.481.558,00)	99,66		
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.204.700.000,00	2.197.218.442,00	(7.481.558,00)	99,66		
03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	956.289.000,00	935.480.457,00	(20.808.543,00)	97,82		
03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	599.432.000,00	590.486.615,00	(8.945.385,00)	98,51		
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	599.432.000,00	590.486.615,00	(8.945.385,00)	98,51		
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	599.432.000,00	590.486.615,00	(8.945.385,00)	98,51		
03.2.02.02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	356.857.000,00	344.993.842,00	(11.863.158,00)	96,68		
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	356.857.000,00	344.993.842,00	(11.863.158,00)	96,68		
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	356.857.000,00	344.993.842,00	(11.863.158,00)	96,68		
03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	80.366.000,00	79.572.295,00	(793.705,00)	99,01		
03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	80.366.000,00	79.572.295,00	(793.705,00)	99,01		
03.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	80.366.000,00	79.572.295,00	(793.705,00)	99,01		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	80.366.000,00	79.572.295,00	(793.705,00)	99,01		
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.366.000,00	79.572.295,00	(793.705,00)	99,01		
04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	218.227.000,00	217.039.173,00	(1.187.827,00)	99,46		
04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	114.544.000,00	113.705.372,00	(838.628,00)	99,27		
04.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	114.544.000,00	113.705.372,00	(838.628,00)	99,27		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	114.544.000,00	113.705.372,00	(838.628,00)	99,27		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.544.000,00	113.705.372,00	(838.628,00)	99,27		
04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	103.683.000,00	103.333.801,00	(349.199,00)	99,66		
04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	103.683.000,00	103.333.801,00	(349.199,00)	99,66		
04.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	103.683.000,00	103.333.801,00	(349.199,00)	99,66		
04.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	465.000,00	465.000,00	0,00	100,00		
04.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.218.000,00	102.868.801,00	(349.199,00)	99,66		
04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	43.554.000,00	43.155.903,00	(398.097,00)	99,09		
04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	43.554.000,00	43.155.903,00	(398.097,00)	99,09		
04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	43.554.000,00	43.155.903,00	(398.097,00)	99,09		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	43.554.000,00	43.155.903,00	(398.097,00)	99,09		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.554.000,00	43.155.903,00	(398.097,00)	99,09		
05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	277.287.000,00	266.081.564,00	(11.205.436,00)	95,96		
05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	277.287.000,00	266.081.564,00	(11.205.436,00)	95,96		
05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	277.287.000,00	266.081.564,00	(11.205.436,00)	95,96		
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	277.287.000,00	266.081.564,00	(11.205.436,00)	95,96		
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	178.287.000,00	167.846.564,00	(10.440.436,00)	94,14		
05.2.01.01.5.1.05	Belanja Hibah	99.000.000,00	98.235.000,00	(765.000,00)	99,23		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	325.366.000,00	323.644.489,00	(1.721.511,00)	99,47		
05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	325.366.000,00	323.644.489,00	(1.721.511,00)	99,47		
05.2.01.01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	325.366.000,00	323.644.489,00	(1.721.511,00)	99,47		
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	325.366.000,00	323.644.489,00	(1.721.511,00)	99,47		
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	325.366.000,00	323.644.489,00	(1.721.511,00)	99,47		
06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	445.730.000,00	429.165.134,00	(16.564.866,00)	96,28		
06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	445.730.000,00	429.165.134,00	(16.564.866,00)	96,28		
06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	445.730.000,00	429.165.134,00	(16.564.866,00)	96,28		
06.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	445.730.000,00	429.165.134,00	(16.564.866,00)	96,28		
06.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.837.000,00	5.772.914,00	(64.086,00)	98,90		
06.2.01.01.5.1.05	Belanja Hibah	439.893.000,00	423.392.220,00	(16.500.780,00)	96,25		
06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	173.754.000,00	171.671.936,00	(2.082.064,00)	98,80		
06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	173.754.000,00	171.671.936,00	(2.082.064,00)	98,80		
06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	173.754.000,00	171.671.936,00	(2.082.064,00)	98,80		
06.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	173.754.000,00	171.671.936,00	(2.082.064,00)	98,80		
06.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	171.334.000,00	169.251.936,00	(2.082.064,00)	98,78		
07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1.836.560.000,00	1.740.302.449,00	(96.257.551,00)	94,76		
07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	1.836.560.000,00	1.740.302.449,00	(96.257.551,00)	94,76		
07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	30.000.000,00	29.456.819,00	(543.181,00)	98,19		
07.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	29.456.819,00	(543.181,00)	98,19		
07.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	29.456.819,00	(543.181,00)	98,19		
07.2.01.03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	40.000.000,00	39.940.090,00	(59.910,00)	99,85		
07.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	39.940.090,00	(59.910,00)	99,85		
07.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	39.940.090,00	(59.910,00)	99,85		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	1.766.560.000,00	1.670.905.540,00	(95.654.460,00)	94,59		
07.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	1.766.560.000,00	1.670.905.540,00	(95.654.460,00)	94,59		
07.2.01.04.5.1.01	Belanja Pegawai	4.760.000,00	4.420.000,00	(340.000,00)	92,86		
07.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	819.968.000,00	799.265.140,00	(20.702.860,00)	97,48		
07.2.01.04.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	941.832.000,00	867.220.400,00	(74.611.600,00)	92,08		
07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	639.474.000,00	633.541.053,00	(5.932.947,00)	99,07		
07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	639.474.000,00	633.541.053,00	(5.932.947,00)	99,07		
07.2.01.02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	639.474.000,00	633.541.053,00	(5.932.947,00)	99,07		
07.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	639.474.000,00	633.541.053,00	(5.932.947,00)	99,07		
07.2.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	5.665.000,00	5.665.000,00	0,00	100,00		
07.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	633.809.000,00	627.876.053,00	(5.932.947,00)	99,06		
08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2.058.007.000,00	1.976.006.349,00	(82.000.651,00)	96,02		
08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	2.058.007.000,00	1.976.006.349,00	(82.000.651,00)	96,02		
08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	2.058.007.000,00	1.976.006.349,00	(82.000.651,00)	96,02		
08.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.957.401.000,00	1.876.709.699,00	(80.691.301,00)	95,88		
08.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.090.000,00	0,00	(2.090.000,00)	0		
08.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.005.954.000,00	971.921.199,00	(34.032.801,00)	96,62		
08.2.01.01.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	949.357.000,00	904.788.500,00	(44.568.500,00)	95,31		
08.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	100.606.000,00	99.296.650,00	(1.309.350,00)	98,70		
08.2.01.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.606.000,00	99.296.650,00	(1.309.350,00)	98,70		
	SURPLUS / DEFISIT	(24.770.055.250,00)	(24.373.680.494,00)	396.374.756,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(24.770.055.250,00)	(24.373.680.494,00)	396.374.756,00	0		





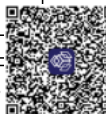
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 2.18 PENANAMAN MODAL

SKPD : 2-18.0-00.0-00.01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

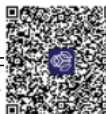
KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	1.493.096.000,00	1.543.956.730,00	50.860.730,00	103,41		
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.493.096.000,00	1.543.956.730,00	50.860.730,00	103,41		
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	1.493.096.000,00	1.543.956.730,00	50.860.730,00	103,41		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	4.967.700.000,00	4.773.980.765,00	(193.719.235,00)	96,10		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.962.509.000,00	3.780.903.145,00	(181.605.855,00)	95,42		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.600.000,00	21.515.900,00	(84.100,00)	99,61		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.500.000,00	11.432.500,00	(67.500,00)	99,41		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	11.500.000,00	11.432.500,00	(67.500,00)	99,41		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000,00	11.432.500,00	(67.500,00)	99,41		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.100.000,00	10.083.400,00	(16.600,00)	99,84		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	10.100.000,00	10.083.400,00	(16.600,00)	99,84		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.100.000,00	10.083.400,00	(16.600,00)	99,84		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.120.929.000,00	2.952.811.713,00	(168.117.287,00)	94,61		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.940.284.000,00	2.773.155.446,00	(167.128.554,00)	94,32		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.940.284.000,00	2.773.155.446,00	(167.128.554,00)	94,32		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.940.284.000,00	2.773.155.446,00	(167.128.554,00)	94,32		
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	180.645.000,00	179.656.267,00	(988.733,00)	99,45		
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	180.645.000,00	179.656.267,00	(988.733,00)	99,45		
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	14.610.000,00	14.610.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	166.035.000,00	165.046.267,00	(988.733,00)	99,40		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	40.000.000,00	39.386.750,00	(613.250,00)	98,47		
01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40.000.000,00	39.386.750,00	(613.250,00)	98,47		
01.2.05.09.5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	39.386.750,00	(613.250,00)	98,47		



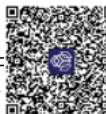
KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.05.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	39.386.750,00	(613.250,00)	98,47		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	199.554.000,00	199.169.123,00	(384.877,00)	99,81		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	27.464.000,00	27.462.600,00	(1.400,00)	99,99		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	27.464.000,00	27.462.600,00	(1.400,00)	99,99		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.464.000,00	27.462.600,00	(1.400,00)	99,99		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	31.430.000,00	31.265.395,00	(164.605,00)	99,48		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	31.430.000,00	31.265.395,00	(164.605,00)	99,48		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.430.000,00	31.265.395,00	(164.605,00)	99,48		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.130.000,00	27.106.900,00	(23.100,00)	99,91		
01.2.06.05.1	BELANJA OPERASI	27.130.000,00	27.106.900,00	(23.100,00)	99,91		
01.2.06.05.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.130.000,00	27.106.900,00	(23.100,00)	99,91		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	29.000.000,00	28.824.850,00	(175.150,00)	99,40		
01.2.06.07.5.1	BELANJA OPERASI	26.947.000,00	26.772.150,00	(174.850,00)	99,35		
01.2.06.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.947.000,00	26.772.150,00	(174.850,00)	99,35		
01.2.06.07.5.2	BELANJA MODAL	2.053.000,00	2.052.700,00	(300,00)	99,99		
01.2.06.07.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.053.000,00	2.052.700,00	(300,00)	99,99		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	82.000.000,00	81.999.778,00	(222,00)	100,00		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	82.000.000,00	81.999.778,00	(222,00)	100,00		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.000.000,00	81.999.778,00	(222,00)	100,00		
01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	930.000,00	909.600,00	(20.400,00)	97,81		
01.2.06.10.5.1	BELANJA OPERASI	930.000,00	909.600,00	(20.400,00)	97,81		
01.2.06.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	930.000,00	909.600,00	(20.400,00)	97,81		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15.125.000,00	15.000.000,00	(125.000,00)	99,17		
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.125.000,00	15.000.000,00	(125.000,00)	99,17		
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	15.125.000,00	15.000.000,00	(125.000,00)	99,17		
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.125.000,00	15.000.000,00	(125.000,00)	99,17		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	247.153.000,00	235.961.718,00	(11.191.282,00)	95,47		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.880.000,00	1.880.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.880.000,00	1.880.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.880.000,00	1.880.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	212.394.000,00	201.208.318,00	(11.185.682,00)	94,73		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	212.394.000,00	201.208.318,00	(11.185.682,00)	94,73		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	212.394.000,00	201.208.318,00	(11.185.682,00)	94,73		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	32.879.000,00	32.873.400,00	(5.600,00)	99,98		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	32.879.000,00	32.873.400,00	(5.600,00)	99,98		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.879.000,00	32.873.400,00	(5.600,00)	99,98		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	318.148.000,00	317.057.941,00	(1.090.059,00)	99,66		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	123.948.000,00	123.258.941,00	(689.059,00)	99,44		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	123.948.000,00	123.258.941,00	(689.059,00)	99,44		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.948.000,00	123.258.941,00	(689.059,00)	99,44		
01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.05.5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.100.000,00	39.086.000,00	(14.000,00)	99,96		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	39.100.000,00	39.086.000,00	(14.000,00)	99,96		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.100.000,00	39.086.000,00	(14.000,00)	99,96		
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	153.100.000,00	152.713.000,00	(387.000,00)	99,75		
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	153.100.000,00	152.713.000,00	(387.000,00)	99,75		
01.2.09.09.5.1.01	Belanja Pegawai	415.000,00	415.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	152.685.000,00	152.298.000,00	(387.000,00)	99,75		
02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	74.900.000,00	73.995.278,00	(904.722,00)	98,79		
02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	43.000.000,00	42.237.850,00	(762.150,00)	98,23		
02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	17.000.000,00	16.925.950,00	(74.050,00)	99,56		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	17.000.000,00	16.925.950,00	(74.050,00)	99,56		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	16.925.950,00	(74.050,00)	99,56		
02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	26.000.000,00	25.311.900,00	(688.100,00)	97,35		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	26.000.000,00	25.311.900,00	(688.100,00)	97,35		
02.2.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	1.515.000,00	1.515.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.485.000,00	23.796.900,00	(688.100,00)	97,19		
02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	31.900.000,00	31.757.428,00	(142.572,00)	99,55		
02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	19.500.000,00	19.434.500,00	(65.500,00)	99,66		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	19.500.000,00	19.434.500,00	(65.500,00)	99,66		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.490.000,00	18.424.500,00	(65.500,00)	99,65		
02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	12.400.000,00	12.322.928,00	(77.072,00)	99,38		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	12.400.000,00	12.322.928,00	(77.072,00)	99,38		
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.400.000,00	12.322.928,00	(77.072,00)	99,38		
03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	223.983.000,00	219.049.650,00	(4.933.350,00)	97,80		
03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	223.983.000,00	219.049.650,00	(4.933.350,00)	97,80		
03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	23.700.000,00	23.619.800,00	(80.200,00)	99,66		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	23.700.000,00	23.619.800,00	(80.200,00)	99,66		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.700.000,00	23.619.800,00	(80.200,00)	99,66		
03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	200.283.000,00	195.429.850,00	(4.853.150,00)	97,58		
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	200.283.000,00	195.429.850,00	(4.853.150,00)	97,58		
03.2.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	197.863.000,00	193.009.850,00	(4.853.150,00)	97,55		
04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	283.240.000,00	282.914.312,00	(325.688,00)	99,89		
04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	283.240.000,00	282.914.312,00	(325.688,00)	99,89		
04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	229.560.000,00	229.418.500,00	(141.500,00)	99,94		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	229.560.000,00	229.418.500,00	(141.500,00)	99,94		
04.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	3.248.000,00	3.247.500,00	(500,00)	99,98		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	226.312.000,00	226.171.000,00	(141.000,00)	99,94		
04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	12.380.000,00	12.339.407,00	(40.593,00)	99,67		
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	12.380.000,00	12.339.407,00	(40.593,00)	99,67		
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.380.000,00	12.339.407,00	(40.593,00)	99,67		
04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	29.410.000,00	29.343.705,00	(66.295,00)	99,77		
04.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	29.410.000,00	29.343.705,00	(66.295,00)	99,77		
04.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.410.000,00	29.343.705,00	(66.295,00)	99,77		
04.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	11.890.000,00	11.812.700,00	(77.300,00)	99,35		
04.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	11.890.000,00	11.812.700,00	(77.300,00)	99,35		
04.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.890.000,00	11.812.700,00	(77.300,00)	99,35		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	399.188.000,00	393.488.420,00	(5.699.580,00)	98,57		
05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	399.188.000,00	393.488.420,00	(5.699.580,00)	98,57		
05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	315.200.000,00	309.696.620,00	(5.503.380,00)	98,25		
05.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	315.200.000,00	309.696.620,00	(5.503.380,00)	98,25		
05.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	315.200.000,00	309.696.620,00	(5.503.380,00)	98,25		
05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	83.988.000,00	83.791.800,00	(196.200,00)	99,77		
05.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	83.988.000,00	83.791.800,00	(196.200,00)	99,77		
05.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.988.000,00	83.791.800,00	(196.200,00)	99,77		
06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	23.880.000,00	23.629.960,00	(250.040,00)	98,95		
06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	23.880.000,00	23.629.960,00	(250.040,00)	98,95		
06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	23.880.000,00	23.629.960,00	(250.040,00)	98,95		
06.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	23.880.000,00	23.629.960,00	(250.040,00)	98,95		
06.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.448.000,00	2.447.500,00	(500,00)	99,98		
06.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.432.000,00	21.182.460,00	(249.540,00)	98,84		
	SURPLUS / DEFISIT	(3.474.604.000,00)	(3.230.024.035,00)	244.579.965,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(3.474.604.000,00)	(3.230.024.035,00)	244.579.965,00	0		





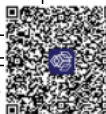
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 2.22 KEBUDAYAAN

SKPD : 2-22.3-26.0-00.01 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	10.000.000.000,00	5.671.441.129,00	(4.328.558.871,00)	56,71		
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10.000.000.000,00	5.671.441.129,00	(4.328.558.871,00)	56,71		
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	10.000.000.000,00	5.671.441.129,00	(4.328.558.871,00)	56,71		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	36.696.848.773,00	35.514.665.183,00	(1.182.183.590,00)	96,78		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.836.327.773,00	6.522.217.273,00	(314.110.500,00)	95,41		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	62.108.000,00	54.944.830,00	(7.163.170,00)	88,47		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	47.108.000,00	40.087.715,00	(7.020.285,00)	85,10		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	47.108.000,00	40.087.715,00	(7.020.285,00)	85,10		
01.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.260.000,00	0,00	(2.260.000,00)	0		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.848.000,00	40.087.715,00	(4.760.285,00)	89,39		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000,00	14.857.115,00	(142.885,00)	99,05		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	14.857.115,00	(142.885,00)	99,05		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.857.115,00	(142.885,00)	99,05		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.479.424.773,00	5.213.574.010,00	(265.850.763,00)	95,15		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.447.424.773,00	5.183.326.847,00	(264.097.926,00)	95,15		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	5.447.424.773,00	5.183.326.847,00	(264.097.926,00)	95,15		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	5.447.424.773,00	5.183.326.847,00	(264.097.926,00)	95,15		
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	32.000.000,00	30.247.163,00	(1.752.837,00)	94,52		
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	32.000.000,00	30.247.163,00	(1.752.837,00)	94,52		
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	25.130.000,00	23.870.000,00	(1.260.000,00)	94,99		
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.870.000,00	6.377.163,00	(492.837,00)	92,83		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	522.753.000,00	511.018.525,00	(11.734.475,00)	97,76		
01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.000.000,00	29.510.000,00	(490.000,00)	98,37		
01.2.05.09.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	29.510.000,00	(490.000,00)	98,37		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.05.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	29.510.000,00	(490.000,00)	98,37		
01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	492.753.000,00	481.508.525,00	(11.244.475,00)	97,72		
01.2.05.10.5.1	BELANJA OPERASI	492.753.000,00	481.508.525,00	(11.244.475,00)	97,72		
01.2.05.10.5.1.01	Belanja Pegawai	3.650.000,00	3.160.000,00	(490.000,00)	86,58		
01.2.05.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	489.103.000,00	478.348.525,00	(10.754.475,00)	97,80		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	197.900.000,00	196.283.750,00	(1.616.250,00)	99,18		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.400.000,00	30.290.000,00	(110.000,00)	99,64		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	30.400.000,00	30.290.000,00	(110.000,00)	99,64		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.400.000,00	30.290.000,00	(110.000,00)	99,64		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33.000.000,00	32.981.500,00	(18.500,00)	99,94		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	33.000.000,00	32.981.500,00	(18.500,00)	99,94		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	32.981.500,00	(18.500,00)	99,94		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	42.000.000,00	41.999.000,00	(1.000,00)	100,00		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	42.000.000,00	41.999.000,00	(1.000,00)	100,00		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	41.999.000,00	(1.000,00)	100,00		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.500.000,00	3.355.000,00	(145.000,00)	95,86		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	3.500.000,00	3.355.000,00	(145.000,00)	95,86		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.355.000,00	(145.000,00)	95,86		
01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	25.000.000,00	24.857.550,00	(142.450,00)	99,43		
01.2.06.07.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	24.857.550,00	(142.450,00)	99,43		
01.2.06.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	24.857.550,00	(142.450,00)	99,43		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	64.000.000,00	62.800.700,00	(1.199.300,00)	98,13		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	64.000.000,00	62.800.700,00	(1.199.300,00)	98,13		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.000.000,00	62.800.700,00	(1.199.300,00)	98,13		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	105.000.000,00	103.235.000,00	(1.765.000,00)	98,32		
01.2.07.05	Pengadaan Mebel	15.000.000,00	14.680.000,00	(320.000,00)	97,87		
01.2.07.05.5.2	BELANJA MODAL	15.000.000,00	14.680.000,00	(320.000,00)	97,87		
01.2.07.05.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	14.680.000,00	(320.000,00)	97,87		
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	90.000.000,00	88.555.000,00	(1.445.000,00)	98,39		
01.2.07.06.5.1	BELANJA OPERASI	4.574.000,00	4.250.000,00	(324.000,00)	92,92		
01.2.07.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.574.000,00	4.250.000,00	(324.000,00)	92,92		
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	85.426.000,00	84.305.000,00	(1.121.000,00)	98,69		
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	85.426.000,00	84.305.000,00	(1.121.000,00)	98,69		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	273.500.000,00	250.598.662,00	(22.901.338,00)	91,63		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	1.987.500,00	(12.500,00)	99,38		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	1.987.500,00	(12.500,00)	99,38		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.987.500,00	(12.500,00)	99,38		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	256.500.000,00	233.701.562,00	(22.798.438,00)	91,11		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	256.500.000,00	233.701.562,00	(22.798.438,00)	91,11		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	256.500.000,00	233.701.562,00	(22.798.438,00)	91,11		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	15.000.000,00	14.909.600,00	(90.400,00)	99,40		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	14.909.600,00	(90.400,00)	99,40		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.909.600,00	(90.400,00)	99,40		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	195.642.000,00	192.562.496,00	(3.079.504,00)	98,43		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	112.210.000,00	109.427.346,00	(2.782.654,00)	97,52		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	112.210.000,00	109.427.346,00	(2.782.654,00)	97,52		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.210.000,00	109.427.346,00	(2.782.654,00)	97,52		
01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.05.5.1	BELANJA OPERASI	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.500.000,00	18.433.000,00	(67.000,00)	99,64		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	18.500.000,00	18.433.000,00	(67.000,00)	99,64		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.500.000,00	18.433.000,00	(67.000,00)	99,64		
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60.632.000,00	60.402.150,00	(229.850,00)	99,62		
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	60.632.000,00	60.402.150,00	(229.850,00)	99,62		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.632.000,00	60.402.150,00	(229.850,00)	99,62		
02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	4.139.238.000,00	3.896.224.927,00	(243.013.073,00)	94,13		
02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	125.977.000,00	122.745.669,00	(3.231.331,00)	97,43		
02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	81.867.000,00	80.100.127,00	(1.766.873,00)	97,84		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	81.867.000,00	80.100.127,00	(1.766.873,00)	97,84		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.867.000,00	80.100.127,00	(1.766.873,00)	97,84		
02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	44.110.000,00	42.645.542,00	(1.464.458,00)	96,68		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	44.110.000,00	42.645.542,00	(1.464.458,00)	96,68		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.110.000,00	42.645.542,00	(1.464.458,00)	96,68		
02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.013.261.000,00	3.773.479.258,00	(239.781.742,00)	94,03		
02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	3.489.786.000,00	3.251.839.258,00	(237.946.742,00)	93,18		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.489.786.000,00	3.251.839.258,00	(237.946.742,00)	93,18		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	4.720.000,00	4.420.000,00	(300.000,00)	93,64		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	818.566.000,00	806.919.258,00	(11.646.742,00)	98,58		
02.2.02.01.5.1.05	Belanja Hibah	2.666.500.000,00	2.440.500.000,00	(226.000.000,00)	91,52		
02.2.02.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	523.475.000,00	521.640.000,00	(1.835.000,00)	99,65		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	523.475.000,00	521.640.000,00	(1.835.000,00)	99,65		
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	523.475.000,00	521.640.000,00	(1.835.000,00)	99,65		
02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.100.585.000,00	3.011.941.094,00	(88.643.906,00)	97,14		
02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	203.683.000,00	202.133.000,00	(1.550.000,00)	99,24		
02.2.02.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	203.683.000,00	202.133.000,00	(1.550.000,00)	99,24		
02.2.02.06.5.1	BELANJA OPERASI	203.683.000,00	202.133.000,00	(1.550.000,00)	99,24		
02.2.02.06.5.1.01	Belanja Pegawai	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	201.263.000,00	199.713.000,00	(1.550.000,00)	99,23		
02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2.821.902.000,00	2.739.206.265,00	(82.695.735,00)	97,07		
02.2.03.02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	95.000.000,00	79.111.607,00	(15.888.393,00)	83,28		
02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	95.000.000,00	79.111.607,00	(15.888.393,00)	83,28		
02.2.03.02.5.1.01	Belanja Pegawai	2.105.000,00	2.082.500,00	(22.500,00)	98,93		
02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.895.000,00	77.029.107,00	(15.865.893,00)	82,92		
02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	343.554.000,00	341.244.300,00	(2.309.700,00)	99,33		
02.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	343.554.000,00	341.244.300,00	(2.309.700,00)	99,33		
02.2.03.04.5.1.01	Belanja Pegawai	1.805.000,00	1.805.000,00	0,00	100,00		
02.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	341.749.000,00	339.439.300,00	(2.309.700,00)	99,32		
02.2.03.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2.383.348.000,00	2.318.850.358,00	(64.497.642,00)	97,29		
02.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	2.132.508.000,00	2.069.729.358,00	(62.778.642,00)	97,06		
02.2.03.06.5.1.01	Belanja Pegawai	10.941.000,00	9.212.500,00	(1.728.500,00)	84,20		
02.2.03.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.121.567.000,00	2.060.516.858,00	(61.050.142,00)	97,12		
02.2.03.06.5.2	BELANJA MODAL	250.840.000,00	249.121.000,00	(1.719.000,00)	99,31		
02.2.03.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	75.000.000,00	74.700.000,00	(300.000,00)	99,60		
02.2.03.06.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	175.840.000,00	174.421.000,00	(1.419.000,00)	99,19		
02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000,00	70.601.829,00	(4.398.171,00)	94,14		
02.2.04.01	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	30.000.000,00	27.604.729,00	(2.395.271,00)	92,02		
02.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	27.604.729,00	(2.395.271,00)	92,02		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	27.604.729,00	(2.395.271,00)	92,02		
02.2.04.03	Pengelolaan Investasi Pariwisata	45.000.000,00	42.997.100,00	(2.002.900,00)	95,55		
02.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	45.000.000,00	42.997.100,00	(2.002.900,00)	95,55		
02.2.04.03.5.1.01	Belanja Pegawai	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	100,00		
02.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.980.000,00	40.977.100,00	(2.002.900,00)	95,34		
03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	2.390.924.000,00	2.320.188.566,00	(70.735.434,00)	97,04		
03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	2.390.924.000,00	2.320.188.566,00	(70.735.434,00)	97,04		
03.2.01.02	Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	2.390.924.000,00	2.320.188.566,00	(70.735.434,00)	97,04		
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	2.390.924.000,00	2.320.188.566,00	(70.735.434,00)	97,04		
03.2.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	7.537.500,00	6.567.500,00	(970.000,00)	87,13		
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.383.386.500,00	2.313.621.066,00	(69.765.434,00)	97,07		
05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	20.169.774.000,00	19.704.577.373,00	(465.196.627,00)	97,69		
05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	20.169.774.000,00	19.704.577.373,00	(465.196.627,00)	97,69		
05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	87.456.000,00	83.693.950,00	(3.762.050,00)	95,70		
05.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	87.456.000,00	83.693.950,00	(3.762.050,00)	95,70		
05.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.456.000,00	83.693.950,00	(3.762.050,00)	95,70		
05.2.02.02	Pengembangan Cagar Budaya	20.082.318.000,00	19.620.883.423,00	(461.434.577,00)	97,70		
05.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	82.318.000,00	67.655.594,00	(14.662.406,00)	82,19		
05.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.318.000,00	67.655.594,00	(14.662.406,00)	82,19		
05.2.02.02.5.2	BELANJA MODAL	20.000.000.000,00	19.553.227.829,00	(446.772.171,00)	97,77		
05.2.02.02.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20.000.000.000,00	19.553.227.829,00	(446.772.171,00)	97,77		
05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	60.000.000,00	59.515.950,00	(484.050,00)	99,19		
05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	60.000.000,00	59.515.950,00	(484.050,00)	99,19		
05.2.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	60.000.000,00	59.515.950,00	(484.050,00)	99,19		
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	59.515.950,00	(484.050,00)	99,19		
05.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.980.000,00	57.495.950,00	(484.050,00)	99,17		
	SURPLUS / DEFISIT	(26.696.848.773,00)	(29.843.224.054,00)	(3.146.375.281,00)	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(26.696.848.773,00)	(29.843.224.054,00)	(3.146.375.281,00)	0		





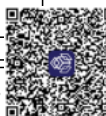
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 2.23 PERPUSTAKAAN

SKPD : 2-23.2-24.0-00.01 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	4.143.851.335,00	3.874.762.340,00	(269.088.995,00)	93,51		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.254.237.335,00	2.989.979.646,00	(264.257.689,00)	91,88		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.710.000,00	25.235.700,00	(474.300,00)	98,16		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.000.000,00	15.602.200,00	(397.800,00)	97,51		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	16.000.000,00	15.602.200,00	(397.800,00)	97,51		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	15.602.200,00	(397.800,00)	97,51		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.710.000,00	9.633.500,00	(76.500,00)	99,21		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	9.710.000,00	9.633.500,00	(76.500,00)	99,21		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.710.000,00	9.633.500,00	(76.500,00)	99,21		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.579.912.435,00	2.334.755.136,00	(245.157.299,00)	90,50		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.562.912.435,00	2.317.790.076,00	(245.122.359,00)	90,44		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.562.912.435,00	2.317.790.076,00	(245.122.359,00)	90,44		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.562.912.435,00	2.317.790.076,00	(245.122.359,00)	90,44		
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	17.000.000,00	16.965.060,00	(34.940,00)	99,79		
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	17.000.000,00	16.965.060,00	(34.940,00)	99,79		
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	12.680.000,00	12.680.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.320.000,00	4.285.060,00	(34.940,00)	99,19		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.000.000,00	24.455.400,00	(544.600,00)	97,82		
01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25.000.000,00	24.455.400,00	(544.600,00)	97,82		
01.2.05.11.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	24.455.400,00	(544.600,00)	97,82		
01.2.05.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	24.455.400,00	(544.600,00)	97,82		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	109.500.000,00	108.700.049,00	(799.951,00)	99,27		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.000.000,00	16.999.900,00	(100,00)	100,00		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	17.000.000,00	16.999.900,00	(100,00)	100,00		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	16.999.900,00	(100,00)	100,00		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.500.000,00	16.486.760,00	(13.240,00)	99,92		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	16.500.000,00	16.486.760,00	(13.240,00)	99,92		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.500.000,00	16.486.760,00	(13.240,00)	99,92		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.000.000,00	11.994.400,00	(5.600,00)	99,95		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	11.994.400,00	(5.600,00)	99,95		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	11.994.400,00	(5.600,00)	99,95		
01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	17.000.000,00	16.908.150,00	(91.850,00)	99,46		
01.2.06.07.5.1	BELANJA OPERASI	17.000.000,00	16.908.150,00	(91.850,00)	99,46		
01.2.06.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	16.908.150,00	(91.850,00)	99,46		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.000.000,00	39.326.889,00	(673.111,00)	98,32		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	39.326.889,00	(673.111,00)	98,32		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	39.326.889,00	(673.111,00)	98,32		
01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7.000.000,00	6.983.950,00	(16.050,00)	99,77		
01.2.06.10.5.1	BELANJA OPERASI	7.000.000,00	6.983.950,00	(16.050,00)	99,77		
01.2.06.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	6.983.950,00	(16.050,00)	99,77		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	45.000.000,00	43.441.500,00	(1.558.500,00)	96,54		
01.2.07.05	Pengadaan Mebel	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.07.05.5.2	BELANJA MODAL	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.07.05.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.000.000,00	38.441.500,00	(1.558.500,00)	96,10		
01.2.07.06.5.1	BELANJA OPERASI	7.750.000,00	7.672.500,00	(77.500,00)	99,00		
01.2.07.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.750.000,00	7.672.500,00	(77.500,00)	99,00		
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	32.250.000,00	30.769.000,00	(1.481.000,00)	95,41		
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.250.000,00	30.769.000,00	(1.481.000,00)	95,41		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	295.200.000,00	283.156.051,00	(12.043.949,00)	95,92		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	2.200.000,00	(800.000,00)	73,33		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	2.200.000,00	(800.000,00)	73,33		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.200.000,00	(800.000,00)	73,33		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	226.600.000,00	215.447.551,00	(11.152.449,00)	95,08		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	226.600.000,00	215.447.551,00	(11.152.449,00)	95,08		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	226.600.000,00	215.447.551,00	(11.152.449,00)	95,08		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	65.600.000,00	65.508.500,00	(91.500,00)	99,86		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	65.600.000,00	65.508.500,00	(91.500,00)	99,86		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.600.000,00	65.508.500,00	(91.500,00)	99,86		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	173.914.900,00	170.235.810,00	(3.679.090,00)	97,88		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	86.423.000,00	83.030.810,00	(3.392.190,00)	96,07		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	86.423.000,00	83.030.810,00	(3.392.190,00)	96,07		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.423.000,00	83.030.810,00	(3.392.190,00)	96,07		
01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	10.300.000,00	10.290.000,00	(10.000,00)	99,90		
01.2.09.05.5.1	BELANJA OPERASI	10.300.000,00	10.290.000,00	(10.000,00)	99,90		
01.2.09.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.300.000,00	10.290.000,00	(10.000,00)	99,90		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000,00	19.915.000,00	(85.000,00)	99,58		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	19.915.000,00	(85.000,00)	99,58		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.915.000,00	(85.000,00)	99,58		
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	57.191.900,00	57.000.000,00	(191.900,00)	99,66		
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	57.191.900,00	57.000.000,00	(191.900,00)	99,66		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.191.900,00	57.000.000,00	(191.900,00)	99,66		
02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	504.874.000,00	500.800.611,00	(4.073.389,00)	99,19		
02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	410.355.000,00	406.578.011,00	(3.776.989,00)	99,08		
02.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	11.052.000,00	11.007.606,00	(44.394,00)	99,60		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	11.052.000,00	11.007.606,00	(44.394,00)	99,60		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.052.000,00	11.007.606,00	(44.394,00)	99,60		
02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	19.376.000,00	19.309.450,00	(66.550,00)	99,66		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	19.376.000,00	19.309.450,00	(66.550,00)	99,66		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.376.000,00	19.309.450,00	(66.550,00)	99,66		
02.2.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	203.444.000,00	203.265.575,00	(178.425,00)	99,91		
02.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	203.444.000,00	203.265.575,00	(178.425,00)	99,91		
02.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	203.444.000,00	203.265.575,00	(178.425,00)	99,91		
02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	176.483.000,00	172.995.380,00	(3.487.620,00)	98,02		
02.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	56.483.000,00	56.381.000,00	(102.000,00)	99,82		
02.2.01.09.5.1.01	Belanja Pegawai	3.665.000,00	3.665.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.818.000,00	52.716.000,00	(102.000,00)	99,81		
02.2.01.09.5.2	BELANJA MODAL	120.000.000,00	116.614.380,00	(3.385.620,00)	97,18		
02.2.01.09.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	120.000.000,00	116.614.380,00	(3.385.620,00)	97,18		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	94.519.000,00	94.222.600,00	(296.400,00)	99,69		
02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	15.050.000,00	15.048.500,00	(1.500,00)	99,99		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	15.050.000,00	15.048.500,00	(1.500,00)	99,99		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.050.000,00	15.048.500,00	(1.500,00)	99,99		
02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	79.469.000,00	79.174.100,00	(294.900,00)	99,63		
02.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	79.469.000,00	79.174.100,00	(294.900,00)	99,63		
02.2.02.04.5.1.01	Belanja Pegawai	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.449.000,00	77.154.100,00	(294.900,00)	99,62		
02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	365.822.000,00	365.066.263,00	(755.737,00)	99,79		
02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	290.274.000,00	289.595.413,00	(678.587,00)	99,77		
02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	175.542.000,00	174.919.913,00	(622.087,00)	99,65		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	175.542.000,00	174.919.913,00	(622.087,00)	99,65		
02.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.815.000,00	1.815.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	173.727.000,00	173.104.913,00	(622.087,00)	99,64		
02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	114.732.000,00	114.675.500,00	(56.500,00)	99,95		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	114.732.000,00	114.675.500,00	(56.500,00)	99,95		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.732.000,00	114.675.500,00	(56.500,00)	99,95		
02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	25.148.000,00	25.090.500,00	(57.500,00)	99,77		
02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	25.148.000,00	25.090.500,00	(57.500,00)	99,77		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	25.148.000,00	25.090.500,00	(57.500,00)	99,77		
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.148.000,00	25.090.500,00	(57.500,00)	99,77		
02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	50.400.000,00	50.380.350,00	(19.650,00)	99,96		
02.2.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	50.400.000,00	50.380.350,00	(19.650,00)	99,96		
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	50.400.000,00	50.380.350,00	(19.650,00)	99,96		
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.400.000,00	50.380.350,00	(19.650,00)	99,96		
03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	18.918.000,00	18.915.820,00	(2.180,00)	99,99		
03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	18.918.000,00	18.915.820,00	(2.180,00)	99,99		
03.2.01.01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	18.918.000,00	18.915.820,00	(2.180,00)	99,99		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	18.918.000,00	18.915.820,00	(2.180,00)	99,99		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.918.000,00	18.915.820,00	(2.180,00)	99,99		
	SURPLUS / DEFISIT	(4.143.851.335,00)	(3.874.762.340,00)	269.088.995,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(4.143.851.335,00)	(3.874.762.340,00)	269.088.995,00	0		





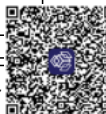
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 3.29 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

SKPD : 3-29.3-32.2-07.01 DINAS TENAGA KERJA

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	82.500.000,00	84.120.000,00	1.620.000,00	101,96		
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	82.500.000,00	84.120.000,00	1.620.000,00	101,96		
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	82.500.000,00	84.120.000,00	1.620.000,00	101,96		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	7.230.186.000,00	7.158.219.147,00	(71.966.853,00)	99,00		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.885.294.000,00	5.816.951.124,00	(68.342.876,00)	98,84		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	102.108.000,00	101.268.450,00	(839.550,00)	99,18		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	82.108.000,00	81.345.850,00	(762.150,00)	99,07		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	82.108.000,00	81.345.850,00	(762.150,00)	99,07		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.108.000,00	81.345.850,00	(762.150,00)	99,07		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000,00	19.922.600,00	(77.400,00)	99,61		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	19.922.600,00	(77.400,00)	99,61		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.922.600,00	(77.400,00)	99,61		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.228.854.000,00	5.172.532.343,00	(56.321.657,00)	98,92		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.197.854.000,00	5.141.677.798,00	(56.176.202,00)	98,92		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	5.197.854.000,00	5.141.677.798,00	(56.176.202,00)	98,92		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	5.197.854.000,00	5.141.677.798,00	(56.176.202,00)	98,92		
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	31.000.000,00	30.854.545,00	(145.455,00)	99,53		
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	31.000.000,00	30.854.545,00	(145.455,00)	99,53		
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.400.000,00	17.254.545,00	(145.455,00)	99,16		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.000.000,00	29.999.800,00	(200,00)	100,00		
01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.000.000,00	29.999.800,00	(200,00)	100,00		
01.2.05.09.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	29.999.800,00	(200,00)	100,00		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.05.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	29.999.800,00	(200,00)	100,00		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	63.478.000,00	63.411.393,00	(66.607,00)	99,90		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.000.000,00	12.996.750,00	(3.250,00)	99,98		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	13.000.000,00	12.996.750,00	(3.250,00)	99,98		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	12.996.750,00	(3.250,00)	99,98		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	2.999.900,00	(100,00)	100,00		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	2.999.900,00	(100,00)	100,00		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.999.900,00	(100,00)	100,00		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	7.686.000,00	7.648.600,00	(37.400,00)	99,51		
01.2.06.07.5.1	BELANJA OPERASI	7.686.000,00	7.648.600,00	(37.400,00)	99,51		
01.2.06.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.686.000,00	7.648.600,00	(37.400,00)	99,51		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26.700.000,00	26.699.843,00	(157,00)	100,00		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	26.700.000,00	26.699.843,00	(157,00)	100,00		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.700.000,00	26.699.843,00	(157,00)	100,00		
01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.092.000,00	5.066.300,00	(25.700,00)	99,50		
01.2.06.10.5.1	BELANJA OPERASI	5.092.000,00	5.066.300,00	(25.700,00)	99,50		
01.2.06.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.092.000,00	5.066.300,00	(25.700,00)	99,50		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	22.000.000,00	21.350.000,00	(650.000,00)	97,05		
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.000.000,00	21.350.000,00	(650.000,00)	97,05		
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	22.000.000,00	21.350.000,00	(650.000,00)	97,05		
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.000.000,00	21.350.000,00	(650.000,00)	97,05		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	327.432.000,00	317.084.711,00	(10.347.289,00)	96,84		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000,00	1.123.000,00	(77.000,00)	93,58		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.200.000,00	1.123.000,00	(77.000,00)	93,58		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.123.000,00	(77.000,00)	93,58		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	160.000.000,00	149.731.811,00	(10.268.189,00)	93,58		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	160.000.000,00	149.731.811,00	(10.268.189,00)	93,58		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.000.000,00	149.731.811,00	(10.268.189,00)	93,58		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	166.232.000,00	166.229.900,00	(2.100,00)	100,00		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	166.232.000,00	166.229.900,00	(2.100,00)	100,00		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	166.232.000,00	166.229.900,00	(2.100,00)	100,00		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	111.422.000,00	111.304.427,00	(117.573,00)	99,89		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	79.775.000,00	79.714.427,00	(60.573,00)	99,92		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	79.775.000,00	79.714.427,00	(60.573,00)	99,92		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.775.000,00	79.714.427,00	(60.573,00)	99,92		
01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	4.647.000,00	4.590.000,00	(57.000,00)	98,77		
01.2.09.05.5.1	BELANJA OPERASI	4.647.000,00	4.590.000,00	(57.000,00)	98,77		
01.2.09.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.647.000,00	4.590.000,00	(57.000,00)	98,77		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00		
02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	50.000.000,00	49.917.960,00	(82.040,00)	99,84		
02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	50.000.000,00	49.917.960,00	(82.040,00)	99,84		
02.2.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	50.000.000,00	49.917.960,00	(82.040,00)	99,84		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	49.917.960,00	(82.040,00)	99,84		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.917.960,00	(82.040,00)	99,84		
03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	456.152.000,00	455.239.487,00	(912.513,00)	99,80		
03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	434.152.000,00	433.280.687,00	(871.313,00)	99,80		
03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi	384.152.000,00	383.545.287,00	(606.713,00)	99,84		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	384.152.000,00	383.545.287,00	(606.713,00)	99,84		
03.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	3.220.000,00	3.220.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	380.932.000,00	380.325.287,00	(606.713,00)	99,84		
03.2.01.02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	50.000.000,00	49.735.400,00	(264.600,00)	99,47		
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	49.735.400,00	(264.600,00)	99,47		
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.735.400,00	(264.600,00)	99,47		
03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	22.000.000,00	21.958.800,00	(41.200,00)	99,81		
03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	22.000.000,00	21.958.800,00	(41.200,00)	99,81		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	22.000.000,00	21.958.800,00	(41.200,00)	99,81		
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	21.958.800,00	(41.200,00)	99,81		
03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	139.000.000,00	138.374.027,00	(625.973,00)	99,55		
03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	139.000.000,00	138.374.027,00	(625.973,00)	99,55		
03.2.01.04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	139.000.000,00	138.374.027,00	(625.973,00)	99,55		
03.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	139.000.000,00	138.374.027,00	(625.973,00)	99,55		
03.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.000.000,00	138.374.027,00	(625.973,00)	99,55		
04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	532.464.000,00	530.719.872,00	(1.744.128,00)	99,67		
04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	278.285.000,00	277.058.567,00	(1.226.433,00)	99,56		
04.2.01.02	Pelayanan antar Kerja	171.049.000,00	170.461.445,00	(587.555,00)	99,66		
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	171.049.000,00	170.461.445,00	(587.555,00)	99,66		
04.2.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	4.830.000,00	4.830.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	166.219.000,00	165.631.445,00	(587.555,00)	99,65		
04.2.01.04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	32.236.000,00	31.952.522,00	(283.478,00)	99,12		
04.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	32.236.000,00	31.952.522,00	(283.478,00)	99,12		
04.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.236.000,00	31.952.522,00	(283.478,00)	99,12		
04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	75.000.000,00	74.644.600,00	(355.400,00)	99,53		
04.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	75.000.000,00	74.644.600,00	(355.400,00)	99,53		
04.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	74.644.600,00	(355.400,00)	99,53		
04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	254.179.000,00	253.661.305,00	(517.695,00)	99,80		
04.2.04.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	85.564.000,00	85.345.380,00	(218.620,00)	99,74		
04.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	85.564.000,00	85.345.380,00	(218.620,00)	99,74		
04.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.564.000,00	85.345.380,00	(218.620,00)	99,74		
04.2.04.02	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	87.049.000,00	86.821.866,00	(227.134,00)	99,74		
04.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	87.049.000,00	86.821.866,00	(227.134,00)	99,74		
04.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.049.000,00	86.821.866,00	(227.134,00)	99,74		
04.2.04.03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	81.566.000,00	81.494.059,00	(71.941,00)	99,91		
04.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	81.566.000,00	81.494.059,00	(71.941,00)	99,91		
04.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.566.000,00	81.494.059,00	(71.941,00)	99,91		
05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	157.276.000,00	157.028.500,00	(247.500,00)	99,84		
05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	157.276.000,00	157.028.500,00	(247.500,00)	99,84		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	157.276.000,00	157.028.500,00	(247.500,00)	99,84		
05.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	157.276.000,00	157.028.500,00	(247.500,00)	99,84		
05.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	157.276.000,00	157.028.500,00	(247.500,00)	99,84		
05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	10.000.000,00	9.988.177,00	(11.823,00)	99,88		
05.2.01	Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000,00	9.988.177,00	(11.823,00)	99,88		
05.2.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000,00	9.988.177,00	(11.823,00)	99,88		
05.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.988.177,00	(11.823,00)	99,88		
05.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.988.177,00	(11.823,00)	99,88		
	SURPLUS / DEFISIT	(7.147.686.000,00)	(7.074.099.147,00)	73.586.853,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(7.147.686.000,00)	(7.074.099.147,00)	73.586.853,00	0		





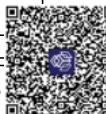
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH

SKPD : 4-01.0-00.0-00.01 SEKRETARIAT DAERAH

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	81.900.000,00	158.132.000,00	76.232.000,00	193,08		
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	81.900.000,00	158.132.000,00	76.232.000,00	193,08		
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	81.900.000,00	158.132.000,00	76.232.000,00	193,08		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	59.089.486.000,00	57.131.754.729,00	(1.957.731.271,00)	96,69		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	34.171.241.000,00	33.067.769.265,00	(1.103.471.735,00)	96,77		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.491.495.000,00	18.998.588.558,00	(492.906.442,00)	97,47		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.340.497.000,00	18.852.245.324,00	(488.251.676,00)	97,48		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	19.340.497.000,00	18.852.245.324,00	(488.251.676,00)	97,48		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	19.340.497.000,00	18.852.245.324,00	(488.251.676,00)	97,48		
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	150.998.000,00	146.343.234,00	(4.654.766,00)	96,92		
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	150.998.000,00	146.343.234,00	(4.654.766,00)	96,92		
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	38.120.000,00	35.655.000,00	(2.465.000,00)	93,53		
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.878.000,00	110.688.234,00	(2.189.766,00)	98,06		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	545.650.000,00	541.740.950,00	(3.909.050,00)	99,28		
01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	23.000.000,00	22.236.800,00	(763.200,00)	96,68		
01.2.05.03.5.1	BELANJA OPERASI	23.000.000,00	22.236.800,00	(763.200,00)	96,68		
01.2.05.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.000.000,00	22.236.800,00	(763.200,00)	96,68		
01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	522.650.000,00	519.504.150,00	(3.145.850,00)	99,40		
01.2.05.10.5.1	BELANJA OPERASI	522.650.000,00	519.504.150,00	(3.145.850,00)	99,40		
01.2.05.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	522.650.000,00	519.504.150,00	(3.145.850,00)	99,40		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.351.930.000,00	3.320.972.741,00	(30.957.259,00)	99,08		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	177.680.000,00	177.670.000,00	(10.000,00)	99,99		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	177.680.000,00	177.670.000,00	(10.000,00)	99,99		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	177.680.000,00	177.670.000,00	(10.000,00)	99,99		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.500.000.000,00	1.499.312.650,00	(687.350,00)	99,95		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000.000,00	1.499.312.650,00	(687.350,00)	99,95		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000.000,00	1.499.312.650,00	(687.350,00)	99,95		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	81.700.000,00	79.912.500,00	(1.787.500,00)	97,81		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	81.700.000,00	79.912.500,00	(1.787.500,00)	97,81		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.700.000,00	79.912.500,00	(1.787.500,00)	97,81		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	22.150.000,00	20.390.000,00	(1.760.000,00)	92,05		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	22.150.000,00	20.390.000,00	(1.760.000,00)	92,05		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.150.000,00	20.390.000,00	(1.760.000,00)	92,05		
01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	64.720.000,00	64.501.700,00	(218.300,00)	99,66		
01.2.06.07.5.1	BELANJA OPERASI	64.720.000,00	64.501.700,00	(218.300,00)	99,66		
01.2.06.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.720.000,00	64.501.700,00	(218.300,00)	99,66		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.505.680.000,00	1.479.185.891,00	(26.494.109,00)	98,24		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	1.505.680.000,00	1.479.185.891,00	(26.494.109,00)	98,24		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.505.680.000,00	1.479.185.891,00	(26.494.109,00)	98,24		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.053.086.000,00	1.000.606.750,00	(52.479.250,00)	95,02		
01.2.07.05	Pengadaan Mebel	76.467.000,00	68.037.750,00	(8.429.250,00)	88,98		
01.2.07.05.5.2	BELANJA MODAL	76.467.000,00	68.037.750,00	(8.429.250,00)	88,98		
01.2.07.05.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	76.467.000,00	68.037.750,00	(8.429.250,00)	88,98		
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	194.929.000,00	184.440.000,00	(10.489.000,00)	94,62		
01.2.07.06.5.1	BELANJA OPERASI	75.000,00	0,00	(75.000,00)	0		
01.2.07.06.5.1.01	Belanja Pegawai	75.000,00	0,00	(75.000,00)	0		
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	194.854.000,00	184.440.000,00	(10.414.000,00)	94,66		
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	194.854.000,00	184.440.000,00	(10.414.000,00)	94,66		
01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	781.690.000,00	748.129.000,00	(33.561.000,00)	95,71		
01.2.07.10.5.1	BELANJA OPERASI	276.491.000,00	268.123.000,00	(8.368.000,00)	96,97		
01.2.07.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	276.491.000,00	268.123.000,00	(8.368.000,00)	96,97		
01.2.07.10.5.2	BELANJA MODAL	505.199.000,00	480.006.000,00	(25.193.000,00)	95,01		
01.2.07.10.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	505.199.000,00	480.006.000,00	(25.193.000,00)	95,01		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.180.919.000,00	2.050.764.337,00	(130.154.663,00)	94,03		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.200.000,00	4.940.500,00	(259.500,00)	95,01		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	5.200.000,00	4.940.500,00	(259.500,00)	95,01		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	4.940.500,00	(259.500,00)	95,01		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	934.000.000,00	853.425.650,00	(80.574.350,00)	91,37		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	934.000.000,00	853.425.650,00	(80.574.350,00)	91,37		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	934.000.000,00	853.425.650,00	(80.574.350,00)	91,37		
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	92.423.000,00	76.930.355,00	(15.492.645,00)	83,24		
01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	92.423.000,00	76.930.355,00	(15.492.645,00)	83,24		
01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.423.000,00	76.930.355,00	(15.492.645,00)	83,24		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.149.296.000,00	1.115.467.832,00	(33.828.168,00)	97,06		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	1.149.296.000,00	1.115.467.832,00	(33.828.168,00)	97,06		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.149.296.000,00	1.115.467.832,00	(33.828.168,00)	97,06		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.510.340.000,00	4.287.746.345,00	(222.593.655,00)	95,06		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.367.962.000,00	1.322.633.262,00	(45.328.738,00)	96,69		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.367.962.000,00	1.322.633.262,00	(45.328.738,00)	96,69		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.367.962.000,00	1.322.633.262,00	(45.328.738,00)	96,69		
01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	62.952.000,00	62.018.000,00	(934.000,00)	98,52		
01.2.09.05.5.1	BELANJA OPERASI	62.952.000,00	62.018.000,00	(934.000,00)	98,52		
01.2.09.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.952.000,00	62.018.000,00	(934.000,00)	98,52		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.720.000,00	24.536.000,00	(184.000,00)	99,26		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	24.720.000,00	24.536.000,00	(184.000,00)	99,26		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.720.000,00	24.536.000,00	(184.000,00)	99,26		
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.054.706.000,00	2.878.559.083,00	(176.146.917,00)	94,23		
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	3.054.706.000,00	2.878.559.083,00	(176.146.917,00)	94,23		
01.2.09.09.5.1.01	Belanja Pegawai	8.488.000,00	7.252.500,00	(1.235.500,00)	85,44		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.046.218.000,00	2.871.306.583,00	(174.911.417,00)	94,26		
01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.147.194.000,00	1.019.056.641,00	(128.137.359,00)	88,83		
01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	302.394.000,00	174.976.641,00	(127.417.359,00)	57,86		
01.2.11.01.5.1	BELANJA OPERASI	302.394.000,00	174.976.641,00	(127.417.359,00)	57,86		
01.2.11.01.5.1.01	Belanja Pegawai	302.394.000,00	174.976.641,00	(127.417.359,00)	57,86		
01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	205.000.000,00	204.995.000,00	(5.000,00)	100,00		
01.2.11.02.5.1	BELANJA OPERASI	205.000.000,00	204.995.000,00	(5.000,00)	100,00		
01.2.11.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	205.000.000,00	204.995.000,00	(5.000,00)	100,00		
01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00		
01.2.11.03.5.1	BELANJA OPERASI	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00		
01.2.11.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	635.000.000,00	634.285.000,00	(715.000,00)	99,89		
01.2.11.04.5.1	BELANJA OPERASI	635.000.000,00	634.285.000,00	(715.000,00)	99,89		
01.2.11.04.5.1.01	Belanja Pegawai	635.000.000,00	634.285.000,00	(715.000,00)	99,89		
01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	883.645.000,00	860.286.492,00	(23.358.508,00)	97,36		
01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	677.419.000,00	655.170.739,00	(22.248.261,00)	96,72		
01.2.12.01.5.1	BELANJA OPERASI	677.419.000,00	655.170.739,00	(22.248.261,00)	96,72		
01.2.12.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	677.419.000,00	655.170.739,00	(22.248.261,00)	96,72		
01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	206.226.000,00	205.115.753,00	(1.110.247,00)	99,46		
01.2.12.02.5.1	BELANJA OPERASI	206.226.000,00	205.115.753,00	(1.110.247,00)	99,46		
01.2.12.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	206.226.000,00	205.115.753,00	(1.110.247,00)	99,46		
01.2.13	Penataan Organisasi	336.400.000,00	332.702.777,00	(3.697.223,00)	98,90		
01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	120.000.000,00	118.782.436,00	(1.217.564,00)	98,99		
01.2.13.01.5.1	BELANJA OPERASI	120.000.000,00	118.782.436,00	(1.217.564,00)	98,99		
01.2.13.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	118.782.436,00	(1.217.564,00)	98,99		
01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	120.000.000,00	119.334.487,00	(665.513,00)	99,45		
01.2.13.02.5.1	BELANJA OPERASI	120.000.000,00	119.334.487,00	(665.513,00)	99,45		
01.2.13.02.5.1.01	Belanja Pegawai	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	100,00		
01.2.13.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.400.000,00	111.734.487,00	(665.513,00)	99,41		
01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	96.400.000,00	94.585.854,00	(1.814.146,00)	98,12		
01.2.13.03.5.1	BELANJA OPERASI	96.400.000,00	94.585.854,00	(1.814.146,00)	98,12		
01.2.13.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.400.000,00	94.585.854,00	(1.814.146,00)	98,12		
01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	670.582.000,00	655.303.674,00	(15.278.326,00)	97,72		
01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	379.816.000,00	376.176.732,00	(3.639.268,00)	99,04		
01.2.14.01.5.1	BELANJA OPERASI	379.816.000,00	376.176.732,00	(3.639.268,00)	99,04		
01.2.14.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	379.816.000,00	376.176.732,00	(3.639.268,00)	99,04		
01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	139.599.000,00	133.562.335,00	(6.036.665,00)	95,68		
01.2.14.02.5.1	BELANJA OPERASI	139.599.000,00	133.562.335,00	(6.036.665,00)	95,68		
01.2.14.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.599.000,00	133.562.335,00	(6.036.665,00)	95,68		
01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	151.167.000,00	145.564.607,00	(5.602.393,00)	96,29		
01.2.14.03.5.1	BELANJA OPERASI	151.167.000,00	145.564.607,00	(5.602.393,00)	96,29		
01.2.14.03.5.1.01	Belanja Pegawai	8.720.000,00	8.720.000,00	0,00	100,00		
01.2.14.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	142.447.000,00	136.844.607,00	(5.602.393,00)	96,07		
02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	23.444.762.000,00	22.667.281.813,00	(777.480.187,00)	96,68		
02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	1.303.210.000,00	1.300.112.553,00	(3.097.447,00)	99,76		
02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	76.460.000,00	76.145.269,00	(314.731,00)	99,59		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	76.460.000,00	76.145.269,00	(314.731,00)	99,59		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.460.000,00	76.145.269,00	(314.731,00)	99,59		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	63.490.000,00	62.982.725,00	(507.275,00)	99,20		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	63.490.000,00	62.982.725,00	(507.275,00)	99,20		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.490.000,00	62.982.725,00	(507.275,00)	99,20		
02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1.163.260.000,00	1.160.984.559,00	(2.275.441,00)	99,80		
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.163.260.000,00	1.160.984.559,00	(2.275.441,00)	99,80		
02.2.01.03.5.1.01	Belanja Pegawai	10.300.000,00	10.300.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.152.960.000,00	1.150.684.559,00	(2.275.441,00)	99,80		
02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	21.675.295.000,00	20.953.862.980,00	(721.432.020,00)	96,67		
02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	20.582.295.000,00	19.963.090.230,00	(619.204.770,00)	96,99		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	20.582.295.000,00	19.963.090.230,00	(619.204.770,00)	96,99		
02.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	23.810.000,00	23.810.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.059.190.000,00	2.852.985.230,00	(206.204.770,00)	93,26		
02.2.02.01.5.1.05	Belanja Hibah	15.501.295.000,00	15.091.295.000,00	(410.000.000,00)	97,36		
02.2.02.01.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.998.000.000,00	1.995.000.000,00	(3.000.000,00)	99,85		
02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	379.400.000,00	368.935.650,00	(10.464.350,00)	97,24		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	379.400.000,00	368.935.650,00	(10.464.350,00)	97,24		
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	379.400.000,00	368.935.650,00	(10.464.350,00)	97,24		
02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	713.600.000,00	621.837.100,00	(91.762.900,00)	87,14		
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	713.600.000,00	621.837.100,00	(91.762.900,00)	87,14		
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	713.600.000,00	621.837.100,00	(91.762.900,00)	87,14		
02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	441.277.000,00	388.497.638,00	(52.779.362,00)	88,04		
02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	57.560.000,00	57.223.993,00	(336.007,00)	99,42		
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	57.560.000,00	57.223.993,00	(336.007,00)	99,42		
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.560.000,00	57.223.993,00	(336.007,00)	99,42		
02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	309.447.000,00	257.522.441,00	(51.924.559,00)	83,22		
02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	309.447.000,00	257.522.441,00	(51.924.559,00)	83,22		
02.2.03.02.5.1.01	Belanja Pegawai	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	100,00		
02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	301.847.000,00	249.922.441,00	(51.924.559,00)	82,80		
02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	74.270.000,00	73.751.204,00	(518.796,00)	99,30		
02.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	69.270.000,00	68.751.204,00	(518.796,00)	99,25		
02.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.270.000,00	68.751.204,00	(518.796,00)	99,25		
02.2.03.03.5.2	BELANJA MODAL	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.03.03.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	24.980.000,00	24.808.642,00	(171.358,00)	99,31		
02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	24.980.000,00	24.808.642,00	(171.358,00)	99,31		
02.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	24.980.000,00	24.808.642,00	(171.358,00)	99,31		
02.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.980.000,00	24.808.642,00	(171.358,00)	99,31		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.473.483.000,00	1.396.703.651,00	(76.779.349,00)	94,79		
03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	175.480.000,00	174.269.981,00	(1.210.019,00)	99,31		
03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	121.880.000,00	120.722.190,00	(1.157.810,00)	99,05		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	121.880.000,00	120.722.190,00	(1.157.810,00)	99,05		
03.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	3.275.000,00	3.275.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.605.000,00	117.447.190,00	(1.157.810,00)	99,02		
03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	53.600.000,00	53.547.791,00	(52.209,00)	99,90		
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	53.600.000,00	53.547.791,00	(52.209,00)	99,90		
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.600.000,00	53.547.791,00	(52.209,00)	99,90		
03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	200.260.000,00	198.337.920,00	(1.922.080,00)	99,04		
03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	87.100.000,00	86.266.836,00	(833.164,00)	99,04		
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	87.100.000,00	86.266.836,00	(833.164,00)	99,04		
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.100.000,00	86.266.836,00	(833.164,00)	99,04		
03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	113.160.000,00	112.071.084,00	(1.088.916,00)	99,04		
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	113.160.000,00	112.071.084,00	(1.088.916,00)	99,04		
03.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00		
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.660.000,00	105.571.084,00	(1.088.916,00)	98,98		
03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	767.060.000,00	701.465.017,00	(65.594.983,00)	91,45		
03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	524.750.000,00	461.311.751,00	(63.438.249,00)	87,91		
03.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	524.750.000,00	461.311.751,00	(63.438.249,00)	87,91		
03.2.03.01.5.1.01	Belanja Pegawai	197.450.000,00	143.600.000,00	(53.850.000,00)	72,73		
03.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	327.300.000,00	317.711.751,00	(9.588.249,00)	97,07		
03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	65.330.000,00	63.605.321,00	(1.724.679,00)	97,36		
03.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	65.330.000,00	63.605.321,00	(1.724.679,00)	97,36		
03.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.330.000,00	63.605.321,00	(1.724.679,00)	97,36		
03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	176.980.000,00	176.547.945,00	(432.055,00)	99,76		
03.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	176.980.000,00	176.547.945,00	(432.055,00)	99,76		
03.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	176.980.000,00	176.547.945,00	(432.055,00)	99,76		
03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	330.683.000,00	322.630.733,00	(8.052.267,00)	97,56		
03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	294.149.000,00	288.801.751,00	(5.347.249,00)	98,18		
03.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	294.149.000,00	288.801.751,00	(5.347.249,00)	98,18		
03.2.04.01.5.1.01	Belanja Pegawai	8.320.000,00	8.320.000,00	0,00	100,00		
03.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	285.829.000,00	280.481.751,00	(5.347.249,00)	98,13		
03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	5.368.000,00	5.306.163,00	(61.837,00)	98,85		
03.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	5.368.000,00	5.306.163,00	(61.837,00)	98,85		
03.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.368.000,00	5.306.163,00	(61.837,00)	98,85		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	31.166.000,00	28.522.819,00	(2.643.181,00)	91,52		
03.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	31.166.000,00	28.522.819,00	(2.643.181,00)	91,52		
03.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.166.000,00	28.522.819,00	(2.643.181,00)	91,52		
	SURPLUS / DEFISIT	(59.007.586.000,00)	(56.973.622.729,00)	2.033.963.271,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(59.007.586.000,00)	(56.973.622.729,00)	2.033.963.271,00	0		





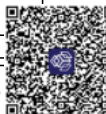
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD

SKPD : 4-02.0-00.0-00.01 SEKRETARIAT DPRD

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	58.098.054.000,00	55.815.327.763,00	(2.282.726.237,00)	96,07		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	41.173.223.000,00	40.604.769.877,00	(568.453.123,00)	98,62		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	56.168.000,00	55.744.825,00	(423.175,00)	99,25		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	53.668.000,00	53.429.050,00	(238.950,00)	99,55		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	53.668.000,00	53.429.050,00	(238.950,00)	99,55		
01.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.515.000,00	1.515.000,00	0,00	100,00		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.153.000,00	51.914.050,00	(238.950,00)	99,54		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.500.000,00	2.315.775,00	(184.225,00)	92,63		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.315.775,00	(184.225,00)	92,63		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.315.775,00	(184.225,00)	92,63		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.730.600.000,00	3.520.218.434,00	(210.381.566,00)	94,36		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.650.982.000,00	3.441.668.850,00	(209.313.150,00)	94,27		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.650.982.000,00	3.441.668.850,00	(209.313.150,00)	94,27		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	3.650.982.000,00	3.441.668.850,00	(209.313.150,00)	94,27		
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	79.618.000,00	78.549.584,00	(1.068.416,00)	98,66		
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	79.618.000,00	78.549.584,00	(1.068.416,00)	98,66		
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	17.270.000,00	16.470.000,00	(800.000,00)	95,37		
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.348.000,00	62.079.584,00	(268.416,00)	99,57		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	214.652.000,00	201.603.333,00	(13.048.667,00)	93,92		
01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	175.256.000,00	167.079.333,00	(8.176.667,00)	95,33		
01.2.05.10.5.1	BELANJA OPERASI	175.256.000,00	167.079.333,00	(8.176.667,00)	95,33		
01.2.05.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	175.256.000,00	167.079.333,00	(8.176.667,00)	95,33		
01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	39.396.000,00	34.524.000,00	(4.872.000,00)	87,63		
01.2.05.11.5.1	BELANJA OPERASI	39.396.000,00	34.524.000,00	(4.872.000,00)	87,63		



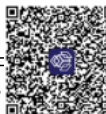
KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.05.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.396.000,00	34.524.000,00	(4.872.000,00)	87,63		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	393.829.000,00	388.227.208,00	(5.601.792,00)	98,58		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.835.000,00	12.817.000,00	(18.000,00)	99,86		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	12.835.000,00	12.817.000,00	(18.000,00)	99,86		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.835.000,00	12.817.000,00	(18.000,00)	99,86		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	165.160.000,00	163.828.730,00	(1.331.270,00)	99,19		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	165.160.000,00	163.828.730,00	(1.331.270,00)	99,19		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	165.160.000,00	163.828.730,00	(1.331.270,00)	99,19		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	89.000.000,00	86.862.600,00	(2.137.400,00)	97,60		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	89.000.000,00	86.862.600,00	(2.137.400,00)	97,60		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.000.000,00	86.862.600,00	(2.137.400,00)	97,60		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000,00	14.980.000,00	(20.000,00)	99,87		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	14.980.000,00	(20.000,00)	99,87		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.980.000,00	(20.000,00)	99,87		
01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	12.594.000,00	12.226.300,00	(367.700,00)	97,08		
01.2.06.07.5.1	BELANJA OPERASI	12.594.000,00	12.226.300,00	(367.700,00)	97,08		
01.2.06.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.594.000,00	12.226.300,00	(367.700,00)	97,08		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	78.740.000,00	77.964.378,00	(775.622,00)	99,01		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	78.740.000,00	77.964.378,00	(775.622,00)	99,01		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.740.000,00	77.964.378,00	(775.622,00)	99,01		
01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	20.500.000,00	19.548.200,00	(951.800,00)	95,36		
01.2.06.10.5.1	BELANJA OPERASI	11.029.000,00	10.148.200,00	(880.800,00)	92,01		
01.2.06.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.029.000,00	10.148.200,00	(880.800,00)	92,01		
01.2.06.10.5.2	BELANJA MODAL	9.471.000,00	9.400.000,00	(71.000,00)	99,25		
01.2.06.10.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.471.000,00	9.400.000,00	(71.000,00)	99,25		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	188.285.000,00	181.133.000,00	(7.152.000,00)	96,20		
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	188.285.000,00	181.133.000,00	(7.152.000,00)	96,20		
01.2.07.06.5.1	BELANJA OPERASI	424.000,00	424.000,00	0,00	100,00		
01.2.07.06.5.1.01	Belanja Pegawai	424.000,00	424.000,00	0,00	100,00		
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	187.861.000,00	180.709.000,00	(7.152.000,00)	96,19		
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	187.861.000,00	180.709.000,00	(7.152.000,00)	96,19		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	526.100.000,00	484.003.731,00	(42.096.269,00)	92,00		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.500.000,00	2.025.000,00	(1.475.000,00)	57,86		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.500.000,00	2.025.000,00	(1.475.000,00)	57,86		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	2.025.000,00	(1.475.000,00)	57,86		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	300.000.000,00	261.108.606,00	(38.891.394,00)	87,04		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	300.000.000,00	261.108.606,00	(38.891.394,00)	87,04		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	261.108.606,00	(38.891.394,00)	87,04		
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.000.000,00	34.489.700,00	(510.300,00)	98,54		
01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	34.489.700,00	(510.300,00)	98,54		
01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	34.489.700,00	(510.300,00)	98,54		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	187.600.000,00	186.380.425,00	(1.219.575,00)	99,35		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	187.600.000,00	186.380.425,00	(1.219.575,00)	99,35		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	187.600.000,00	186.380.425,00	(1.219.575,00)	99,35		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	777.878.000,00	752.488.440,00	(25.389.560,00)	96,74		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	427.878.000,00	409.055.340,00	(18.822.660,00)	95,60		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	427.878.000,00	409.055.340,00	(18.822.660,00)	95,60		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	427.878.000,00	409.055.340,00	(18.822.660,00)	95,60		
01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	15.000.000,00	14.992.500,00	(7.500,00)	99,95		
01.2.09.05.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	14.992.500,00	(7.500,00)	99,95		
01.2.09.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.992.500,00	(7.500,00)	99,95		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.000.000,00	34.195.000,00	(805.000,00)	97,70		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	34.195.000,00	(805.000,00)	97,70		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	34.195.000,00	(805.000,00)	97,70		
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	300.000.000,00	294.245.600,00	(5.754.400,00)	98,08		
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	300.000.000,00	294.245.600,00	(5.754.400,00)	98,08		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	294.245.600,00	(5.754.400,00)	98,08		
01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	34.180.326.000,00	34.064.729.516,00	(115.596.484,00)	99,66		
01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	33.830.326.000,00	33.749.815.616,00	(80.510.384,00)	99,76		
01.2.15.01.5.1	BELANJA OPERASI	33.830.326.000,00	33.749.815.616,00	(80.510.384,00)	99,76		
01.2.15.01.5.1.01	Belanja Pegawai	33.730.326.000,00	33.650.013.740,00	(80.312.260,00)	99,76		
01.2.15.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	99.801.876,00	(198.124,00)	99,80		
01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	315.000.000,00	288.772.500,00	(26.227.500,00)	91,67		
01.2.15.02.5.1	BELANJA OPERASI	315.000.000,00	288.772.500,00	(26.227.500,00)	91,67		
01.2.15.02.5.1.01	Belanja Pegawai	905.000,00	680.000,00	(225.000,00)	75,14		
01.2.15.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	314.095.000,00	288.092.500,00	(26.002.500,00)	91,72		
01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	35.000.000,00	26.141.400,00	(8.858.600,00)	74,69		
01.2.15.03.5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	26.141.400,00	(8.858.600,00)	74,69		
01.2.15.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	26.141.400,00	(8.858.600,00)	74,69		
01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	1.105.385.000,00	956.621.390,00	(148.763.610,00)	86,54		
01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	74.361.000,00	53.216.400,00	(21.144.600,00)	71,56		
01.2.16.02.5.1	BELANJA OPERASI	74.361.000,00	53.216.400,00	(21.144.600,00)	71,56		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.16.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.361.000,00	53.216.400,00	(21.144.600,00)	71,56		
01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1.031.024.000,00	903.404.990,00	(127.619.010,00)	87,62		
01.2.16.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.031.024.000,00	903.404.990,00	(127.619.010,00)	87,62		
01.2.16.03.5.1.01	Belanja Pegawai	3.820.000,00	3.820.000,00	0,00	100,00		
01.2.16.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.027.204.000,00	899.584.990,00	(127.619.010,00)	87,58		
02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	16.924.831.000,00	15.210.557.886,00	(1.714.273.114,00)	89,87		
02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	3.372.867.000,00	2.929.931.535,00	(442.935.465,00)	86,87		
02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	567.586.000,00	422.092.639,00	(145.493.361,00)	74,37		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	567.586.000,00	422.092.639,00	(145.493.361,00)	74,37		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	567.586.000,00	422.092.639,00	(145.493.361,00)	74,37		
02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Perda	2.405.281.000,00	2.164.625.496,00	(240.655.504,00)	89,99		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	2.405.281.000,00	2.164.625.496,00	(240.655.504,00)	89,99		
02.2.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.241.000,00	2.159.585.496,00	(240.655.504,00)	89,97		
02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	160.000.000,00	145.633.400,00	(14.366.600,00)	91,02		
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	160.000.000,00	145.633.400,00	(14.366.600,00)	91,02		
02.2.01.03.5.1.01	Belanja Pegawai	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	158.640.000,00	144.273.400,00	(14.366.600,00)	90,94		
02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	240.000.000,00	197.580.000,00	(42.420.000,00)	82,33		
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	240.000.000,00	197.580.000,00	(42.420.000,00)	82,33		
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	240.000.000,00	197.580.000,00	(42.420.000,00)	82,33		
02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	640.000.000,00	523.199.228,00	(116.800.772,00)	81,75		
02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	90.000.000,00	82.823.868,00	(7.176.132,00)	92,03		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	90.000.000,00	82.823.868,00	(7.176.132,00)	92,03		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	82.823.868,00	(7.176.132,00)	92,03		
02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	90.000.000,00	71.025.500,00	(18.974.500,00)	78,92		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	90.000.000,00	71.025.500,00	(18.974.500,00)	78,92		
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	71.025.500,00	(18.974.500,00)	78,92		
02.2.02.03	Pembahasan APBD	140.000.000,00	111.359.654,00	(28.640.346,00)	79,54		
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	140.000.000,00	111.359.654,00	(28.640.346,00)	79,54		
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.000.000,00	111.359.654,00	(28.640.346,00)	79,54		
02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	140.000.000,00	114.137.375,00	(25.862.625,00)	81,53		
02.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	140.000.000,00	114.137.375,00	(25.862.625,00)	81,53		
02.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.000.000,00	114.137.375,00	(25.862.625,00)	81,53		
02.2.02.05	Pembahasan Laporan Semester	90.000.000,00	71.029.481,00	(18.970.519,00)	78,92		
02.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	90.000.000,00	71.029.481,00	(18.970.519,00)	78,92		
02.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	71.029.481,00	(18.970.519,00)	78,92		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	90.000.000,00	72.823.350,00	(17.176.650,00)	80,91		
02.2.02.06.5.1	BELANJA OPERASI	90.000.000,00	72.823.350,00	(17.176.650,00)	80,91		
02.2.02.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	72.823.350,00	(17.176.650,00)	80,91		
02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	108.320.000,00	77.614.000,00	(30.706.000,00)	71,65		
02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	20.000.000,00	7.090.000,00	(12.910.000,00)	35,45		
02.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	7.090.000,00	(12.910.000,00)	35,45		
02.2.03.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	7.090.000,00	(12.910.000,00)	35,45		
02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	88.320.000,00	70.524.000,00	(17.796.000,00)	79,85		
02.2.03.08.5.1	BELANJA OPERASI	88.320.000,00	70.524.000,00	(17.796.000,00)	79,85		
02.2.03.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.320.000,00	70.524.000,00	(17.796.000,00)	79,85		
02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	4.101.519.000,00	3.269.061.528,00	(832.457.472,00)	79,70		
02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	2.767.800.000,00	2.199.683.824,00	(568.116.176,00)	79,47		
02.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	2.767.800.000,00	2.199.683.824,00	(568.116.176,00)	79,47		
02.2.04.02.5.1.01	Belanja Pegawai	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	100,00		
02.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.762.760.000,00	2.194.643.824,00	(568.116.176,00)	79,44		
02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	202.780.000,00	186.301.005,00	(16.478.995,00)	91,87		
02.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	202.780.000,00	186.301.005,00	(16.478.995,00)	91,87		
02.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	202.780.000,00	186.301.005,00	(16.478.995,00)	91,87		
02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	793.568.000,00	587.490.549,00	(206.077.451,00)	74,03		
02.2.04.04.5.1	BELANJA OPERASI	793.568.000,00	587.490.549,00	(206.077.451,00)	74,03		
02.2.04.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	793.568.000,00	587.490.549,00	(206.077.451,00)	74,03		
02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.04.05.5.1	BELANJA OPERASI	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.04.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	57.371.000,00	20.628.200,00	(36.742.800,00)	35,96		
02.2.04.06.5.1	BELANJA OPERASI	57.371.000,00	20.628.200,00	(36.742.800,00)	35,96		
02.2.04.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.371.000,00	20.628.200,00	(36.742.800,00)	35,96		
02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	100.000.000,00	94.957.950,00	(5.042.050,00)	94,96		
02.2.04.07.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	94.957.950,00	(5.042.050,00)	94,96		
02.2.04.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	94.957.950,00	(5.042.050,00)	94,96		
02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1.281.098.000,00	1.171.489.565,00	(109.608.435,00)	91,44		
02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	11.098.000,00	1.041.900,00	(10.056.100,00)	9,39		
02.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	11.098.000,00	1.041.900,00	(10.056.100,00)	9,39		
02.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.098.000,00	1.041.900,00	(10.056.100,00)	9,39		
02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	1.270.000.000,00	1.170.447.665,00	(99.552.335,00)	92,16		
02.2.05.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.270.000.000,00	1.170.447.665,00	(99.552.335,00)	92,16		
02.2.05.03.5.1.01	Belanja Pegawai	3.820.000,00	3.820.000,00	0,00	100,00		
02.2.05.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.266.180.000,00	1.166.627.665,00	(99.552.335,00)	92,14		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	20.000.000,00	3.590.000,00	(16.410.000,00)	17,95		
02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	20.000.000,00	3.590.000,00	(16.410.000,00)	17,95		
02.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	3.590.000,00	(16.410.000,00)	17,95		
02.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	3.590.000,00	(16.410.000,00)	17,95		
02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0		
02.2.07.01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0		
02.2.07.01.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0		
02.2.07.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0		
02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	7.396.027.000,00	7.235.672.030,00	(160.354.970,00)	97,83		
02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	5.404.391.000,00	5.266.374.556,00	(138.016.444,00)	97,45		
02.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	5.404.391.000,00	5.266.374.556,00	(138.016.444,00)	97,45		
02.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.404.391.000,00	5.266.374.556,00	(138.016.444,00)	97,45		
02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	5.118.000,00	4.964.700,00	(153.300,00)	97,00		
02.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	5.118.000,00	4.964.700,00	(153.300,00)	97,00		
02.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.118.000,00	4.964.700,00	(153.300,00)	97,00		
02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1.986.518.000,00	1.964.332.774,00	(22.185.226,00)	98,88		
02.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	1.986.518.000,00	1.964.332.774,00	(22.185.226,00)	98,88		
02.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.986.518.000,00	1.964.332.774,00	(22.185.226,00)	98,88		
	SURPLUS / DEFISIT	(58.098.054.000,00)	(55.815.327.763,00)	2.282.726.237,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(58.098.054.000,00)	(55.815.327.763,00)	2.282.726.237,00	0		





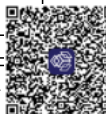
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN

SKPD : 5-01.5-05.0-00.01 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	7.661.017.000,00	7.520.031.009,00	(140.985.991,00)	98,16		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.345.676.000,00	5.245.635.348,00	(100.040.652,00)	98,13		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.718.000,00	41.404.550,00	(313.450,00)	99,25		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	33.812.000,00	33.660.750,00	(151.250,00)	99,55		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	33.812.000,00	33.660.750,00	(151.250,00)	99,55		
01.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	100,00		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.792.000,00	31.640.750,00	(151.250,00)	99,52		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.906.000,00	7.743.800,00	(162.200,00)	97,95		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	7.906.000,00	7.743.800,00	(162.200,00)	97,95		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.906.000,00	7.743.800,00	(162.200,00)	97,95		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.440.776.000,00	4.355.590.789,00	(85.185.211,00)	98,08		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.416.632.000,00	4.331.567.207,00	(85.064.793,00)	98,07		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.416.632.000,00	4.331.567.207,00	(85.064.793,00)	98,07		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	4.416.632.000,00	4.331.567.207,00	(85.064.793,00)	98,07		
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24.144.000,00	24.023.582,00	(120.418,00)	99,50		
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	24.144.000,00	24.023.582,00	(120.418,00)	99,50		
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.544.000,00	8.423.582,00	(120.418,00)	98,59		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.000.000,00	49.856.600,00	(143.400,00)	99,71		
01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000,00	49.856.600,00	(143.400,00)	99,71		
01.2.05.09.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	49.856.600,00	(143.400,00)	99,71		
01.2.05.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.856.600,00	(143.400,00)	99,71		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	420.140.000,00	419.615.727,00	(524.273,00)	99,88		



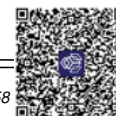
KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	9.967.500,00	(32.500,00)	99,68		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.967.500,00	(32.500,00)	99,68		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.967.500,00	(32.500,00)	99,68		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	129.000.000,00	128.967.400,00	(32.600,00)	99,97		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	129.000.000,00	128.967.400,00	(32.600,00)	99,97		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.000.000,00	128.967.400,00	(32.600,00)	99,97		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	94.340.000,00	94.335.375,00	(4.625,00)	100,00		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	94.340.000,00	94.335.375,00	(4.625,00)	100,00		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.340.000,00	94.335.375,00	(4.625,00)	100,00		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.800.000,00	4.650.000,00	(150.000,00)	96,88		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	4.800.000,00	4.650.000,00	(150.000,00)	96,88		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.650.000,00	(150.000,00)	96,88		
01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	20.000.000,00	19.958.200,00	(41.800,00)	99,79		
01.2.06.07.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	19.958.200,00	(41.800,00)	99,79		
01.2.06.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.958.200,00	(41.800,00)	99,79		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	158.000.000,00	157.835.752,00	(164.248,00)	99,90		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	158.000.000,00	157.835.752,00	(164.248,00)	99,90		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	158.000.000,00	157.835.752,00	(164.248,00)	99,90		
01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.000.000,00	3.901.500,00	(98.500,00)	97,54		
01.2.06.10.5.1	BELANJA OPERASI	1.905.000,00	1.902.500,00	(2.500,00)	99,87		
01.2.06.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.905.000,00	1.902.500,00	(2.500,00)	99,87		
01.2.06.10.5.2	BELANJA MODAL	2.095.000,00	1.999.000,00	(96.000,00)	95,42		
01.2.06.10.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.095.000,00	1.999.000,00	(96.000,00)	95,42		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80.950.000,00	75.316.000,00	(5.634.000,00)	93,04		
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	80.950.000,00	75.316.000,00	(5.634.000,00)	93,04		
01.2.07.06.5.1	BELANJA OPERASI	340.000,00	340.000,00	0,00	100,00		
01.2.07.06.5.1.01	Belanja Pegawai	340.000,00	340.000,00	0,00	100,00		
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	80.610.000,00	74.976.000,00	(5.634.000,00)	93,01		
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	80.610.000,00	74.976.000,00	(5.634.000,00)	93,01		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	151.592.000,00	144.575.695,00	(7.016.305,00)	95,37		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	3.478.100,00	(521.900,00)	86,95		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	3.478.100,00	(521.900,00)	86,95		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	3.478.100,00	(521.900,00)	86,95		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	85.000.000,00	78.526.295,00	(6.473.705,00)	92,38		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	85.000.000,00	78.526.295,00	(6.473.705,00)	92,38		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.000.000,00	78.526.295,00	(6.473.705,00)	92,38		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	62.592.000,00	62.571.300,00	(20.700,00)	99,97		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	62.592.000,00	62.571.300,00	(20.700,00)	99,97		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.592.000,00	62.571.300,00	(20.700,00)	99,97		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	160.500.000,00	159.275.987,00	(1.224.013,00)	99,24		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	112.500.000,00	111.749.987,00	(750.013,00)	99,33		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	112.500.000,00	111.749.987,00	(750.013,00)	99,33		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.500.000,00	111.749.987,00	(750.013,00)	99,33		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.000.000,00	31.932.000,00	(68.000,00)	99,79		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	32.000.000,00	31.932.000,00	(68.000,00)	99,79		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	31.932.000,00	(68.000,00)	99,79		
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	16.000.000,00	15.594.000,00	(406.000,00)	97,46		
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	16.000.000,00	15.594.000,00	(406.000,00)	97,46		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	15.594.000,00	(406.000,00)	97,46		
02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.196.614.000,00	1.179.022.595,00	(17.591.405,00)	98,53		
02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	738.837.000,00	731.009.249,00	(7.827.751,00)	98,94		
02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	317.698.000,00	314.790.443,00	(2.907.557,00)	99,08		
02.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	317.698.000,00	314.790.443,00	(2.907.557,00)	99,08		
02.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	317.698.000,00	314.790.443,00	(2.907.557,00)	99,08		
02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	421.139.000,00	416.218.806,00	(4.920.194,00)	98,83		
02.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	421.139.000,00	416.218.806,00	(4.920.194,00)	98,83		
02.2.01.07.5.1.01	Belanja Pegawai	3.220.000,00	3.220.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	417.919.000,00	412.998.806,00	(4.920.194,00)	98,82		
02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	157.596.000,00	155.004.753,00	(2.591.247,00)	98,36		
02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	157.596.000,00	155.004.753,00	(2.591.247,00)	98,36		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	157.596.000,00	155.004.753,00	(2.591.247,00)	98,36		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	157.596.000,00	155.004.753,00	(2.591.247,00)	98,36		
02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	300.181.000,00	293.008.593,00	(7.172.407,00)	97,61		
02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	300.181.000,00	293.008.593,00	(7.172.407,00)	97,61		
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	300.181.000,00	293.008.593,00	(7.172.407,00)	97,61		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.181.000,00	293.008.593,00	(7.172.407,00)	97,61		
02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	482.039.000,00	475.689.611,00	(6.349.389,00)	98,68		
02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	315.459.000,00	311.868.039,00	(3.590.961,00)	98,86		
02.2.01.02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	315.459.000,00	311.868.039,00	(3.590.961,00)	98,86		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	315.459.000,00	311.868.039,00	(3.590.961,00)	98,86		
02.2.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	2.820.000,00	2.820.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	312.639.000,00	309.048.039,00	(3.590.961,00)	98,85		
02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	166.580.000,00	163.821.572,00	(2.758.428,00)	98,34		
02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	166.580.000,00	163.821.572,00	(2.758.428,00)	98,34		
02.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	166.580.000,00	163.821.572,00	(2.758.428,00)	98,34		
02.2.04.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00	100,00		
02.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	164.160.000,00	161.401.572,00	(2.758.428,00)	98,32		
03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	636.688.000,00	619.683.455,00	(17.004.545,00)	97,33		
03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	255.142.000,00	248.506.078,00	(6.635.922,00)	97,40		
03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	95.288.000,00	93.503.478,00	(1.784.522,00)	98,13		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	95.288.000,00	93.503.478,00	(1.784.522,00)	98,13		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.288.000,00	93.503.478,00	(1.784.522,00)	98,13		
03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	159.854.000,00	155.002.600,00	(4.851.400,00)	96,97		
03.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	159.854.000,00	155.002.600,00	(4.851.400,00)	96,97		
03.2.01.05.5.1.01	Belanja Pegawai	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	157.434.000,00	152.582.600,00	(4.851.400,00)	96,92		
03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	250.758.000,00	249.168.384,00	(1.589.616,00)	99,37		
03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	195.522.000,00	194.126.668,00	(1.395.332,00)	99,29		
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	195.522.000,00	194.126.668,00	(1.395.332,00)	99,29		
03.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00	100,00		
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	193.102.000,00	191.706.668,00	(1.395.332,00)	99,28		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	55.236.000,00	55.041.716,00	(194.284,00)	99,65		
03.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	55.236.000,00	55.041.716,00	(194.284,00)	99,65		
03.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.236.000,00	55.041.716,00	(194.284,00)	99,65		
03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	130.788.000,00	122.008.993,00	(8.779.007,00)	93,29		
03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	130.788.000,00	122.008.993,00	(8.779.007,00)	93,29		
03.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	130.788.000,00	122.008.993,00	(8.779.007,00)	93,29		
03.2.03.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00	100,00		
03.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	128.368.000,00	119.588.993,00	(8.779.007,00)	93,16		
	SURPLUS / DEFISIT	(7.661.017.000,00)	(7.520.031.009,00)	140.985.991,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(7.661.017.000,00)	(7.520.031.009,00)	140.985.991,00	0		





PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN
SKPD : 5-02.0-00.0-00.01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Unit Organisasi : 5-02.0-00.0-00.01.001 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5-02.0-00.0-00.01.001.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	162.876.485.000,00	167.861.857.894,00	4.985.372.894,00	103,06		
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	162.876.485.000,00	167.861.857.894,00	4.985.372.894,00	103,06		
00.0.00.00.4.1.01	Pajak Daerah	133.030.000.000,00	137.222.705.502,00	4.192.705.502,00	103,15		
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	221.000.000,00	283.648.416,00	62.648.416,00	128,35		
00.0.00.00.4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19.123.337.000,00	19.123.340.688,00	3.688,00	100,00		
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	10.502.148.000,00	11.232.163.288,00	730.015.288,00	106,95		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	30.294.848.000,00	29.200.721.282,00	(1.094.126.718,00)	96,39		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.045.103.000,00	20.062.391.420,00	(982.711.580,00)	95,33		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	117.366.000,00	115.998.300,00	(1.367.700,00)	98,83		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	77.366.000,00	76.979.000,00	(387.000,00)	99,50		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	77.366.000,00	76.979.000,00	(387.000,00)	99,50		
01.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00	100,00		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.946.000,00	74.559.000,00	(387.000,00)	99,48		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.000.000,00	39.019.300,00	(980.700,00)	97,55		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	39.019.300,00	(980.700,00)	97,55		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	39.019.300,00	(980.700,00)	97,55		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.479.547.000,00	14.552.799.184,00	(926.747.816,00)	94,01		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.282.198.000,00	14.359.228.016,00	(922.969.984,00)	93,96		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	15.282.198.000,00	14.359.228.016,00	(922.969.984,00)	93,96		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	15.282.198.000,00	14.359.228.016,00	(922.969.984,00)	93,96		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	197.349.000,00	193.571.168,00	(3.777.832,00)	98,09		
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	197.349.000,00	193.571.168,00	(3.777.832,00)	98,09		
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	30.680.000,00	29.980.000,00	(700.000,00)	97,72		
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	166.669.000,00	163.591.168,00	(3.077.832,00)	98,15		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	196.724.000,00	193.483.993,00	(3.240.007,00)	98,35		
01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	196.724.000,00	193.483.993,00	(3.240.007,00)	98,35		
01.2.05.11.5.1	BELANJA OPERASI	196.724.000,00	193.483.993,00	(3.240.007,00)	98,35		
01.2.05.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	196.724.000,00	193.483.993,00	(3.240.007,00)	98,35		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	415.554.000,00	407.274.392,00	(8.279.608,00)	98,01		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.000.000,00	15.970.800,00	(29.200,00)	99,82		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	16.000.000,00	15.970.800,00	(29.200,00)	99,82		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	15.970.800,00	(29.200,00)	99,82		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	105.000.000,00	102.011.380,00	(2.988.620,00)	97,15		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	105.000.000,00	102.011.380,00	(2.988.620,00)	97,15		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.000.000,00	102.011.380,00	(2.988.620,00)	97,15		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	41.000.000,00	37.942.200,00	(3.057.800,00)	92,54		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	41.000.000,00	37.942.200,00	(3.057.800,00)	92,54		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.000.000,00	37.942.200,00	(3.057.800,00)	92,54		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.000.000,00	11.990.000,00	(10.000,00)	99,92		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	11.990.000,00	(10.000,00)	99,92		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	11.990.000,00	(10.000,00)	99,92		
01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	75.000.000,00	73.636.000,00	(1.364.000,00)	98,18		
01.2.06.07.5.1	BELANJA OPERASI	75.000.000,00	73.636.000,00	(1.364.000,00)	98,18		
01.2.06.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	73.636.000,00	(1.364.000,00)	98,18		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	138.000.000,00	137.651.212,00	(348.788,00)	99,75		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	138.000.000,00	137.651.212,00	(348.788,00)	99,75		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	138.000.000,00	137.651.212,00	(348.788,00)	99,75		
01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	28.554.000,00	28.072.800,00	(481.200,00)	98,31		
01.2.06.10.5.1	BELANJA OPERASI	28.554.000,00	28.072.800,00	(481.200,00)	98,31		
01.2.06.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.554.000,00	28.072.800,00	(481.200,00)	98,31		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.845.312.000,00	3.832.834.500,00	(12.477.500,00)	99,68		
01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.596.112.000,00	3.584.269.500,00	(11.842.500,00)	99,67		
01.2.07.02.5.2	BELANJA MODAL	3.596.112.000,00	3.584.269.500,00	(11.842.500,00)	99,67		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.07.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.596.112.000,00	3.584.269.500,00	(11.842.500,00)	99,67		
01.2.07.05	Pengadaan Mebel	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.07.05.5.2	BELANJA MODAL	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.07.05.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	233.200.000,00	232.565.000,00	(635.000,00)	99,73		
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	233.200.000,00	232.565.000,00	(635.000,00)	99,73		
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	233.200.000,00	232.565.000,00	(635.000,00)	99,73		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	468.600.000,00	440.041.564,00	(28.558.436,00)	93,91		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	3.929.500,00	(70.500,00)	98,24		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	3.929.500,00	(70.500,00)	98,24		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	3.929.500,00	(70.500,00)	98,24		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	298.000.000,00	269.823.064,00	(28.176.936,00)	90,54		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	298.000.000,00	269.823.064,00	(28.176.936,00)	90,54		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	298.000.000,00	269.823.064,00	(28.176.936,00)	90,54		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	166.600.000,00	166.289.000,00	(311.000,00)	99,81		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	166.600.000,00	166.289.000,00	(311.000,00)	99,81		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	166.600.000,00	166.289.000,00	(311.000,00)	99,81		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	522.000.000,00	519.959.487,00	(2.040.513,00)	99,61		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	237.000.000,00	235.553.487,00	(1.446.513,00)	99,39		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	237.000.000,00	235.553.487,00	(1.446.513,00)	99,39		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	237.000.000,00	235.553.487,00	(1.446.513,00)	99,39		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	80.000.000,00	79.445.500,00	(554.500,00)	99,31		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	80.000.000,00	79.445.500,00	(554.500,00)	99,31		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	79.445.500,00	(554.500,00)	99,31		
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	205.000.000,00	204.960.500,00	(39.500,00)	99,98		
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	205.000.000,00	204.960.500,00	(39.500,00)	99,98		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	205.000.000,00	204.960.500,00	(39.500,00)	99,98		
02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	2.410.740.000,00	2.374.569.519,00	(36.170.481,00)	98,50		
02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.013.554.000,00	1.007.171.206,00	(6.382.794,00)	99,37		
02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	170.000.000,00	169.188.100,00	(811.900,00)	99,52		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	170.000.000,00	169.188.100,00	(811.900,00)	99,52		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	170.000.000,00	169.188.100,00	(811.900,00)	99,52		
02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	323.554.000,00	319.317.849,00	(4.236.151,00)	98,69		
02.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	323.554.000,00	319.317.849,00	(4.236.151,00)	98,69		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	323.554.000,00	319.317.849,00	(4.236.151,00)	98,69		
02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	300.000.000,00	299.625.960,00	(374.040,00)	99,88		
02.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	300.000.000,00	299.625.960,00	(374.040,00)	99,88		
02.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	299.625.960,00	(374.040,00)	99,88		
02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	150.000.000,00	149.534.876,00	(465.124,00)	99,69		
02.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	149.534.876,00	(465.124,00)	99,69		
02.2.01.09.5.1.01	Belanja Pegawai	4.235.000,00	4.235.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	145.765.000,00	145.299.876,00	(465.124,00)	99,68		
02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	70.000.000,00	69.504.421,00	(495.579,00)	99,29		
02.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	70.000.000,00	69.504.421,00	(495.579,00)	99,29		
02.2.01.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	69.504.421,00	(495.579,00)	99,29		
02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	625.366.000,00	602.701.332,00	(22.664.668,00)	96,38		
02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	193.683.000,00	190.046.300,00	(3.636.700,00)	98,12		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	193.683.000,00	190.046.300,00	(3.636.700,00)	98,12		
02.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	25.710.000,00	25.710.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	167.973.000,00	164.336.300,00	(3.636.700,00)	97,83		
02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	118.000.000,00	115.226.000,00	(2.774.000,00)	97,65		
02.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	118.000.000,00	115.226.000,00	(2.774.000,00)	97,65		
02.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.000.000,00	115.226.000,00	(2.774.000,00)	97,65		
02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait	113.683.000,00	105.293.037,00	(8.389.963,00)	92,62		
02.2.02.09.5.1	BELANJA OPERASI	113.683.000,00	105.293.037,00	(8.389.963,00)	92,62		
02.2.02.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.683.000,00	105.293.037,00	(8.389.963,00)	92,62		
02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	200.000.000,00	192.135.995,00	(7.864.005,00)	96,07		
02.2.02.10.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	192.135.995,00	(7.864.005,00)	96,07		
02.2.02.10.5.1.01	Belanja Pegawai	390.000,00	390.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.610.000,00	191.745.995,00	(7.864.005,00)	96,06		
02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	551.366.000,00	544.662.729,00	(6.703.271,00)	98,78		
02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	110.000.000,00	109.861.850,00	(138.150,00)	99,87		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	110.000.000,00	109.861.850,00	(138.150,00)	99,87		
02.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.000.000,00	109.861.850,00	(138.150,00)	99,87		
02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	113.683.000,00	112.797.000,00	(886.000,00)	99,22		
02.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	113.683.000,00	112.797.000,00	(886.000,00)	99,22		
02.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.683.000,00	112.797.000,00	(886.000,00)	99,22		
02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	133.683.000,00	132.486.916,00	(1.196.084,00)	99,11		
02.2.03.05.5.1	BELANJA OPERASI	133.683.000,00	132.486.916,00	(1.196.084,00)	99,11		
02.2.03.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	133.683.000,00	132.486.916,00	(1.196.084,00)	99,11		
02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	170.000.000,00	166.334.563,00	(3.665.437,00)	97,84		
02.2.03.11.5.1	BELANJA OPERASI	170.000.000,00	166.334.563,00	(3.665.437,00)	97,84		
02.2.03.11.5.1.01	Belanja Pegawai	3.823.000,00	3.823.000,00	0,00	100,00		
02.2.03.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	166.177.000,00	162.511.563,00	(3.665.437,00)	97,79		
02.2.03.12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	24.000.000,00	23.182.400,00	(817.600,00)	96,59		
02.2.03.12.5.1	BELANJA OPERASI	24.000.000,00	23.182.400,00	(817.600,00)	96,59		
02.2.03.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	23.182.400,00	(817.600,00)	96,59		
02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	220.454.000,00	220.034.252,00	(419.748,00)	99,81		
02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	220.454.000,00	220.034.252,00	(419.748,00)	99,81		
02.2.04.08.5.1	BELANJA OPERASI	220.454.000,00	220.034.252,00	(419.748,00)	99,81		
02.2.04.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	220.454.000,00	220.034.252,00	(419.748,00)	99,81		
03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.721.168.000,00	1.696.729.074,00	(24.438.926,00)	98,58		
03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.721.168.000,00	1.696.729.074,00	(24.438.926,00)	98,58		
03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	85.000.000,00	83.908.500,00	(1.091.500,00)	98,72		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	85.000.000,00	83.908.500,00	(1.091.500,00)	98,72		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.000.000,00	83.908.500,00	(1.091.500,00)	98,72		
03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	121.436.000,00	118.370.641,00	(3.065.359,00)	97,48		
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	121.436.000,00	118.370.641,00	(3.065.359,00)	97,48		
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.436.000,00	118.370.641,00	(3.065.359,00)	97,48		
03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	330.000.000,00	324.199.000,00	(5.801.000,00)	98,24		
03.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	330.000.000,00	324.199.000,00	(5.801.000,00)	98,24		
03.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	330.000.000,00	324.199.000,00	(5.801.000,00)	98,24		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	683.554.000,00	678.731.911,00	(4.822.089,00)	99,29		
03.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	683.554.000,00	678.731.911,00	(4.822.089,00)	99,29		
03.2.01.07.5.1.01	Belanja Pegawai	3.820.000,00	3.820.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	679.734.000,00	674.911.911,00	(4.822.089,00)	99,29		
03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	141.178.000,00	137.969.300,00	(3.208.700,00)	97,73		
03.2.01.10.5.1	BELANJA OPERASI	141.178.000,00	137.969.300,00	(3.208.700,00)	97,73		
03.2.01.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	141.178.000,00	137.969.300,00	(3.208.700,00)	97,73		
03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	110.000.000,00	107.526.550,00	(2.473.450,00)	97,75		
03.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	110.000.000,00	107.526.550,00	(2.473.450,00)	97,75		
03.2.01.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.000.000,00	107.526.550,00	(2.473.450,00)	97,75		
03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	165.000.000,00	161.574.172,00	(3.425.828,00)	97,92		
03.2.01.12.5.1	BELANJA OPERASI	165.000.000,00	161.574.172,00	(3.425.828,00)	97,92		
03.2.01.12.5.1.01	Belanja Pegawai	12.200.000,00	11.600.000,00	(600.000,00)	95,08		
03.2.01.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	152.800.000,00	149.974.172,00	(2.825.828,00)	98,15		
03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	85.000.000,00	84.449.000,00	(551.000,00)	99,35		
03.2.01.13.5.1	BELANJA OPERASI	85.000.000,00	84.449.000,00	(551.000,00)	99,35		
03.2.01.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.000.000,00	84.449.000,00	(551.000,00)	99,35		
04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.117.837.000,00	5.067.031.269,00	(50.805.731,00)	99,01		
04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.117.837.000,00	5.067.031.269,00	(50.805.731,00)	99,01		
04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	1.066.070.000,00	1.037.414.332,00	(28.655.668,00)	97,31		
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.066.070.000,00	1.037.414.332,00	(28.655.668,00)	97,31		
04.2.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.059.470.000,00	1.030.814.332,00	(28.655.668,00)	97,30		
04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	105.000.000,00	103.497.450,00	(1.502.550,00)	98,57		
04.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	105.000.000,00	103.497.450,00	(1.502.550,00)	98,57		
04.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.000.000,00	103.497.450,00	(1.502.550,00)	98,57		
04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	245.265.000,00	240.475.837,00	(4.789.163,00)	98,05		
04.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	245.265.000,00	240.475.837,00	(4.789.163,00)	98,05		
04.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	245.265.000,00	240.475.837,00	(4.789.163,00)	98,05		
04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	130.000.000,00	129.809.721,00	(190.279,00)	99,85		
04.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	130.000.000,00	129.809.721,00	(190.279,00)	99,85		
04.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.000.000,00	129.809.721,00	(190.279,00)	99,85		
04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	411.049.000,00	396.259.129,00	(14.789.871,00)	96,40		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
04.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	411.049.000,00	396.259.129,00	(14.789.871,00)	96,40		
04.2.01.08.5.1.01	Belanja Pegawai	1.580.000,00	905.000,00	(675.000,00)	57,28		
04.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	409.469.000,00	395.354.129,00	(14.114.871,00)	96,55		
04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	3.160.453.000,00	3.159.574.800,00	(878.200,00)	99,97		
04.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	3.160.453.000,00	3.159.574.800,00	(878.200,00)	99,97		
04.2.01.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.160.453.000,00	3.159.574.800,00	(878.200,00)	99,97		
	SURPLUS / DEFISIT	132.581.637.000,00	138.661.136.612,00	6.079.499.612,00	104,59		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	132.581.637.000,00	138.661.136.612,00	6.079.499.612,00	104,59		





PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN
SKPD : 5-02.0-00.0-00.01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Unit Organisasi : 5-02.0-00.0-00.01.001 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5-02.0-00.0-00.01.001.001 PPKD

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	2.424.160.391.000,00	2.437.370.548.016,00	13.210.157.016,00	100,54		
00.0.00.00.4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.421.983.808.000,00	2.435.850.438.454,00	13.866.630.454,00	100,57		
00.0.00.00.4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.233.962.752.000,00	2.250.967.223.263,00	17.004.471.263,00	100,76		
00.0.00.00.4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	188.021.056.000,00	184.883.215.191,00	(3.137.840.809,00)	98,33		
00.0.00.00.4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	2.176.583.000,00	1.520.109.562,00	(656.473.438,00)	69,84		
00.0.00.00.4.3.01	Pendapatan Hibah	2.176.583.000,00	1.520.109.562,00	(656.473.438,00)	69,84		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	679.439.111.000,00	678.060.140.822,00	(1.378.970.178,00)	99,80		
00	Non Program	0,00	85.211.926,00	85.211.926,00	0		
00.0.00	Non Kegiatan	0,00	85.211.926,00	85.211.926,00	0		
00.0.00.00	Non Sub Kegiatan	0,00	85.211.926,00	85.211.926,00	0		
00.0.00.00.5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	0,00	85.211.926,00	85.211.926,00	0		
00.0.00.00.5.3.01	Belanja Tidak Terduga	0,00	85.211.926,00	85.211.926,00	0		
02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	679.439.111.000,00	677.974.928.896,00	(1.464.182.104,00)	99,78		
02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	679.439.111.000,00	677.974.928.896,00	(1.464.182.104,00)	99,78		
02.2.04.07	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	730.000.000,00	675.656.402,00	(54.343.598,00)	92,56		
02.2.04.07.5.1	BELANJA OPERASI	730.000.000,00	675.656.402,00	(54.343.598,00)	92,56		
02.2.04.07.5.1.04	Belanja Subsidi	730.000.000,00	675.656.402,00	(54.343.598,00)	92,56		
02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	663.680.625.000,00	663.231.376.738,00	(449.248.262,00)	99,93		
02.2.04.08.5.4	BELANJA TRANSFER	663.680.625.000,00	663.231.376.738,00	(449.248.262,00)	99,93		
02.2.04.08.5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	663.680.625.000,00	663.231.376.738,00	(449.248.262,00)	99,93		
02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1.235.728.000,00	324.728.875,00	(910.999.125,00)	26,28		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.04.09.5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.235.728.000,00	324.728.875,00	(910.999.125,00)	26,28		
02.2.04.09.5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.235.728.000,00	324.728.875,00	(910.999.125,00)	26,28		
02.2.04.10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	13.792.758.000,00	13.743.166.881,00	(49.591.119,00)	99,64		
02.2.04.10.5.4	BELANJA TRANSFER	13.792.758.000,00	13.743.166.881,00	(49.591.119,00)	99,64		
02.2.04.10.5.4.01	Belanja Bagi Hasil	13.792.758.000,00	13.743.166.881,00	(49.591.119,00)	99,64		
	SURPLUS / DEFISIT	1.744.721.280.000,00	1.759.310.407.194,00	14.589.127.194,00	100,84		
	PEMBIAYAAN						
00.0.00.00.6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	283.277.522.000,00	283.142.890.877,98	(134.631.122,02)	99,95		
00.0.00.00.6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	258.826.262.000,00	258.817.350.877,98	(8.911.122,02)	100,00		
00.0.00.00.6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	22.351.260.000,00	22.225.540.000,00	(125.720.000,00)	99,44		
00.0.00.00.6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	0,00	100,00		
00.0.00.00.6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	46.331.000.000,00	42.331.000.000,00	(4.000.000.000,00)	91,37		
00.0.00.00.6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00	100,00		
00.0.00.00.6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	24.231.000.000,00	20.231.000.000,00	(4.000.000.000,00)	83,49		
00.0.00.00.6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	0,00	100,00		
	PEMBIAYAAN NETTO	236.946.522.000,00	240.811.890.877,98	3.865.368.877,98	101,63		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	1.981.667.802.000,00	2.000.122.298.071,98	18.454.496.071,98	100,93		





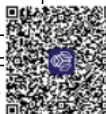
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN

SKPD : 5-03.5-04.0-00.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

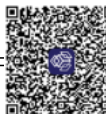
KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	61.724.383.000,00	22.099.934.181,00	(39.624.448.819,00)	35,80		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	57.764.574.000,00	18.914.288.622,00	(38.850.285.378,00)	32,74		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.116.000,00	23.293.480,00	(822.520,00)	96,59		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.247.000,00	11.678.480,00	(568.520,00)	95,36		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	12.247.000,00	11.678.480,00	(568.520,00)	95,36		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.247.000,00	11.678.480,00	(568.520,00)	95,36		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.869.000,00	11.615.000,00	(254.000,00)	97,86		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	11.869.000,00	11.615.000,00	(254.000,00)	97,86		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.869.000,00	11.615.000,00	(254.000,00)	97,86		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	56.616.915.000,00	17.823.751.919,00	(38.793.163.081,00)	31,48		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	56.593.019.000,00	17.800.921.319,00	(38.792.097.681,00)	31,45		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	56.593.019.000,00	17.800.921.319,00	(38.792.097.681,00)	31,45		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	56.593.019.000,00	17.800.921.319,00	(38.792.097.681,00)	31,45		
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	23.896.000,00	22.830.600,00	(1.065.400,00)	95,54		
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	23.896.000,00	22.830.600,00	(1.065.400,00)	95,54		
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	13.500.000,00	12.695.000,00	(805.000,00)	94,04		
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.396.000,00	10.135.600,00	(260.400,00)	97,50		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	155.078.000,00	150.995.313,00	(4.082.687,00)	97,37		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.538.000,00	7.238.500,00	(3.299.500,00)	68,69		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	10.538.000,00	7.238.500,00	(3.299.500,00)	68,69		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.538.000,00	7.238.500,00	(3.299.500,00)	68,69		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.000.000,00	28.942.750,00	(57.250,00)	99,80		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	29.000.000,00	28.942.750,00	(57.250,00)	99,80		



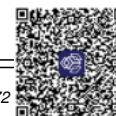
KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.000.000,00	28.942.750,00	(57.250,00)	99,80		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	33.540.000,00	33.539.150,00	(850,00)	100,00		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	33.540.000,00	33.539.150,00	(850,00)	100,00		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.540.000,00	33.539.150,00	(850,00)	100,00		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.000.000,00	990.000,00	(10.000,00)	99,00		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	990.000,00	(10.000,00)	99,00		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	990.000,00	(10.000,00)	99,00		
01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	22.000.000,00	21.805.000,00	(195.000,00)	99,11		
01.2.06.07.5.1	BELANJA OPERASI	22.000.000,00	21.805.000,00	(195.000,00)	99,11		
01.2.06.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	21.805.000,00	(195.000,00)	99,11		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56.000.000,00	55.499.213,00	(500.787,00)	99,11		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	56.000.000,00	55.499.213,00	(500.787,00)	99,11		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.000.000,00	55.499.213,00	(500.787,00)	99,11		
01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.000.000,00	2.980.700,00	(19.300,00)	99,36		
01.2.06.10.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	2.980.700,00	(19.300,00)	99,36		
01.2.06.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.980.700,00	(19.300,00)	99,36		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	666.774.000,00	638.526.000,00	(28.248.000,00)	95,76		
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	376.774.000,00	351.951.000,00	(24.823.000,00)	93,41		
01.2.07.06.5.1	BELANJA OPERASI	125.225.000,00	103.475.000,00	(21.750.000,00)	82,63		
01.2.07.06.5.1.01	Belanja Pegawai	550.000,00	475.000,00	(75.000,00)	86,36		
01.2.07.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.675.000,00	103.000.000,00	(21.675.000,00)	82,61		
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	251.549.000,00	248.476.000,00	(3.073.000,00)	98,78		
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	251.549.000,00	248.476.000,00	(3.073.000,00)	98,78		
01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	290.000.000,00	286.575.000,00	(3.425.000,00)	98,82		
01.2.07.10.5.1	BELANJA OPERASI	225.000,00	225.000,00	0,00	100,00		
01.2.07.10.5.1.01	Belanja Pegawai	225.000,00	225.000,00	0,00	100,00		
01.2.07.10.5.2	BELANJA MODAL	289.775.000,00	286.350.000,00	(3.425.000,00)	98,82		
01.2.07.10.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	289.775.000,00	286.350.000,00	(3.425.000,00)	98,82		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	151.596.000,00	129.625.798,00	(21.970.202,00)	85,51		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	1.058.000,00	(942.000,00)	52,90		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	1.058.000,00	(942.000,00)	52,90		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.058.000,00	(942.000,00)	52,90		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	139.596.000,00	118.618.498,00	(20.977.502,00)	84,97		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	139.596.000,00	118.618.498,00	(20.977.502,00)	84,97		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.596.000,00	118.618.498,00	(20.977.502,00)	84,97		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10.000.000,00	9.949.300,00	(50.700,00)	99,49		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.949.300,00	(50.700,00)	99,49		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.949.300,00	(50.700,00)	99,49		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	150.095.000,00	148.096.112,00	(1.998.888,00)	98,67		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	106.345.000,00	104.482.912,00	(1.862.088,00)	98,25		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	106.345.000,00	104.482.912,00	(1.862.088,00)	98,25		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.345.000,00	104.482.912,00	(1.862.088,00)	98,25		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.000.000,00	34.886.800,00	(113.200,00)	99,68		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	34.886.800,00	(113.200,00)	99,68		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	34.886.800,00	(113.200,00)	99,68		
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.750.000,00	8.726.400,00	(23.600,00)	99,73		
01.2.09.10.5.1	BELANJA OPERASI	8.750.000,00	8.726.400,00	(23.600,00)	99,73		
01.2.09.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.750.000,00	8.726.400,00	(23.600,00)	99,73		
02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.080.283.000,00	1.407.403.109,00	(672.879.891,00)	67,65		
02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1.170.000.000,00	520.597.929,00	(649.402.071,00)	44,50		
02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	905.000.000,00	265.609.701,00	(639.390.299,00)	29,35		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	905.000.000,00	265.609.701,00	(639.390.299,00)	29,35		
02.2.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	901.550.000,00	262.159.701,00	(639.390.299,00)	29,08		
02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	205.000.000,00	198.630.630,00	(6.369.370,00)	96,89		
02.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	205.000.000,00	198.630.630,00	(6.369.370,00)	96,89		
02.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	205.000.000,00	198.630.630,00	(6.369.370,00)	96,89		
02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	60.000.000,00	56.357.598,00	(3.642.402,00)	93,93		
02.2.01.10.5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	56.357.598,00	(3.642.402,00)	93,93		
02.2.01.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	56.357.598,00	(3.642.402,00)	93,93		
02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	735.000.000,00	717.964.624,00	(17.035.376,00)	97,68		
02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	225.000.000,00	212.375.393,00	(12.624.607,00)	94,39		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	225.000.000,00	212.375.393,00	(12.624.607,00)	94,39		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	225.000.000,00	212.375.393,00	(12.624.607,00)	94,39		
02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	510.000.000,00	505.589.231,00	(4.410.769,00)	99,14		
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	510.000.000,00	505.589.231,00	(4.410.769,00)	99,14		
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	510.000.000,00	505.589.231,00	(4.410.769,00)	99,14		
02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	72.628.000,00	72.350.346,00	(277.654,00)	99,62		
02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	37.029.000,00	36.856.398,00	(172.602,00)	99,53		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	37.029.000,00	36.856.398,00	(172.602,00)	99,53		
02.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.029.000,00	36.856.398,00	(172.602,00)	99,53		
02.2.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	35.599.000,00	35.493.948,00	(105.052,00)	99,70		
02.2.03.14.5.1	BELANJA OPERASI	35.599.000,00	35.493.948,00	(105.052,00)	99,70		
02.2.03.14.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.599.000,00	35.493.948,00	(105.052,00)	99,70		
02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	102.655.000,00	96.490.210,00	(6.164.790,00)	93,99		
02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	44.455.000,00	42.873.548,00	(1.581.452,00)	96,44		
02.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	44.455.000,00	42.873.548,00	(1.581.452,00)	96,44		
02.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.455.000,00	42.873.548,00	(1.581.452,00)	96,44		
02.2.04.03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	58.200.000,00	53.616.662,00	(4.583.338,00)	92,12		
02.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	58.200.000,00	53.616.662,00	(4.583.338,00)	92,12		
02.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.200.000,00	53.616.662,00	(4.583.338,00)	92,12		
02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.879.526.000,00	1.778.242.450,00	(101.283.550,00)	94,61		
02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	371.036.000,00	344.813.000,00	(26.223.000,00)	92,93		
02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	371.036.000,00	344.813.000,00	(26.223.000,00)	92,93		
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	371.036.000,00	344.813.000,00	(26.223.000,00)	92,93		
02.2.01.03.5.1.01	Belanja Pegawai	2.820.000,00	2.820.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	368.216.000,00	341.993.000,00	(26.223.000,00)	92,88		
02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1.508.490.000,00	1.433.429.450,00	(75.060.550,00)	95,02		
02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1.508.490.000,00	1.433.429.450,00	(75.060.550,00)	95,02		
02.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	1.508.490.000,00	1.433.429.450,00	(75.060.550,00)	95,02		
02.2.02.07.5.1.01	Belanja Pegawai	3.820.000,00	3.820.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.504.670.000,00	1.429.609.450,00	(75.060.550,00)	95,01		
	SURPLUS / DEFISIT	(61.724.383.000,00)	(22.099.934.181,00)	39.624.448.819,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(61.724.383.000,00)	(22.099.934.181,00)	39.624.448.819,00	0		





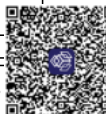
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

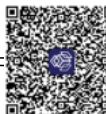
Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT

SKPD : 6-01.0-00.0-00.01 INSPEKTORAT DAERAH

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	10.467.450.000,00	10.293.991.283,00	(173.458.717,00)	98,34		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.576.542.000,00	8.433.420.917,00	(143.121.083,00)	98,33		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000,00	29.955.544,00	(44.456,00)	99,85		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.000.000,00	16.972.544,00	(27.456,00)	99,84		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	17.000.000,00	16.972.544,00	(27.456,00)	99,84		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	16.972.544,00	(27.456,00)	99,84		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.000.000,00	12.983.000,00	(17.000,00)	99,87		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	13.000.000,00	12.983.000,00	(17.000,00)	99,87		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	12.983.000,00	(17.000,00)	99,87		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.682.504.000,00	7.550.609.107,00	(131.894.893,00)	98,28		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.668.504.000,00	7.539.224.826,00	(129.279.174,00)	98,31		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	7.668.504.000,00	7.539.224.826,00	(129.279.174,00)	98,31		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	7.668.504.000,00	7.539.224.826,00	(129.279.174,00)	98,31		
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14.000.000,00	11.384.281,00	(2.615.719,00)	81,32		
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	14.000.000,00	11.384.281,00	(2.615.719,00)	81,32		
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	13.295.000,00	10.710.000,00	(2.585.000,00)	80,56		
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	705.000,00	674.281,00	(30.719,00)	95,64		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	70.000.000,00	69.832.279,00	(167.721,00)	99,76		
01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	70.000.000,00	69.832.279,00	(167.721,00)	99,76		
01.2.05.09.5.1	BELANJA OPERASI	70.000.000,00	69.832.279,00	(167.721,00)	99,76		
01.2.05.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	69.832.279,00	(167.721,00)	99,76		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	135.000.000,00	134.491.791,00	(508.209,00)	99,62		



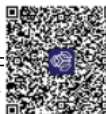
KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000,00	14.993.700,00	(6.300,00)	99,96		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	14.993.700,00	(6.300,00)	99,96		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.993.700,00	(6.300,00)	99,96		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.000.000,00	11.995.000,00	(5.000,00)	99,96		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	11.995.000,00	(5.000,00)	99,96		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	11.995.000,00	(5.000,00)	99,96		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.000.000,00	8.990.000,00	(10.000,00)	99,89		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	9.000.000,00	8.990.000,00	(10.000,00)	99,89		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	8.990.000,00	(10.000,00)	99,89		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000,00	2.970.500,00	(29.500,00)	99,02		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	2.970.500,00	(29.500,00)	99,02		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.970.500,00	(29.500,00)	99,02		
01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	16.000.000,00	15.975.000,00	(25.000,00)	99,84		
01.2.06.07.5.1	BELANJA OPERASI	16.000.000,00	15.975.000,00	(25.000,00)	99,84		
01.2.06.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	15.975.000,00	(25.000,00)	99,84		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.000.000,00	74.567.591,00	(432.409,00)	99,42		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	75.000.000,00	74.567.591,00	(432.409,00)	99,42		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	74.567.591,00	(432.409,00)	99,42		
01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.10.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	200.169.000,00	197.051.700,00	(3.117.300,00)	98,44		
01.2.07.05	Pengadaan Mebel	40.000.000,00	39.103.900,00	(896.100,00)	97,76		
01.2.07.05.5.2	BELANJA MODAL	40.000.000,00	39.103.900,00	(896.100,00)	97,76		
01.2.07.05.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.000.000,00	39.103.900,00	(896.100,00)	97,76		
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	80.169.000,00	78.338.800,00	(1.830.200,00)	97,72		
01.2.07.06.5.1	BELANJA OPERASI	1.754.000,00	1.754.000,00	0,00	100,00		
01.2.07.06.5.1.01	Belanja Pegawai	440.000,00	440.000,00	0,00	100,00		
01.2.07.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.314.000,00	1.314.000,00	0,00	100,00		
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	78.415.000,00	76.584.800,00	(1.830.200,00)	97,67		
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	78.415.000,00	76.584.800,00	(1.830.200,00)	97,67		
01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	80.000.000,00	79.609.000,00	(391.000,00)	99,51		
01.2.07.10.5.1	BELANJA OPERASI	665.000,00	665.000,00	0,00	100,00		
01.2.07.10.5.1.01	Belanja Pegawai	665.000,00	665.000,00	0,00	100,00		
01.2.07.10.5.2	BELANJA MODAL	79.335.000,00	78.944.000,00	(391.000,00)	99,51		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.07.10.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	79.335.000,00	78.944.000,00	(391.000,00)	99,51		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	162.038.000,00	156.210.850,00	(5.827.150,00)	96,40		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	1.993.300,00	(6.700,00)	99,67		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	1.993.300,00	(6.700,00)	99,67		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.993.300,00	(6.700,00)	99,67		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	112.000.000,00	106.249.001,00	(5.750.999,00)	94,87		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	112.000.000,00	106.249.001,00	(5.750.999,00)	94,87		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.000.000,00	106.249.001,00	(5.750.999,00)	94,87		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	48.038.000,00	47.968.549,00	(69.451,00)	99,86		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	48.038.000,00	47.968.549,00	(69.451,00)	99,86		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.038.000,00	47.968.549,00	(69.451,00)	99,86		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	296.831.000,00	295.269.646,00	(1.561.354,00)	99,47		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	194.831.000,00	194.439.246,00	(391.754,00)	99,80		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	194.831.000,00	194.439.246,00	(391.754,00)	99,80		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	194.831.000,00	194.439.246,00	(391.754,00)	99,80		
01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	12.000.000,00	11.970.000,00	(30.000,00)	99,75		
01.2.09.05.5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	11.970.000,00	(30.000,00)	99,75		
01.2.09.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	11.970.000,00	(30.000,00)	99,75		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000,00	24.915.400,00	(84.600,00)	99,66		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	24.915.400,00	(84.600,00)	99,66		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	24.915.400,00	(84.600,00)	99,66		
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	65.000.000,00	63.945.000,00	(1.055.000,00)	98,38		
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	65.000.000,00	63.945.000,00	(1.055.000,00)	98,38		
01.2.09.09.5.1.01	Belanja Pegawai	590.000,00	590.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.410.000,00	63.355.000,00	(1.055.000,00)	98,36		
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.216.908.000,00	1.192.932.811,00	(23.975.189,00)	98,03		
02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.012.560.000,00	995.095.435,00	(17.464.565,00)	98,28		
02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	100.000.000,00	97.430.897,00	(2.569.103,00)	97,43		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	97.430.897,00	(2.569.103,00)	97,43		
02.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.990.000,00	96.420.897,00	(2.569.103,00)	97,40		
02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	208.500.000,00	206.941.430,00	(1.558.570,00)	99,25		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	208.500.000,00	206.941.430,00	(1.558.570,00)	99,25		
02.2.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	9.425.000,00	9.025.000,00	(400.000,00)	95,76		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.075.000,00	197.916.430,00	(1.158.570,00)	99,42		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	71.000.000,00	70.707.106,00	(292.894,00)	99,59		
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	71.000.000,00	70.707.106,00	(292.894,00)	99,59		
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.000.000,00	70.707.106,00	(292.894,00)	99,59		
02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	81.000.000,00	80.786.228,00	(213.772,00)	99,74		
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	81.000.000,00	80.786.228,00	(213.772,00)	99,74		
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.000.000,00	80.786.228,00	(213.772,00)	99,74		
02.2.01.05	Pengawasan Desa	448.400.000,00	436.580.895,00	(11.819.105,00)	97,36		
02.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	448.400.000,00	436.580.895,00	(11.819.105,00)	97,36		
02.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	448.400.000,00	436.580.895,00	(11.819.105,00)	97,36		
02.2.01.06	Kerja Sama Pengawasan Internal	41.660.000,00	41.070.600,00	(589.400,00)	98,59		
02.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	41.660.000,00	41.070.600,00	(589.400,00)	98,59		
02.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.660.000,00	41.070.600,00	(589.400,00)	98,59		
02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	62.000.000,00	61.578.279,00	(421.721,00)	99,32		
02.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	62.000.000,00	61.578.279,00	(421.721,00)	99,32		
02.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.000.000,00	61.578.279,00	(421.721,00)	99,32		
02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	204.348.000,00	197.837.376,00	(6.510.624,00)	96,81		
02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	61.600.000,00	57.531.318,00	(4.068.682,00)	93,39		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	61.600.000,00	57.531.318,00	(4.068.682,00)	93,39		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.600.000,00	57.531.318,00	(4.068.682,00)	93,39		
02.2.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	142.748.000,00	140.306.058,00	(2.441.942,00)	98,29		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	142.748.000,00	140.306.058,00	(2.441.942,00)	98,29		
02.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.328.000,00	137.886.058,00	(2.441.942,00)	98,26		
03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	674.000.000,00	667.637.555,00	(6.362.445,00)	99,06		
03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	27.000.000,00	26.836.188,00	(163.812,00)	99,39		
03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	14.000.000,00	13.851.088,00	(148.912,00)	98,94		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	14.000.000,00	13.851.088,00	(148.912,00)	98,94		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	13.851.088,00	(148.912,00)	98,94		
03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	13.000.000,00	12.985.100,00	(14.900,00)	99,89		
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	13.000.000,00	12.985.100,00	(14.900,00)	99,89		
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	12.985.100,00	(14.900,00)	99,89		
03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	647.000.000,00	640.801.367,00	(6.198.633,00)	99,04		
03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	58.000.000,00	57.184.426,00	(815.574,00)	98,59		
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	58.000.000,00	57.184.426,00	(815.574,00)	98,59		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.000.000,00	57.184.426,00	(815.574,00)	98,59		
03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	185.000.000,00	182.551.848,00	(2.448.152,00)	98,68		
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	185.000.000,00	182.551.848,00	(2.448.152,00)	98,68		
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	185.000.000,00	182.551.848,00	(2.448.152,00)	98,68		
03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	235.000.000,00	233.283.239,00	(1.716.761,00)	99,27		
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	235.000.000,00	233.283.239,00	(1.716.761,00)	99,27		
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	235.000.000,00	233.283.239,00	(1.716.761,00)	99,27		
03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	169.000.000,00	167.781.854,00	(1.218.146,00)	99,28		
03.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	169.000.000,00	167.781.854,00	(1.218.146,00)	99,28		
03.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	169.000.000,00	167.781.854,00	(1.218.146,00)	99,28		
	SURPLUS / DEFISIT	(10.467.450.000,00)	(10.293.991.283,00)	173.458.717,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(10.467.450.000,00)	(10.293.991.283,00)	173.458.717,00	0		





PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

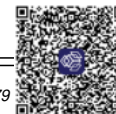
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN

SKPD : 7-01.0-00.0-00.01 KECAMATAN AYAH

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	2.536.980.000,00	2.506.325.164,00	(30.654.836,00)	98,79		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.250.463.000,00	2.224.350.054,00	(26.112.946,00)	98,84		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.638.000,00	8.635.368,00	(2.632,00)	99,97		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.214.000,00	4.213.150,00	(850,00)	99,98		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.214.000,00	4.213.150,00	(850,00)	99,98		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.214.000,00	4.213.150,00	(850,00)	99,98		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.424.000,00	4.422.218,00	(1.782,00)	99,96		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	4.424.000,00	4.422.218,00	(1.782,00)	99,96		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.424.000,00	4.422.218,00	(1.782,00)	99,96		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.062.045.000,00	2.037.362.869,00	(24.682.131,00)	98,80		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.037.319.000,00	2.012.725.841,00	(24.593.159,00)	98,79		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.037.319.000,00	2.012.725.841,00	(24.593.159,00)	98,79		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.037.319.000,00	2.012.725.841,00	(24.593.159,00)	98,79		
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24.726.000,00	24.637.028,00	(88.972,00)	99,64		
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	24.726.000,00	24.637.028,00	(88.972,00)	99,64		
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	11.640.000,00	11.640.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.086.000,00	12.997.028,00	(88.972,00)	99,32		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	34.947.000,00	34.861.100,00	(85.900,00)	99,75		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000,00	3.993.700,00	(6.300,00)	99,84		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	3.993.700,00	(6.300,00)	99,84		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	3.993.700,00	(6.300,00)	99,84		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.160.000,00	13.112.900,00	(47.100,00)	99,64		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	13.160.000,00	13.112.900,00	(47.100,00)	99,64		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.160.000,00	13.112.900,00	(47.100,00)	99,64		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.301.000,00	4.301.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	4.301.000,00	4.301.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.301.000,00	4.301.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	8.286.000,00	8.285.400,00	(600,00)	99,99		
01.2.06.07.5.1	BELANJA OPERASI	8.286.000,00	8.285.400,00	(600,00)	99,99		
01.2.06.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.286.000,00	8.285.400,00	(600,00)	99,99		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.200.000,00	1.170.000,00	(30.000,00)	97,50		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	1.200.000,00	1.170.000,00	(30.000,00)	97,50		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.170.000,00	(30.000,00)	97,50		
01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.600.000,00	1.598.100,00	(1.900,00)	99,88		
01.2.06.10.5.1	BELANJA OPERASI	1.600.000,00	1.598.100,00	(1.900,00)	99,88		
01.2.06.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	1.598.100,00	(1.900,00)	99,88		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.725.000,00	10.449.000,00	(276.000,00)	97,43		
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.725.000,00	10.449.000,00	(276.000,00)	97,43		
01.2.07.06.5.1	BELANJA OPERASI	480.000,00	465.000,00	(15.000,00)	96,88		
01.2.07.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	480.000,00	465.000,00	(15.000,00)	96,88		
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	10.245.000,00	9.984.000,00	(261.000,00)	97,45		
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.245.000,00	9.984.000,00	(261.000,00)	97,45		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72.400.000,00	71.365.134,00	(1.034.866,00)	98,57		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.000.000,00	38.969.134,00	(1.030.866,00)	97,42		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	38.969.134,00	(1.030.866,00)	97,42		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	38.969.134,00	(1.030.866,00)	97,42		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	32.200.000,00	32.196.000,00	(4.000,00)	99,99		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	32.200.000,00	32.196.000,00	(4.000,00)	99,99		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.200.000,00	32.196.000,00	(4.000,00)	99,99		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.708.000,00	61.676.583,00	(31.417,00)	99,95		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	43.708.000,00	43.685.083,00	(22.917,00)	99,95		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	43.708.000,00	43.685.083,00	(22.917,00)	99,95		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.708.000,00	43.685.083,00	(22.917,00)	99,95		
01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	1.000.000,00	999.100,00	(900,00)	99,91		
01.2.09.05.5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	999.100,00	(900,00)	99,91		
01.2.09.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	999.100,00	(900,00)	99,91		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000,00	9.992.400,00	(7.600,00)	99,92		
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.992.400,00	(7.600,00)	99,92		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.992.400,00	(7.600,00)	99,92		
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	78.799.000,00	75.895.800,00	(2.903.200,00)	96,32		
02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	78.799.000,00	75.895.800,00	(2.903.200,00)	96,32		
02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	78.799.000,00	75.895.800,00	(2.903.200,00)	96,32		
02.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	78.799.000,00	75.895.800,00	(2.903.200,00)	96,32		
02.2.04.02.5.1.01	Belanja Pegawai	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	100,00		
02.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.779.000,00	73.875.800,00	(2.903.200,00)	96,22		
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	25.000.000,00	24.999.200,00	(800,00)	100,00		
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	25.000.000,00	24.999.200,00	(800,00)	100,00		
05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	25.000.000,00	24.999.200,00	(800,00)	100,00		
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	24.999.200,00	(800,00)	100,00		
05.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	505.000,00	505.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.495.000,00	24.494.200,00	(800,00)	100,00		
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	182.718.000,00	181.080.110,00	(1.637.890,00)	99,10		
06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	182.718.000,00	181.080.110,00	(1.637.890,00)	99,10		
06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	25.000.000,00	24.999.175,00	(825,00)	100,00		
06.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	24.999.175,00	(825,00)	100,00		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
06.2.01.03.5.1.01	Belanja Pegawai	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.980.000,00	22.979.175,00	(825,00)	100,00		
06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	10.000.000,00	9.598.595,00	(401.405,00)	95,99		
06.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.598.595,00	(401.405,00)	95,99		
06.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.598.595,00	(401.405,00)	95,99		
06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	3.050.000,00	3.049.700,00	(300,00)	99,99		
06.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	3.050.000,00	3.049.700,00	(300,00)	99,99		
06.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.050.000,00	3.049.700,00	(300,00)	99,99		
06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5.000.000,00	4.997.000,00	(3.000,00)	99,94		
06.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.997.000,00	(3.000,00)	99,94		
06.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.997.000,00	(3.000,00)	99,94		
06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.000.000,00	4.999.400,00	(600,00)	99,99		
06.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.999.400,00	(600,00)	99,99		
06.2.01.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.999.400,00	(600,00)	99,99		
06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	25.000.000,00	24.999.040,00	(960,00)	100,00		
06.2.01.13.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	24.999.040,00	(960,00)	100,00		
06.2.01.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	24.999.040,00	(960,00)	100,00		
06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	99.668.000,00	98.742.400,00	(925.600,00)	99,07		
06.2.01.16.5.1	BELANJA OPERASI	99.668.000,00	98.742.400,00	(925.600,00)	99,07		
06.2.01.16.5.1.01	Belanja Pegawai	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.16.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.648.000,00	96.722.400,00	(925.600,00)	99,05		
06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	10.000.000,00	9.694.800,00	(305.200,00)	96,95		
06.2.01.17.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.694.800,00	(305.200,00)	96,95		
06.2.01.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.694.800,00	(305.200,00)	96,95		
	SURPLUS / DEFISIT	(2.536.980.000,00)	(2.506.325.164,00)	30.654.836,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(2.536.980.000,00)	(2.506.325.164,00)	30.654.836,00	0		





PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN

SKPD : 7-01.0-00.0-00.02 KECAMATAN BUAYAN

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	2.053.582.307,00	1.908.524.747,00	(145.057.560,00)	92,94		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.836.034.307,00	1.692.806.247,00	(143.228.060,00)	92,20		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.050.000,00	4.047.400,00	(2.600,00)	99,94		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.550.000,00	1.549.000,00	(1.000,00)	99,94		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.550.000,00	1.549.000,00	(1.000,00)	99,94		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.550.000,00	1.549.000,00	(1.000,00)	99,94		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.500.000,00	2.498.400,00	(1.600,00)	99,94		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.498.400,00	(1.600,00)	99,94		
01.2.01.07.5.1.01	Belanja Pegawai	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	100,00		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.490.000,00	1.488.400,00	(1.600,00)	99,89		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.741.039.307,00	1.599.388.710,00	(141.650.597,00)	91,86		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.727.957.307,00	1.586.330.379,00	(141.626.928,00)	91,80		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.727.957.307,00	1.586.330.379,00	(141.626.928,00)	91,80		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.727.957.307,00	1.586.330.379,00	(141.626.928,00)	91,80		
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	13.082.000,00	13.058.331,00	(23.669,00)	99,82		
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	13.082.000,00	13.058.331,00	(23.669,00)	99,82		
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	6.080.000,00	6.080.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.002.000,00	6.978.331,00	(23.669,00)	99,66		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	19.695.000,00	19.570.400,00	(124.600,00)	99,37		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.262.000,00	1.261.500,00	(500,00)	99,96		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.262.000,00	1.261.500,00	(500,00)	99,96		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.262.000,00	1.261.500,00	(500,00)	99,96		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.860.000,00	8.820.000,00	(40.000,00)	99,55		



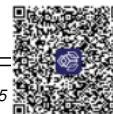
KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	8.860.000,00	8.820.000,00	(40.000,00)	99,55		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.860.000,00	8.820.000,00	(40.000,00)	99,55		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.601.000,00	1.600.500,00	(500,00)	99,97		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	1.601.000,00	1.600.500,00	(500,00)	99,97		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.601.000,00	1.600.500,00	(500,00)	99,97		
01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	5.000.000,00	4.990.200,00	(9.800,00)	99,80		
01.2.06.07.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.990.200,00	(9.800,00)	99,80		
01.2.06.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.990.200,00	(9.800,00)	99,80		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.492.000,00	1.418.200,00	(73.800,00)	95,05		
01.2.06.10.5.1	BELANJA OPERASI	1.492.000,00	1.418.200,00	(73.800,00)	95,05		
01.2.06.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.492.000,00	1.418.200,00	(73.800,00)	95,05		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12.000.000,00	11.880.000,00	(120.000,00)	99,00		
01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.000.000,00	11.880.000,00	(120.000,00)	99,00		
01.2.07.10.5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	11.880.000,00	(120.000,00)	99,00		
01.2.07.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	11.880.000,00	(120.000,00)	99,00		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32.750.000,00	31.456.810,00	(1.293.190,00)	96,05		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.000.000,00	15.707.210,00	(1.292.790,00)	92,40		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	17.000.000,00	15.707.210,00	(1.292.790,00)	92,40		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	15.707.210,00	(1.292.790,00)	92,40		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	15.200.000,00	15.199.600,00	(400,00)	100,00		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	15.200.000,00	15.199.600,00	(400,00)	100,00		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.200.000,00	15.199.600,00	(400,00)	100,00		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26.500.000,00	26.462.927,00	(37.073,00)	99,86		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24.500.000,00	24.472.927,00	(27.073,00)	99,89		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	24.500.000,00	24.472.927,00	(27.073,00)	99,89		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.500.000,00	24.472.927,00	(27.073,00)	99,89		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.000.000,00	1.990.000,00	(10.000,00)	99,50		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	1.990.000,00	(10.000,00)	99,50		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.990.000,00	(10.000,00)	99,50		
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	55.370.000,00	54.908.750,00	(461.250,00)	99,17		
02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	55.370.000,00	54.908.750,00	(461.250,00)	99,17		
02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	55.370.000,00	54.908.750,00	(461.250,00)	99,17		
02.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	55.370.000,00	54.908.750,00	(461.250,00)	99,17		
02.2.04.02.5.1.01	Belanja Pegawai	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	100,00		
02.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.350.000,00	52.888.750,00	(461.250,00)	99,14		
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.000.000,00	6.997.800,00	(2.200,00)	99,97		
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.000.000,00	6.997.800,00	(2.200,00)	99,97		
05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	7.000.000,00	6.997.800,00	(2.200,00)	99,97		
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	7.000.000,00	6.997.800,00	(2.200,00)	99,97		
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	6.997.800,00	(2.200,00)	99,97		
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	155.178.000,00	153.811.950,00	(1.366.050,00)	99,12		
06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	155.178.000,00	153.811.950,00	(1.366.050,00)	99,12		
06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	31.529.000,00	31.104.350,00	(424.650,00)	98,65		
06.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	31.529.000,00	31.104.350,00	(424.650,00)	98,65		
06.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.529.000,00	31.104.350,00	(424.650,00)	98,65		
06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.650.000,00	3.648.000,00	(2.000,00)	99,95		
06.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	3.650.000,00	3.648.000,00	(2.000,00)	99,95		
06.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.650.000,00	3.648.000,00	(2.000,00)	99,95		
06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	2.280.000,00	2.277.800,00	(2.200,00)	99,90		
06.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	2.280.000,00	2.277.800,00	(2.200,00)	99,90		
06.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.280.000,00	2.277.800,00	(2.200,00)	99,90		
06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.280.000,00	5.240.100,00	(39.900,00)	99,24		
06.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	5.280.000,00	5.240.100,00	(39.900,00)	99,24		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
06.2.01.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.280.000,00	5.240.100,00	(39.900,00)	99,24		
06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	8.275.000,00	8.274.000,00	(1.000,00)	99,99		
06.2.01.13.5.1	BELANJA OPERASI	8.275.000,00	8.274.000,00	(1.000,00)	99,99		
06.2.01.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.275.000,00	8.274.000,00	(1.000,00)	99,99		
06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	99.914.000,00	99.019.100,00	(894.900,00)	99,10		
06.2.01.16.5.1	BELANJA OPERASI	99.914.000,00	99.019.100,00	(894.900,00)	99,10		
06.2.01.16.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.914.000,00	99.019.100,00	(894.900,00)	99,10		
06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	4.250.000,00	4.248.600,00	(1.400,00)	99,97		
06.2.01.17.5.1	BELANJA OPERASI	4.250.000,00	4.248.600,00	(1.400,00)	99,97		
06.2.01.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.250.000,00	4.248.600,00	(1.400,00)	99,97		
	SURPLUS / DEFISIT	(2.053.582.307,00)	(1.908.524.747,00)	145.057.560,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(2.053.582.307,00)	(1.908.524.747,00)	145.057.560,00	0		





PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN

SKPD : 7-01.0-00.0-00.03 KECAMATAN PURING

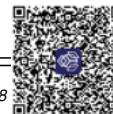
KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	2.201.740.000,00	2.130.803.714,00	(70.936.286,00)	96,78		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.938.252.000,00	1.867.422.414,00	(70.829.586,00)	96,35		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.454.000,00	5.444.000,00	(10.000,00)	99,82		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.940.000,00	1.937.500,00	(2.500,00)	99,87		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.940.000,00	1.937.500,00	(2.500,00)	99,87		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.940.000,00	1.937.500,00	(2.500,00)	99,87		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.514.000,00	3.506.500,00	(7.500,00)	99,79		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	3.514.000,00	3.506.500,00	(7.500,00)	99,79		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.514.000,00	3.506.500,00	(7.500,00)	99,79		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.818.033.000,00	1.748.384.311,00	(69.648.689,00)	96,17		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.808.033.000,00	1.738.390.749,00	(69.642.251,00)	96,15		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.808.033.000,00	1.738.390.749,00	(69.642.251,00)	96,15		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.808.033.000,00	1.738.390.749,00	(69.642.251,00)	96,15		
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.000.000,00	9.993.562,00	(6.438,00)	99,94		
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.993.562,00	(6.438,00)	99,94		
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	8.580.000,00	8.580.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.420.000,00	1.413.562,00	(6.438,00)	99,55		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	40.071.000,00	40.018.000,00	(53.000,00)	99,87		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.890.000,00	21.855.000,00	(35.000,00)	99,84		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	21.890.000,00	21.855.000,00	(35.000,00)	99,84		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.890.000,00	21.855.000,00	(35.000,00)	99,84		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.981.000,00	1.981.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	1.981.000,00	1.981.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.981.000,00	1.981.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.300.000,00	1.284.000,00	(16.000,00)	98,77		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	1.300.000,00	1.284.000,00	(16.000,00)	98,77		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	1.284.000,00	(16.000,00)	98,77		
01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.07.5.1	BELANJA OPERASI	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	200.000,00	198.000,00	(2.000,00)	99,00		
01.2.06.10.5.1	BELANJA OPERASI	200.000,00	198.000,00	(2.000,00)	99,00		
01.2.06.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	198.000,00	(2.000,00)	99,00		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.256.000,00	29.432.103,00	(823.897,00)	97,28		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.277.000,00	9.454.103,00	(822.897,00)	91,99		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	10.277.000,00	9.454.103,00	(822.897,00)	91,99		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.277.000,00	9.454.103,00	(822.897,00)	91,99		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	18.879.000,00	18.878.000,00	(1.000,00)	99,99		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	18.879.000,00	18.878.000,00	(1.000,00)	99,99		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.879.000,00	18.878.000,00	(1.000,00)	99,99		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44.438.000,00	44.144.000,00	(294.000,00)	99,34		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.262.000,00	34.968.500,00	(293.500,00)	99,17		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	35.262.000,00	34.968.500,00	(293.500,00)	99,17		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.262.000,00	34.968.500,00	(293.500,00)	99,17		
01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.05.5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.930.000,00	3.929.500,00	(500,00)	99,99		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	3.930.000,00	3.929.500,00	(500,00)	99,99		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.930.000,00	3.929.500,00	(500,00)	99,99		
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.246.000,00	4.246.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	4.246.000,00	4.246.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.246.000,00	4.246.000,00	0,00	100,00		
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	58.536.000,00	58.534.600,00	(1.400,00)	100,00		
02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	58.536.000,00	58.534.600,00	(1.400,00)	100,00		
02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	58.536.000,00	58.534.600,00	(1.400,00)	100,00		
02.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	58.536.000,00	58.534.600,00	(1.400,00)	100,00		
02.2.04.02.5.1.01	Belanja Pegawai	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00	100,00		
02.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.116.000,00	56.114.600,00	(1.400,00)	100,00		
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	17.180.000,00	17.174.600,00	(5.400,00)	99,97		
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	17.180.000,00	17.174.600,00	(5.400,00)	99,97		
05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	17.180.000,00	17.174.600,00	(5.400,00)	99,97		
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	17.180.000,00	17.174.600,00	(5.400,00)	99,97		
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.180.000,00	17.174.600,00	(5.400,00)	99,97		
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	187.772.000,00	187.672.100,00	(99.900,00)	99,95		
06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	187.772.000,00	187.672.100,00	(99.900,00)	99,95		
06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	27.106.000,00	27.085.000,00	(21.000,00)	99,92		
06.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	27.106.000,00	27.085.000,00	(21.000,00)	99,92		
06.2.01.03.5.1.01	Belanja Pegawai	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.086.000,00	25.065.000,00	(21.000,00)	99,92		
06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	2.539.000,00	2.533.000,00	(6.000,00)	99,76		
06.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	2.539.000,00	2.533.000,00	(6.000,00)	99,76		
06.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.539.000,00	2.533.000,00	(6.000,00)	99,76		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1.000.000,00	981.000,00	(19.000,00)	98,10		
06.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	981.000,00	(19.000,00)	98,10		
06.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	981.000,00	(19.000,00)	98,10		
06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	7.230.000,00	7.224.000,00	(6.000,00)	99,92		
06.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	7.230.000,00	7.224.000,00	(6.000,00)	99,92		
06.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.230.000,00	7.224.000,00	(6.000,00)	99,92		
06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	23.611.000,00	23.591.000,00	(20.000,00)	99,92		
06.2.01.13.5.1	BELANJA OPERASI	23.611.000,00	23.591.000,00	(20.000,00)	99,92		
06.2.01.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.611.000,00	23.591.000,00	(20.000,00)	99,92		
06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	119.209.000,00	119.198.100,00	(10.900,00)	99,99		
06.2.01.16.5.1	BELANJA OPERASI	119.209.000,00	119.198.100,00	(10.900,00)	99,99		
06.2.01.16.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	119.209.000,00	119.198.100,00	(10.900,00)	99,99		
06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	7.077.000,00	7.060.000,00	(17.000,00)	99,76		
06.2.01.17.5.1	BELANJA OPERASI	7.077.000,00	7.060.000,00	(17.000,00)	99,76		
06.2.01.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.077.000,00	7.060.000,00	(17.000,00)	99,76		
	SURPLUS / DEFISIT	(2.201.740.000,00)	(2.130.803.714,00)	70.936.286,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(2.201.740.000,00)	(2.130.803.714,00)	70.936.286,00	0		





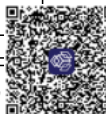
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN

SKPD : 7-01.0-00.0-00.04 KECAMATAN PETANAHAN

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	2.399.214.000,00	2.321.924.873,00	(77.289.127,00)	96,78		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.132.980.000,00	2.061.714.951,00	(71.265.049,00)	96,66		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.180.000,00	13.630.150,00	(549.850,00)	96,12		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.952.000,00	11.885.350,00	(66.650,00)	99,44		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	11.952.000,00	11.885.350,00	(66.650,00)	99,44		
01.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	100,00		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.932.000,00	9.865.350,00	(66.650,00)	99,33		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.228.000,00	1.744.800,00	(483.200,00)	78,31		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	2.228.000,00	1.744.800,00	(483.200,00)	78,31		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.228.000,00	1.744.800,00	(483.200,00)	78,31		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.946.597.000,00	1.879.701.953,00	(66.895.047,00)	96,56		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.914.260.000,00	1.849.317.997,00	(64.942.003,00)	96,61		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.914.260.000,00	1.849.317.997,00	(64.942.003,00)	96,61		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.914.260.000,00	1.849.317.997,00	(64.942.003,00)	96,61		
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	32.337.000,00	30.383.956,00	(1.953.044,00)	93,96		
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	32.337.000,00	30.383.956,00	(1.953.044,00)	93,96		
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	8.170.000,00	8.170.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.167.000,00	22.213.956,00	(1.953.044,00)	91,92		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	36.334.000,00	35.968.730,00	(365.270,00)	98,99		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.136.000,00	2.135.500,00	(500,00)	99,98		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.136.000,00	2.135.500,00	(500,00)	99,98		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.136.000,00	2.135.500,00	(500,00)	99,98		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.095.000,00	14.081.250,00	(13.750,00)	99,90		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	14.095.000,00	14.081.250,00	(13.750,00)	99,90		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.095.000,00	14.081.250,00	(13.750,00)	99,90		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.460.000,00	7.459.980,00	(20,00)	100,00		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	7.460.000,00	7.459.980,00	(20,00)	100,00		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.460.000,00	7.459.980,00	(20,00)	100,00		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.040.000,00	1.800.000,00	(240.000,00)	88,24		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	2.040.000,00	1.800.000,00	(240.000,00)	88,24		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.040.000,00	1.800.000,00	(240.000,00)	88,24		
01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	8.465.000,00	8.412.000,00	(53.000,00)	99,37		
01.2.06.07.5.1	BELANJA OPERASI	8.465.000,00	8.412.000,00	(53.000,00)	99,37		
01.2.06.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.465.000,00	8.412.000,00	(53.000,00)	99,37		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.538.000,00	1.480.000,00	(58.000,00)	96,23		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	1.538.000,00	1.480.000,00	(58.000,00)	96,23		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.538.000,00	1.480.000,00	(58.000,00)	96,23		
01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.10.5.1	BELANJA OPERASI	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12.403.000,00	12.384.500,00	(18.500,00)	99,85		
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.403.000,00	12.384.500,00	(18.500,00)	99,85		
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	12.403.000,00	12.384.500,00	(18.500,00)	99,85		
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.403.000,00	12.384.500,00	(18.500,00)	99,85		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32.754.000,00	30.522.343,00	(2.231.657,00)	93,19		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	550.000,00	542.900,00	(7.100,00)	98,71		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	550.000,00	542.900,00	(7.100,00)	98,71		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	550.000,00	542.900,00	(7.100,00)	98,71		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.500.000,00	23.488.143,00	(2.011.857,00)	92,11		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	25.500.000,00	23.488.143,00	(2.011.857,00)	92,11		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.500.000,00	23.488.143,00	(2.011.857,00)	92,11		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.704.000,00	6.491.300,00	(212.700,00)	96,83		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	6.704.000,00	6.491.300,00	(212.700,00)	96,83		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.704.000,00	6.491.300,00	(212.700,00)	96,83		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.712.000,00	89.507.275,00	(1.204.725,00)	98,67		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	37.994.000,00	36.814.575,00	(1.179.425,00)	96,90		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	37.994.000,00	36.814.575,00	(1.179.425,00)	96,90		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.994.000,00	36.814.575,00	(1.179.425,00)	96,90		
01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	1.008.000,00	1.008.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.05.5.1	BELANJA OPERASI	1.008.000,00	1.008.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.008.000,00	1.008.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	48.210.000,00	48.184.700,00	(25.300,00)	99,95		
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	48.210.000,00	48.184.700,00	(25.300,00)	99,95		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.210.000,00	48.184.700,00	(25.300,00)	99,95		
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	61.522.000,00	57.524.890,00	(3.997.110,00)	93,50		
02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	61.522.000,00	57.524.890,00	(3.997.110,00)	93,50		
02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	61.522.000,00	57.524.890,00	(3.997.110,00)	93,50		
02.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	61.522.000,00	57.524.890,00	(3.997.110,00)	93,50		
02.2.04.02.5.1.01	Belanja Pegawai	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	100,00		
02.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.502.000,00	55.504.890,00	(3.997.110,00)	93,28		
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	9.000.000,00	8.826.800,00	(173.200,00)	98,08		
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	9.000.000,00	8.826.800,00	(173.200,00)	98,08		
05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	9.000.000,00	8.826.800,00	(173.200,00)	98,08		
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	9.000.000,00	8.826.800,00	(173.200,00)	98,08		
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	8.826.800,00	(173.200,00)	98,08		
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	195.712.000,00	193.858.232,00	(1.853.768,00)	99,05		
06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	195.712.000,00	193.858.232,00	(1.853.768,00)	99,05		
06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	33.785.000,00	33.458.502,00	(326.498,00)	99,03		
06.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	33.785.000,00	33.458.502,00	(326.498,00)	99,03		
06.2.01.03.5.1.01	Belanja Pegawai	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00	100,00		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
06.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.365.000,00	31.038.502,00	(326.498,00)	98,96		
06.2.01.06	Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1.000.000,00	972.400,00	(27.600,00)	97,24		
06.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	972.400,00	(27.600,00)	97,24		
06.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	972.400,00	(27.600,00)	97,24		
06.2.01.09	Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	10.297.000,00	9.548.720,00	(748.280,00)	92,73		
06.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	10.297.000,00	9.548.720,00	(748.280,00)	92,73		
06.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.297.000,00	9.548.720,00	(748.280,00)	92,73		
06.2.01.11	Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9.000.000,00	8.931.353,00	(68.647,00)	99,24		
06.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	9.000.000,00	8.931.353,00	(68.647,00)	99,24		
06.2.01.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	8.931.353,00	(68.647,00)	99,24		
06.2.01.13	Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	28.050.000,00	28.022.407,00	(27.593,00)	99,90		
06.2.01.13.5.1	BELANJA OPERASI	28.050.000,00	28.022.407,00	(27.593,00)	99,90		
06.2.01.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.050.000,00	28.022.407,00	(27.593,00)	99,90		
06.2.01.16	Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	104.580.000,00	104.006.100,00	(573.900,00)	99,45		
06.2.01.16.5.1	BELANJA OPERASI	104.580.000,00	104.006.100,00	(573.900,00)	99,45		
06.2.01.16.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.580.000,00	104.006.100,00	(573.900,00)	99,45		
06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	9.000.000,00	8.918.750,00	(81.250,00)	99,10		
06.2.01.17.5.1	BELANJA OPERASI	9.000.000,00	8.918.750,00	(81.250,00)	99,10		
06.2.01.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	8.918.750,00	(81.250,00)	99,10		
	SURPLUS / DEFISIT	(2.399.214.000,00)	(2.321.924.873,00)	77.289.127,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(2.399.214.000,00)	(2.321.924.873,00)	77.289.127,00	0		





PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN

SKPD : 7-01.0-00.0-00.05 KECAMATAN KLIRONG

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	2.186.874.000,00	2.094.513.046,00	(92.360.954,00)	95,78		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.933.741.000,00	1.850.165.646,00	(83.575.354,00)	95,68		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.917.000,00	4.980.000,00	(937.000,00)	84,16		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.221.000,00	3.405.000,00	(816.000,00)	80,67		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.221.000,00	3.405.000,00	(816.000,00)	80,67		
01.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	505.000,00	505.000,00	0,00	100,00		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.716.000,00	2.900.000,00	(816.000,00)	78,04		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.696.000,00	1.575.000,00	(121.000,00)	92,87		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	1.696.000,00	1.575.000,00	(121.000,00)	92,87		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.696.000,00	1.575.000,00	(121.000,00)	92,87		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.819.488.000,00	1.742.200.529,00	(77.287.471,00)	95,75		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.785.934.000,00	1.708.690.489,00	(77.243.511,00)	95,67		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.785.934.000,00	1.708.690.489,00	(77.243.511,00)	95,67		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.785.934.000,00	1.708.690.489,00	(77.243.511,00)	95,67		
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	33.554.000,00	33.510.040,00	(43.960,00)	99,87		
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	33.554.000,00	33.510.040,00	(43.960,00)	99,87		
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	10.710.000,00	10.710.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.844.000,00	22.800.040,00	(43.960,00)	99,81		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	35.042.000,00	34.627.000,00	(415.000,00)	98,82		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.790.000,00	9.790.000,00	0,00	100,00		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	9.790.000,00	9.790.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.790.000,00	9.790.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.450.000,00	7.450.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	7.450.000,00	7.450.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.450.000,00	7.450.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	10.272.000,00	10.252.000,00	(20.000,00)	99,81		
01.2.06.07.5.1	BELANJA OPERASI	10.272.000,00	10.252.000,00	(20.000,00)	99,81		
01.2.06.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.272.000,00	10.252.000,00	(20.000,00)	99,81		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.630.000,00	1.240.000,00	(390.000,00)	76,07		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	1.630.000,00	1.240.000,00	(390.000,00)	76,07		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.630.000,00	1.240.000,00	(390.000,00)	76,07		
01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.000.000,00	1.995.000,00	(5.000,00)	99,75		
01.2.06.10.5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	1.995.000,00	(5.000,00)	99,75		
01.2.06.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.995.000,00	(5.000,00)	99,75		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39.250.000,00	37.089.717,00	(2.160.283,00)	94,50		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	992.000,00	(8.000,00)	99,20		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	992.000,00	(8.000,00)	99,20		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	992.000,00	(8.000,00)	99,20		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.050.000,00	17.920.717,00	(2.129.283,00)	89,38		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	20.050.000,00	17.920.717,00	(2.129.283,00)	89,38		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.050.000,00	17.920.717,00	(2.129.283,00)	89,38		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	18.200.000,00	18.177.000,00	(23.000,00)	99,87		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	18.200.000,00	18.177.000,00	(23.000,00)	99,87		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.200.000,00	18.177.000,00	(23.000,00)	99,87		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	34.044.000,00	31.268.400,00	(2.775.600,00)	91,85		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	22.044.000,00	20.745.400,00	(1.298.600,00)	94,11		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	22.044.000,00	20.745.400,00	(1.298.600,00)	94,11		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.044.000,00	20.745.400,00	(1.298.600,00)	94,11		
01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	2.000.000,00	1.750.000,00	(250.000,00)	87,50		
01.2.09.05.5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	1.750.000,00	(250.000,00)	87,50		
01.2.09.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.750.000,00	(250.000,00)	87,50		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.000.000,00	6.773.000,00	(1.227.000,00)	84,66		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	8.000.000,00	6.773.000,00	(1.227.000,00)	84,66		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	6.773.000,00	(1.227.000,00)	84,66		
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00		
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	77.566.000,00	76.561.000,00	(1.005.000,00)	98,70		
02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	77.566.000,00	76.561.000,00	(1.005.000,00)	98,70		
02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	77.566.000,00	76.561.000,00	(1.005.000,00)	98,70		
02.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	77.566.000,00	76.561.000,00	(1.005.000,00)	98,70		
02.2.04.02.5.1.01	Belanja Pegawai	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	100,00		
02.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.546.000,00	74.541.000,00	(1.005.000,00)	98,67		
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	8.000.000,00	7.955.000,00	(45.000,00)	99,44		
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	8.000.000,00	7.955.000,00	(45.000,00)	99,44		
05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	8.000.000,00	7.955.000,00	(45.000,00)	99,44		
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	8.000.000,00	7.955.000,00	(45.000,00)	99,44		
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	7.955.000,00	(45.000,00)	99,44		
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	167.567.000,00	159.831.400,00	(7.735.600,00)	95,38		
06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	167.567.000,00	159.831.400,00	(7.735.600,00)	95,38		
06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	15.517.000,00	10.995.000,00	(4.522.000,00)	70,86		
06.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	15.517.000,00	10.995.000,00	(4.522.000,00)	70,86		
06.2.01.03.5.1.01	Belanja Pegawai	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.497.000,00	8.975.000,00	(4.522.000,00)	66,50		
06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	4.757.000,00	4.100.000,00	(657.000,00)	86,19		
06.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	4.757.000,00	4.100.000,00	(657.000,00)	86,19		
06.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.757.000,00	4.100.000,00	(657.000,00)	86,19		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	3.000.000,00	2.492.000,00	(508.000,00)	83,07		
06.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	2.492.000,00	(508.000,00)	83,07		
06.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.492.000,00	(508.000,00)	83,07		
06.2.01.09	Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	7.340.000,00	6.408.000,00	(932.000,00)	87,30		
06.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	7.340.000,00	6.408.000,00	(932.000,00)	87,30		
06.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.340.000,00	6.408.000,00	(932.000,00)	87,30		
06.2.01.11	Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.13	Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	24.100.000,00	24.093.000,00	(7.000,00)	99,97		
06.2.01.13.5.1	BELANJA OPERASI	24.100.000,00	24.093.000,00	(7.000,00)	99,97		
06.2.01.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.100.000,00	24.093.000,00	(7.000,00)	99,97		
06.2.01.16	Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	101.650.000,00	100.654.400,00	(995.600,00)	99,02		
06.2.01.16.5.1	BELANJA OPERASI	101.650.000,00	100.654.400,00	(995.600,00)	99,02		
06.2.01.16.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.650.000,00	100.654.400,00	(995.600,00)	99,02		
06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	5.003.000,00	4.889.000,00	(114.000,00)	97,72		
06.2.01.17.5.1	BELANJA OPERASI	5.003.000,00	4.889.000,00	(114.000,00)	97,72		
06.2.01.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.003.000,00	4.889.000,00	(114.000,00)	97,72		
	SURPLUS / DEFISIT	(2.186.874.000,00)	(2.094.513.046,00)	92.360.954,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(2.186.874.000,00)	(2.094.513.046,00)	92.360.954,00	0		





PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN

SKPD : 7-01.0-00.0-00.06 KECAMATAN BULUSPESANTREN

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	2.403.940.735,00	2.270.476.203,00	(133.464.532,00)	94,45		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.205.432.735,00	2.076.429.903,00	(129.002.832,00)	94,15		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.050.000,00	10.883.600,00	(166.400,00)	98,49		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.500.000,00	7.499.200,00	(800,00)	99,99		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	7.500.000,00	7.499.200,00	(800,00)	99,99		
01.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	5.580.000,00	5.580.000,00	0,00	100,00		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.920.000,00	1.919.200,00	(800,00)	99,96		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.550.000,00	3.384.400,00	(165.600,00)	95,34		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	3.550.000,00	3.384.400,00	(165.600,00)	95,34		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.550.000,00	3.384.400,00	(165.600,00)	95,34		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.079.074.735,00	1.951.754.792,00	(127.319.943,00)	93,88		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.046.520.735,00	1.919.345.788,00	(127.174.947,00)	93,79		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.046.520.735,00	1.919.345.788,00	(127.174.947,00)	93,79		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.046.520.735,00	1.919.345.788,00	(127.174.947,00)	93,79		
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	32.554.000,00	32.409.004,00	(144.996,00)	99,55		
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	32.554.000,00	32.409.004,00	(144.996,00)	99,55		
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	3.820.000,00	3.820.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.734.000,00	28.589.004,00	(144.996,00)	99,50		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	33.508.000,00	33.107.000,00	(401.000,00)	98,80		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.815.000,00	1.803.000,00	(12.000,00)	99,34		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.815.000,00	1.803.000,00	(12.000,00)	99,34		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.815.000,00	1.803.000,00	(12.000,00)	99,34		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.340.000,00	9.985.500,00	(354.500,00)	96,57		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	10.340.000,00	9.985.500,00	(354.500,00)	96,57		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.340.000,00	9.985.500,00	(354.500,00)	96,57		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	11.203.000,00	11.175.800,00	(27.200,00)	99,76		
01.2.06.07.5.1	BELANJA OPERASI	11.203.000,00	11.175.800,00	(27.200,00)	99,76		
01.2.06.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.203.000,00	11.175.800,00	(27.200,00)	99,76		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.000.000,00	992.700,00	(7.300,00)	99,27		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	992.700,00	(7.300,00)	99,27		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	992.700,00	(7.300,00)	99,27		
01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.10.5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.800.000,00	22.080.713,00	(719.287,00)	96,85		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.000.000,00	18.282.713,00	(717.287,00)	96,22		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	19.000.000,00	18.282.713,00	(717.287,00)	96,22		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.000.000,00	18.282.713,00	(717.287,00)	96,22		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.300.000,00	3.298.000,00	(2.000,00)	99,94		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	3.300.000,00	3.298.000,00	(2.000,00)	99,94		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	3.298.000,00	(2.000,00)	99,94		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59.000.000,00	58.603.798,00	(396.202,00)	99,33		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.000.000,00	34.677.298,00	(322.702,00)	99,08		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	34.677.298,00	(322.702,00)	99,08		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	34.677.298,00	(322.702,00)	99,08		
01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.05.5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	4.935.000,00	(65.000,00)	98,70		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.935.000,00	(65.000,00)	98,70		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.935.000,00	(65.000,00)	98,70		
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000,00	14.991.500,00	(8.500,00)	99,94		
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	14.991.500,00	(8.500,00)	99,94		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.991.500,00	(8.500,00)	99,94		
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	54.608.000,00	54.274.200,00	(333.800,00)	99,39		
02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	54.608.000,00	54.274.200,00	(333.800,00)	99,39		
02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	54.608.000,00	54.274.200,00	(333.800,00)	99,39		
02.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	54.608.000,00	54.274.200,00	(333.800,00)	99,39		
02.2.04.02.5.1.01	Belanja Pegawai	3.030.000,00	3.030.000,00	0,00	100,00		
02.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.578.000,00	51.244.200,00	(333.800,00)	99,35		
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00		
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	505.000,00	505.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.495.000,00	11.495.000,00	0,00	100,00		
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	131.900.000,00	127.772.100,00	(4.127.900,00)	96,87		
06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	131.900.000,00	127.772.100,00	(4.127.900,00)	96,87		
06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4.000.000,00	3.219.400,00	(780.600,00)	80,49		
06.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	3.219.400,00	(780.600,00)	80,49		
06.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	3.219.400,00	(780.600,00)	80,49		
06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	2.500.000,00	2.451.500,00	(48.500,00)	98,06		
06.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.451.500,00	(48.500,00)	98,06		
06.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.451.500,00	(48.500,00)	98,06		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2.000.000,00	1.958.700,00	(41.300,00)	97,94		
06.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	1.958.700,00	(41.300,00)	97,94		
06.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.958.700,00	(41.300,00)	97,94		
06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5.000.000,00	4.778.600,00	(221.400,00)	95,57		
06.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.778.600,00	(221.400,00)	95,57		
06.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.778.600,00	(221.400,00)	95,57		
06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9.000.000,00	8.949.100,00	(50.900,00)	99,43		
06.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	9.000.000,00	8.949.100,00	(50.900,00)	99,43		
06.2.01.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	8.949.100,00	(50.900,00)	99,43		
06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	15.500.000,00	15.491.000,00	(9.000,00)	99,94		
06.2.01.13.5.1	BELANJA OPERASI	15.500.000,00	15.491.000,00	(9.000,00)	99,94		
06.2.01.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.500.000,00	15.491.000,00	(9.000,00)	99,94		
06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	90.300.000,00	87.405.500,00	(2.894.500,00)	96,79		
06.2.01.16.5.1	BELANJA OPERASI	90.300.000,00	87.405.500,00	(2.894.500,00)	96,79		
06.2.01.16.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.300.000,00	87.405.500,00	(2.894.500,00)	96,79		
06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	3.600.000,00	3.518.300,00	(81.700,00)	97,73		
06.2.01.17.5.1	BELANJA OPERASI	3.600.000,00	3.518.300,00	(81.700,00)	97,73		
06.2.01.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.518.300,00	(81.700,00)	97,73		
	SURPLUS / DEFISIT	(2.403.940.735,00)	(2.270.476.203,00)	133.464.532,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(2.403.940.735,00)	(2.270.476.203,00)	133.464.532,00	0		





PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN

SKPD : 7-01.0-00.0-00.07 KECAMATAN AMBAL

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	2.384.940.000,00	2.254.785.274,00	(130.154.726,00)	94,54		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.022.133.000,00	1.904.515.024,00	(117.617.976,00)	94,18		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.706.000,00	11.727.300,00	(4.978.700,00)	70,20		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.388.000,00	6.836.800,00	(2.551.200,00)	72,82		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	9.388.000,00	6.836.800,00	(2.551.200,00)	72,82		
01.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	100,00		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.378.000,00	5.826.800,00	(2.551.200,00)	69,55		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.318.000,00	4.890.500,00	(2.427.500,00)	66,83		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	7.318.000,00	4.890.500,00	(2.427.500,00)	66,83		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.318.000,00	4.890.500,00	(2.427.500,00)	66,83		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.854.567.000,00	1.760.732.280,00	(93.834.720,00)	94,94		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.835.300.000,00	1.742.147.780,00	(93.152.220,00)	94,92		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.835.300.000,00	1.742.147.780,00	(93.152.220,00)	94,92		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.835.300.000,00	1.742.147.780,00	(93.152.220,00)	94,92		
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	19.267.000,00	18.584.500,00	(682.500,00)	96,46		
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	19.267.000,00	18.584.500,00	(682.500,00)	96,46		
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	11.640.000,00	11.640.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.627.000,00	6.944.500,00	(682.500,00)	91,05		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	48.015.000,00	44.213.500,00	(3.801.500,00)	92,08		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.582.000,00	4.561.200,00	(20.800,00)	99,55		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.582.000,00	4.561.200,00	(20.800,00)	99,55		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.582.000,00	4.561.200,00	(20.800,00)	99,55		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.399.000,00	13.758.000,00	(3.641.000,00)	79,07		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	17.399.000,00	13.758.000,00	(3.641.000,00)	79,07		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.399.000,00	13.758.000,00	(3.641.000,00)	79,07		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.510.000,00	7.510.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	7.510.000,00	7.510.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.510.000,00	7.510.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.500.000,00	2.420.000,00	(80.000,00)	96,80		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.420.000,00	(80.000,00)	96,80		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.420.000,00	(80.000,00)	96,80		
01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	12.593.000,00	12.575.100,00	(17.900,00)	99,86		
01.2.06.07.5.1	BELANJA OPERASI	12.593.000,00	12.575.100,00	(17.900,00)	99,86		
01.2.06.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.593.000,00	12.575.100,00	(17.900,00)	99,86		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.200.000,00	1.160.000,00	(40.000,00)	96,67		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	1.200.000,00	1.160.000,00	(40.000,00)	96,67		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.160.000,00	(40.000,00)	96,67		
01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.231.000,00	2.229.200,00	(1.800,00)	99,92		
01.2.06.10.5.1	BELANJA OPERASI	2.231.000,00	2.229.200,00	(1.800,00)	99,92		
01.2.06.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.231.000,00	2.229.200,00	(1.800,00)	99,92		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.270.000,00	9.270.000,00	0,00	100,00		
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.270.000,00	9.270.000,00	0,00	100,00		
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	9.270.000,00	9.270.000,00	0,00	100,00		
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.270.000,00	9.270.000,00	0,00	100,00		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36.825.000,00	26.657.144,00	(10.167.856,00)	72,39		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	1.617.000,00	(383.000,00)	80,85		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	1.617.000,00	(383.000,00)	80,85		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.617.000,00	(383.000,00)	80,85		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.440.000,00	7.935.944,00	(9.504.056,00)	45,50		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	17.440.000,00	7.935.944,00	(9.504.056,00)	45,50		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.440.000,00	7.935.944,00	(9.504.056,00)	45,50		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	17.385.000,00	17.104.200,00	(280.800,00)	98,38		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	17.385.000,00	17.104.200,00	(280.800,00)	98,38		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.385.000,00	17.104.200,00	(280.800,00)	98,38		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56.750.000,00	51.914.800,00	(4.835.200,00)	91,48		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	32.750.000,00	28.827.800,00	(3.922.200,00)	88,02		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	32.750.000,00	28.827.800,00	(3.922.200,00)	88,02		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.750.000,00	28.827.800,00	(3.922.200,00)	88,02		
01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.05.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.000.000,00	8.087.000,00	(913.000,00)	89,86		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	9.000.000,00	8.087.000,00	(913.000,00)	89,86		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	8.087.000,00	(913.000,00)	89,86		
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	49.335.000,00	48.920.500,00	(414.500,00)	99,16		
02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	49.335.000,00	48.920.500,00	(414.500,00)	99,16		
02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	49.335.000,00	48.920.500,00	(414.500,00)	99,16		
02.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	49.335.000,00	48.920.500,00	(414.500,00)	99,16		
02.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.335.000,00	48.920.500,00	(414.500,00)	99,16		
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	16.857.000,00	16.856.300,00	(700,00)	100,00		
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	16.857.000,00	16.856.300,00	(700,00)	100,00		
05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	16.857.000,00	16.856.300,00	(700,00)	100,00		
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	16.857.000,00	16.856.300,00	(700,00)	100,00		
05.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	505.000,00	505.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.352.000,00	16.351.300,00	(700,00)	100,00		
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	296.615.000,00	284.493.450,00	(12.121.550,00)	95,91		
06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	296.615.000,00	284.493.450,00	(12.121.550,00)	95,91		
06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	50.872.000,00	50.333.900,00	(538.100,00)	98,94		
06.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	50.872.000,00	50.333.900,00	(538.100,00)	98,94		
06.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.872.000,00	50.333.900,00	(538.100,00)	98,94		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	5.633.000,00	5.632.600,00	(400,00)	99,99		
06.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	5.633.000,00	5.632.600,00	(400,00)	99,99		
06.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.633.000,00	5.632.600,00	(400,00)	99,99		
06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	21.551.000,00	21.548.000,00	(3.000,00)	99,99		
06.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	21.551.000,00	21.548.000,00	(3.000,00)	99,99		
06.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.551.000,00	21.548.000,00	(3.000,00)	99,99		
06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9.819.000,00	9.817.200,00	(1.800,00)	99,98		
06.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	9.819.000,00	9.817.200,00	(1.800,00)	99,98		
06.2.01.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.819.000,00	9.817.200,00	(1.800,00)	99,98		
06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	31.052.000,00	30.950.700,00	(101.300,00)	99,67		
06.2.01.13.5.1	BELANJA OPERASI	31.052.000,00	30.950.700,00	(101.300,00)	99,67		
06.2.01.13.5.1.01	Belanja Pegawai	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.042.000,00	29.940.700,00	(101.300,00)	99,66		
06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	164.788.000,00	156.733.250,00	(8.054.750,00)	95,11		
06.2.01.16.5.1	BELANJA OPERASI	164.788.000,00	156.733.250,00	(8.054.750,00)	95,11		
06.2.01.16.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	164.788.000,00	156.733.250,00	(8.054.750,00)	95,11		
06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12.900.000,00	9.477.800,00	(3.422.200,00)	73,47		
06.2.01.17.5.1	BELANJA OPERASI	12.900.000,00	9.477.800,00	(3.422.200,00)	73,47		
06.2.01.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.900.000,00	9.477.800,00	(3.422.200,00)	73,47		
	SURPLUS / DEFISIT	(2.384.940.000,00)	(2.254.785.274,00)	130.154.726,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(2.384.940.000,00)	(2.254.785.274,00)	130.154.726,00	0		





PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN

SKPD : 7-01.0-00.0-00.08 KECAMATAN MIRIT

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	2.322.602.000,00	2.280.723.506,00	(41.878.494,00)	98,20		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.068.421.000,00	2.027.253.156,00	(41.167.844,00)	98,01		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.865.000,00	12.862.600,00	(2.400,00)	99,98		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.935.000,00	8.932.600,00	(2.400,00)	99,97		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	8.935.000,00	8.932.600,00	(2.400,00)	99,97		
01.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	100,00		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.915.000,00	6.912.600,00	(2.400,00)	99,97		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.930.000,00	3.930.000,00	0,00	100,00		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	3.930.000,00	3.930.000,00	0,00	100,00		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.930.000,00	3.930.000,00	0,00	100,00		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.871.915.000,00	1.832.976.941,00	(38.938.059,00)	97,92		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.852.765.000,00	1.813.844.229,00	(38.920.771,00)	97,90		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.852.765.000,00	1.813.844.229,00	(38.920.771,00)	97,90		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.852.765.000,00	1.813.844.229,00	(38.920.771,00)	97,90		
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	19.150.000,00	19.132.712,00	(17.288,00)	99,91		
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	19.150.000,00	19.132.712,00	(17.288,00)	99,91		
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	15.280.000,00	15.280.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.870.000,00	3.852.712,00	(17.288,00)	99,55		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	58.563.000,00	58.255.750,00	(307.250,00)	99,48		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000,00	2.999.500,00	(500,00)	99,98		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	2.999.500,00	(500,00)	99,98		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.999.500,00	(500,00)	99,98		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.514.000,00	28.514.000,00	0,00	100,00		



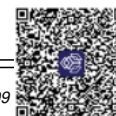
KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	28.514.000,00	28.514.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.514.000,00	28.514.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.009.000,00	8.008.800,00	(200,00)	100,00		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	8.009.000,00	8.008.800,00	(200,00)	100,00		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.009.000,00	8.008.800,00	(200,00)	100,00		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	11.000.000,00	10.978.450,00	(21.550,00)	99,80		
01.2.06.07.5.1	BELANJA OPERASI	11.000.000,00	10.978.450,00	(21.550,00)	99,80		
01.2.06.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	10.978.450,00	(21.550,00)	99,80		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.540.000,00	4.255.000,00	(285.000,00)	93,72		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	4.540.000,00	4.255.000,00	(285.000,00)	93,72		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.540.000,00	4.255.000,00	(285.000,00)	93,72		
01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.10.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	24.176.000,00	24.070.000,00	(106.000,00)	99,56		
01.2.07.05	Pengadaan Mebel	840.000,00	840.000,00	0,00	100,00		
01.2.07.05.5.2	BELANJA MODAL	840.000,00	840.000,00	0,00	100,00		
01.2.07.05.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	840.000,00	840.000,00	0,00	100,00		
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.336.000,00	23.230.000,00	(106.000,00)	99,55		
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	23.336.000,00	23.230.000,00	(106.000,00)	99,55		
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.336.000,00	23.230.000,00	(106.000,00)	99,55		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39.365.000,00	38.534.020,00	(830.980,00)	97,89		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	359.000,00	352.000,00	(7.000,00)	98,05		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	359.000,00	352.000,00	(7.000,00)	98,05		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	359.000,00	352.000,00	(7.000,00)	98,05		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.806.000,00	12.983.020,00	(822.980,00)	94,04		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	13.806.000,00	12.983.020,00	(822.980,00)	94,04		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.806.000,00	12.983.020,00	(822.980,00)	94,04		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	25.200.000,00	25.199.000,00	(1.000,00)	100,00		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	25.200.000,00	25.199.000,00	(1.000,00)	100,00		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.200.000,00	25.199.000,00	(1.000,00)	100,00		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.537.000,00	60.553.845,00	(983.155,00)	98,40		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.612.000,00	39.629.845,00	(982.155,00)	97,58		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	40.612.000,00	39.629.845,00	(982.155,00)	97,58		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.612.000,00	39.629.845,00	(982.155,00)	97,58		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.500.000,00	6.499.000,00	(1.000,00)	99,98		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	6.500.000,00	6.499.000,00	(1.000,00)	99,98		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	6.499.000,00	(1.000,00)	99,98		
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.425.000,00	14.425.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	14.425.000,00	14.425.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.425.000,00	14.425.000,00	0,00	100,00		
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	40.932.000,00	40.909.000,00	(23.000,00)	99,94		
02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	40.932.000,00	40.909.000,00	(23.000,00)	99,94		
02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	40.932.000,00	40.909.000,00	(23.000,00)	99,94		
02.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	40.932.000,00	40.909.000,00	(23.000,00)	99,94		
02.2.04.02.5.1.01	Belanja Pegawai	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	100,00		
02.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.912.000,00	38.889.000,00	(23.000,00)	99,94		
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	19.500.000,00	19.449.800,00	(50.200,00)	99,74		
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	19.500.000,00	19.449.800,00	(50.200,00)	99,74		
05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	19.500.000,00	19.449.800,00	(50.200,00)	99,74		
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	19.500.000,00	19.449.800,00	(50.200,00)	99,74		
05.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.515.000,00	1.515.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.985.000,00	17.934.800,00	(50.200,00)	99,72		
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	193.749.000,00	193.111.550,00	(637.450,00)	99,67		
06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	193.749.000,00	193.111.550,00	(637.450,00)	99,67		
06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	15.000.000,00	14.999.200,00	(800,00)	99,99		
06.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	14.999.200,00	(800,00)	99,99		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
06.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.999.200,00	(800,00)	99,99		
06.2.01.06	Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	3.000.000,00	2.997.400,00	(2.600,00)	99,91		
06.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	2.997.400,00	(2.600,00)	99,91		
06.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.997.400,00	(2.600,00)	99,91		
06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	3.520.000,00	3.519.900,00	(100,00)	100,00		
06.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	3.520.000,00	3.519.900,00	(100,00)	100,00		
06.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.520.000,00	3.519.900,00	(100,00)	100,00		
06.2.01.09	Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	9.390.000,00	9.389.900,00	(100,00)	100,00		
06.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	9.390.000,00	9.389.900,00	(100,00)	100,00		
06.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.390.000,00	9.389.900,00	(100,00)	100,00		
06.2.01.11	Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12.044.000,00	12.043.600,00	(400,00)	100,00		
06.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	12.044.000,00	12.043.600,00	(400,00)	100,00		
06.2.01.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.044.000,00	12.043.600,00	(400,00)	100,00		
06.2.01.13	Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	19.650.000,00	19.649.700,00	(300,00)	100,00		
06.2.01.13.5.1	BELANJA OPERASI	19.650.000,00	19.649.700,00	(300,00)	100,00		
06.2.01.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.650.000,00	19.649.700,00	(300,00)	100,00		
06.2.01.16	Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	119.645.000,00	119.011.950,00	(633.050,00)	99,47		
06.2.01.16.5.1	BELANJA OPERASI	119.645.000,00	119.011.950,00	(633.050,00)	99,47		
06.2.01.16.5.1.01	Belanja Pegawai	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.16.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.625.000,00	116.991.950,00	(633.050,00)	99,46		
06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	11.500.000,00	11.499.900,00	(100,00)	100,00		
06.2.01.17.5.1	BELANJA OPERASI	11.500.000,00	11.499.900,00	(100,00)	100,00		
06.2.01.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000,00	11.499.900,00	(100,00)	100,00		
	SURPLUS / DEFISIT	(2.322.602.000,00)	(2.280.723.506,00)	41.878.494,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(2.322.602.000,00)	(2.280.723.506,00)	41.878.494,00	0		





PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN

SKPD : 7-01.0-00.0-00.09 KECAMATAN BONOROWO

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	2.319.606.000,00	2.209.360.370,00	(110.245.630,00)	95,25		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.068.537.000,00	1.964.556.467,00	(103.980.533,00)	94,97		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.648.000,00	4.566.535,00	(81.465,00)	98,25		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.600.000,00	3.543.380,00	(56.620,00)	98,43		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.600.000,00	3.543.380,00	(56.620,00)	98,43		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.543.380,00	(56.620,00)	98,43		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.048.000,00	1.023.155,00	(24.845,00)	97,63		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	1.048.000,00	1.023.155,00	(24.845,00)	97,63		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.048.000,00	1.023.155,00	(24.845,00)	97,63		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.904.369.000,00	1.801.978.273,00	(102.390.727,00)	94,62		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.889.878.000,00	1.787.557.069,00	(102.320.931,00)	94,59		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.889.878.000,00	1.787.557.069,00	(102.320.931,00)	94,59		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.889.878.000,00	1.787.557.069,00	(102.320.931,00)	94,59		
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14.491.000,00	14.421.204,00	(69.796,00)	99,52		
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	14.491.000,00	14.421.204,00	(69.796,00)	99,52		
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	9.670.000,00	9.670.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.821.000,00	4.751.204,00	(69.796,00)	98,55		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	29.265.000,00	28.858.580,00	(406.420,00)	98,61		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.817.000,00	2.805.000,00	(12.000,00)	99,57		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.817.000,00	2.805.000,00	(12.000,00)	99,57		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.817.000,00	2.805.000,00	(12.000,00)	99,57		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.616.000,00	10.470.680,00	(145.320,00)	98,63		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	10.616.000,00	10.470.680,00	(145.320,00)	98,63		



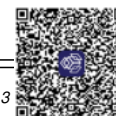
KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.616.000,00	10.470.680,00	(145.320,00)	98,63		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.324.000,00	2.303.200,00	(20.800,00)	99,10		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	2.324.000,00	2.303.200,00	(20.800,00)	99,10		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.324.000,00	2.303.200,00	(20.800,00)	99,10		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.500.000,00	1.320.000,00	(180.000,00)	88,00		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.320.000,00	(180.000,00)	88,00		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.320.000,00	(180.000,00)	88,00		
01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	7.200.000,00	7.159.600,00	(40.400,00)	99,44		
01.2.06.07.5.1	BELANJA OPERASI	7.200.000,00	7.159.600,00	(40.400,00)	99,44		
01.2.06.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	7.159.600,00	(40.400,00)	99,44		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.223.000,00	3.220.000,00	(3.000,00)	99,91		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	3.223.000,00	3.220.000,00	(3.000,00)	99,91		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.223.000,00	3.220.000,00	(3.000,00)	99,91		
01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.585.000,00	1.580.100,00	(4.900,00)	99,69		
01.2.06.10.5.1	BELANJA OPERASI	1.585.000,00	1.580.100,00	(4.900,00)	99,69		
01.2.06.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.585.000,00	1.580.100,00	(4.900,00)	99,69		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	21.253.000,00	20.754.000,00	(499.000,00)	97,65		
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.100.000,00	9.753.000,00	(347.000,00)	96,56		
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	10.100.000,00	9.753.000,00	(347.000,00)	96,56		
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.100.000,00	9.753.000,00	(347.000,00)	96,56		
01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.153.000,00	11.001.000,00	(152.000,00)	98,64		
01.2.07.10.5.2	BELANJA MODAL	11.153.000,00	11.001.000,00	(152.000,00)	98,64		
01.2.07.10.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.153.000,00	11.001.000,00	(152.000,00)	98,64		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28.656.000,00	28.283.000,00	(373.000,00)	98,70		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	800.000,00	720.000,00	(80.000,00)	90,00		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	800.000,00	720.000,00	(80.000,00)	90,00		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	720.000,00	(80.000,00)	90,00		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.000.000,00	9.709.500,00	(290.500,00)	97,10		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.709.500,00	(290.500,00)	97,10		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.709.500,00	(290.500,00)	97,10		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	17.856.000,00	17.853.500,00	(2.500,00)	99,99		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	17.856.000,00	17.853.500,00	(2.500,00)	99,99		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.856.000,00	17.853.500,00	(2.500,00)	99,99		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80.346.000,00	80.116.079,00	(229.921,00)	99,71		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	31.000.000,00	30.833.979,00	(166.021,00)	99,46		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	31.000.000,00	30.833.979,00	(166.021,00)	99,46		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.000.000,00	30.833.979,00	(166.021,00)	99,46		
01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	1.500.000,00	1.475.000,00	(25.000,00)	98,33		
01.2.09.05.5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.475.000,00	(25.000,00)	98,33		
01.2.09.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.475.000,00	(25.000,00)	98,33		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.665.000,00	5.628.100,00	(36.900,00)	99,35		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	5.665.000,00	5.628.100,00	(36.900,00)	99,35		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.665.000,00	5.628.100,00	(36.900,00)	99,35		
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	42.181.000,00	42.179.000,00	(2.000,00)	100,00		
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	42.181.000,00	42.179.000,00	(2.000,00)	100,00		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.181.000,00	42.179.000,00	(2.000,00)	100,00		
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	37.956.000,00	36.769.485,00	(1.186.515,00)	96,87		
02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	37.956.000,00	36.769.485,00	(1.186.515,00)	96,87		
02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	37.956.000,00	36.769.485,00	(1.186.515,00)	96,87		
02.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	37.956.000,00	36.769.485,00	(1.186.515,00)	96,87		
02.2.04.02.5.1.01	Belanja Pegawai	2.020.000,00	2.019.600,00	(400,00)	99,98		
02.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.936.000,00	34.749.885,00	(1.186.115,00)	96,70		
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	17.000.000,00	16.342.150,00	(657.850,00)	96,13		
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	17.000.000,00	16.342.150,00	(657.850,00)	96,13		
05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	17.000.000,00	16.342.150,00	(657.850,00)	96,13		
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	17.000.000,00	16.342.150,00	(657.850,00)	96,13		
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	16.342.150,00	(657.850,00)	96,13		
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	196.113.000,00	191.692.268,00	(4.420.732,00)	97,75		
06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	196.113.000,00	191.692.268,00	(4.420.732,00)	97,75		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
06.2.01.03	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	24.000.000,00	23.890.800,00	(109.200,00)	99,55		
06.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	24.000.000,00	23.890.800,00	(109.200,00)	99,55		
06.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	23.890.800,00	(109.200,00)	99,55		
06.2.01.06	Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	4.800.000,00	4.514.200,00	(285.800,00)	94,05		
06.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	4.800.000,00	4.514.200,00	(285.800,00)	94,05		
06.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.514.200,00	(285.800,00)	94,05		
06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	4.800.000,00	4.595.050,00	(204.950,00)	95,73		
06.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	4.800.000,00	4.595.050,00	(204.950,00)	95,73		
06.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.595.050,00	(204.950,00)	95,73		
06.2.01.09	Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	14.804.000,00	13.958.708,00	(845.292,00)	94,29		
06.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	14.804.000,00	13.958.708,00	(845.292,00)	94,29		
06.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.804.000,00	13.958.708,00	(845.292,00)	94,29		
06.2.01.11	Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12.000.000,00	11.655.350,00	(344.650,00)	97,13		
06.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	11.655.350,00	(344.650,00)	97,13		
06.2.01.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	11.655.350,00	(344.650,00)	97,13		
06.2.01.13	Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	24.000.000,00	23.554.690,00	(445.310,00)	98,14		
06.2.01.13.5.1	BELANJA OPERASI	24.000.000,00	23.554.690,00	(445.310,00)	98,14		
06.2.01.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	23.554.690,00	(445.310,00)	98,14		
06.2.01.16	Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	95.709.000,00	94.839.970,00	(869.030,00)	99,09		
06.2.01.16.5.1	BELANJA OPERASI	95.709.000,00	94.839.970,00	(869.030,00)	99,09		
06.2.01.16.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.709.000,00	94.839.970,00	(869.030,00)	99,09		
06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	16.000.000,00	14.683.500,00	(1.316.500,00)	91,77		
06.2.01.17.5.1	BELANJA OPERASI	16.000.000,00	14.683.500,00	(1.316.500,00)	91,77		
06.2.01.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	14.683.500,00	(1.316.500,00)	91,77		
	SURPLUS / DEFISIT	(2.319.606.000,00)	(2.209.360.370,00)	110.245.630,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(2.319.606.000,00)	(2.209.360.370,00)	110.245.630,00	0		





PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN

SKPD : 7-01.0-00.0-00.10 KECAMATAN PREMBUN

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	2.000.000,00	2.915.000,00	915.000,00	145,75		
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.000.000,00	2.915.000,00	915.000,00	145,75		
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	2.000.000,00	2.915.000,00	915.000,00	145,75		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	2.552.043.000,00	2.500.750.846,00	(51.292.154,00)	97,99		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.333.426.000,00	2.283.113.003,00	(50.312.997,00)	97,84		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.600.000,00	5.553.600,00	(46.400,00)	99,17		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.400.000,00	2.389.000,00	(11.000,00)	99,54		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.400.000,00	2.389.000,00	(11.000,00)	99,54		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.389.000,00	(11.000,00)	99,54		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.200.000,00	3.164.600,00	(35.400,00)	98,89		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	3.200.000,00	3.164.600,00	(35.400,00)	98,89		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	3.164.600,00	(35.400,00)	98,89		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.124.384.000,00	2.083.256.978,00	(41.127.022,00)	98,06		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.112.017.000,00	2.071.077.376,00	(40.939.624,00)	98,06		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.112.017.000,00	2.071.077.376,00	(40.939.624,00)	98,06		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.112.017.000,00	2.071.077.376,00	(40.939.624,00)	98,06		
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12.367.000,00	12.179.602,00	(187.398,00)	98,48		
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	12.367.000,00	12.179.602,00	(187.398,00)	98,48		
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	6.320.000,00	6.320.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.047.000,00	5.859.602,00	(187.398,00)	96,90		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.400.000,00	2.309.000,00	(91.000,00)	96,21		
01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2.400.000,00	2.309.000,00	(91.000,00)	96,21		
01.2.05.11.5.1	BELANJA OPERASI	2.400.000,00	2.309.000,00	(91.000,00)	96,21		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.05.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.309.000,00	(91.000,00)	96,21		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	44.040.000,00	43.967.500,00	(72.500,00)	99,84		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.600.000,00	5.596.500,00	(3.500,00)	99,94		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	5.600.000,00	5.596.500,00	(3.500,00)	99,94		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	5.596.500,00	(3.500,00)	99,94		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.800.000,00	12.772.000,00	(28.000,00)	99,78		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	12.800.000,00	12.772.000,00	(28.000,00)	99,78		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.800.000,00	12.772.000,00	(28.000,00)	99,78		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.600.000,00	9.599.000,00	(1.000,00)	99,99		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	9.600.000,00	9.599.000,00	(1.000,00)	99,99		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	9.599.000,00	(1.000,00)	99,99		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	12.000.000,00	11.960.000,00	(40.000,00)	99,67		
01.2.06.07.5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	11.960.000,00	(40.000,00)	99,67		
01.2.06.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	11.960.000,00	(40.000,00)	99,67		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.960.000,00	2.960.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	2.960.000,00	2.960.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.960.000,00	2.960.000,00	0,00	100,00		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	38.846.000,00	35.495.000,00	(3.351.000,00)	91,37		
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.646.000,00	32.295.000,00	(3.351.000,00)	90,60		
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	35.646.000,00	32.295.000,00	(3.351.000,00)	90,60		
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.646.000,00	32.295.000,00	(3.351.000,00)	90,60		
01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	100,00		
01.2.07.10.5.1	BELANJA OPERASI	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	100,00		
01.2.07.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	100,00		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.085.000,00	49.940.345,00	(5.144.655,00)	90,66		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	880.000,00	880.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	880.000,00	880.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	880.000,00	880.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.005.000,00	28.860.345,00	(5.144.655,00)	84,87		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	34.005.000,00	28.860.345,00	(5.144.655,00)	84,87		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.005.000,00	28.860.345,00	(5.144.655,00)	84,87		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20.200.000,00	20.200.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	20.200.000,00	20.200.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1.01	Belanja Pegawai	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.780.000,00	17.780.000,00	0,00	100,00		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63.071.000,00	62.590.580,00	(480.420,00)	99,24		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.602.000,00	25.208.580,00	(393.420,00)	98,46		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	25.602.000,00	25.208.580,00	(393.420,00)	98,46		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.602.000,00	25.208.580,00	(393.420,00)	98,46		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	31.469.000,00	31.382.000,00	(87.000,00)	99,72		
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	31.469.000,00	31.382.000,00	(87.000,00)	99,72		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.469.000,00	31.382.000,00	(87.000,00)	99,72		
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	58.985.000,00	58.866.393,00	(118.607,00)	99,80		
02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	58.985.000,00	58.866.393,00	(118.607,00)	99,80		
02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	58.985.000,00	58.866.393,00	(118.607,00)	99,80		
02.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	58.985.000,00	58.866.393,00	(118.607,00)	99,80		
02.2.04.02.5.1.01	Belanja Pegawai	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	100,00		
02.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.965.000,00	56.846.393,00	(118.607,00)	99,79		
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	16.807.000,00	16.754.000,00	(53.000,00)	99,68		
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	16.807.000,00	16.754.000,00	(53.000,00)	99,68		
05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	16.807.000,00	16.754.000,00	(53.000,00)	99,68		
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	16.807.000,00	16.754.000,00	(53.000,00)	99,68		
05.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.787.000,00	14.734.000,00	(53.000,00)	99,64		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	142.825.000,00	142.017.450,00	(807.550,00)	99,43		
06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	142.825.000,00	142.017.450,00	(807.550,00)	99,43		
06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10.400.000,00	10.368.800,00	(31.200,00)	99,70		
06.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	10.400.000,00	10.368.800,00	(31.200,00)	99,70		
06.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.400.000,00	10.368.800,00	(31.200,00)	99,70		
06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	12.800.000,00	12.774.000,00	(26.000,00)	99,80		
06.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	12.800.000,00	12.774.000,00	(26.000,00)	99,80		
06.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.800.000,00	12.774.000,00	(26.000,00)	99,80		
06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	12.800.000,00	12.761.000,00	(39.000,00)	99,70		
06.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	12.800.000,00	12.761.000,00	(39.000,00)	99,70		
06.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.800.000,00	12.761.000,00	(39.000,00)	99,70		
06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.600.000,00	5.597.000,00	(3.000,00)	99,95		
06.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	5.600.000,00	5.597.000,00	(3.000,00)	99,95		
06.2.01.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	5.597.000,00	(3.000,00)	99,95		
06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	14.400.000,00	14.370.000,00	(30.000,00)	99,79		
06.2.01.13.5.1	BELANJA OPERASI	14.400.000,00	14.370.000,00	(30.000,00)	99,79		
06.2.01.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	14.370.000,00	(30.000,00)	99,79		
06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	79.625.000,00	78.977.650,00	(647.350,00)	99,19		
06.2.01.16.5.1	BELANJA OPERASI	79.625.000,00	78.977.650,00	(647.350,00)	99,19		
06.2.01.16.5.1.01	Belanja Pegawai	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.16.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.205.000,00	76.557.650,00	(647.350,00)	99,16		
06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	7.200.000,00	7.169.000,00	(31.000,00)	99,57		
06.2.01.17.5.1	BELANJA OPERASI	7.200.000,00	7.169.000,00	(31.000,00)	99,57		
06.2.01.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	7.169.000,00	(31.000,00)	99,57		
	SURPLUS / DEFISIT	(2.550.043.000,00)	(2.497.835.846,00)	52.207.154,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(2.550.043.000,00)	(2.497.835.846,00)	52.207.154,00	0		





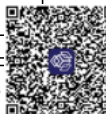
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN

SKPD : 7-01.0-00.0-00.11 KECAMATAN PADURESO

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	1.876.822.000,00	1.773.814.188,00	(103.007.812,00)	94,51		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.726.147.000,00	1.624.392.988,00	(101.754.012,00)	94,11		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.743.000,00	10.556.886,00	(186.114,00)	98,27		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.913.000,00	6.775.128,00	(137.872,00)	98,01		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	6.913.000,00	6.775.128,00	(137.872,00)	98,01		
01.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	100,00		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.893.000,00	4.755.128,00	(137.872,00)	97,18		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.830.000,00	3.781.758,00	(48.242,00)	98,74		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	3.830.000,00	3.781.758,00	(48.242,00)	98,74		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.830.000,00	3.781.758,00	(48.242,00)	98,74		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.595.508.000,00	1.501.496.051,00	(94.011.949,00)	94,11		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.579.398.000,00	1.485.860.381,00	(93.537.619,00)	94,08		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.579.398.000,00	1.485.860.381,00	(93.537.619,00)	94,08		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.579.398.000,00	1.485.860.381,00	(93.537.619,00)	94,08		
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	16.110.000,00	15.635.670,00	(474.330,00)	97,06		
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	16.110.000,00	15.635.670,00	(474.330,00)	97,06		
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	9.990.000,00	9.952.500,00	(37.500,00)	99,62		
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.120.000,00	5.683.170,00	(436.830,00)	92,86		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	34.594.000,00	34.274.160,00	(319.840,00)	99,08		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.999.000,00	3.952.000,00	(47.000,00)	98,82		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.999.000,00	3.952.000,00	(47.000,00)	98,82		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.999.000,00	3.952.000,00	(47.000,00)	98,82		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.400.000,00	10.369.220,00	(30.780,00)	99,70		



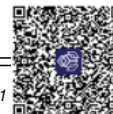
KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	10.400.000,00	10.369.220,00	(30.780,00)	99,70		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.400.000,00	10.369.220,00	(30.780,00)	99,70		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.624.000,00	5.603.600,00	(20.400,00)	99,64		
01.2.06.05.1	BELANJA OPERASI	5.624.000,00	5.603.600,00	(20.400,00)	99,64		
01.2.06.05.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.624.000,00	5.603.600,00	(20.400,00)	99,64		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	11.181.000,00	11.077.800,00	(103.200,00)	99,08		
01.2.06.07.5.1	BELANJA OPERASI	11.181.000,00	11.077.800,00	(103.200,00)	99,08		
01.2.06.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.181.000,00	11.077.800,00	(103.200,00)	99,08		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	800.000,00	740.000,00	(60.000,00)	92,50		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	800.000,00	740.000,00	(60.000,00)	92,50		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	740.000,00	(60.000,00)	92,50		
01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.590.000,00	1.531.540,00	(58.460,00)	96,32		
01.2.06.10.5.1	BELANJA OPERASI	1.590.000,00	1.531.540,00	(58.460,00)	96,32		
01.2.06.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.590.000,00	1.531.540,00	(58.460,00)	96,32		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.178.000,00	49.493.491,00	(5.684.509,00)	89,70		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600.000,00	594.000,00	(6.000,00)	99,00		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	600.000,00	594.000,00	(6.000,00)	99,00		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	594.000,00	(6.000,00)	99,00		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.000.000,00	21.440.450,00	(5.559.550,00)	79,41		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	27.000.000,00	21.440.450,00	(5.559.550,00)	79,41		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	21.440.450,00	(5.559.550,00)	79,41		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	27.578.000,00	27.459.041,00	(118.959,00)	99,57		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	27.578.000,00	27.459.041,00	(118.959,00)	99,57		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.578.000,00	27.459.041,00	(118.959,00)	99,57		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.124.000,00	28.572.400,00	(1.551.600,00)	94,85		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	28.124.000,00	26.637.000,00	(1.487.000,00)	94,71		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	28.124.000,00	26.637.000,00	(1.487.000,00)	94,71		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.124.000,00	26.637.000,00	(1.487.000,00)	94,71		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.000.000,00	1.935.400,00	(64.600,00)	96,77		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	1.935.400,00	(64.600,00)	96,77		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.935.400,00	(64.600,00)	96,77		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	68.598.000,00	68.181.400,00	(416.600,00)	99,39		
02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	68.598.000,00	68.181.400,00	(416.600,00)	99,39		
02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	68.598.000,00	68.181.400,00	(416.600,00)	99,39		
02.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	68.598.000,00	68.181.400,00	(416.600,00)	99,39		
02.2.04.02.5.1.01	Belanja Pegawai	3.560.000,00	3.300.000,00	(260.000,00)	92,70		
02.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.038.000,00	64.881.400,00	(156.600,00)	99,76		
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	8.732.000,00	8.609.900,00	(122.100,00)	98,60		
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	8.732.000,00	8.609.900,00	(122.100,00)	98,60		
05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	8.732.000,00	8.609.900,00	(122.100,00)	98,60		
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	8.732.000,00	8.609.900,00	(122.100,00)	98,60		
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.732.000,00	8.609.900,00	(122.100,00)	98,60		
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	73.345.000,00	72.629.900,00	(715.100,00)	99,03		
06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	73.345.000,00	72.629.900,00	(715.100,00)	99,03		
06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9.902.000,00	9.606.300,00	(295.700,00)	97,01		
06.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	9.902.000,00	9.606.300,00	(295.700,00)	97,01		
06.2.01.03.5.1.01	Belanja Pegawai	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.882.000,00	7.586.300,00	(295.700,00)	96,25		
06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1.989.000,00	1.987.400,00	(1.600,00)	99,92		
06.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	1.989.000,00	1.987.400,00	(1.600,00)	99,92		
06.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.989.000,00	1.987.400,00	(1.600,00)	99,92		
06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.089.000,00	4.088.300,00	(700,00)	99,98		
06.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	4.089.000,00	4.088.300,00	(700,00)	99,98		
06.2.01.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.089.000,00	4.088.300,00	(700,00)	99,98		
06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	14.011.000,00	13.698.900,00	(312.100,00)	97,77		
06.2.01.13.5.1	BELANJA OPERASI	14.011.000,00	13.698.900,00	(312.100,00)	97,77		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
06.2.01.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.011.000,00	13.698.900,00	(312.100,00)	97,77		
06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	42.200.000,00	42.142.000,00	(58.000,00)	99,86		
06.2.01.16.5.1	BELANJA OPERASI	42.200.000,00	42.142.000,00	(58.000,00)	99,86		
06.2.01.16.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.200.000,00	42.142.000,00	(58.000,00)	99,86		
06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1.154.000,00	1.107.000,00	(47.000,00)	95,93		
06.2.01.17.5.1	BELANJA OPERASI	1.154.000,00	1.107.000,00	(47.000,00)	95,93		
06.2.01.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.154.000,00	1.107.000,00	(47.000,00)	95,93		
	SURPLUS / DEFISIT	(1.876.822.000,00)	(1.773.814.188,00)	103.007.812,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(1.876.822.000,00)	(1.773.814.188,00)	103.007.812,00	0		





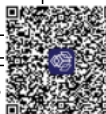
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN

SKPD : 7-01.0-00.0-00.12 KECAMATAN KUTOWINANGUN

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	2.000.000,00	800.000,00	(1.200.000,00)	40,00		
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.000.000,00	800.000,00	(1.200.000,00)	40,00		
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	2.000.000,00	800.000,00	(1.200.000,00)	40,00		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	2.134.140.000,00	2.067.638.973,00	(66.501.027,00)	96,88		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.859.102.000,00	1.794.211.773,00	(64.890.227,00)	96,51		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.300.000,00	8.746.750,00	(553.250,00)	94,05		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.700.000,00	5.579.750,00	(120.250,00)	97,89		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	5.700.000,00	5.579.750,00	(120.250,00)	97,89		
01.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	3.530.000,00	3.530.000,00	0,00	100,00		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.170.000,00	2.049.750,00	(120.250,00)	94,46		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.600.000,00	3.167.000,00	(433.000,00)	87,97		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	3.600.000,00	3.167.000,00	(433.000,00)	87,97		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.167.000,00	(433.000,00)	87,97		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.751.932.000,00	1.692.347.131,00	(59.584.869,00)	96,60		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.739.782.000,00	1.680.566.495,00	(59.215.505,00)	96,60		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.739.782.000,00	1.680.566.495,00	(59.215.505,00)	96,60		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.739.782.000,00	1.680.566.495,00	(59.215.505,00)	96,60		
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12.150.000,00	11.780.636,00	(369.364,00)	96,96		
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	12.150.000,00	11.780.636,00	(369.364,00)	96,96		
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	4.930.000,00	4.730.000,00	(200.000,00)	95,94		
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.220.000,00	7.050.636,00	(169.364,00)	97,65		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	27.450.000,00	27.318.300,00	(131.700,00)	99,52		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.600.000,00	1.597.300,00	(2.700,00)	99,83		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.600.000,00	1.597.300,00	(2.700,00)	99,83		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	1.597.300,00	(2.700,00)	99,83		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.100.000,00	10.092.500,00	(7.500,00)	99,93		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	10.100.000,00	10.092.500,00	(7.500,00)	99,93		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.100.000,00	10.092.500,00	(7.500,00)	99,93		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	8.000.000,00	7.989.000,00	(11.000,00)	99,86		
01.2.06.07.5.1	BELANJA OPERASI	8.000.000,00	7.989.000,00	(11.000,00)	99,86		
01.2.06.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	7.989.000,00	(11.000,00)	99,86		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	800.000,00	705.000,00	(95.000,00)	88,13		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	800.000,00	705.000,00	(95.000,00)	88,13		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	705.000,00	(95.000,00)	88,13		
01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.000.000,00	1.984.500,00	(15.500,00)	99,23		
01.2.06.10.5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	1.984.500,00	(15.500,00)	99,23		
01.2.06.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.984.500,00	(15.500,00)	99,23		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.600.000,00	29.172.894,00	(4.427.106,00)	86,82		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.000.000,00	10.576.294,00	(4.423.706,00)	70,51		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	10.576.294,00	(4.423.706,00)	70,51		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	10.576.294,00	(4.423.706,00)	70,51		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	18.100.000,00	18.096.600,00	(3.400,00)	99,98		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	18.100.000,00	18.096.600,00	(3.400,00)	99,98		
01.2.08.04.5.1.01	Belanja Pegawai	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.080.000,00	16.076.600,00	(3.400,00)	99,98		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36.820.000,00	36.626.698,00	(193.302,00)	99,48		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	21.298.000,00	21.104.698,00	(193.302,00)	99,09		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	21.298.000,00	21.104.698,00	(193.302,00)	99,09		
01.2.09.02.5.1.01	Belanja Pegawai	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	100,00		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.278.000,00	19.084.698,00	(193.302,00)	99,00		
01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.05.5.1	BELANJA OPERASI	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.990.000,00	3.990.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	3.990.000,00	3.990.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.990.000,00	3.990.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.882.000,00	8.882.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	8.882.000,00	8.882.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.882.000,00	8.882.000,00	0,00	100,00		
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	98.786.000,00	98.694.900,00	(91.100,00)	99,91		
02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	98.786.000,00	98.694.900,00	(91.100,00)	99,91		
02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	98.786.000,00	98.694.900,00	(91.100,00)	99,91		
02.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	81.456.000,00	81.436.800,00	(19.200,00)	99,98		
02.2.04.02.5.1.01	Belanja Pegawai	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	100,00		
02.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.436.000,00	79.416.800,00	(19.200,00)	99,98		
02.2.04.02.5.2	BELANJA MODAL	17.330.000,00	17.258.100,00	(71.900,00)	99,59		
02.2.04.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.330.000,00	17.258.100,00	(71.900,00)	99,59		
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	33.370.000,00	33.219.000,00	(151.000,00)	99,55		
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	33.370.000,00	33.219.000,00	(151.000,00)	99,55		
05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	33.370.000,00	33.219.000,00	(151.000,00)	99,55		
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	33.370.000,00	33.219.000,00	(151.000,00)	99,55		
05.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.350.000,00	31.199.000,00	(151.000,00)	99,52		
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	142.882.000,00	141.513.300,00	(1.368.700,00)	99,04		
06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	142.882.000,00	141.513.300,00	(1.368.700,00)	99,04		
06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	24.210.000,00	24.090.200,00	(119.800,00)	99,51		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
06.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	24.210.000,00	24.090.200,00	(119.800,00)	99,51		
06.2.01.03.5.1.01	Belanja Pegawai	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.190.000,00	22.070.200,00	(119.800,00)	99,46		
06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	3.000.000,00	2.975.300,00	(24.700,00)	99,18		
06.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	2.975.300,00	(24.700,00)	99,18		
06.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.975.300,00	(24.700,00)	99,18		
06.2.01.09	Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	4.500.000,00	4.469.300,00	(30.700,00)	99,32		
06.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	4.500.000,00	4.469.300,00	(30.700,00)	99,32		
06.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.469.300,00	(30.700,00)	99,32		
06.2.01.13	Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	25.992.000,00	24.841.100,00	(1.150.900,00)	95,57		
06.2.01.13.5.1	BELANJA OPERASI	25.992.000,00	24.841.100,00	(1.150.900,00)	95,57		
06.2.01.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.992.000,00	24.841.100,00	(1.150.900,00)	95,57		
06.2.01.16	Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	82.180.000,00	82.150.750,00	(29.250,00)	99,96		
06.2.01.16.5.1	BELANJA OPERASI	82.180.000,00	82.150.750,00	(29.250,00)	99,96		
06.2.01.16.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.180.000,00	82.150.750,00	(29.250,00)	99,96		
06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	3.000.000,00	2.986.650,00	(13.350,00)	99,56		
06.2.01.17.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	2.986.650,00	(13.350,00)	99,56		
06.2.01.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.986.650,00	(13.350,00)	99,56		
	SURPLUS / DEFISIT	(2.132.140.000,00)	(2.066.838.973,00)	65.301.027,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(2.132.140.000,00)	(2.066.838.973,00)	65.301.027,00	0		





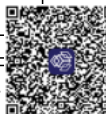
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

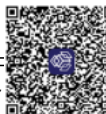
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN

SKPD : 7-01.0-00.0-00.13 KECAMATAN ALIAN

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	2.273.869.000,00	2.208.198.330,00	(65.670.670,00)	97,11		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.021.091.000,00	1.955.614.590,00	(65.476.410,00)	96,76		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.076.000,00	11.032.250,00	(43.750,00)	99,61		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.720.000,00	4.697.400,00	(22.600,00)	99,52		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.720.000,00	4.697.400,00	(22.600,00)	99,52		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.720.000,00	4.697.400,00	(22.600,00)	99,52		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.356.000,00	6.334.850,00	(21.150,00)	99,67		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	6.356.000,00	6.334.850,00	(21.150,00)	99,67		
01.2.01.07.5.1.01	Belanja Pegawai	1.515.000,00	1.515.000,00	0,00	100,00		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.841.000,00	4.819.850,00	(21.150,00)	99,56		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.888.730.000,00	1.827.028.889,00	(61.701.111,00)	96,73		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.854.160.000,00	1.792.490.076,00	(61.669.924,00)	96,67		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.854.160.000,00	1.792.490.076,00	(61.669.924,00)	96,67		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.854.160.000,00	1.792.490.076,00	(61.669.924,00)	96,67		
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	34.570.000,00	34.538.813,00	(31.187,00)	99,91		
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	34.570.000,00	34.538.813,00	(31.187,00)	99,91		
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	9.060.000,00	9.060.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.510.000,00	25.478.813,00	(31.187,00)	99,88		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	41.068.000,00	41.023.550,00	(44.450,00)	99,89		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.808.000,00	11.796.000,00	(12.000,00)	99,90		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	11.808.000,00	11.796.000,00	(12.000,00)	99,90		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.808.000,00	11.796.000,00	(12.000,00)	99,90		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	3.999.800,00	(200,00)	100,00		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	3.999.800,00	(200,00)	100,00		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	3.999.800,00	(200,00)	100,00		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	13.000.000,00	12.975.750,00	(24.250,00)	99,81		
01.2.06.07.5.1	BELANJA OPERASI	13.000.000,00	12.975.750,00	(24.250,00)	99,81		
01.2.06.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	12.975.750,00	(24.250,00)	99,81		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.260.000,00	6.252.000,00	(8.000,00)	99,87		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	6.260.000,00	6.252.000,00	(8.000,00)	99,87		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.260.000,00	6.252.000,00	(8.000,00)	99,87		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.000.000,00	9.950.000,00	(50.000,00)	99,50		
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	9.950.000,00	(50.000,00)	99,50		
01.2.07.06.5.1	BELANJA OPERASI	368.000,00	350.000,00	(18.000,00)	95,11		
01.2.07.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	368.000,00	350.000,00	(18.000,00)	95,11		
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	9.632.000,00	9.600.000,00	(32.000,00)	99,67		
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.632.000,00	9.600.000,00	(32.000,00)	99,67		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29.947.000,00	26.612.801,00	(3.334.199,00)	88,87		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.000.000,00	17.667.501,00	(3.332.499,00)	84,13		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	21.000.000,00	17.667.501,00	(3.332.499,00)	84,13		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	17.667.501,00	(3.332.499,00)	84,13		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.447.000,00	8.445.300,00	(1.700,00)	99,98		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	7.685.000,00	7.684.800,00	(200,00)	100,00		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.685.000,00	7.684.800,00	(200,00)	100,00		
01.2.08.04.5.2	BELANJA MODAL	762.000,00	760.500,00	(1.500,00)	99,80		
01.2.08.04.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	762.000,00	760.500,00	(1.500,00)	99,80		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40.270.000,00	39.967.100,00	(302.900,00)	99,25		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	31.000.000,00	30.737.000,00	(263.000,00)	99,15		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	31.000.000,00	30.737.000,00	(263.000,00)	99,15		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.000.000,00	30.737.000,00	(263.000,00)	99,15		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.270.000,00	4.230.400,00	(39.600,00)	99,07		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	4.270.000,00	4.230.400,00	(39.600,00)	99,07		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.270.000,00	4.230.400,00	(39.600,00)	99,07		
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.000.000,00	4.999.700,00	(300,00)	99,99		
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.999.700,00	(300,00)	99,99		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.999.700,00	(300,00)	99,99		
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	59.508.000,00	59.450.540,00	(57.460,00)	99,90		
02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	59.508.000,00	59.450.540,00	(57.460,00)	99,90		
02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	59.508.000,00	59.450.540,00	(57.460,00)	99,90		
02.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	59.508.000,00	59.450.540,00	(57.460,00)	99,90		
02.2.04.02.5.1.01	Belanja Pegawai	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	100,00		
02.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.488.000,00	57.430.540,00	(57.460,00)	99,90		
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	20.000.000,00	19.988.100,00	(11.900,00)	99,94		
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	20.000.000,00	19.988.100,00	(11.900,00)	99,94		
05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	20.000.000,00	19.988.100,00	(11.900,00)	99,94		
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	19.988.100,00	(11.900,00)	99,94		
05.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.990.000,00	18.978.100,00	(11.900,00)	99,94		
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	173.270.000,00	173.145.100,00	(124.900,00)	99,93		
06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	173.270.000,00	173.145.100,00	(124.900,00)	99,93		
06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	30.770.000,00	30.728.650,00	(41.350,00)	99,87		
06.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	30.770.000,00	30.728.650,00	(41.350,00)	99,87		
06.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.770.000,00	30.728.650,00	(41.350,00)	99,87		
06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	4.500.000,00	4.483.200,00	(16.800,00)	99,63		
06.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	4.500.000,00	4.483.200,00	(16.800,00)	99,63		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
06.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.483.200,00	(16.800,00)	99,63		
06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2.000.000,00	1.990.590,00	(9.410,00)	99,53		
06.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	1.990.590,00	(9.410,00)	99,53		
06.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.990.590,00	(9.410,00)	99,53		
06.2.01.09	Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	3.000.000,00	2.993.630,00	(6.370,00)	99,79		
06.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	2.993.630,00	(6.370,00)	99,79		
06.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.993.630,00	(6.370,00)	99,79		
06.2.01.11	Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	15.000.000,00	14.992.650,00	(7.350,00)	99,95		
06.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	14.992.650,00	(7.350,00)	99,95		
06.2.01.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.992.650,00	(7.350,00)	99,95		
06.2.01.13	Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	22.000.000,00	21.982.700,00	(17.300,00)	99,92		
06.2.01.13.5.1	BELANJA OPERASI	22.000.000,00	21.982.700,00	(17.300,00)	99,92		
06.2.01.13.5.1.01	Belanja Pegawai	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.980.000,00	19.962.700,00	(17.300,00)	99,91		
06.2.01.16	Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	91.000.000,00	90.992.480,00	(7.520,00)	99,99		
06.2.01.16.5.1	BELANJA OPERASI	91.000.000,00	90.992.480,00	(7.520,00)	99,99		
06.2.01.16.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.000.000,00	90.992.480,00	(7.520,00)	99,99		
06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	5.000.000,00	4.981.200,00	(18.800,00)	99,62		
06.2.01.17.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.981.200,00	(18.800,00)	99,62		
06.2.01.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.981.200,00	(18.800,00)	99,62		
	SURPLUS / DEFISIT	(2.273.869.000,00)	(2.208.198.330,00)	65.670.670,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(2.273.869.000,00)	(2.208.198.330,00)	65.670.670,00	0		





PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN

SKPD : 7-01.0-00.0-00.14 KECAMATAN PONCOWARNO

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	2.141.837.000,00	1.996.802.712,00	(145.034.288,00)	93,23		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.915.674.000,00	1.780.528.812,00	(135.145.188,00)	92,95		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.000.000,00	8.840.750,00	(159.250,00)	98,23		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.000.000,00	3.952.000,00	(48.000,00)	98,80		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	3.952.000,00	(48.000,00)	98,80		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	3.952.000,00	(48.000,00)	98,80		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	4.888.750,00	(111.250,00)	97,78		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.888.750,00	(111.250,00)	97,78		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.888.750,00	(111.250,00)	97,78		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.714.931.000,00	1.604.421.117,00	(110.509.883,00)	93,56		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.698.326.000,00	1.587.897.045,00	(110.428.955,00)	93,50		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.698.326.000,00	1.587.897.045,00	(110.428.955,00)	93,50		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.698.326.000,00	1.587.897.045,00	(110.428.955,00)	93,50		
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	16.605.000,00	16.524.072,00	(80.928,00)	99,51		
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	16.605.000,00	16.524.072,00	(80.928,00)	99,51		
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	10.280.000,00	10.280.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.325.000,00	6.244.072,00	(80.928,00)	98,72		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	33.553.000,00	31.837.450,00	(1.715.550,00)	94,89		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.400.000,00	1.391.500,00	(8.500,00)	99,39		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.400.000,00	1.391.500,00	(8.500,00)	99,39		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.391.500,00	(8.500,00)	99,39		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.615.000,00	11.390.000,00	(1.225.000,00)	90,29		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	12.615.000,00	11.390.000,00	(1.225.000,00)	90,29		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.615.000,00	11.390.000,00	(1.225.000,00)	90,29		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.088.000,00	6.087.700,00	(300,00)	100,00		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	6.088.000,00	6.087.700,00	(300,00)	100,00		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.088.000,00	6.087.700,00	(300,00)	100,00		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.250.000,00	1.854.000,00	(396.000,00)	82,40		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	2.250.000,00	1.854.000,00	(396.000,00)	82,40		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	1.854.000,00	(396.000,00)	82,40		
01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	8.000.000,00	7.914.250,00	(85.750,00)	98,93		
01.2.06.07.5.1	BELANJA OPERASI	8.000.000,00	7.914.250,00	(85.750,00)	98,93		
01.2.06.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	7.914.250,00	(85.750,00)	98,93		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	100,00		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16.000.000,00	15.184.000,00	(816.000,00)	94,90		
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.000.000,00	11.224.000,00	(776.000,00)	93,53		
01.2.07.06.5.1	BELANJA OPERASI	824.000,00	824.000,00	0,00	100,00		
01.2.07.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	824.000,00	824.000,00	0,00	100,00		
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	11.176.000,00	10.400.000,00	(776.000,00)	93,06		
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.176.000,00	10.400.000,00	(776.000,00)	93,06		
01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.000.000,00	3.960.000,00	(40.000,00)	99,00		
01.2.07.10.5.2	BELANJA MODAL	4.000.000,00	3.960.000,00	(40.000,00)	99,00		
01.2.07.10.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.000.000,00	3.960.000,00	(40.000,00)	99,00		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71.950.000,00	52.932.665,00	(19.017.335,00)	73,57		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	500.000,00	(500.000,00)	50,00		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	500.000,00	(500.000,00)	50,00		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	500.000,00	(500.000,00)	50,00		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.750.000,00	32.280.165,00	(18.469.835,00)	63,61		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	50.750.000,00	32.280.165,00	(18.469.835,00)	63,61		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.750.000,00	32.280.165,00	(18.469.835,00)	63,61		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20.200.000,00	20.152.500,00	(47.500,00)	99,76		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	20.200.000,00	20.152.500,00	(47.500,00)	99,76		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.200.000,00	20.152.500,00	(47.500,00)	99,76		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.240.000,00	67.312.830,00	(2.927.170,00)	95,83		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.577.000,00	20.102.830,00	(474.170,00)	97,70		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	20.577.000,00	20.102.830,00	(474.170,00)	97,70		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.577.000,00	20.102.830,00	(474.170,00)	97,70		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.000.000,00	1.960.000,00	(40.000,00)	98,00		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	1.960.000,00	(40.000,00)	98,00		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.960.000,00	(40.000,00)	98,00		
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	47.663.000,00	45.250.000,00	(2.413.000,00)	94,94		
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	47.663.000,00	45.250.000,00	(2.413.000,00)	94,94		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.663.000,00	45.250.000,00	(2.413.000,00)	94,94		
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	59.442.000,00	52.634.900,00	(6.807.100,00)	88,55		
02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	59.442.000,00	52.634.900,00	(6.807.100,00)	88,55		
02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	59.442.000,00	52.634.900,00	(6.807.100,00)	88,55		
02.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	59.442.000,00	52.634.900,00	(6.807.100,00)	88,55		
02.2.04.02.5.1.01	Belanja Pegawai	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	100,00		
02.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.422.000,00	50.614.900,00	(6.807.100,00)	88,15		
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	21.750.000,00	21.736.150,00	(13.850,00)	99,94		
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	21.750.000,00	21.736.150,00	(13.850,00)	99,94		
05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	21.750.000,00	21.736.150,00	(13.850,00)	99,94		
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	21.750.000,00	21.736.150,00	(13.850,00)	99,94		
05.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.740.000,00	20.726.150,00	(13.850,00)	99,93		
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	144.971.000,00	141.902.850,00	(3.068.150,00)	97,88		
06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	144.971.000,00	141.902.850,00	(3.068.150,00)	97,88		
06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	17.000.000,00	16.783.200,00	(216.800,00)	98,72		
06.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	17.000.000,00	16.783.200,00	(216.800,00)	98,72		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
06.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	16.783.200,00	(216.800,00)	98,72		
06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	3.000.000,00	2.900.600,00	(99.400,00)	96,69		
06.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	2.900.600,00	(99.400,00)	96,69		
06.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.900.600,00	(99.400,00)	96,69		
06.2.01.09	Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	10.000.000,00	9.716.850,00	(283.150,00)	97,17		
06.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.716.850,00	(283.150,00)	97,17		
06.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.716.850,00	(283.150,00)	97,17		
06.2.01.11	Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12.000.000,00	11.653.700,00	(346.300,00)	97,11		
06.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	11.653.700,00	(346.300,00)	97,11		
06.2.01.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	11.653.700,00	(346.300,00)	97,11		
06.2.01.13	Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	24.000.000,00	23.439.500,00	(560.500,00)	97,66		
06.2.01.13.5.1	BELANJA OPERASI	24.000.000,00	23.439.500,00	(560.500,00)	97,66		
06.2.01.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	23.439.500,00	(560.500,00)	97,66		
06.2.01.16	Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	68.971.000,00	67.926.200,00	(1.044.800,00)	98,49		
06.2.01.16.5.1	BELANJA OPERASI	68.971.000,00	67.926.200,00	(1.044.800,00)	98,49		
06.2.01.16.5.1.01	Belanja Pegawai	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.16.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.551.000,00	65.506.200,00	(1.044.800,00)	98,43		
06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	10.000.000,00	9.482.800,00	(517.200,00)	94,83		
06.2.01.17.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.482.800,00	(517.200,00)	94,83		
06.2.01.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.482.800,00	(517.200,00)	94,83		
	SURPLUS / DEFISIT	(2.141.837.000,00)	(1.996.802.712,00)	145.034.288,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(2.141.837.000,00)	(1.996.802.712,00)	145.034.288,00	0		





PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN

SKPD : 7-01.0-00.0-00.15 KECAMATAN KEBUMEN

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	195.656.000,00	219.672.703,00	24.016.703,00	112,27		
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	195.656.000,00	219.672.703,00	24.016.703,00	112,27		
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	195.656.000,00	219.672.703,00	24.016.703,00	112,27		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	10.176.656.000,00	9.934.226.041,00	(242.429.959,00)	97,62		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.902.840.000,00	5.686.517.841,00	(216.322.159,00)	96,34		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.423.000,00	34.175.800,00	(247.200,00)	99,28		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22.810.000,00	22.592.100,00	(217.900,00)	99,04		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	22.810.000,00	22.592.100,00	(217.900,00)	99,04		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.810.000,00	22.592.100,00	(217.900,00)	99,04		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.613.000,00	11.583.700,00	(29.300,00)	99,75		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	11.613.000,00	11.583.700,00	(29.300,00)	99,75		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.613.000,00	11.583.700,00	(29.300,00)	99,75		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.294.325.000,00	5.093.763.223,00	(200.561.777,00)	96,21		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.217.992.000,00	5.019.004.074,00	(198.987.926,00)	96,19		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	5.217.992.000,00	5.019.004.074,00	(198.987.926,00)	96,19		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	5.217.992.000,00	5.019.004.074,00	(198.987.926,00)	96,19		
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	76.333.000,00	74.759.149,00	(1.573.851,00)	97,94		
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	76.333.000,00	74.759.149,00	(1.573.851,00)	97,94		
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	29.885.000,00	29.410.000,00	(475.000,00)	98,41		
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.448.000,00	45.349.149,00	(1.098.851,00)	97,63		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	138.213.000,00	136.243.000,00	(1.970.000,00)	98,57		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.275.000,00	11.260.700,00	(14.300,00)	99,87		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	11.275.000,00	11.260.700,00	(14.300,00)	99,87		



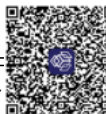
KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.275.000,00	11.260.700,00	(14.300,00)	99,87		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.740.000,00	30.540.200,00	(199.800,00)	99,35		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	30.740.000,00	30.540.200,00	(199.800,00)	99,35		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.740.000,00	30.540.200,00	(199.800,00)	99,35		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.536.000,00	19.514.450,00	(21.550,00)	99,89		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	19.536.000,00	19.514.450,00	(21.550,00)	99,89		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.536.000,00	19.514.450,00	(21.550,00)	99,89		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13.480.000,00	13.340.000,00	(140.000,00)	98,96		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	13.480.000,00	13.340.000,00	(140.000,00)	98,96		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.480.000,00	13.340.000,00	(140.000,00)	98,96		
01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	50.077.000,00	49.074.450,00	(1.002.550,00)	98,00		
01.2.06.07.5.1	BELANJA OPERASI	50.077.000,00	49.074.450,00	(1.002.550,00)	98,00		
01.2.06.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.077.000,00	49.074.450,00	(1.002.550,00)	98,00		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.700.000,00	5.140.000,00	(560.000,00)	90,18		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	5.700.000,00	5.140.000,00	(560.000,00)	90,18		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	5.140.000,00	(560.000,00)	90,18		
01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7.405.000,00	7.373.200,00	(31.800,00)	99,57		
01.2.06.10.5.1	BELANJA OPERASI	3.405.000,00	3.373.200,00	(31.800,00)	99,07		
01.2.06.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.405.000,00	3.373.200,00	(31.800,00)	99,07		
01.2.06.10.5.2	BELANJA MODAL	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.10.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	73.105.000,00	71.160.000,00	(1.945.000,00)	97,34		
01.2.07.05	Pengadaan Mebel	8.000.000,00	7.900.000,00	(100.000,00)	98,75		
01.2.07.05.5.2	BELANJA MODAL	8.000.000,00	7.900.000,00	(100.000,00)	98,75		
01.2.07.05.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.000.000,00	7.900.000,00	(100.000,00)	98,75		
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.665.000,00	38.125.000,00	(540.000,00)	98,60		
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	38.665.000,00	38.125.000,00	(540.000,00)	98,60		
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.665.000,00	38.125.000,00	(540.000,00)	98,60		
01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	26.440.000,00	25.135.000,00	(1.305.000,00)	95,06		
01.2.07.10.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.950.000,00	(50.000,00)	99,00		
01.2.07.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.950.000,00	(50.000,00)	99,00		
01.2.07.10.5.2	BELANJA MODAL	21.440.000,00	20.185.000,00	(1.255.000,00)	94,15		
01.2.07.10.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.440.000,00	20.185.000,00	(1.255.000,00)	94,15		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	176.997.000,00	168.505.597,00	(8.491.403,00)	95,20		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.650.000,00	5.640.000,00	(10.000,00)	99,82		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	5.650.000,00	5.640.000,00	(10.000,00)	99,82		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.650.000,00	5.640.000,00	(10.000,00)	99,82		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	81.980.000,00	73.546.097,00	(8.433.903,00)	89,71		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	81.980.000,00	73.546.097,00	(8.433.903,00)	89,71		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.980.000,00	73.546.097,00	(8.433.903,00)	89,71		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	89.367.000,00	89.319.500,00	(47.500,00)	99,95		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	89.367.000,00	89.319.500,00	(47.500,00)	99,95		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.367.000,00	89.319.500,00	(47.500,00)	99,95		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	185.777.000,00	182.670.221,00	(3.106.779,00)	98,33		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	64.403.000,00	63.108.389,00	(1.294.611,00)	97,99		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	64.403.000,00	63.108.389,00	(1.294.611,00)	97,99		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.403.000,00	63.108.389,00	(1.294.611,00)	97,99		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.870.000,00	24.269.400,00	(600.600,00)	97,59		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	24.870.000,00	24.269.400,00	(600.600,00)	97,59		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.870.000,00	24.269.400,00	(600.600,00)	97,59		
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	96.504.000,00	95.292.432,00	(1.211.568,00)	98,74		
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	96.504.000,00	95.292.432,00	(1.211.568,00)	98,74		
01.2.09.09.5.1.01	Belanja Pegawai	505.000,00	505.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.999.000,00	94.787.432,00	(1.211.568,00)	98,74		
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	83.719.000,00	83.718.600,00	(400,00)	100,00		
02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	83.719.000,00	83.718.600,00	(400,00)	100,00		
02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	83.719.000,00	83.718.600,00	(400,00)	100,00		
02.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	83.719.000,00	83.718.600,00	(400,00)	100,00		
02.2.04.02.5.1.01	Belanja Pegawai	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	100,00		
02.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.019.000,00	78.018.600,00	(400,00)	100,00		
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.929.394.000,00	3.904.028.000,00	(25.366.000,00)	99,35		
03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3.929.394.000,00	3.904.028.000,00	(25.366.000,00)	99,35		
03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	79.466.000,00	78.983.200,00	(482.800,00)	99,39		
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	79.466.000,00	78.983.200,00	(482.800,00)	99,39		
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.466.000,00	78.983.200,00	(482.800,00)	99,39		
03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.757.242.000,00	2.736.978.900,00	(20.263.100,00)	99,27		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	2.757.242.000,00	2.736.978.900,00	(20.263.100,00)	99,27		
03.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	43.431.000,00	40.830.000,00	(2.601.000,00)	94,01		
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.713.811.000,00	2.696.148.900,00	(17.662.100,00)	99,35		
03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.076.843.000,00	1.072.369.000,00	(4.474.000,00)	99,58		
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.076.843.000,00	1.072.369.000,00	(4.474.000,00)	99,58		
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.076.843.000,00	1.072.369.000,00	(4.474.000,00)	99,58		
03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	15.843.000,00	15.696.900,00	(146.100,00)	99,08		
03.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	15.843.000,00	15.696.900,00	(146.100,00)	99,08		
03.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.843.000,00	15.696.900,00	(146.100,00)	99,08		
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00		
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	505.000,00	505.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.495.000,00	4.495.000,00	0,00	100,00		
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	255.703.000,00	254.961.600,00	(741.400,00)	99,71		
06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	255.703.000,00	254.961.600,00	(741.400,00)	99,71		
06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	23.950.000,00	23.947.900,00	(2.100,00)	99,99		
06.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	23.950.000,00	23.947.900,00	(2.100,00)	99,99		
06.2.01.03.5.1.01	Belanja Pegawai	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.930.000,00	21.927.900,00	(2.100,00)	99,99		
06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	7.200.000,00	7.199.800,00	(200,00)	100,00		
06.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	7.200.000,00	7.199.800,00	(200,00)	100,00		
06.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	7.199.800,00	(200,00)	100,00		
06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2.000.000,00	1.995.800,00	(4.200,00)	99,79		
06.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	1.995.800,00	(4.200,00)	99,79		
06.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.995.800,00	(4.200,00)	99,79		
06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	8.965.000,00	8.963.400,00	(1.600,00)	99,98		
06.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	8.965.000,00	8.963.400,00	(1.600,00)	99,98		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
06.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.965.000,00	8.963.400,00	(1.600,00)	99,98		
06.2.01.11	Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	14.370.000,00	14.369.900,00	(100,00)	100,00		
06.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	14.370.000,00	14.369.900,00	(100,00)	100,00		
06.2.01.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.370.000,00	14.369.900,00	(100,00)	100,00		
06.2.01.13	Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	38.111.000,00	38.109.900,00	(1.100,00)	100,00		
06.2.01.13.5.1	BELANJA OPERASI	38.111.000,00	38.109.900,00	(1.100,00)	100,00		
06.2.01.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.111.000,00	38.109.900,00	(1.100,00)	100,00		
06.2.01.16	Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	152.804.000,00	152.072.100,00	(731.900,00)	99,52		
06.2.01.16.5.1	BELANJA OPERASI	152.804.000,00	152.072.100,00	(731.900,00)	99,52		
06.2.01.16.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	152.804.000,00	152.072.100,00	(731.900,00)	99,52		
06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	8.303.000,00	8.302.800,00	(200,00)	100,00		
06.2.01.17.5.1	BELANJA OPERASI	8.303.000,00	8.302.800,00	(200,00)	100,00		
06.2.01.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.303.000,00	8.302.800,00	(200,00)	100,00		
	SURPLUS / DEFISIT	(9.981.000.000,00)	(9.714.553.338,00)	266.446.662,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(9.981.000.000,00)	(9.714.553.338,00)	266.446.662,00	0		





PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN

SKPD : 7-01.0-00.0-00.16 KECAMATAN PEJAGOAN

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	2.555.831.000,00	2.467.329.908,00	(88.501.092,00)	96,54		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.282.318.000,00	2.194.923.758,00	(87.394.242,00)	96,17		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.390.000,00	13.309.020,00	(80.980,00)	99,40		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.790.000,00	7.738.620,00	(51.380,00)	99,34		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	7.790.000,00	7.738.620,00	(51.380,00)	99,34		
01.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.090.000,00	5.038.620,00	(51.380,00)	98,99		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.600.000,00	5.570.400,00	(29.600,00)	99,47		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	5.600.000,00	5.570.400,00	(29.600,00)	99,47		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	5.570.400,00	(29.600,00)	99,47		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.119.052.000,00	2.039.690.059,00	(79.361.941,00)	96,25		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.101.256.000,00	2.021.954.540,00	(79.301.460,00)	96,23		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.101.256.000,00	2.021.954.540,00	(79.301.460,00)	96,23		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.101.256.000,00	2.021.954.540,00	(79.301.460,00)	96,23		
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	17.796.000,00	17.735.519,00	(60.481,00)	99,66		
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	17.796.000,00	17.735.519,00	(60.481,00)	99,66		
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	6.580.000,00	6.580.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.216.000,00	11.155.519,00	(60.481,00)	99,46		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	31.373.000,00	31.349.050,00	(23.950,00)	99,92		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.745.000,00	2.744.500,00	(500,00)	99,98		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.745.000,00	2.744.500,00	(500,00)	99,98		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.745.000,00	2.744.500,00	(500,00)	99,98		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.600.000,00	9.576.750,00	(23.250,00)	99,76		



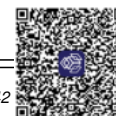
KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	9.600.000,00	9.576.750,00	(23.250,00)	99,76		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	9.576.750,00	(23.250,00)	99,76		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.817.000,00	2.816.800,00	(200,00)	99,99		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	2.817.000,00	2.816.800,00	(200,00)	99,99		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.817.000,00	2.816.800,00	(200,00)	99,99		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	8.367.000,00	8.367.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.07.5.1	BELANJA OPERASI	8.367.000,00	8.367.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.367.000,00	8.367.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.644.000,00	3.644.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	3.644.000,00	3.644.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.644.000,00	3.644.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.10.5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36.253.000,00	31.558.367,00	(4.694.633,00)	87,05		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	960.000,00	957.000,00	(3.000,00)	99,69		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	960.000,00	957.000,00	(3.000,00)	99,69		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	960.000,00	957.000,00	(3.000,00)	99,69		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.000.000,00	14.308.367,00	(4.691.633,00)	75,31		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	19.000.000,00	14.308.367,00	(4.691.633,00)	75,31		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.000.000,00	14.308.367,00	(4.691.633,00)	75,31		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	16.293.000,00	16.293.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	16.293.000,00	16.293.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.293.000,00	16.293.000,00	0,00	100,00		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82.250.000,00	79.017.262,00	(3.232.738,00)	96,07		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	39.250.000,00	37.090.262,00	(2.159.738,00)	94,50		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	39.250.000,00	37.090.262,00	(2.159.738,00)	94,50		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.250.000,00	37.090.262,00	(2.159.738,00)	94,50		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	37.000.000,00	35.927.000,00	(1.073.000,00)	97,10		
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	665.000,00	440.000,00	(225.000,00)	66,17		
01.2.09.09.5.1.01	Belanja Pegawai	665.000,00	440.000,00	(225.000,00)	66,17		
01.2.09.09.5.2	BELANJA MODAL	36.335.000,00	35.487.000,00	(848.000,00)	97,67		
01.2.09.09.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	36.335.000,00	35.487.000,00	(848.000,00)	97,67		
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	65.135.000,00	64.793.500,00	(341.500,00)	99,48		
02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	65.135.000,00	64.793.500,00	(341.500,00)	99,48		
02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	65.135.000,00	64.793.500,00	(341.500,00)	99,48		
02.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	42.666.000,00	42.326.000,00	(340.000,00)	99,20		
02.2.04.02.5.1.01	Belanja Pegawai	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	100,00		
02.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.646.000,00	40.306.000,00	(340.000,00)	99,16		
02.2.04.02.5.2	BELANJA MODAL	22.469.000,00	22.467.500,00	(1.500,00)	99,99		
02.2.04.02.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	22.469.000,00	22.467.500,00	(1.500,00)	99,99		
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	19.788.000,00	19.773.500,00	(14.500,00)	99,93		
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	19.788.000,00	19.773.500,00	(14.500,00)	99,93		
05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	19.788.000,00	19.773.500,00	(14.500,00)	99,93		
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	19.788.000,00	19.773.500,00	(14.500,00)	99,93		
05.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.768.000,00	17.753.500,00	(14.500,00)	99,92		
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	188.590.000,00	187.839.150,00	(750.850,00)	99,60		
06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	188.590.000,00	187.839.150,00	(750.850,00)	99,60		
06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	16.800.000,00	16.782.062,00	(17.938,00)	99,89		
06.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	16.800.000,00	16.782.062,00	(17.938,00)	99,89		
06.2.01.03.5.1.01	Belanja Pegawai	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.780.000,00	14.762.062,00	(17.938,00)	99,88		
06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	7.559.000,00	7.548.370,00	(10.630,00)	99,86		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
06.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	7.559.000,00	7.548.370,00	(10.630,00)	99,86		
06.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.559.000,00	7.548.370,00	(10.630,00)	99,86		
06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	8.083.000,00	8.050.126,00	(32.874,00)	99,59		
06.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	8.083.000,00	8.050.126,00	(32.874,00)	99,59		
06.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.083.000,00	8.050.126,00	(32.874,00)	99,59		
06.2.01.09	Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	19.436.000,00	19.374.938,00	(61.062,00)	99,69		
06.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	19.436.000,00	19.374.938,00	(61.062,00)	99,69		
06.2.01.09.5.1.01	Belanja Pegawai	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.416.000,00	17.354.938,00	(61.062,00)	99,65		
06.2.01.11	Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	14.400.000,00	14.356.640,00	(43.360,00)	99,70		
06.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	14.400.000,00	14.356.640,00	(43.360,00)	99,70		
06.2.01.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	14.356.640,00	(43.360,00)	99,70		
06.2.01.13	Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	18.225.000,00	18.208.500,00	(16.500,00)	99,91		
06.2.01.13.5.1	BELANJA OPERASI	18.225.000,00	18.208.500,00	(16.500,00)	99,91		
06.2.01.13.5.1.01	Belanja Pegawai	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.125.000,00	14.108.500,00	(16.500,00)	99,88		
06.2.01.16	Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	75.846.000,00	75.419.699,00	(426.301,00)	99,44		
06.2.01.16.5.1	BELANJA OPERASI	75.846.000,00	75.419.699,00	(426.301,00)	99,44		
06.2.01.16.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.846.000,00	75.419.699,00	(426.301,00)	99,44		
06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	28.241.000,00	28.098.815,00	(142.185,00)	99,50		
06.2.01.17.5.1	BELANJA OPERASI	28.241.000,00	28.098.815,00	(142.185,00)	99,50		
06.2.01.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.241.000,00	28.098.815,00	(142.185,00)	99,50		
	SURPLUS / DEFISIT	(2.555.831.000,00)	(2.467.329.908,00)	88.501.092,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(2.555.831.000,00)	(2.467.329.908,00)	88.501.092,00	0		





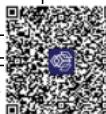
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN

SKPD : 7-01.0-00.0-00.17 KECAMATAN SRUWENG

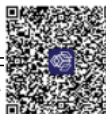
KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	2.272.778.000,00	2.193.769.203,00	(79.008.797,00)	96,52		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.039.171.000,00	1.961.625.149,00	(77.545.851,00)	96,20		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.000.000,00	13.999.873,00	(127,00)	100,00		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000,00	9.999.873,00	(127,00)	100,00		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.999.873,00	(127,00)	100,00		
01.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	100,00		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.980.000,00	7.979.873,00	(127,00)	100,00		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.852.930.000,00	1.779.160.457,00	(73.769.543,00)	96,02		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.842.895.000,00	1.769.127.657,00	(73.767.343,00)	96,00		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.842.895.000,00	1.769.127.657,00	(73.767.343,00)	96,00		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.842.895.000,00	1.769.127.657,00	(73.767.343,00)	96,00		
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.035.000,00	10.032.800,00	(2.200,00)	99,98		
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	10.035.000,00	10.032.800,00	(2.200,00)	99,98		
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.385.000,00	4.382.800,00	(2.200,00)	99,95		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	42.154.000,00	42.148.750,00	(5.250,00)	99,99		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.982.000,00	3.981.500,00	(500,00)	99,99		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.982.000,00	3.981.500,00	(500,00)	99,99		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.982.000,00	3.981.500,00	(500,00)	99,99		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	100,00		



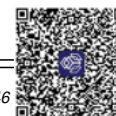
KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	8.452.000,00	8.447.250,00	(4.750,00)	99,94		
01.2.06.07.5.1	BELANJA OPERASI	8.452.000,00	8.447.250,00	(4.750,00)	99,94		
01.2.06.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.452.000,00	8.447.250,00	(4.750,00)	99,94		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.320.000,00	2.320.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	2.320.000,00	2.320.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.320.000,00	2.320.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.10.5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	19.745.000,00	19.740.000,00	(5.000,00)	99,97		
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00	100,00		
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00	100,00		
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00	100,00		
01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.295.000,00	10.290.000,00	(5.000,00)	99,95		
01.2.07.10.5.2	BELANJA MODAL	10.295.000,00	10.290.000,00	(5.000,00)	99,95		
01.2.07.10.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.295.000,00	10.290.000,00	(5.000,00)	99,95		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78.172.000,00	74.407.369,00	(3.764.631,00)	95,18		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.600.000,00	34.835.369,00	(3.764.631,00)	90,25		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	38.600.000,00	34.835.369,00	(3.764.631,00)	90,25		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.600.000,00	34.835.369,00	(3.764.631,00)	90,25		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	38.072.000,00	38.072.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	38.072.000,00	38.072.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.072.000,00	38.072.000,00	0,00	100,00		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32.170.000,00	32.168.700,00	(1.300,00)	100,00		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.450.000,00	15.449.100,00	(900,00)	99,99		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	15.450.000,00	15.449.100,00	(900,00)	99,99		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.450.000,00	15.449.100,00	(900,00)	99,99		
01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	3.090.000,00	3.090.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.05.5.1	BELANJA OPERASI	3.090.000,00	3.090.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.090.000,00	3.090.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.000.000,00	7.999.600,00	(400,00)	100,00		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	8.000.000,00	7.999.600,00	(400,00)	100,00		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	7.999.600,00	(400,00)	100,00		
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.630.000,00	5.630.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	5.630.000,00	5.630.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.630.000,00	5.630.000,00	0,00	100,00		
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	54.231.000,00	54.231.000,00	0,00	100,00		
02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	54.231.000,00	54.231.000,00	0,00	100,00		
02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	54.231.000,00	54.231.000,00	0,00	100,00		
02.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	54.231.000,00	54.231.000,00	0,00	100,00		
02.2.04.02.5.1.01	Belanja Pegawai	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	100,00		
02.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.331.000,00	49.331.000,00	0,00	100,00		
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15.548.000,00	15.548.000,00	0,00	100,00		
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	15.548.000,00	15.548.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	15.548.000,00	15.548.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	15.548.000,00	15.548.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	505.000,00	505.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.043.000,00	15.043.000,00	0,00	100,00		
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	163.828.000,00	162.365.054,00	(1.462.946,00)	99,11		
06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	163.828.000,00	162.365.054,00	(1.462.946,00)	99,11		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	14.456.000,00	14.454.344,00	(1.656,00)	99,99		
06.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	14.456.000,00	14.454.344,00	(1.656,00)	99,99		
06.2.01.03.5.1.01	Belanja Pegawai	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.006.000,00	12.004.344,00	(1.656,00)	99,99		
06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	5.389.000,00	5.386.000,00	(3.000,00)	99,94		
06.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	5.389.000,00	5.386.000,00	(3.000,00)	99,94		
06.2.01.08.5.1.01	Belanja Pegawai	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.379.000,00	4.376.000,00	(3.000,00)	99,93		
06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	4.688.000,00	4.675.000,00	(13.000,00)	99,72		
06.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	4.688.000,00	4.675.000,00	(13.000,00)	99,72		
06.2.01.09.5.1.01	Belanja Pegawai	505.000,00	505.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.183.000,00	4.170.000,00	(13.000,00)	99,69		
06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.11.5.1.01	Belanja Pegawai	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.980.000,00	7.980.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	18.746.000,00	18.746.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.13.5.1	BELANJA OPERASI	18.746.000,00	18.746.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.746.000,00	18.746.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	97.507.000,00	96.063.110,00	(1.443.890,00)	98,52		
06.2.01.16.5.1	BELANJA OPERASI	97.507.000,00	96.063.110,00	(1.443.890,00)	98,52		
06.2.01.16.5.1.01	Belanja Pegawai	4.740.000,00	4.740.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.16.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.767.000,00	91.323.110,00	(1.443.890,00)	98,44		
06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	9.042.000,00	9.040.600,00	(1.400,00)	99,98		
06.2.01.17.5.1	BELANJA OPERASI	9.042.000,00	9.040.600,00	(1.400,00)	99,98		
06.2.01.17.5.1.01	Belanja Pegawai	1.515.000,00	1.515.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.527.000,00	7.525.600,00	(1.400,00)	99,98		
	SURPLUS / DEFISIT	(2.272.778.000,00)	(2.193.769.203,00)	79.008.797,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(2.272.778.000,00)	(2.193.769.203,00)	79.008.797,00	0		





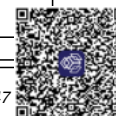
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN

SKPD : 7-01.0-00.0-00.18 KECAMATAN ADIMULYO

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	2.509.596.000,00	2.373.035.333,00	(136.560.667,00)	94,56		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.194.565.000,00	2.060.314.833,00	(134.250.167,00)	93,88		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.256.000,00	8.248.400,00	(7.600,00)	99,91		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.256.000,00	4.253.800,00	(2.200,00)	99,95		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.256.000,00	4.253.800,00	(2.200,00)	99,95		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.256.000,00	4.253.800,00	(2.200,00)	99,95		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.000.000,00	3.994.600,00	(5.400,00)	99,87		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	3.994.600,00	(5.400,00)	99,87		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	3.994.600,00	(5.400,00)	99,87		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.047.281.000,00	1.915.782.190,00	(131.498.810,00)	93,58		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.032.281.000,00	1.900.855.620,00	(131.425.380,00)	93,53		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.032.281.000,00	1.900.855.620,00	(131.425.380,00)	93,53		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.032.281.000,00	1.900.855.620,00	(131.425.380,00)	93,53		
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15.000.000,00	14.926.570,00	(73.430,00)	99,51		
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	14.926.570,00	(73.430,00)	99,51		
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	10.280.000,00	10.280.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.720.000,00	4.646.570,00	(73.430,00)	98,44		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	38.566.000,00	38.413.600,00	(152.400,00)	99,60		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000,00	3.999.300,00	(700,00)	99,98		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	3.999.300,00	(700,00)	99,98		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	3.999.300,00	(700,00)	99,98		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.900.000,00	15.900.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	15.900.000,00	15.900.000,00	0,00	100,00		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.900.000,00	15.900.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.250.000,00	2.246.900,00	(3.100,00)	99,86		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	2.250.000,00	2.246.900,00	(3.100,00)	99,86		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	2.246.900,00	(3.100,00)	99,86		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.500.000,00	1.476.000,00	(24.000,00)	98,40		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.476.000,00	(24.000,00)	98,40		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.476.000,00	(24.000,00)	98,40		
01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	9.716.000,00	9.688.100,00	(27.900,00)	99,71		
01.2.06.07.5.1	BELANJA OPERASI	9.716.000,00	9.688.100,00	(27.900,00)	99,71		
01.2.06.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.716.000,00	9.688.100,00	(27.900,00)	99,71		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.200.000,00	3.110.000,00	(90.000,00)	97,19		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	3.200.000,00	3.110.000,00	(90.000,00)	97,19		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	3.110.000,00	(90.000,00)	97,19		
01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.000.000,00	1.993.300,00	(6.700,00)	99,67		
01.2.06.10.5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	1.993.300,00	(6.700,00)	99,67		
01.2.06.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.993.300,00	(6.700,00)	99,67		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16.000.000,00	15.889.200,00	(110.800,00)	99,31		
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.000.000,00	15.889.200,00	(110.800,00)	99,31		
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	16.000.000,00	15.889.200,00	(110.800,00)	99,31		
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.000.000,00	15.889.200,00	(110.800,00)	99,31		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.462.000,00	33.095.443,00	(2.366.557,00)	93,33		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00	1.496.000,00	(4.000,00)	99,73		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.496.000,00	(4.000,00)	99,73		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.496.000,00	(4.000,00)	99,73		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.000.000,00	12.640.443,00	(2.359.557,00)	84,27		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	12.640.443,00	(2.359.557,00)	84,27		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	12.640.443,00	(2.359.557,00)	84,27		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	18.962.000,00	18.959.000,00	(3.000,00)	99,98		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	18.962.000,00	18.959.000,00	(3.000,00)	99,98		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.962.000,00	18.959.000,00	(3.000,00)	99,98		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.000.000,00	48.886.000,00	(114.000,00)	99,77		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.000.000,00	24.961.100,00	(38.900,00)	99,84		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	24.961.100,00	(38.900,00)	99,84		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	24.961.100,00	(38.900,00)	99,84		
01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	4.000.000,00	3.926.000,00	(74.000,00)	98,15		
01.2.09.05.5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	3.926.000,00	(74.000,00)	98,15		
01.2.09.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	3.926.000,00	(74.000,00)	98,15		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000,00	9.998.900,00	(1.100,00)	99,99		
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.998.900,00	(1.100,00)	99,99		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.998.900,00	(1.100,00)	99,99		
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	46.310.000,00	46.106.400,00	(203.600,00)	99,56		
02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	46.310.000,00	46.106.400,00	(203.600,00)	99,56		
02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	46.310.000,00	46.106.400,00	(203.600,00)	99,56		
02.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	46.310.000,00	46.106.400,00	(203.600,00)	99,56		
02.2.04.02.5.1.01	Belanja Pegawai	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	100,00		
02.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.290.000,00	44.086.400,00	(203.600,00)	99,54		
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	20.000.000,00	19.999.200,00	(800,00)	100,00		
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	20.000.000,00	19.999.200,00	(800,00)	100,00		
05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	20.000.000,00	19.999.200,00	(800,00)	100,00		
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	19.999.200,00	(800,00)	100,00		
05.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.990.000,00	18.989.200,00	(800,00)	100,00		
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	248.721.000,00	246.614.900,00	(2.106.100,00)	99,15		
06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	248.721.000,00	246.614.900,00	(2.106.100,00)	99,15		
06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	38.354.000,00	38.338.800,00	(15.200,00)	99,96		
06.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	38.354.000,00	38.338.800,00	(15.200,00)	99,96		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
06.2.01.03.5.1.01	Belanja Pegawai	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.334.000,00	36.318.800,00	(15.200,00)	99,96		
06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	5.000.000,00	4.999.200,00	(800,00)	99,98		
06.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.999.200,00	(800,00)	99,98		
06.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.999.200,00	(800,00)	99,98		
06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	17.246.000,00	17.244.200,00	(1.800,00)	99,99		
06.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	17.246.000,00	17.244.200,00	(1.800,00)	99,99		
06.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.246.000,00	17.244.200,00	(1.800,00)	99,99		
06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	14.245.000,00	14.243.200,00	(1.800,00)	99,99		
06.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	14.245.000,00	14.243.200,00	(1.800,00)	99,99		
06.2.01.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.245.000,00	14.243.200,00	(1.800,00)	99,99		
06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	30.001.000,00	29.999.800,00	(1.200,00)	100,00		
06.2.01.13.5.1	BELANJA OPERASI	30.001.000,00	29.999.800,00	(1.200,00)	100,00		
06.2.01.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.001.000,00	29.999.800,00	(1.200,00)	100,00		
06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	123.875.000,00	121.792.900,00	(2.082.100,00)	98,32		
06.2.01.16.5.1	BELANJA OPERASI	123.875.000,00	121.792.900,00	(2.082.100,00)	98,32		
06.2.01.16.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.875.000,00	121.792.900,00	(2.082.100,00)	98,32		
06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	20.000.000,00	19.996.800,00	(3.200,00)	99,98		
06.2.01.17.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	19.996.800,00	(3.200,00)	99,98		
06.2.01.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.996.800,00	(3.200,00)	99,98		
	SURPLUS / DEFISIT	(2.509.596.000,00)	(2.373.035.333,00)	136.560.667,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(2.509.596.000,00)	(2.373.035.333,00)	136.560.667,00	0		





PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN

SKPD : 7-01.0-00.0-00.19 KECAMATAN KUWARASAN

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	2.459.400.600,00	2.231.175.139,00	(228.225.461,00)	90,72		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.205.259.600,00	1.978.264.539,00	(226.995.061,00)	89,71		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.211.000,00	6.035.500,00	(175.500,00)	97,17		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.525.000,00	3.469.000,00	(56.000,00)	98,41		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.525.000,00	3.469.000,00	(56.000,00)	98,41		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.525.000,00	3.469.000,00	(56.000,00)	98,41		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.686.000,00	2.566.500,00	(119.500,00)	95,55		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	2.686.000,00	2.566.500,00	(119.500,00)	95,55		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.686.000,00	2.566.500,00	(119.500,00)	95,55		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.090.005.600,00	1.864.926.827,00	(225.078.773,00)	89,23		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.061.332.600,00	1.836.331.438,00	(225.001.162,00)	89,08		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.061.332.600,00	1.836.331.438,00	(225.001.162,00)	89,08		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.061.332.600,00	1.836.331.438,00	(225.001.162,00)	89,08		
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	28.673.000,00	28.595.389,00	(77.611,00)	99,73		
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	28.673.000,00	28.595.389,00	(77.611,00)	99,73		
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	6.580.000,00	6.580.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.093.000,00	22.015.389,00	(77.611,00)	99,65		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	29.148.000,00	29.016.500,00	(131.500,00)	99,55		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.920.000,00	5.917.000,00	(3.000,00)	99,95		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	5.920.000,00	5.917.000,00	(3.000,00)	99,95		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.920.000,00	5.917.000,00	(3.000,00)	99,95		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.278.000,00	5.265.500,00	(12.500,00)	99,76		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	5.278.000,00	5.265.500,00	(12.500,00)	99,76		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.278.000,00	5.265.500,00	(12.500,00)	99,76		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	11.196.000,00	11.089.000,00	(107.000,00)	99,04		
01.2.06.07.5.1	BELANJA OPERASI	11.196.000,00	11.089.000,00	(107.000,00)	99,04		
01.2.06.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.196.000,00	11.089.000,00	(107.000,00)	99,04		
01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.554.000,00	1.545.000,00	(9.000,00)	99,42		
01.2.06.10.5.1	BELANJA OPERASI	1.554.000,00	1.545.000,00	(9.000,00)	99,42		
01.2.06.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.554.000,00	1.545.000,00	(9.000,00)	99,42		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46.395.000,00	45.992.512,00	(402.488,00)	99,13		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28.000.000,00	27.597.512,00	(402.488,00)	98,56		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	28.000.000,00	27.597.512,00	(402.488,00)	98,56		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	27.597.512,00	(402.488,00)	98,56		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	18.195.000,00	18.195.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	18.195.000,00	18.195.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.195.000,00	18.195.000,00	0,00	100,00		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.500.000,00	32.293.200,00	(1.206.800,00)	96,40		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	29.000.000,00	27.793.200,00	(1.206.800,00)	95,84		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	29.000.000,00	27.793.200,00	(1.206.800,00)	95,84		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.000.000,00	27.793.200,00	(1.206.800,00)	95,84		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00		
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	47.862.000,00	47.635.600,00	(226.400,00)	99,53		
02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	47.862.000,00	47.635.600,00	(226.400,00)	99,53		
02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	47.862.000,00	47.635.600,00	(226.400,00)	99,53		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	47.862.000,00	47.635.600,00	(226.400,00)	99,53		
02.2.04.02.5.1.01	Belanja Pegawai	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	100,00		
02.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.842.000,00	45.615.600,00	(226.400,00)	99,51		
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	10.000.000,00	9.999.000,00	(1.000,00)	99,99		
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	10.000.000,00	9.999.000,00	(1.000,00)	99,99		
05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	10.000.000,00	9.999.000,00	(1.000,00)	99,99		
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.999.000,00	(1.000,00)	99,99		
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.999.000,00	(1.000,00)	99,99		
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	196.279.000,00	195.276.000,00	(1.003.000,00)	99,49		
06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	196.279.000,00	195.276.000,00	(1.003.000,00)	99,49		
06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	38.800.000,00	38.636.500,00	(163.500,00)	99,58		
06.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	38.800.000,00	38.636.500,00	(163.500,00)	99,58		
06.2.01.03.5.1.01	Belanja Pegawai	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.780.000,00	36.616.500,00	(163.500,00)	99,56		
06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	24.487.000,00	24.334.500,00	(152.500,00)	99,38		
06.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	24.487.000,00	24.334.500,00	(152.500,00)	99,38		
06.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.487.000,00	24.334.500,00	(152.500,00)	99,38		
06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	20.191.000,00	20.163.000,00	(28.000,00)	99,86		
06.2.01.13.5.1	BELANJA OPERASI	20.191.000,00	20.163.000,00	(28.000,00)	99,86		
06.2.01.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.191.000,00	20.163.000,00	(28.000,00)	99,86		
06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	108.061.000,00	107.861.000,00	(200.000,00)	99,81		
06.2.01.16.5.1	BELANJA OPERASI	108.061.000,00	107.861.000,00	(200.000,00)	99,81		
06.2.01.16.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.061.000,00	107.861.000,00	(200.000,00)	99,81		
06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	2.740.000,00	2.281.000,00	(459.000,00)	83,25		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
06.2.01.17.5.1	BELANJA OPERASI	2.740.000,00	2.281.000,00	(459.000,00)	83,25		
06.2.01.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.740.000,00	2.281.000,00	(459.000,00)	83,25		
	SURPLUS / DEFISIT	(2.459.400.600,00)	(2.231.175.139,00)	228.225.461,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(2.459.400.600,00)	(2.231.175.139,00)	228.225.461,00	0		





PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN

SKPD : 7-01.0-00.0-00.20 KECAMATAN ROWOKELE

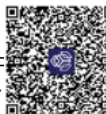
KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	2.365.751.000,00	2.174.905.675,00	(190.845.325,00)	91,93		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.176.335.000,00	1.985.988.375,00	(190.346.625,00)	91,25		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.395.000,00	2.394.400,00	(600,00)	99,97		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.315.000,00	1.315.000,00	0,00	100,00		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.315.000,00	1.315.000,00	0,00	100,00		
01.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	505.000,00	505.000,00	0,00	100,00		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	810.000,00	810.000,00	0,00	100,00		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.080.000,00	1.079.400,00	(600,00)	99,94		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	1.080.000,00	1.079.400,00	(600,00)	99,94		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.080.000,00	1.079.400,00	(600,00)	99,94		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.975.436.000,00	1.788.108.806,00	(187.327.194,00)	90,52		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.958.132.000,00	1.770.870.019,00	(187.261.981,00)	90,44		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.958.132.000,00	1.770.870.019,00	(187.261.981,00)	90,44		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.958.132.000,00	1.770.870.019,00	(187.261.981,00)	90,44		
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	17.304.000,00	17.238.787,00	(65.213,00)	99,62		
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	17.304.000,00	17.238.787,00	(65.213,00)	99,62		
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	10.780.000,00	10.780.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.524.000,00	6.458.787,00	(65.213,00)	99,00		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	39.558.000,00	39.539.500,00	(18.500,00)	99,95		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.993.000,00	1.993.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.993.000,00	1.993.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.993.000,00	1.993.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.900.000,00	18.899.400,00	(600,00)	100,00		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	18.900.000,00	18.899.400,00	(600,00)	100,00		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.900.000,00	18.899.400,00	(600,00)	100,00		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.552.000,00	4.552.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	4.552.000,00	4.552.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.552.000,00	4.552.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	10.000.000,00	9.999.600,00	(400,00)	100,00		
01.2.06.07.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.999.600,00	(400,00)	100,00		
01.2.06.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.999.600,00	(400,00)	100,00		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	740.000,00	740.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	740.000,00	740.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	740.000,00	740.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.373.000,00	1.355.500,00	(17.500,00)	98,73		
01.2.06.10.5.1	BELANJA OPERASI	1.373.000,00	1.355.500,00	(17.500,00)	98,73		
01.2.06.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.373.000,00	1.355.500,00	(17.500,00)	98,73		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12.875.000,00	10.290.000,00	(2.585.000,00)	79,92		
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.875.000,00	10.290.000,00	(2.585.000,00)	79,92		
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	12.875.000,00	10.290.000,00	(2.585.000,00)	79,92		
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.875.000,00	10.290.000,00	(2.585.000,00)	79,92		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86.571.000,00	86.212.777,00	(358.223,00)	99,59		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	165.000,00	157.900,00	(7.100,00)	95,70		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	165.000,00	157.900,00	(7.100,00)	95,70		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	165.000,00	157.900,00	(7.100,00)	95,70		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.936.000,00	34.584.877,00	(351.123,00)	98,99		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	34.936.000,00	34.584.877,00	(351.123,00)	98,99		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.936.000,00	34.584.877,00	(351.123,00)	98,99		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	51.470.000,00	51.470.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	51.470.000,00	51.470.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1.01	Belanja Pegawai	390.000,00	390.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.080.000,00	51.080.000,00	0,00	100,00		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59.500.000,00	59.442.892,00	(57.108,00)	99,90		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	55.000.000,00	54.942.892,00	(57.108,00)	99,90		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	55.000.000,00	54.942.892,00	(57.108,00)	99,90		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	54.942.892,00	(57.108,00)	99,90		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00		
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	57.662.000,00	57.640.400,00	(21.600,00)	99,96		
02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	57.662.000,00	57.640.400,00	(21.600,00)	99,96		
02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	57.662.000,00	57.640.400,00	(21.600,00)	99,96		
02.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	57.662.000,00	57.640.400,00	(21.600,00)	99,96		
02.2.04.02.5.1.01	Belanja Pegawai	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	100,00		
02.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.642.000,00	55.620.400,00	(21.600,00)	99,96		
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00		
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	505.000,00	505.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.495.000,00	17.495.000,00	0,00	100,00		
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	113.754.000,00	113.276.900,00	(477.100,00)	99,58		
06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	113.754.000,00	113.276.900,00	(477.100,00)	99,58		
06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	18.000.000,00	17.985.500,00	(14.500,00)	99,92		
06.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	18.000.000,00	17.985.500,00	(14.500,00)	99,92		
06.2.01.03.5.1.01	Belanja Pegawai	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.980.000,00	15.965.500,00	(14.500,00)	99,91		
06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	3.975.000,00	3.969.000,00	(6.000,00)	99,85		
06.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	3.975.000,00	3.969.000,00	(6.000,00)	99,85		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
06.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.975.000,00	3.969.000,00	(6.000,00)	99,85		
06.2.01.11	Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.518.000,00	4.518.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	4.518.000,00	4.518.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.518.000,00	4.518.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.13	Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	16.675.000,00	16.674.900,00	(100,00)	100,00		
06.2.01.13.5.1	BELANJA OPERASI	16.675.000,00	16.674.900,00	(100,00)	100,00		
06.2.01.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.675.000,00	16.674.900,00	(100,00)	100,00		
06.2.01.16	Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	63.461.000,00	63.004.600,00	(456.400,00)	99,28		
06.2.01.16.5.1	BELANJA OPERASI	63.461.000,00	63.004.600,00	(456.400,00)	99,28		
06.2.01.16.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.461.000,00	63.004.600,00	(456.400,00)	99,28		
06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	6.000.000,00	5.999.900,00	(100,00)	100,00		
06.2.01.17.5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	5.999.900,00	(100,00)	100,00		
06.2.01.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	5.999.900,00	(100,00)	100,00		
	SURPLUS / DEFISIT	(2.365.751.000,00)	(2.174.905.675,00)	190.845.325,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(2.365.751.000,00)	(2.174.905.675,00)	190.845.325,00	0		





PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN

SKPD : 7-01.0-00.0-00.21 KECAMATAN SEMPOR

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	1.000.000,00	1.080.000,00	80.000,00	108,00		
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.000.000,00	1.080.000,00	80.000,00	108,00		
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	1.000.000,00	1.080.000,00	80.000,00	108,00		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	2.378.333.000,00	2.319.807.930,00	(58.525.070,00)	97,54		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.174.392.000,00	2.116.300.845,00	(58.091.155,00)	97,33		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.800.000,00	8.717.500,00	(82.500,00)	99,06		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.700.000,00	6.689.700,00	(10.300,00)	99,85		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	6.700.000,00	6.689.700,00	(10.300,00)	99,85		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.700.000,00	6.689.700,00	(10.300,00)	99,85		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.100.000,00	2.027.800,00	(72.200,00)	96,56		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	2.100.000,00	2.027.800,00	(72.200,00)	96,56		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.027.800,00	(72.200,00)	96,56		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.034.355.000,00	1.978.954.641,00	(55.400.359,00)	97,28		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.022.055.000,00	1.966.667.269,00	(55.387.731,00)	97,26		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.022.055.000,00	1.966.667.269,00	(55.387.731,00)	97,26		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.022.055.000,00	1.966.667.269,00	(55.387.731,00)	97,26		
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12.300.000,00	12.287.372,00	(12.628,00)	99,90		
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	12.300.000,00	12.287.372,00	(12.628,00)	99,90		
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	11.420.000,00	11.420.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	880.000,00	867.372,00	(12.628,00)	98,57		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	31.280.000,00	31.189.600,00	(90.400,00)	99,71		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.100.000,00	2.095.700,00	(4.300,00)	99,80		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.100.000,00	2.095.700,00	(4.300,00)	99,80		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.095.700,00	(4.300,00)	99,80		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.500.000,00	13.490.000,00	(10.000,00)	99,93		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	13.500.000,00	13.490.000,00	(10.000,00)	99,93		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	13.490.000,00	(10.000,00)	99,93		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.050.000,00	3.049.800,00	(200,00)	99,99		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	3.050.000,00	3.049.800,00	(200,00)	99,99		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.050.000,00	3.049.800,00	(200,00)	99,99		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	7.350.000,00	7.295.400,00	(54.600,00)	99,26		
01.2.06.07.5.1	BELANJA OPERASI	7.350.000,00	7.295.400,00	(54.600,00)	99,26		
01.2.06.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.350.000,00	7.295.400,00	(54.600,00)	99,26		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.500.000,00	1.480.000,00	(20.000,00)	98,67		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.480.000,00	(20.000,00)	98,67		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.480.000,00	(20.000,00)	98,67		
01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.100.000,00	2.098.700,00	(1.300,00)	99,94		
01.2.06.10.5.1	BELANJA OPERASI	2.100.000,00	2.098.700,00	(1.300,00)	99,94		
01.2.06.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.098.700,00	(1.300,00)	99,94		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.957.000,00	53.669.154,00	(2.287.846,00)	95,91		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000,00	495.000,00	(5.000,00)	99,00		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	500.000,00	495.000,00	(5.000,00)	99,00		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	495.000,00	(5.000,00)	99,00		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.935.000,00	32.678.504,00	(2.256.496,00)	93,54		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	34.935.000,00	32.678.504,00	(2.256.496,00)	93,54		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.935.000,00	32.678.504,00	(2.256.496,00)	93,54		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20.522.000,00	20.495.650,00	(26.350,00)	99,87		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	20.522.000,00	20.495.650,00	(26.350,00)	99,87		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.522.000,00	20.495.650,00	(26.350,00)	99,87		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44.000.000,00	43.769.950,00	(230.050,00)	99,48		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.000.000,00	34.769.950,00	(230.050,00)	99,34		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	34.769.950,00	(230.050,00)	99,34		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	34.769.950,00	(230.050,00)	99,34		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
	Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
01.2.09.11.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	50.550.000,00	50.506.322,00	(43.678,00)	99,91		
02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	50.550.000,00	50.506.322,00	(43.678,00)	99,91		
02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	50.550.000,00	50.506.322,00	(43.678,00)	99,91		
02.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	50.550.000,00	50.506.322,00	(43.678,00)	99,91		
02.2.04.02.5.1.01	Belanja Pegawai	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	100,00		
02.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.530.000,00	48.486.322,00	(43.678,00)	99,91		
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	10.449.000,00	10.448.600,00	(400,00)	100,00		
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	10.449.000,00	10.448.600,00	(400,00)	100,00		
05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	10.449.000,00	10.448.600,00	(400,00)	100,00		
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	10.449.000,00	10.448.600,00	(400,00)	100,00		
05.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	505.000,00	505.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.944.000,00	9.943.600,00	(400,00)	100,00		
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	142.942.000,00	142.552.163,00	(389.837,00)	99,73		
06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	142.942.000,00	142.552.163,00	(389.837,00)	99,73		
06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	19.200.000,00	19.112.307,00	(87.693,00)	99,54		
06.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	19.200.000,00	19.112.307,00	(87.693,00)	99,54		
06.2.01.03.5.1.01	Belanja Pegawai	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.780.000,00	16.692.307,00	(87.693,00)	99,48		
06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	3.000.000,00	2.982.000,00	(18.000,00)	99,40		
06.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	2.982.000,00	(18.000,00)	99,40		
06.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.982.000,00	(18.000,00)	99,40		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
06.2.01.09	Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	10.560.000,00	10.511.700,00	(48.300,00)	99,54		
06.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	10.560.000,00	10.511.700,00	(48.300,00)	99,54		
06.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.560.000,00	10.511.700,00	(48.300,00)	99,54		
06.2.01.11	Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6.000.000,00	5.952.656,00	(47.344,00)	99,21		
06.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	5.952.656,00	(47.344,00)	99,21		
06.2.01.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	5.952.656,00	(47.344,00)	99,21		
06.2.01.13	Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	18.234.000,00	18.216.000,00	(18.000,00)	99,90		
06.2.01.13.5.1	BELANJA OPERASI	18.234.000,00	18.216.000,00	(18.000,00)	99,90		
06.2.01.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.234.000,00	18.216.000,00	(18.000,00)	99,90		
06.2.01.16	Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	79.648.000,00	79.486.800,00	(161.200,00)	99,80		
06.2.01.16.5.1	BELANJA OPERASI	79.648.000,00	79.486.800,00	(161.200,00)	99,80		
06.2.01.16.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.648.000,00	79.486.800,00	(161.200,00)	99,80		
06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	6.300.000,00	6.290.700,00	(9.300,00)	99,85		
06.2.01.17.5.1	BELANJA OPERASI	6.300.000,00	6.290.700,00	(9.300,00)	99,85		
06.2.01.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000,00	6.290.700,00	(9.300,00)	99,85		
	SURPLUS / DEFISIT	(2.377.333.000,00)	(2.318.727.930,00)	58.605.070,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(2.377.333.000,00)	(2.318.727.930,00)	58.605.070,00	0		





PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN

SKPD : 7-01.0-00.0-00.22 KECAMATAN GOMBONG

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	272.505.000,00	266.432.400,00	(6.072.600,00)	97,77		
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	272.505.000,00	266.432.400,00	(6.072.600,00)	97,77		
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	272.505.000,00	266.432.400,00	(6.072.600,00)	97,77		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	5.197.651.815,00	5.041.053.928,00	(156.597.887,00)	96,99		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.556.940.815,00	3.406.035.828,00	(150.904.987,00)	95,76		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	56.883.000,00	56.818.900,00	(64.100,00)	99,89		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	52.810.000,00	52.752.600,00	(57.400,00)	99,89		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	52.810.000,00	52.752.600,00	(57.400,00)	99,89		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.810.000,00	52.752.600,00	(57.400,00)	99,89		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.073.000,00	4.066.300,00	(6.700,00)	99,84		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	4.073.000,00	4.066.300,00	(6.700,00)	99,84		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.073.000,00	4.066.300,00	(6.700,00)	99,84		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.225.310.815,00	3.077.077.790,00	(148.233.025,00)	95,40		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.182.575.815,00	3.034.367.990,00	(148.207.825,00)	95,34		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.182.575.815,00	3.034.367.990,00	(148.207.825,00)	95,34		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	3.182.575.815,00	3.034.367.990,00	(148.207.825,00)	95,34		
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	42.735.000,00	42.709.800,00	(25.200,00)	99,94		
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	42.735.000,00	42.709.800,00	(25.200,00)	99,94		
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	25.900.000,00	25.900.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.835.000,00	16.809.800,00	(25.200,00)	99,85		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	74.984.000,00	74.368.900,00	(615.100,00)	99,18		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.200.000,00	7.177.500,00	(22.500,00)	99,69		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	7.200.000,00	7.177.500,00	(22.500,00)	99,69		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	7.177.500,00	(22.500,00)	99,69		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23.200.000,00	23.147.000,00	(53.000,00)	99,77		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	23.200.000,00	23.147.000,00	(53.000,00)	99,77		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.200.000,00	23.147.000,00	(53.000,00)	99,77		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.500.000,00	10.499.800,00	(200,00)	100,00		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	10.500.000,00	10.499.800,00	(200,00)	100,00		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	10.499.800,00	(200,00)	100,00		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.500.000,00	5.498.000,00	(2.000,00)	99,96		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	5.500.000,00	5.498.000,00	(2.000,00)	99,96		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	5.498.000,00	(2.000,00)	99,96		
01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	25.610.000,00	25.411.400,00	(198.600,00)	99,22		
01.2.06.07.5.1	BELANJA OPERASI	25.469.000,00	25.272.400,00	(196.600,00)	99,23		
01.2.06.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.469.000,00	25.272.400,00	(196.600,00)	99,23		
01.2.06.07.5.2	BELANJA MODAL	141.000,00	139.000,00	(2.000,00)	98,58		
01.2.06.07.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	141.000,00	139.000,00	(2.000,00)	98,58		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.776.000,00	1.480.000,00	(296.000,00)	83,33		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	1.776.000,00	1.480.000,00	(296.000,00)	83,33		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.776.000,00	1.480.000,00	(296.000,00)	83,33		
01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.198.000,00	1.155.200,00	(42.800,00)	96,43		
01.2.06.10.5.1	BELANJA OPERASI	1.198.000,00	1.155.200,00	(42.800,00)	96,43		
01.2.06.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.198.000,00	1.155.200,00	(42.800,00)	96,43		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	35.658.000,00	35.214.000,00	(444.000,00)	98,75		
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.878.000,00	30.454.000,00	(424.000,00)	98,63		
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	30.878.000,00	30.454.000,00	(424.000,00)	98,63		
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.878.000,00	30.454.000,00	(424.000,00)	98,63		
01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.780.000,00	4.760.000,00	(20.000,00)	99,58		
01.2.07.10.5.2	BELANJA MODAL	4.780.000,00	4.760.000,00	(20.000,00)	99,58		
01.2.07.10.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.780.000,00	4.760.000,00	(20.000,00)	99,58		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74.318.000,00	73.537.068,00	(780.932,00)	98,95		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	4.983.000,00	(17.000,00)	99,66		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.983.000,00	(17.000,00)	99,66		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.983.000,00	(17.000,00)	99,66		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.000.000,00	38.297.588,00	(702.412,00)	98,20		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	39.000.000,00	38.297.588,00	(702.412,00)	98,20		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.000.000,00	38.297.588,00	(702.412,00)	98,20		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	30.318.000,00	30.256.480,00	(61.520,00)	99,80		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	30.318.000,00	30.256.480,00	(61.520,00)	99,80		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.318.000,00	30.256.480,00	(61.520,00)	99,80		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89.787.000,00	89.019.170,00	(767.830,00)	99,14		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	28.333.000,00	28.140.170,00	(192.830,00)	99,32		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	28.333.000,00	28.140.170,00	(192.830,00)	99,32		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.333.000,00	28.140.170,00	(192.830,00)	99,32		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.466.000,00	12.411.400,00	(54.600,00)	99,56		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	12.466.000,00	12.411.400,00	(54.600,00)	99,56		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.466.000,00	12.411.400,00	(54.600,00)	99,56		
01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	48.988.000,00	48.467.600,00	(520.400,00)	98,94		
01.2.09.11.5.1	BELANJA OPERASI	48.988.000,00	48.467.600,00	(520.400,00)	98,94		
01.2.09.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.988.000,00	48.467.600,00	(520.400,00)	98,94		
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	47.164.000,00	47.154.300,00	(9.700,00)	99,98		
02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	47.164.000,00	47.154.300,00	(9.700,00)	99,98		
02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	47.164.000,00	47.154.300,00	(9.700,00)	99,98		
02.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	47.164.000,00	47.154.300,00	(9.700,00)	99,98		
02.2.04.02.5.1.01	Belanja Pegawai	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00		
02.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.464.000,00	44.454.300,00	(9.700,00)	99,98		
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.449.777.000,00	1.444.415.300,00	(5.361.700,00)	99,63		
03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.449.777.000,00	1.444.415.300,00	(5.361.700,00)	99,63		
03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	20.120.000,00	19.911.200,00	(208.800,00)	98,96		
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	20.120.000,00	19.911.200,00	(208.800,00)	98,96		
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.120.000,00	19.911.200,00	(208.800,00)	98,96		
03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.105.498.000,00	1.101.164.400,00	(4.333.600,00)	99,61		
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.105.498.000,00	1.101.164.400,00	(4.333.600,00)	99,61		
03.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	10.450.000,00	10.370.000,00	(80.000,00)	99,23		
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.095.048.000,00	1.090.794.400,00	(4.253.600,00)	99,61		
03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	321.141.000,00	320.328.700,00	(812.300,00)	99,75		
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	321.141.000,00	320.328.700,00	(812.300,00)	99,75		
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	321.141.000,00	320.328.700,00	(812.300,00)	99,75		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	3.018.000,00	3.011.000,00	(7.000,00)	99,77		
03.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	3.018.000,00	3.011.000,00	(7.000,00)	99,77		
03.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.018.000,00	3.011.000,00	(7.000,00)	99,77		
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	27.958.000,00	27.955.700,00	(2.300,00)	99,99		
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	27.958.000,00	27.955.700,00	(2.300,00)	99,99		
05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	27.958.000,00	27.955.700,00	(2.300,00)	99,99		
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	27.958.000,00	27.955.700,00	(2.300,00)	99,99		
05.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	505.000,00	505.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.453.000,00	27.450.700,00	(2.300,00)	99,99		
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	115.812.000,00	115.492.800,00	(319.200,00)	99,72		
06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	115.812.000,00	115.492.800,00	(319.200,00)	99,72		
06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10.577.000,00	10.575.700,00	(1.300,00)	99,99		
06.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	10.577.000,00	10.575.700,00	(1.300,00)	99,99		
06.2.01.03.5.1.01	Belanja Pegawai	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.557.000,00	8.555.700,00	(1.300,00)	99,98		
06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1.000.000,00	992.400,00	(7.600,00)	99,24		
06.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	992.400,00	(7.600,00)	99,24		
06.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	992.400,00	(7.600,00)	99,24		
06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	840.000,00	825.000,00	(15.000,00)	98,21		
06.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	840.000,00	825.000,00	(15.000,00)	98,21		
06.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	840.000,00	825.000,00	(15.000,00)	98,21		
06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	4.538.000,00	4.536.200,00	(1.800,00)	99,96		
06.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	4.538.000,00	4.536.200,00	(1.800,00)	99,96		
06.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.538.000,00	4.536.200,00	(1.800,00)	99,96		
06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.552.000,00	4.551.400,00	(600,00)	99,99		
06.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	4.552.000,00	4.551.400,00	(600,00)	99,99		
06.2.01.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.552.000,00	4.551.400,00	(600,00)	99,99		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	17.930.000,00	17.929.700,00	(300,00)	100,00		
06.2.01.13.5.1	BELANJA OPERASI	17.930.000,00	17.929.700,00	(300,00)	100,00		
06.2.01.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.930.000,00	17.929.700,00	(300,00)	100,00		
06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	73.407.000,00	73.115.000,00	(292.000,00)	99,60		
06.2.01.16.5.1	BELANJA OPERASI	73.407.000,00	73.115.000,00	(292.000,00)	99,60		
06.2.01.16.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.407.000,00	73.115.000,00	(292.000,00)	99,60		
06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	2.968.000,00	2.967.400,00	(600,00)	99,98		
06.2.01.17.5.1	BELANJA OPERASI	2.968.000,00	2.967.400,00	(600,00)	99,98		
06.2.01.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.968.000,00	2.967.400,00	(600,00)	99,98		
	SURPLUS / DEFISIT	(4.925.146.815,00)	(4.774.621.528,00)	150.525.287,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(4.925.146.815,00)	(4.774.621.528,00)	150.525.287,00	0		





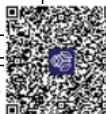
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN

SKPD : 7-01.0-00.0-00.23 KECAMATAN KARANGANYAR

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	400.000.000,00	425.681.550,00	25.681.550,00	106,42		
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	400.000.000,00	425.681.550,00	25.681.550,00	106,42		
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	400.000.000,00	425.681.550,00	25.681.550,00	106,42		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	9.300.692.000,00	8.723.868.859,00	(576.823.141,00)	93,80		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.340.773.000,00	4.837.557.089,00	(503.215.911,00)	90,58		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.578.000,00	22.806.200,00	(771.800,00)	96,73		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.426.000,00	15.024.800,00	(401.200,00)	97,40		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	15.426.000,00	15.024.800,00	(401.200,00)	97,40		
01.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	100,00		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.406.000,00	13.004.800,00	(401.200,00)	97,01		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.152.000,00	7.781.400,00	(370.600,00)	95,45		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	8.152.000,00	7.781.400,00	(370.600,00)	95,45		
01.2.01.07.5.1.01	Belanja Pegawai	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	100,00		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.132.000,00	5.761.400,00	(370.600,00)	93,96		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.977.441.000,00	4.490.504.154,00	(486.936.846,00)	90,22		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.932.821.000,00	4.448.249.924,00	(484.571.076,00)	90,18		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.932.821.000,00	4.448.249.924,00	(484.571.076,00)	90,18		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	4.932.821.000,00	4.448.249.924,00	(484.571.076,00)	90,18		
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	44.620.000,00	42.254.230,00	(2.365.770,00)	94,70		
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	44.620.000,00	42.254.230,00	(2.365.770,00)	94,70		
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	29.075.000,00	27.820.000,00	(1.255.000,00)	95,68		
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.545.000,00	14.434.230,00	(1.110.770,00)	92,85		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	105.193.000,00	103.928.400,00	(1.264.600,00)	98,80		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.842.000,00	11.767.400,00	(74.600,00)	99,37		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	9.842.000,00	9.767.400,00	(74.600,00)	99,24		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.842.000,00	9.767.400,00	(74.600,00)	99,24		
01.2.06.01.5.2	BELANJA MODAL	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.01.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.543.000,00	26.057.400,00	(485.600,00)	98,17		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	26.543.000,00	26.057.400,00	(485.600,00)	98,17		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.543.000,00	26.057.400,00	(485.600,00)	98,17		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.075.000,00	17.062.600,00	(12.400,00)	99,93		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	17.075.000,00	17.062.600,00	(12.400,00)	99,93		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.075.000,00	17.062.600,00	(12.400,00)	99,93		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.716.000,00	9.457.000,00	(259.000,00)	97,33		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	9.716.000,00	9.457.000,00	(259.000,00)	97,33		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.716.000,00	9.457.000,00	(259.000,00)	97,33		
01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	34.818.000,00	34.516.200,00	(301.800,00)	99,13		
01.2.06.07.5.1	BELANJA OPERASI	34.818.000,00	34.516.200,00	(301.800,00)	99,13		
01.2.06.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.818.000,00	34.516.200,00	(301.800,00)	99,13		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	740.000,00	740.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	740.000,00	740.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	740.000,00	740.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.459.000,00	4.327.800,00	(131.200,00)	97,06		
01.2.06.10.5.1	BELANJA OPERASI	4.459.000,00	4.327.800,00	(131.200,00)	97,06		
01.2.06.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.459.000,00	4.327.800,00	(131.200,00)	97,06		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	45.788.000,00	44.886.000,00	(902.000,00)	98,03		
01.2.07.05	Pengadaan Mebel	3.350.000,00	3.320.000,00	(30.000,00)	99,10		
01.2.07.05.5.2	BELANJA MODAL	3.350.000,00	3.320.000,00	(30.000,00)	99,10		
01.2.07.05.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.350.000,00	3.320.000,00	(30.000,00)	99,10		
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42.438.000,00	41.566.000,00	(872.000,00)	97,95		
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	42.438.000,00	41.566.000,00	(872.000,00)	97,95		
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.438.000,00	41.566.000,00	(872.000,00)	97,95		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	112.119.000,00	102.177.375,00	(9.941.625,00)	91,13		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.750.000,00	9.702.000,00	(1.048.000,00)	90,25		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	10.750.000,00	9.702.000,00	(1.048.000,00)	90,25		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.750.000,00	9.702.000,00	(1.048.000,00)	90,25		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	69.732.000,00	61.120.575,00	(8.611.425,00)	87,65		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	69.732.000,00	61.120.575,00	(8.611.425,00)	87,65		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.732.000,00	61.120.575,00	(8.611.425,00)	87,65		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	31.637.000,00	31.354.800,00	(282.200,00)	99,11		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	31.637.000,00	31.354.800,00	(282.200,00)	99,11		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.637.000,00	31.354.800,00	(282.200,00)	99,11		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	76.654.000,00	73.254.960,00	(3.399.040,00)	95,57		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.083.000,00	37.908.160,00	(2.174.840,00)	94,57		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	40.083.000,00	37.908.160,00	(2.174.840,00)	94,57		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.083.000,00	37.908.160,00	(2.174.840,00)	94,57		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.571.000,00	20.516.000,00	(1.055.000,00)	95,11		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	21.571.000,00	20.516.000,00	(1.055.000,00)	95,11		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.571.000,00	20.516.000,00	(1.055.000,00)	95,11		
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000,00	14.830.800,00	(169.200,00)	98,87		
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	14.830.800,00	(169.200,00)	98,87		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.830.800,00	(169.200,00)	98,87		
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	70.694.000,00	70.638.600,00	(55.400,00)	99,92		
02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	70.694.000,00	70.638.600,00	(55.400,00)	99,92		
02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	70.694.000,00	70.638.600,00	(55.400,00)	99,92		
02.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	70.694.000,00	70.638.600,00	(55.400,00)	99,92		
02.2.04.02.5.1.01	Belanja Pegawai	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	100,00		
02.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.684.000,00	69.628.600,00	(55.400,00)	99,92		
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.820.048.000,00	3.748.413.520,00	(71.634.480,00)	98,12		
03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3.820.048.000,00	3.748.413.520,00	(71.634.480,00)	98,12		
03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	42.671.000,00	39.158.800,00	(3.512.200,00)	91,77		
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	42.671.000,00	39.158.800,00	(3.512.200,00)	91,77		
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.671.000,00	39.158.800,00	(3.512.200,00)	91,77		
03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3.276.931.000,00	3.222.498.362,00	(54.432.638,00)	98,34		
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	2.912.631.000,00	2.861.318.862,00	(51.312.138,00)	98,24		
03.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	20.665.000,00	20.365.000,00	(300.000,00)	98,55		
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.891.966.000,00	2.840.953.862,00	(51.012.138,00)	98,24		
03.2.02.02.5.2	BELANJA MODAL	364.300.000,00	361.179.500,00	(3.120.500,00)	99,14		
03.2.02.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.02.02.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	86.600.000,00	85.454.000,00	(1.146.000,00)	98,68		
03.2.02.02.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	275.000.000,00	273.025.500,00	(1.974.500,00)	99,28		
03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	493.816.000,00	480.512.758,00	(13.303.242,00)	97,31		
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	471.460.000,00	460.692.758,00	(10.767.242,00)	97,72		
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	471.460.000,00	460.692.758,00	(10.767.242,00)	97,72		
03.2.02.03.5.2	BELANJA MODAL	22.356.000,00	19.820.000,00	(2.536.000,00)	88,66		
03.2.02.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.356.000,00	19.820.000,00	(2.536.000,00)	88,66		
03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	6.630.000,00	6.243.600,00	(386.400,00)	94,17		
03.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	6.630.000,00	6.243.600,00	(386.400,00)	94,17		
03.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.630.000,00	6.243.600,00	(386.400,00)	94,17		
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.571.000,00	7.176.000,00	(395.000,00)	94,78		
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.571.000,00	7.176.000,00	(395.000,00)	94,78		
05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	7.571.000,00	7.176.000,00	(395.000,00)	94,78		
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	7.571.000,00	7.176.000,00	(395.000,00)	94,78		
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.571.000,00	7.176.000,00	(395.000,00)	94,78		
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	61.606.000,00	60.083.650,00	(1.522.350,00)	97,53		
06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	61.606.000,00	60.083.650,00	(1.522.350,00)	97,53		
06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8.030.000,00	7.913.800,00	(116.200,00)	98,55		
06.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	8.030.000,00	7.913.800,00	(116.200,00)	98,55		
06.2.01.03.5.1.01	Belanja Pegawai	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.010.000,00	5.893.800,00	(116.200,00)	98,07		
06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1.679.000,00	1.659.000,00	(20.000,00)	98,81		
06.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	1.679.000,00	1.659.000,00	(20.000,00)	98,81		
06.2.01.09.5.1.01	Belanja Pegawai	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	669.000,00	649.000,00	(20.000,00)	97,01		
06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.430.000,00	2.414.800,00	(15.200,00)	99,37		
06.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	2.430.000,00	2.414.800,00	(15.200,00)	99,37		
06.2.01.11.5.1.01	Belanja Pegawai	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	100,00		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
06.2.01.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.420.000,00	1.404.800,00	(15.200,00)	98,93		
06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1.706.000,00	1.604.900,00	(101.100,00)	94,07		
06.2.01.13.5.1	BELANJA OPERASI	1.706.000,00	1.604.900,00	(101.100,00)	94,07		
06.2.01.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.706.000,00	1.604.900,00	(101.100,00)	94,07		
06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	47.761.000,00	46.491.150,00	(1.269.850,00)	97,34		
06.2.01.16.5.1	BELANJA OPERASI	47.761.000,00	46.491.150,00	(1.269.850,00)	97,34		
06.2.01.16.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.761.000,00	46.491.150,00	(1.269.850,00)	97,34		
	SURPLUS / DEFISIT	(8.900.692.000,00)	(8.298.187.309,00)	602.504.691,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(8.900.692.000,00)	(8.298.187.309,00)	602.504.691,00	0		





PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN

SKPD : 7-01.0-00.0-00.24 KECAMATAN KARANGGAYAM

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	2.183.771.000,00	2.058.730.425,00	(125.040.575,00)	94,27		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.896.004.000,00	1.776.820.525,00	(119.183.475,00)	93,71		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.715.000,00	33.538.600,00	(176.400,00)	99,48		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.647.000,00	29.551.600,00	(95.400,00)	99,68		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	29.647.000,00	29.551.600,00	(95.400,00)	99,68		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.647.000,00	29.551.600,00	(95.400,00)	99,68		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.068.000,00	3.987.000,00	(81.000,00)	98,01		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	4.068.000,00	3.987.000,00	(81.000,00)	98,01		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.068.000,00	3.987.000,00	(81.000,00)	98,01		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.741.583.000,00	1.627.365.732,00	(114.217.268,00)	93,44		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.725.581.000,00	1.619.720.589,00	(105.860.411,00)	93,87		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.725.581.000,00	1.619.720.589,00	(105.860.411,00)	93,87		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.725.581.000,00	1.619.720.589,00	(105.860.411,00)	93,87		
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	16.002.000,00	7.645.143,00	(8.356.857,00)	47,78		
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	16.002.000,00	7.645.143,00	(8.356.857,00)	47,78		
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	7.060.000,00	7.060.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.942.000,00	585.143,00	(8.356.857,00)	6,54		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	44.547.000,00	44.172.400,00	(374.600,00)	99,16		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.058.000,00	4.055.200,00	(2.800,00)	99,93		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.058.000,00	4.055.200,00	(2.800,00)	99,93		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.058.000,00	4.055.200,00	(2.800,00)	99,93		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.100.000,00	14.729.900,00	(370.100,00)	97,55		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	15.100.000,00	14.729.900,00	(370.100,00)	97,55		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.04.5.1.01	Belanja Pegawai	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.080.000,00	12.709.900,00	(370.100,00)	97,17		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.648.000,00	7.647.700,00	(300,00)	100,00		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	7.648.000,00	7.647.700,00	(300,00)	100,00		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.648.000,00	7.647.700,00	(300,00)	100,00		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	13.892.000,00	13.890.800,00	(1.200,00)	99,99		
01.2.06.07.5.1	BELANJA OPERASI	13.892.000,00	13.890.800,00	(1.200,00)	99,99		
01.2.06.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.892.000,00	13.890.800,00	(1.200,00)	99,99		
01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.849.000,00	1.848.800,00	(200,00)	99,99		
01.2.06.10.5.1	BELANJA OPERASI	1.849.000,00	1.848.800,00	(200,00)	99,99		
01.2.06.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.849.000,00	1.848.800,00	(200,00)	99,99		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51.880.000,00	47.636.902,00	(4.243.098,00)	91,82		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.255.000,00	2.255.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.255.000,00	2.255.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.255.000,00	2.255.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.997.000,00	12.754.402,00	(4.242.598,00)	75,04		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	16.997.000,00	12.754.402,00	(4.242.598,00)	75,04		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.997.000,00	12.754.402,00	(4.242.598,00)	75,04		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	32.628.000,00	32.627.500,00	(500,00)	100,00		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	32.628.000,00	32.627.500,00	(500,00)	100,00		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.628.000,00	32.627.500,00	(500,00)	100,00		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.279.000,00	24.106.891,00	(172.109,00)	99,29		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	18.999.000,00	18.834.791,00	(164.209,00)	99,14		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	18.999.000,00	18.834.791,00	(164.209,00)	99,14		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.999.000,00	18.834.791,00	(164.209,00)	99,14		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	980.000,00	972.100,00	(7.900,00)	99,19		
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	980.000,00	972.100,00	(7.900,00)	99,19		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	980.000,00	972.100,00	(7.900,00)	99,19		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	85.890.000,00	85.240.000,00	(650.000,00)	99,24		
02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	85.890.000,00	85.240.000,00	(650.000,00)	99,24		
02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	85.890.000,00	85.240.000,00	(650.000,00)	99,24		
02.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	85.890.000,00	85.240.000,00	(650.000,00)	99,24		
02.2.04.02.5.1.01	Belanja Pegawai	3.020.000,00	3.020.000,00	0,00	100,00		
02.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.870.000,00	82.220.000,00	(650.000,00)	99,22		
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	12.797.000,00	12.397.000,00	(400.000,00)	96,87		
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	12.797.000,00	12.397.000,00	(400.000,00)	96,87		
05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	12.797.000,00	12.397.000,00	(400.000,00)	96,87		
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	12.797.000,00	12.397.000,00	(400.000,00)	96,87		
05.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.777.000,00	10.377.000,00	(400.000,00)	96,29		
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	189.080.000,00	184.272.900,00	(4.807.100,00)	97,46		
06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	189.080.000,00	184.272.900,00	(4.807.100,00)	97,46		
06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	21.390.000,00	20.898.500,00	(491.500,00)	97,70		
06.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	21.390.000,00	20.898.500,00	(491.500,00)	97,70		
06.2.01.03.5.1.01	Belanja Pegawai	1.210.000,00	1.210.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.180.000,00	19.688.500,00	(491.500,00)	97,56		
06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	3.091.000,00	3.001.000,00	(90.000,00)	97,09		
06.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	3.091.000,00	3.001.000,00	(90.000,00)	97,09		
06.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.091.000,00	3.001.000,00	(90.000,00)	97,09		
06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	4.097.000,00	4.047.000,00	(50.000,00)	98,78		
06.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	4.097.000,00	4.047.000,00	(50.000,00)	98,78		
06.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.097.000,00	4.047.000,00	(50.000,00)	98,78		
06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	17.221.000,00	16.860.300,00	(360.700,00)	97,91		
06.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	17.221.000,00	16.860.300,00	(360.700,00)	97,91		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
06.2.01.09.5.1.01	Belanja Pegawai	1.210.000,00	1.210.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.011.000,00	15.650.300,00	(360.700,00)	97,75		
06.2.01.11	Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9.634.000,00	9.547.900,00	(86.100,00)	99,11		
06.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	9.634.000,00	9.547.900,00	(86.100,00)	99,11		
06.2.01.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.634.000,00	9.547.900,00	(86.100,00)	99,11		
06.2.01.13	Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	21.110.000,00	20.515.000,00	(595.000,00)	97,18		
06.2.01.13.5.1	BELANJA OPERASI	21.110.000,00	20.515.000,00	(595.000,00)	97,18		
06.2.01.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.110.000,00	20.515.000,00	(595.000,00)	97,18		
06.2.01.16	Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	105.535.000,00	102.561.200,00	(2.973.800,00)	97,18		
06.2.01.16.5.1	BELANJA OPERASI	105.535.000,00	102.561.200,00	(2.973.800,00)	97,18		
06.2.01.16.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.535.000,00	102.561.200,00	(2.973.800,00)	97,18		
06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	7.002.000,00	6.842.000,00	(160.000,00)	97,71		
06.2.01.17.5.1	BELANJA OPERASI	7.002.000,00	6.842.000,00	(160.000,00)	97,71		
06.2.01.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.002.000,00	6.842.000,00	(160.000,00)	97,71		
	SURPLUS / DEFISIT	(2.183.771.000,00)	(2.058.730.425,00)	125.040.575,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(2.183.771.000,00)	(2.058.730.425,00)	125.040.575,00	0		





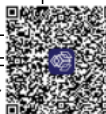
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN

SKPD : 7-01.0-00.0-00.25 KECAMATAN SADANG

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	2.290.266.000,00	2.162.518.369,00	(127.747.631,00)	94,42		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.091.024.000,00	1.967.805.994,00	(123.218.006,00)	94,11		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.185.000,00	5.117.200,00	(67.800,00)	98,69		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.810.000,00	3.807.200,00	(2.800,00)	99,93		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.810.000,00	3.807.200,00	(2.800,00)	99,93		
01.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.395.000,00	1.395.000,00	0,00	100,00		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.415.000,00	2.412.200,00	(2.800,00)	99,88		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.375.000,00	1.310.000,00	(65.000,00)	95,27		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	1.375.000,00	1.310.000,00	(65.000,00)	95,27		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.375.000,00	1.310.000,00	(65.000,00)	95,27		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.946.539.000,00	1.825.962.494,00	(120.576.506,00)	93,81		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.935.321.000,00	1.815.621.240,00	(119.699.760,00)	93,81		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.935.321.000,00	1.815.621.240,00	(119.699.760,00)	93,81		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.935.321.000,00	1.815.621.240,00	(119.699.760,00)	93,81		
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11.218.000,00	10.341.254,00	(876.746,00)	92,18		
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	11.218.000,00	10.341.254,00	(876.746,00)	92,18		
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	4.485.000,00	4.485.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.733.000,00	5.856.254,00	(876.746,00)	86,98		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	38.609.000,00	37.404.000,00	(1.205.000,00)	96,88		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.739.000,00	3.739.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.739.000,00	3.739.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.739.000,00	3.739.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.505.000,00	14.342.450,00	(162.550,00)	98,88		



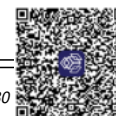
KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	14.505.000,00	14.342.450,00	(162.550,00)	98,88		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.505.000,00	14.342.450,00	(162.550,00)	98,88		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.575.000,00	3.537.425,00	(37.575,00)	98,95		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	3.575.000,00	3.537.425,00	(37.575,00)	98,95		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.575.000,00	3.537.425,00	(37.575,00)	98,95		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.884.000,00	2.880.000,00	(4.000,00)	99,86		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	2.884.000,00	2.880.000,00	(4.000,00)	99,86		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.884.000,00	2.880.000,00	(4.000,00)	99,86		
01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	10.708.000,00	9.857.600,00	(850.400,00)	92,06		
01.2.06.07.5.1	BELANJA OPERASI	10.708.000,00	9.857.600,00	(850.400,00)	92,06		
01.2.06.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.708.000,00	9.857.600,00	(850.400,00)	92,06		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.440.000,00	1.435.325,00	(4.675,00)	99,68		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	1.440.000,00	1.435.325,00	(4.675,00)	99,68		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.440.000,00	1.435.325,00	(4.675,00)	99,68		
01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.758.000,00	1.612.200,00	(145.800,00)	91,71		
01.2.06.10.5.1	BELANJA OPERASI	1.758.000,00	1.612.200,00	(145.800,00)	91,71		
01.2.06.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.758.000,00	1.612.200,00	(145.800,00)	91,71		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.944.000,00	5.805.600,00	(138.400,00)	97,67		
01.2.07.05	Pengadaan Mebel	5.064.000,00	5.064.000,00	0,00	100,00		
01.2.07.05.5.2	BELANJA MODAL	5.064.000,00	5.064.000,00	0,00	100,00		
01.2.07.05.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.064.000,00	5.064.000,00	0,00	100,00		
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	880.000,00	741.600,00	(138.400,00)	84,27		
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	880.000,00	741.600,00	(138.400,00)	84,27		
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	880.000,00	741.600,00	(138.400,00)	84,27		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39.953.000,00	38.975.900,00	(977.100,00)	97,55		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.540.000,00	17.568.800,00	(971.200,00)	94,76		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	18.540.000,00	17.568.800,00	(971.200,00)	94,76		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.540.000,00	17.568.800,00	(971.200,00)	94,76		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20.313.000,00	20.307.100,00	(5.900,00)	99,97		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	20.313.000,00	20.307.100,00	(5.900,00)	99,97		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.313.000,00	20.307.100,00	(5.900,00)	99,97		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54.794.000,00	54.540.800,00	(253.200,00)	99,54		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	27.039.000,00	26.785.800,00	(253.200,00)	99,06		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	27.039.000,00	26.785.800,00	(253.200,00)	99,06		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.039.000,00	26.785.800,00	(253.200,00)	99,06		
01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	2.575.000,00	2.575.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.05.5.1	BELANJA OPERASI	2.575.000,00	2.575.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.575.000,00	2.575.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.680.000,00	5.680.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	5.680.000,00	5.680.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.680.000,00	5.680.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.09.5.2	BELANJA MODAL	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.09.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.11.5.1	BELANJA OPERASI	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00		
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	79.041.000,00	77.880.300,00	(1.160.700,00)	98,53		
02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	79.041.000,00	77.880.300,00	(1.160.700,00)	98,53		
02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	79.041.000,00	77.880.300,00	(1.160.700,00)	98,53		
02.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	79.041.000,00	77.880.300,00	(1.160.700,00)	98,53		
02.2.04.02.5.1.01	Belanja Pegawai	5.580.000,00	5.580.000,00	0,00	100,00		
02.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.461.000,00	72.300.300,00	(1.160.700,00)	98,42		
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	14.584.000,00	14.569.650,00	(14.350,00)	99,90		
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	14.584.000,00	14.569.650,00	(14.350,00)	99,90		
05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	14.584.000,00	14.569.650,00	(14.350,00)	99,90		
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	14.584.000,00	14.569.650,00	(14.350,00)	99,90		
05.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	505.000,00	505.000,00	0,00	100,00		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.079.000,00	14.064.650,00	(14.350,00)	99,90		
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	105.617.000,00	102.262.425,00	(3.354.575,00)	96,82		
06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	105.617.000,00	102.262.425,00	(3.354.575,00)	96,82		
06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	20.740.000,00	19.839.650,00	(900.350,00)	95,66		
06.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	20.740.000,00	19.839.650,00	(900.350,00)	95,66		
06.2.01.03.5.1.01	Belanja Pegawai	2.790.000,00	2.790.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.950.000,00	17.049.650,00	(900.350,00)	94,98		
06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5.453.000,00	5.119.900,00	(333.100,00)	93,89		
06.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	5.453.000,00	5.119.900,00	(333.100,00)	93,89		
06.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.453.000,00	5.119.900,00	(333.100,00)	93,89		
06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.876.000,00	4.622.675,00	(253.325,00)	94,80		
06.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	4.876.000,00	4.622.675,00	(253.325,00)	94,80		
06.2.01.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.876.000,00	4.622.675,00	(253.325,00)	94,80		
06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	17.102.000,00	15.773.725,00	(1.328.275,00)	92,23		
06.2.01.13.5.1	BELANJA OPERASI	17.102.000,00	15.773.725,00	(1.328.275,00)	92,23		
06.2.01.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.102.000,00	15.773.725,00	(1.328.275,00)	92,23		
06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	51.902.000,00	51.368.200,00	(533.800,00)	98,97		
06.2.01.16.5.1	BELANJA OPERASI	51.902.000,00	51.368.200,00	(533.800,00)	98,97		
06.2.01.16.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.902.000,00	51.368.200,00	(533.800,00)	98,97		
06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	5.544.000,00	5.538.275,00	(5.725,00)	99,90		
06.2.01.17.5.1	BELANJA OPERASI	5.544.000,00	5.538.275,00	(5.725,00)	99,90		
06.2.01.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.544.000,00	5.538.275,00	(5.725,00)	99,90		
	SURPLUS / DEFISIT	(2.290.266.000,00)	(2.162.518.369,00)	127.747.631,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(2.290.266.000,00)	(2.162.518.369,00)	127.747.631,00	0		





PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN

SKPD : 7-01.0-00.0-00.26 KECAMATAN KARANGSAMBUNG

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	2.460.010.000,00	2.334.241.941,00	(125.768.059,00)	94,89		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.234.404.000,00	2.109.481.589,00	(124.922.411,00)	94,41		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.200.000,00	14.162.600,00	(37.400,00)	99,74		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.200.000,00	8.195.800,00	(4.200,00)	99,95		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	8.200.000,00	8.195.800,00	(4.200,00)	99,95		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.200.000,00	8.195.800,00	(4.200,00)	99,95		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.000.000,00	5.966.800,00	(33.200,00)	99,45		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	5.966.800,00	(33.200,00)	99,45		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	5.966.800,00	(33.200,00)	99,45		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.023.789.000,00	1.899.546.003,00	(124.242.997,00)	93,86		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.008.289.000,00	1.884.478.132,00	(123.810.868,00)	93,84		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.008.289.000,00	1.884.478.132,00	(123.810.868,00)	93,84		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.008.289.000,00	1.884.478.132,00	(123.810.868,00)	93,84		
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15.500.000,00	15.067.871,00	(432.129,00)	97,21		
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	15.500.000,00	15.067.871,00	(432.129,00)	97,21		
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	10.190.000,00	10.190.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.310.000,00	4.877.871,00	(432.129,00)	91,86		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	49.836.000,00	49.734.750,00	(101.250,00)	99,80		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000,00	5.998.000,00	(2.000,00)	99,97		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	5.998.000,00	(2.000,00)	99,97		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	5.998.000,00	(2.000,00)	99,97		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.000.000,00	16.984.000,00	(16.000,00)	99,91		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	17.000.000,00	16.984.000,00	(16.000,00)	99,91		



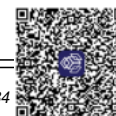
KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	16.984.000,00	(16.000,00)	99,91		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	12.000.000,00	11.931.300,00	(68.700,00)	99,43		
01.2.06.07.5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	11.931.300,00	(68.700,00)	99,43		
01.2.06.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	11.931.300,00	(68.700,00)	99,43		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.836.000,00	1.821.450,00	(14.550,00)	99,21		
01.2.06.10.5.1	BELANJA OPERASI	1.836.000,00	1.821.450,00	(14.550,00)	99,21		
01.2.06.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.836.000,00	1.821.450,00	(14.550,00)	99,21		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	23.057.000,00	22.785.000,00	(272.000,00)	98,82		
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.057.000,00	22.785.000,00	(272.000,00)	98,82		
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	23.057.000,00	22.785.000,00	(272.000,00)	98,82		
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.057.000,00	22.785.000,00	(272.000,00)	98,82		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48.522.000,00	48.450.612,00	(71.388,00)	99,85		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000,00	23.980.112,00	(19.888,00)	99,92		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	24.000.000,00	23.980.112,00	(19.888,00)	99,92		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	23.980.112,00	(19.888,00)	99,92		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	21.522.000,00	21.470.500,00	(51.500,00)	99,76		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	21.522.000,00	21.470.500,00	(51.500,00)	99,76		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.522.000,00	21.470.500,00	(51.500,00)	99,76		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.000.000,00	74.802.624,00	(197.376,00)	99,74		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.000.000,00	36.953.324,00	(46.676,00)	99,87		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	37.000.000,00	36.953.324,00	(46.676,00)	99,87		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.000.000,00	36.953.324,00	(46.676,00)	99,87		
01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	6.000.000,00	5.930.000,00	(70.000,00)	98,83		
01.2.09.05.5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	5.930.000,00	(70.000,00)	98,83		
01.2.09.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	5.930.000,00	(70.000,00)	98,83		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000,00	14.919.300,00	(80.700,00)	99,46		
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	14.919.300,00	(80.700,00)	99,46		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.919.300,00	(80.700,00)	99,46		
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	52.792.000,00	52.748.400,00	(43.600,00)	99,92		
02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	52.792.000,00	52.748.400,00	(43.600,00)	99,92		
02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	52.792.000,00	52.748.400,00	(43.600,00)	99,92		
02.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	52.792.000,00	52.748.400,00	(43.600,00)	99,92		
02.2.04.02.5.1.01	Belanja Pegawai	2.140.000,00	2.140.000,00	0,00	100,00		
02.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.652.000,00	50.608.400,00	(43.600,00)	99,91		
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	8.000.000,00	7.979.900,00	(20.100,00)	99,75		
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	8.000.000,00	7.979.900,00	(20.100,00)	99,75		
05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	8.000.000,00	7.979.900,00	(20.100,00)	99,75		
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	8.000.000,00	7.979.900,00	(20.100,00)	99,75		
05.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.980.000,00	5.959.900,00	(20.100,00)	99,66		
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	164.814.000,00	164.032.052,00	(781.948,00)	99,53		
06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	164.814.000,00	164.032.052,00	(781.948,00)	99,53		
06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12.000.000,00	11.968.100,00	(31.900,00)	99,73		
06.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	11.968.100,00	(31.900,00)	99,73		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
06.2.01.03.5.1.01	Belanja Pegawai	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.980.000,00	9.948.100,00	(31.900,00)	99,68		
06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	8.500.000,00	8.452.100,00	(47.900,00)	99,44		
06.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	8.500.000,00	8.452.100,00	(47.900,00)	99,44		
06.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	8.452.100,00	(47.900,00)	99,44		
06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	9.000.000,00	8.888.800,00	(111.200,00)	98,76		
06.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	9.000.000,00	8.888.800,00	(111.200,00)	98,76		
06.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	8.888.800,00	(111.200,00)	98,76		
06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	6.000.000,00	5.984.800,00	(15.200,00)	99,75		
06.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	5.984.800,00	(15.200,00)	99,75		
06.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	5.984.800,00	(15.200,00)	99,75		
06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8.000.000,00	7.993.200,00	(6.800,00)	99,92		
06.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	8.000.000,00	7.993.200,00	(6.800,00)	99,92		
06.2.01.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	7.993.200,00	(6.800,00)	99,92		
06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	22.000.000,00	21.924.200,00	(75.800,00)	99,66		
06.2.01.13.5.1	BELANJA OPERASI	22.000.000,00	21.924.200,00	(75.800,00)	99,66		
06.2.01.13.5.1.01	Belanja Pegawai	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.980.000,00	19.904.200,00	(75.800,00)	99,62		
06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	92.314.000,00	91.868.300,00	(445.700,00)	99,52		
06.2.01.16.5.1	BELANJA OPERASI	92.314.000,00	91.868.300,00	(445.700,00)	99,52		
06.2.01.16.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.314.000,00	91.868.300,00	(445.700,00)	99,52		
06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	7.000.000,00	6.952.552,00	(47.448,00)	99,32		
06.2.01.17.5.1	BELANJA OPERASI	7.000.000,00	6.952.552,00	(47.448,00)	99,32		
06.2.01.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	6.952.552,00	(47.448,00)	99,32		
	SURPLUS / DEFISIT	(2.460.010.000,00)	(2.334.241.941,00)	125.768.059,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(2.460.010.000,00)	(2.334.241.941,00)	125.768.059,00	0		





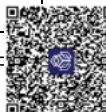
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

SKPD : 8-01.0-00.0-00.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	32.980.657.581,00	32.682.663.076,00	(297.994.505,00)	99,10		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.591.242.581,00	3.458.436.561,00	(132.806.020,00)	96,30		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.845.000,00	15.599.500,00	(245.500,00)	98,45		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.855.000,00	13.649.500,00	(205.500,00)	98,52		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	13.855.000,00	13.649.500,00	(205.500,00)	98,52		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.855.000,00	13.649.500,00	(205.500,00)	98,52		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.990.000,00	1.950.000,00	(40.000,00)	97,99		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	1.990.000,00	1.950.000,00	(40.000,00)	97,99		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.990.000,00	1.950.000,00	(40.000,00)	97,99		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.068.415.581,00	2.939.769.479,00	(128.646.102,00)	95,81		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.038.727.581,00	2.910.159.571,00	(128.568.010,00)	95,77		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.038.727.581,00	2.910.159.571,00	(128.568.010,00)	95,77		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	3.038.727.581,00	2.910.159.571,00	(128.568.010,00)	95,77		
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	29.688.000,00	29.609.908,00	(78.092,00)	99,74		
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	29.688.000,00	29.609.908,00	(78.092,00)	99,74		
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	17.010.000,00	17.010.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.678.000,00	12.599.908,00	(78.092,00)	99,38		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.900.000,00	25.561.700,00	(338.300,00)	98,69		
01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25.900.000,00	25.561.700,00	(338.300,00)	98,69		
01.2.05.09.5.1	BELANJA OPERASI	25.900.000,00	25.561.700,00	(338.300,00)	98,69		
01.2.05.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.900.000,00	25.561.700,00	(338.300,00)	98,69		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	113.939.000,00	113.511.105,00	(427.895,00)	99,62		



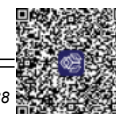
KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000,00	3.999.000,00	(1.000,00)	99,98		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	3.999.000,00	(1.000,00)	99,98		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	3.999.000,00	(1.000,00)	99,98		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.428.000,00	10.421.000,00	(7.000,00)	99,93		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	10.428.000,00	10.421.000,00	(7.000,00)	99,93		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.428.000,00	10.421.000,00	(7.000,00)	99,93		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.500.000,00	7.497.400,00	(2.600,00)	99,97		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	7.500.000,00	7.497.400,00	(2.600,00)	99,97		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.497.400,00	(2.600,00)	99,97		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.500.000,00	8.499.800,00	(200,00)	100,00		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	8.500.000,00	8.499.800,00	(200,00)	100,00		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	8.499.800,00	(200,00)	100,00		
01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	12.000.000,00	11.954.050,00	(45.950,00)	99,62		
01.2.06.07.5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	11.954.050,00	(45.950,00)	99,62		
01.2.06.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	11.954.050,00	(45.950,00)	99,62		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	63.334.000,00	63.166.955,00	(167.045,00)	99,74		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	63.334.000,00	63.166.955,00	(167.045,00)	99,74		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.334.000,00	63.166.955,00	(167.045,00)	99,74		
01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8.177.000,00	7.972.900,00	(204.100,00)	97,50		
01.2.06.10.5.1	BELANJA OPERASI	8.177.000,00	7.972.900,00	(204.100,00)	97,50		
01.2.06.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.177.000,00	7.972.900,00	(204.100,00)	97,50		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	160.835.000,00	160.311.000,00	(524.000,00)	99,67		
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41.728.000,00	41.375.000,00	(353.000,00)	99,15		
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	41.728.000,00	41.375.000,00	(353.000,00)	99,15		
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.728.000,00	41.375.000,00	(353.000,00)	99,15		
01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	119.107.000,00	118.936.000,00	(171.000,00)	99,86		
01.2.07.10.5.1	BELANJA OPERASI	902.000,00	881.000,00	(21.000,00)	97,67		
01.2.07.10.5.1.01	Belanja Pegawai	650.000,00	650.000,00	0,00	100,00		
01.2.07.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	252.000,00	231.000,00	(21.000,00)	91,67		
01.2.07.10.5.2	BELANJA MODAL	118.205.000,00	118.055.000,00	(150.000,00)	99,87		
01.2.07.10.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	118.205.000,00	118.055.000,00	(150.000,00)	99,87		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	96.912.000,00	94.617.986,00	(2.294.014,00)	97,63		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00	2.479.000,00	(21.000,00)	99,16		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.479.000,00	(21.000,00)	99,16		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.479.000,00	(21.000,00)	99,16		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	47.000.000,00	45.525.886,00	(1.474.114,00)	96,86		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	47.000.000,00	45.525.886,00	(1.474.114,00)	96,86		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.000.000,00	45.525.886,00	(1.474.114,00)	96,86		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	47.412.000,00	46.613.100,00	(798.900,00)	98,31		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	47.412.000,00	46.613.100,00	(798.900,00)	98,31		
01.2.08.04.5.1.01	Belanja Pegawai	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.012.000,00	46.213.100,00	(798.900,00)	98,30		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	109.396.000,00	109.065.791,00	(330.209,00)	99,70		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	59.321.000,00	59.203.791,00	(117.209,00)	99,80		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	59.321.000,00	59.203.791,00	(117.209,00)	99,80		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.321.000,00	59.203.791,00	(117.209,00)	99,80		
01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	12.475.000,00	12.430.000,00	(45.000,00)	99,64		
01.2.09.05.5.1	BELANJA OPERASI	12.475.000,00	12.430.000,00	(45.000,00)	99,64		
01.2.09.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.475.000,00	12.430.000,00	(45.000,00)	99,64		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.000.000,00	11.955.000,00	(45.000,00)	99,63		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	11.955.000,00	(45.000,00)	99,63		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	11.955.000,00	(45.000,00)	99,63		
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.600.000,00	25.477.000,00	(123.000,00)	99,52		
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	25.600.000,00	25.477.000,00	(123.000,00)	99,52		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.600.000,00	25.477.000,00	(123.000,00)	99,52		
02	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	415.000.000,00	410.838.741,00	(4.161.259,00)	99,00		
02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	415.000.000,00	410.838.741,00	(4.161.259,00)	99,00		
02.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	415.000.000,00	410.838.741,00	(4.161.259,00)	99,00		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	415.000.000,00	410.838.741,00	(4.161.259,00)	99,00		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	415.000.000,00	410.838.741,00	(4.161.259,00)	99,00		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	25.692.385.000,00	25.562.296.650,00	(130.088.350,00)	99,49		
03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	25.692.385.000,00	25.562.296.650,00	(130.088.350,00)	99,49		
03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	25.692.385.000,00	25.562.296.650,00	(130.088.350,00)	99,49		
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	25.692.385.000,00	25.562.296.650,00	(130.088.350,00)	99,49		
03.2.01.03.5.1.01	Belanja Pegawai	4.420.000,00	4.420.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.271.829.000,00	1.267.460.650,00	(4.368.350,00)	99,66		
03.2.01.03.5.1.05	Belanja Hibah	24.416.136.000,00	24.290.416.000,00	(125.720.000,00)	99,49		
04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	237.341.000,00	236.958.200,00	(382.800,00)	99,84		
04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	237.341.000,00	236.958.200,00	(382.800,00)	99,84		
04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	233.300.000,00	232.917.800,00	(382.200,00)	99,84		
04.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	233.300.000,00	232.917.800,00	(382.200,00)	99,84		
04.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.300.000,00	32.917.800,00	(382.200,00)	98,85		
04.2.01.03.5.1.05	Belanja Hibah	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	4.041.000,00	4.040.400,00	(600,00)	99,99		
04.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	4.041.000,00	4.040.400,00	(600,00)	99,99		
04.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.041.000,00	4.040.400,00	(600,00)	99,99		
05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	1.722.842.000,00	1.713.797.770,00	(9.044.230,00)	99,48		
05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1.722.842.000,00	1.713.797.770,00	(9.044.230,00)	99,48		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1.614.215.000,00	1.611.526.170,00	(2.688.830,00)	99,83		
05.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.614.215.000,00	1.611.526.170,00	(2.688.830,00)	99,83		
05.2.01.03.5.1.01	Belanja Pegawai	5.730.000,00	5.730.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.608.485.000,00	1.605.796.170,00	(2.688.830,00)	99,83		
05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	108.627.000,00	102.271.600,00	(6.355.400,00)	94,15		
05.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	108.627.000,00	102.271.600,00	(6.355.400,00)	94,15		
05.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.627.000,00	102.271.600,00	(6.355.400,00)	94,15		
06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.321.847.000,00	1.300.335.154,00	(21.511.846,00)	98,37		
06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1.321.847.000,00	1.300.335.154,00	(21.511.846,00)	98,37		
06.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	35.000.000,00	34.338.697,00	(661.303,00)	98,11		
06.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	34.338.697,00	(661.303,00)	98,11		
06.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	34.338.697,00	(661.303,00)	98,11		
06.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	64.000.000,00	62.986.610,00	(1.013.390,00)	98,42		
06.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	64.000.000,00	62.986.610,00	(1.013.390,00)	98,42		
06.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.000.000,00	62.986.610,00	(1.013.390,00)	98,42		

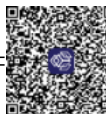


KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	210.000.000,00	205.816.903,00	(4.183.097,00)	98,01		
06.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	210.000.000,00	205.816.903,00	(4.183.097,00)	98,01		
06.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	210.000.000,00	205.816.903,00	(4.183.097,00)	98,01		
06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	200.000.000,00	199.951.604,00	(48.396,00)	99,98		
06.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	199.951.604,00	(48.396,00)	99,98		
06.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	199.951.604,00	(48.396,00)	99,98		
06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12.847.000,00	12.706.390,00	(140.610,00)	98,91		
06.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	12.847.000,00	12.706.390,00	(140.610,00)	98,91		
06.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.847.000,00	12.706.390,00	(140.610,00)	98,91		
06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	800.000.000,00	784.534.950,00	(15.465.050,00)	98,07		
06.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	800.000.000,00	784.534.950,00	(15.465.050,00)	98,07		
06.2.01.06.5.1.01	Belanja Pegawai	3.820.000,00	3.820.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	796.180.000,00	780.714.950,00	(15.465.050,00)	98,06		
	SURPLUS / DEFISIT	(32.980.657.581,00)	(32.682.663.076,00)	297.994.505,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(32.980.657.581,00)	(32.682.663.076,00)	297.994.505,00	0		

BUPATI KEBUMEN

ttd.

ARIF SUGIYANTO





PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
REKAPITULASI REALISASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN

Tahun Anggaran 2023

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.577.189.204.269,00	220.902.063.000,00	0,00	0,00
		1.529.855.083.435,00	210.915.644.302,00	0,00	0,00
1.01	PENDIDIKAN	941.985.526.727,00	52.208.788.000,00	0,00	0,00
		919.328.506.899,00	50.535.428.912,00	0,00	0,00
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	771.807.912.727,00	558.544.000,00	0,00	0,00
		750.110.707.267,00	543.105.000,00	0,00	0,00
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	255.319.000,00	0,00	0,00	0,00
		253.439.930,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	110.540.000,00	0,00	0,00	0,00
		110.151.450,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	144.779.000,00	0,00	0,00	0,00
		143.288.480,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	769.116.510.727,00	0,00	0,00	0,00
		747.481.377.710,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	768.377.040.727,00	0,00	0,00	0,00
		746.756.881.450,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	739.470.000,00	0,00	0,00	0,00
		724.496.260,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		39.897.650,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		39.897.650,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	602.622.000,00	0,00	0,00	0,00
		601.172.605,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		118.683.850,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	160.023.000,00	0,00	0,00	0,00
		159.991.918,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		150.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		34.975.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130.599.000,00	0,00	0,00	0,00
		130.569.837,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.952.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25.000.000,00	558.544.000,00	0,00	0,00
		24.717.500,00	543.105.000,00	0,00	0,00
1.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0,00	31.788.000,00	0,00	0,00
		0,00	29.440.000,00	0,00	0,00
1.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	526.756.000,00	0,00	0,00
		0,00	513.665.000,00	0,00	0,00
1.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		24.717.500,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	965.481.000,00	0,00	0,00	0,00
		947.956.924,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		35.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	530.530.000,00	0,00	0,00	0,00
		514.372.974,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	399.951.000,00	0,00	0,00	0,00
		398.583.950,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	802.980.000,00	0,00	0,00	0,00
		762.144.948,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	162.980.000,00	0,00	0,00	0,00
		159.345.868,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	640.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		602.799.080,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	170.177.614.000,00	51.650.244.000,00	0,00	0,00
		169.217.799.632,00	49.992.323.912,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	85.924.714.000,00	37.268.045.000,00	0,00	0,00
		85.362.352.397,00	36.015.414.759,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	41.123.000,00	6.177.479.000,00	0,00	0,00
		35.639.700,00	5.868.203.972,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	326.404.000,00	8.348.957.000,00	0,00	0,00
		313.558.343,00	7.839.103.728,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	17.030.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	25.398.000,00	1.254.602.000,00	0,00	0,00
		22.682.466,00	850.155.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		96.972.200,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	830.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		827.756.020,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	235.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		233.542.711,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	139.940.000,00	0,00	0,00	0,00
		132.649.280,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	305.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		301.620.752,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	7.453.975.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.288.794.410,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	96.206.000,00	0,00	0,00	0,00
		94.617.760,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	183.175.000,00	0,00	0,00	0,00
		173.607.932,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	76.188.493.000,00	21.467.007.000,00	0,00	0,00
		75.840.910.823,00	21.440.922.059,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	46.775.622.000,00	14.137.699.000,00	0,00	0,00
		46.588.592.223,00	13.745.164.153,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	166.181.000,00	3.092.910.000,00	0,00	0,00
		134.403.167,00	3.032.385.532,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	11.296.000,00	3.029.064.000,00	0,00	0,00
		10.158.999,00	2.844.672.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	758.798.000,00	0,00	0,00	0,00
		758.776.750,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	203.530.000,00	0,00	0,00	0,00
		202.063.753,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	645.140.000,00	0,00	0,00	0,00
		636.784.700,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	184.431.000,00	0,00	0,00	0,00
		183.924.130,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.01.02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2.383.480.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.363.749.466,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	112.380.000,00	0,00	0,00	0,00
		107.281.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1.139.279.000,00	7.232.000,00	0,00	0,00
		1.138.614.024,00	7.232.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	41.171.107.000,00	8.008.493.000,00	0,00	0,00
		41.052.836.234,00	7.860.874.621,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	34.570.705.000,00	244.500.000,00	0,00	0,00
		34.427.266.239,00	231.745.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.198.764.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.182.917.899,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.06	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	456.500.000,00	172.500.000,00	0,00	0,00
		448.253.000,00	166.945.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	764.802.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00
		763.563.600,00	64.800.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	229.857.000,00	0,00	0,00	0,00
		225.927.376,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	9.630.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.529.900,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	10.293.208.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.198.098.064,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	178.744.000,00	0,00	0,00	0,00
		177.268.400,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	21.439.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		21.421.708.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	2.906.573.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.839.588.773,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.04.05	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.498.200,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.04.10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan	91.286.000,00	0,00	0,00	0,00
		90.259.700,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal/Kesetaraan	89.404.000,00	0,00	0,00	0,00
		89.044.230,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	200.025.000,00	0,00	0,00	0,00
		193.589.972,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan	165.858.000,00	0,00	0,00	0,00
		165.485.671,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	2.353.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.294.711.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02	KESEHATAN	512.222.403.272,00	53.733.517.000,00	0,00	0,00
		492.729.427.261,00	50.093.915.753,00	0,00	0,00
1.02.00	Non Program	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.00.0.00	Non Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.00.0.00.00	Non Sub Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	413.400.609.272,00	17.304.914.000,00	0,00	0,00
		397.306.831.401,00	15.438.654.870,00	0,00	0,00
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		74.743.500,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		49.883.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		24.860.500,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	131.389.973.272,00	0,00	0,00	0,00
		129.432.176.590,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	130.990.082.272,00	0,00	0,00	0,00
		129.049.286.175,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	399.891.000,00	0,00	0,00	0,00
		382.890.415,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		44.975.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		44.975.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	286.100.000,00	0,00	0,00	0,00
		285.967.279,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		34.970.600,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	57.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		57.500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		49.952.460,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.585.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		79.964.500,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		59.994.719,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	290.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	285.783.000,00	0,00	0,00
1.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	49.980.000,00	0,00	0,00
1.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	240.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	235.803.000,00	0,00	0,00
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	621.360.000,00	0,00	0,00	0,00
		518.023.708,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.447.500,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	487.660.000,00	0,00	0,00	0,00
		384.634.208,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	131.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		130.942.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	490.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		487.472.495,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		198.036.495,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.950.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		99.888.500,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		179.597.500,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	280.493.176.000,00	17.014.914.000,00	0,00	0,00
		266.463.472.829,00	15.152.871.870,00	0,00	0,00
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	280.493.176.000,00	17.014.914.000,00	0,00	0,00
		266.463.472.829,00	15.152.871.870,00	0,00	0,00



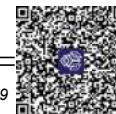
KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	91.724.456.000,00	36.403.603.000,00	0,00	0,00
		88.521.932.675,00	34.630.390.883,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	9.946.245.000,00	36.403.603.000,00	0,00	0,00
		9.942.958.163,00	34.630.390.883,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	41.760.000,00	0,00	0,00	0,00
		41.687.634,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	15.050.000,00	7.445.950.000,00	0,00	0,00
		15.049.000,00	7.201.415.269,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit	0,00	11.500.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	10.655.238.887,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	0,00	6.700.908.000,00	0,00	0,00
		0,00	6.443.263.916,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	500.180.000,00	0,00	0,00
		0,00	487.347.480,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	5.783.134.000,00	0,00	0,00
		0,00	5.732.380.783,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	4.473.431.000,00	0,00	0,00
		0,00	4.110.744.548,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	2.735.715.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.735.237.186,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	7.153.720.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.150.984.343,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	81.567.411.000,00	0,00	0,00	0,00
		78.371.100.699,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	3.368.541.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.268.202.803,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	88.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		87.894.200,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		34.692.900,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	1.819.869.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.761.339.800,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	531.560.000,00	0,00	0,00	0,00
		423.695.700,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	1.635.481.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.624.080.700,00	0,00	0,00	0,00



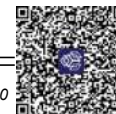
KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	778.940.000,00	0,00	0,00	0,00
		747.422.864,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		39.972.300,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		44.974.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	279.480.000,00	0,00	0,00	0,00
		264.518.223,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	448.279.000,00	0,00	0,00	0,00
		420.684.300,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	513.390.000,00	0,00	0,00	0,00
		501.810.508,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	64.079.000,00	0,00	0,00	0,00
		57.998.650,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		19.454.300,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	21.998.574.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.594.725.353,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	435.377.000,00	0,00	0,00	0,00
		426.467.300,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	792.352.000,00	0,00	0,00	0,00
		745.716.643,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2.717.290.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.668.444.580,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		19.678.748,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	322.780.000,00	0,00	0,00	0,00
		261.439.331,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	73.265.000,00	0,00	0,00	0,00
		71.481.724,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	152.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		151.928.800,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	5.122.148.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.709.514.033,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	34.967.431.000,00	0,00	0,00	0,00
		34.323.133.657,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		27.956.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	4.930.545.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.754.164.465,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	71.895.000,00	0,00	0,00	0,00
		71.811.263,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		69.997.900,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	104.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		93.674.154,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		29.990.500,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	63.935.000,00	0,00	0,00	0,00
		54.235.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		29.369.202,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		29.369.202,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	180.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		178.504.611,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	180.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		178.504.611,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	3.402.385.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.313.798.383,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		39.829.366,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.2.02.01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		39.829.366,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.362.385.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.273.969.017,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.362.385.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.273.969.017,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	548.172.000,00	0,00	0,00	0,00
		547.419.504,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	83.730.000,00	0,00	0,00	0,00
		83.611.677,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	83.730.000,00	0,00	0,00	0,00
		83.611.677,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	464.442.000,00	0,00	0,00	0,00
		463.807.827,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	464.442.000,00	0,00	0,00	0,00
		463.807.827,00	0,00	0,00	0,00
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	3.146.781.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
		3.039.445.298,00	24.870.000,00	0,00	0,00
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		65.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		65.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	45.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
		45.000.000,00	24.870.000,00	0,00	0,00
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	45.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
		45.000.000,00	24.870.000,00	0,00	0,00
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.036.781.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.929.445.298,00	0,00	0,00	0,00
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3.036.781.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.929.445.298,00	0,00	0,00	0,00
1.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	67.276.915.288,00	111.656.250.000,00	0,00	0,00
		64.212.630.941,00	107.141.949.337,00	0,00	0,00
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.479.873.000,00	443.447.000,00	0,00	0,00
		20.690.150.528,00	422.385.000,00	0,00	0,00
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	127.937.000,00	0,00	0,00	0,00
		125.909.250,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	47.017.000,00	0,00	0,00	0,00
		46.609.250,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80.920.000,00	0,00	0,00	0,00
		79.300.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.846.570.000,00	0,00	0,00	0,00
		19.073.238.240,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.107.744.000,00	0,00	0,00	0,00
		18.355.538.662,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	738.826.000,00	0,00	0,00	0,00
		717.699.578,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	264.367.000,00	4.190.000,00	0,00	0,00
		260.005.849,00	4.190.000,00	0,00	0,00
1.03.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	264.367.000,00	4.190.000,00	0,00	0,00
		260.005.849,00	4.190.000,00	0,00	0,00
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	47.983.000,00	0,00	0,00	0,00
		45.185.200,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	47.983.000,00	0,00	0,00	0,00
		45.185.200,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	307.066.000,00	0,00	0,00	0,00
		304.819.519,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40.100.000,00	0,00	0,00	0,00
		40.063.500,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		59.006.900,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		24.607.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.996.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		49.975.700,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	115.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		114.214.719,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6.966.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.955.700,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.743.000,00	439.257.000,00	0,00	0,00
		10.449.300,00	418.195.000,00	0,00	0,00
1.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	750.000,00	29.250.000,00	0,00	0,00
		730.000,00	28.800.000,00	0,00	0,00
1.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.993.000,00	410.007.000,00	0,00	0,00
		9.719.300,00	389.395.000,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	302.583.000,00	0,00	0,00	0,00
		299.156.315,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.988.500,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	209.583.000,00	0,00	0,00	0,00
		206.273.515,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	91.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		90.894.300,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	572.624.000,00	0,00	0,00	0,00
		571.386.855,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	368.260.000,00	0,00	0,00	0,00
		367.915.617,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	74.364.000,00	0,00	0,00	0,00
		74.239.238,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		129.232.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	7.061.661.000,00	8.362.394.000,00	0,00	0,00
		6.457.676.539,00	7.905.974.745,00	0,00	0,00
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	498.048.000,00	0,00	0,00	0,00
		487.273.184,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		53.732.500,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.2.01.49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	352.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		347.672.300,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.2.01.62	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	90.648.000,00	0,00	0,00	0,00
		85.868.384,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6.563.613.000,00	8.362.394.000,00	0,00	0,00
		5.970.403.355,00	7.905.974.745,00	0,00	0,00
1.03.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	900.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		445.984.400,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.2.02.07	Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah	3.180.000,00	1.670.820.000,00	0,00	0,00
		3.118.500,00	1.627.710.700,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.03.02.2.02.08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	625.000,00	249.375.000,00	0,00	0,00
		625.000,00	236.176.515,00	0,00	0,00
1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	122.735.000,00	6.385.287.000,00	0,00	0,00
		121.188.595,00	5.987.291.530,00	0,00	0,00
1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	4.915.709.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.809.954.570,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.2.02.26	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah	765.000,00	56.912.000,00	0,00	0,00
		664.500,00	54.796.000,00	0,00	0,00
1.03.02.2.02.28	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	620.599.000,00	0,00	0,00	0,00
		588.867.790,00	0,00	0,00	0,00
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	721.943.000,00	11.118.270.000,00	0,00	0,00
		120.595.600,00	10.787.667.242,00	0,00	0,00
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	721.943.000,00	11.118.270.000,00	0,00	0,00
		120.595.600,00	10.787.667.242,00	0,00	0,00
1.03.03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	600.000.000,00	8.256.976.000,00	0,00	0,00
		0,00	7.976.030.890,00	0,00	0,00
1.03.03.2.01.06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	0,00	2.500.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	2.455.623.952,00	0,00	0,00
1.03.03.2.01.14	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	121.943.000,00	0,00	0,00	0,00
		120.595.600,00	0,00	0,00	0,00
1.03.03.2.01.16	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	0,00	361.294.000,00	0,00	0,00
		0,00	356.012.400,00	0,00	0,00
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	3.549.185.000,00	1.912.493.000,00	0,00	0,00
		3.389.277.861,00	1.794.177.710,00	0,00	0,00
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.549.185.000,00	1.912.493.000,00	0,00	0,00
		3.389.277.861,00	1.794.177.710,00	0,00	0,00
1.03.06.2.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	2.988.013.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.945.640.441,00	0,00	0,00	0,00
1.03.06.2.01.12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	28.500.000,00	479.900.000,00	0,00	0,00
		26.456.428,00	467.901.254,00	0,00	0,00
1.03.06.2.01.14	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	147.407.000,00	1.432.593.000,00	0,00	0,00
		139.877.492,00	1.326.276.456,00	0,00	0,00
1.03.06.2.01.16	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	385.265.000,00	0,00	0,00	0,00
		277.303.500,00	0,00	0,00	0,00
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	2.343.120.000,00	1.956.887.000,00	0,00	0,00
		2.264.680.660,00	1.860.320.600,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	2.343.120.000,00	1.956.887.000,00	0,00	0,00
		2.264.680.660,00	1.860.320.600,00	0,00	0,00
1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	136.640.000,00	0,00	0,00	0,00
		135.467.831,00	0,00	0,00	0,00
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	25.898.000,00	1.956.887.000,00	0,00	0,00
		25.691.900,00	1.860.320.600,00	0,00	0,00
1.03.08.2.01.04	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	33.075.000,00	0,00	0,00	0,00
		31.730.100,00	0,00	0,00	0,00
1.03.08.2.01.05	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	51.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		50.056.929,00	0,00	0,00	0,00
1.03.08.2.01.09	Penilaian Terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	24.380.000,00	0,00	0,00	0,00
		21.998.600,00	0,00	0,00	0,00
1.03.08.2.01.13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	2.071.627.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.999.735.300,00	0,00	0,00	0,00
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	10.088.638.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.576.434.277,00	0,00	0,00	0,00
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	10.088.638.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.576.434.277,00	0,00	0,00	0,00
1.03.09.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	567.688.000,00	0,00	0,00	0,00
		561.399.700,00	0,00	0,00	0,00
1.03.09.2.01.05	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	9.520.950.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.015.034.577,00	0,00	0,00	0,00
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	21.366.788.288,00	87.847.634.000,00	0,00	0,00
		21.051.576.195,00	84.356.304.040,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	21.366.788.288,00	87.847.634.000,00	0,00	0,00
		21.051.576.195,00	84.356.304.040,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1.195.053.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.189.569.400,00	0,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01.02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	0,00	1.594.820.000,00	0,00	0,00
		0,00	1.400.551.240,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	587.079.000,00	0,00	0,00	0,00
		565.353.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	0,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	9.690.885.500,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01.06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	41.476.000,00	29.867.603.000,00	0,00	0,00
		41.343.971,00	28.872.904.250,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	0,00	37.810.211.000,00	0,00	0,00
		0,00	36.474.669.750,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	18.203.487.288,00	0,00	0,00	0,00
		17.929.658.723,00	0,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	0,00	3.925.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	3.769.425.200,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01.17	Pelebaran Jembatan	0,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	971.453.100,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	498.685.000,00	0,00	0,00	0,00
		489.280.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01.20	Pemeliharaan Berkala Jembatan	0,00	3.650.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	3.176.415.000,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01.22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	841.008.000,00	0,00	0,00	0,00
		836.371.101,00	0,00	0,00	0,00
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	99.699.000,00	0,00	0,00	0,00
		97.700.200,00	0,00	0,00	0,00
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	32.027.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.879.800,00	0,00	0,00	0,00
1.03.11.2.01.07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	32.027.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.879.800,00	0,00	0,00	0,00
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	67.672.000,00	0,00	0,00	0,00
		66.820.400,00	0,00	0,00	0,00
1.03.11.2.02.07	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	67.672.000,00	0,00	0,00	0,00
		66.820.400,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	566.008.000,00	15.125.000,00	0,00	0,00
		564.539.081,00	15.120.000,00	0,00	0,00
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	313.816.000,00	0,00	0,00	0,00
		313.359.938,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12.2.01.01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	83.232.000,00	0,00	0,00	0,00
		82.946.038,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	230.584.000,00	0,00	0,00	0,00
		230.413.900,00	0,00	0,00	0,00



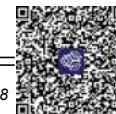
KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	91.848.000,00	0,00	0,00	0,00
		91.426.709,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	35.926.000,00	0,00	0,00	0,00
		35.710.800,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	29.622.000,00	0,00	0,00	0,00
		29.499.700,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12.2.02.03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	26.300.000,00	0,00	0,00	0,00
		26.216.209,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	113.217.000,00	0,00	0,00	0,00
		112.845.462,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	57.970.000,00	0,00	0,00	0,00
		57.787.600,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12.2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	55.247.000,00	0,00	0,00	0,00
		55.057.862,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	47.127.000,00	15.125.000,00	0,00	0,00
		46.906.972,00	15.120.000,00	0,00	0,00
1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	47.127.000,00	15.125.000,00	0,00	0,00
		46.906.972,00	15.120.000,00	0,00	0,00
1.04	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	20.087.137.000,00	1.372.027.000,00	0,00	0,00
		19.519.491.893,00	1.297.363.000,00	0,00	0,00
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.697.721.000,00	20.727.000,00	0,00	0,00
		6.183.067.539,00	20.645.000,00	0,00	0,00
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.463.000,00	0,00	0,00	0,00
		40.515.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24.367.000,00	0,00	0,00	0,00
		23.488.700,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.096.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.026.300,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.912.294.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.445.509.671,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.606.657.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.143.670.239,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	305.637.000,00	0,00	0,00	0,00
		301.839.432,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		38.051.300,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		38.051.300,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	178.497.000,00	0,00	0,00	0,00
		177.765.226,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.103.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.075.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.394.000,00	0,00	0,00	0,00
		24.863.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		49.959.100,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.995.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		39.895.200,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		49.977.926,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	970.000,00	20.727.000,00	0,00	0,00
		969.400,00	20.645.000,00	0,00	0,00
1.04.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	970.000,00	20.727.000,00	0,00	0,00
		969.400,00	20.645.000,00	0,00	0,00
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	146.414.000,00	0,00	0,00	0,00
		115.191.645,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	124.414.000,00	0,00	0,00	0,00
		93.271.145,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		18.920.500,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	378.083.000,00	0,00	0,00	0,00
		365.065.297,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	212.590.000,00	0,00	0,00	0,00
		202.272.297,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	6.693.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.550.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		29.991.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	128.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		126.252.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	533.801.000,00	0,00	0,00	0,00
		532.653.390,00	0,00	0,00	0,00



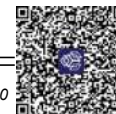
KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	31.036.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.917.876,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.2.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	31.036.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.917.876,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	502.765.000,00	0,00	0,00	0,00
		501.735.514,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	502.765.000,00	0,00	0,00	0,00
		501.735.514,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.415.286.000,00	723.000.000,00	0,00	0,00
		1.395.449.409,00	688.718.000,00	0,00	0,00
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.415.286.000,00	723.000.000,00	0,00	0,00
		1.395.449.409,00	688.718.000,00	0,00	0,00
1.04.03.2.02.03	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	1.212.590.000,00	723.000.000,00	0,00	0,00
		1.207.099.676,00	688.718.000,00	0,00	0,00
1.04.03.2.02.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	202.696.000,00	0,00	0,00	0,00
		188.349.733,00	0,00	0,00	0,00
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	2.130.900.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.100.372.754,00	0,00	0,00	0,00
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	2.130.900.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.100.372.754,00	0,00	0,00	0,00
1.04.04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	2.104.864.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.074.403.806,00	0,00	0,00	0,00
1.04.04.2.01.02	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	26.036.000,00	0,00	0,00	0,00
		25.968.948,00	0,00	0,00	0,00
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	9.309.429.000,00	628.300.000,00	0,00	0,00
		9.307.948.801,00	588.000.000,00	0,00	0,00
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	9.309.429.000,00	628.300.000,00	0,00	0,00
		9.307.948.801,00	588.000.000,00	0,00	0,00
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	8.708.473.000,00	628.300.000,00	0,00	0,00
		8.707.283.715,00	588.000.000,00	0,00	0,00



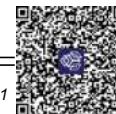
KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.04.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	600.956.000,00	0,00	0,00	0,00
		600.665.086,00	0,00	0,00	0,00
1.05	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	25.242.258.982,00	1.842.858.000,00	0,00	0,00
		24.120.386.722,00	1.758.647.000,00	0,00	0,00
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.507.413.955,00	12.990.000,00	0,00	0,00
		9.922.680.445,00	12.875.000,00	0,00	0,00
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		39.864.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		27.904.800,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.959.200,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.434.862.455,00	0,00	0,00	0,00
		7.883.021.808,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.201.688.455,00	0,00	0,00	0,00
		7.650.162.401,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	233.174.000,00	0,00	0,00	0,00
		232.859.407,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	354.892.000,00	0,00	0,00	0,00
		353.232.800,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	330.892.000,00	0,00	0,00	0,00
		329.232.800,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		24.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	352.704.000,00	0,00	0,00	0,00
		350.296.396,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		14.984.400,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	88.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		88.131.650,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		35.120.600,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.360.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.353.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	52.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		51.389.850,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	156.144.000,00	0,00	0,00	0,00
		154.939.296,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.05.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.377.600,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	47.010.000,00	12.990.000,00	0,00	0,00
		46.966.800,00	12.875.000,00	0,00	0,00
1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.010.000,00	12.990.000,00	0,00	0,00
		7.009.800,00	12.875.000,00	0,00	0,00
1.05.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		39.957.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	272.373.000,00	0,00	0,00	0,00
		258.983.452,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.404.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	170.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		157.239.752,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		23.753.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	74.773.000,00	0,00	0,00	0,00
		74.586.700,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.005.572.500,00	0,00	0,00	0,00
		990.315.189,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	314.321.500,00	0,00	0,00	0,00
		313.983.215,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		286.621.574,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.995.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		23.941.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	365.251.000,00	0,00	0,00	0,00
		363.774.400,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.777.394.027,00	55.441.000,00	0,00	0,00
		7.467.937.054,00	53.360.000,00	0,00	0,00
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	7.112.619.500,00	0,00	0,00	0,00
		6.828.051.791,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	4.350.311.500,00	0,00	0,00	0,00
		4.273.854.341,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.528.528.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.321.030.600,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	76.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		75.972.700,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.01.06	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.157.380.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.157.194.150,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	654.774.527,00	55.441.000,00	0,00	0,00
		630.108.794,00	53.360.000,00	0,00	0,00
1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	38.087.000,00	0,00	0,00	0,00
		37.980.120,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.02.02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	29.380.000,00	0,00	0,00	0,00
		29.289.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.02.03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	587.307.527,00	55.441.000,00	0,00	0,00
		562.839.674,00	53.360.000,00	0,00	0,00
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.776.469,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.776.469,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	5.025.975.000,00	413.682.000,00	0,00	0,00
		4.827.971.179,00	411.562.000,00	0,00	0,00
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	232.586.000,00	227.594.000,00	0,00	0,00
		231.328.215,00	226.662.000,00	0,00	0,00
1.05.03.2.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		74.494.500,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	157.586.000,00	227.594.000,00	0,00	0,00
		156.833.715,00	226.662.000,00	0,00	0,00
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.499.652.000,00	186.088.000,00	0,00	0,00
		1.482.931.748,00	184.900.000,00	0,00	0,00
1.05.03.2.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		49.617.400,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		98.859.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	435.740.000,00	0,00	0,00	0,00
		427.277.623,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	163.912.000,00	186.088.000,00	0,00	0,00
		161.055.800,00	184.900.000,00	0,00	0,00
1.05.03.2.02.05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		49.432.700,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		397.789.125,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		99.409.900,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.02.10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		199.490.200,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	2.329.237.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.167.282.545,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	2.029.237.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.993.671.156,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		73.739.989,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		99.871.400,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	964.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		946.428.671,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.04.02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		72.915.900,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.04.03	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		74.787.700,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.04.06	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	814.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		798.725.071,00	0,00	0,00	0,00
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.931.476.000,00	1.360.745.000,00	0,00	0,00
		1.901.798.044,00	1.280.850.000,00	0,00	0,00
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.879.780.000,00	1.360.745.000,00	0,00	0,00
		1.850.489.444,00	1.280.850.000,00	0,00	0,00
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.824.780.000,00	1.360.745.000,00	0,00	0,00
		1.795.577.844,00	1.280.850.000,00	0,00	0,00
1.05.04.2.01.03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		54.911.600,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	21.776.000,00	0,00	0,00	0,00
		21.759.600,00	0,00	0,00	0,00
1.05.04.2.02.01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	21.776.000,00	0,00	0,00	0,00
		21.759.600,00	0,00	0,00	0,00
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	29.920.000,00	0,00	0,00	0,00
		29.549.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	29.920.000,00	0,00	0,00	0,00
		29.549.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	SOSIAL	10.374.963.000,00	88.623.000,00	0,00	0,00
		9.944.639.719,00	88.340.300,00	0,00	0,00
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.478.267.000,00	76.237.000,00	0,00	0,00
		4.165.217.848,00	76.031.000,00	0,00	0,00
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	87.108.000,00	0,00	0,00	0,00
		85.971.500,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	67.108.000,00	0,00	0,00	0,00
		66.874.800,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		19.096.700,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.563.650.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.267.437.783,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.476.413.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.180.383.071,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	87.237.000,00	0,00	0,00	0,00
		87.054.712,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	48.904.000,00	0,00	0,00	0,00
		48.902.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	48.904.000,00	0,00	0,00	0,00
		48.902.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	184.792.000,00	2.671.000,00	0,00	0,00
		184.724.076,00	2.671.000,00	0,00	0,00
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.185.900,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.673.000,00	0,00	0,00	0,00
		49.663.900,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.140.000,00	0,00	0,00	0,00
		19.140.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.982.500,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.06.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	25.270.000,00	0,00	0,00	0,00
		25.247.400,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	58.776.000,00	0,00	0,00	0,00
		58.773.876,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	22.733.000,00	2.671.000,00	0,00	0,00
		22.730.500,00	2.671.000,00	0,00	0,00
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	565.000,00	73.566.000,00	0,00	0,00
		565.000,00	73.360.000,00	0,00	0,00
1.06.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	565.000,00	73.566.000,00	0,00	0,00
		565.000,00	73.360.000,00	0,00	0,00
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	249.680.000,00	0,00	0,00	0,00
		237.809.463,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.079.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.071.400,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	142.925.000,00	0,00	0,00	0,00
		131.640.663,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	104.676.000,00	0,00	0,00	0,00
		104.097.400,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	343.568.000,00	0,00	0,00	0,00
		339.808.026,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	144.042.000,00	0,00	0,00	0,00
		140.370.826,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.526.000,00	0,00	0,00	0,00
		24.468.400,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	175.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		174.968.800,00	0,00	0,00	0,00
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	38.030.000,00	0,00	0,00	0,00
		37.674.020,00	0,00	0,00	0,00
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	38.030.000,00	0,00	0,00	0,00
		37.674.020,00	0,00	0,00	0,00
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	28.030.000,00	0,00	0,00	0,00
		27.915.800,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.758.220,00	0,00	0,00	0,00
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	3.384.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.237.350,00	0,00	0,00	0,00
1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	3.384.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.237.350,00	0,00	0,00	0,00
1.06.03.2.01.01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	3.384.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.237.350,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.825.208.000,00	7.931.000,00	0,00	0,00
		1.819.970.786,00	7.931.000,00	0,00	0,00
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.293.253.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.289.746.350,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	844.145.000,00	0,00	0,00	0,00
		842.637.262,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		88.825.275,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	112.108.000,00	0,00	0,00	0,00
		111.470.273,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	190.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		189.943.640,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	37.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		36.927.800,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		19.942.100,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	531.955.000,00	7.931.000,00	0,00	0,00
		530.224.436,00	7.931.000,00	0,00	0,00
1.06.04.2.02.01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.02.03	Penyediaan Permakanan	275.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		274.066.436,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.02.04	Penyediaan Sandang	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		39.771.500,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	156.955.000,00	7.931.000,00	0,00	0,00
		156.554.000,00	7.931.000,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.06.04.2.02.14	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		39.832.500,00	0,00	0,00	0,00
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	3.240.994.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.136.613.405,00	0,00	0,00	0,00
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	3.240.994.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.136.613.405,00	0,00	0,00	0,00
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	212.118.000,00	0,00	0,00	0,00
		210.618.029,00	0,00	0,00	0,00
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	3.028.876.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.925.995.376,00	0,00	0,00	0,00
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	774.880.000,00	4.455.000,00	0,00	0,00
		767.726.310,00	4.378.300,00	0,00	0,00
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	633.821.000,00	4.455.000,00	0,00	0,00
		627.382.259,00	4.378.300,00	0,00	0,00
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	206.336.000,00	0,00	0,00	0,00
		205.750.311,00	0,00	0,00	0,00
1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	90.760.000,00	0,00	0,00	0,00
		89.880.250,00	0,00	0,00	0,00
1.06.06.2.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	165.419.000,00	4.455.000,00	0,00	0,00
		161.918.565,00	4.378.300,00	0,00	0,00
1.06.06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	126.790.000,00	0,00	0,00	0,00
		125.426.500,00	0,00	0,00	0,00
1.06.06.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	44.516.000,00	0,00	0,00	0,00
		44.406.633,00	0,00	0,00	0,00
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	141.059.000,00	0,00	0,00	0,00
		140.344.051,00	0,00	0,00	0,00
1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	43.028.000,00	0,00	0,00	0,00
		42.617.951,00	0,00	0,00	0,00
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	98.031.000,00	0,00	0,00	0,00
		97.726.100,00	0,00	0,00	0,00
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	14.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		14.200.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	14.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		14.200.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.07.2.01.03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	14.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		14.200.000,00	0,00	0,00	0,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	162.352.829.640,00	43.378.502.000,00	0,00	0,00
		157.598.870.717,00	42.335.136.226,00	0,00	0,00



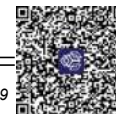
KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.07	TENAGA KERJA	1.195.892.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.192.905.819,00	0,00	0,00	0,00
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		49.917.960,00	0,00	0,00	0,00
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		49.917.960,00	0,00	0,00	0,00
2.07.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		49.917.960,00	0,00	0,00	0,00
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	456.152.000,00	0,00	0,00	0,00
		455.239.487,00	0,00	0,00	0,00
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	434.152.000,00	0,00	0,00	0,00
		433.280.687,00	0,00	0,00	0,00
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi	384.152.000,00	0,00	0,00	0,00
		383.545.287,00	0,00	0,00	0,00
2.07.03.2.01.02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		49.735.400,00	0,00	0,00	0,00
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		21.958.800,00	0,00	0,00	0,00
2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		21.958.800,00	0,00	0,00	0,00
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	532.464.000,00	0,00	0,00	0,00
		530.719.872,00	0,00	0,00	0,00
2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	278.285.000,00	0,00	0,00	0,00
		277.058.567,00	0,00	0,00	0,00
2.07.04.2.01.02	Pelayanan antar Kerja	171.049.000,00	0,00	0,00	0,00
		170.461.445,00	0,00	0,00	0,00
2.07.04.2.01.04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	32.236.000,00	0,00	0,00	0,00
		31.952.522,00	0,00	0,00	0,00
2.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		74.644.600,00	0,00	0,00	0,00
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	254.179.000,00	0,00	0,00	0,00
		253.661.305,00	0,00	0,00	0,00
2.07.04.2.04.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	85.564.000,00	0,00	0,00	0,00
		85.345.380,00	0,00	0,00	0,00
2.07.04.2.04.02	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	87.049.000,00	0,00	0,00	0,00
		86.821.866,00	0,00	0,00	0,00



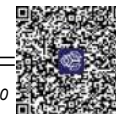
KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.07.04.2.04.03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	81.566.000,00	0,00	0,00	0,00
		81.494.059,00	0,00	0,00	0,00
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	157.276.000,00	0,00	0,00	0,00
		157.028.500,00	0,00	0,00	0,00
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	157.276.000,00	0,00	0,00	0,00
		157.028.500,00	0,00	0,00	0,00
2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	157.276.000,00	0,00	0,00	0,00
		157.028.500,00	0,00	0,00	0,00
2.08	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.202.084.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.189.189.229,00	0,00	0,00	0,00
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	592.281.000,00	0,00	0,00	0,00
		589.977.195,00	0,00	0,00	0,00
2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	71.385.000,00	0,00	0,00	0,00
		71.060.450,00	0,00	0,00	0,00
2.08.02.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	71.385.000,00	0,00	0,00	0,00
		71.060.450,00	0,00	0,00	0,00
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	520.896.000,00	0,00	0,00	0,00
		518.916.745,00	0,00	0,00	0,00
2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	520.896.000,00	0,00	0,00	0,00
		518.916.745,00	0,00	0,00	0,00
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	141.840.000,00	0,00	0,00	0,00
		139.640.250,00	0,00	0,00	0,00
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		68.984.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		68.984.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	71.840.000,00	0,00	0,00	0,00
		70.656.250,00	0,00	0,00	0,00
2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	31.840.000,00	0,00	0,00	0,00
		31.665.300,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		38.990.950,00	0,00	0,00	0,00
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	30.644.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.209.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.644.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.209.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30.644.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.209.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	31.996.000,00	0,00	0,00	0,00
		31.951.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	31.996.000,00	0,00	0,00	0,00
		31.951.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	31.996.000,00	0,00	0,00	0,00
		31.951.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	142.622.000,00	0,00	0,00	0,00
		140.637.600,00	0,00	0,00	0,00
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	74.932.000,00	0,00	0,00	0,00
		73.469.800,00	0,00	0,00	0,00
2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	74.932.000,00	0,00	0,00	0,00
		73.469.800,00	0,00	0,00	0,00
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	67.690.000,00	0,00	0,00	0,00
		67.167.800,00	0,00	0,00	0,00
2.08.06.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	67.690.000,00	0,00	0,00	0,00
		67.167.800,00	0,00	0,00	0,00
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	262.701.000,00	0,00	0,00	0,00
		256.774.184,00	0,00	0,00	0,00
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		74.700.254,00	0,00	0,00	0,00
2.08.07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		74.700.254,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	107.201.000,00	0,00	0,00	0,00
		102.333.076,00	0,00	0,00	0,00
2.08.07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	49.201.000,00	0,00	0,00	0,00
		48.787.900,00	0,00	0,00	0,00
2.08.07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	58.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		53.545.176,00	0,00	0,00	0,00
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	80.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		79.740.854,00	0,00	0,00	0,00
2.08.07.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	80.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		79.740.854,00	0,00	0,00	0,00
2.09	PANGAN	20.458.856.000,00	211.202.000,00	0,00	0,00
		20.089.163.279,00	208.825.000,00	0,00	0,00
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.566.772.000,00	211.202.000,00	0,00	0,00
		18.211.995.022,00	208.825.000,00	0,00	0,00
2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	172.695.000,00	0,00	0,00	0,00
		162.069.015,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.602.000,00	0,00	0,00	0,00
		48.847.700,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	122.093.000,00	0,00	0,00	0,00
		113.221.315,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.459.705.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.128.717.845,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.339.376.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.010.027.445,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	120.329.000,00	0,00	0,00	0,00
		118.690.400,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.997.100,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.997.100,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	82.230.000,00	0,00	0,00	0,00
		82.041.600,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	82.230.000,00	0,00	0,00	0,00
		82.041.600,00	0,00	0,00	0,00



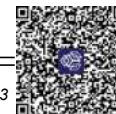
KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	188.356.000,00	0,00	0,00	0,00
		185.230.021,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.928.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.925.100,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	44.608.000,00	0,00	0,00	0,00
		44.444.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.900.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.899.900,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.720.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.640.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	35.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		33.412.600,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		79.026.021,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.882.400,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	211.202.000,00	0,00	0,00
		0,00	208.825.000,00	0,00	0,00
2.09.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	152.688.000,00	0,00	0,00
		0,00	150.825.000,00	0,00	0,00
2.09.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	58.514.000,00	0,00	0,00
		0,00	58.000.000,00	0,00	0,00
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	267.246.000,00	0,00	0,00	0,00
		259.417.017,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.496.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.494.500,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	183.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		176.140.517,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	82.350.000,00	0,00	0,00	0,00
		81.782.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	389.340.000,00	0,00	0,00	0,00
		387.522.424,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	115.340.000,00	0,00	0,00	0,00
		115.289.424,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.600.000,00	0,00	0,00	0,00
		27.600.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.09.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	246.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		244.633.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		39.661.300,00	0,00	0,00	0,00
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		39.661.300,00	0,00	0,00	0,00
2.09.02.2.01.01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		39.661.300,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	662.381.000,00	0,00	0,00	0,00
		656.389.787,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	171.932.000,00	0,00	0,00	0,00
		170.443.212,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	72.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		71.105.300,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	99.932.000,00	0,00	0,00	0,00
		99.337.912,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	244.883.000,00	0,00	0,00	0,00
		242.611.975,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	244.883.000,00	0,00	0,00	0,00
		242.611.975,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	245.566.000,00	0,00	0,00	0,00
		243.334.600,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	245.566.000,00	0,00	0,00	0,00
		243.334.600,00	0,00	0,00	0,00
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	1.094.537.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.087.099.670,00	0,00	0,00	0,00
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	14.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		13.996.600,00	0,00	0,00	0,00
2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	14.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		13.996.600,00	0,00	0,00	0,00
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.080.137.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.073.103.070,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.09.04.2.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.080.137.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.073.103.070,00	0,00	0,00	0,00
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	95.166.000,00	0,00	0,00	0,00
		94.017.500,00	0,00	0,00	0,00
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	95.166.000,00	0,00	0,00	0,00
		94.017.500,00	0,00	0,00	0,00
2.09.05.2.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	66.366.000,00	0,00	0,00	0,00
		65.671.700,00	0,00	0,00	0,00
2.09.05.2.01.03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	28.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		28.345.800,00	0,00	0,00	0,00
2.10	PERTANAHAN	37.632.000,00	0,00	0,00	0,00
		37.493.600,00	0,00	0,00	0,00
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	37.632.000,00	0,00	0,00	0,00
		37.493.600,00	0,00	0,00	0,00
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	37.632.000,00	0,00	0,00	0,00
		37.493.600,00	0,00	0,00	0,00
2.10.04.2.01.01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	37.632.000,00	0,00	0,00	0,00
		37.493.600,00	0,00	0,00	0,00
2.11	LINGKUNGAN HIDUP	25.779.389.000,00	964.312.000,00	0,00	0,00
		25.274.032.605,00	961.104.650,00	0,00	0,00
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.698.926.000,00	31.630.000,00	0,00	0,00
		12.308.558.311,00	31.384.000,00	0,00	0,00
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	168.554.000,00	0,00	0,00	0,00
		167.927.760,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	115.459.000,00	0,00	0,00	0,00
		115.047.100,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	53.095.000,00	0,00	0,00	0,00
		52.880.660,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.749.901.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.394.582.760,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.171.368.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.816.312.744,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	578.533.000,00	0,00	0,00	0,00
		578.270.016,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	54.838.000,00	0,00	0,00	0,00
		54.508.500,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		39.750.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.11.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	14.838.000,00	0,00	0,00	0,00
		14.758.500,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	174.352.000,00	0,00	0,00	0,00
		174.135.076,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.839.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.838.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.384.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.384.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	47.534.000,00	0,00	0,00	0,00
		47.458.450,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.861.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.861.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	19.770.000,00	0,00	0,00	0,00
		19.758.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	83.380.000,00	0,00	0,00	0,00
		83.251.626,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.384.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.384.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	31.630.000,00	0,00	0,00
		0,00	31.384.000,00	0,00	0,00
2.11.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	31.630.000,00	0,00	0,00
		0,00	31.384.000,00	0,00	0,00
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	342.579.000,00	0,00	0,00	0,00
		309.580.721,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.977.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.970.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	274.409.000,00	0,00	0,00	0,00
		241.514.721,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	66.193.000,00	0,00	0,00	0,00
		66.096.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	208.702.000,00	0,00	0,00	0,00
		207.823.494,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	156.912.000,00	0,00	0,00	0,00
		156.134.494,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	2.444.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.410.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.398.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.398.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	39.948.000,00	0,00	0,00	0,00
		39.881.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	342.358.000,00	0,00	0,00	0,00
		332.736.963,00	0,00	0,00	0,00
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	342.358.000,00	0,00	0,00	0,00
		332.736.963,00	0,00	0,00	0,00
2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	39.538.000,00	0,00	0,00	0,00
		39.488.748,00	0,00	0,00	0,00
2.11.02.2.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	302.820.000,00	0,00	0,00	0,00
		293.248.215,00	0,00	0,00	0,00
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.234.635.400,00	29.084.000,00	0,00	0,00
		1.218.716.157,00	28.936.650,00	0,00	0,00
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	351.752.000,00	29.084.000,00	0,00	0,00
		342.517.771,00	28.936.650,00	0,00	0,00
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	20.294.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.245.800,00	0,00	0,00	0,00
2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	15.816.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.656.100,00	0,00	0,00	0,00
2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	315.642.000,00	29.084.000,00	0,00	0,00
		306.615.871,00	28.936.650,00	0,00	0,00
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	59.340.000,00	0,00	0,00	0,00
		58.915.154,00	0,00	0,00	0,00
2.11.03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	39.570.000,00	0,00	0,00	0,00
		39.444.854,00	0,00	0,00	0,00
2.11.03.2.02.03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	19.770.000,00	0,00	0,00	0,00
		19.470.300,00	0,00	0,00	0,00
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	823.543.400,00	0,00	0,00	0,00
		817.283.232,00	0,00	0,00	0,00
2.11.03.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	17.299.000,00	0,00	0,00	0,00
		16.885.966,00	0,00	0,00	0,00
2.11.03.2.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	758.798.000,00	0,00	0,00	0,00
		753.623.616,00	0,00	0,00	0,00
2.11.03.2.03.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	47.446.400,00	0,00	0,00	0,00
		46.773.650,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.374.753.600,00	0,00	0,00	0,00
		2.360.814.567,00	0,00	0,00	0,00
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	2.374.753.600,00	0,00	0,00	0,00
		2.360.814.567,00	0,00	0,00	0,00
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2.266.023.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.253.198.529,00	0,00	0,00	0,00
2.11.04.2.01.06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	14.826.600,00	0,00	0,00	0,00
		14.528.188,00	0,00	0,00	0,00
2.11.04.2.01.07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati	93.904.000,00	0,00	0,00	0,00
		93.087.850,00	0,00	0,00	0,00
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	38.531.000,00	0,00	0,00	0,00
		38.147.354,00	0,00	0,00	0,00
2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	38.531.000,00	0,00	0,00	0,00
		38.147.354,00	0,00	0,00	0,00
2.11.05.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	22.241.000,00	0,00	0,00	0,00
		21.885.254,00	0,00	0,00	0,00
2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	16.290.000,00	0,00	0,00	0,00
		16.262.100,00	0,00	0,00	0,00
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	69.055.000,00	0,00	0,00	0,00
		68.869.614,00	0,00	0,00	0,00
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	69.055.000,00	0,00	0,00	0,00
		68.869.614,00	0,00	0,00	0,00
2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	15.820.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.816.300,00	0,00	0,00	0,00
2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	53.235.000,00	0,00	0,00	0,00
		53.053.314,00	0,00	0,00	0,00
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	82.043.000,00	0,00	0,00	0,00
		81.814.863,00	0,00	0,00	0,00
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	82.043.000,00	0,00	0,00	0,00
		81.814.863,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.11.08.2.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	52.389.000,00	0,00	0,00	0,00
		52.287.700,00	0,00	0,00	0,00
2.11.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	29.654.000,00	0,00	0,00	0,00
		29.527.163,00	0,00	0,00	0,00
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	46.656.000,00	0,00	0,00	0,00
		46.453.400,00	0,00	0,00	0,00
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	46.656.000,00	0,00	0,00	0,00
		46.453.400,00	0,00	0,00	0,00
2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	46.656.000,00	0,00	0,00	0,00
		46.453.400,00	0,00	0,00	0,00
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	16.464.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.179.500,00	0,00	0,00	0,00
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	16.464.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.179.500,00	0,00	0,00	0,00
2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	16.464.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.179.500,00	0,00	0,00	0,00
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	8.875.967.000,00	903.598.000,00	0,00	0,00
		8.802.741.876,00	900.784.000,00	0,00	0,00
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	8.875.967.000,00	903.598.000,00	0,00	0,00
		8.802.741.876,00	900.784.000,00	0,00	0,00
2.11.11.2.01.01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	12.850.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.786.700,00	0,00	0,00	0,00
2.11.11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	98.846.000,00	0,00	0,00	0,00
		98.666.625,00	0,00	0,00	0,00
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	8.067.644.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.997.428.927,00	0,00	0,00	0,00
2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	88.527.000,00	0,00	0,00	0,00
		88.394.690,00	0,00	0,00	0,00
2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	608.100.000,00	903.598.000,00	0,00	0,00
		605.464.934,00	900.784.000,00	0,00	0,00
2.12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6.532.973.682,00	968.778.000,00	0,00	0,00
		6.424.385.055,00	937.468.000,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.276.276.000,00	142.498.000,00	0,00	0,00
		4.193.900.838,00	138.924.000,00	0,00	0,00
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.524.000,00	0,00	0,00	0,00
		19.432.150,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.981.050,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.524.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.451.100,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.851.166.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.770.436.580,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.819.214.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.738.546.967,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	31.952.000,00	0,00	0,00	0,00
		31.889.613,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.299.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.224.800,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7.299.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.224.800,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	84.371.000,00	0,00	0,00	0,00
		84.171.585,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.433.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.423.500,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.560.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.520.500,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.617.000,00	0,00	0,00	0,00
		22.556.900,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.756.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.730.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	19.811.000,00	0,00	0,00	0,00
		19.753.500,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18.998.000,00	0,00	0,00	0,00
		18.993.185,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.196.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.194.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	142.498.000,00	0,00	0,00
		0,00	138.924.000,00	0,00	0,00
2.12.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0,00	40.837.000,00	0,00	0,00
		0,00	40.009.000,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.12.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	63.296.000,00	0,00	0,00
		0,00	61.475.000,00	0,00	0,00
2.12.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	38.365.000,00	0,00	0,00
		0,00	37.440.000,00	0,00	0,00
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	124.645.000,00	0,00	0,00	0,00
		123.651.727,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	914.000,00	0,00	0,00	0,00
		910.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	62.730.000,00	0,00	0,00	0,00
		61.756.027,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	61.001.000,00	0,00	0,00	0,00
		60.985.700,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	189.271.000,00	0,00	0,00	0,00
		188.983.996,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	71.918.000,00	0,00	0,00	0,00
		71.803.496,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	6.281.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.210.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	63.072.000,00	0,00	0,00	0,00
		62.999.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	48.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		47.971.500,00	0,00	0,00	0,00
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1.802.778.682,00	86.390.000,00	0,00	0,00
		1.778.203.350,00	86.276.000,00	0,00	0,00
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	882.712.682,00	86.390.000,00	0,00	0,00
		877.172.262,00	86.276.000,00	0,00	0,00
2.12.02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	546.533.000,00	0,00	0,00	0,00
		541.276.150,00	0,00	0,00	0,00
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	329.299.682,00	86.390.000,00	0,00	0,00
		329.088.062,00	86.276.000,00	0,00	0,00
2.12.02.2.01.05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	6.880.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.808.050,00	0,00	0,00	0,00
2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	903.266.000,00	0,00	0,00	0,00
		884.403.838,00	0,00	0,00	0,00
2.12.02.2.02.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	903.266.000,00	0,00	0,00	0,00
		884.403.838,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	16.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		16.627.250,00	0,00	0,00	0,00
2.12.02.2.03.05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	16.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		16.627.250,00	0,00	0,00	0,00
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	224.153.000,00	0,00	0,00	0,00
		223.249.716,00	0,00	0,00	0,00
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	212.953.000,00	0,00	0,00	0,00
		212.117.416,00	0,00	0,00	0,00
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	31.612.000,00	0,00	0,00	0,00
		31.460.866,00	0,00	0,00	0,00
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	181.341.000,00	0,00	0,00	0,00
		180.656.550,00	0,00	0,00	0,00
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	11.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.132.300,00	0,00	0,00	0,00
2.12.03.2.02.02	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	11.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.132.300,00	0,00	0,00	0,00
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	229.766.000,00	739.890.000,00	0,00	0,00
		229.031.151,00	712.268.000,00	0,00	0,00
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	53.600.000,00	0,00	0,00	0,00
		53.284.918,00	0,00	0,00	0,00
2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	53.600.000,00	0,00	0,00	0,00
		53.284.918,00	0,00	0,00	0,00
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	176.166.000,00	739.890.000,00	0,00	0,00
		175.746.233,00	712.268.000,00	0,00	0,00
2.12.04.2.03.03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	154.643.000,00	739.890.000,00	0,00	0,00
		154.561.681,00	712.268.000,00	0,00	0,00
2.12.04.2.03.04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	8.236.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.090.340,00	0,00	0,00	0,00
2.12.04.2.03.07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	13.287.000,00	0,00	0,00	0,00
		13.094.212,00	0,00	0,00	0,00
2.13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	9.084.877.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00
		8.864.035.724,00	1.172.000,00	0,00	0,00
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.259.075.000,00	516.000,00	0,00	0,00
		4.057.858.133,00	516.000,00	0,00	0,00
2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		24.778.600,00	0,00	0,00	0,00



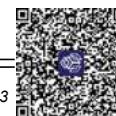
KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.13.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.796.300,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.982.300,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.778.397.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.590.056.229,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.750.518.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.562.241.829,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	27.879.000,00	0,00	0,00	0,00
		27.814.400,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	137.337.000,00	516.000,00	0,00	0,00
		137.149.500,00	516.000,00	0,00	0,00
2.13.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.557.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.553.500,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		39.982.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.998.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	720.000,00	516.000,00	0,00	0,00
		720.000,00	516.000,00	0,00	0,00
2.13.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		26.932.100,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	43.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		42.916.500,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7.060.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.047.400,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	143.048.000,00	0,00	0,00	0,00
		135.869.720,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.648.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.480.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	81.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		73.999.920,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		60.389.800,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	175.293.000,00	0,00	0,00	0,00
		170.004.084,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	116.253.000,00	0,00	0,00	0,00
		111.430.084,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.13.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	51.040.000,00	0,00	0,00	0,00
		50.574.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	31.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.927.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	31.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.927.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13.02.2.01.01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	31.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.927.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	1.870.692.000,00	804.000,00	0,00	0,00
		1.859.795.568,00	656.000,00	0,00	0,00
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	1.870.692.000,00	804.000,00	0,00	0,00
		1.859.795.568,00	656.000,00	0,00	0,00
2.13.03.2.01.01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		26.915.090,00	0,00	0,00	0,00
2.13.03.2.01.02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	1.743.692.000,00	804.000,00	0,00	0,00
		1.733.030.890,00	656.000,00	0,00	0,00
2.13.03.2.01.03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		99.849.588,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	797.147.000,00	0,00	0,00	0,00
		795.728.947,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	797.147.000,00	0,00	0,00	0,00
		795.728.947,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		99.961.858,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		19.978.125,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	72.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		71.873.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	82.464.000,00	0,00	0,00	0,00
		82.329.600,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04.2.01.06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.928.700,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		39.977.400,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	135.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		134.565.100,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.13.04.2.01.10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		13.756.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	98.683.000,00	0,00	0,00	0,00
		98.666.532,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	68.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		67.889.320,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04.2.01.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		34.937.900,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04.2.01.17	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	114.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		113.865.412,00	0,00	0,00	0,00
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.126.963.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.119.726.076,00	0,00	0,00	0,00
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.126.963.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.119.726.076,00	0,00	0,00	0,00
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	85.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		84.671.200,00	0,00	0,00	0,00
2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	15.636.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.563.300,00	0,00	0,00	0,00
2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.945.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	55.327.000,00	0,00	0,00	0,00
		55.266.300,00	0,00	0,00	0,00
2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.960.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.953.280.276,00	0,00	0,00	0,00
2.14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	16.690.362.000,00	1.998.329.000,00	0,00	0,00
		15.884.216.472,00	1.943.871.415,00	0,00	0,00
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	715.390.000,00	0,00	0,00	0,00
		660.651.702,00	0,00	0,00	0,00
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		59.941.559,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.14.02.2.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		29.957.659,00	0,00	0,00	0,00
2.14.02.2.01.10	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		29.983.900,00	0,00	0,00	0,00
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	655.390.000,00	0,00	0,00	0,00
		600.710.143,00	0,00	0,00	0,00
2.14.02.2.02.03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	63.190.000,00	0,00	0,00	0,00
		62.115.791,00	0,00	0,00	0,00
2.14.02.2.02.05	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		29.993.606,00	0,00	0,00	0,00
2.14.02.2.02.09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	64.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		63.760.600,00	0,00	0,00	0,00
2.14.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.02.2.02.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	342.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		342.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	156.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		102.840.146,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	8.908.864.000,00	1.998.329.000,00	0,00	0,00
		8.320.559.772,00	1.943.871.415,00	0,00	0,00
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.494.300.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.346.952.472,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	210.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		129.089.200,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	174.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		162.114.200,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	340.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		333.919.800,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	690.300.000,00	0,00	0,00	0,00
		671.888.272,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		49.941.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	2.688.637.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.681.643.358,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.14.03.2.02.01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	636.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		636.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	2.052.637.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.045.643.358,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	3.466.319.000,00	1.998.329.000,00	0,00	0,00
		3.032.768.392,00	1.943.871.415,00	0,00	0,00
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	51.300.000,00	0,00	0,00	0,00
		43.278.950,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	3.321.559.000,00	19.050.000,00	0,00	0,00
		2.913.333.900,00	18.415.000,00	0,00	0,00
2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	45.560.000,00	1.979.279.000,00	0,00	0,00
		28.448.492,00	1.925.456.415,00	0,00	0,00
2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	27.900.000,00	0,00	0,00	0,00
		27.759.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.03.09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		19.948.050,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	1.259.608.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.259.195.550,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.04.02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.892.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	1.250.608.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.250.303.550,00	0,00	0,00	0,00
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	7.066.108.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.903.004.998,00	0,00	0,00	0,00
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	7.036.108.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.873.267.198,00	0,00	0,00	0,00
2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	362.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		234.058.500,00	0,00	0,00	0,00
2.14.04.2.01.03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	68.554.000,00	0,00	0,00	0,00
		68.477.100,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.14.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	6.552.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.518.456.800,00	0,00	0,00	0,00
2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	53.554.000,00	0,00	0,00	0,00
		52.274.798,00	0,00	0,00	0,00
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		29.737.800,00	0,00	0,00	0,00
2.14.04.2.02.04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		29.737.800,00	0,00	0,00	0,00
2.15	PERHUBUNGAN	14.464.273.000,00	17.862.679.000,00	0,00	0,00
		14.200.811.874,00	17.386.866.602,00	0,00	0,00
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	14.464.273.000,00	17.862.679.000,00	0,00	0,00
		14.200.811.874,00	17.386.866.602,00	0,00	0,00
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	11.718.319.000,00	17.696.439.000,00	0,00	0,00
		11.539.615.660,00	17.221.963.602,00	0,00	0,00
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1.018.556.000,00	17.579.963.000,00	0,00	0,00
		993.824.285,00	17.108.063.602,00	0,00	0,00
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	10.699.763.000,00	116.476.000,00	0,00	0,00
		10.545.791.375,00	113.900.000,00	0,00	0,00
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	131.897.000,00	0,00	0,00	0,00
		110.245.600,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	131.897.000,00	0,00	0,00	0,00
		110.245.600,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	229.773.000,00	0,00	0,00	0,00
		212.277.427,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	160.709.000,00	0,00	0,00	0,00
		144.943.238,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	69.064.000,00	0,00	0,00	0,00
		67.334.189,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	630.975.000,00	9.540.000,00	0,00	0,00
		592.053.014,00	9.500.000,00	0,00	0,00
2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	630.975.000,00	9.540.000,00	0,00	0,00
		592.053.014,00	9.500.000,00	0,00	0,00
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.426.660,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.15.02.2.07.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.426.660,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	1.582.260.000,00	156.700.000,00	0,00	0,00
		1.581.567.547,00	155.403.000,00	0,00	0,00
2.15.02.2.08.04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	1.582.260.000,00	156.700.000,00	0,00	0,00
		1.581.567.547,00	155.403.000,00	0,00	0,00
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	63.683.000,00	0,00	0,00	0,00
		63.449.150,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	63.683.000,00	0,00	0,00	0,00
		63.449.150,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	87.366.000,00	0,00	0,00	0,00
		84.176.816,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.14.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	87.366.000,00	0,00	0,00	0,00
		84.176.816,00	0,00	0,00	0,00
2.16	KOMUNIKASI & INFORMATIKA	12.708.923.000,00	971.132.000,00	0,00	0,00
		12.369.845.682,00	950.018.000,00	0,00	0,00
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.863.907.000,00	98.180.000,00	0,00	0,00
		4.622.577.927,00	92.025.000,00	0,00	0,00
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		31.539.400,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		18.966.300,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.573.100,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.816.076.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.620.000.326,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.683.693.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.491.570.691,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	132.383.000,00	0,00	0,00	0,00
		128.429.635,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	217.600.000,00	0,00	0,00	0,00
		213.468.900,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.16.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		196.531.500,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	17.600.000,00	0,00	0,00	0,00
		16.937.400,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	104.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		103.598.922,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.945.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		27.906.900,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.999.200,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.836.500,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.913.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		34.998.322,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.820.000,00	98.180.000,00	0,00	0,00
		1.813.000,00	92.025.000,00	0,00	0,00
2.16.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	490.000,00	79.510.000,00	0,00	0,00
		490.000,00	73.650.000,00	0,00	0,00
2.16.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.330.000,00	18.670.000,00	0,00	0,00
		1.323.000,00	18.375.000,00	0,00	0,00
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	507.411.000,00	0,00	0,00	0,00
		473.461.300,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.485.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	429.213.000,00	0,00	0,00	0,00
		395.384.500,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	76.598.000,00	0,00	0,00	0,00
		76.591.800,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	185.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		178.696.079,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	112.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		106.193.079,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.996.800,00	0,00	0,00	0,00



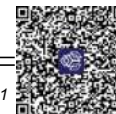
KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	51.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		50.506.200,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	5.439.300.000,00	217.543.000,00	0,00	0,00
		5.360.462.857,00	216.195.500,00	0,00	0,00
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.439.300.000,00	217.543.000,00	0,00	0,00
		5.360.462.857,00	216.195.500,00	0,00	0,00
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	3.932.391.000,00	166.403.000,00	0,00	0,00
		3.867.492.596,00	165.590.500,00	0,00	0,00
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	726.909.000,00	51.140.000,00	0,00	0,00
		718.932.114,00	50.605.000,00	0,00	0,00
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	780.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		774.038.147,00	0,00	0,00	0,00
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	2.405.716.000,00	655.409.000,00	0,00	0,00
		2.386.804.898,00	641.797.500,00	0,00	0,00
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.714.974.000,00	655.409.000,00	0,00	0,00
		1.699.230.282,00	641.797.500,00	0,00	0,00
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1.714.974.000,00	655.409.000,00	0,00	0,00
		1.699.230.282,00	641.797.500,00	0,00	0,00
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	690.742.000,00	0,00	0,00	0,00
		687.574.616,00	0,00	0,00	0,00
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	650.742.000,00	0,00	0,00	0,00
		648.783.016,00	0,00	0,00	0,00
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		38.791.600,00	0,00	0,00	0,00
2.17	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	15.567.259.850,00	120.606.000,00	0,00	0,00
		14.743.862.245,00	118.871.650,00	0,00	0,00
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.030.281.850,00	20.000.000,00	0,00	0,00
		10.411.728.699,00	19.575.000,00	0,00	0,00
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48.554.000,00	0,00	0,00	0,00
		48.021.425,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	33.554.000,00	0,00	0,00	0,00
		33.332.775,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		14.688.650,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.934.024.850,00	0,00	0,00	0,00
		9.453.701.962,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.836.916.850,00	0,00	0,00	0,00
		9.358.265.979,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	97.108.000,00	0,00	0,00	0,00
		95.435.983,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		34.499.500,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		34.499.500,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	179.600.000,00	0,00	0,00	0,00
		177.304.270,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.600.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.600.000,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		19.655.350,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		80.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		14.984.200,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		46.465.220,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.599.500,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	19.575.000,00	0,00	0,00
2.17.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	19.575.000,00	0,00	0,00
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	650.395.000,00	0,00	0,00	0,00
		515.912.945,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.690.000,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	623.395.000,00	0,00	0,00	0,00
		489.274.545,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		16.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.948.400,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	182.708.000,00	0,00	0,00	0,00
		182.288.597,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	142.708.000,00	0,00	0,00	0,00
		142.687.197,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		39.601.400,00	0,00	0,00	0,00
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		19.874.700,00	0,00	0,00	0,00
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		19.874.700,00	0,00	0,00	0,00
2.17.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		19.874.700,00	0,00	0,00	0,00
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	277.287.000,00	0,00	0,00	0,00
		266.081.564,00	0,00	0,00	0,00
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	277.287.000,00	0,00	0,00	0,00
		266.081.564,00	0,00	0,00	0,00
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	277.287.000,00	0,00	0,00	0,00
		266.081.564,00	0,00	0,00	0,00
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	445.730.000,00	0,00	0,00	0,00
		429.165.134,00	0,00	0,00	0,00
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	445.730.000,00	0,00	0,00	0,00
		429.165.134,00	0,00	0,00	0,00
2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	445.730.000,00	0,00	0,00	0,00
		429.165.134,00	0,00	0,00	0,00
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1.836.560.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.740.302.449,00	0,00	0,00	0,00
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	1.836.560.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.740.302.449,00	0,00	0,00	0,00
2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		29.456.819,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.17.07.2.01.03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		39.940.090,00	0,00	0,00	0,00
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	1.766.560.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.670.905.540,00	0,00	0,00	0,00
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1.957.401.000,00	100.606.000,00	0,00	0,00
		1.876.709.699,00	99.296.650,00	0,00	0,00
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	1.957.401.000,00	100.606.000,00	0,00	0,00
		1.876.709.699,00	99.296.650,00	0,00	0,00
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	1.957.401.000,00	100.606.000,00	0,00	0,00
		1.876.709.699,00	99.296.650,00	0,00	0,00
2.18	PENANAMAN MODAL	4.950.522.000,00	17.178.000,00	0,00	0,00
		4.756.928.065,00	17.052.700,00	0,00	0,00
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.945.331.000,00	17.178.000,00	0,00	0,00
		3.763.850.445,00	17.052.700,00	0,00	0,00
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.600.000,00	0,00	0,00	0,00
		21.515.900,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.432.500,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.100.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.083.400,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.120.929.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.952.811.713,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.940.284.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.773.155.446,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	180.645.000,00	0,00	0,00	0,00
		179.656.267,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		39.386.750,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		39.386.750,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	197.501.000,00	2.053.000,00	0,00	0,00
		197.116.423,00	2.052.700,00	0,00	0,00
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	27.464.000,00	0,00	0,00	0,00
		27.462.600,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	31.430.000,00	0,00	0,00	0,00
		31.265.395,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.130.000,00	0,00	0,00	0,00
		27.106.900,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	26.947.000,00	2.053.000,00	0,00	0,00
		26.772.150,00	2.052.700,00	0,00	0,00
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	82.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		81.999.778,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	930.000,00	0,00	0,00	0,00
		909.600,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	15.125.000,00	0,00	0,00
		0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
2.18.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	15.125.000,00	0,00	0,00
		0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	247.153.000,00	0,00	0,00	0,00
		235.961.718,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.880.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.880.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	212.394.000,00	0,00	0,00	0,00
		201.208.318,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	32.879.000,00	0,00	0,00	0,00
		32.873.400,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	318.148.000,00	0,00	0,00	0,00
		317.057.941,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	123.948.000,00	0,00	0,00	0,00
		123.258.941,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.100.000,00	0,00	0,00	0,00
		39.086.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	153.100.000,00	0,00	0,00	0,00
		152.713.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	74.900.000,00	0,00	0,00	0,00
		73.995.278,00	0,00	0,00	0,00
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	43.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		42.237.850,00	0,00	0,00	0,00
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		16.925.950,00	0,00	0,00	0,00



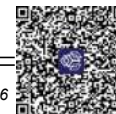
KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.18.02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	26.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		25.311.900,00	0,00	0,00	0,00
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	31.900.000,00	0,00	0,00	0,00
		31.757.428,00	0,00	0,00	0,00
2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	19.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		19.434.500,00	0,00	0,00	0,00
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	12.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.322.928,00	0,00	0,00	0,00
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	223.983.000,00	0,00	0,00	0,00
		219.049.650,00	0,00	0,00	0,00
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	223.983.000,00	0,00	0,00	0,00
		219.049.650,00	0,00	0,00	0,00
2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	23.700.000,00	0,00	0,00	0,00
		23.619.800,00	0,00	0,00	0,00
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	200.283.000,00	0,00	0,00	0,00
		195.429.850,00	0,00	0,00	0,00
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	283.240.000,00	0,00	0,00	0,00
		282.914.312,00	0,00	0,00	0,00
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	283.240.000,00	0,00	0,00	0,00
		282.914.312,00	0,00	0,00	0,00
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	229.560.000,00	0,00	0,00	0,00
		229.418.500,00	0,00	0,00	0,00
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	12.380.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.339.407,00	0,00	0,00	0,00
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	29.410.000,00	0,00	0,00	0,00
		29.343.705,00	0,00	0,00	0,00
2.18.04.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	11.890.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.812.700,00	0,00	0,00	0,00
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	399.188.000,00	0,00	0,00	0,00
		393.488.420,00	0,00	0,00	0,00
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	399.188.000,00	0,00	0,00	0,00
		393.488.420,00	0,00	0,00	0,00
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	315.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		309.696.620,00	0,00	0,00	0,00
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	83.988.000,00	0,00	0,00	0,00
		83.791.800,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	23.880.000,00	0,00	0,00	0,00
		23.629.960,00	0,00	0,00	0,00
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	23.880.000,00	0,00	0,00	0,00
		23.629.960,00	0,00	0,00	0,00
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	23.880.000,00	0,00	0,00	0,00
		23.629.960,00	0,00	0,00	0,00
2.19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	18.390.771.000,00	5.290.000,00	0,00	0,00
		18.128.809.124,00	5.290.000,00	0,00	0,00
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	553.801.000,00	0,00	0,00	0,00
		552.678.670,00	0,00	0,00	0,00
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	553.801.000,00	0,00	0,00	0,00
		552.678.670,00	0,00	0,00	0,00
2.19.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	553.801.000,00	0,00	0,00	0,00
		552.678.670,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	17.231.040.000,00	5.290.000,00	0,00	0,00
		16.971.887.744,00	5.290.000,00	0,00	0,00
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	13.963.141.000,00	5.290.000,00	0,00	0,00
		13.722.475.720,00	5.290.000,00	0,00	0,00
2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	13.963.141.000,00	5.290.000,00	0,00	0,00
		13.722.475.720,00	5.290.000,00	0,00	0,00
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	678.958.000,00	0,00	0,00	0,00
		678.516.170,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	678.958.000,00	0,00	0,00	0,00
		678.516.170,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	538.941.000,00	0,00	0,00	0,00
		531.952.584,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03.2.03.02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	120.323.000,00	0,00	0,00	0,00
		116.211.750,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03.2.03.04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	418.618.000,00	0,00	0,00	0,00
		415.740.834,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	2.050.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.038.943.270,00	0,00	0,00	0,00



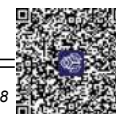
KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.19.03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	2.050.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.038.943.270,00	0,00	0,00	0,00
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	605.930.000,00	0,00	0,00	0,00
		604.242.710,00	0,00	0,00	0,00
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	605.930.000,00	0,00	0,00	0,00
		604.242.710,00	0,00	0,00	0,00
2.19.04.2.01.08	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	605.930.000,00	0,00	0,00	0,00
		604.242.710,00	0,00	0,00	0,00
2.20	STATISTIK	83.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		78.746.933,00	0,00	0,00	0,00
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	83.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		78.746.933,00	0,00	0,00	0,00
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	83.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		78.746.933,00	0,00	0,00	0,00
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	83.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		78.746.933,00	0,00	0,00	0,00
2.21	PERSANDIAN	174.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		171.259.307,00	0,00	0,00	0,00
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	174.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		171.259.307,00	0,00	0,00	0,00
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	174.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		171.259.307,00	0,00	0,00	0,00
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		31.771.339,00	0,00	0,00	0,00
2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	141.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		139.487.968,00	0,00	0,00	0,00
2.22	KEBUDAYAAN	11.044.913.773,00	20.100.426.000,00	0,00	0,00
		10.470.806.744,00	19.652.212.829,00	0,00	0,00
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.735.901.773,00	100.426.000,00	0,00	0,00
		6.423.232.273,00	98.985.000,00	0,00	0,00
2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	62.108.000,00	0,00	0,00	0,00
		54.944.830,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	47.108.000,00	0,00	0,00	0,00
		40.087.715,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		14.857.115,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.479.424.773,00	0,00	0,00	0,00
		5.213.574.010,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.447.424.773,00	0,00	0,00	0,00
		5.183.326.847,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.247.163,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	522.753.000,00	0,00	0,00	0,00
		511.018.525,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		29.510.000,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	492.753.000,00	0,00	0,00	0,00
		481.508.525,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	197.900.000,00	0,00	0,00	0,00
		196.283.750,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.290.000,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		32.981.500,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		41.999.000,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.355.000,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		24.857.550,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	64.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		62.800.700,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.574.000,00	100.426.000,00	0,00	0,00
		4.250.000,00	98.985.000,00	0,00	0,00
2.22.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	14.680.000,00	0,00	0,00
2.22.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.574.000,00	85.426.000,00	0,00	0,00
		4.250.000,00	84.305.000,00	0,00	0,00
2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	273.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		250.598.662,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.987.500,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	256.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		233.701.562,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.22.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		14.909.600,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	195.642.000,00	0,00	0,00	0,00
		192.562.496,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	112.210.000,00	0,00	0,00	0,00
		109.427.346,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.300.000,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		18.433.000,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60.632.000,00	0,00	0,00	0,00
		60.402.150,00	0,00	0,00	0,00
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	4.139.238.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.896.224.927,00	0,00	0,00	0,00
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	125.977.000,00	0,00	0,00	0,00
		122.745.669,00	0,00	0,00	0,00
2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	81.867.000,00	0,00	0,00	0,00
		80.100.127,00	0,00	0,00	0,00
2.22.02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	44.110.000,00	0,00	0,00	0,00
		42.645.542,00	0,00	0,00	0,00
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.013.261.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.773.479.258,00	0,00	0,00	0,00
2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	3.489.786.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.251.839.258,00	0,00	0,00	0,00
2.22.02.2.02.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	523.475.000,00	0,00	0,00	0,00
		521.640.000,00	0,00	0,00	0,00
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	169.774.000,00	20.000.000.000,00	0,00	0,00
		151.349.544,00	19.553.227.829,00	0,00	0,00
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	169.774.000,00	20.000.000.000,00	0,00	0,00
		151.349.544,00	19.553.227.829,00	0,00	0,00
2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	87.456.000,00	0,00	0,00	0,00
		83.693.950,00	0,00	0,00	0,00
2.22.05.2.02.02	Pengembangan Cagar Budaya	82.318.000,00	20.000.000.000,00	0,00	0,00
		67.655.594,00	19.553.227.829,00	0,00	0,00
2.23	PERPUSTAKAAN	3.620.779.335,00	157.250.000,00	0,00	0,00
		3.357.312.697,00	152.383.380,00	0,00	0,00
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.216.987.335,00	37.250.000,00	0,00	0,00
		2.954.210.646,00	35.769.000,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.710.000,00	0,00	0,00	0,00
		25.235.700,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.602.200,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.710.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.633.500,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.579.912.435,00	0,00	0,00	0,00
		2.334.755.136,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.562.912.435,00	0,00	0,00	0,00
		2.317.790.076,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		16.965.060,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		24.455.400,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		24.455.400,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	109.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		108.700.049,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		16.999.900,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		16.486.760,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.994.400,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		16.908.150,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		39.326.889,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.983.950,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.750.000,00	37.250.000,00	0,00	0,00
		7.672.500,00	35.769.000,00	0,00	0,00
2.23.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
2.23.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.750.000,00	32.250.000,00	0,00	0,00
		7.672.500,00	30.769.000,00	0,00	0,00
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	295.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		283.156.051,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.23.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.200.000,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	226.600.000,00	0,00	0,00	0,00
		215.447.551,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	65.600.000,00	0,00	0,00	0,00
		65.508.500,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	173.914.900,00	0,00	0,00	0,00
		170.235.810,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	86.423.000,00	0,00	0,00	0,00
		83.030.810,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	10.300.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.290.000,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		19.915.000,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	57.191.900,00	0,00	0,00	0,00
		57.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	384.874.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00
		384.186.231,00	116.614.380,00	0,00	0,00
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	290.355.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00
		289.963.631,00	116.614.380,00	0,00	0,00
2.23.02.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	11.052.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.007.606,00	0,00	0,00	0,00
2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	19.376.000,00	0,00	0,00	0,00
		19.309.450,00	0,00	0,00	0,00
2.23.02.2.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	203.444.000,00	0,00	0,00	0,00
		203.265.575,00	0,00	0,00	0,00
2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	56.483.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00
		56.381.000,00	116.614.380,00	0,00	0,00
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	94.519.000,00	0,00	0,00	0,00
		94.222.600,00	0,00	0,00	0,00
2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	15.050.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.048.500,00	0,00	0,00	0,00
2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	79.469.000,00	0,00	0,00	0,00
		79.174.100,00	0,00	0,00	0,00
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	18.918.000,00	0,00	0,00	0,00
		18.915.820,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	18.918.000,00	0,00	0,00	0,00
		18.915.820,00	0,00	0,00	0,00
2.23.03.2.01.01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	18.918.000,00	0,00	0,00	0,00
		18.915.820,00	0,00	0,00	0,00
2.24	KEARSIPAN	365.822.000,00	0,00	0,00	0,00
		365.066.263,00	0,00	0,00	0,00
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	365.822.000,00	0,00	0,00	0,00
		365.066.263,00	0,00	0,00	0,00
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	290.274.000,00	0,00	0,00	0,00
		289.595.413,00	0,00	0,00	0,00
2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	175.542.000,00	0,00	0,00	0,00
		174.919.913,00	0,00	0,00	0,00
2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	114.732.000,00	0,00	0,00	0,00
		114.675.500,00	0,00	0,00	0,00
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	25.148.000,00	0,00	0,00	0,00
		25.090.500,00	0,00	0,00	0,00
2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	25.148.000,00	0,00	0,00	0,00
		25.090.500,00	0,00	0,00	0,00
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	50.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		50.380.350,00	0,00	0,00	0,00
2.24.02.2.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	50.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		50.380.350,00	0,00	0,00	0,00
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	52.835.184.953,00	19.576.243.100,00	0,00	0,00
		50.056.618.147,00	19.036.693.160,00	0,00	0,00
3.25	KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.536.688.000,00	1.845.096.000,00	0,00	0,00
		4.438.719.352,00	1.822.455.960,00	0,00	0,00
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	1.451.771.000,00	1.400.878.000,00	0,00	0,00
		1.427.485.500,00	1.383.629.360,00	0,00	0,00
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	555.847.000,00	1.386.152.000,00	0,00	0,00
		537.506.600,00	1.369.129.360,00	0,00	0,00
3.25.03.2.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	0,00	1.386.152.000,00	0,00	0,00
		0,00	1.369.129.360,00	0,00	0,00
3.25.03.2.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	555.847.000,00	0,00	0,00	0,00
		537.506.600,00	0,00	0,00	0,00
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	77.416.000,00	0,00	0,00	0,00
		77.306.200,00	0,00	0,00	0,00



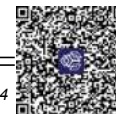
KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	27.600.000,00	0,00	0,00	0,00
		27.490.200,00	0,00	0,00	0,00
3.25.03.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	49.816.000,00	0,00	0,00	0,00
		49.816.000,00	0,00	0,00	0,00
3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	768.692.000,00	14.726.000,00	0,00	0,00
		762.881.800,00	14.500.000,00	0,00	0,00
3.25.03.2.03.02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	768.692.000,00	14.726.000,00	0,00	0,00
		762.881.800,00	14.500.000,00	0,00	0,00
3.25.03.2.04	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	49.816.000,00	0,00	0,00	0,00
		49.790.900,00	0,00	0,00	0,00
3.25.03.2.04.02	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	49.816.000,00	0,00	0,00	0,00
		49.790.900,00	0,00	0,00	0,00
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	2.647.997.000,00	444.218.000,00	0,00	0,00
		2.577.251.948,00	438.826.600,00	0,00	0,00
3.25.04.2.03	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	27.666.000,00	0,00	0,00	0,00
		27.611.100,00	0,00	0,00	0,00
3.25.04.2.03.02	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	27.666.000,00	0,00	0,00	0,00
		27.611.100,00	0,00	0,00	0,00
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	2.620.331.000,00	444.218.000,00	0,00	0,00
		2.549.640.848,00	438.826.600,00	0,00	0,00
3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	119.349.000,00	442.706.000,00	0,00	0,00
		118.178.765,00	437.314.600,00	0,00	0,00
3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.980.135.000,00	1.512.000,00	0,00	0,00
		1.918.584.147,00	1.512.000,00	0,00	0,00
3.25.04.2.04.04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	29.654.000,00	0,00	0,00	0,00
		29.404.250,00	0,00	0,00	0,00
3.25.04.2.04.05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	102.576.000,00	0,00	0,00	0,00
		101.692.156,00	0,00	0,00	0,00
3.25.04.2.04.06	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	388.617.000,00	0,00	0,00	0,00
		381.781.530,00	0,00	0,00	0,00
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	53.456.000,00	0,00	0,00	0,00
		52.610.400,00	0,00	0,00	0,00



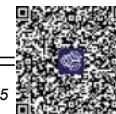
KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	53.456.000,00	0,00	0,00	0,00
		52.610.400,00	0,00	0,00	0,00
3.25.05.2.01.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	53.456.000,00	0,00	0,00	0,00
		52.610.400,00	0,00	0,00	0,00
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	383.464.000,00	0,00	0,00	0,00
		381.371.504,00	0,00	0,00	0,00
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	63.182.000,00	0,00	0,00	0,00
		63.086.969,00	0,00	0,00	0,00
3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	63.182.000,00	0,00	0,00	0,00
		63.086.969,00	0,00	0,00	0,00
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	320.282.000,00	0,00	0,00	0,00
		318.284.535,00	0,00	0,00	0,00
3.25.06.2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	63.439.000,00	0,00	0,00	0,00
		63.336.455,00	0,00	0,00	0,00
3.25.06.2.03.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	256.843.000,00	0,00	0,00	0,00
		254.948.080,00	0,00	0,00	0,00
3.26	PARIWISATA	5.300.669.000,00	250.840.000,00	0,00	0,00
		5.142.524.610,00	249.121.000,00	0,00	0,00
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	2.849.745.000,00	250.840.000,00	0,00	0,00
		2.762.820.094,00	249.121.000,00	0,00	0,00
3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	203.683.000,00	0,00	0,00	0,00
		202.133.000,00	0,00	0,00	0,00
3.26.02.2.02.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	203.683.000,00	0,00	0,00	0,00
		202.133.000,00	0,00	0,00	0,00
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2.571.062.000,00	250.840.000,00	0,00	0,00
		2.490.085.265,00	249.121.000,00	0,00	0,00
3.26.02.2.03.02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	95.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		79.111.607,00	0,00	0,00	0,00
3.26.02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	343.554.000,00	0,00	0,00	0,00
		341.244.300,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
3.26.02.2.03.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2.132.508.000,00	250.840.000,00	0,00	0,00
		2.069.729.358,00	249.121.000,00	0,00	0,00
3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		70.601.829,00	0,00	0,00	0,00
3.26.02.2.04.01	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		27.604.729,00	0,00	0,00	0,00
3.26.02.2.04.03	Pengelolaan Investasi Pariwisata	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		42.997.100,00	0,00	0,00	0,00
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	2.390.924.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.320.188.566,00	0,00	0,00	0,00
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	2.390.924.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.320.188.566,00	0,00	0,00	0,00
3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	2.390.924.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.320.188.566,00	0,00	0,00	0,00
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		59.515.950,00	0,00	0,00	0,00
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		59.515.950,00	0,00	0,00	0,00
3.26.05.2.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		59.515.950,00	0,00	0,00	0,00
3.27	PERTANIAN	31.168.405.953,00	1.342.498.100,00	0,00	0,00
		28.776.142.883,00	1.311.041.700,00	0,00	0,00
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	14.947.277.000,00	202.159.000,00	0,00	0,00
		13.051.370.361,00	191.688.600,00	0,00	0,00
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	5.559.416.000,00	167.959.000,00	0,00	0,00
		5.277.943.292,00	163.488.600,00	0,00	0,00
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	5.496.216.000,00	167.959.000,00	0,00	0,00
		5.218.165.940,00	163.488.600,00	0,00	0,00
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	63.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		59.777.352,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	9.038.012.000,00	34.200.000,00	0,00	0,00
		7.428.303.519,00	28.200.000,00	0,00	0,00
3.27.02.2.02.01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	147.166.000,00	0,00	0,00	0,00
		137.421.900,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
3.27.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	8.442.397.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.853.393.950,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02.2.02.03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	448.449.000,00	34.200.000,00	0,00	0,00
		437.487.669,00	28.200.000,00	0,00	0,00
3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	178.813.000,00	0,00	0,00	0,00
		175.061.550,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02.2.03.01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	178.813.000,00	0,00	0,00	0,00
		175.061.550,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02.2.04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecur	20.380.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.359.800,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02.2.04.01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	20.380.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.359.800,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	150.656.000,00	0,00	0,00	0,00
		149.702.200,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02.2.05.01	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	111.716.000,00	0,00	0,00	0,00
		110.846.900,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02.2.05.03	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	38.940.000,00	0,00	0,00	0,00
		38.855.300,00	0,00	0,00	0,00
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	11.296.040.053,00	968.492.000,00	0,00	0,00
		10.978.804.025,00	951.848.100,00	0,00	0,00
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	1.586.993.053,00	0,00	0,00	0,00
		1.450.480.885,00	0,00	0,00	0,00
3.27.03.2.01.01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1.586.993.053,00	0,00	0,00	0,00
		1.450.480.885,00	0,00	0,00	0,00
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	4.295.942.000,00	877.827.000,00	0,00	0,00
		4.244.679.396,00	861.206.500,00	0,00	0,00
3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	763.535.000,00	0,00	0,00	0,00
		760.055.100,00	0,00	0,00	0,00
3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	2.563.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.528.587.096,00	0,00	0,00	0,00
3.27.03.2.02.07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	201.038.000,00	451.851.000,00	0,00	0,00
		191.807.600,00	439.465.000,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
3.27.03.2.02.08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	2.369.000,00	425.976.000,00	0,00	0,00
		2.346.100,00	421.741.500,00	0,00	0,00
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	766.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		761.883.500,00	0,00	0,00	0,00
3.27.03.2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	5.413.105.000,00	90.665.000,00	0,00	0,00
		5.283.643.744,00	90.641.600,00	0,00	0,00
3.27.03.2.03.01	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	5.413.105.000,00	90.665.000,00	0,00	0,00
		5.283.643.744,00	90.641.600,00	0,00	0,00
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1.847.866.900,00	171.847.100,00	0,00	0,00
		1.801.659.086,00	167.505.000,00	0,00	0,00
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	305.984.900,00	151.047.100,00	0,00	0,00
		299.015.686,00	147.005.000,00	0,00	0,00
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	305.984.900,00	151.047.100,00	0,00	0,00
		299.015.686,00	147.005.000,00	0,00	0,00
3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	163.648.000,00	0,00	0,00	0,00
		147.050.900,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04.2.02.01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	135.408.000,00	0,00	0,00	0,00
		118.853.100,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04.2.02.02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	28.240.000,00	0,00	0,00	0,00
		28.197.800,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.246.860.000,00	20.800.000,00	0,00	0,00
		1.226.825.500,00	20.500.000,00	0,00	0,00
3.27.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1.246.860.000,00	20.800.000,00	0,00	0,00
		1.226.825.500,00	20.500.000,00	0,00	0,00
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	106.014.000,00	0,00	0,00	0,00
		103.486.300,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04.2.04.01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	88.016.000,00	0,00	0,00	0,00
		86.496.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04.2.04.04	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	17.998.000,00	0,00	0,00	0,00
		16.990.300,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04.2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	25.360.000,00	0,00	0,00	0,00
		25.280.700,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
3.27.04.2.05.01	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	25.360.000,00	0,00	0,00	0,00
		25.280.700,00	0,00	0,00	0,00
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	591.132.000,00	0,00	0,00	0,00
		561.182.620,00	0,00	0,00	0,00
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	591.132.000,00	0,00	0,00	0,00
		561.182.620,00	0,00	0,00	0,00
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	527.932.000,00	0,00	0,00	0,00
		499.551.560,00	0,00	0,00	0,00
3.27.05.2.01.05	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	63.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		61.631.060,00	0,00	0,00	0,00
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	50.068.000,00	0,00	0,00	0,00
		49.367.250,00	0,00	0,00	0,00
3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	24.716.000,00	0,00	0,00	0,00
		24.392.750,00	0,00	0,00	0,00
3.27.06.2.01.02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	24.716.000,00	0,00	0,00	0,00
		24.392.750,00	0,00	0,00	0,00
3.27.06.2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	25.352.000,00	0,00	0,00	0,00
		24.974.500,00	0,00	0,00	0,00
3.27.06.2.02.01	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	25.352.000,00	0,00	0,00	0,00
		24.974.500,00	0,00	0,00	0,00
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	2.436.022.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.333.759.541,00	0,00	0,00	0,00
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	2.436.022.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.333.759.541,00	0,00	0,00	0,00
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	1.962.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.871.256.265,00	0,00	0,00	0,00
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	141.796.000,00	0,00	0,00	0,00
		139.180.261,00	0,00	0,00	0,00
3.27.07.2.01.04	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	95.910.000,00	0,00	0,00	0,00
		94.205.140,00	0,00	0,00	0,00
3.27.07.2.01.05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	235.516.000,00	0,00	0,00	0,00
		229.117.875,00	0,00	0,00	0,00
3.29	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	5.873.294.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00
		5.805.589.301,00	21.350.000,00	0,00	0,00



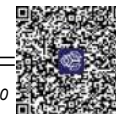
KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.863.294.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00
		5.795.601.124,00	21.350.000,00	0,00	0,00
3.29.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	102.108.000,00	0,00	0,00	0,00
		101.268.450,00	0,00	0,00	0,00
3.29.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	82.108.000,00	0,00	0,00	0,00
		81.345.850,00	0,00	0,00	0,00
3.29.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		19.922.600,00	0,00	0,00	0,00
3.29.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.228.854.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.172.532.343,00	0,00	0,00	0,00
3.29.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.197.854.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.141.677.798,00	0,00	0,00	0,00
3.29.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	31.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.854.545,00	0,00	0,00	0,00
3.29.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		29.999.800,00	0,00	0,00	0,00
3.29.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		29.999.800,00	0,00	0,00	0,00
3.29.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	63.478.000,00	0,00	0,00	0,00
		63.411.393,00	0,00	0,00	0,00
3.29.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.400.000,00	0,00	0,00	0,00
3.29.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.996.750,00	0,00	0,00	0,00
3.29.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.999.900,00	0,00	0,00	0,00
3.29.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
3.29.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	7.686.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.648.600,00	0,00	0,00	0,00
3.29.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26.700.000,00	0,00	0,00	0,00
		26.699.843,00	0,00	0,00	0,00
3.29.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.092.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.066.300,00	0,00	0,00	0,00
3.29.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	22.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	21.350.000,00	0,00	0,00
3.29.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	22.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	21.350.000,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
3.29.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	327.432.000,00	0,00	0,00	0,00
		317.084.711,00	0,00	0,00	0,00
3.29.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.123.000,00	0,00	0,00	0,00
3.29.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	160.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		149.731.811,00	0,00	0,00	0,00
3.29.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	166.232.000,00	0,00	0,00	0,00
		166.229.900,00	0,00	0,00	0,00
3.29.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	111.422.000,00	0,00	0,00	0,00
		111.304.427,00	0,00	0,00	0,00
3.29.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	79.775.000,00	0,00	0,00	0,00
		79.714.427,00	0,00	0,00	0,00
3.29.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	4.647.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.590.000,00	0,00	0,00	0,00
3.29.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.29.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.988.177,00	0,00	0,00	0,00
3.29.05.2.01	Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.988.177,00	0,00	0,00	0,00
3.29.05.2.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.988.177,00	0,00	0,00	0,00
3.30	PERDAGANGAN	5.287.301.000,00	15.403.216.000,00	0,00	0,00
		5.233.752.263,00	14.921.648.000,00	0,00	0,00
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3.930.480.000,00	15.403.216.000,00	0,00	0,00
		3.887.855.612,00	14.921.648.000,00	0,00	0,00
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	2.974.191.000,00	15.403.216.000,00	0,00	0,00
		2.952.375.155,00	14.921.648.000,00	0,00	0,00
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	769.491.000,00	15.403.216.000,00	0,00	0,00
		755.156.713,00	14.921.648.000,00	0,00	0,00
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	2.204.700.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.197.218.442,00	0,00	0,00	0,00
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	956.289.000,00	0,00	0,00	0,00
		935.480.457,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	599.432.000,00	0,00	0,00	0,00
		590.486.615,00	0,00	0,00	0,00
3.30.03.2.02.02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	356.857.000,00	0,00	0,00	0,00
		344.993.842,00	0,00	0,00	0,00
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	218.227.000,00	0,00	0,00	0,00
		217.039.173,00	0,00	0,00	0,00
3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	114.544.000,00	0,00	0,00	0,00
		113.705.372,00	0,00	0,00	0,00
3.30.04.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	114.544.000,00	0,00	0,00	0,00
		113.705.372,00	0,00	0,00	0,00
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	103.683.000,00	0,00	0,00	0,00
		103.333.801,00	0,00	0,00	0,00
3.30.04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	103.683.000,00	0,00	0,00	0,00
		103.333.801,00	0,00	0,00	0,00
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	325.366.000,00	0,00	0,00	0,00
		323.644.489,00	0,00	0,00	0,00
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	325.366.000,00	0,00	0,00	0,00
		323.644.489,00	0,00	0,00	0,00
3.30.05.2.01.01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	325.366.000,00	0,00	0,00	0,00
		323.644.489,00	0,00	0,00	0,00
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	173.754.000,00	0,00	0,00	0,00
		171.671.936,00	0,00	0,00	0,00
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	173.754.000,00	0,00	0,00	0,00
		171.671.936,00	0,00	0,00	0,00
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	173.754.000,00	0,00	0,00	0,00
		171.671.936,00	0,00	0,00	0,00
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	639.474.000,00	0,00	0,00	0,00
		633.541.053,00	0,00	0,00	0,00
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	639.474.000,00	0,00	0,00	0,00
		633.541.053,00	0,00	0,00	0,00
3.30.07.2.01.02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	639.474.000,00	0,00	0,00	0,00
		633.541.053,00	0,00	0,00	0,00
3.31	PERINDUSTRIAN	529.827.000,00	712.593.000,00	0,00	0,00
		521.515.711,00	711.076.500,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	405.907.000,00	712.593.000,00	0,00	0,00
		398.787.513,00	711.076.500,00	0,00	0,00
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	405.907.000,00	712.593.000,00	0,00	0,00
		398.787.513,00	711.076.500,00	0,00	0,00
3.31.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	55.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		54.894.322,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	137.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		136.045.608,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	96.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		93.748.215,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	117.407.000,00	712.593.000,00	0,00	0,00
		114.099.368,00	711.076.500,00	0,00	0,00
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	80.366.000,00	0,00	0,00	0,00
		79.572.295,00	0,00	0,00	0,00
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	80.366.000,00	0,00	0,00	0,00
		79.572.295,00	0,00	0,00	0,00
3.31.03.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	80.366.000,00	0,00	0,00	0,00
		79.572.295,00	0,00	0,00	0,00
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	43.554.000,00	0,00	0,00	0,00
		43.155.903,00	0,00	0,00	0,00
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	43.554.000,00	0,00	0,00	0,00
		43.155.903,00	0,00	0,00	0,00
3.31.04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	43.554.000,00	0,00	0,00	0,00
		43.155.903,00	0,00	0,00	0,00
3.32	TRANSMIGRASI	139.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		138.374.027,00	0,00	0,00	0,00
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	139.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		138.374.027,00	0,00	0,00	0,00
3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	139.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		138.374.027,00	0,00	0,00	0,00
3.32.03.2.01.04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	139.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		138.374.027,00	0,00	0,00	0,00
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	116.208.688.000,00	978.852.000,00	0,00	0,00
		112.019.489.742,00	927.592.750,00	0,00	0,00



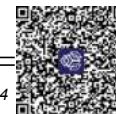
KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	58.307.966.000,00	781.520.000,00	0,00	0,00
		56.394.270.979,00	737.483.750,00	0,00	0,00
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	33.394.721.000,00	776.520.000,00	0,00	0,00
		32.335.285.515,00	732.483.750,00	0,00	0,00
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.491.495.000,00	0,00	0,00	0,00
		18.998.588.558,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.340.497.000,00	0,00	0,00	0,00
		18.852.245.324,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	150.998.000,00	0,00	0,00	0,00
		146.343.234,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	545.650.000,00	0,00	0,00	0,00
		541.740.950,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		22.236.800,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	522.650.000,00	0,00	0,00	0,00
		519.504.150,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.351.930.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.320.972.741,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	177.680.000,00	0,00	0,00	0,00
		177.670.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.499.312.650,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	81.700.000,00	0,00	0,00	0,00
		79.912.500,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	22.150.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.390.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	64.720.000,00	0,00	0,00	0,00
		64.501.700,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.505.680.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.479.185.891,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	276.566.000,00	776.520.000,00	0,00	0,00
		268.123.000,00	732.483.750,00	0,00	0,00
4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0,00	76.467.000,00	0,00	0,00
		0,00	68.037.750,00	0,00	0,00
4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75.000,00	194.854.000,00	0,00	0,00
		0,00	184.440.000,00	0,00	0,00
4.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	276.491.000,00	505.199.000,00	0,00	0,00
		268.123.000,00	480.006.000,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.180.919.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.050.764.337,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.940.500,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	934.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		853.425.650,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	92.423.000,00	0,00	0,00	0,00
		76.930.355,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.149.296.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.115.467.832,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.510.340.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.287.746.345,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.367.962.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.322.633.262,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	62.952.000,00	0,00	0,00	0,00
		62.018.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.720.000,00	0,00	0,00	0,00
		24.536.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.054.706.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.878.559.083,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.147.194.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.019.056.641,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	302.394.000,00	0,00	0,00	0,00
		174.976.641,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	205.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		204.995.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.800.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	635.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		634.285.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	883.645.000,00	0,00	0,00	0,00
		860.286.492,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	677.419.000,00	0,00	0,00	0,00
		655.170.739,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	206.226.000,00	0,00	0,00	0,00
		205.115.753,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	336.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		332.702.777,00	0,00	0,00	0,00



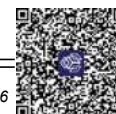
KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		118.782.436,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		119.334.487,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	96.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		94.585.854,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	670.582.000,00	0,00	0,00	0,00
		655.303.674,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	379.816.000,00	0,00	0,00	0,00
		376.176.732,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	139.599.000,00	0,00	0,00	0,00
		133.562.335,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	151.167.000,00	0,00	0,00	0,00
		145.564.607,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	23.439.762.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
		22.662.281.813,00	5.000.000,00	0,00	0,00
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	1.303.210.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.300.112.553,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	76.460.000,00	0,00	0,00	0,00
		76.145.269,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	63.490.000,00	0,00	0,00	0,00
		62.982.725,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1.163.260.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.160.984.559,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	21.675.295.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.953.862.980,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	20.582.295.000,00	0,00	0,00	0,00
		19.963.090.230,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	379.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		368.935.650,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	713.600.000,00	0,00	0,00	0,00
		621.837.100,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	436.277.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
		383.497.638,00	5.000.000,00	0,00	0,00
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	57.560.000,00	0,00	0,00	0,00
		57.223.993,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	309.447.000,00	0,00	0,00	0,00
		257.522.441,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	69.270.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
		68.751.204,00	5.000.000,00	0,00	0,00
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	24.980.000,00	0,00	0,00	0,00
		24.808.642,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	24.980.000,00	0,00	0,00	0,00
		24.808.642,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.473.483.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.396.703.651,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	175.480.000,00	0,00	0,00	0,00
		174.269.981,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	121.880.000,00	0,00	0,00	0,00
		120.722.190,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	53.600.000,00	0,00	0,00	0,00
		53.547.791,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	200.260.000,00	0,00	0,00	0,00
		198.337.920,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	87.100.000,00	0,00	0,00	0,00
		86.266.836,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	113.160.000,00	0,00	0,00	0,00
		112.071.084,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	767.060.000,00	0,00	0,00	0,00
		701.465.017,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	524.750.000,00	0,00	0,00	0,00
		461.311.751,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	65.330.000,00	0,00	0,00	0,00
		63.605.321,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	176.980.000,00	0,00	0,00	0,00
		176.547.945,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	330.683.000,00	0,00	0,00	0,00
		322.630.733,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	294.149.000,00	0,00	0,00	0,00
		288.801.751,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	5.368.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.306.163,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	31.166.000,00	0,00	0,00	0,00
		28.522.819,00	0,00	0,00	0,00
4.02	SEKRETARIAT DPRD	57.900.722.000,00	197.332.000,00	0,00	0,00
		55.625.218.763,00	190.109.000,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	40.975.891.000,00	197.332.000,00	0,00	0,00
		40.414.660.877,00	190.109.000,00	0,00	0,00
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	56.168.000,00	0,00	0,00	0,00
		55.744.825,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	53.668.000,00	0,00	0,00	0,00
		53.429.050,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.315.775,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.730.600.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.520.218.434,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.650.982.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.441.668.850,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	79.618.000,00	0,00	0,00	0,00
		78.549.584,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	214.652.000,00	0,00	0,00	0,00
		201.603.333,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	175.256.000,00	0,00	0,00	0,00
		167.079.333,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	39.396.000,00	0,00	0,00	0,00
		34.524.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	384.358.000,00	9.471.000,00	0,00	0,00
		378.827.208,00	9.400.000,00	0,00	0,00
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.835.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.817.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	165.160.000,00	0,00	0,00	0,00
		163.828.730,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	89.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		86.862.600,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		14.980.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	12.594.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.226.300,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	78.740.000,00	0,00	0,00	0,00
		77.964.378,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	11.029.000,00	9.471.000,00	0,00	0,00
		10.148.200,00	9.400.000,00	0,00	0,00
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	424.000,00	187.861.000,00	0,00	0,00
		424.000,00	180.709.000,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
4.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	424.000,00	187.861.000,00	0,00	0,00
		424.000,00	180.709.000,00	0,00	0,00
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	526.100.000,00	0,00	0,00	0,00
		484.003.731,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.025.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		261.108.606,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		34.489.700,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	187.600.000,00	0,00	0,00	0,00
		186.380.425,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	777.878.000,00	0,00	0,00	0,00
		752.488.440,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	427.878.000,00	0,00	0,00	0,00
		409.055.340,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		14.992.500,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		34.195.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		294.245.600,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	34.180.326.000,00	0,00	0,00	0,00
		34.064.729.516,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	33.830.326.000,00	0,00	0,00	0,00
		33.749.815.616,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	315.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		288.772.500,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		26.141.400,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	1.105.385.000,00	0,00	0,00	0,00
		956.621.390,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	74.361.000,00	0,00	0,00	0,00
		53.216.400,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1.031.024.000,00	0,00	0,00	0,00
		903.404.990,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	16.924.831.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.210.557.886,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	3.372.867.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.929.931.535,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	567.586.000,00	0,00	0,00	0,00
		422.092.639,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Perda	2.405.281.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.164.625.496,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	160.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		145.633.400,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	240.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		197.580.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	640.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		523.199.228,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		82.823.868,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		71.025.500,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	140.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		111.359.654,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	140.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		114.137.375,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.02.05	Pembahasan Laporan Semester	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		71.029.481,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		72.823.350,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	108.320.000,00	0,00	0,00	0,00
		77.614.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.03.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.090.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
4.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	88.320.000,00	0,00	0,00	0,00
		70.524.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	4.101.519.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.269.061.528,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	2.767.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.199.683.824,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	202.780.000,00	0,00	0,00	0,00
		186.301.005,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	793.568.000,00	0,00	0,00	0,00
		587.490.549,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		180.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	57.371.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.628.200,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		94.957.950,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1.281.098.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.171.489.565,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	11.098.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.041.900,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	1.270.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.170.447.665,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.590.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.590.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.07.01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	7.396.027.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.235.672.030,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	5.404.391.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.266.374.556,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	5.118.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.964.700,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1.986.518.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.964.332.774,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	95.940.907.000,00	4.469.341.000,00	1.235.728.000,00	677.473.383.000,00
		55.051.707.374,00	4.444.635.500,00	409.940.801,00	676.974.543.619,00
5.01	PERENCANAAN	7.096.273.000,00	82.705.000,00	0,00	0,00
		6.967.366.398,00	76.975.000,00	0,00	0,00
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.262.971.000,00	82.705.000,00	0,00	0,00
		5.168.660.348,00	76.975.000,00	0,00	0,00
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.718.000,00	0,00	0,00	0,00
		41.404.550,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	33.812.000,00	0,00	0,00	0,00
		33.660.750,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.906.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.743.800,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.440.776.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.355.590.789,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.416.632.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.331.567.207,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24.144.000,00	0,00	0,00	0,00
		24.023.582,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		49.856.600,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		49.856.600,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	418.045.000,00	2.095.000,00	0,00	0,00
		417.616.727,00	1.999.000,00	0,00	0,00
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.967.500,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	129.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		128.967.400,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	94.340.000,00	0,00	0,00	0,00
		94.335.375,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.650.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		19.958.200,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	158.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		157.835.752,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.905.000,00	2.095.000,00	0,00	0,00
		1.902.500,00	1.999.000,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	340.000,00	80.610.000,00	0,00	0,00
		340.000,00	74.976.000,00	0,00	0,00
5.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	340.000,00	80.610.000,00	0,00	0,00
		340.000,00	74.976.000,00	0,00	0,00
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	151.592.000,00	0,00	0,00	0,00
		144.575.695,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.478.100,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	85.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		78.526.295,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	62.592.000,00	0,00	0,00	0,00
		62.571.300,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	160.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		159.275.987,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	112.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		111.749.987,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		31.932.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.594.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.196.614.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.179.022.595,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	738.837.000,00	0,00	0,00	0,00
		731.009.249,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	317.698.000,00	0,00	0,00	0,00
		314.790.443,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	421.139.000,00	0,00	0,00	0,00
		416.218.806,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	157.596.000,00	0,00	0,00	0,00
		155.004.753,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	157.596.000,00	0,00	0,00	0,00
		155.004.753,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	300.181.000,00	0,00	0,00	0,00
		293.008.593,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	300.181.000,00	0,00	0,00	0,00
		293.008.593,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	636.688.000,00	0,00	0,00	0,00
		619.683.455,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	255.142.000,00	0,00	0,00	0,00
		248.506.078,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	95.288.000,00	0,00	0,00	0,00
		93.503.478,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	159.854.000,00	0,00	0,00	0,00
		155.002.600,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	250.758.000,00	0,00	0,00	0,00
		249.168.384,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	195.522.000,00	0,00	0,00	0,00
		194.126.668,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	55.236.000,00	0,00	0,00	0,00
		55.041.716,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	130.788.000,00	0,00	0,00	0,00
		122.008.993,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	130.788.000,00	0,00	0,00	0,00
		122.008.993,00	0,00	0,00	0,00
5.02	KEUANGAN	27.179.536.000,00	3.845.312.000,00	1.235.728.000,00	677.473.383.000,00
		26.043.543.184,00	3.832.834.500,00	409.940.801,00	676.974.543.619,00
5.02.00	Non Program	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	85.211.926,00	0,00
5.02.00.0.00	Non Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	85.211.926,00	0,00
5.02.00.0.00.00	Non Sub Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	85.211.926,00	0,00
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.199.791.000,00	3.845.312.000,00	0,00	0,00
		16.229.556.920,00	3.832.834.500,00	0,00	0,00
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	117.366.000,00	0,00	0,00	0,00
		115.998.300,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	77.366.000,00	0,00	0,00	0,00
		76.979.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		39.019.300,00	0,00	0,00	0,00



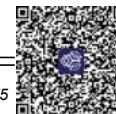
KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.479.547.000,00	0,00	0,00	0,00
		14.552.799.184,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.282.198.000,00	0,00	0,00	0,00
		14.359.228.016,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	197.349.000,00	0,00	0,00	0,00
		193.571.168,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	196.724.000,00	0,00	0,00	0,00
		193.483.993,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	196.724.000,00	0,00	0,00	0,00
		193.483.993,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	415.554.000,00	0,00	0,00	0,00
		407.274.392,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.970.800,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	105.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		102.011.380,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	41.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		37.942.200,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.990.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		73.636.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	138.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		137.651.212,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	28.554.000,00	0,00	0,00	0,00
		28.072.800,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	3.845.312.000,00	0,00	0,00
		0,00	3.832.834.500,00	0,00	0,00
5.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	3.596.112.000,00	0,00	0,00
		0,00	3.584.269.500,00	0,00	0,00
5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0,00	16.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	16.000.000,00	0,00	0,00
5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	233.200.000,00	0,00	0,00
		0,00	232.565.000,00	0,00	0,00
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	468.600.000,00	0,00	0,00	0,00
		440.041.564,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.929.500,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	298.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		269.823.064,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	166.600.000,00	0,00	0,00	0,00
		166.289.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	522.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		519.959.487,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	237.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		235.553.487,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		79.445.500,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	205.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		204.960.500,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	3.140.740.000,00	0,00	1.235.728.000,00	677.473.383.000,00
		3.050.225.921,00	0,00	324.728.875,00	676.974.543.619,00
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.013.554.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.007.171.206,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	170.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		169.188.100,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	323.554.000,00	0,00	0,00	0,00
		319.317.849,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		299.625.960,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		149.534.876,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		69.504.421,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	625.366.000,00	0,00	0,00	0,00
		602.701.332,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	193.683.000,00	0,00	0,00	0,00
		190.046.300,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemetongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	118.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		115.226.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait	113.683.000,00	0,00	0,00	0,00
		105.293.037,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		192.135.995,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	551.366.000,00	0,00	0,00	0,00
		544.662.729,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	110.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		109.861.850,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	113.683.000,00	0,00	0,00	0,00
		112.797.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	133.683.000,00	0,00	0,00	0,00
		132.486.916,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	170.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		166.334.563,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.03.12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		23.182.400,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	950.454.000,00	0,00	1.235.728.000,00	677.473.383.000,00
		895.690.654,00	0,00	324.728.875,00	676.974.543.619,00
5.02.02.2.04.07	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	730.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		675.656.402,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	220.454.000,00	0,00	0,00	663.680.625.000,00
		220.034.252,00	0,00	0,00	663.231.376.738,00
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	0,00	0,00	1.235.728.000,00	0,00
		0,00	0,00	324.728.875,00	0,00
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	13.792.758.000,00
		0,00	0,00	0,00	13.743.166.881,00
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.721.168.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.696.729.074,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.721.168.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.696.729.074,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	85.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		83.908.500,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	121.436.000,00	0,00	0,00	0,00
		118.370.641,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	330.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		324.199.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	683.554.000,00	0,00	0,00	0,00
		678.731.911,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	141.178.000,00	0,00	0,00	0,00
		137.969.300,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	110.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		107.526.550,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	165.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		161.574.172,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	85.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		84.449.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.117.837.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.067.031.269,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.117.837.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.067.031.269,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	1.066.070.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.037.414.332,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	105.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		103.497.450,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	245.265.000,00	0,00	0,00	0,00
		240.475.837,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		129.809.721,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	411.049.000,00	0,00	0,00	0,00
		396.259.129,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	3.160.453.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.159.574.800,00	0,00	0,00	0,00
5.03	KEPEGAWAIAN	59.303.533.000,00	541.324.000,00	0,00	0,00
		19.786.865.731,00	534.826.000,00	0,00	0,00
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	57.223.250.000,00	541.324.000,00	0,00	0,00
		18.379.462.622,00	534.826.000,00	0,00	0,00
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.116.000,00	0,00	0,00	0,00
		23.293.480,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.247.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.678.480,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.869.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.615.000,00	0,00	0,00	0,00



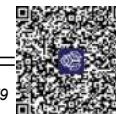
KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	56.616.915.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.823.751.919,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	56.593.019.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.800.921.319,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	23.896.000,00	0,00	0,00	0,00
		22.830.600,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	155.078.000,00	0,00	0,00	0,00
		150.995.313,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.538.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.238.500,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		28.942.750,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	33.540.000,00	0,00	0,00	0,00
		33.539.150,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		990.000,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		21.805.000,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		55.499.213,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.980.700,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	125.450.000,00	541.324.000,00	0,00	0,00
		103.700.000,00	534.826.000,00	0,00	0,00
5.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	125.225.000,00	251.549.000,00	0,00	0,00
		103.475.000,00	248.476.000,00	0,00	0,00
5.03.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	225.000,00	289.775.000,00	0,00	0,00
		225.000,00	286.350.000,00	0,00	0,00
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	151.596.000,00	0,00	0,00	0,00
		129.625.798,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.058.000,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	139.596.000,00	0,00	0,00	0,00
		118.618.498,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.949.300,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	150.095.000,00	0,00	0,00	0,00
		148.096.112,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	106.345.000,00	0,00	0,00	0,00
		104.482.912,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		34.886.800,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.750.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.726.400,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.080.283.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.407.403.109,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1.170.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		520.597.929,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	905.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		265.609.701,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	205.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		198.630.630,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		56.357.598,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	735.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		717.964.624,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	225.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		212.375.393,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	510.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		505.589.231,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	72.628.000,00	0,00	0,00	0,00
		72.350.346,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	37.029.000,00	0,00	0,00	0,00
		36.856.398,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	35.599.000,00	0,00	0,00	0,00
		35.493.948,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	102.655.000,00	0,00	0,00	0,00
		96.490.210,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	44.455.000,00	0,00	0,00	0,00
		42.873.548,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.04.03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	58.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		53.616.662,00	0,00	0,00	0,00
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1.879.526.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.778.242.450,00	0,00	0,00	0,00
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.879.526.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.778.242.450,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	371.036.000,00	0,00	0,00	0,00
		344.813.000,00	0,00	0,00	0,00
5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	371.036.000,00	0,00	0,00	0,00
		344.813.000,00	0,00	0,00	0,00
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1.508.490.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.433.429.450,00	0,00	0,00	0,00
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1.508.490.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.433.429.450,00	0,00	0,00	0,00
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	482.039.000,00	0,00	0,00	0,00
		475.689.611,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	482.039.000,00	0,00	0,00	0,00
		475.689.611,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	315.459.000,00	0,00	0,00	0,00
		311.868.039,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.2.01.02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	315.459.000,00	0,00	0,00	0,00
		311.868.039,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	166.580.000,00	0,00	0,00	0,00
		163.821.572,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	166.580.000,00	0,00	0,00	0,00
		163.821.572,00	0,00	0,00	0,00
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	10.269.700.000,00	197.750.000,00	0,00	0,00
		10.099.358.583,00	194.632.700,00	0,00	0,00
6.01	INSPEKTORAT	10.269.700.000,00	197.750.000,00	0,00	0,00
		10.099.358.583,00	194.632.700,00	0,00	0,00
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.378.792.000,00	197.750.000,00	0,00	0,00
		8.238.788.217,00	194.632.700,00	0,00	0,00
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		29.955.544,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		16.972.544,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.983.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.682.504.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.550.609.107,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.668.504.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.539.224.826,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
6.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.384.281,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		69.832.279,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		69.832.279,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	135.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		134.491.791,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		14.993.700,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.995.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.990.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.970.500,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.975.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		74.567.591,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.419.000,00	197.750.000,00	0,00	0,00
		2.419.000,00	194.632.700,00	0,00	0,00
6.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	39.103.900,00	0,00	0,00
6.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.754.000,00	78.415.000,00	0,00	0,00
		1.754.000,00	76.584.800,00	0,00	0,00
6.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	665.000,00	79.335.000,00	0,00	0,00
		665.000,00	78.944.000,00	0,00	0,00
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	162.038.000,00	0,00	0,00	0,00
		156.210.850,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.993.300,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	112.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		106.249.001,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	48.038.000,00	0,00	0,00	0,00
		47.968.549,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	296.831.000,00	0,00	0,00	0,00
		295.269.646,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	194.831.000,00	0,00	0,00	0,00
		194.439.246,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.970.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		24.915.400,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		63.945.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.216.908.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.192.932.811,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.012.560.000,00	0,00	0,00	0,00
		995.095.435,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		97.430.897,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	208.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		206.941.430,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	71.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		70.707.106,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	81.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		80.786.228,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	448.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		436.580.895,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.01.06	Kerja Sama Pengawasan Internal	41.660.000,00	0,00	0,00	0,00
		41.070.600,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	62.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		61.578.279,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	204.348.000,00	0,00	0,00	0,00
		197.837.376,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	61.600.000,00	0,00	0,00	0,00
		57.531.318,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	142.748.000,00	0,00	0,00	0,00
		140.306.058,00	0,00	0,00	0,00
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	674.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		667.637.555,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		26.836.188,00	0,00	0,00	0,00
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		13.851.088,00	0,00	0,00	0,00
6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.985.100,00	0,00	0,00	0,00
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	647.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		640.801.367,00	0,00	0,00	0,00
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	58.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		57.184.426,00	0,00	0,00	0,00
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	185.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		182.551.848,00	0,00	0,00	0,00
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	235.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		233.283.239,00	0,00	0,00	0,00
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	169.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		167.781.854,00	0,00	0,00	0,00
7	UNSUR KEWILAYAHAN	77.091.760.457,00	847.166.000,00	0,00	0,00
		73.710.155.797,00	829.148.900,00	0,00	0,00
7.01	KECAMATAN	77.091.760.457,00	847.166.000,00	0,00	0,00
		73.710.155.797,00	829.148.900,00	0,00	0,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	61.984.749.457,00	420.711.000,00	0,00	0,00
		58.780.287.593,00	408.423.800,00	0,00	0,00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	350.263.000,00	0,00	0,00	0,00
		340.831.182,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	243.322.000,00	0,00	0,00	0,00
		238.585.351,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	106.941.000,00	0,00	0,00	0,00
		102.245.831,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	57.500.660.457,00	0,00	0,00	0,00
		54.443.873.200,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	56.902.181.457,00	0,00	0,00	0,00
		53.863.490.186,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	598.479.000,00	0,00	0,00	0,00
		580.383.014,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.309.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.309.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.173.465.000,00	6.141.000,00	0,00	0,00
		1.159.270.470,00	6.139.000,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.745.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
		100.508.500,00	2.000.000,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	400.295.000,00	0,00	0,00	0,00
		393.391.150,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	164.629.000,00	0,00	0,00	0,00
		164.497.555,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	70.130.000,00	0,00	0,00	0,00
		68.789.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	337.245.000,00	141.000,00	0,00	0,00
		334.174.450,00	139.000,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	58.091.000,00	0,00	0,00	0,00
		56.144.025,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	42.330.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
		41.765.790,00	4.000.000,00	0,00	0,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	21.872.000,00	364.973.000,00	0,00	0,00
		21.669.000,00	353.537.300,00	0,00	0,00
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0,00	17.254.000,00	0,00	0,00
		0,00	17.124.000,00	0,00	0,00
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.672.000,00	296.051.000,00	0,00	0,00
		1.639.000,00	286.217.300,00	0,00	0,00
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.200.000,00	51.668.000,00	0,00	0,00
		20.030.000,00	50.196.000,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.422.653.000,00	762.000,00	0,00	0,00
		1.327.031.756,00	760.500,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	43.119.000,00	0,00	0,00	0,00
		41.033.800,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	741.548.000,00	0,00	0,00	0,00
		649.187.885,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	637.986.000,00	762.000,00	0,00	0,00
		636.810.071,00	760.500,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.513.436.000,00	48.835.000,00	0,00	0,00
		1.485.302.985,00	47.987.000,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	99.782.000,00	0,00	0,00	0,00
		99.377.385,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	744.246.000,00	0,00	0,00	0,00
		725.805.268,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	33.823.000,00	0,00	0,00	0,00
		33.403.100,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	193.742.000,00	0,00	0,00	0,00
		189.633.800,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	382.855.000,00	48.835.000,00	0,00	0,00
		378.615.832,00	47.987.000,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	58.988.000,00	0,00	0,00	0,00
		58.467.600,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.561.194.000,00	39.799.000,00	0,00	0,00
		1.540.694.180,00	39.725.600,00	0,00	0,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1.561.194.000,00	39.799.000,00	0,00	0,00
		1.540.694.180,00	39.725.600,00	0,00	0,00
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	1.561.194.000,00	39.799.000,00	0,00	0,00
		1.540.694.180,00	39.725.600,00	0,00	0,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	8.812.563.000,00	386.656.000,00	0,00	0,00
		8.715.857.320,00	380.999.500,00	0,00	0,00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	8.812.563.000,00	386.656.000,00	0,00	0,00
		8.715.857.320,00	380.999.500,00	0,00	0,00
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	142.257.000,00	0,00	0,00	0,00
		138.053.200,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	6.775.371.000,00	364.300.000,00	0,00	0,00
		6.699.462.162,00	361.179.500,00	0,00	0,00
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.869.444.000,00	22.356.000,00	0,00	0,00
		1.853.390.458,00	19.820.000,00	0,00	0,00
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	25.491.000,00	0,00	0,00	0,00
		24.951.500,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	401.891.000,00	0,00	0,00	0,00
		399.755.350,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	401.891.000,00	0,00	0,00	0,00
		399.755.350,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	386.343.000,00	0,00	0,00	0,00
		384.207.350,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	15.548.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.548.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	4.331.363.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.273.561.354,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4.331.363.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.273.561.354,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	561.388.000,00	0,00	0,00	0,00
		552.115.640,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.650.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.648.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	83.484.000,00	0,00	0,00	0,00
		81.860.565,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	67.579.000,00	0,00	0,00	0,00
		66.429.566,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	237.149.000,00	0,00	0,00	0,00
		233.014.046,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	198.057.000,00	0,00	0,00	0,00
		196.738.124,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	539.672.000,00	0,00	0,00	0,00
		534.823.362,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	2.431.560.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.402.903.909,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	208.824.000,00	0,00	0,00	0,00
		202.028.142,00	0,00	0,00	0,00
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	32.820.724.581,00	159.933.000,00	0,00	0,00
		32.523.233.076,00	159.430.000,00	0,00	0,00
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	32.820.724.581,00	159.933.000,00	0,00	0,00
		32.523.233.076,00	159.430.000,00	0,00	0,00
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.431.309.581,00	159.933.000,00	0,00	0,00
		3.299.006.561,00	159.430.000,00	0,00	0,00
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.845.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.599.500,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.855.000,00	0,00	0,00	0,00
		13.649.500,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.990.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.950.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.068.415.581,00	0,00	0,00	0,00
		2.939.769.479,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.038.727.581,00	0,00	0,00	0,00
		2.910.159.571,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	29.688.000,00	0,00	0,00	0,00
		29.609.908,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.900.000,00	0,00	0,00	0,00
		25.561.700,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25.900.000,00	0,00	0,00	0,00
		25.561.700,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	113.939.000,00	0,00	0,00	0,00
		113.511.105,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.999.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.428.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.421.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.497.400,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.499.800,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.954.050,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	63.334.000,00	0,00	0,00	0,00
		63.166.955,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8.177.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.972.900,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	902.000,00	159.933.000,00	0,00	0,00
		881.000,00	159.430.000,00	0,00	0,00
8.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	41.728.000,00	0,00	0,00
		0,00	41.375.000,00	0,00	0,00
8.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	902.000,00	118.205.000,00	0,00	0,00
		881.000,00	118.055.000,00	0,00	0,00
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	96.912.000,00	0,00	0,00	0,00
		94.617.986,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.479.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	47.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		45.525.886,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	47.412.000,00	0,00	0,00	0,00
		46.613.100,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	109.396.000,00	0,00	0,00	0,00
		109.065.791,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	59.321.000,00	0,00	0,00	0,00
		59.203.791,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	12.475.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.430.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.955.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.600.000,00	0,00	0,00	0,00
		25.477.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.02	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	415.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		410.838.741,00	0,00	0,00	0,00
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	415.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		410.838.741,00	0,00	0,00	0,00
8.01.02.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	415.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		410.838.741,00	0,00	0,00	0,00
8.01.03	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	25.692.385.000,00	0,00	0,00	0,00
		25.562.296.650,00	0,00	0,00	0,00
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	25.692.385.000,00	0,00	0,00	0,00
		25.562.296.650,00	0,00	0,00	0,00
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	25.692.385.000,00	0,00	0,00	0,00
		25.562.296.650,00	0,00	0,00	0,00
8.01.04	PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	237.341.000,00	0,00	0,00	0,00
		236.958.200,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	237.341.000,00	0,00	0,00	0,00
		236.958.200,00	0,00	0,00	0,00
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	233.300.000,00	0,00	0,00	0,00
		232.917.800,00	0,00	0,00	0,00
8.01.04.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	4.041.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.040.400,00	0,00	0,00	0,00
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	1.722.842.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.713.797.770,00	0,00	0,00	0,00
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1.722.842.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.713.797.770,00	0,00	0,00	0,00
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1.614.215.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.611.526.170,00	0,00	0,00	0,00
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	108.627.000,00	0,00	0,00	0,00
		102.271.600,00	0,00	0,00	0,00
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.321.847.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.300.335.154,00	0,00	0,00	0,00
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1.321.847.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.300.335.154,00	0,00	0,00	0,00
8.01.06.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		34.338.697,00	0,00	0,00	0,00
8.01.06.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	64.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		62.986.610,00	0,00	0,00	0,00

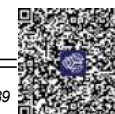


KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	210.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		205.816.903,00	0,00	0,00	0,00
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		199.951.604,00	0,00	0,00	0,00
8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12.847.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.706.390,00	0,00	0,00	0,00
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	800.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		784.534.950,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		2.124.708.998.900,00	290.509.850.100,00	1.235.728.000,00	677.473.383.000,00
		2.020.914.516.871,00	278.842.913.538,00	409.940.801,00	676.974.543.619,00

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO



LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
 NOMOR 8 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
 PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Ref.	Tahun 2023	Tahun 2022
1	2	3	4
Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1	258.817.350.877,98	269.179.627.198,98
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.2	258.817.350.877,98	269.179.627.198,98
Sub Total		0,00	0,00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	5.2.3	164.691.485.769,98	258.817.350.877,98
Sub Total		164.691.485.769,98	258.817.350.877,98
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		0,00	0,00
Lain-lain		0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	5.2.4	164.691.485.769,98	258.817.350.877,98

Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Ref.	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN - LO	5.4.1				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	5.4.1.1				
Pajak Daerah - LO	5.4.1.1.1	138.433.022.893,88	129.947.088.731,15	8.485.934.162,73	6,53
Retribusi Daerah - LO	5.4.1.1.2	28.398.881.530,25	29.168.471.204,41	(769.589.674,16)	(2,64)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	5.4.1.1.3	35.664.544.215,92	17.640.585.052,00	18.023.959.163,92	102,17
Lain-lain PAD Yang Sah - LO	5.4.1.1.4	279.045.846.743,26	263.191.841.577,27	15.854.005.165,99	6,02
Jumlah PAD - LO		481.542.295.383,31	439.947.986.564,83	41.594.308.818,48	9,45
PENDAPATAN TRANSFER - LO	5.4.1.2				
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LO	5.4.1.2.1				
Dana Bagi Hasil - LO	5.4.1.2.1.1	40.353.020.666,44	38.220.093.261,00	2.132.927.405,44	5,58
Dana Alokasi Umum - LO	5.4.1.2.1.2	1.239.930.914.430,00	1.176.172.068.800,00	63.758.845.630,00	5,42
Dana Alokasi Khusus - LO	5.4.1.2.1.3	467.167.944.694,00	460.367.527.917,00	6.800.416.777,00	1,48
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -Dana Perimbangan - LO		1.747.451.879.790,44	1.674.759.689.978,00	72.692.189.812,44	4,34
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	5.4.1.2.2				
Dana Insentif Daerah - LO	5.4.1.2.2.1	11.805.728.000,00	0,00	11.805.728.000,00	0,00
Dana Desa - LO	5.4.1.2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya -LO		11.805.728.000,00	0,00	11.805.728.000,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - LO	5.4.1.2.3				
Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO	5.4.1.2.3.1	176.853.178.521,00	174.430.162.580,00	2.423.015.941,00	1,39
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LO	5.4.1.2.3.2	10.639.281.000,00	30.643.811.000,00	(20.004.530.000,00)	(65,28)
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - LO		187.492.459.521,00	205.073.973.580,00	(17.581.514.059,00)	(8,57)
Jumlah Pendapatan Transfer - LO		1.946.750.067.311,44	1.879.833.663.558,00	66.916.403.753,44	3,56
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	5.4.1.3				
Pendapatan Hibah	5.4.1.3.1	15.115.805.742,00	5.250.570.763,00	9.865.234.979,00	187,89
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO		15.115.805.742,00	5.250.570.763,00	9.865.234.979,00	187,89
JUMLAH PENDAPATAN - LO		2.443.408.168.436,75	2.325.032.220.885,83	118.375.947.550,92	5,09
BEBAN - LO	5.4.2				
Beban Pegawai	5.4.2.1	1.170.781.732.921,00	1.143.541.014.988,00	27.240.717.933,00	2,38
Beban Persediaan	5.4.2.2	120.440.703.262,04	129.227.982.839,05	(8.787.279.577,01)	(6,80)
Beban Jasa	5.4.2.3	511.700.525.549,57	438.028.568.766,54	73.671.956.783,03	16,82
Beban Pemeliharaan	5.4.2.4	41.801.795.747,00	36.243.110.638,00	5.558.685.109,00	15,34
Beban Perjalanan Dinas	5.4.2.5	50.636.739.096,00	47.731.989.155,00	2.904.749.941,00	6,09
Beban Subsidi	5.4.2.6	675.656.402,00	313.864.348,00	361.792.054,00	115,27
Beban Hibah	5.4.2.7	88.719.045.255,00	37.491.422.414,00	51.227.622.841,00	136,64
Beban Bantuan Sosial	5.4.2.8	11.040.168.523,00	11.088.807.122,00	(48.638.599,00)	(0,44)
Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.9	1.941.495.935,95	1.426.171.211,00	515.324.724,95	36,13
Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.4.2.10	295.412.850.752,87	309.591.026.986,50	(14.178.176.233,63)	(4,58)
Beban Transfer	5.4.2.11	221.014.650.419,00	215.734.892.300,00	5.279.758.119,00	2,45
JUMLAH BEBAN - LO		2.514.165.363.863,43	2.370.418.850.768,09	143.746.513.095,34	6,06
SURPLUS/ DEFISIT DARI OPERASI	5.4.3	(70.757.195.426,68)	(45.386.629.882,26)	(25.370.565.544,42)	55,90

Uraian	Ref.	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.4				
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	5.4.4.1	0,00	1.829.716.362,00	(1.829.716.362,00)	(100,00)
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	5.4.4.2	61.892.277.453,00	16.836.290.192,00	45.055.987.261,00	267,61
SURPLUS / DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(61.892.277.453,00)	(15.006.573.830,00)	(46.885.703.623,00)	312,43
SURPLUS/ DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	5.4.5	(132.649.472.879,68)	(60.393.203.712,26)	(72.256.269.167,42)	119,64
POS LUAR BIASA	5.4.6				
Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Luar Biasa	5.4.6.1	409.940.801,00	1.295.204.500,00	(885.263.699,00)	(68,35)
SURPLUS/ DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		(409.940.801,00)	(1.295.204.500,00)	885.263.699,00	(68,35)
SURPLUS/DEFISIT-LO	5.4.7	(133.059.413.680,68)	(61.688.408.212,26)	(71.371.005.468,42)	115,70

Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
 NOMOR 8 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Ref.	Tahun 2023	Tahun 2022
1	2	3	4
EKUITAS AWAL	5.6.1	4.592.239.658.445,71	4.614.349.431.228,11
SURPLUS/DEFISIT-LO	5.6.2	(133.059.413.680,68)	(61.688.408.212,26)
DAMPAK KUMULATIF KESALAHAN MENDASAR :	5.6.3	(1.088.604.645,38)	39.578.635.429,86
Koreksi Nilai Persediaan			
Selisih Revaluasi Aset Tetap			
Lain-lain	5.6.3.1		
Koreksi Piutang		0,00	2.283.077.472,50
Koreksi Investasi		0,00	(6.637.838.044,46)
Koreksi Aset Tetap		10.013.457.286,62	8.440.561.681,00
Koreksi Aset Lainnya		(11.102.061.932,00)	35.492.834.320,82
EKUITAS AKHIR	5.6.4	4.458.091.640.119,65	4.592.239.658.445,71

Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam rupiah)

URAIAN	Ref.	Tahun 2023	Tahun 2022
1	2	3	4
ASET	5.3.1		
ASET LANCAR	5.3.1.1		
Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1	113.015.912.113,00	170.249.980.751,00
Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.2	212.936.280,00	41.794.313,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.3	0,00	1.429.217,00
Kas di BLUD	5.3.1.1.4	49.367.509.581,98	87.496.345.014,98
Kas Dana BOS	5.3.1.1.5	893.163.639,00	1.037.127.884,00
Kas Lainnya	5.3.1.1.6	1.208.402.886,00	0,00
Piutang Pajak	5.3.1.1.7	9.358.194.241,00	7.980.512.527,00
Piutang Retribusi	5.3.1.1.8	4.359.106.740,00	4.079.655.400,00
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	5.3.1.1.9	21.073.792.846,36	20.390.647.936,94
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	5.3.1.1.10	0,00	0,00
Piutang Transfer Antar Daerah	5.3.1.1.11	6.047.212.575,00	3.437.968.245,00
Penyisihan Piutang	5.3.1.1.12	(10.866.464.784,45)	(9.170.645.322,50)
Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.1.13	33.705.587,11	63.096.715,00
Persediaan	5.3.1.1.14	51.568.005.606,60	59.569.450.839,32
JUMLAH ASET LANCAR		246.271.477.311,60	345.177.363.520,74
INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	5.3.1.2.1		
Investasi Non Permanen Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen		0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen	5.3.1.2.2		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		204.963.341.996,07	168.191.138.468,15
Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen		204.963.341.996,07	168.191.138.468,15
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		204.963.341.996,07	168.191.138.468,15
ASET TETAP	5.3.1.3		
Tanah	5.3.1.3.1	811.434.718.585,55	794.019.449.045,55
Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	1.136.839.523.231,00	1.094.696.731.234,00
Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	1.741.811.783.185,00	1.664.430.735.238,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.3.1.3.4	2.917.657.832.729,25	2.787.621.602.000,25
Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	111.986.224.096,00	143.266.418.481,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	9.455.386.708,00	8.911.032.658,00
Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(2.793.035.937.938,29)	(2.533.703.596.021,04)
JUMLAH ASET TETAP		3.936.149.530.596,51	3.959.242.372.635,76
DANA CADANGAN	5.3.1.4		
Dana Cadangan		12.774.460.000,00	15.000.000.000,00
JUMLAH DANA CADANGAN		12.774.460.000,00	15.000.000.000,00
ASET LAINNYA	5.3.1.5		
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.3.1.5.1	16.134.562.688,00	16.134.562.688,00
Aset Tidak Berwujud	5.3.1.5.2	5.922.595.030,00	5.873.323.030,00
Aset Lain-lain	5.3.1.5.3	132.099.376.769,44	121.819.628.982,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.3.1.5.4	(3.301.923.144,00)	(2.614.022.456,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	5.3.1.5.5	(34.132.133.152,00)	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA		116.722.478.191,44	141.213.492.244,00
JUMLAH ASET		4.516.881.288.095,62	4.628.824.366.868,65

URAIAN	Ref.	Tahun 2023	Tahun 2022
1	2	3	4
KEWAJIBAN	5.3.2		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.1		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.1	6.438.730,00	9.326.302,00
Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.2	2.002.249.183,97	1.109.331.028,94
Utang Belanja	5.3.2.1.3	56.780.960.062,00	35.466.051.092,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		58.789.647.975,97	36.584.708.422,94
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN		0,00	0,00
EKUITAS	5.3.3		
EKUITAS		4.458.091.640.119,65	4.592.239.658.445,71
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		4.516.881.288.095,62	4.628.824.366.868,65

Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

LAMPIRAN VI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
 NOMOR 8 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Ref.	Tahun 2023	Tahun 2022
1	2	3	4
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.1		
Arus Kas Masuk	5.5.1.1		
Penerimaan Pajak Daerah		137.222.705.502,00	129.843.875.322,00
Penerimaan Retribusi Daerah		28.881.046.419,00	28.375.110.419,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		19.123.340.688,00	17.640.585.052,00
Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah		276.385.853.217,00	334.657.088.320,00
Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat		0,00	2.123.296.694.941,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil		36.123.723.591,00	0,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		1.239.930.914.430,00	0,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus		507.146.964.042,00	0,00
Penerimaan Dana Insentif		11.805.728.000,00	0,00
Penerimaan Dana Desa		455.959.893.200,00	0,00
Penerimaan Transfer Antar Daerah		0,00	206.406.947.000,00
Penerimaan Bagi Hasil Pajak		174.243.934.191,00	0,00
Penerimaan Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		10.639.281.000,00	0,00
Penerimaan Hibah		1.520.109.562,00	5.145.999.988,00
Jumlah Arus Kas Masuk		2.898.983.493.842,00	2.845.366.301.042,00
Arus Kas Keluar	5.5.1.2		
Pembayaran Pegawai		1.153.775.444.865,00	1.142.207.137.167,00
Pembayaran Barang dan Jasa		726.725.182.478,00	704.907.763.493,00
Pembayaran Subsidi		675.656.402,00	313.864.348,00
Pembayaran Hibah		128.698.064.603,00	59.752.651.931,00
Pembayaran Bantuan Sosial		11.040.168.523,00	11.088.807.122,00
Pembayaran Tak Terduga		409.940.801,00	1.295.204.500,00
Pembayaran Transfer Belanja Bagi Hasil		0,00	12.402.615.800,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak		11.224.696.000,00	0,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		2.518.470.881,00	0,00
Pembayaran Transfer Belanja Bantuan Keuangan		0,00	620.088.649.500,00
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		663.231.376.738,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar		2.698.299.001.291,00	2.552.056.693.861,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		200.684.492.551,00	293.309.607.181,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	5.5.2		
Arus Kas Masuk	5.5.2.1		
Pencairan Dana Cadangan		22.225.540.000,00	0,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin		1.769.454.879,00	1.521.719.362,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		204.361.000,00	249.797.000,00
Penjualan Aset Tetap Lainnya		64.200.000,00	58.200.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk		24.263.555.879,00	1.829.716.362,00
Arus Kas Keluar	5.5.2.2		
Pembentukan Dana Cadangan		20.000.000.000,00	15.000.000.000,00
Perolehan Tanah		1.400.551.240,00	1.387.839.580,00
Perolehan Peralatan dan Mesin		65.799.396.633,00	102.152.506.285,00
Perolehan Gedung dan Bangunan		75.265.208.901,00	34.758.067.305,00
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan		124.921.560.732,00	126.620.498.535,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya		11.456.196.032,00	6.894.828.159,00
Perolehan Aset Lainnya		0,00	487.860.000,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		20.231.000.000,00	18.200.000.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar		319.073.913.538,00	305.501.599.864,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(294.810.357.659,00)	(303.671.883.502,00)

Uraian	Ref.	Tahun 2023	Tahun 2022
1	2	3	4
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	5.5.3		
Arus Kas Masuk	5.5.3.1		
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		2.100.000.000,00	2.100.000.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk		2.100.000.000,00	2.100.000.000,00
Arus Kas Keluar	5.5.3.2		
Pemberian Pinjaman Daerah		2.100.000.000,00	2.100.000.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar		2.100.000.000,00	2.100.000.000,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		0,00	0,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.5.4		
Arus Kas Masuk	5.5.4.1		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga		168.451.375.647,01	154.521.795.983,00
Jumlah Arus Kas Masuk		168.451.375.647,01	154.521.795.983,00
Arus Kas Keluar	5.5.4.2		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga		168.454.263.219,01	154.512.469.681,00
Jumlah Arus Kas Keluar		168.454.263.219,01	154.512.469.681,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		(2.887.572,00)	9.326.302,00
Kenaikan/Penurunan Kas	5.5.5	(94.128.752.680,00)	(10.352.950.019,00)
Saldo Awal Kas	5.5.5.1	258.826.677.179,98	269.179.627.198,98
Saldo Akhir Kas	5.5.5.2	164.697.924.499,98	258.826.677.179,98
Rincian Saldo Akhir Kas:			
Kas di Kas Daerah		113.015.912.113,00	170.249.980.751,00
Kas di Bendahara Penerimaan		212.936.280,00	41.794.313,00
Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	1.429.217,00
Kas di BLUD		49.367.509.581,98	87.496.345.014,98
Kas Dana BOS		893.163.639,00	1.037.127.884,00
Kas Lainnya		1.208.402.886,00	0,00
Jumlah		164.697.924.499,98	258.826.677.179,98

Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan disusun dengan maksud sebagai bentuk pertanggungjawaban Bupati Kebumen atas pengelolaan keuangan beserta kinerja atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kebumen.

Tujuan laporan keuangan adalah:

1. Menyediakan informasi yang andal dan relevan mengenai posisi keuangan serta seluruh transaksi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kebumen selama satu periode pelaporan;
2. Untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan;
3. Untuk menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensinya, dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
4. Menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:
 - a. Menyediakan informasi mengenai penerimaan pada periode berjalan kaitannya dengan seluruh alokasi pengeluaran;
 - b. Menyediakan informasi mengenai cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya disesuaikan dengan anggaran yang telah ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
 - c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pembangunan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
 - d. Menyediakan informasi mengenai cara-cara yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam rangka mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhannya;
 - e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Kabupaten Kebumen berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak maupun pinjaman;
 - f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode berjalan;
 - g. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional, aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. PP Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

15. PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 1447);
19. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 1781);
20. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
21. Perda Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 13);
22. Perda Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 Nomor 10);
23. Peraturan Bupati (Perbup) Kebumen Nomor 105 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 105);
24. Perbup Kebumen Nomor 106 tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagaimana telah diubah dengan Perbup Kebumen Nomor 89 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perbup Kebumen Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 89);
25. Perbup Kebumen Nomor 95 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 95);
26. Perbup Kebumen Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Perbup Kebumen Nomor 95 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 Nomor 2);
27. Perbup Kebumen Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Perbup Kebumen Nomor 95 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 Nomor 8);
28. Perbup Kebumen Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Perbup Kebumen Nomor 95 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 Nomor 14);
29. Perbup Kebumen Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Perbup Kebumen Nomor 95 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 Nomor 27;

30. Perbup Kebumen Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Perbup Kebumen Nomor 95 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 Nomor 32;
31. Perbup Kebumen Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 Nomor 53) :
32. Perbup Kebumen Nomor 55 Tahun 2023 tentang Perubahan Perbup Kebumen Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 Nomor 55) ;
33. Perbup Kebumen Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Perbup Kebumen Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 Nomor 62) ; dan
34. Perbup Kebumen Nomor 69 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Perbup Kebumen Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 Nomor 69).

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kebumen Tahun 2023 sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- 2.1 Gambaran Umum Kabupaten Kebumen
- 2.2 Ekonomi Makro
- 2.3 Arah dan Kebijakan Umum APBD
- 2.4 Perubahan Kebijakan Umum APBD TA 2023
- 2.5 Indikator Pencapaian Target Kinerja Keuangan APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1 Iktisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Hambatan dan Kendala yang ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas Akuntansi/Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Bab V Penjelasan Pos – Pos Laporan Keuangan

5.1 Laporan Realisasi Anggaran

5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

5.3 Neraca

5.4 Laporan Operasional

5.5 Laporan Arus Kas

5.6 Laporan Perubahan Ekuitas

Bab VI Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan

Bab VII Penutup

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2.1. Gambaran Umum Kabupaten Kebumen

1. Letak Geografis

Kabupaten Kebumen merupakan kabupaten yang terletak di bagian selatan Provinsi Jawa Tengah, yang secara geografis terletak diantara 7o27' – 7o50' lintang selatan dan 109o22' – 109o50' bujur timur. Wilayah Kabupaten Kebumen berbatasan langsung atau memiliki wilayah pantai dan pegunungan, sehingga ketinggiannya berkisar antara 0 – 997,5 meter di atas permukaan laut, dengan batas-batas:

Sebelah utara : Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo

Sebelah timur : Kabupaten Purworejo

Sebelah selatan : Samudera Indonesia

Sebelah barat : Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas

Luas wilayah Kabupaten Kebumen adalah 128.111,50 hektar yang terbagi dalam 26 kecamatan, terdiri dari 449 desa dan 11 kelurahan.

Gambar 2.1. Peta Kabupaten Kebumen



*) Sumber : Kebumen dalam Angka

Kabupaten Kebumen secara administratif terdiri dari 26 kecamatan dengan luas wilayah sebesar 128.111,50 hektar atau 1.281,115 km², dengan kondisi beberapa wilayah merupakan daerah pantai dan perbukitan, sedangkan sebagian besar merupakan dataran rendah.

2. Demografi

a. Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Kebumen per 31 Desember 2023 adalah 1.434.023 jiwa terdiri dari laki-laki sebanyak 727.418 jiwa dan perempuan sebanyak 706.605 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 473.245 KK. Sementara itu kepadatan penduduk Kabupaten Kebumen tercatat sebanyak 1.100 jiwa/km².

b. Ketenagakerjaan

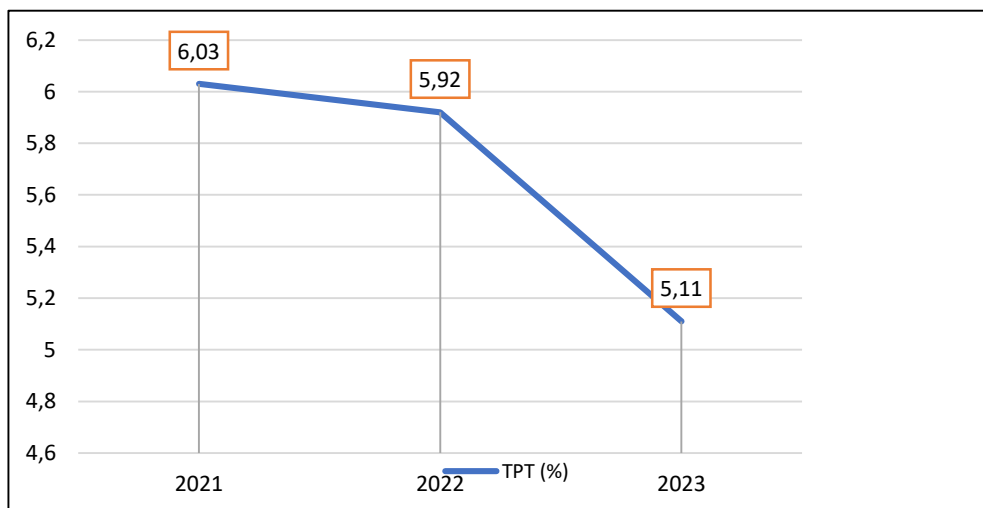
Penduduk usia kerja (usia 15 tahun atau lebih) di Kabupaten Kebumen pada tahun 2023 sebanyak 1.090.885 jiwa, meningkat dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 919.860 jiwa. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Kebumen pada tahun 2023 sekitar 74,54% dimana hal tersebut menggambarkan bahwa penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) di Kabupaten Kebumen termasuk dalam angkatan kerja. Jumlah ini naik dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 71,57%.

Sementara itu nilai Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kebumen tahun 2023 sebesar 5,11% mengalami penurunan dari tahun 2022 yang sebesar 5,92%, dimana TPT merupakan indikator yang digunakan untuk menggambarkan ketidakseimbangan antara ketersediaan lapangan pekerjaan dan penduduk yang berusaha mendapatkan pekerjaan, dimana ketersediaan lapangan pekerjaan lebih kecil dari pencari kerja sehingga tidak mampu menampung pencari kerja.

Selain TPAK, dalam analisis angkatan kerja juga dikenal indikator yang digunakan untuk mengukur pengangguran yaitu TPT. Pengangguran Terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapatkan pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran Terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga hanya orang yang termasuk angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka. TPT dihitung dari perbandingan antara banyaknya jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja.

TPT menggambarkan ketidakseimbangan antara ketersediaan lapangan pekerjaan dan penduduk yang berusaha mendapatkan pekerjaan, dimana ketersediaan lapangan pekerjaan lebih kecil dari pencari kerja sehingga tidak mampu menampung pencari kerja. Adapun perkembangan TPT di Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2023 dapat dilihat pada gambar berikut.

Grafik 2. 1 TPT Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2023



Sumber : BPS Kab. Kebumen, 2023

Perkembangan TPT di Kabupaten Kebumen selama tahun 2021 – 2023 menunjukkan tren penurunan dari 6,03% pada tahun 2021 menjadi 5,92% pada tahun 2022. Hal ini berarti dari 100 angkatan kerja terdapat enam orang yang menganggur.

Indikator kinerja ketenagakerjaan dapat dilihat juga dari besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Kebumen yang meningkat dari Rp2.035.890,00 pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp2.121.947,00 pada tahun 2023 atau naik sebesar Rp86.057,00 (4,06%). Capaian urusan tenaga kerja di Kabupaten Kebumen pada tahun 2021-2023 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1. Capaian Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen Tahun 2021–2023

No	Indikator	2021	2022	2023
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,03	5,92	5,11
2	Upah Minimum Kabupaten (Rp)	1.895.000	2.035.890	2.121.947

Sumber : BPS , Dinas Tenaga Kerja Kab. Kebumen, Data Diolah, 2023

c. Organisasi

Unsur Pemerintah Kabupaten Kebumen meliputi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), bupati/wakil bupati yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum (pemilu). Dalam melaksanakan pemerintahan, bupati/wakil bupati dibantu oleh Perangkat Daerah (PD) yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1) DPRD

Anggota DPRD dipilih melalui pemilu dan dilantik dalam masa jabatan lima tahun. DPRD Kabupaten Kebumen untuk periode tahun 2019-2024 dengan Ketua H. Sarimun, S.Sy dan Wakil Ketua Fuad Wahyudi, Agung Prabowo, dan Munawar Kholil.

2) Bupati/Wakil Bupati

Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Kebumen untuk periode tahun 2021-2026 dipimpin oleh H. Arif Sugiyanto, SH dan Hj. Ristawati Purwaningsih, S.ST, M.M.

3) Perangkat Daerah (PD)

Sesuai Perda Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perda Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Perda Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Perda tersebut mengatur tentang perubahan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A. Hal yang mendasari perubahan nomenklatur perangkat daerah tersebut adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Permendagri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah. Dalam melaksanakan tugas aparaturnya Kabupaten Kebumen melaksanakan kewenangan yang terbagi dalam 50 SKPD.

d. Kebijakan Pembangunan

Visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Kebumen tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, sebagai berikut:

1) Visi

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kebumen adalah “Kebumen Sejahtera, Mandiri, Berakhlak, Bersama Rakyat”.

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Sejahtera : bermakna suatu perwujudan kondisi keadaan dimana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara merata;

Mandiri : bermakna bahwa masyarakat Kabupaten Kebumen memiliki kemampuan mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya yang ada, sehingga mandiri diterjemahkan sebagai perekonomian yang berpihak pada masyarakat, ekonomi yang tumbuh melalui pemerataan, dan ekonomi yang bertumpu pada sektor-sektor yang berbasis pada potensi daerah dalam mencapai kemandirian daerah yang tangguh. Indikator untuk mengukur pencapaian kemandirian adalah meningkatnya daya saing daerah, dan meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian dapat dilihat dari kondisi infrastruktur dan peluang investasi;

Berakhlak : berarti bahwa pembangunan di Kebumen tidak hanya mengejar pemenuhan pembangunan fisik semata, namun juga bertujuan untuk membentuk kualitas rohani masyarakat yang memiliki kualitas moral, etikadan karakter hidup yang tinggi berbasis kehidupan spiritual berlandaskan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran-ajaran agama;

Bersama Rakyat : artinya masyarakat tidak hanya sekedar obyek namun juga sebagai subyek pembangunan. Diharapkan masyarakat berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

2) Misi

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:

- a) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open gov* terintegrasi;
- b) Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya;
- c) Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan;
- d) Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- e) Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.

2.2. Ekonomi Makro

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Secara umum selama periode Tahun 2021-2023 pergerakan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen memiliki pola yang sama dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional. Tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen pada tahun 2022 sebesar 5,92% menurun dibandingkan tahun 2021 sebesar 6,03%. Kemudian pada tahun 2023 ekonomi Kabupaten Kebumen tumbuh sebesar 5,66%.

Pada tahun 2023, berdasarkan angka proyeksi, terdapat 11 jenis lapangan usaha mengalami penurunan. Penurunan tersebut terdapat pada sektor Pertambangan dan Penggalian yang mengalami penurunan sebesar 0.31, Industri Pengolahan sebesar 0.16, Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang sebesar 0.84, Konstruksi 4.92, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 2.09, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 4.02, Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar -5.53, *real estate* sebesar 0.5, Jasa Perusahaan sebesar 1.7, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 0.5, dan Jasa Lainnya sebesar 2.47 dan terdapat 6 jenis lapangan usaha mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut terdapat pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 1.12, Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 0.7, Transportasi dan Pergudangan sebesar 1.18, Informasi dan

Komunikas sebesar 0.15, dan Jasa Pendidikan sebesar 1.19, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0.78.

2. Struktur Ekonomi

Besarnya aktivitas perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi dari setiap lapangan usaha.

Selama enam tahun terakhir (2016-2021) struktur perekonomian Kabupaten Kebumen didominasi oleh tiga kategori lapangan usaha, di antaranya Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Industri Pengolahan; serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Dominasi ketiga sektor tersebut masih terjadi di tahun 2023, di mana peranan berdasarkan harga perkiraan 2023 struktur PDRB Kabupaten Kebumen menunjukkan distribusi setiap lapangan usaha pada PDRB di tahun 2023 masih didominasi oleh Industri Pengolahan sebesar 22,24%; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 20,03%; serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 14,67%. Sementara itu distribusi terendah ada pada lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yakni sebesar 0,04%.

3. PDRB per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk tengah tahun. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Semakin besar nilai PDRB Perkapita suatu daerah, maka semakin tinggi tingkat kesejahteraannya.

4. Kualitas Pembangunan Manusia

Pembangunan daerah tidak hanya bertumpu pada ketersediaan dan penggalian potensi Sumber Daya Alam (SDA), tetapi juga Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai subjek sekaligus objek dari pembangunan daerah. Kualitas SDM diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang disusun atas tiga komposit utama yaitu kesehatan, pendidikan, dan kelayakan hidup. Pembangunan manusia dinilai berhasil jika penduduknya memiliki umur yang panjang, sehat, memiliki pengetahuan, dan mampu mencukupi standar hidup yang layak.

IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. Meskipun tidak mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, namun IPM dinilai mampu mengukur dimensi pokok dari pembangunan manusia. IPM Kabupaten Kebumen pada kurun waktu 2021-2023 mengalami peningkatan sebesar 1,83% dari tahun 2021 sebesar 70,05% dan pada tahun 2023 sebesar 71,88% atau peningkatan rata-rata per tahun sebesar 0,915%. Hal ini menunjukkan kondisi tingkat kesejahteraan masyarakat Kebumen selama lima tahun terakhir semakin membaik.

Berdasarkan skala internasional (UNDP), capaian IPM dikategorikan menjadi kategori sangat tinggi ($IPM \geq 80$), kategori tinggi ($70 \leq IPM < 80$), kategori sedang ($60 \leq IPM < 70$), dan kategori rendah ($IPM < 60$). Sejak tahun 2010 hingga 2020 IPM Kabupaten Kebumen berada pada kategori sedang, dan mulai tahun 2021 IPM Kabupaten Kebumen

termasuk kategori tinggi. Meskipun IPM Kabupaten Kebumen terus meningkat lima tahun terakhir, namun nilai IPM Kabupaten Kebumen masih di bawah IPM Jawa Tengah dan Nasional. Nilai IPM Jawa Tengah dan Nasional pada tahun 2023 berturut-turut sebesar 73,39 dan 74,39.

5. Angka Kemiskinan

Dalam kurun waktu selama sepuluh tahun terakhir, tren kemiskinan pada Kabupaten Kebumen mengalami penurunan dengan nilai rata-rata penurunan sebesar 0,02%.

Kejadian luar biasa terjadi pada saat pandemi *Covid-19* pada tahun 2020 dan tahun 2021 sedikit banyak berdampak pada menurunnya aktivitas perekonomian yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat sehingga tingkat kemiskinan pada kurun waktu tersebut meningkat sebesar 0,77% pada tahun 2020 dan 0,24% pada tahun 2021.

Kinerja penurunan kemiskinan ini akan terus didorong sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kebumen. Upaya penanggulangan kemiskinan menjadi tantangan dalam pembangunan daerah baik peningkatan kualitas pendataan kemiskinan maupun penentuan program penanggulangan kemiskinan.

Tabel 2.2. Profil Kemiskinan Kabupaten Kebumen Tahun 2020 – 2023

Profil Kemiskinan	2020	2021	2022	2023
Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	211.090	212.900	196.160	195.450
Persentase Penduduk Miskin	17,59%	17,83%	16,41%	16,34%
Garis Kemiskinan (Rp)	380.557	390.599	416.004	451.678
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	2,62	3,24	3,41	2,89
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,55	0,88	1,02	0,75

Sumber: Katalog Data dan Informasi Kemiskinan Kab/Kota di Indonesia, BPS, 2023

Berdasarkan perkembangan profil kemiskinan Kabupaten Kebumen tahun 2020-2023 menunjukkan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Kebumen pada tahun 2020-2023 terjadi kenaikan yang artinya jarak antara pengeluaran penduduk miskin dengan Garis Kemiskinan semakin besar, dan jarak rata-rata pengeluaran antar penduduk miskin di Kabupaten Kebumen juga semakin jauh atau ketimpangan antar penduduk miskin semakin lebar. P1 pada tahun 2021 sebesar 3,24% dan kembali meningkat menjadi 3,41% pada tahun 2022, sedangkan P2 pada tahun 2021 sebesar 0,88% dan mengalami kenaikan menjadi 1,02% pada tahun 2022. Secara rata-rata Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 sebesar 3,04 dan 0,8 untuk Indeks Keparahan Kemiskinan (P2).

Tabel 2.3. Kinerja Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2023

Uraian	% Penduduk Miskin			% Penurunan 2021-2023
	2021	2022	2023	
Kebumen	17,83	16,41	16,34	0,07

Sumber: Katalog Data dan Informasi Kemiskinan Kab/Kota di Indonesia, BPS, 2023

6. Inflasi

Laju inflasi adalah salah satu Indikator makro ekonomi yang penting. Tingkat perkembangan harga serta kestabilan perekonomian di suatu wilayah dapat dilihat dari laju inflasi. Pengendalian inflasi dilakukan agar tercipta stabilitas harga barang dan jasa yang tidak merugikan masyarakat. Beberapa hal yang dilakukan untuk pengendalian inflasi adalah dengan melaksanakan Pemantauan dan pengendalian jalur-jalur distribusi serta penyediaan informasi harga bahan pokok dan pengendalian harga, menjaga distribusi, ketersediaan dan pasokan barang terutama pada produk yang banyak dikonsumsi masyarakat miskin dalam rangka pengendalian garis kemiskinan serta kebutuhan pokok masyarakat.

Pada akhir tahun 2017 tingkat inflasi di Kabupaten Kebumen mencapai inflasi sebesar 3,01%. Angka inflasi tersebut naik pada tahun 2018 yang tercatat sebesar 3,25 %. Setahun kemudian pada tahun 2019, tingkat inflasi menurun menjadi 2,18%.

Sejak tahun 2020, BPS tidak lagi menghitung tingkat inflasi di Kabupaten Kebumen. Perkembangan inflasi selanjutnya hanya dapat ditunjukkan di tingkat nasional, provinsi, dan kota-kota besar di Jawa Tengah. Purwokerto merupakan daerah rujukan yang paling dekat untuk menggambarkan kondisi inflasi di Kabupaten Kebumen. Pada tahun 2023, mengacu pada tingkat inflasi di Purwokerto maka tingkat inflasi di Kebumen sebesar 2,61% sama dengan angka nasional. Angka inflasi ini masih dibawah Inflasi Provinsi Jawa Tengah, sebesar 2,89%.

7. Indeks Gini

Indeks Gini atau Koefisien Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Koefisien Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Koefisien Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.

Ketimpangan pendapatan Kabupaten Kbeumen menurut ukuran Bank Dunia pada Tahun 2022 kembali meningkat menjadi 19,86% yang menunjukkan ketimpangan pendapatan di Kabupaten Kebumen masih tergolong rendah (kategori baik). Hal ini merujuk pada definisi oleh Bank Dunia dimana jika proporsi pendapatan yang dikuasai 40% penduduk berpendapatan terendah lebih besar dari 17% maka telah masuk kategori ketimpangan pendapatan rendah. Hal ini sesuai dengan target Indikator Kinerja Utama Ketimpangan Pendapatan (ukuran Bank Dunia) dengan capaian 19,86 dari target 20,50-21,00.

Berdasarkan data BPS Tahun 2023 ukuran ketimpangan Koefisien Gini adalah sebesar 0,333. Besaran ukuran ketimpangan Koefisian Gini pada tahun 2023 menurun jika dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar 0,354 dan 2021 sebesar 0,350.

Tabel 2.4. Rasio Gini Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengan dan Nasional

Tahun	Gini Ratio		
	Kab. Kebumen	Prov. Jateng	Nasionnal
2019	')	0.358	0.38
2020	')	0.362	0.381
2021	0.333	0.368	0.381
2022	0.354	0.366	0.381
2023	0.35	0.369	0.388

Sumber: Subjek Kemiskinan dan Ketimpangan, BPS, 2023

2.3. Arah dan Kebijakan Umum APBD

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2023 merupakan tahun kedua dengan menggunakan pola pengelolaan keuangan yang berpedoman pada PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada porsi penganggaran, dimana struktur APBD TA 2023 mengatur jenis pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Dana Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Sedangkan jenis belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Sehingga proses pengelolaan keuangan dari penganggaran struktur APBD TA 2023 selaras dengan struktur Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022.

Secara umum APBD berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, dimana RKPD Tahun 2023 merupakan pelaksanaan tahun ketiga dari RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, dengan arah kebijakan pembangunan daerah bertemakan “Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi serta Penerapan *Open-gov* dan Pengembangan Sistem Pendidikan dan Kesehatan Adaptif Bencana”. RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 tersebut merupakan pelaksanaan 5 (lima) tahun

keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025.

Kebijakan umum APBD TA 2023 mempedomani RKPD Tahun 2023 didalamnya tercantum prioritas pembangunan pada Tahun 2023. Prioritas pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2023 disusun berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan pembangunan yang dikaitkan dengan isu strategis dan sasaran pembangunan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Selain itu, prioritas pembangunan Kabupaten Kebumen juga diselaraskan dengan arah kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023. Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2023 dijabarkan dalam 6 (enam) Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, 18 (delapan belas) Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, 8 (delapan) Urusan Pemerintahan Pilihan, 5 (lima) Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan.

Dengan memperhatikan sasaran pembangunan dan kemampuan keuangan pada Rancangan APBD TA 2023, arah kebijakan pembangunan tahun ketiga yang sudah dituangkan dalam visi dan misi Bupati dan diselaraskan dengan arah kebijakan pemerintah,. Arah kebijakan tahunan tersebut menjadi tema pembangunan tahunan, dimana tema pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2023 adalah “Pemantapan Kualitas Infrastruktur dalam rangka Pengembangan Perekonomian dan Pertanian serta Peningkatan Profesionalisme Aparatur dan Kualitas Sumber Daya Manusia”, dengan prioritas:

1. Peningkatan profesionalisme aparatur, melalui Upaya
 - a. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - b. Peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggara pelayanan publik; dan
 - c. Peningkatan kualitas penguasaan teknologi informasi dan komunikasi ASN.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dilakukan melalui upaya:
 - a. Peningkatan kualitas dan akses pelayanan Pendidikan dan Kesehatan; dan
 - b. Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan, dilakukan melalui upaya:
 - a. Peningkatan nilai tambah sektor pertanian dalam arti luas;
 - b. Peningkatan skala ekonomi koperasi, industri/usaha mikro, kecil dan menengah;
 - c. Pengembangan sektor pariwisata dan perdagangan; dan Penguatan ketahanan pangan dalam rangka penanggulangan kemiskinan.
4. Pemantapan kualitas infrastruktur wilayah, dilakukan melalui upaya:
 - a. Pemantapan penyelenggaraan jalan kabupaten pendukung aktivitas ekonomi;
 - b. Pemantapan penyediaan sistem irigasi permukaan;
 - c. Peningkatan pengelolaan persampahan; IV-7
 - d. Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui penataan RTH dan reboisasi; dan
 - e. Peningkatan cakupan pelayanan air bersih perpipaan.
5. Peningkatan kondusivitas wilayah, dilakukan melalui upaya:
 - a. Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - b. Peningkatan kesiapsiagaan penanggulangan bencana; dan
 - c. Pelestarian kebudayaan yang mendukung sektor pariwisata.

Pandemi *Covid-19* yang mengakibatkan lesunya aktivitas perekonomian juga berdampak bagi perolehan pendapatan daerah baik dana transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi serta PAD sendiri. Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Kebumen adalah alat kebijakan fiskal daerah yaitu selain untuk memfasilitasi juga sebagai stimulan dalam rangka mendorong pembangunan ekonomi daerah. Kebijakan keuangan daerah dilakukan dengan sinkronisasi dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan dan penerimaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan anggaran belanja dan pengeluaran prioritas pembangunan. Kebijakan keuangan daerah dalam pelaksanaannya harus dikelola secara efektif, efisien, tertib, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan keuangan daerah terdiri dari

pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang telah disesuaikan dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana dalam rangka peningkatan kinerjanya akan ditempuh melalui arah kebijakan sebagai berikut:

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Sistematika Pendapatan Daerah tahun 2023 telah disesuaikan dengan sistematika pendapatan daerah pada PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur Pendapatan Daerah Tahun 2023 terdiri dari PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Sumber PAD terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (HPKDYD) dan Lain-lain PAD yang Sah (LLPADYS). Pendapatan Transfer terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, DID, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa) dan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan). Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas Hibah, Dana Darurat, serta Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.

Dalam rangka peningkatan dan optimalisasi kinerja Pendapatan Daerah pada tahun 2023 ditempuh dengan kebijakan sebagai berikut:

- a. Optimalisasi PAD melalui:
 - 1) Intensifikasi pungutan pajak daerah, retribusi daerah, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah dan pendapatan daerah lainnya yang sah;
 - 2) Intensifikasi dalam penagihan kembali terhadap piutang yang belum dibayar wajib pajak;
 - 3) Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan baru yang potensial;
 - 4) Ekstensifikasi melalui penyesuaian tarif pajak daerah dan retribusi daerah;
 - 5) Inventarisasi, revitalisasi dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah sesuai aturan yang berlaku;
 - 6) Peningkatan kemudahan, kualitas dan kuantitas pelayanan umum kepada masyarakat sebagai wajib pajak;
 - 7) Peningkatan pengawasan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - 8) Pengembangan inovasi dan teknologi informasi agar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
 - 9) Optimalisasi pengembangan kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dan swasta/badan usaha dalam rangka pemanfaatan aset daerah;
 - 10) Optimalisasi realisasi investasi yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang lebih besar melalui peningkatan efisiensi dan efektifitas pelayanan perijinan dan investasi;
 - 11) Peningkatan koordinasi, pembinaan serta penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berpotensi dalam optimalisasi pendapatan deviden atas laba yang dicapai sebagai kontribusi pada PAD;
 - 12) Optimalisasi pengelolaan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) secara profesional; dan
 - 13) Peningkatan profesionalisme dan kapasitas SDM aparatur pendapatan dan pengelola pajak dan retribusi daerah;
- b. Peningkatan kerjasama, koordinasi, dan sinkronisasi dengan instansi terkait di tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat dalam rangka optimalisasi pendapatan transfer dan pendapatan daerah lain yang sah; serta
- c. Pengembangan kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dan swasta/badan usaha dalam rangka mendapatkan alternatif sumber pendapatan yang baru.

2. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah digunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan

pelayanan dasar, urusan pilihan, fungsi penunjang urusan pemerintahan, program pendukung operasional Perangkat Daerah, dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Salah satu aspek terpenting dalam pengelolaan keuangan daerah adalah bagaimana mengelola belanja daerah secara efisien dan efektif, sehingga dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dan menyelenggarakan pembangunan agar hasilnya benar-benar dapat dirasakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu dalam pengalokasian anggaran pada program/kegiatan dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Belanja daerah tahun 2023 secara umum dialokasikan dalam rangka:

- a. Pemenuhan alokasi persentase belanja *mandatory* yaitu untuk pendidikan minimal sebesar 20% dan kesehatan minimal sebesar 10% sebagaimana amanat perundangundangan. Sedangkan alokasi belanja *mandatory* untuk infrastruktur, peningkatan kapasitas ASN dan pengawasan (APIP) akan disesuaikan dengan potensi pendanaan yang ada;
- b. Pemenuhan alokasi belanja untuk penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM;
- c. Pencapaian target dan sasaran RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;
- d. Upaya pemulihan ekonomi pasca Pandemi *Covid-19* melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan komoditas unggulan pertanian, pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), peningkatan promosi dan pemasaran produk UMKM, pengembangan pariwisata serta peningkatan infrastruktur pendukung perekonomian untuk menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat serkaligus untuk mengurangi angka kemiskinan.

Struktur belanja daerah dalam rancangan APBD TA 2023 berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

- a. Belanja Operasi
Belanja operasi sebagaimana dimaksud merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemda yang memberi manfaat jangka pendek, yang terdiri dari jenis belanja 1) Belanja Pegawai, 2) Belanja Barang dan Jasa, 3) Belanja Bunga, 4) Belanja Subsidi, 5) Belanja hibah, dan 6) Bantuan Sosial. Arah kebijakan Belanja Operasi pada tahun 2023, antara lain:
 - 1) Belanja Pegawai
 - (a) Pengangggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;
 - (b) Mengantisipasi kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
 - (c) Mengalokasikan kebutuhan belanja pegawai untuk mengakomodir kebutuhan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai formasi pegawai tahun 2023;
 - (d) Pengangggaran gaji pokok dan tunjangan, dan belanja penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD mempedomani PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - (e) Pengangggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD

dibebankan pada APBD TA 2023 dengan mempedomani UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Perpres Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;

- (f) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani PP Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai ASN sebagaimana diubah dengan PP Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai ASN;
 - (g) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (h) Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - (i) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani PP Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sebagai implementasi Pasal 58 PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 PP Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya;
 - (j) Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN TA 2023 melalui DAK Non Fisik; dan
 - (k) Belanja Honorarium untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, meliputi honorarium penanggung jawab pengelola keuangan, dengan struktur honorarium berdasarkan Perpres Nomor 33 Tahun 2020 dan pemberiannya sesuai kemampuan keuangan daerah, sedangkan honorarium pengadaan barang dan jasa, honorarium perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) dengan mempedomani Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- 2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD. Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- (a) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan dalam sub kegiatan yang besarnya sesuai kemampuan keuangan daerah sesuai ketentuan Perbup Kebumen Nomor 40 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Daerah Pemkab Kebumen TA 2023.

- (b) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani UU Nomor 40 Tahun 2004, UU Nomor 24 Tahun 2011, Perpres Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 dan Permendagri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- (c) Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan dalam rangka pemberian hadiah yang bersifat perlombaan; penghargaan atas suatu prestasi;
- (d) Penganggaran biaya sertifikasi atas Barang Milik Daerah (BMD) berupa tanah yang dikuasai pemerintah daerah mempedomani Pasal 49 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- (e) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), sebagaimana diatur dalam PP Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD sebanyak satu kali dalam satu tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (f) Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC), pemerintah daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional;
- (g) Pemerintah daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan () milik pemda sesuai amanat UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pada masing-masing SKPD serta besaran tarifnya sesuai dengan masing-masing Perda;
- (h) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada kepala daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (i) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau *lumpsum*;
- (j) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum;
- (k) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi: pejabat daerah dan staf pemda; pimpinan dan anggota DPRD; serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 3) **Belanja Subsidi**

Bantuan subsidi bunga merupakan inovasi daerah sekaligus sebagai bagian penanganan dampak *Covid-19* dalam rangka peningkatan kemudahan akses permodalan bagi UMKM sebagai upaya membantu meringankan beban pembayaran bunga pinjaman produksi bagi UMKM melalui BUMD perbankan. Belanja subsidi kepada BUMD sebagai penerima subsidi yang dianggarkan dalam APBD TA 2023, harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) **Belanja Hibah dan Bantuan Sosial**

Belanja hibah dan bantuan sosial penganggaran yang bersumber dari APBD mempedomani Perbup Kebumen Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen, yang telah disesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- b. **Belanja Modal**

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan Aset Tetap dan Aset Lainnya. Pengadaan Aset Tetap tersebut memenuhi kriteria: mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan; digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan batas minimal kapitalisasi Aset Tetap. Batas minimal kapitalisasi Aset Tetap diatur dalam Perbup Kebumen Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagaimana diubah dengan Perbup Kebumen Nomor 89 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perbup Kebumen Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Nilai Aset Tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai maksud Pasal 64 ayat (4) PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrua.

Pemda harus memprioritaskan alokasi Belanja Modal pada APBD TA 2023 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- c. **Belanja Tidak Terduga**

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
- d. **Belanja Transfer**

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari pemda kepada pemda lainnya dan/atau dari pemda kepada pemerintah desa. Belanja Transfer dirinci atas jenis:

 - 1) **Belanja Bagi Hasil**

Pemkab/kota menganggarkan belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% dari realisasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada TA sebelumnya dengan mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Penganggaran belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada pihak ketiga, merupakan belanja bagi hasil kepada Pihak Perhutani atas pengelolaan obyek wisata Pantai Logending, dan kepada Koperasi Proyek Induk Pengembangan Wilayah Serayu Bogowonto Sempor atas pengelolaan obyek wisata Waduk Sempor.

2) **Belanja Bantuan Keuangan**

Belanja Bantuan Keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa diantaranya harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis Belanja Bantuan Keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD TA 2023 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) UU Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 96 PP Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 11 Tahun 2019.

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dialokasikan dalam APBD TA 2023. Besaran penganggaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik berpedoman kepada PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik yang diatur dengan Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

2.4. Perubahan Kebijakan Umum APBD

Pada pelaksanaan APBD TA 2023 s.d. Semester I Tahun 2023, Pemkab Kebumen telah melakukan perubahan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 95 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD TA 2023 sebanyak lima kali, perubahan pertama, kedua dan ketiga dilakukan dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian DAU yang Ditentukan Penggunannya Tahun 2023, Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD dan usulan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan, perubahan keempat mengatur tentang Perbup Nomer 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga belas kepada Aparatur Negara di Lingkungan Pemkab Kebumen Tahun 2023. Perubahan kelima menindaklanjuti Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan TA 2023.

Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) TA 2023 dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Adanya beberapa regulasi dari Pemerintah Pusat yang mengalami perubahan, diantaranya pendapatan dari dana-dana transfer disesuaikan dengan penerimaan yang akan diterima dan sudah masuk Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), pendapatan pajak dan retribusi daerah disesuaikan dengan potensi yang ada, dan realisasi;
2. Berdasar LKPD TA 2022 (*Audited*) yang dituangkan pada Perda Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2023 tanggal 21 Agustus 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022, terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2022 sebesar Rp258.817.350.877,98. SiLPA tersebut dialokasikan untuk belanja yang sifatnya transitoris antara lain Belanja BOS sebesar Rp4.722.503.214,00, Belanja BLUD RSUD dr. Soedirman sebesar Rp52.325.530.201,00, BLUD RSUD Prembun sebesar Rp30.578.253.474,00 dan BLUD Puskesmas sebesar Rp4.592.561.339,98 serta SiLPA di RKUD sebesar Rp162.258.784.241,00;
3. Adanya penyesuaian dengan Perbup Kebumen Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara di Lingkungan Pemkab Kebumen;
4. Penyesuaian Belanja Daerah berdasarkan Permenkes Nomor 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan;
5. Penyesuaian Belanja Daerah berdasarkan PMK Nomor 97 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pada TA 2023 dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 350 Tahun 2023 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pada TA 2023 menurut Provinsi/Kabupaten/Kota;
6. Perubahan Belanja Daerah yang bersumber dari Dana Desa berdasarkan PMK Nomor 98/PMK.07/2023 tentang Perubahan atas PMK Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa; dan
7. Perubahan Belanja daerah diarahkan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing SKPD di jajaran Pemkab Kebumen. Efisiensi belanja daerah melalui analisis kewajaran biaya yang dikaitkan dengan output yang dihasilkan.

APBD Perubahan TA 2023 ditetapkan dengan Perda Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD TA 2023.

2.5. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

1. Pendapatan

Estimasi pendapatan daerah didasarkan pada potensi dan perhitungan riil atas pendapatan daerah baik Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah.

Adapun estimasi Pendapatan Daerah tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. PAD sebesar Rp432.821.047.000,00 atau 15,15% dari total Pendapatan, yang terdiri dari:
 - 1) Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp133.030.000.000,00 atau 4,66% dari total Pendapatan;
 - 2) Pendapatan Retribusi Daerah sebesar 36.368.440.000,00 atau 1,27% dari total Pendapatan;
 - 3) Pendapatan HPKDYD sebesar Rp19.123.337.000 atau 0,67% dari total Pendapatan;
 - 4) Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp244.299.270.000,00 atau 8,55% dari total Pendapatan.
- b. Pendapatan Transfer sebesar Rp2.421.983.808.000,00 atau 84,77% dari total Pendapatan, yang terdiri dari:

- 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp2.233.962.752.000,00 atau 78,19% dari total Pendapatan;
 - 2) Pendapatan Transfer antar Pemerintah Daerah sebesar Rp188.021.056.000,00 atau 6,58% dari total Pendapatan.
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp2.176.583.000,00 atau 0,08% dari total Pendapatan.

2. Belanja

Belanja Daerah secara rinci diestimasikan sebagai berikut:

- a. Belanja Operasi sebesar Rp2.124.708.998.900,00 atau 68,67% dari total Belanja, yang terdiri dari:
 - 1) Belanja Pegawai sebesar Rp1.226.237.772.050,00 atau 39,63% dari total Belanja;
 - 2) Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp753.610.646.850,00 atau 24,36% dari total Belanja;
 - 3) Belanja Subsidi sebesar Rp730.000.000,00 atau 0,02% dari total Belanja;
 - 4) Belanja Hibah sebesar Rp132.241.048.000,00 atau 4,27% dari total Belanja;
 - 5) Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp11.889.532.000,00 atau 0,38% dari total Belanja.
- b. Belanja Modal sebesar Rp290.509.850.100,00 atau 9,39% dari total Belanja, yang terdiri dari:
 - 1) Belanja Modal Tanah sebesar Rp1.594.820.000,00 atau 0,05% dari total Belanja;
 - 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp69,599,220,763,00 atau 2,25% dari total Belanja;
 - 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp78.195.858.337,00 atau 2,53% dari total Belanja;
 - 4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp129.636.032.000,00 atau 4,19% dari total Belanja;
 - 5) Belanja Modal Aset tetap lainnya sebesar Rp11.483.919.000,00 atau 0,37% dari total Belanja;
- c. Belanja Tak Terduga sebesar Rp1.235.728.000,00 atau 0,04% dari total Belanja;
- d. Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp677.473.383.000,00 atau 21,9% dari total Belanja, yang terdiri dari:
 - 1) Belanja Bagi Hasil sebesar Rp13.792.758.000,00 atau 0,45% dari total Belanja;
 - 2) Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp663.680.625.000,00 atau 21,45% dari total Belanja.

3. Pembiayaan

Pembiayaan dianggarkan untuk menutup selisih jumlah Pendapatan dan Belanja Daerah. Pada APBD TA 2023, Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp236.946.522.000,00 yang berarti SiLPA minimal diharapkan sebesar tersebut. Pembiayaan terdiri dari estimasi Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp283.277.522.000,00 dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp46.331.000.000,00.

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pencapaian kinerja keuangan Pemkab Kebumen diukur dari realisasi atas anggaran yang telah disepakati dalam Perda Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2022 tentang APBD TA 2023 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD TA 2023.

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah pada APBD murni ditargetkan sebesar Rp2.805.528.213.000,00 sedangkan pada APBD-Perubahan targetnya naik menjadi Rp2.856.981.438.000,00. Realisasi Pendapatan pada TA 2023 sebesar Rp2.901.021.509.721,00 atau 101,54%. Jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2022 yang sebesar Rp2.847.196.017.404,00 mengalami kenaikan sebesar Rp53.823.993.060,00 atau 1,88%. Anggaran dan realisasi Pendapatan Daerah TA 2023 dirinci sebagai berikut.

Tabel 3.1. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah TA 2023

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%
1	2	3	4	5	6=4/3
1	PAD	432.821.047.000,00	463.650.961.705,00	30.829.914.705,00	107,12
	Pajak Daerah	133.030.000.000,00	137.222.705.502,00	4.192.705.502,00	103,15
	Retribusi Daerah	36.368.440.000,00	28.881.046.419,00	(7.487.393.581,00)	79,41
	HPKDYD	19.123.337.000,00	19.123.340.688,00	3.688,00	100,00
	Lain-lain PAD yang Sah	244.299.270.000,00	278.423.869.096,00	34.124.599.096,00	113,97
2	PENDAPATAN TRANSFER	2.421.983.808.000,00	2.435.850.438.454,00	13.866.630.454,00	100,57
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.765.872.796.000,00	1.783.201.602.063,00	17.328.806.063,00	100,98
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	468.089.956.000,00	467.765.621.200,00	(324.334.800,00)	99,93
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	188.021.056.000,00	184.883.215.191,00	(3.137.840.809,00)	98,33
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	2.176.583.000,00	1.520.109.562,00	(656.473.438,00)	69,84
	Pendapatan Hibah	2.176.583.000,00	1.520.109.562,00	(656.473.438,00)	69,84
	JUMLAH PENDAPATAN	2.856.981.438.000,00	2.901.021.509.721,00	44.040.071.721,00	101,54

Dari rincian Pendapatan Daerah tersebut dapat dilihat bahwa target PAD TA 2023 sebesar Rp432.821.047.000,00 dan terealisasi sebesar Rp463.668.071.215,00 atau 107,12%. Realisasi PAD tersebut terdiri dari realisasi Pajak Daerah sebesar Rp137.222.705.502,00 atau tercapai 103,15% dari target anggaran sebesar Rp133.030.000.000,00, realisasi Retribusi Daerah sebesar Rp28.881.046.419,00 atau tercapai 79,41% dari target anggaran sebesar Rp36.368.440.000,00, realisasi HPKDYD sebesar Rp19.123.340.688,00 atau tercapai 100,00% dari target anggaran sebesar Rp19.123.337.000,00 dan realisasi Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp278.423.869.096,00 atau tercapai 113,97% dari target anggaran sebesar Rp244.299.270.000,00.

Pendapatan Transfer dari target sebesar Rp2.421.983.808.000,00 telah terealisasi sebesar Rp2.435.831.829.687,00 atau 100,57%. Realisasi Pendapatan Transfer ini terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp2.250.948.614.496,00 atau 100,76% dan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp184.883.215.191,00 atau 98,33%.

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp1.520.109.562,00 dari target anggaran sebesar Rp2.176.583.000,00 atau sebesar 69,84%.

Dilihat dari kontribusi masing-masing jenis Pendapatan pada tahun 2023, Pendapatan Transfer merupakan komponen pendapatan yang utama dalam Pendapatan Pemkab Kebumen dengan kontribusi sebesar 83,96% dari total realisasi Pendapatan. Sedangkan PAD menyokong Pendapatan Daerah sebesar 15,98% dan Lain-lain Pendapatan yang Sah memberikan kontribusi sebesar 0,05%.

2. Belanja Daerah

Belanja Daerah TA 2023 pada APBD murni dianggarkan sebesar Rp2.805.528.213.000,00 dan mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp3.093.927.960.000,00 pada APBD-Perubahan. Selanjutnya pada APBD pergeseran setelah perubahan ketiga, Belanja Daerah TA 2023 menjadi sebesar Rp3.116.444.020.000,00. Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019, Belanja Daerah pada TA 2023 terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer. Anggaran dan realisasi Belanja Daerah TA 2023 dirinci sebagai berikut.

Tabel 3.2. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah TA 2023

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%
1	2	3	4	5	6=4/3
1	BELANJA OPERASI	2.124.708.998.900,00	2.020.914.516.871,00	(103.794.482.029,00)	95,11
	Belanja Pegawai	1.226.237.772.050,00	1.153.775.444.865,00	(72.462.327.185,00)	94,09
	Belanja Barang dan Jasa	753.610.646.850,00	726.725.182.478,00	(26.885.464.372,00)	96,43
	Belanja Subsidi	730.000.000,00	675.656.402,00	(54.343.598,00)	92,56
	Belanja Hibah	132.241.048.000,00	128.698.064.603,00	(3.542.983.397,00)	97,32
	Belanja Bantuan Sosial	11.889.532.000,00	11.040.168.523,00	(849.363.477,00)	92,86
2	BELANJA MODAL	290.509.850.100,00	278.842.913.538,00	(11.666.936.562,00)	95,98
	Belanja Modal Tanah	1.594.820.000,00	1.400.551.240,00	(194.268.760,00)	87,82
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	69.599.220.763,00	65.799.396.633,00	(3.799.824.130,00)	94,54
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	78.195.858.337,00	75.265.208.901,00	(2.930.649.436,00)	96,25
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	129.636.032.000,00	124.921.560.732,00	(4.714.471.268,00)	96,36
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	11.483.919.000,00	11.456.196.032,00	(27.722.968,00)	99,76
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.235.728.000,00	409.940.801,00	(825.787.199,00)	33,17
	Belanja Tidak Terduga	1.235.728.000,00	409.940.801,00	(825.787.199,00)	33,17
4	BELANJA TRANSFER	677.473.383.000,00	676.974.543.619,00	(498.839.381,00)	99,93
	Belanja Bagi Hasil	13.792.758.000,00	13.743.166.881,00	(49.591.119,00)	99,64
	Belanja Bantuan Keuangan	663.680.625.000,00	663.231.376.738,00	(449.248.262,00)	99,93
	JUMLAH BELANJA	3.093.927.960.000,00	2.977.141.914.829,00	(116.786.045.171,00)	96,23

Belanja Daerah TA 2023 terealisasi 96,23% atau sebesar Rp2.977.141.914.829,00. Realisasi tersebut terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp2.020.914.516.871,00, Belanja Modal sebesar Rp278.842.913.538,00, Belanja Tak Terduga sebesar Rp409.940.801,00 dan Belanja Transfer sebesar Rp676.974.543.619,00.

Berdasarkan data di atas, maka Belanja Daerah didominasi Belanja Operasi dengan proporsi 67,88% dari total Belanja Daerah, Belanja Modal sebesar 9,37%, Belanja Tak Terduga sebesar 0,01% dan Belanja Transfer sebesar 22,74 %.

3. Pembiayaan

Anggaran dan realisasi Pembiayaan Daerah TA 2023 dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.3. Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah TA 2023

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%
1	2	3	4	5	6=4/3
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	283.277.522.000,00	283.142.890.877,98	(134.631.122,02)	99,95
	SILPA Tahun Sebelumnya	258.826.262.000,00	258.817.350.877,90	(8.911.122,10)	100,00
	Pencairan Dana Cadangan	22.351.260.000,00	22.225.540.000,00	(125.720.000,00)	99,44
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	0,00	100,00
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	46.331.000.000,00	42.331.000.000,00	(4.000.000.000,00)	91,37
	Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00	100,00
	Penyertaan Modal Daerah	24.231.000.000,00	20.231.000.000,00	(4.000.000.000,00)	83,49
	Pemberian Pinjaman Daerah	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	0,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	236.946.522.000,00	240.811.890.877,98	3.865.368.877,98	101,63

4. SILPA

Dari penjelasan komposisi realisasi Pendapatan, Belanja, Transfer dan Pembiayaan di atas, diperoleh SILPA TA 2023 sebesar Rp164.691.485.769,98.

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

1. Pendapatan Daerah

Capaian Pendapatan Daerah TA 2023 terealisasi sebesar 101,54%, namun untuk Pendapatan Retribusi Daerah hanya tercapai 79,46%. Pencapaian target Pendapatan Daerah dipengaruhi beberapa faktor antara lain:

- Keterbatasan sarana dan prasarana dalam memaksimalkan Pendapatan Daerah;
- Pemungutan Pendapatan Daerah belum semua sektor memanfaatkan teknologi informasi, masih dilakukan secara manual; dan
- Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM pengelola pendapatan daerah;
- Pada kelompok penerimaan Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah permasalahan yang selalu terjadi adalah kesulitan melakukan prediksi serta terlambatnya informasi atas penerimaan dan Bagi Hasil Baik Pajak maupun SDA dari pemerintah dan penerimaan Dana Bagi Hasil dari provinsi;
- Ketatnya persyaratan pencairan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat.

Adapun upaya yang dilakukan antara lain:

- Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemungutan Pendapatan Daerah;
- Mempersiapkan kualitas dan kompetensi tenaga pengelola Pendapatan Daerah melalui pelatihan, bimbingan teknik dan *in house training*;
- Meningkatkan pengawasan pemungutan dan penyetoran pajak dan retribusi;
- Meningkatkan sosialisasi dan promosi untuk menggali pendapatan; dan
- Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait dengan alokasi dana-dana transfer.

2. **Belanja Daerah**

Capaian Belanja Daerah TA 2023 terealisasi sebesar 96,23%. Kendala dalam pencapaian Belanja Daerah antara lain disebabkan:

- a. Terdapat paket pekerjaan yang tidak terlaksana 100%;
- b. Kegiatan Belanja Jasa Tenaga Pendidikan yang tidak terserap optimal;
- c. Dana BTT direalisasikan untuk bantuan korban bencana alam, korban kebakaran, bantuan migran, korban tindak kekerasan dan bantuan orang kehabisan bekal/Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sesuai kebutuhan.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi yang diterapkan pada penyusunan Laporan Keuangan Pemkab Kebumen Tahun 2023 yang terdiri dari LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, LPE dan CaLK berdasarkan pada peraturan yang telah ditetapkan yaitu Perbup Kebumen Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemkab Kebumen sebagaimana diubah dengan Perbup Kebumen Nomor 89 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perbup Kebumen Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemkab Kebumen.

4.1. Entitas Akuntansi/Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan adalah pemda atau satuan organisasi di lingkungan pemda atau organisasi lainnya menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

Entitas pelaporan pada Pemkab Kebumen dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kebumen yang menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Laporan Keuangan Pemkab Kebumen meliputi rekening-rekening entitas pemerintah daerah secara keseluruhan yang tidak dipisah-pisahkan, termasuk seluruh unit kerja dalam organisasi Pemkab Kebumen. Laporan Keuangan Pemkab Kebumen merupakan hasil konsolidasi dari laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemkab Kebumen selaku entitas akuntansi.

Laporan Keuangan Pemkab Kebumen tidak mengkonsolidasikan rekening-rekening yang merupakan entitas kekayaan Pemkab Kebumen yang dipisahkan baik berbentuk perusahaan daerah maupun yayasan dan entitas terpisah lainnya yang dimiliki Pemkab Kebumen.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemkab Kebumen Tahun 2023 adalah basis akrual, dimana pengakuan Pendapatan, Beban, Aset, Utang, dan Ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta pengakuan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Pemkab Kebumen Tahun 2023 menggunakan nilai perolehan historis dengan menggunakan mata uang rupiah sehingga transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia. Angka-angka dalam laporan keuangan disajikan sampai dengan dua digit di belakang koma.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Kebijakan akuntansi akun yang diterapkan Pemkab Kebumen secara rinci dijelaskan sebagai berikut.

4.4.1 Kebijakan Akuntansi Aset

Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset non lancar. Aset lancar meliputi Kas dan Setara Kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang, dan Persediaan. Adapun aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan Aset Tak Berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemda atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar diklasifikasikan menjadi Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, dan Aset Lainnya.

4.4.1.1 Aset Lancar

1. Kas dan Setara Kas

a. Definisi

- 1) Kas dan setara Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemda yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
- 2) Kas meliputi seluruh Uang Persediaan (Sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan), saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran, dan uang tunai atau simpanan di bank yang belum disetorkan ke RKUD.

Termasuk kas adalah:

- 1) Pendapatan yang telah diterima RKUD;
- 2) Penerimaan kas yang diterima oleh Bendahara Penerimaan sebagai pendapatan daerah yang belum disetor ke RKUD s.d. tanggal pelaporan keuangan;
- 3) Penerimaan transitoris oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) yang belum disetor ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) maupun pihak lain s.d. tanggal pelaporan keuangan;
- 4) Potongan pajak oleh Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke RKUN s.d. tanggal pelaporan keuangan;
- 5) Kas yang diterima dan digunakan langsung oleh SKPD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang dilaporkan ke BUD sebagai pendapatan BLUD;
- 6) Kas yang diterima dan digunakan langsung oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang merupakan bagian dari entitas SKPD yang dilaporkan ke BUD untuk disahkan sebagai pendapatan; dan
- 7) Hibah langsung yang diterima SKPD yang kemudian digunakan langsung oleh SKPD tanpa disetorkan terlebih dahulu ke RKUD dan dilaporkan ke BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah.

Kas terdiri dari:

- 1) Kas di Kas Daerah;
- 2) Kas di Bendahara Penerimaan;
- 3) Kas di Bendahara Pengeluaran;
- 4) Kas di BLUD;
- 5) Kas Dana BOS;
- 6) Kas Dana Kapitasi pada FKTP; dan
- 7) Kas Lainnya.

Termasuk dalam Setara Kas adalah Investasi Jangka Pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek yaitu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

- b. Pengakuan
 - 1) Kas dan Setara Kas diakui pada saat Kas dan Setara Kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan;
 - 2) Hibah Langsung yang diterima SKPD diakui pada saat dilaporkan ke BUD untuk disahkan sebagai Pendapatan Daerah.
- c. Pengukuran

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- d. Penyajian
 - 1) Saldo Kas dan Setara Kas harus disajikan dalam Neraca dan LAK;
 - 2) Mutasi antar pos-pos Kas dan Setara Kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada LAK.
- e. Pengungkapan

Pengungkapan Kas dan Setara Kas dalam CaLK antara lain mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

 - 1) Rincian Kas dan nilai Kas yang disajikan dalam laporan keuangan;
 - 2) Rincian Kas dan nilai Kas yang ada dalam RKUD namun merupakan kas transitoris yang belum disetorkan ke pihak yang berkepentingan seperti PPN/PPH yang dipungut tetapi belum disetorkan ke RKUN, Iuran Tunjangan Kesehatan/Taspen/Taperum/Jaminan Kecelakaan Kerja/Jaminan Kematian yang belum disetorkan dan lain-lain; dan
 - 3) Informasi lainnya yang dianggap penting.

2. Investasi Jangka Pendek

- a. Definisi

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, biasanya digunakan untuk tujuan manajemen kas dimana pemda dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhan akan kas dan berisiko rendah serta dimiliki dalam waktu tiga bulan s.d. 12 bulan. Investasi Jangka Pendek dapat berupa:

 - 1) Saham;
 - 2) Deposito;
 - 3) Surat Utang Negara (SUN);
 - 4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - 5) Surat Perbendaharaan Negara;
 - 6) Investasi Jangka Pendek BLUD.
- b. Pengakuan
 - 1) Investasi Jangka Pendek diakui saat terdapat pengeluaran Kas yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Memungkinkan pemda memperoleh manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; dan
 - b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).
 - 2) Penerimaan Kas dapat diakui sebagai pelepasan/pengurang Investasi Jangka Pendek apabila terjadi penjualan, pelepasan hak atau pencairan dana karena kebutuhan, jatuh tempo, maupun karena peraturan pemda. Hasil investasi yang diperoleh dari Investasi Jangka Pendek antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan deviden tunai diakui pada saat diperoleh sebagai pendapatan (PAD).

- c. Pengukuran
Pengukuran Investasi Jangka Pendek sesuai dengan jenisnya, sebagai berikut:
 - 1) Saham dicatat sebesar harga perolehan;
 - 2) Deposito Berjangka dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut;
 - 3) SUN dicatat dengan nilai pasar sebagai dasar penerapan nilai wajar karena terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar;
 - 4) SBI dicatat dengan nilai pasar sebagai dasar penerapan nilai wajar karena terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar;
 - 5) Surat Perbendaharaan Negara dicatat dengan nilai pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar;
 - 6) Investasi Jangka Pendek BLUD dicatat sebesar nilai nominal.
- d. Penyajian
Investasi jangka pendek disajikan di Neraca sebagai bagian dari Aset Lancar.
- e. Pengungkapan
Pengungkapan investasi jangka pendek dalam CaLK antara lain mengenai:
 - 1) Jenis-jenis investasi jangka pendek yang dimiliki;
 - 2) Penurunan nilai investasi jangka pendek yang dimiliki; dan
 - 3) Perubahan nilai pasar investasi jangka pendek (bila ada).

3. Piutang

- a. Definisi
 - 1) Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemda dan/atau hak pemda yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
 - 2) Piutang diklasifikasikan berdasarkan peristiwa yang menimbulkan piutang, yaitu:
 - a) Piutang Pendapatan, meliputi:
 - (1) Piutang berdasarkan pungutan Pendapatan Daerah, adalah hak pemda yang dapat dinilai dengan uang yang timbul berdasarkan Undang-undang Pajak dan Retribusi Daerah meliputi Piutang Pajak dan Piutang Retribusi, serta peraturan daerah yang berlaku di Kabupaten Kebumen meliputi Piutang Lain-lain PAD yang Sah;
 - (2) Piutang berdasarkan perikatan perjanjian, adalah hak pemda yang dapat dinilai dengan uang yang timbul antara lain karena adanya pemberian pinjaman, transaksi jual beli, kemitraan dengan pihak lain, pemberian fasilitas/jasa kepada pihak lain atau adanya transaksi dibayar di muka; dan
 - (3) Piutang Transfer Antar Pemerintahan, adalah hak pemda untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan. Piutang ini dapat timbul karena perbedaan waktu antara timbulnya hak tagih dan saat dilaksanakannya pembayaran melalui transfer.
 - b) Piutang Lainnya, meliputi:
 - (1) Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi, adalah hak pemda yang dapat dinilai dengan uang yang terjadi karena adanya peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang disebabkan karena pelaksanaan tuntutan ganti rugi yang telah diputus/ditetapkan oleh pihak yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena adanya kerugian negara/daerah seperti Piutang Tuntutan Ganti Rugi; dan

- (2) Piutang berdasarkan peristiwa lainnya, adalah hak pemda yang dapat dinilai dengan uang yang terjadi karena adanya peristiwa lainnya selain peristiwa di atas, meliputi Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Uang Muka Belanja, Beban Dibayar Dimuka, dan uang muka yang harus dipertanggungjawabkan.

b. Pengakuan

Piutang dapat diakui apabila memenuhi kriteria:

- 1) Telah terbit atau keluar dokumen resmi yang menyatakan dan kewajiban secara jelas;
- 2) Nilai piutang dapat diukur;
- 3) Dapat dilakukan penagihan atas dokumen resmi pada nomor 1), dan
- 4) Kewajiban belum dilunasi.

c. Pengukuran

- 1) Piutang dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan *Net Realizable Value* (NRV) dengan memperhitungkan nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih.
- 2) Penyisihan kerugian Piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan Piutang dan dibentuk sebesar nilai Piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan kualitas dan umur Piutang.
- 3) Kualitas Piutang dikelompokkan menjadi empat dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a) Kualitas Piutang Lancar;
 - b) Kualitas Piutang Kurang Lancar;
 - c) Kualitas Piutang Diragukan; dan
 - d) Kualitas Piutang Macet.
- 4) Penggolongan kriteria kualitas Piutang berdasarkan jenis Piutang:
 - a) Pajak Daerah

Penggolongan kriteria kualitas Piutang Pajak Daerah dapat dipilah berdasarkan cara pemungutan:

- (1) Pajak Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan
- (2) Pajak Ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*).

Penggolongan kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- (1) Kualitas lancar, dengan kriteria:
 - (a) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - (b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - (c) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (d) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - (e) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - (f) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- (2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - (a) Umur piutang 1 s.d. 2 tahun; dan/atau
 - (b) Apabila Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - (d) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (e) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- (3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria :

- (a) Umur piutang lebih dari 2 tahun s.d. 5 tahun; dan/atau
 - (b) Apabila Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c) Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - (d) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (e) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- (4) Kualitas Macet, dengan kriteria:
- (a) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - (b) Apabila Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - (d) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - (e) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- (1) Kualitas Lancar, dengan kriteria:
- (a) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - (b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - (c) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - (d) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - (e) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- (2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
- (a) Umur piutang lebih dari 1 tahun s.d. 2 tahun; dan/atau
 - (b) Apabila Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c) Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - (d) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- (3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
- (a) Umur piutang lebih dari 2 tahun s.d. 5 tahun; dan/atau
 - (b) Apabila Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - (d) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- (4) Kualitas Macet, dengan kriteria:
- (a) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - (b) Apabila Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - (d) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - (e) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- b) Piutang Retribusi Daerah
- Penggolongan Piutang Retribusi Daerah terdiri dari:
- (1) Kualitas Lancar
- (a) Umur piutang 0 s.d. 1 (satu) bulan; dan/atau
 - (b) Apabila Wajib Retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- (2) Kualitas Kurang Lancar
- (a) Umur piutang 1 (satu) bulan s.d. 3 (tiga) bulan; dan/atau

- (b) Apabila Wajib Retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
 - (3) Kualitas Diragukan
 - (a) Umur piutang 3 (tiga) bulan s.d. 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 - (b) Apabila Wajib Retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
 - (4) Kualitas Macet
 - (a) Umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 - (b) Apabila Wajib Retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.
 - c) Piutang selain Pajak dan Retribusi
 - (1) Kualitas Lancar

Apabila belum melakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
 - (2) Kualitas Kurang Lancar

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
 - (3) Kualitas Diragukan

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
 - (4) Kualitas Macet

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.
 - 5) Penentuan Besaran Penyisihan Piutang

Besaran Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan:

 - a) Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari Piutang dengan kualitas lancar;
 - b) Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar;
 - c) Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d) Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
 - 6) Proses penghapusan piutang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - 7) Jika terdapat pelunasan atas piutang-piutang yang telah dihapuskan sebagaimana dimaksud pada angka 5) huruf d) pelunasan tersebut dibukukan sebagai Pendapatan Lain-lain tahun berjalan.
- d. Penyajian

Piutang disajikan di Neraca sebagai bagian dari Aset Lancar dengan menyajikan nilai penyisihannya.
 - e. Pengungkapan

- 1) Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun Piutang diungkapkan secara cukup dalam CaLK. Informasi dimaksud dapat berupa:
 - a) kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran Piutang;
 - b) rincian jenis-jenis saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
 - c) penjelasan atas penyelesaian Piutang; dan
 - d) jaminan atau sita jaminan jika ada. Khusus untuk tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.
- 2) Penghapusan Piutang harus diungkapkan secara cukup dalam CaLK agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis Piutang, nama debitur, nilai Piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan Piutang, dasar pertimbangan penghapusan Piutang dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

4. **Beban Dibayar Dimuka**

- a. Definisi
Beban Dibayar Dimuka adalah pembayaran dimuka suatu biaya yang manfaatnya akan diperoleh pada masa yang akan datang. Beban Dibayar Dimuka berfungsi untuk membiayai kegiatan operasional jangka panjang pemda yang jangka waktunya melebihi atau melewati tahun berjalan.
- b. Pengakuan
 - 1) Beban Dibayar Dimuka diakui dan dicatat pada saat pembayaran.
 - 2) Beban Dibayar Dimuka diakui dan dicatat sebagai biaya pada saat jasa diterima.
 - 3) Beban Dibayar Dimuka berkurang pada saat jasa diterima atau berlalunya waktu.
- c. Pengukuran
Beban Dibayar Dimuka diukur sebesar jumlah uang yang dibayarkan atau sesuai dengan nilai rupiah pada bukti-bukti yang belum disahkan/dipertanggungjawabkan.
- d. Penyajian
Biaya Dibayar Dimuka disajikan pada kelompok Aset Lancar dalam Neraca.
- e. Pengungkapan
Hal-hal yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan antara lain:
 - 1) Rincian jenis, jumlah, saldo, dan batas waktu berakhirnya jasa yang diterima.
 - 2) Disajikan secara neto.

5. **Persediaan**

- a. Definisi
 - 1) Persediaan adalah Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemda dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
 - 2) Persediaan merupakan aset yang berupa:
 - a) barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemda, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas;

- b) bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku pembuatan benih;
 - c) barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya adalah alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur; dan
 - d) barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya adalah hewan dan bibit tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
- 3) Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam Neraca, tetapi diungkapkan dalam CaLK.
- b. Pengakuan
Persediaan diakui:
- 1) Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemda dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
 - 2) Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
- c. Pengukuran
- 1) Persediaan disajikan sebesar:
 - a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan Persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan Persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan;
 - b) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan Persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis;
 - c) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar Persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).
 - 2) Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar;
 - 3) Persediaan dinilai dengan menggunakan Metode Harga Pembelian Terakhir; dan
 - 4) Persediaan dicatat dengan metode periodik, artinya fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah Persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan.
- d. Penyajian
Persediaan disajikan di Neraca sebagai bagian dari Aset Lancar.
- e. Pengungkapan
Pengungkapan Persediaan dalam Laporan Keuangan antara lain:
- 1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran Persediaan;
 - 2) Penjelasan lebih lanjut Persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
 - 3) Jenis, jumlah, dan nilai Persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

4.4.1.2 Aset Non Lancar

1. Investasi Jangka Panjang

a. Definisi

Investasi Jangka Panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi Jangka Panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:

1) Investasi Non Permanen

- a) Investasi Jangka Panjang Non Permanen merupakan Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

Investasi Non Permanen dapat berupa:

- (1) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki s.d. tanggal jatuh temponya;
 - (2) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
 - (3) Dana yang disisihkan oleh pemda dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat; dan
 - (4) Investasi Non Permanen Lainnya yang sifatnya tidak untuk dimiliki secara berkelanjutan, seperti Penyertaan Modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.
- b) Dana Bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.
 - c) Dana Bergulir mempunyai karakteristik sebagai berikut:
 - (1) Merupakan bagian dari keuangan daerah;
 - (2) Tercantum dalam APBD dan/atau laporan keuangan;
 - (3) Dikuasai, dimiliki dan/atau dikendalikan oleh PA/KPA;
 - (4) Merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat, ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir); dan
 - (5) Pemda dapat menarik kembali Dana Bergulir.
 - d) Dana Bergulir dalam APBD dianggarkan pada Pengeluaran Pembiayaan, untuk pengembalian pokok Dana Bergulir dicatat pada Penerimaan Pembiayaan pos Penerimaan Kembali Pinjaman dan bagi hasil jasa usaha Dana Bergulir dicatat pada PAD-Lain-lain PAD yang Sah.
 - e) Alokasi Anggaran Dana Bergulir berada di BUD tetapi pelaksanaan pengelolaannya didelegasikan kepada SKPD yang membidangi.
 - f) Dana Bergulir disajikan dalam LRA sebagai Pengeluaran Pembiayaan sebesar jumlah Kas yang dikeluarkan dalam rangka perolehan Dana Bergulir.
 - g) Dana Bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen-Dana Bergulir. Pada saat perolehan Dana Bergulir dicatat sebesar harga perolehan Dana Bergulir, tetapi secara periodik pemda harus melakukan penyesuaian terhadap Dana Bergulir sehingga nilai Dana Bergulir yang tercatat di Neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (NRV). Penyesuaian tersebut

berdasarkan data yang dilaporkan oleh SKPD yang membidangi atas pencatatan penatausahaan dana bergulir.

- h) Untuk mendapatkan nilai bersih Dana Bergulir yang dapat direalisasikan (NRV) maka dilakukan perhitungan nilai penyisihan Dana Bergulir. Nilai bersih Dana Bergulir yang dapat direalisasikan (NRV) diperoleh dari Dana Bergulir dikurangi dengan penyisihan Dana Bergulir. Penyisihan Dana Bergulir bukan merupakan penghapusan Dana Bergulir.
- i) Besaran Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan:
 - (1) Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari Dana Bergulir dengan kualitas lancar;
 - (2) Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari Dana Bergulir dengan kualitas kurang lancar;
 - (3) Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - (4) Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari Dana Bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- j) Kualitas Dana Bergulir adalah hampiran atas ketertagihan Dana Bergulir yang diukur berdasarkan umur Dana Bergulir dan/atau upaya tagih pemerintah daerah kepada debitur. Penggolongan Kriteria kualitas Dana Bergulir terdiri atas:
 - (1) Dana Bergulir dengan kelola sendiri:
 - (a) Kualitas lancar dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (1) Umur dana bergulir s.d. 1 tahun; dan/atau
 - (2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - (3) Penerima dana menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (4) Penerima dana kooperatif.
 - (b) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (1) Umur Dana Bergulir lebih dari 1 tahun s.d. 3 tahun; dan/atau
 - (2) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (3) Penerima dana kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - (4) Penerima dana menyetujui sebagian hasil pemeriksaan.
 - (c) Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (1) Umur Dana Bergulir lebih dari 3 tahun s.d. 5 tahun; dan/atau
 - (2) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (3) Penerima dana tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - (4) Penerima dana tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan.
 - (d) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (1) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun; dan/atau

- (2)) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (3)) Penerima dana tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - (4)) Penerima dana mengalami kesulitan bangkrut dan/atau meninggal dunia; dan/atau
 - (5)) Penerima dana mengalami musibah (*force majeure*).
- (2) Dana Bergulir dengan *executing agency*;
- (a) Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (1)) Lembaga Keuangan Bank (LKB), Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan Lembaga keuangan lainnya menyetorkan pengembalian dana bergulir sesuai dengan perjanjian dengan pemda; dan/atau
 - (2)) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
 - (b) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (1)) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan Lembaga keuangan lainnya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian tidak melakukan pelunasan; dan/atau
 - (2)) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - (3)) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga lainnya bangkrut; dan/atau
 - (4)) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga lainnya mengalami musibah (*force majeure*).
- (3) Dana Bergulir dengan *chanelling agency*
- (a) Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (1)) Umur Dana Bergulir s.d. 1 tahun; dan/atau
 - (2)) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
 - (b) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengankriteria:
 - (1)) Umur Dana Bergulir lebih dari 1 tahun s.d. 3 tahun; dan/atau
 - (2)) Apabila penerima Dana Bergulir dalam jangka waktu 1(satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan.
 - (c) Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (1)) Umur Dana Bergulir lebih dari 3 tahun s.d. 5 tahun; dan/atau
 - (2)) Apabila penerima Dana Bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan.
 - (d) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (1)) Umur Dana Bergulir lebih dari 5 tahun; dan/atau
 - (2)) Apabila penerima Dana Bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (3)) Penerima Dana Bergulir tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - (4)) Penerima Dana Bergulir bangkrut/meninggal dunia; dan/atau

(5) Penerima Dana Bergulir mengalami musibah (*force majeure*).

2) Investasi Permanen

- a) Investasi Permanen merupakan Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.
- b) Investasi Permanen dapat berupa:
 - (1) Penyertaan modal pemda pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara;
 - (2) Investasi Permanen lainnya yang dimiliki oleh pemda untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

b. Pengakuan

- 1) Investasi diakui saat terdapat pengeluaran Kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Memungkinkan pemda memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
 - b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).
- 2) Pengakuan hasil investasi dapat dilakukan dengan cara:
 - a) Hasil investasi berupa deviden tunai yang diperoleh dari Penyertaan Modal pemda yang pencatatannya menggunakan metode biaya dicatat sebagai pendapatan hasil investasi; dan
 - b) Apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang berupa deviden tunai yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemda.

c. Pengukuran

- 1) Investasi Permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
- 2) Investasi Nonpermanen:
 - a) Investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya;
 - b) Investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan;
 - c) Penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemda (seperti Proyek Investasi Rakyat) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga;
 - d) Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemda, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada;
 - e) Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi; dan
 - f) Dana Bergulir diukur berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan, dilaksanakan dengan mengurangkan akun Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari Dana Bergulir.

d. Penilaian investasi pemda dilakukan dengan tiga metode yaitu:

- 1) Metode biaya;

Metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

2) Metode ekuitas;

Metode ekuitas pemda mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemda setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemda. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemda, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

3) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan metode tersebut didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- 1) Kepemilikan kurang dari 20% (dua puluh persen) menggunakan metode biaya;
- 2) Kepemilikan 20% (dua puluh persen) sampai 50% (lima puluh persen), atau kepemilikan kurang dari 20% (dua puluh persen) tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- 3) Kepemilikan lebih dari 50% (lima puluh persen) menggunakan metode ekuitas; dan
- 4) Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

- 1) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- 2) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- 3) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*; dan
- 4) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

e. Penyajian

Investasi Jangka Panjang disajikan di Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

f. Pengungkapan

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam CaLK antara lain mengenai metode penilaian dan jenis investasi yang dimiliki oleh pemda.

2. Aset Tetap

a. Definisi

- 1) Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemda atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- 2) Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi Aset Tetap adalah sebagai berikut:
 - a) Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai Aset Tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemda dan dalam kondisi siap dipakai.

- b) **Peralatan dan Mesin**
Peralatan dan Mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- c) **Gedung dan Bangunan**
Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemda dan dalam kondisi siap dipakai.
- d) **Jalan, Irigasi, dan Jaringan**
Jalan, Irigasi, dan Jaringan mencakup Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang dibangun oleh pemda serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemda dan dalam kondisi siap dipakai.
- e) **Aset Tetap Lainnya**
Aset Tetap Lainnya mencakup Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemda dan dalam kondisi siap dipakai.
- f) **Konstruksi Dalam Pengerjaan**
Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup Aset Tetap yang sedang dalam proses pengerjaan namun pada tanggal laporan keuangan belum dapat dimanfaatkan.

b. Pengakuan

- 1) Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan Aset Tetap sangat andal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah;
- 2) Apabila perolehan Aset Tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka Aset Tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas Aset Tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya;
- 3) Untuk dapat diakui sebagai Aset Tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Berwujud;
 - b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
 - f) Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
 - g) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
- 4) batasan minimal kapitalisasi Aset Tetap sebagai berikut:

Tabel 2.5. Minimal Kapitalisasi Aset

No.	Uraian	Harga Satuan/Unit (Rp)
1.	Tanah	-
2.	Peralatan dan Mesin	300.000,00

No.	Uraian	Harga Satuan/Unit (Rp)
3.	Gedung dan Bangunan	10.000.000,00
4.	Jalan	-
5.	Jembatan	-
6.	Irigasi/Bangunan Air/Pengaman Sungai	-
7.	Instalasi dan Jaringan	-
8.	Buku	-
9.	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga	-
10.	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	-

- 5) Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria Aset Tetap di atas akan diperlakukan sebagai belanja; dan
- 6) Aset Tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemda tidak memenuhi definisi Aset Tetap dan harus disajikan di pos Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

c. Pengukuran

- 1) Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan;
- 2) Biaya perolehan Aset Tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan;
- 3) Biaya perolehan Aset Tetap yang dapat diatribusikan secara langsung meliputi:
 - a) Honorarium terkait Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b) Belanja dokumen/administrasi tender;
 - c) Belanja jasa pengumuman lelang/pemenang lelang;
 - d) Belanja jasa konsultasi (apabila pengadaan Aset Tetap membutuhkan/menggunakan jasa konsultan);
 - e) Belanja perjalanan dinas yang berkaitan dengan pengadaan Aset Tetap;
 - f) Biaya lainnya sampai dengan aset siap digunakan.
- 4) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya Aset Tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya;
- 5) Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian;
- 6) Bila Aset Tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh;
- 7) Jika penyelesaian pengerjaan suatu Aset Tetap melebihi dan/atau melewati satu periode tahun anggaran, maka Aset Tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai;
- 8) Biaya perolehan dari masing-masing Aset Tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan;
- 9) Suatu Aset Tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian Aset Tetap yang tidak serupa atau Aset Lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperolehnya itu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang

ditransfer/diserahkan. Suatu Aset Tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu Aset Tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas;

- 10) Aset Tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan Aset Tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional;
- 11) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Pengeluaran lainnya yang timbul setelah perolehan awal selain pengeluaran yang memberi nilai manfaat tersebut serta yang tidak memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap diakui sebagai beban pengeluaran pada periode di mana beban pengeluaran tersebut terjadi;
- 12) Kriteria seperti pada paragraf di atas dan/atau suatu batasan jumlah biaya (*Capitalization Thresholds*) tertentu digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak.

d. Penyajian

- 1) Aset Tetap disajikan di Neraca berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka Aset Tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun Aset Tetap dan akun ekuitas.
- 2) Penyusutan Aset Tetap:
 - a) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
 - b) Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
 - c) Metode penyusutan dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*), dengan asumsi nilai residu Rp0,00 dan formula penghitungan sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

- d) Selain Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan, seluruh Aset Tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.
- f) Besarnya penyusutan setiap tahun disajikan dalam Neraca dan LO. Penyusutan disajikan dalam Neraca dengan akun Akumulasi Penyusutan yang mengurangi nilai perolehan Aset Tetap. Penyusutan disajikan dalam LO sebagai Beban Penyusutan.
- g) Neraca menyajikan Akumulasi Penyusutan sekaligus nilai perolehan Aset Tetap sehingga nilai buku Aset Tetap sebagai gambaran dari potensi manfaat yang masih dapat diharapkan dari aset yang bersangkutan dapat diketahui.
- 3) Suatu Aset Tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang;

- 4) Aset Tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK; dan
 - 5) Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemda tidak memenuhi definisi Aset Tetap dan harus dipindahkan ke pos Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- e. Pengungkapan
- 1) Laporan Keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis Aset Tetap sebagai berikut:
 - a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
 - b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - (1) Penambahan;
 - (2) Pelepasan;
 - (3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; dan
 - (4) Mutasi Aset Tetap Lainnya.
 - c) Informasi penyusutan, meliputi:
 - (1) Nilai penyusutan;
 - (2) Metode penyusutan yang digunakan;
 - (3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan
 - (4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
 - 2) Laporan Keuangan juga harus mengungkapkan:
 - a) Eksistensi dan batasan hak milik atas Aset Tetap;
 - b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset Tetap;
 - c) Jumlah pengeluaran pada pos Aset Tetap dalam konstruksi; dan
 - d) Jumlah komitmen untuk akuisisi Aset Tetap.
 - 3) Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

3. Konstruksi Dalam Pengerjaan

- a. Definisi
- 1) Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan.
 - 2) KDP mencakup Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, serta Aset Tetap Lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut biasanya kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.
 - 3) Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.
- b. Pengakuan
- 1) Suatu aset berwujud harus diakui sebagai KDP jika:
 - a) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - b) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - c) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
 - 2) KDP biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemda atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam Aset Tetap.

- 3) KDP dipindahkan ke pos Aset Tetap yang bersangkutan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
 - b) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

Suatu KDP dipindahkan ke Aset Tetap yang bersangkutan (Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

- c. Pengukuran
KDP dicatat dengan biaya perolehan sebesar persentase kemajuan fisik per tanggal pelaporan Neraca.
- d. Penyajian
KDP disajikan di Neraca sebagai bagian dari Aset Tetap.
- e. Pengungkapan
Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai KDP pada akhir periode akuntansi, antara lain mengenai:
 - 1) Rincian kontrak KDP berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
 - 2) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya;
 - 3) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar;
 - 4) Uang muka kerja yang diberikan; dan
 - 5) Retensi.

4. Dana Cadangan

- a. Definisi
 - 1) Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
 - 2) Dana Cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan Dana Cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan Dana Cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup:
 - a) Penetapan tujuan pembentukan Dana Cadangan;
 - b) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Cadangan;
 - c) Besaran dan rincian tahunan Dana Cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana 441 cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
 - d) Sumber Dana Cadangan; dan
 - e) Tahun anggaran pelaksanaan Dana Cadangan.
- b. Pengakuan
Dana Cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari RKUD ke Rekening Dana Cadangan.
- c. Pengukuran
 - 1) Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari Kas yang diklasifikasikan ke Dana Cadangan;
 - 2) Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan;
 - 3) Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan; dan
 - 4) Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemda merupakan penambah Dana Cadangan.
- d. Penyajian

Dana Cadangan disajikan di Neraca pada kelompok Aset Non Lancar.

- e. Pengungkapan
Pengungkapan Dana Cadangan dalam CaLK, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Dasar hukum (Peraturan Daerah) pembentukan Dana Cadangan;
 - 2) Tujuan pembentukan Dana Cadangan;
 - 3) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Cadangan;
 - 4) Besaran dan rincian tahunan Dana Cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening Dana Cadangan;
 - 5) Sumber Dana Cadangan; dan
 - 6) Tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan Dana Cadangan.

5. Aset Lainnya

- a. Definisi
- 1) Aset Lainnya merupakan aset pemda yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Dana Cadangan.
 - 2) Aset Lainnya terdiri dari:
 - a) Tagihan Penjualan Angsuran
Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemda secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemda. Contoh Tagihan Penjualan Angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.
 - b) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah
Ganti Kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
 - c) Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemda diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:
 - (1) Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Sewa;
 - (2) Kerja Sama Pemanfaatan (KSP);
 - (3) Bangun Guna Serah-BGS (*Build, Operate, Transfer*-BOT); dan
 - (4) Bangun Serah Guna-BSG (*Build, Transfer, Operate*-BTO).
 - d) Aset Tak Berwujud (ATB)
ATB adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemda. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. ATB dapat berupa:
 - (1) *Goodwill*;
 - (2) Hak Paten atau Hak Cipta;
 - (3) Royalti;
 - (4) *Software*;
Software komputer yang diakui sebagai ATB adalah *software* yang dibangun sendiri atau diperoleh dengan cara pembelian yang dimaksudkan untuk digunakan dalam operasional pemerintahan, yang bukan merupakan bagian integral dari suatu *hardware*.
 - (5) Lisensi;

- (6) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang; dan
 - (7) ATB Lainnya.
- e) Aset Lain-lain.
Aset Tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemda direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau Aset Tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).
- b. Pengakuan
- 1) Aset Lainnya diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau pengusaannya berpindah.
 - 2) Tuntutan Ganti Rugi (TGR) ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).
 - 3) Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan.
 - 4) KSP diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan.
 - 5) BGS/BOT diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan.
 - 6) BSG/BTO diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.
 - 7) Pengakuan *Software* komputer:
 - a) *Software* program yang diperoleh dengan cara dikontrakkan dengan pihak ketiga diakui pada saat diterbitkannya tagihan oleh Pihak Ketiga.
 - b) *Software* yang diperoleh dengan cara pembelian:
 - (1) Perolehan *software* yang memiliki izin penggunaan/masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, maka nilai perolehan *software* dan biaya lisensinya harus dikapitalisasi sebagai ATB. Sedangkan perolehan *software* yang memiliki izin penggunaan/masa manfaat kurang dari atau s.d. 12 (dua belas) bulan, maka nilai perolehan *software* tidak perlu dikapitalisasi.
 - (2) *Software* yang diperoleh hanya dengan membayar izin penggunaan/lisensi dengan masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan harus dikapitalisasi sebagai ATB. *Software* yang diperoleh hanya dengan membayar izin penggunaan/lisensi kurang dari atau s.d. 12 (dua belas) bulan, tidak perlu dikapitalisasi.
 - (3) *Software* yang tidak memiliki pembatasan izin penggunaan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan harus dikapitalisasi. *Software* yang tidak memiliki pembatasan izin penggunaan dan masa manfaatnya kurang dari atau s.d. 12 (dua belas) bulan tidak perlu dikapitalisasi.
 - (4) Pengeluaran terkait *software* yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi akan diakui sebagai beban operasi pada periode terjadinya.
- c. Pengukuran
- 1) Aset Lainnya diukur sesuai biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
 - 2) Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
 - 3) Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara perjanjian sewa aset yang bersangkutan.

- 4) KSP dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian.
- 5) BGS/BOT dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemda kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.
- 6) BSG/BTO dicatat sebesar nilai perolehan Aset Tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai Aset Tetap yang diserahkan pemda ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.
- 7) ATB diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemda untuk memperoleh suatu ATB hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemda tersebut.
- 8) Terhadap ATB dilakukan amortisasi, kecuali atas ATB yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap ATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Masa manfaat untuk ATB diatur sebagai berikut:

Tabel 2.6. Masa Manfaat ATB

Kodefikasi	Uraian	Masa Manfaat (Bulan)
1.5.03.01.01	ATB	
1.5.03.01.01.01	<i>Goodwill</i>	120
1.5.03.01.01.02	Lisensi dan <i>Franchise</i>	120
1.5.03.01.01.03	Hak Cipta	120
1.5.03.01.01.04	Hak Paten	120
1.5.03.01.01.05	<i>Software</i>	120
1.5.03.01.01.06	Kajian	120
1.5.03.01.01.07	ATB yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya	120
1.5.03.01.01.08	ATB dalam Pengerjaan	120
1.5.03.01.01.09	ATB Lainnya	120

- 9) Amortisasi disajikan dengan metode garis lurus, tanpa nilai residu yang diperhitungkan setiap akhir periode.
 - 10) Apabila suatu ATB tidak dapat digunakan karena ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak, atau masa kegunaannya telah berakhir, maka ATB tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan. Apabila suatu ATB dihentikan dari penggunaannya, baik karena dipindahtangankan maupun karena berakhirnya masa manfaat/tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan akun ATB yang bersangkutan harus dihentikan dan diproses penghapusannya.
- d. Penyajian
Aset Lainnya disajikan di Neraca sebagai bagian dari Aset Non Lancar sebesar nilai tercatat neto, yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- e. Pengungkapan
Pengungkapan Aset Lainnya dalam CaLK, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Besaran dan rincian Aset Lainnya;
 - 2) Kebijakan amortisasi atas ATB;
 - 3) Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BGS/BOT, dan BSG/BTO); dan
 - 4) Informasi lainnya yang penting.

4.4.2 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

1. Definisi

- a. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemda. Kewajiban pemda dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/relokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.
- b. Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.
- c. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Pendek antara lain Utang Transfer Pemda, Utang kepada Pegawai, Utang Bunga, Utang Jangka Pendek kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga, dan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.
- d. Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:
 - 1) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - 2) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
 - 3) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

2. Pengakuan

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban tersebut dapat timbul dari:

- a. Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*)
Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika pemda menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan, misal utang atas belanja alat tulis kantor.
- b. Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*)
Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika pemda berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.
- c. Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*).
Dalam kejadian yang berkaitan dengan pemda, kewajiban diakui ketika pemda berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi pemda dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas pemda.
- d. Kejadian yang Diakui Pemerintah (*government-acknowledge events*)
Dalam kejadian yang diakui pemda, kewajiban diakui ketika pemda memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal pemda memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

3. Pengukuran

- a. Kewajiban pemda dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal necara. Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos

mengikuti karakteristiknya. Berikut ini akan dijabarkan mengenai pengukuran untuk masing-masing pos kewajiban.

b. Pengukuran kewajiban atau Utang Jangka Pendek pemda berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya sebagai berikut:

1) Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga terjadi ketika pemda menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemda mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Contoh: bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.

2) Pengukuran Utang Transfer

Utang Transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3) Pengukuran Utang Bunga

Utang Bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

4) Pengukuran Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Utang Perhitungan Pihak Ketiga dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.

5) Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

6) Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya

Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut. Contoh: biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

c. Kewajiban atau Utang Jangka Panjang pemda juga diukur berdasarkan karakteristiknya. Terdapat dua karakteristik Utang Jangka Panjang pemda, yaitu:

1) Utang yang tidak diperjualbelikan

Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari World Bank.

2) Utang yang diperjualbelikan

Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemda. Sekuritas utang pemerintah dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

4. Penyajian

Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang pemda disajikan dalam neraca disisi pasiva.

5. Pengungkapan

Dalam pengungkapan pada CaLK terkait dengan kewajiban, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut:

- a. Jumlah saldo Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
- b. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
- c. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
- d. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
- e. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - 1) Pengurangan pinjaman;
 - 2) Modifikasi persyaratan utang;
 - 3) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - 4) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - 5) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 - 6) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
- f. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur; dan
- g. Biaya pinjaman:
 - 1) Perlakuan biaya pinjaman;
 - 2) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan;
 - 3) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

4.4.3 Kebijakan Akuntansi Ekuitas

1. Definisi
Ekuitas adalah kekayaan bersih pemda yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban pada tanggal pelaporan. Saldo Ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir Ekuitas pada LPE.
2. Pengakuan
Pengakuan atas Ekuitas tergantung dari saat pengakuan Aset dan Kewajiban.
3. Penyajian dan Pengungkapan
Ekuitas disajikan di Neraca dan dijelaskan rinciannya dalam CaLK.

4.4.4 Kebijakan Akuntansi Pendapatan Daerah

1. Definisi
Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan RKUD yang menambah SAL dalam periode TA yang bersangkutan yang menjadi hak pemda, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemda.
2. Pengakuan
Pendapatan Daerah menggunakan basis kas sehingga Pendapatan Daerah diakui pada saat:
 - a. Diterima di RKUD; atau
 - b. Diterima oleh SKPD; atau
 - c. Diterima entitas lain diluar pemda atas nama BUD.
3. Pengukuran
 - a. Pendapatan Daerah diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
 - b. Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan Daerah bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
4. Penyajian

Pendapatan Daerah disajikan dalam LRA dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah.

5. Pengungkapan
Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan pendapatan adalah:
 - a. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - b. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
 - c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan Pendapatan Daerah; dan
 - d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.5 Kebijakan Akuntansi Belanja Daerah

1. Definisi
Belanja merupakan semua pengeluaran oleh BUD yang mengurangi SAL dalam periode TA bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemda.
2. Pengakuan
Belanja diakui pada saat:
 - a. Kas untuk belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan dari RKUD.
 - b. Kas untuk belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran dan pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan; dan
 - c. Dalam hal BLU, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLU.
3. Pengukuran
Belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.
4. Penyajian dan Pengungkapan
 - a. Belanja disajikan dalam LRA. Rincian atas belanja tersebut dijelaskan dalam CaLK;
 - b. Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran Kas atas Belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi; dan
 - c. Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.6 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan Daerah

1. Definisi
Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran pemda dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
Pembiayaan diklasifikasi kedalam dua bagian, yaitu Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Penerimaan Pembiayaan
Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan RKUD antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
 - b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran RKUN/D antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

2. Pengakuan
 - a. Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada RKUD.
 - b. Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari RKUD.
3. Pengukuran
 - a. Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari penerimaan dan pengeluaran.
 - b. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.
4. Penyajian dan Pengungkapan
Pembiayaan disajikan dalam LRA dan rinciannya dijelaskan dalam CALK.

4.4.7 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

1. Definisi
Pendapatan-LO adalah hak pemda yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode TA yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan yang dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.
Termasuk Pendapatan-LO adalah hibah langsung yang diterima SKPD yang kemudian digunakan langsung oleh SKPD tanpa disetorkan terlebih dahulu ke RKUD dan dilaporkan ke BUD untuk diakui sebagai Pendapatan Daerah.
2. Pengakuan
 - a. Pengakuan Pendapatan-LO pada PPKD:
 - 1) PAD
Merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu PAD melalui penetapan, PAD tanpa penetapan, dan PAD dari hasil eksekusi jaminan.
 - 2) PAD Melalui Penetapan
PAD yang masuk ke dalam kategori ini adalah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, dan Pendapatan Denda Retribusi. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.
 - 3) PAD Tanpa Penetapan
PAD yang masuk ke dalam kategori ini antara lain Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, dan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran langsung ke RKUD.
 - 4) PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan
Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, PPKD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.

- 5) **Pendapatan Transfer**
Pemerintah Pusat akan mengeluarkan ketetapan mengenai jumlah dana transfer yang akan diterima oleh pemda. Namun demikian ketetapan pemerintah belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO, mengingat kepastian pendapatan tergantung pada persyaratan-persyaratan sesuai peraturan perundangan penyaluran alokasi tersebut. Untuk itu pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada RKUD. Walaupun demikian, Pendapatan Transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur.
 - 6) **Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**
Merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada PPKD, antara lain meliputi Pendapatan Hibah baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan/Lembaga/ Organisasi Swasta Dalam Negeri, maupun Kelompok Masyarakat/ Perorangan. Naskah Perjanjian Hibah yang ditandatangani belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO mengingat adanya proses dan persyaratan untuk realisasi pendapatan hibah tersebut.
Hibah langsung yang diterima SKPD yang kemudian digunakan langsung oleh SKPD diakui pada saat dilaporkan ke BUD pada akhir periode.
 - 7) **Pendapatan Non Operasional**
Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Nonlancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Nonlancar) telah diterima.
- b. **Pengakuan Pendapatan-LO pada SKPD**
Pendapatan Daerah pada SKPD hanya sebagian dari PAD yaitu pendapatan Pajak Daerah dalam hal instansi pungutan pajak terpisah dari BUD, pendapatan Retribusi dan sebagian dari Lain-lain PAD yang Sah.
PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Alternatif pengakuan Pendapatan tersebut dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:
- 1) Alternatif satu yaitu kelompok pendapatan pajak yang didahului oleh penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh wajib pajak yang bersangkutan. Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.
 - 2) Alternatif dua yaitu kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah disampaikannya Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dari Wajib Pajak ke SKPKD atas pendapatan terkait.
 - 3) Alternatif tiga yaitu kelompok pendapatan retribusi yang pembayarannya diterima untuk memenuhi kewajiban dalam periode tahun berjalan. Pendapatan retribusi ini diakui ketika pembayaran telah diterima atau pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah.
3. **Pengukuran**
Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4. Penyajian dan pengungkapan
Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

4.4.8 Kebijakan Akuntansi Beban

1. Definisi
Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan Ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi Aset atau timbulnya Kewajiban.
2. Pengakuan
Beban diakui pada saat timbulnya Kewajiban, terjadi konsumsi Aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya Kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya Kas dari RKUD. Contoh: tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi Aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemda. Sedangkan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai Aset sehubungan dengan penggunaan Aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.
 - a) Pengakuan Beban pada SKPKD
 - 1) Beban Bunga
Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran Pemerintah Daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.
Beban Bunga meliputi Beban Bunga Pinjaman dan Beban Bunga Obligasi. Beban bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
 - 2) Beban Subsidi
Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Beban subsidi diakui pada saat kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.
 - 3) Beban Hibah
Beban Hibah merupakan beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
Pengakuan beban hibah sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja hibah, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah karena harus dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran hibah.
 - 4) Beban Bantuan Sosial
Beban Bantuan Sosial merupakan beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
Pengakuan beban bantuan sosial dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat

ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial.

5) **Beban Penyisihan Piutang**

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun.

6) **Beban Transfer**

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari Pemerintah Daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Beban transfer diakui saat diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana atau pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah (jika terdapat dokumen yang memadai). Dalam hal pada akhir tahun anggaran terdapat pendapatan yang harus dibagikan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban.

b) **Pengakuan Beban Pada SKPD**

1) **Beban Pegawai**

Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang belum berstatus pegawai negeri sipil sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Pembayaran atas beban pegawai dapat dilakukan melalui mekanisme Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang Persediaan (GUP)/Tambahan Uang Persediaan (TUP) seperti honorarium non pegawai negeri sipil, atau melalui mekanisme langsung seperti beban gaji dan tunjangan.

Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme langsung, beban pegawai diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah (jika terdapat dokumen yang memadai).

Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme UP/GUP/TUP, beban pegawai diakui ketika bukti pembayaran beban (misal: bukti pembayaran honor) telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Beban pegawai yang pembayarannya didanai dari hibah langsung yang diterima SKPD diakui pada saat dilaporkan ke Bendahara Umum Daerah pada akhir periode.

2) **Beban Barang**

Beban Barang merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi. Beban barang diakui ketika bukti penerimaan barang atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.

Beban barang yang pembayarannya didanai dari hibah langsung yang diterima SKPD diakui pada saat dilaporkan ke Bendahara Umum Daerah pada akhir periode.

3. **Pengukuran**

Beban diukur sesuai dengan:

- a) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal kewajiban yang timbul, konsumsi aset dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan mata uang rupiah; dan

- b) Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diketahui harga perolehannya.
4. Penyajian dan Pengungkapan
Beban disajikan dalam LO dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

4.4.9 Kebijakan Akuntansi Koreksi

Kesalahan merupakan akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sedangkan koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

Kesalahan dapat terjadi karena adanya:

1. Keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran;
2. Kesalahan perhitungan matematis;
3. Kesalahan dalam penerapan standar dan kebijakan akuntansi;
4. Kesalahan interpretasi fakta;
5. Kecurangan; atau
6. Kelalaian.

Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan menjadi:

1. Kesalahan berulang dan sistemik
Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak. Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan jurnal koreksi tidak perlu dibuat untuk kesalahan seperti ini, tetapi dicatat pada saat terjadi pengeluaran/penerimaan kas untuk kelebihan/kekurangan pendapatan dengan mengurangi/menambah Pendapatan Daerah maupun Pendapatan-LO yang bersangkutan.
2. Kesalahan tidak berulang
Kesalahan tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali, dikelompokkan dalam dua jenis:
 - a) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan
Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun Pendapatan Daerah atau akun Belanja, maupun akun Pendapatan-LO atau akun Beban.
 - b) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya
Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun Pendapatan-Daerah atau akun Belanja, maupun akun Pendapatan-LO atau akun Beban.

Apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan dilakukan dengan pembetulan sebagai berikut:

- a) Kesalahan tidak mempengaruhi posisi kas, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait.
- b) Kesalahan atas kelebihan pengeluaran Belanja/Beban sehingga mengakibatkan penerimaan kembali Belanja/Beban dilakukan pada akun Pendapatan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah /Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO.
- c) Kesalahan atas kekurangan pengeluaran Belanja/Beban sehingga mengakibatkan penambahan belanja/beban dan mengurangi posisi kas, pembetulan dilakukan pada akun Saldo Anggaran Lebih/akun Ekuitas.

- d) Koreksi kesalahan atas penerimaan Pendapatan Daerah/ Pendapatan-LO yang menambah maupun mengurangi posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo anggaran lebih/akun ekuitas.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1 Pendapatan

Anggaran (Rp)	TA 2023			Realisasi (Rp)
	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
2.856.981.438.000,00	2.901.021.509.721,00	44.040.071.721,00	101,54	2.847.196.017.404,00

Anggaran Pendapatan dalam Perbup Kebumen Nomor 69 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Perbup Kebumen Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2023 ditargetkan sebesar Rp2.856.981.438.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.901.021.509.721,00 yang terdiri dari.

Tabel 5.1.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023				Realisasi TA 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
Pendapatan Asli Daerah	432.821.047.000,00	463.650.961.705,00	30.847.024.215,00	107,12	512.346.375.475,00
Pendapatan Transfer	2.421.983.808.000,00	2.435.850.438.454,00	13.866.630.454,00	100,57	2.329.703.641.941,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	2.176.583.000,00	1.520.109.562,00	(656.473.438,00)	69,84	5.145.999.988,00
Jumlah	2.856.981.438.000,00	2.901.021.509.721,00	44.040.071.721,00	101,54	2.847.196.017.404,00

Pendapatan Pemkab Kebumen TA 2023 mencapai target sebesar 101,54% dari anggaran atau terdapat pelampauan pendapatan sebesar Rp44.040.071.721,00. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan TA 2022 terdapat kenaikan sebesar Rp53.825.492.317,00 atau naik sebesar 1,89%.

Tabel 5.1.1 menunjukkan bahwa Pendapatan Transfer merupakan komponen utama Pendapatan Pemkab Kebumen dengan kontribusi sebesar 83,97% dari total realisasi Pendapatan. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyokong Pendapatan sebesar 15,98% dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah memberikan kontribusi sebesar 0,05%. Kontribusi PAD turun dari kontribusi pada TA 2022 yang sebesar 17,99%.

Realisasi PAD secara nominal mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu pada TA 2023 realisasinya sebesar Rp463.650.961.705,00 sedangkan realisasi TA 2022 sebesar Rp512.346.375.475,00 atau turun sebesar 9,50%. Pendapatan Transfer TA 2023 terealisasi sebesar Rp2.435.850.438.454,00 atau 100,57% mengalami kenaikan sebesar 4,56% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp2.329.703.641.941,00. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2023 terealisasi sebesar Rp1.520.109.562,00 atau 69,84%, jika dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar Rp5.145.999.988,00 secara nominal mengalami penurunan sebesar 70,46%.

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Anggaran (Rp)	TA 2023			Realisasi (Rp)
	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
432.821.047.000,00	463.650.961.705,00	30.847.024.215,00	107,12	512.346.375.475,00

Realisasi PAD TA 2023 Pemkab Kebumen sebesar Rp463.650.961.705,00 terdiri atas:

Tabel 5.1.2 Anggaran dan Realisasi PAD TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023				Realisasi TA 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
Pendapatan Pajak Daerah	133.030.000.000,00	137.222.705.502,00	4.192.705.502,00	103,15	129.843.875.322,00

Uraian	TA 2023				Realisasi TA 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
Pendapatan Retribusi Daerah	36.368.440.000,00	28.881.046.419,00	(7.487.393.581,00)	79,41	28.375.110.419,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19.123.337.000,00	19.123.340.688,00	3.688,00	100,00	17.640.585.052,00
Lain-lain PAD Yang Sah	244.299.270.000,00	278.423.869.096,00	34.124.599.096,00	113,97	336.486.804.682,00
Jumlah	432.821.047.000,00	463.650.961.705,00	30.829.914.705,00	107,12	512.346.375.475,00

Dari empat objek PAD terdapat tiga obyek PAD yang mencapai target yaitu Pendapatan Pajak Daerah tercapai sebesar 103,15%, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tercapai sebesar 100,00% dan Lain-Lain PAD yang Sah tercapai sebesar 113,97%. Sedangkan Pendapatan Retribusi Daerah tidak mencapai target atau hanya terealisasi sebesar 79,46%, jika dibandingkan realisasi TA 2022 yang sebesar Rp28.375.110.419,00 secara nominal Pendapatan Retribusi Daerah mengalami kenaikan sebesar 1,84%.

5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Anggaran (Rp)	TA 2023			%	Realisasi (Rp)
	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)			
133.030.000.000,00	137.222.705.502,00	4.192.705.502,00	103,15	129.843.875.322,00	

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2023 mencapai target sebesar 103,15% dari target anggaran sebesar Rp133.030.000.000,00 terealisasi sebesar Rp137.222.705.502,00. Pemungutan Pajak Daerah dilaksanakan berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memungut 11 Jenis Pajak Daerah. Pemungutan 11 Jenis Pajak Daerah diatur lebih lanjut oleh peraturan daerah dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang diatur dengan peraturan kepala daerah. Rincian Pendapatan Pajak Daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023				Realisasi TA 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
Pajak Hotel	2.650.000.000,00	2.915.673.634,00	265.673.634,00	110,03	2.455.684.956,00
Pajak Restoran	11.100.000.000,00	13.254.656.107,00	2.154.656.107,00	119,41	11.159.401.535,00
Pajak Hiburan	900.000.000,00	1.129.890.815,00	229.890.815,00	125,54	543.034.159,00
Pajak Reklame	2.000.000.000,00	2.324.243.500,00	324.243.500,00	116,21	2.001.768.503,00
Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	41.600.000.000,00	42.269.699.527,00	669.699.527,00	101,61	39.261.189.956,00
Pajak Parkir	700.000.000,00	744.359.699,00	44.359.699,00	106,34	631.035.253,00
Pajak Air Tanah	380.000.000,00	405.744.478,00	25.744.478,00	106,77	451.312.560,00
Pajak Sarang Burung Walet	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	700.000.000,00	593.014.174,00	(106.985.826,00)	84,72	702.807.750,00
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	56.700.000.000,00	56.985.271.522,00	285.271.522,00	100,50	56.649.407.691,00
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	16.300.000.000,00	16.600.152.046,00	300.152.046,00	101,84	15.983.132.959,00
Jumlah	133.030.000.000,00	137.222.705.502,00	4.192.705.502,00	103,15	129.843.875.322,00

Pendapatan Pajak Daerah TA 2023 terealisasi sebesar Rp137.222.705.502,00 atau naik sebesar 5,68% dibandingkan Pendapatan Pajak Daerah TA 2022 yang hanya sebesar Rp129.843.875.322,00. Dari 10 objek Pendapatan Pajak Daerah rata-rata tercapai di atas

100,00% dari target anggaran. Pendapatan Pajak Daerah dianggarkan pada BPKPD Kabupaten Kebumen.

1. Pajak Hotel

Pemungutan Pajak Hotel berdasarkan Perrda Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel dan Perbup Kebumen Nomor 22 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel, dimana tarif pengenaan Pajak Hotel sebesar 10% dari jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima hotel.

Pendapatan Pajak Hotel TA 2023 ditargetkan sebesar Rp2.650.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.915.673.674,00 atau 110,03%. Realisasi pendapatan Pajak Hotel pada TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp459.988.678,00 atau 18,73% dari TA 2022.

2. Pajak Restoran

Pemungutan Pajak Restoran berdasarkan Perda Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran dan Perbup Kebumen Nomor 110 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran, dimana tarif Pajak Restoran sebesar 10% dari jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.

Pendapatan Pajak Restoran TA 2023 ditargetkan sebesar Rp11.100.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp13.254.656.107,00 atau 119,41%. Realisasi pendapatan Pajak Restoran TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp2.095.254.572,00 atau 18,78% dari TA 2022. Rincian pendapatan Pajak Restoran disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.4 Anggaran dan Realisasi Pajak Restoran TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023				Realisasi TA 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	2.100.000.000,00	2.971.806.454,00	871.806.454,00	141,51	2.407.041.145,00
Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	9.000.000.000,00	10.282.849.653,00	1.282.849.653,00	114,25	8.752.360.390,00
Jumlah	11.100.000.000,00	13.254.656.107,00	2.154.656.107,00	119,41	11.159.401.535,00

3. Pajak Hiburan

Pemungutan Pajak Hiburan berdasarkan Perda Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan dan Perbup Kebumen Nomor 23 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Tontonan film sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
- b. Pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana sebesar 20% (dua puluh persen), kecuali untuk hiburan kesenian rakyat/tradisional sebesar 10% (sepuluh persen);
- c. Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya sebesar 20% (dua puluh persen);
- d. Pameran sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- e. Diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya sebesar 50% (lima puluh persen);
- f. Sirkus, akrobat dan sulap sebesar 20% (dua puluh persen);
- g. Permainan bilyard, golf dan bowling sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
- h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan sebesar 20% (dua puluh persen);
- i. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness centre*) sebesar 20% (dua puluh persen); dan
- j. Pertandingan olah raga sebesar 15% (lima belas persen).

Pendapatan Pajak Hiburan TA 2023 ditargetkan sebesar Rp900.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.129.890.815,00 atau 125,54%. Realisasi pendapatan Pajak

Hiburan TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp586.856.656,00 atau 108,07% dari TA 2022. Rincian pendapatan Pajak Hiburan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.5 Anggaran dan Realisasi Pajak Hiburan TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023				Realisasi TA 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
Pajak Tontonan Film	500.000.000,00	345.345.344,00	(154.654.656,00)	0,00	0,00
Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	225.000.000,00	233.037.116,00	8.037.116,00	103,57	176.482.225,00
Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	150.000.000,00	537.078.355,00	387.078.355,00	358,05	340.015.334,00
Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (<i>Fitness Center</i>)	20.000.000,00	14.430.000,00	(5.570.000,00)	72,15	26.536.600,00
Pajak Pertandingan Olahraga	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	-	-
Jumlah	900.000.000,00	1.129.890.815,00	229.890.815,00	125,54	543.034.159,00

Objek Pajak Hiburan yang realisasinya mengalami kenaikan pada TA 2023 yaitu Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya sebesar Rp56.554.891,00 atau 32,05% dari TA 2022 serta Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan sebesar Rp197.063.021,00 atau 57,96% dari TA 2022. Sedangkan Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (*Fitness Center*) mengalami penurunan sebesar Rp12.106.600,00 atau 45,62% dari TA 2022.

4. Pajak Reklame

Pemungutan Pajak Reklame berdasarkan Perda Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame dan Perbup Kebumen Nomor 111 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame sebagaimana telah diubah dengan Perbup Kebumen Nomor 62 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perbup Kebumen Nomor 111 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame. Pendapatan Pajak Reklame TA 2023 ditargetkan sebesar Rp2.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.324.243.500,00 atau 116,21%. Realisasi pendapatan Pajak Reklame TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp322.474.997,00 atau 16,11% dari TA 2022. Rincian pendapatan Pajak Reklame disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.6 Anggaran dan Realisasi Pajak Reklame TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023				Realisasi TA 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	1.425.000.000,00	1.353.758.700,00	(71.241.300,00)	95,00	1.263.042.519,00
Pajak Reklame Kain	575.000.000,00	970.484.800,00	395.484.800,00	168,78	738.725.984,00
Jumlah	2.000.000.000,00	2.324.243.500,00	324.243.500,00	116,21	2.001.768.503,00

5. PPJ

Pemungutan PPJ berdasarkan Perda Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2012 tentang PPJ dan Perbup Kebumen Nomor 45 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2012 tentang PPJ.

Dasar pengenaan PPJ adalah Nilai Jual Tenaga Listrik dengan tarif PPJ sebesar 10% (sepuluh persen), penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam dengan tarif PPJ sebesar 3% (tiga persen) dan penggunaan

tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan tarif PPJ sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Wajib Pajak untuk PPJ adalah penyedia tenaga listrik karena penggunaan listrik di Kabupaten Kebumen adalah listrik yang disediakan oleh PT PLN (Persero) sehingga yang menjadi Wajib Pajak adalah PT PLN (Persero). Untuk kelancaran pemungutan PPJ, telah disusun Kesepakatan Bersama tentang Pengelolaan Pemungutan dan Penyetoran PPJ, Penanganan Lampu Penerangan Jalan Umum dan Pembayaran Rekening Listrik Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen antara Pemkab Kebumen dengan PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Cilacap dan BPKPD Kabupaten Kebumen dan Disperkimhub Kabupaten Kebumen dengan Nomor 0065.Pj/AGA.04.01/C03010000/2022, Nomor 510.7.2/3473/VI/2022 Tahun 2022, dan Nomor 510.7.2/1200/VI/2022 Tahun 2022 tanggal 9 Juni 2022.

Pendapatan PPJ TA 2023 ditargetkan sebesar Rp41.600.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp42.269.699.527,00 atau 101,61%. Realisasi pendapatan PPJ TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp3.008.509.571,00 atau sebesar 7,66% dari TA 2022.

6. Pajak Parkir

Pemungutan Pajak Parkir berdasarkan Perda Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir dan Perbup Kebumen Nomor 24 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir. Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.

Pendapatan Pajak Parkir TA 2023 ditargetkan sebesar Rp700.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp744.359.699,00 atau 106,34%. Realisasi pendapatan Pajak Parkir TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp113.324.446,00 atau 17,96% dari TA 2022.

7. Pajak Air Tanah

Pemungutan Pajak Air Tanah berdasarkan Perda Kabupaten Kebumen Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah dan Perbup Kebumen Nomor 115 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kabupaten Kebumen Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai perolehan air tanah.

Pendapatan Pajak Air Tanah TA 2023 ditargetkan sebesar Rp380.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp405.744.478,00 atau 106,77%. Realisasi pendapatan Pajak Air Tanah TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp45.568.082,00 atau 10,10% dari TA 2022.

8. Pajak MBLB

Pemungutan Pajak MBLB berdasarkan Perda Kabupaten Kebumen Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pajak MBLB dan Perbup Kebumen Nomor 114 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kabupaten Kebumen Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pajak MBLB. Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai jual hasil pengambilan MBLB.

Pendapatan Pajak MBLB ditargetkan sebesar Rp700.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp593.014.174,00 atau 84,72%. Realisasi pendapatan Pajak MBLB TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp109.793.576,00 atau 15,62% dari TA 2022. Hal ini disebabkan para kontraktor di Kebumen memilih menggunakan batuan dari kabupaten lain karena batuan di Kebumen tidak memenuhi standar dalam spesifikasi pekerjaan.

9. PBB-P2

Pemungutan PBB-P2 berdasarkan Perda Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2012 tentang PBB-P2 dan Perbup Kebumen Nomor 36 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Perbup Kebumen Nomor 44 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2012 tentang PBB-P2.

Pendapatan PBB-P2 TA 2023 ditargetkan sebesar Rp56.700.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp56.985.271.522,00 atau 100,50%. Realisasi pendapatan PBB-P2 TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp335.863.831,00 atau 0,59% dari realisasi TA 2022.

10. BPHTB

Pemungutan BPHTB berdasarkan Perda Kabupaten Kebumen Nomor 18 Tahun 2010 tentang BPHTB dan Perbup Kebumen Nomor 3 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan BPHTB di Kabupaten Kebumen.

Pendapatan BPHTB ditargetkan sebesar Rp16.300.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp16.600.152.046,00 atau 101,84%. Pendapatan BPHTB TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp617.019.087,00 atau 3,86% dari realisasi TA 2022.

5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

TA 2023				TA 2022
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	Realisasi (Rp)
36.368.440.000,00	28.881.046.419,00	(7.487.393.581,00)	79,41	28.375.110.419,00

Pendapatan Retribusi Daerah TA 2023 ditargetkan sebesar Rp36.368.440.000,00 dan terealisasi sebesar Rp28.881.046.419,00 atau hanya mencapai 79,41%. Realisasi pendapatan Retribusi Daerah TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp505.936.000,00 atau 1,78% dari TA 2022.

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009, Retribusi Daerah terdiri dari tiga jenis Retribusi yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. UU Nomor 28 Tahun 2009 mengatur lebih lanjut mengenai pemungutan Retribusi Jasa Umum yang terdiri dari 15 jenis Retribusi, Retribusi Jasa Usaha yang terdiri dari 11 jenis Retribusi, dan Retribusi Perizinan Tertentu yang terdiri dari enam jenis Retribusi. Retribusi Izin Gangguan yang merupakan salah satu rincian dalam Retribusi Perizinan Tertentu telah dihapus berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2017 dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai PP Nomor 16 Tahun 2021 telah diubah menjadi Retribusi Perizinan Bangunan Gedung (PBG).

Pemkab Kebumen pada TA 20223 memungut Retribusi Jasa Umum sebanyak sembilan jenis, Retribusi Jasa Usaha sebanyak delapan jenis dan Retribusi Perizinan tertentu sebanyak dua jenis.

Rincian Pendapatan Retribusi Daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.7 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023				Realisasi TA 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
Retribusi Jasa Umum					
Retribusi Pelayanan Kesehatan	725.000.000,00	795.516.300,00	70.516.300,00	109,73	1.305.252.800,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.349.750.000,00	1.441.471.300,00	91.721.300,00	106,80	1.363.595.100,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	2.410.000.000,00	1.170.762.700,00	(1.239.237.300,00)	48,58	1.259.225.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar	7.529.001.000,00	6.246.595.015,00	(1.282.405.985,00)	82,97	6.182.853.889,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.050.443.000,00	548.336.000,00	(502.107.000,00)	52,20	621.044.000,00
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	90.000.000,00	140.955.500,00	50.955.500,00	156,62	117.611.500,00
Retribusi Pelayanan Pendidikan	82.500.000,00	84.120.000,00	1.620.000,00	101,96	85.128.000,00
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian	1.293.096.000,00	1.271.616.000,00	(21.480.000,00)	98,34	1.808.616.000,00

Uraian	TA 2023				Realisasi TA 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
Menara Telekomunikasi					
Sub Jumlah I	14.529.790.000,00	11.699.372.815,00	(2.830.417.185,00)	80,52	12.743.326.289,00
Retribusi Jasa Usaha					
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	4.236.660.149,00	4.656.304.233,00	419.644.084,00	109,91	3.715.634.737,00
Retribusi Tempat Pelelangan	1.910.562.251,00	1.438.639.484,00	(471.922.767,00)	75,30	893.216.161,00
Retribusi Terminal	143.300.000,00	94.461.000,00	(48.839.000,00)	65,92	97.994.200,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir	5.205.877.600,00	5.021.520.600,00	(184.357.000,00)	96,46	4.183.632.300,00
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	24.920.000,00	27.610.000,00	2.690.000,00	110,79	26.740.000,00
Retribusi Rumah Potong Hewan	30.000.000,00	37.877.500,00	7.877.500,00	126,26	25.950.000,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	8.644.008.000,00	4.720.282.500,00	(3.923.725.500,00)	54,61	4.973.498.300,00
Sub Jumlah II	20.195.328.000,00	15.996.695.317,00	(4.198.632.683,00)	79,21	13.916.665.698,00
Retribusi Perizinan Tertentu					
Retribusi IMB	1.587.134.000,00	1.173.548.287,00	(413.585.713,00)	73,94	1.687.933.432,00
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	56.188.000,00	11.430.000,00	(44.758.000,00)	20,34	27.185.000,00
Sub Jumlah III	1.643.322.000,00	1.184.978.287,00	(458.343.713,00)	72,11	1.715.118.432,00
Jumlah	36.368.440.000,00	28.881.046.419,00	(7.487.393.581,00)	79,41	28.375.110.419,00

Tabel 5.1.7 menunjukkan bahwa dari 17 rincian obyek pendapatan Retribusi Daerah TA 2023 terdapat tujuh rincian objek retribusi yang mencapai target yaitu Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar 109,73%, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebesar 106,80%, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebesar 156,62%, Retribusi Pelayanan Pendidikan sebesar 101,96%, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar 109,91%, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebesar 110,79%, dan Retribusi Rumah Potong Hewan sebesar 126,26%.

Sedangkan, sepuluh rincian objek retribusi lainnya tidak dapat mencapai target yaitu:

1. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum hanya mencapai 48,58%, karena terdapat jalan koridor satu arah yang menyebabkan titik parkir di Jalan Soekarno Hatta sudah tidak menjadi titik parkir (non aktif);
2. Retribusi Pelayanan Pasar hanya mencapai 82,97%, karena sebagian besar kios dan los tutup dan tidak aktif berjualan dan banyaknya minimarket/pasar online/pasar tradisional;
3. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor hanya mencapai 52,20%, karena masih banyak kendaraan yang terlambat untuk menguji sesuai dengan habis batas waktunya dan terdapat batasan umur kendaraan angkutan umum;
4. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi hanya mencapai 98,34%, karena terdapat satu perusahaan yang belum membayarkan retribusinya karena anggaran telah habis dan berkomitmen membayarkan retribusinya pada awal bulan Januari 2024 dan telah dibayarkan pada tanggal 4 Januari 2024;
5. Retribusi Tempat Pelelangan merupakan retribusi pelelangan ikan yang dikelola oleh DLHKP hanya mencapai 75,30%, karena faktor cuaca ekstrim (gelombang tinggi, angin dan arus laut kencang) yang menghalangi nelayan melaut serta terjadi penurunan produksi untuk komoditas perikanan yang memiliki harga tinggi. Penurunan retribusi pelelangan ikan ini juga disebabkan adanya dominasi komoditas tangkap dengan nilai ekonomi yang rendah seperti ubur-ubur;

6. Retribusi Terminal hanya mencapai 65,92%, karena menurunnya jumlah kendaraan angkutan umum yang beroperasi dan masuk terminal non bus, hal tersebut merupakan dampak dari perubahan perilaku masyarakat yang beralih menggunakan kendaraan pribadi atau moda transportasi *online*;
7. Retribusi Tempat Khusus Parkir merupakan tempat khusus parkir yang berada pada tempat rekreasi hanya mencapai 96,46%, karena turunnya kunjungan wisatawan dan menjamurnya tempat wisata baru sebagai destinasi pilihan;
8. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga hanya mencapai 54,61%, karena turunnya kunjungan wisatawan dan menjamur tempat wisata yang baru sebagai destinasi pilihan;
9. Retribusi IMB hanya mencapai 73,94%, karena terdapat SE Kemendagri Nomor 011/5976/SJ tentang Percepatan Penyusunan Regulasi Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha, Penyelenggaraan Layanan Persetujuan Bangunan Gedung dan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung serta Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, yang menyebutkan bahwa layanan yang diberikan sebelum ditetapkan peraturan daerah tentang Retribusi PBG tidak disertai pemungutan retribusi atau gratis, mengingat peraturan daerah mengenai Retribusi PBG tidak dapat berlaku surut. Peraturan pelaksanaan untuk pemungutan Retribusi PBG Kabupaten Kebumen baru ditetapkan pada tanggal 23 Februari 2023; dan
10. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum hanya mencapai 20,34%, karena belum terdapat penambahan kendaraan baru dan untuk menentukan jumlah trayek baru perlu ada survei *load factore*, waktu perpanjangan SK Ijin Trayek berlaku lima tahun, banyak jalur trayek yang kendaraannya sudah tidak beroperasi karena sepi pengguna angkutan dan batasan usia kendaraan angkutan umum 25 tahun.

5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Anggaran (Rp)	TA 2023			TA 2022	
	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
19.123.337.000,00	19.123.340.688,00	3.688,00	100,00	17.640.585.052,00	

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (HPKDYD) TA 2023 ditargetkan sebesar Rp19.123.337.000,00 dan terealisasi sebesar Rp19.123.340.688,00 atau mencapai 100,00%. Realisasi Pendapatan HPKDYD TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp1.482.755.636,00 atau 8,41% dari TA 2022.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (HPKDYD) merupakan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD oleh Pemkab Kebumen berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Rincian Pendapatan HPKDYD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.8 Anggaran dan Realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023				Realisasi TA 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
Lembaga Keuangan					
PT BPD Jateng	12.782.353.000,00	12.782.353.955,00	955,00	100,00	10.332.638.637,00
PT BPR BKK Kebumen (Perseroda)	3.412.154.000,00	3.412.154.809,00	809,00	100,00	3.602.748.954,00
PT BPR Bank Kebumen (Perseroda)	583.206.000,00	583.206.099,00	99,00	100,00	1.488.038.292,00
Aneka Usaha					
PT Luk Ulo Farma (Perseroda)	199.212.000,00	199.212.900,00	900,00	100,00	190.336.846,00
Bidang Air Minum					
Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa	2.146.412.000,00	2.146.412.925,00	925,00	100,00	2.026.822.323,00

Uraian	TA 2023				Realisasi TA 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
Lembaga Keuangan					
Jumlah	19.123.337.000,00	19.123.340.688,00	3.688,00	100,00	17.640.585.052,00

5.1.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah

TA 2023				TA 2022
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	Realisasi (Rp)
244.299.270.000,00	278.423.869.096,00	34.124.599.096,00	113,97	336.486.804.682,00

Lain-lain PAD yang Sah TA 2023 ditargetkan sebesar Rp244.299.270.000,00 dan terealisasi sebesar Rp278.423.869.096,00 atau mencapai 113,97%. Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp58.062.935.586,00 atau 17,26% dari TA 2022. Rincian Lain-lain PAD yang Sah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.9 Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023				Realisasi TA 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.906.000.000,00	2.038.015.879,00	132.015.879,00	106,93	1.829.716.362,00
Hasil Kerja Sama Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	11.204.594,00
Jasa Giro	1.934.000.000,00	1.941.444.932,00	7.444.932,00	100,38	2.205.784.880,00
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	37.500.000,00	47.704.545,00	10.204.545,00	127,21	42.750.000,00
Pendapatan Bunga	6.287.000.000,00	5.411.536.170,00	(875.463.830,00)	86,08	9.845.890.393,00
Pendapatan Denda Pajak Daerah	250.000.000,00	403.885.062,00	153.885.062,00	161,55	231.123.774,00
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	13.000.000,00	22.317.520,00	9.317.520,00	171,67	372.197.893,00
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	18.500.000,00	0,00	(18.500.000,00)	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian	245.000.000,00	355.217.506,00	110.217.506,00	144,99	302.104.274,00
Pendapatan BLUD	232.954.122.000,00	266.431.178.288,00	33.477.056.288,00	114,37	320.331.784.898,00
Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)	654.148.000,00	1.772.569.194,00	1.118.421.194,00	270,97	978.602.614,00
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	335.645.000,00
Jumlah	244.299.270.000,00	278.423.869.096,00	34.124.599.096,00	113,97	336.486.804.682,00

Tabel 5.1.9 menunjukkan bahwa seluruh realisasi objek Lain-Lain PAD yang Sah melampaui target anggaran kecuali Pendapatan Bunga yang hanya mencapai 86,08%.

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

TA 2023				TA 2022
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	Realisasi (Rp)
2.421.983.808.000,00	2.435.850.438.454,00	13.866.630.454,00	100,57	2.329.703.641.941,00

Pendapatan Transfer dianggarkan sebesar Rp2.421.983.808.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.435.850.438.454,00 atau 100,57% merupakan pendapatan yang realisasinya dicatat

berdasarkan pada realisasi transfer yang masuk ke RKUD periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2023. Rincian Pendapatan Transfer disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.10 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023				Realisasi TA 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.765.872.796.000,00	1.783.201.602.063,00	17.328.806.063,00	100,98	1.706.540.321.941,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	468.089.956.000,00	467.765.621.200,00	(324.334.800,00)	99,93	416.756.373.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	188.021.056.000,00	184.883.215.191,00	(3.137.840.809,00)	98,33	206.406.947.000,00
Jumlah	2.421.983.808.000,00	2.435.850.438.454,00	13.866.630.454,00	100,57	2.329.703.641.941,00

Tabel 5.1.10 menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Transfer TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp106.146.796.513,00 atau 4,56% dari TA 2022.

5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Uraian	TA 2023				TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	1.765.872.796.000,00	1.783.201.602.063,00	17.328.806.063,00	100,98	1.706.540.321.941,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2023 terealisasi sebesar 100,98% atau Rp1.783.201.602.063,00 dari anggaran sebesar Rp1.765.872.796.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp1.706.540.321.941,00, realisasi TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp76.661.280.122,00 atau 4,49%. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.11 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023				Realisasi TA 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
Dana Bagi Hasil (DBH)	38.220.089.000,00	36.123.723.591,00	(2.096.365.409,00)	94,52	38.220.093.261,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	1.220.564.022.000,00	1.239.930.914.430,00	19.366.892.430,00	101,59	1.173.705.068.800,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	507.088.685.000,00	507.146.964.042,00	58.279.042,00	100,01	494.615.159.880,00
Jumlah	1.765.872.796.000,00	1.783.201.602.063,00	17.328.806.063,00	100,98	1.706.540.321.941,00

5.1.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil

Uraian	TA 2023				TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	38.220.089.000,00	36.123.723.591,00	(2.096.365.409,00)	94,52	38.220.093.261,00

Pendapatan DBH TA 2023 dianggarkan sebesar Rp38.220.089.000,00 dan terealisasi sebesar Rp36.123.723.591,00 atau 94,52%. Realisasi TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp2.096.369.670,00 atau 5,48% dibandingkan TA 2022. Rincian pendapatan DBH disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.12 Anggaran dan Realisasi DBH TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023				Realisasi TA 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
DBH PBB	7.280.169.000,00	3.585.351.950,00	(3.694.817.050,00)	49,25	7.280.169.217,00
DBH PPh Pasal 21	15.598.200.000,00	14.486.092.027,00	(1.112.107.973,00)	92,87	15.598.200.774,00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	11.006.705.000,00	15.296.931.852,00	4.290.226.852,00	138,98	11.006.705.380,00
DBH SDA Minyak Bumi	1.630.978.000,00	408.856.946,00	(1.222.121.054,00)	25,07	1.630.978.982,00
DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	265.591.000,00	104.757.255,00	(160.833.745,00)	39,44	265.591.359,00
DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	2.629.000,00	1.010.933,00	(1.618.067,00)	38,45	2.629.718,00
DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	477.506.000,00	389.207.417,00	(88.298.583,00)	81,51	477.506.831,00
DBH SDA Perikanan	1.958.311.000,00	1.851.515.211,00	(106.795.789,00)	94,55	1.958.311.000,00
Jumlah	38.220.089.000,00	36.123.723.591,00	(2.096.365.409,00)	94,52	38.220.093.261,00

5.1.1.2.1.2 Dana Alokasi Umum

	TA 2023				TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	1.220.564.022.000,00	1.239.930.914.430,00	19.366.892.430,00	101,59	1.173.705.068.800,00

Pendapatan DAU TA 2023 dianggarkan sebesar Rp1.220.564.022.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.239.930.914.430,00 atau 101,59%. Realisasi TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp66.225.845.630,00 atau 5,64% dibandingkan TA 2022. Rincian pendapatan DAU disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.13 Anggaran dan Realisasi DAU TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023				Realisasi TA 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
DAU					1.173.705.068.800,00
<i>Block Grant</i>	989.248.445.000,00	989.079.141.430,00	(169.303.570,00)	99,98	
SG - Kesehatan	56.839.975.000,00	56.839.975.000,00	0,00	100,00	
SG - Pekerjaan Umum	21.158.653.000,00	21.158.653.000,00	0,00	100,00	
SG - Pendidikan	100.248.901.000,00	100.248.901.000,00	0,00	100,00	
Tambahan	0,00	19.536.196.000,00	19.536.196.000,00	0,00	
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00	0,00	100,00	
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian PPPK	50.868.048.000,00	50.868.048.000,00	0,00	100,00	
Jumlah	1.220.564.022.000,00	1.239.930.914.430,00	19.366.892.430,00	101,59	

Anggaran DAU TA 2023 Kabupaten Kebumen berdasarkan Perpres Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN TA 2023. Pendapatan DAU melampaui anggaran karena terdapat alokasi DAU Tambahan atas DAU Khusus THR 50% dan TPG 50% sebesar Rp19.536.196.000,00 berdasarkan Lampiran KMK Nomor 464 Tahun 2023 tentang Perubahan Rincian DAU TA 2023. Atas alokasi DAU Tambahan tersebut telah diterima di RKUD pada tanggal 29 Desember 2023 sebesar Rp19.536.196.000,00 atau 100%.

5.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Khusus

Anggaran (Rp)	TA 2023			TA 2022
	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	Realisasi (Rp)
507.088.685.000,00	507.146.964.042,00	58.279.042,00	100,01	494.615.159.880,00

Pendapatan DAK TA 2023 dianggarkan sebesar Rp507.088.685.000,00 dan terealisasi sebesar Rp507.146.964.042,00 atau 100,01%. Realisasi TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp12.531.804.162,00 atau 2,53% dibandingkan TA 2022. Rincian pendapatan DAK disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.14 Anggaran dan Realisasi DAK TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023				Realisasi TA 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
DAK Fisik	52.506.964.000,00	49.510.073.990,00	(2.996.890.010,00)	94,29	70.275.269.743,00
DAK Non Fisik	454.581.721.000,00	457.636.890.052,00	3.036.560.285,00	100,67	424.339.890.137,00
Jumlah	507.088.685.000,00	507.146.964.042,00	39.670.275,00	100,01	494.615.159.880,00

1. DAK Fisik

Realisasi DAK Fisik tercapai sebesar Rp49.510.073.990,00 atau 94,29% dari anggaran sebesar Rp52.506.964.000,00. Realisasi TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp20.765.195.753,00 atau 29,55% dari TA 2022.

2. DAK Non Fisik

Realisasi DAK Non Fisik TA 2023 tercapai sebesar Rp457.636.890.052,00 atau 100,67% dari anggaran sebesar Rp454.581.721.000,00. Realisasi TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp33.296.999.915,00 atau 7,85% dari TA 2022.

Realisasi DAK Non Fisik TA 2023 sebesar Rp457.636.890.052,00 termasuk realisasi Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) yang disalurkan langsung ke Satuan Pendidikan Negeri maupun Swasta sebesar Rp169.752.277.297,00 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.1.15 Anggaran dan Realisasi DAK Non Fisik-BOSP TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023				Realisasi TA 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
BOS Reguler-SDN					
SD Negeri	138.892.339.000,00	86.299.680.314,00	327.128.064,00	100,24	87.098.081.007,00
SMP Negeri		37.271.568.097,00			35.117.259.076,00
SD Swasta		5.239.092.948,00			0,00
SMP Swasta		10.233.507.400,00			0,00
Bunga		1.251,00			51.531,00
Pengembalian LHP APIP		175.617.054,00			27.381.786,00
BOS Kinerja					
SD Negeri	6.835.000.000,00	5.140.000.000,00	0,00	100,00	2.480.000.000,00
SMP Negeri		405.000.000,00			480.000.000,00
SD Swasta		905.000.000,00			0,00
SMP Swasta		385.000.000,00			0,00
BOP PAUD	21.439.200.000,00	21.421.708.000,00	(17.492.000,00)	99,92	19.731.047.000,00
BOP Kesetaraan	2.353.500.000,00	2.294.711.000,00	(58.789.000,00)	97,50	14.516.584.963,00
Jumlah	169.520.039.000,00	169.770.886.064,00	250.847.064,00	100,14	159.450.405.363,00

Realisasi DAK Non Fisik yang melebihi anggaran adalah dari DAK Non Fisik-TPG PNSD sesuai Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-173/PK/2022 tanggal 29 September 2023 perihal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah TA 2023.

5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

TA 2023				TA 2022
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	Realisasi (Rp)
468.089.956.000,00	467.765.621.200,00	(324.334.800,00)	99,93	416.756.373.000,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2023 terealisasi sebesar 99,93% atau Rp467.765.621.200,00 dari anggaran sebesar Rp468.089.956.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp416.756.373.000,00, realisasi TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp51.009.248.200,00 atau 12,24%. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.16 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023				Realisasi TA 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
Dana Insentif Daerah (DID)	11.805.728.000,00	11.805.728.000,00	0,00	100,00	0,00
Dana Desa	456.284.228.000,00	455.959.893.200,00	(324.334.800,00)	99,93	416.756.373.000,00
Jumlah	468.089.956.000,00	467.765.621.200,00	(324.334.800,00)	99,93	416.756.373.000,00

5.1.1.2.2.1 Dana Insentif Daerah

TA 2023				TA 2022
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	Realisasi (Rp)
11.805.728.000,00	11.805.728.000,00	0,00	100,00	0,00

Pemkab Kebumen pada TA 2023 memperoleh DID sebesar Rp11.805.728.000,00 atau 100% dari anggaran. Apabila dibandingkan dengan TA 2022, realisasi TA 2023 mengalami kenaikan 100% karena Pemkab Kebumen pada TA 2022 tidak memperoleh DID karena tidak memenuhi syarat yang tertuang dalam PMK Nomor 140/PMK.07/2022 tentang DID untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun 2022 dan Penggunaan Sisa DID TA 2020, Sisa DID Tambahan TA 2020, dan Sisa DID TA 2021.

5.1.1.2.2.2 Dana Desa

TA 2023				TA 2022
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	Realisasi (Rp)
456.284.228.000,00	455.959.893.200,00	(324.334.800,00)	99,93	416.756.373.000,00

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa setiap Desa dihitung secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar, alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.

Penganggaran Dana Desa pada TA 2023 yang bersumber dari APBN, dialokasikan berdasarkan PMK Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa dan PMK Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PMK Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa. Realisasi Dana Desa Tahun 2023 sebesar Rp455.959.893.200,00 atau sebesar 99,93% dari anggaran sebesar Rp456.284.228.000,00. Tidak tercapainya anggaran tersebut karena pada penyaluran Dana Desa nonBLT Tahap III, Desa Karangembang, Kecamatan Alian tidak dapat memenuhi syarat salur sebagaimana tercantum pada Pasal 19 ayat (1) huruf c PMK Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa.

5.1.1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi

TA 2023				TA 2022
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	Realisasi (Rp)
188.021.056.000,00	184.883.215.191,00	(3.137.840.809,00)	98,33	206.406.947.000,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi TA 2023 terealisasi sebesar Rp184.883.215.191,00 atau 98,33% dari anggaran sebesar Rp188.021.056.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp206.406.947.000,00, realisasi TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp21.523.731.809,00 atau 10,43%. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.17 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023				Realisasi TA 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	177.268.056.000,00	174.243.934.191,00	(3.024.121.809,00)	98,29	175.763.136.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	10.753.000.000,00	10.639.281.000,00	(113.719.000,00)	98,94	30.643.811.000,00
Jumlah	188.021.056.000,00	184.883.215.191,00	(3.137.840.809,00)	98,33	206.406.947.000,00

5.1.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak

TA 2023				TA 2022	
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
177.268.056.000,00	174.243.934.191,00	(3.024.121.809,00)	98,29	175.763.136.000,00	

Pendapatan Bagi Hasil Pajak merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai ketentuan perundang-undangan. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2023 sebesar Rp174.243.934.191,00 atau 98,29% dari anggaran sebesar Rp177.268.056.000,00. Realisasi TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp1.519.201.809,00 atau 0,86% dari TA 2022. Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.18 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023				Realisasi TA 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	63.810.310.000,00	43.781.141.043,00	1.333.848.189,00	102,09	63.810.310.460,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		21.363.017.146,00			
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	40.923.200.000,00	44.912.780.605,00	3.989.580.605,00	109,75	40.923.200.410,00
Pajak Air Permukaan (PAP)	344.556.000,00	406.632.566,00	62.076.566,00	118,02	344.556.764,00
Pajak Rokok	72.189.990.000,00	63.780.362.831,00	(8.409.627.169,00)	88,35	70.685.068.366,00
Jumlah	177.268.056.000,00	174.243.934.191,00	(3.024.121.809,00)	98,29	175.763.136.000,00

5.1.1.2.3.2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya

TA 2023				TA 2022	
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
10.753.000.000,00	10.639.281.000,00	(113.719.000,00)	98,94	30.643.811.000,00	

Pendapatan Bagi Hasil Lainnya TA 2023 merupakan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan/atau tujuan tertentu.

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Lainnya TA 2023 sebesar Rp10.639.281.000,00 atau 98,94% dari anggaran sebesar Rp10.753.000.000,00. Realisasi TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp20.004.530.000,00 atau 65,28% dari TA 2022. Rincian Pendapatan Bagi Hasil Lainnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.19 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Lainnya TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023				Realisasi TA 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
TMMD	753.000.000,00	753.000.000,00	0,00	100,00	753.000.000,00
Bantuan Sarana Prasarana	10.000.000.000,00	9.886.281.000,00	(113.719.000,00)	98,86	28.966.360.000,00
Peningkatan Jalan Demangsari - Bulurejo	6.000.000.000,00	5.989.739.000,00	(10.261.000,00)	99,83	0,00
Peningkatan Jalan Sadang Kulon - Cangkring	4.000.000.000,00	3.896.542.000,00	(103.458.000,00)	97,41	0,00
Bantuan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	924.451.000,00
Jumlah	10.753.000.000,00	10.639.281.000,00	(113.719.000,00)	98,94	30.643.811.000,00

5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Anggaran (Rp)	TA 2023			Realisasi (Rp)
	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
2.176.583.000,00	1.520.109.562,00	(656.473.438,00)	69,84	5.145.999.988,00

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah seluruh pendapatan daerah selain PAD dan Pendapatan Transfer, yang meliputi Hibah, Dana Darurat, dan Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2023 sebesar Rp1.520.109.562,00 atau 69,84% dari anggaran sebesar Rp2.176.583.000,00 seluruhnya merupakan Pendapatan Hibah. Realisasi TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp3.625.890.426,00 atau 70,46% dari TA 2022.

5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah

Anggaran (Rp)	TA 2023			Realisasi (Rp)
	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
2.176.583.000,00	1.520.109.562,00	(656.473.438,00)	69,84	5.145.999.988,00

Pendapatan Hibah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.

Realisasi Pendapatan Hibah TA 2023 sebesar Rp1.520.109.562,00 atau 69,84% dari anggaran sebesar Rp2.176.583.000,00 seluruhnya merupakan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat. Realisasi TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp3.625.890.426,00 atau 70,46% dari TA 2022. Rincian Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.20 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023				Realisasi TA 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
Hibah Air Minum Pedesaan (AMD)	1.490.000.000,00	1.188.000.000,00	(302.000.000,00)	79,73	2.285.500.000,00
Hibah Air Minum Berbasis Kinerja Bantuan Pemerintah Australia	549.000.000,00	208.312.500,00	(340.687.500,00)	37,94	
Hibah IPDMIP	137.583.000,00	123.797.062,00	(13.785.938,00)	89,98	2.860.499.988,00
Jumlah	2.176.583.000,00	1.520.109.562,00	(656.473.438,00)	69,84	5.145.999.988,00

Pada Tahun 2023 Pemkab Kebumen mendapatkan hibah dari pemerintah pusat dengan alokasi sebesar Rp2.176.583.000,00 berdasarkan Perpres Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN TA 2023 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN TA 2023.

Kegiatan *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program* (IPDMIP) dilaksanakan pada tahun 2018 s.d. tahun 2022. Koordinasi IPDMIP terdiri dari upaya penguatan kapasitas kelembagaan SDA, pengelola irigasi dan kapasitas pemerintah dalam melaksanakan operasional, pemeliharaan dan pengelolaan sistem irigasi.

5.1.2 Belanja

TA 2023				TA 2022
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	Realisasi (Rp)
2.416.454.577.000,00	2.300.167.371.210,00	(116.287.205.790,00)	95,19	2.191.867.028.425,00

Belanja TA 2023 dianggarkan sebesar Rp2.416.454.577.000,00 dan terealisasi sebesar 95,19% atau sebesar Rp2.300.167.371.210,00. Realisasi Belanja TA 2023 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp108.300.342.785,00,00 atau 4,94% dari TA 2022. Rincian Belanja disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.21 Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023				Realisasi TA 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
Belanja Operasi	2.124.708.998.900,00	2.020.914.516.871,00	(103.794.482.029,00)	95,11	1.918.270.224.061,00
Belanja Modal	290.509.850.100,00	278.842.913.538,00	(11.666.936.562,00)	95,98	272.301.599.864,00
Belanja Tak Terduga	1.235.728.000,00	409.940.801,00	(825.787.199,00)	33,17	1.295.204.500,00
Jumlah	2.416.454.577.000,00	2.300.167.371.210,00	(116.287.205.790,00)	95,19	2.191.867.028.425,00

Kontribusi masing-masing jenis Belanja terhadap total Belanja didominasi oleh Belanja Operasi sebesar 87,86% kemudian Belanja Modal 12,12% dan Belanja Tak Terduga sebesar 0,02%.

Realisasi Belanja TA 2023 sebesar Rp2.300.166.951.962,00 sudah termasuk Belanja yang tidak melalui RKUD sebagai berikut:

1. Belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Pemerintah Pusat sebesar Rp146.195.124.489,00;
2. Belanja BOP PAUD sebesar Rp21.421.708.000,00 dan Pendidikan Kesetaraan sebesar Rp2.294.711.000,00;
3. Belanja BLUD RSUD dr. Soedirman sebesar Rp140.536.091.305,00 dan RSUD Prembun sebesar Rp69.740.956.591,00;
4. Belanja BLUD Puskesmas sebesar Rp70.999.368.825,00; serta
5. Belanja BOK Puskesmas sebesar Rp24.490.558.114,00.

5.1.2.1 Belanja Operasi

TA 2023				TA 2022
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	Realisasi (Rp)
2.124.708.998.900,00	2.020.914.516.871,00	(103.794.482.029,00)	95,11	1.918.270.224.061,00

Realisasi Belanja Operasi TA 2023 sebesar Rp2.020.914.516.871,00 atau mencapai 95,11% dari anggaran sebesar Rp2.124.708.998.900,00. Realisasi TA 2023 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp102.644.292.810,00 atau 5,35% dari TA 2022. Rincian Belanja Operasi disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.22 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023				Realisasi TA 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
Belanja Pegawai	1.226.237.772.050,00	1.153.775.444.865,00	(72.462.327.185,00)	94,09	1.142.207.137.167,00
Belanja Barang dan Jasa	753.610.646.850,00	726.725.182.478,00	(26.885.464.372,00)	96,43	704.907.763.493,00
Belanja Subsidi	730.000.000,00	675.656.402,00	(54.343.598,00)	92,56	313.864.348,00
Belanja Hibah	132.241.048.000,00	128.698.064.603,00	(3.542.983.397,00)	97,32	59.752.651.931,00
Belanja Bantuan Sosial	11.889.532.000,00	11.040.168.523,00	(849.363.477,00)	92,86	11.088.807.122,00
Jumlah	2.124.708.998.900,00	2.020.914.516.871,00	(103.794.482.029,00)	95,11	1.918.270.224.061,00

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

TA 2023				TA 2022	
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1.226.237.772.050,00	1.153.775.444.865,00	(72.462.327.185,00)	94,09	1.142.207.137.167,00	

Belanja Pegawai merupakan Belanja yang digunakan untuk pembayaran gaji, tunjangan, honorarium, belanja pegawai BOS dan belanja pegawai dana BLUD. Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 sebesar Rp1.153.775.444.865,00 atau 94,09% dari anggaran sebesar Rp1.226.237.772.050,00. Realisasi TA 2023 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp11.568.307.698,00 atau 1,01% dari TA 2022. Rincian Belanja Pegawai disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.23 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023				Realisasi TA 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	809.527.209.133,00	750.484.534.791,00	(59.042.674.342,00)	92,71	728.313.378.021,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	114.595.621.207,00	108.132.182.896,00	(6.463.438.311,00)	94,36	110.852.151.279,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	251.023.620.710,00	244.365.884.474,00	(6.657.736.236,00)	97,35	244.598.135.746,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	33.337.206.000,00	33.256.897.740,00	(80.308.260,00)	99,76	30.583.723.917,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	729.002.000,00	539.554.364,00	(189.447.636,00)	74,01	510.222.879,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.028.120.000,00	1.027.401.000,00	(719.000,00)	99,93	966.170.000,00
Belanja Pegawai BOS	15.391.120.000,00	15.389.395.600,00	(1.724.400,00)	99,99	25.914.114.000,00
Belanja Pegawai BLUD	605.873.000,00	579.594.000,00	(26.279.000,00)	95,66	469.241.325,00
Jumlah	1.226.237.772.050,00	1.153.775.444.865,00	(72.462.327.185,00)	94,09	1.142.207.137.167,00

Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 sebesar Rp726.725.182.478,00 sudah termasuk:

1. Belanja Pegawai BOS sebesar Rp15.389.395.600,00 mengalami penurunan sebesar Rp10.524.718.400,00 atau 40,61% dari TA 2022;
2. Belanja Pegawai BLUD sebesar Rp579.594.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp110.352.675,00 atau 23,52% dari TA 2022.

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Anggaran (Rp)	TA 2023			TA 2022
	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	Realisasi (Rp)
753.610.646.850,00	726.725.182.478,00	(26.885.464.372,00)	96,43	704.907.763.493,00

Belanja Barang dan Jasa yang direalisasikan selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2023 digunakan untuk menunjang operasional Pemkab Kebumen dan tersebar di seluruh SKPD.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2023 sebesar Rp726.725.182.478,00 atau 96,43% dari anggaran sebesar Rp753.610.646.850,00. Realisasi TA 2023 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp21.817.418.985,00 atau 3,10% dari TA 2022. Rincian Belanja Barang dan Jasa disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.24 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023				Realisasi TA 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
Belanja Barang	116.865.606.162,00	113.519.910.153,00	(3.345.696.009,00)	97,14	112.353.281.445,00
Belanja Jasa	158.875.267.300,00	153.014.641.062,00	(5.860.626.238,00)	96,31	153.909.502.355,00
Belanja Pemeliharaan	55.524.030.888,00	54.731.550.207,00	(792.480.681,00)	98,57	38.518.790.266,00
Belanja Perjalanan Dinas	53.108.259.500,00	50.636.739.096,00	(2.471.520.404,00)	95,35	47.731.989.155,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.041.264.000,00	4.036.640.000,00	(4.624.000,00)	99,89	5.422.897.000,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	85.650.136.000,00	85.241.751.109,00	(408.384.891,00)	99,52	87.002.325.361,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	279.546.083.000,00	265.543.950.851,00	(14.002.132.149,00)	94,99	259.968.977.911,00
Jumlah	753.610.646.850,00	726.725.182.478,00	(26.885.464.372,00)	96,43	704.907.763.493,00

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2023 sebesar Rp726.725.182.478,00 sudah termasuk:

1. Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp4.036.640.000,00
Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat merupakan rekening yang digunakan untuk mencatat belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, dan pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat.
Realisasi TA 2023 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.386.257.000,00 atau 25,56% dari TA 2022, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.1.25 Anggaran dan Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023				Realisasi TA 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.034.264.000,00	4.030.445.000,00	(3.819.000,00)	99,91	5.422.897.000,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.000.000,00	6.195.000,00	(805.000,00)	88,50	0,00
Jumlah	4.041.264.000,00	4.036.640.000,00	(4.624.000,00)	99,89	5.422.897.000,00

- a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA 2023 terdiri dari:
 - 1) Belanja Hadiah yang bersifat Perlombaan dianggarkan sebesar Rp1.278.034.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.274.300.000,00 atau terserap 99,71%;
 - 2) Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi dianggarkan sebesar Rp2.656.230.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.656.145.000,00 atau 100,00%;
 - 3) Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) dianggarkan dan direalisasikan sebesar Rp100.000.000,00 atau 100,00%. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan.
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat seluruhnya berupa Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain.
2. Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp85.241.751.109,00
Pengelolaan Dana BOS tidak melalui RKUD melainkan ditransfer langsung dari Pemerintah Pusat ke rekening masing-masing sekolah di lingkungan Disdikpora Kabupaten Kebumen dan digunakan langsung untuk operasional sekolah.
Realisasi Belanja Barang dan Jasa yang bersumber dari Dana BOS TA 2023 menyesuaikan dengan jumlah siswa dan pemakaian sisa tahun sebelumnya dan mengalami penurunan sebesar Rp1.760.574.252,00 atau 2,02% dari TA 2022.
 3. Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp265.543.950.851,00 merupakan belanja operasional barang dan jasa pada BLUD RSUD Dr. Soedirman, RSUD Prembun dan 35 Puskesmas.
Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp5.574.972.940,00 atau 2,14% dari TA 2022.

5.1.2.1.3 Belanja Subsidi

Anggaran (Rp)	TA 2023			TA 2022	
	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
730.000.000,00	675.656.402,00	(54.343.598,00)	92,56	313.864.348,00	

Pemkab Kebumen mengalokasikan dana untuk program subsidi kepada BUMD sebesar Rp730.000.000,00. Program subsidi kepada BUMD dilaksanakan dalam rangka memfasilitasi pelaku usaha mikro kecil guna mendapat akses permodalan dari lembaga keuangan/perbankan. Pedoman pelaksanaan Belanja Subsidi bunga diatur melalui Peraturan Kepala Daerah berikut:

1. Perbup Nomor 9 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kepada Usaha Mikro di Kabupaten Kebumen TA 2023; dan
2. Perbup Kebumen Nomor 51 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen TA 2023.

Program subsidi bunga tersebut disalurkan melalui Lembaga Keuangan Penyalur dengan alokasi dan realisasi sebagai berikut:

Tabel 5.1.26 Anggaran dan Realisasi Belanja Subsidi TA 2023 dan 2022

Lembaga Keuangan Penyalur	TA 2023				Realisasi TA 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
PT BPR Bank Kebumen (Perseroda)	200.000.000,00	173.263.827,00	(26.736.173,00)	86,63	51.357.057,00
PT BPR BKK Kebumen (Perseroda)	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	100,00	225.000.000,00
PT BPR BKK Jateng (Perseroda)	100.000.000,00	72.409.584,00	(27.590.416,00)	72,41	37.507.291,00
PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda)	130.000.000,00	129.982.991,00	(17.009,00)	99,99	0,00

Lembaga Keuangan Penyalur	TA 2023				Realisasi TA 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
Jumlah	730.000.000,00	675.656.402,00	(54.343.598,00)	92,56	313.864.348,00

Realisasi Belanja Subsidi LRA TA 2023 sebesar Rp675.656.401,00 dirinci pada tabel berikut:

Tabel 5.1.27 Rincian Realisasi Belanja Subsidi TA 2023

Nama Penyalur	No. & Tanggal SP2D	Nilai SP2D (Rp)	Tanggal Pengembalian	Pengembalian (Rp)	Realisasi (Rp)
PT BPR BKK Kebumen (PESERODA)	00177/LS/DAU/2023 28 Mar 2023	300.000.000,00	-	0,00	300.000.000,00
PT BPR Bank Kebumen (PESERODA)		200.000.000,00	12 Des 2023	26.736.173,00	173.263.827,00
PT BPR BKK Jateng (PESERODA)		100.000.000,00	4 Des 2023	27.590.416,00	72.409.584,00
PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (PESERODA)	01406/LS/DAU/2023 17 Okt2023	130.000.000,00	15 Des 2023	17.009,00	129.982.991,00
Jumlah		730.000.000,00	-	54.343.598,00	675.656.402,00

Hal tersebut karena terdapat peningkatan plafon pinjaman nasabah, penurunan kualitas kredit sehingga tidak lagi berhak mendapat subsidi bunga dan adanya pelunasan kredit oleh debitur sehingga volume penyaluran subsidi bunga berkurang.

5.1.2.1.4 Belanja Hibah

Anggaran (Rp)	TA 2023			%	Realisasi (Rp)
	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)			
132.241.048.000,00	128.698.064.603,00	(3.542.983.397,00)	97,32	59.752.651.931,00	

Rekening Belanja Hibah digunakan untuk mencatat pemberian hibah kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Realisasi Belanja Hibah TA 2023 sebesar Rp128.698.064.603,00 atau 97,32% dari anggaran sebesar Rp132.241.048.000,00. Realisasi TA 2023 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp68.945.412.672,00 atau 115,38% dari TA 2022. Rincian Belanja Hibah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.28 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023				Realisasi TA 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat					
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	22.351.260.000,00	22.225.540.000,00	(125.720.000,00)	99,44	0,00
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	79.000.379.000,00	76.328.475.383,00	(2.671.903.617,00)	96,62	45.756.070.471,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah	41.845.000,00	41.146.000,00	(699.000,00)	98,33	2.092.426.860,00

Uraian	TA 2023				Realisasi TA 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
Memiliki Surat Keterangan Terdaftar					
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	27.992.795.000,00	27.229.635.000,00	(763.160.000,00)	97,27	9.637.414.000,00
Belanja Hibah kepada Koperasi	439.893.000,00	423.392.220,00	(16.500.780,00)	96,25	201.864.600,00
Belanja Hibah Dana BOS					
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	350.000.000,00	385.000.000,00	35.000.000,00	110,00	-
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik					
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.064.876.000,00	2.064.876.000,00	-	100,00	2.064.876.000,00
Jumlah	132.241.048.000,00	128.698.064.603,00	(3.542.983.397,00)	97,32	59.752.651.931,00

Realisasi Hibah TA 2023 sebesar Rp128.698.064.603,00 sudah termasuk:

1. Belanja BOP PAUD sebesar Rp21.421.708.000,00 ;
2. Belanja Pendidikan Kesetaraan sebesar Rp2.294.711.000,00 ;
3. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp2.064.876.000,00 yang diberikan kepada sembilan partai politik dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.1.29 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023				Realisasi TA 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
Partai Nasional Demokrat	162.873.000,00	162.873.000,00	0,00	100,00	162.873.000,00
Partai Kebangkitan Bangsa	356.487.000,00	356.487.000,00	0,00	100,00	356.487.000,00
Partai Keadilan Sejahtera	126.141.000,00	126.141.000,00	0,00	100,00	126.141.000,00
PDI Perjuangan	464.832.000,00	464.832.000,00	0,00	100,00	464.832.000,00
Partai Golongan Karya	228.741.000,00	228.741.000,00	0,00	100,00	228.741.000,00
Partai Gerakan Indonesia Raya	281.346.000,00	281.346.000,00	0,00	100,00	281.346.000,00
Partai Demokrat	133.671.000,00	133.671.000,00	0,00	100,00	133.671.000,00
Partai Amanat Nasional	146.091.000,00	146.091.000,00	0,00	100,00	146.091.000,00
Partai Persatuan Pembangunan	164.694.000,00	164.694.000,00	0,00	100,00	164.694.000,00
Jumlah	2.064.876.000,00	2.064.876.000,00	0,00	100,00	2.064.876.000,00

5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

Uraian	TA 2023				TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	11.889.532.000,00	11.040.168.523,00	(849.363.477,00)	92,86	11.088.807.122,00

Rekening Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk mencatat pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Penganggaran dan pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial TA 2023 pada masing-masing SKPD dilaksanakan sesuai Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjelaskan bahwa penganggaran Belanja Bantuan Sosial dianggarkan pada SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2023 sebesar Rp11.040.168.523,00 atau 92,86% dari anggaran sebesar Rp11.889.532.000,00. Realisasi TA 2023 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp48.638.599,00 atau 0,44% dari TA 2022. Rincian Belanja Bantuan Sosial disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.30 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023				Realisasi TA 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	9.160.252.000,00	9.022.309.473,00	(137.942.527,00)	98,49	8.631.337.772,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	547.801.000,00	546.900.150,00	(900.850,00)	99,84	2.127.879.350,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	2.181.479.000,00	1.470.958.900,00	(710.520.100,00)	67,43	329.590.000,00
Jumlah	11.889.532.000,00	11.040.168.523,00	(849.363.477,00)	92,86	11.088.807.122,00

5.1.2.2 Belanja Modal

Uraian	TA 2023				TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	290.509.850.100,00	278.842.913.538,00	(11.666.936.562,00)	95,98	272.301.599.864,00

Belanja Modal digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan Aset Tetap dan Aset Lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal TA 2023 sebesar Rp278.842.913.538,00 atau mencapai 95,98% dari anggaran sebesar Rp290.509.850.100,00. Realisasi Belanja Modal TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp6.541.313.674,00 atau 2,40% dari realisasi TA 2022. Rincian Belanja Modal disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.31 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023				Realisasi TA 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
BM-Tanah	1.594.820.000,00	1.400.551.240,00	(194.268.760,00)	87,82	1.387.839.580,00
BM-Peralatan dan Mesin	69.599.220.763,00	65.799.396.633,00	(3.799.824.130,00)	94,54	102.152.506.285,00
BM-Gedung dan Bangunan	78.195.858.337,00	75.265.208.901,00	(2.930.649.436,00)	96,25	34.758.067.305,00
BM-Jalan, Irigasi dan Jaringan	129.636.032.000,00	124.921.560.732,00	(4.714.471.268,00)	96,36	126.620.498.535,00
BM-Aset Tetap Lainnya	11.483.919.000,00	11.456.196.032,00	(27.722.968,00)	99,76	6.894.828.159,00
BM-Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	487.860.000,00
Jumlah	290.509.850.100,00	278.842.913.538,00	(11.666.936.562,00)	95,98	272.301.599.864,00

Tabel 5.1.30 menunjukkan bahwa penyerapannya tertinggi Belanja Modal adalah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar 99,76% dari anggaran. Sedangkan penyerapan terendah adalah Belanja Modal Tanah sebesar 87,82% dari anggaran. Namun jika melihat dari besaran nilai sisa anggaran yang tidak terserap maka Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan memiliki nilai sisa anggaran terbesar yaitu sebesar Rp4.714.471.268,00.

Kontribusi terbesar Belanja Modal adalah Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar 44,80% dari realisasi total Belanja Modal, kemudian Belanja Modal Gedung dan Bangunan

sebesar 26,99%, Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar 23,60%, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar 4,11% dan Belanja Modal Tanah sebesar 0,50%.

Realisasi Belanja Modal TA 2023 sudah termasuk realisasi Belanja Modal BOS sebesar Rp146.195.124.489,00 dan Belanja Modal BLUD sebesar Rp15.152.871.870,00.

Rincian Belanja Modal dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut.

5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Anggaran (Rp)	TA 2023			TA 2022
	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.594.820.000,00	1.400.551.240,00	(194.268.760,00)	87,82	1.387.839.580,00

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2023 sebesar Rp1.400.551.240,00 atau 87,82% dari anggaran sebesar Rp1.594.820.000,00. Realisasi TA 2023 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp12.711.660,00 atau 0,92% dari TA 2022. Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2023 seluruhnya merupakan Belanja Modal Tanah untuk Jalan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Rincian Belanja Modal Tanah per SKPD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.32 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023				Realisasi TA 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
Dinkes PPKB	0,00	0,00	0,00	0,00	32.747.550,00
DPUPR	1.594.820.000,00	1.400.551.240,00	(194.268.760,00)	87,82	1.355.092.030,00
Jumlah	1.594.820.000,00	1.400.551.240,00	(194.268.760,00)	87,82	1.387.839.580,00

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2023 tersebut digunakan untuk:

1. Pembayaran ganti rugi tanah/bangunan/tanaman yang berlokasi di Desa Ayamputih Kecamatan Buluspesantren untuk kepentingan umum Pembangunan Jalan Kejayan Pantai Desa Ayamputih Kecamatan Buluspesantren sebesar Rp1.127.516.280,00 dengan rincian penerima sebagai berikut:

Tabel 5.1.33 Rincian Pembayaran Ganti Rugi Tanah/Bangunan/Tanaman TA 2023

Penerima	NIB	Luas (m ²)	Nilai Ganti Rugi (Rp)			
			Tanah	Bangunan	Tanaman	Jumlah
Suryati (H. Sudiro)	05647	47	56.400.000,00	140.934.880,00	0,00	197.334.880,00
Lilik Budiono	05648	28	33.600.000,00	0,00	400.000,00	34.000.000,00
Samidi	05649	41	49.200.000,00	19.665.600,00	100.000,00	68.965.000,00
	05651	12	14.400.000,00	3.000.000,00	60.000,00	17.460.000,00
Slamet Budiono	05652	32	38.400.000,00	7.897.500,00	0,00	46.297.500,00
Suwarti	05653	14	16.800.000,00	19.509.200,00	150.000,00	36.459.200,00
	05654	6	7.200.000,00	0,00	0,00	7.200.000,00
Partijah (Marwiyah)	05655	39	46.800.000,00	10.336.000,00	4.485.000,00	61.621.000,00
Saliyo	05656	61	73.200.000,00	0,00	5.000.000,00	78.200.000,00
Tasliman	05657	457	548.400.000,00	20.803.100,00	10.775.000,00	579.978.100
Jumlah		737	884.400.000,00	222.146.280,00	20.970.000,00	1.127.516.280,00

2. Belanja Jasa Konsultan Perencana sebesar Rp129.648.000,00 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.1.34 Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Konsultan Perencana

Uraian	TA 2023			
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%
Belanja Jasa Konsultan DPPT Paket 1	30.000.000,00	29.859.000,00	(141.000,00)	99,53
Belanja Jasa Konsultan Publik (<i>Appraisal</i>) Penilai Harga Tanah Paket 1 oleh KJPP Pung's Zulkarnain & Rekan Cabang Surabaya	50.000.000,00	49.950.000,00	(50.000,00)	99,90

Uraian	TA 2023			
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%
Belanja Jasa Konsultan <i>Staking Out</i> Paket 1 oleh	50.000.000,00	49.839.000,00	(161.000,00)	99,68
Jumlah	130.000.000,00	129.648.000,00	(352.000,00)	99,73

3. Belanja Operasional pengadaan tanah sebesar Rp143.386.960,00 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.1.35 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasional

Uraian	TA 2023			
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%
Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)	9.897.100,00	9.847.000,00	(50.100,00)	99,49%
Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM)	12.496.000,00	12.354.000,00	(142.000,00)	98,86%
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.545.000,00	1.457.500,00	(87.500,00)	94,34%
Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	3.000.000,00	300.000,00	(2.700.000,00)	10,00%
Belanja Penggandaan	3.393.900,00	1.780.700,00	(1.613.200,00)	52,47%
Belanja Pengganti Pengadaan Tanah	75.000.000,00	29.061.500,00	(45.938.500,00)	38,75%
Belanja Penjilidan	645.000,00	0,00	(645.000,00)	0,00%
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	19.100.000,00	12.020.000,00	(7.080.000,00)	62,93%
Belanja Permohonan Ukur BPN : Biaya Pengukuran Kadastral BPN	15.000.000,00	3.668.760,00	(11.331.240,00)	24,46%
Jasa Panitia/Tim Pengadaan Tanah	61.250.000,00	53.271.000,00	(7.979.000,00)	86,97%
Rapat Musyawarah Kesepakatan dan Penetapan Harga Tanah Panitia/Tim Pengadaan Tanah	12.720.000,00	1.831.500,00	(10.888.500,00)	14,40%
Rapat Pembayaran Tanah Panitia/Tim Pengadaan Tanah	12.720.000,00	1.980.000,00	(10.740.000,00)	15,57%
Rapat Persiapan Panitia/Tim Pengadaan Tanah	6.360.000,00	3.712.500,00	(2.647.500,00)	58,37%
Rapat Sosialisasi Panitia/Tim Pengadaan Tanah	12.720.000,00	5.942.500,00	(6.777.500,00)	46,72%
Tenaga Survey Tingkat Desa	6.350.000,00	6.160.000,00	(190.000,00)	97,01%
Jumlah	252.197.000,00	143.386.960,00	(108.810.040,00)	56,86%

5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Anggaran (Rp)	TA 2023			%	Realisasi (Rp)
	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)		
69.599.220.763,00	65.799.396.633,00	(3.799.824.130,00)	94,54	102.152.506.285,00	

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 sebesar Rp65.799.396.633,00 atau 94,54% dari anggaran sebesar Rp69.599.220.763,00. Realisasi TA 2023 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp36.353.109.652,00 atau 35,59% dari TA 2022. Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.36 Anggaran dan Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023				Realisasi TA 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
BM Alat Besar	2.015.121.600,00	1.762.794.010,00	(252.327.590,00)	87,48	753.807.100,00
BM Alat Angkutan	9.684.115.000,00	9.589.913.800,00	(94.201.200,00)	99,03	7.522.166.000,00
BM Alat Bengkel dan Alat Ukur	62.126.000,00	40.290.000,00	(21.836.000,00)	64,85	403.917.363,00
BM Alat Pertanian	281.293.000,00	278.416.400,00	(2.876.600,00)	98,98	77.152.950,00
BM Alat Kantor dan Rumah Tangga	7.892.817.400,00	7.280.936.190,00	(611.881.210,00)	92,25	6.722.315.446,00
BM Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.417.651.300,00	1.360.636.400,00	(57.014.900,00)	95,98	2.105.259.355,00

Uraian	TA 2023				Realisasi TA 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
BM Alat dan Kesehatan	17.478.893.663,00	16.139.933.075,00	(1.338.960.588,00)	92,34	52.045.220.484,00
BM Alat Laboratorium	2.614.083.000,00	2.304.399.360,00	(309.683.640,00)	88,15	599.925.008,00
BM Komputer	27.051.884.800,00	25.979.667.398,00	(1.072.217.402,00)	96,04	30.479.173.579,00
BM Alat Keselamatan Kerja	63.500.000,00	60.543.500,00	(2.956.500,00)	95,34	227.066.000,00
BM Alat Peraga	1.344.000,00	0,00	(1.344.000,00)	0,00	0,00
BM Peralatan Proses/Produksi	15.965.000,00	15.192.000,00	(773.000,00)	0,00	0,00
BM Rambu-Rambu	1.017.926.000,00	984.311.500,00	(33.614.500,00)	96,70	1.206.019.000,00
BM Peralatan Olahraga	2.500.000,00	2.363.000,00	(137.000,00)	94,52	10.484.000,00
Jumlah	69.599.220.763,00	65.799.396.633,00	(3.799.824.130,00)	94,54	102.152.506.285,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 sebesar Rp65.799.396.633,00 sudah termasuk:

1. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebesar Rp18.428.636.028,00;
2. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebesar Rp14.615.001.870,00.

5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

TA 2023				TA 2022
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	Realisasi (Rp)
78.195.858.337,00	75.265.208.901,00	(2.930.649.436,00)	96,25	34.758.067.305,00

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 sebesar Rp75.265.208.901,00 atau 96,25% dari anggaran Rp78.195.858.337,00. Realisasi TA 2023 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp40.507.141.596,00 atau 116,54% dari TA 2022. Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.37 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023				Realisasi TA 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
BM Bangunan Gedung – Tempat Kerja	78.032.878.337,00	75.102.865.901,00	(2.930.012.436,00)	96,25	34.725.108.305,00
BM Tugu Titik Kontrol/Pasti - Tugu/Tanda Batas	162.980.000,00	162.343.000,00	(637.000,00)	99,61	32.959.000,00
Jumlah	78.195.858.337,00	75.265.208.901,00	(2.930.649.436,00)	96,25	34.758.067.305,00

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 sebesar Rp75.265.208.901,00 sudah termasuk realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebesar Rp413.512.000,00.

5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

TA 2023				TA 2022
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	Realisasi (Rp)
129.636.032.000,00	124.921.560.732,00	(4.714.471.268,00)	96,36	126.620.498.535,00

Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2023 sebesar Rp124.921.560.732,00 atau 96,36% dari anggaran sebesar Rp129.636.032.000,00. Realisasi TA 2023 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.698.937.803,00 atau 1,34% dari TA 2022. Rincian Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 5.1.38 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
TA 2023 dan 2022**

Uraian	TA 2023				Realisasi TA 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
BM Jalan dan Jembatan	86.527.814.000,00	83.228.778.300,00	(3.299.035.700,00)	96,19	100.203.245.300,00
BM Bangunan Air	21.393.157.000,00	20.487.819.697,00	(905.337.303,00)	95,77	13.710.611.378,00
BM Instalasi	1.198.458.000,00	1.152.751.000,00	(45.707.000,00)	96,19	786.235.297,00
BM Jaringan	20.516.603.000,00	20.052.211.735,00	(464.391.265,00)	97,74	11.920.406.560,00
Jumlah	129.636.032.000,00	124.921.560.732,00	(4.714.471.268,00)	96,36	126.620.498.535,00

Rincian Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2023 dan 2022 per SKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.1.39 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi per SKPD
TA 2023 dan 2022**

Uraian	TA 2023				Realisasi TA 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
Dinkes PPKB	1.994.557.000,00	1.973.402.633,00	(21.154.367,00)	98,94	221.692.260,00
DPUPR	107.645.971.000,00	103.443.572.497,00	(4.202.398.503,00)	96,10	112.905.067.678,00
Disperkimhub	17.520.231.000,00	17.046.932.102,00	(473.298.898,00)	97,30	11.906.433.300,00
Distapang	0,00	0,00	0,00	0,00	24.809.000,00
DLHKP	318.800.000,00	316.184.000,00	(2.616.000,00)	99,18	533.700.297,00
Disperindag KUKM	1.800.138.000,00	1.787.500.000,00	(12.638.000,00)	99,30	0,00
Itida	79.335.000,00	78.944.000,00	(391.000,00)	99,51	0,00
Kec. Karanganyar	277.000.000,00	275.025.500,00	(1.974.500,00)	99,29	1.028.796.000,00
Jumlah	129.636.032.000,00	124.921.560.732,00	(4.714.471.268,00)	96,36	126.620.498.535,00

Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2023 sebesar Rp124.921.560.732,00 sudah termasuk realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebesar Rp78.468.000,00 dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.1.40 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD
TA 2023 dan 2022**

Uraian	TA 2023				Realisasi TA 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
PKM Alian	50.000.000,00	49.950.000,00	(50.000,00)	99,90	0,00
PKM Ambal I	0,00	0,00	0,00	0,00	9.392.260,00
PKM Karangsembung	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00
PKM Klirong I	6.000.000,00	5.313.000,00	(687.000,00)	88,55	0,00
PKM Petanahan	5.920.000,00	3.480.000,00	(2.440.000,00)	58,78	0,00
PKM Poncowarno	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
PKM Prembun	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00
PKM Sadang	16.403.000,00	10.500.000,00	(5.903.000,00)	64,01	170.000.000,00
PKM Sruweng	2.500.000,00	2.225.000,00	(275.000,00)	89,00	0,00
Jumlah	80.823.000,00	78.468.000,00	(2.355.000,00)	97,09	221.692.260,00

5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Anggaran (Rp)	TA 2023			Realisasi (Rp)
	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
11.483.919.000,00	11.456.196.032,00	(27.722.968,00)	99,76	6.894.828.159,00

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2023 sebesar Rp11.456.196.032,00 atau 99,76% dari anggaran sebesar Rp11.483.919.000,00. Realisasi TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp4.561.367.873,00 atau 66,16% dari TA 2022. Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.1.41 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023				Realisasi TA 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
BM Bahan Perpustakaan-Tercetak					
BM Buku Umum	10.888.503.000,00	10.873.160.652,00	(15.342.348,00)	99,86%	6.886.528.159,00
BM Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00
BM Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	125.516.000,00	122.130.380,00	(3.385.620,00)	97,30%	600.000,00
BM Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga - Kesenian					
BM Alat Musik	469.900.000,00	460.905.000,00	(8.995.000,00)	98,09%	2.300.000,00
BM Aset Tidak Berwujud (ATB)					
BM Software	0,00	0,00	0,00	0,00	313.862.000,00
BM ATB Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	173.998.000,00
Jumlah	11.483.919.000,00	11.456.196.032,00	(27.722.968,00)	99,76	6.894.828.159,00

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2023 sebesar Rp11.456.196.032,00 sudah termasuk realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebesar Rp10.873.160.652,00.

5.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya

Anggaran (Rp)	TA 2023			%	TA 2022
	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)		
0,00	0,00	0,00	0,00	487.860.000,00	

Pada TA 2023, Pemkab Kebumen tidak menganggarkan Belanja Modal Aset Lainnya sehingga jika dibandingkan dengan TA 2022, realisasi Belanja Modal Aset Lainnya mengalami penurunan sebesar 100%.

5.1.2.3 Belanja Tak Terduga

Anggaran (Rp)	TA 2023			%	TA 2022
	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)		
1.235.728.000,00	409.940.801,00	(825.787.199,00)	33,17	1.295.204.500,00	

Belanja Tak Terduga (BTT) TA 2023 dianggarkan untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, seperti bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

Realisasi BTT TA 2023 sebesar Rp409.940.801,00 atau 33,17% dari nilai anggaran sebesar Rp1.235.728.000,00. Realisasi TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp885.263.699,00 atau 68,35% dari TA 2022. Rincian BTT disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.1.42 Anggaran dan Realisasi BTT TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023				Realisasi TA 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
Pengembalian kelebihan pembayaran PBB P2 Tahun 2021	1.235.728.000,00	728.875,00	(825.787.199,00)	33,17	0,00
Pengembalian Dana BOSP TA 2020-2022		85.211.926,00			0,00
Bantuan kepada korban bencana alam		103.000.000,00			167.500.000,00

Uraian	TA 2023				Realisasi TA 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
Bantuan kepada korban kebakaran		200.000.000,00			152.500.000,00
Bantuan orang kehabisan bekal/PMKS		21.000.000,00			36.900.000,00
Penanganan darurat bencana dampak banjir, tanah longsor dan angin puting beliung di Kab. Kebumen Tahun 2022		0,00			932.304.500,00
Bantuan migran korban tindak kekerasan		0,00			6.000.000,00
Jumlah	1.235.728.000,00	409.940.801,00	825.787.199,00	34,56	1.295.204.500,00

1. Pengembalian kelebihan pembayaran PBB P2 Tahun 2021 atas nama Wajib pajak Salud Muslim dengan NOP 33.05.120.024.005-0025.0 sebesar Rp728.875,00.
2. Pengembalian Dana BOSP TA 2020-2022 sebesar Rp85.211.926,00 merupakan pengembalian Dana BOS TA 2022 sebesar Rp.70.632.269,00 dan Dana BOP PAUD TA 2022 sebesar Rp.14.579.657,00 yang diterima RKUD tahun 2022 dan dikembalikan ke RKUN tahun 2023;
3. Bantuan kepada korban bencana alam sebesar Rp103.000.000,00 merupakan pemberian bantuan kepada korban bencana alam yang disalurkan dalam tiga tahap sesuai dengan Persetujuan Bupati Kebumen Nomor 900/3115 tanggal 21 Februari 2023, Persetujuan Bupati Kebumen Nomor 466.1.1/4142 tanggal 27 September 2023 dan Persetujuan Bupati Kebumen Nomor 466.1.1/4389 tanggal 22 November 2023;
4. Bantuan kepada korban kebakaran sebesar Rp200.000.000,00 merupakan pemberian bantuan kepada korban bencana non alam yang disalurkan dalam tiga tahap sesuai dengan Persetujuan Bupati Kebumen Nomor 900/3087.2 tanggal 16 Februari 2023, Persetujuan Bupati Kebumen Nomor 466.1.1/4120 tanggal 18 September 2023 dan Persetujuan Bupati Kebumen Nomor 466.1.1/4237 tanggal 16 Oktober 2023;
5. Bantuan orang kehabisan bekal/PMKS sebesar Rp21.000.000,00 merupakan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya yang diberikan kepada orang yang sedang melakukan perjalanan dan kehabisan biaya.

5.1.3 Transfer

Anggaran (Rp)	TA 2023			%	TA 2022
	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)		
677.473.383.000,00	676.974.543.619,00	(498.839.381,00)	99,93	632.491.265.300,00	

Transfer adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.

Transfer TA 2023 dianggarkan sebesar Rp677.473.383.000,00 dan terealisasi sebesar 99,93% atau sebesar Rp676.974.543.619,00 yang seluruhnya merupakan Transfer/Bagi Hasil ke Desa. Realisasi Transfer TA 2023 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp44.483.278.319,00 atau 7,03% dari TA 2022.

5.1.3.1 Transfer/Bagi Hasil ke Desa

Anggaran (Rp)	TA 2023			TA 2022
	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	Realisasi (Rp)
677.473.383.000,00	676.974.543.619,00	(498.839.381,00)	99,93	632.491.265.300,00

Realisasi Transfer/Bagi Hasil ke Desa TA 2023 sebesar Rp676.974.543.619,00 atau 99,93% dari anggaran sebesar Rp677.473.383.000,00. Realisasi TA 2023 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp44.483.278.319,00 atau 7,03% dari TA 2022. Rincian Transfer/Bagi Hasil ke Desa disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.43 Anggaran dan Realisasi Transfer/Bagi Hasil ke Desa TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023				Realisasi TA 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
Bagi Hasil Pajak	11.247.484.000,00	11.224.696.000,00	(22.788.000,00)	99,80	10.087.758.000,00
Bagi Hasil Retribusi	2.545.274.000,00	2.518.470.881,00	(26.803.119,00)	98,95	2.314.857.800,00
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	663.680.625.000,00	663.231.376.738,00	(449.248.262,00)	99,93	620.088.649.500,00
Jumlah	677.473.383.000,00	676.974.543.619,00	(498.839.381,00)	99,93	632.491.265.300,00

5.1.3.1.1 Bagi Hasil Pajak

Anggaran (Rp)	TA 2023			TA 2022
	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	Realisasi (Rp)
11.247.484.000,00	11.224.696.000,00	(22.788.000,00)	99,80	10.087.758.000,00

Realisasi Bagi Hasil Pajak TA 2023 sebesar Rp11.224.696.000,00 atau 99,80% dari anggaran sebesar Rp11.247.484.000,00 yang seluruhnya merupakan Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa. Realisasi TA 2023 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.136.938.000,00 atau 11,27% dari TA 2022.

Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa disalurkan kepada 449 desa berdasarkan Perbup Kebumen Nomor 30 Tahun 2023 tanggal 31 Mei 2023 tentang Alokasi dan Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kebumen TA 2023 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Kebumen Nomor 41 Tahun 2023 tanggal 31 Juli 2023 tentang Perubahan atas Perbup Kebumen Nomor 30 Tahun 2023 tentang Alokasi dan Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kebumen TA 2023.

5.1.3.1.2 Bagi Hasil Retribusi

Anggaran (Rp)	TA 2023			TA 2022
	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	Realisasi (Rp)
2.545.274.000,00	2.518.470.881,00	(26.803.119,00)	98,95	2.314.857.800,00

Realisasi Bagi Hasil Retribusi TA 2023 sebesar Rp2.518.470.881,00 atau 98,95% dari anggaran sebesar Rp2.545.274.000,00 yang seluruhnya merupakan Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa. Realisasi TA 2023 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp203.613.081,00 atau 8,80% dari TA 2022.

Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa disalurkan kepada 449 desa berdasarkan Perbup Kebumen Nomor 30 Tahun 2023 tanggal 31 Mei 2023 tentang Alokasi dan Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kebumen TA 2023 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Kebumen Nomor 41 Tahun 2023 tanggal 31 Juli 2023 tentang Perubahan atas Perbup Kebumen Nomor 30 Tahun 2023 tentang Alokasi dan Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kebumen TA 2023.

5.1.3.1.3 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

TA 2023				TA 2022
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	Realisasi (Rp)
663.680.625.000,00	663.231.376.738,00	(449.248.262,00)	99,93	620.088.649.500,00

Realisasi Bagi Hasil Pendapatan Lainnya TA 2023 sebesar Rp663.231.376.738,00 atau 99,93% dari anggaran sebesar Rp663.680.625.000,00 seluruhnya merupakan Bantuan Keuangan. Realisasi TA 2023 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp43.142.727.238,00 atau 6,96% dari TA 2022. Rincian Bagi Hasil Pendapatan Lainnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.44 Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023				Realisasi TA 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota					
Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00
Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa					
Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	635.197.447.000,00	634.847.198.738,00	(350.248.262,00)	99,94	586.702.739.500,00
Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	28.483.178.000,00	28.384.178.000,00	(99.000.000,00)	99,65	33.185.910.000,00
Jumlah	663.680.625.000,00	663.231.376.738,00	(449.248.262,00)	99,93	620.088.649.500,00

1. Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa TA 2023 terealisasi sebesar Rp634.847.198.738,00 atau 99,94% dari anggaran sebesar Rp635.197.447.000,00. Realisasi TA 2023 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp48.144.459.238,00 atau 8,21% dari TA 2022. Rincian Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.45 Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023				Realisasi TA 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
Alokasi Dana Desa (ADD)	177.704.219.000,00	177.678.305.538,00	(25.913.462,00)	99,99	169.946.366.500,00
Dana Desa	456.284.228.000,00	455.959.893.200,00	(324.334.800,00)	99,93	416.756.373.000,00
Kegiatan Pemilihan Kepala Desa	1.209.000.000,00	1.209.000.000,00	0,00	100,00	0,00
Jumlah	635.197.447.000,00	634.847.198.738,00	(350.248.262,00)	99,94	586.702.739.500,00

- a. ADD sebesar Rp177.678.305.538,00
Pelaksanaan Bantuan Keuangan ADD berdasarkan Perbup Kebumen Nomor 6 Tahun 2023 tentang ADD di Kabupaten Kebumen TA 2023 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Kebumen Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Perbup Kebumen Nomor 6 Tahun 2023 tentang ADD di Kabupaten Kebumen TA 2023.
Realisasi Bantuan Keuangan ADD TA 2023 termasuk untuk Bantuan Keuangan Pendanaan BPJS Perangkat Desa sebesar Rp1.265.509.898,00. Bantuan Keuangan Pendanaan BPJS merupakan pemotongan iuran BPJS perangkat desa melalui pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD. Iuran Jaminan Kesehatan/BPJS bagi kepala desa dan perangkat desa adalah sebesar 5% (lima

persen) dari gaji atau upah per bulan. Iuran tersebut dibayar dengan ketentuan 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja dan 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta. Berkaitan dengan hal tersebut PPKD selaku BUD melakukan pemotongan iuran sebesar 1% (satu persen) dari gaji atau upah sebelum ADD ditransfer ke rekening Kas Desa untuk kemudian dibayarkan kepada BPJS.

- b. Dana Desa sebesar Rp455.959.893.200,00
Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Realisasi pengeluaran Dana Desa TA 2023 sama dengan realisasi penerimaan Dana Desa TA 2023 sebagaimana disajikan pada catatan nomor 5.1.1.2.2.2 akun Dana Desa yaitu sebesar Rp455.959.893.200,00. Dana Desa TA 2023 tersebut disalurkan langsung dari RKUN kepada 449 desa berdasarkan PMK Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa dan PMK Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PMK Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa.
 - c. Kegiatan Pemilihan Kepala Desa sebesar Rp1.209.000.000,00
Bantuan keuangan untuk kegiatan pemilihan kepala desa merupakan bantuan keuangan yang diberikan kepada 49 pemerintah desa yang pada tahun 2023 melaksanakan pemilihan kepala desa dengan nilai total bantuan sebesar Rp1.209.000.000,00. Pemberian bantuan ini berdasarkan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 400.10/165 Tahun 2023 tentang Penerima Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kebumen Tahun 2023.
2. Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa TA 2023 sebesar Rp28.384.178.000,00 atau 99,65% dari anggaran sebesar Rp28.483.178.000,00. Realisasi TA 2023 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp4.801.732.000,00 atau 14,47% dari TA 2022. Rincian Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.46 Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023				Realisasi TA 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
Infrastruktur	25.983.178.000,00	25.884.178.000,00	(99.000.000,00)	99,62	30.945.910.000,00
Operasional TPQ	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240.000.000,00
Operasional penyelenggaraan event/festival	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	100,00	0,00
Jumlah	28.483.178.000,00	28.384.178.000,00	(99.000.000,00)	99,65	33.185.910.000,00

- a. Infrastruktur sebesar Rp25.884.178.000,00
Bantuan keuangan khusus pembangunan infrastruktur TA 2023 diberikan kepada 157 pemerintah desa dalam 203 kegiatan yang pelaksanaannya berdasarkan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 400.10.1/260 Tahun 2023 tanggal 16 Agustus 2023 tentang Penerima Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Kabupaten Kebumen TA 2023 dan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 400.10.1/510 Tahun 2023 tanggal 30 November 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 400.10.1/260 Tahun 2023 tanggal 16 Agustus 2023 tentang Penerima Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Kabupaten Kebumen TA 2023.
- b. Operasional Penyelenggaraan Event/Festival sebesar Rp2.500.000.000,00
Bantuan keuangan khusus operasional penyelenggaraan event/festival TA 2023 diberikan kepada 144 pemerintah desa untuk penyelenggaraan event/festival pada bidang kepemudaan, olah raga, budaya, ekonomi dan/atau keagamaan yang

pelaksanaannya berdasarkan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 400.10.1/502 Tahun 2023 tanggal 15 November 2023 tentang Penerima Bantuan Keuangan Khusus untuk Operasional Penyelenggaraan Event/Festival Kepada Desa di Kabupaten Kebumen TA 2023.

5.1.4 Pembiayaan

TA 2023				TA 2022
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	Realisasi (Rp)
236.946.522.000,00	240.811.890.877,98	3.865.368.877,98	101,63	235.979.627.198,98

Rekening Pembiayaan digunakan untuk mencatat semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan TA 2023 dianggarkan sebesar Rp236.946.522.000,00 dan terealisasi sebesar Rp240.811.890.877,98 atau 101,63%. Realisasi Pembiayaan TA 2023 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp4.832.263.679,00 atau 2,05% dari TA 2022. Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.1.47 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023				Realisasi TA 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
Penerimaan Pembiayaan	283.277.522.000,00	283.142.890.877,98	(134.631.122,02)	99,95	271.279.627.198,98
Pengeluaran Pembiayaan	46.331.000.000,00	42.331.000.000,00	(4.000.000.000,00)	91,37	35.300.000.000,00
Pembiayaan Neto	236.946.522.000,00	240.811.890.877,98	3.865.368.877,98	101,63	235.979.627.198,98

5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan

TA 2023				TA 2022
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	Realisasi (Rp)
283.277.522.000,00	283.142.890.877,98	(134.631.122,02)	99,95	271.279.627.198,98

Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2023 sebesar Rp283.142.890.877,98 atau mencapai 99,95% dari anggaran sebesar Rp283.277.522.000,00. Realisasi TA 2023 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp11.863.263.679,00 atau 4,37% dari TA 2022. Rincian Penerimaan Pembiayaan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.48 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023				Realisasi TA 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
SiLPA tahun sebelumnya	258.826.262.000,00	258.817.350.877,98	(8.911.122,02)	100,00	269.179.627.198,98
Pencairan Dana Cadangan	22.351.260.000,00	22.225.540.000,00	(125.720.000,00)	99,44	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	0,00	100,00	2.100.000.000,00
Jumlah	283.277.522.000,00	283.142.890.877,98	(134.631.122,02)	99,95	271.279.627.198,98

5.1.4.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

TA 2023				TA 2022
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	Realisasi (Rp)
258.826.262.000,00	258.817.350.877,98	(8.911.122,02)	100,00	269.179.627.198,98

SiLPA Tahun Sebelumnya merupakan penggunaan SiLPA TA 2022 yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan TA 2023 berdasarkan Perda Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD Kabupaten Kebumen TA 2023 sebesar Rp258.826.262.000,00.

Realisasi SiLPA Tahun Sebelumnya TA 2023 sebesar Rp258.817.350.877,98 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp258.826.262.000,00. Realisasi TA 2023 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp10.362.276.321,00 atau 3,85% dari TA 2022. Rincian SiLPA Tahun Sebelumnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.49 Anggaran dan Realisasi SiLPA Tahun Sebelumnya TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023				Realisasi TA 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
Pelampauan Penerimaan PAD	15.525.738.000,00	15.525.738.000,00	0,00	100,00	10.923.354.000,00
Penghematan Belanja	132.520.582.000,00	132.511.670.877,98	(8.911.122,02)	99,99	161.879.799.198,98
Sisa Belanja Lainnya	87.496.345.000,00	87.496.345.000,00	0,00	100,00	96.376.474.000,00
Penarikan SiLPA BLUD	23.283.597.000,00	23.283.597.000,00	0,00	100,00	0,00
Jumlah	258.826.262.000,00	258.817.350.877,98	(8.911.122,02)	100,00	269.179.627.198,98

5.1.4.1.2 Pencairan Dana Cadangan

Anggaran (Rp)	TA 2023			%	Realisasi (Rp)
	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)			
22.351.260.000,00	22.225.540.000,00	(125.720.000,00)	99,44	0,00	

Pada TA 2022 dan 2023 telah dibentuk Dana Cadangan sebesar Rp35.000.000.000,00 dan dilakukan pencairan pada TA 2023 sebesar Rp22.225.540.000,00.

Pencairan Dana Cadangan TA 2023 sebesar Rp22.225.540.000,00 berdasarkan SE Mendagri Nomor 900.1.9.1/5252/SJ tanggal 29 September 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan NPHD antara Pemkab Kebumen dengan:

1. KPU Kabupaten Kebumen Nomor 26 Tahun 2023 dan 551/KU07-50/3305/2023 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024;
2. Bawaslu Kabupaten Kebumen Nomor 27 Tahun 2023 dan 1179/HK.02.00/K.JT-12/11/2023 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024.

Pencairan Dana Cadangan TA 2023 sebesar 40% disalurkan ke KPU sebesar Rp18.157.708.000,00 dan Bawaslu sebesar Rp4.067.832.000,00.

5.1.4.1.3 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

Anggaran (Rp)	TA 2023			%	Realisasi (Rp)
	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)			
2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	0,00	100,00	2.100.000.000,00	

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah merupakan pengembalian atas pemberian pinjaman dari:

1. 33 Gapoktan atau Poktan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 360.2/60 Tahun 2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Penerima Dana Talangan Pengadaan Pangan Kabupaten Kebumen TA 2023 sebesar Rp1.500.000.000,00;
2. Empat Rukun Nelayan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 523/99 Tahun 2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang Penerima dan Besarnya Dana Bergulir Keterlambatan Pembayaran Lelang Ikan di Kabupaten Kebumen TA 2023 sebesar Rp600.000.000,00.

Pemkab Kebumen menyediakan Dana Bergulir Keterlambatan Pembayaran Lelang Ikan dalam APBD TA 2023 dan diatur dalam Perbup Kebumen Nomor 35 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Dana Bergulir Keterlambatan Pembayaran Lelang Ikan di Kabupaten Kebumen.

Pinjaman tersebut ditujukan untuk menanggulangi keterlambatan pembayaran lelang ikan hasil tangkapan nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) pada saat musim ikan.

5.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan

Anggaran (Rp)	TA 2023			TA 2022
	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	Realisasi (Rp)
46.331.000.000,00	42.331.000.000,00	(4.000.000.000,00)	91,37	35.300.000.000,00

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2023 sebesar Rp42.331.000.000,00 atau mencapai 91,37% dari anggaran sebesar Rp46.331.000.000,00. Realisasi TA 2023 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp7.031.000.000,00 atau 19,92% dari TA 2022. Rincian Pengeluaran Pembiayaan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.50 Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023				Realisasi TA 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00	100,00	15.000.000.000,00
Penyertaan Modal Daerah	24.231.000.000,00	20.231.000.000,00	(4.000.000.000,00)	83,49	18.200.000.000,00
Pemberian Pinjaman Daerah	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	0,00	100,00	2.100.000.000,00
Jumlah	46.331.000.000,00	42.331.000.000,00	(4.000.000.000,00)	91,37	35.300.000.000,00

5.1.4.2.1 Pembentukan Dana Cadangan

Anggaran (Rp)	TA 2023			TA 2022
	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	Realisasi (Rp)
20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00	100,00	15.000.000.000,00

Berdasarkan Perda Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024, dana yang disisihkan sebesar Rp35.000.000.000,00 dalam dua tahun anggaran, yaitu TA 2022 sebesar Rp15.000.000.000,00 dan TA 2023 sebesar Rp20.000.000.000,00.

Pada TA 2022 dan 2023 telah dibentuk Dana Cadangan sebesar Rp35.000.000.000,00 yang tersimpan pada Rekening Dana Cadangan pada Bank Jateng Cabang Kebumen Nomor 1.008.01018.4.

5.1.4.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

Anggaran (Rp)	TA 2023			TA 2022
	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	Realisasi (Rp)
24.231.000.000,00	20.231.000.000,00	(4.000.000.000,00)	83,49	18.200.000.000,00

Penyertaan Modal (Investasi) Pemda kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dilaksanakan sesuai Perda Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal pada BUMD Kabupaten Kebumen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2020 tanggal 3 Oktober 2022 tentang Penyertaan Modal pada BUMD Kabupaten Kebumen.

Realisasi Penyertaan Modal (Investasi) Pemda TA 2023 sebesar Rp20.231.000.000,00 atau 83,49% dari anggaran sebesar Rp24.231.000.000,00. Realisasi TA 2023 tersebut mengalami

kenaikan sebesar Rp2.031.000.000,00 atau 11,16% dari TA 2022. Rincian Penyertaan Modal (Investasi) Pemda disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.51 Anggaran dan Realisasi Penyertaan Modal (Investasi) Pemda TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023				Realisasi TA 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
PT BPD Jateng	10.731.000.000,00	10.731.000.000,00	0,00	100,00	9.700.000.000,00
PT BPR Bank Kebumen (Perseroda)	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	100,00	1.500.000.000,00
PT BPR BKK Kebumen	4.000.000.000,00	0,00	(4.000.000.000,00)	0,00	3.500.000.000,00
PT BPR BKK Jateng (Perseroda)	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	100,00	0,00
Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	100,00	0,00
PT Luk Ulo Farma (Perseroda)	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	100,00	500.000.000,00
PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda)	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	100,00	3.000.000.000,00
Jumlah	24.231.000.000,00	20.231.000.000,00	(4.000.000.000,00)	83,49	18.200.000.000,00

Pada TA 2023 penyertaan modal pada PT BPR BKK Kebumen sebesar Rp4.000.000.000,00 tidak dapat direalisasikan karena:

1. indikator kinerja PT BPR BKK Kebumen tidak tercapai;
2. kondisi rasio kecukupan modal (CAR) masih belum memenuhi kriteria.

5.1.4.2.3 Pemberian Pinjaman Daerah

Anggaran (Rp)	TA 2023			%	TA 2022
	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)		
2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	0,00	100,00	2.100.000.000,00	

Pemberian Pinjaman Daerah dilaksanakan berdasarkan Perbup Kebumen Nomor 6 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pemberian Dana Talangan Pengadaan Pangan Kabupaten Kebumen sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perbup Kebumen Nomor 79 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Perubahan Kedua atas Perbup Kebumen Nomor 6 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pemberian Dana Talangan Pengadaan Pangan Kabupaten Kebumen.

Pinjaman Daerah yang diberikan berbentuk dana yang bersifat talangan dan diberikan kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)/Kelompok Tani (Poktan) untuk modal usaha pembelian gabah/beras, jagung, kedelai dan kacang hijau dari petani dan harus dikembalikan ke RKUD dalam jangka waktu tertentu.

Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp2.100.000.000,00 terdiri dari:

1. Dana talangan pangan sebesar Rp1.500.000.000,00 kepada 33 Gapoktan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 360.2/60 Tahun 2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Penerima Dana Talangan Pengadaan Pangan Kabupaten Kebumen TA 2023. Pemberian pinjaman dicairkan dengan SP2D Nomor 00239/LS-PEMBY/DAU/2023 tanggal 6 April 2023.
2. Dana bergulir kepada masyarakat sebesar Rp600.000.000,00 kepada 4 rukun nelayan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 523/99 Tahun 2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang Penerima dan Besarnya Dana Bergulir Keterlambatan Pembayaran Lelang Ikan di Kabupaten Kebumen TA 2023. Pemberian pinjaman dicairkan dengan SP2D Nomor 00276/LS-PEMBY/DAU/2023 tanggal 13 April 2023.

5.1.5 SiLPA

Anggaran (Rp)	TA 2023			TA 2022	
	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
0,00	164.691.485.769,98	164.691.485.769,98	0,00	258.817.350.877,98	

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2023 sebesar Rp164.691.485.769,98, jika dibandingkan TA 2022, SiLPA TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp94.125.865.108,00 atau 36,37%. Perhitungan SiLPA disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.52 Anggaran dan Realisasi SiLPA TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023				Realisasi TA 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
Pendapatan	2.856.981.438.000,00	2.901.021.509.721,00	44.040.071.721,00	101,54	2.847.196.017.404,00
Belanja	2.416.454.577.000,00	2.300.167.371.210,00	(116.287.205.790,00)	95,19	2.191.867.028.425,00
Transfer	677.473.383.000,00	676.974.543.619,00	(498.839.381,00)	99,93	632.491.265.300,00
Jumlah Belanja dan Transfer	3.093.927.960.000,00	2.977.141.914.829,00	(116.786.045.171,00)	96,23	2.824.358.293.725,00
Surplus/(Defisit)	(236.946.522.000,00)	(76.120.405.108,00)	160.826.536.140,00	32,13	22.837.723.679,00
Pembiayaan					
Penerimaan Pembiayaan	283.277.522.000,00	283.142.890.877,98	(134.631.122,02)	99,95	271.279.627.198,98
Pengeluaran Pembiayaan	46.331.000.000,00	42.331.000.000,00	(4.000.000.000,00)	91,37	35.300.000.000,00
Pembiayaan Netto	236.946.522.000,00	240.811.890.877,98	3.865.368.877,98	101,63	235.979.627.198,98
SiLPA	0.00	164.691.485.769,98	164.691.905.017,98	0.00	258.817.350.877,98

Rincian SiLPA TA 2023 dan 2022 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.1.53 Rincian SiLPA TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023			SiLPA TA 2022 (Rp)
	Saldo Kas (Rp)	Saldo Utang PFK (Rp)	SiLPA (Rp)	
Kas di Kas Daerah	113.015.912.113,00	0,00	113.015.912.113,00	170.249.980.751,00
Kas di Bendahara Penerimaan	212.936.280,00	0,00	212.936.280,00	41.794.313,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	1.429.217,00
Kas di BLUD	49.367.509.581,98	0,00	49.367.509.581,98	87.496.345.014,98
Kas Dana BOS	893.163.639,00	6.438.730,00	886.724.909,00	1.037.127.884,00
Kas Lainnya	1.208.402.886,00	0,00	1.208.402.886,00	0,00
Jumlah	164.697.924.499,98	6.438.730,00	164.691.485.769,98	258.826.677.179,98

SiLPA TA 2023 yang berada di Kas Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp113.015.912.113,00 dirinci pada tabel berikut.

Tabel 5.1.54 Rincian SiLPA di Kas Daerah TA 2023

No	Uraian	Jumlah
1	Sisa Dana Transfer dan Mandatory	
	DAU Earmarked	
	- Bidang Kelurahan	21.141.200,00
	- Bidang Kesehatan	247.601.141,00
	- Bidang Pendidikan	3.010.367.419,00
	- Bidang Pekerjaan Umum	344.542.000,00
	- Dukungan Penganjangan P3K	38.612.915.784,00
	DAU Khusus komponen 50% sertifikasi THR dan Gaji 13	19.536.196.000,00
	DAK FISIK TA 2023	188.000,00
	DAK NON FISIK TA 2023	
	- Dana Tunjangan Profesi Guru Aparatur Sipil Negara (TPG ASN)	6.487.950.728,00
	- Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	180.878.976,00
	- Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	766.884.232,00
	- Dana Fasilitasi Penanaman Modal (FPM)	5.619.980,00
	- Dana peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (PK2UKM)	6.262.269,00
	- Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian (KPP)	30.394.100,00
	INSENTIF FISKAL	1.888.116.670,00

No	Uraian	Jumlah
	DBHCHT TA 2023	638.488.377,00
	Sub Jumlah	71.777.546.876,00
2	Pelampauan Pendapatan	
	- Pendapatan Pajak Daerah	4.192.705.502,00
	- Lain-lain PAD yang Sah	702.629.808,00
	Sub Jumlah	4.895.335.310,00
3	Belanja Tidak Terserap	
	- Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	18.660.196.425,00
	- Belanja Subsidi	54.343.598,00
	- Belanja Hibah	3.487.896.397,00
	- Belanja Bantuan Sosial	849.363.477,00
	- Belanja Tak Terduga	808.677.689,00
	- Belanja Bantuan Keuangan	449.248.262,00
	Sub Jumlah	24.309.725.848,00
4	Sisa Tender	346.929.206,78
5	Penghematan Belanja	11.686.374.872,22
	Jumlah SiLPA di Kas Daerah	113.015.912.113,00

5.2. Laporan Perubahan SAL

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

SAL Awal per 31 Desember 2023 sebesar Rp258.817.350.877,98 mengalami penurunan sebesar Rp10.362.276.321,00 atau 3,85% dari SAL Awal per 31 Desember 2022. SAL Awal per 31 Desember 2023 merupakan SiLPA tahun lalu yang dianggarkan untuk membiayai defisit anggaran pada Perubahan APBD TA 2023.

5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp258.817.350.877,98 mengalami penurunan sebesar Rp10.362.276.321,00 atau 3,85% dari Penggunaan SAL per 31 Desember 2022.

5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

SiLPA per 31 Desember 2023 sebesar Rp164.691.485.769,98 mengalami penurunan sebesar Rp94.125.865.108,00 atau 36,37% dari SiLPA per 31 Desember 2022.

SiLPA per 31 Desember 2023 merupakan hasil penjumlahan dari realisasi Surplus/(Defisit) Anggaran sebesar (Rp76.120.405.108,00) dengan realisasi Pembiayaan Netto sebesar Rp240.811.890.877,98 sehingga terdapat SiLPA sebesar Rp164.691.485.769,98.

5.2.4 Saldo Anggaran Lebih Akhir

SAL Akhir per 31 Desember 2023 sebesar Rp164.691.485.769,98 mengalami penurunan sebesar Rp94.125.865.108,00 atau 36,37% dari SAL Akhir per 31 Desember 2022.

Rincian SiLPA TA 2023 dan 2022 sebagaimana disajikan pada catatan nomor 5.1.5 akun SiLPA pada Tabel 5.1.52 dan Tabel 5.1.53.

5.3. Neraca

5.3.1 Aset

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp4.516.881.288.095,62	Rp4.628.824.366.868,65

Saldo Aset terdiri dari:

Tabel 5.3.1 Rincian Aset Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Aset Lancar	246.271.477.311,60	345.177.363.520,74	(98.905.886.209,14)	(28,65)
Investasi Jangka Panjang	204.963.341.996,07	168.191.138.468,15	36.772.203.527,92	21,86
Aset Tetap	3.936.149.530.596,51	3.959.242.372.635,76	(23.092.842.039,25)	(0,58)
Dana Cadangan	12.774.460.000,00	15.000.000.000,00	(2.225.540.000,00)	(14,84)
Aset Lainnya	116.722.478.191,44	141.213.492.244,00	(24.491.014.052,56)	(17,34)
Jumlah	4.516.881.288.095,62	4.628.824.366.868,65	(111.943.078.773,03)	(2,42)

Saldo Aset tahun 2023 mengalami penurunan sebesar sebesar Rp111.943.078.773,03 atau 2,42% dibandingkan dengan tahun 2022 antara lain karena penghapusan BMD.

5.3.1.1 Aset Lancar

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp246.271.477.311,60	Rp345.177.363.520,74

Aset Lancar merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Pemkab Kebumen mengklasifikasikan Aset Lancar meliputi Kas dan Setara Kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang, dan Persediaan.

Saldo Aset Lancar terdiri dari:

Tabel 5.3.2 Rincian Aset Lancar Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Kas di Kas Daerah	113.015.912.113,00	170.249.980.751,00	(57.234.068.638,00)	(33,62)
Kas di Bendahara Penerimaan	212.936.280,00	41.794.313,00	171.141.967,00	409,49
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	1.429.217,00	(1.429.217,00)	(100,00)
Kas di BLUD	49.367.509.581,98	87.496.345.014,98	(38.128.835.433,00)	(43,58)
Kas Dana BOS	893.163.639,00	1.037.127.884,00	(143.964.245,00)	(13,84)
Kas Lainnya	1.208.402.886,00	0,00	1.208.402.886,00	0,00
Piutang Pajak	9.358.194.241,00	7.980.512.527,00	1.377.681.714,00	17,26
Piutang Retribusi	4.359.106.740,00	4.079.655.400,00	279.451.340,00	6,85
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	21.073.792.846,36	20.390.647.936,94	683.144.909,42	3,35
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Transfer Antar Daerah	6.047.212.575,00	3.437.968.245,00	2.609.244.330,00	75,89
Penyisihan Piutang	(10.866.464.784,45)	(9.170.645.322,50)	(1.695.819.461,95)	18,49
Beban Dibayar Dimuka	33.705.587,11	63.096.715,00	(29.391.127,89)	(46,58)
Persediaan	51.568.005.606,60	59.569.450.839,32	(8.001.445.232,72)	(13,43)
Jumlah	246.271.477.311,60	345.177.363.520,74	(98.905.886.209,14)	(28,65)

Saldo Aset Lancar tahun 2023 mengalami penurunan sebesar sebesar Rp98.905.886.209,14 atau 28,65% dibandingkan dengan tahun 2022 dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah

31 Desember 2023	31 Desember 2022
Rp113.015.912.113,00	Rp170.249.980.751,00

Kas di Kas Daerah dalam bentuk giro senilai Rp113.015.912.113,00 tersimpan pada rekening Bank Jateng Cabang Kebumen Nomor 1-008-01372-9. Nomor rekening tersebut merupakan RKUD Kabupaten Kebumen TA 2023 yang ditetapkan dengan SK Bupati Kebumen Nomor 900/4 Tahun 2023 tentang Penunjukkan PT Bank Jateng Cabang Kebumen sebagai Kas Daerah dan RKUD Kabupaten Kebumen Tahun 2023. Sedangkan Kas di Kas Daerah dalam bentuk deposito per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00, hal ini sesuai ketentuan PP Nomor 12 Tahun 2019 bahwa Deposito dan/atau Investasi Jangka Pendek harus disetor ke RKUD paling lambat tanggal 31 Desember.

Selain Kas di Kas Daerah terdapat saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2023 sebesar Rp12.774.460.000,00 yang tersimpan pada rekening Bank Jateng Cabang Kebumen Nomor 1-008-01018-4. Nomor rekening tersebut dibuka berdasarkan Surat Nomor 900/1929.2 tanggal 28 November 2022 perihal Persetujuan Pembukaan Rekening Dana Cadangan. Dana Cadangan tersebut akan digunakan untuk pendanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan Perda Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024.

5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

31 Desember 2023	31 Desember 2022
Rp212.936.280,00	Rp41.794.313,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan terdiri dari:

Tabel 5.3.3 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Disperkimhub	225.200,00	0,00	225.200,00	0,00
DLHKP	5.125.567,00	0,00	5.125.567,00	0,00
Disperindag KUKM	18.036.500,00	0,00	18.036.500,00	0,00
Disparbud	189.134.700,00	41.380.000,00	147.754.700,00	357,07
BPKPD	414.313,00	414.313,00	0,00	0,00
Jumlah	212.936.280,00	41.794.313,00	171.141.967,00	409,49

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 dijelaskan sebagai berikut.

1. Kas di Bendahara Penerimaan Disperkimhub sebesar Rp225.200,00 merupakan pendapatan atas Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebesar Rp66.500,00 dan Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar Rp158.700,00 yang seluruhnya telah disetor ke RKUD pada tanggal 2 Januari 2024.
2. Kas di Bendahara Penerimaan DLHKP sebesar Rp5.125.567,00 merupakan pendapatan atas Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan yang telah disetorkan ke RKUD pada tanggal 2 Januari 2024 sebesar Rp4.660.567,00 dan tanggal 9 Januari 2024 sebesar Rp465.000,00.
3. Kas di Bendahara Penerimaan Disperindag KUKM sebesar Rp18.036.500,00 merupakan pendapatan atas Retribusi Kios sebesar Rp16.775.600,00, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebesar Rp762.900,00 dan Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir sebesar Rp1.417.000,00 yang seluruhnya telah disetorkan ke RKUD pada tanggal 2 Januari 2024.
4. Kas di Bendahara Penerimaan Disparbud sebesar Rp189.134.700,00 merupakan pendapatan atas Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebesar Rp100.000,00, Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan sebesar Rp830.000,00, Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir sebesar Rp4.947.000,00 dan Retribusi Pelayanan Tempat

Rekreasi dan Olahraga sebesar Rp183.257.700,00 yang telah disetor ke RKUD pada tanggal 2 Januari 2024 sebesar Rp171.393.700,00 dan tanggal 3 Januari 2024 sebesar Rp17.741.000,00.

- Kas di Bendaharaa Penerimaan BPKPD sebesar Rp414.313,00, merupakan saldo pada rekening penampungan PBB-P2 di Bank Jateng Cabang Kebumen Nomor 1-008-00361-7 nama REKG PEN PBB P-2 KAB KEBUMEN per 31 Desember 2022 dan telah disajikan sebagai realisasi Lain-Lain PAD yang Sah TA 2022. Saldo tersebut baru disetorkan ke RKUD pada tanggal 17 Januari 2024.

5.3.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

31 Desember 2023	31 Desember 2022
Rp0,00	Rp1.429.217,00

Tidak terdapat saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023. Hal ini menunjukkan bahwa sisa UP/GU/TU yang harus dipertanggungjawabkan seluruhnya disetor/dipindahbukukan ke RKUD per 31 Desember 2023.

5.3.1.1.4 Kas di BLUD

31 Desember 2023	31 Desember 2022
Rp49.367.509.581,98	Rp87.496.345.014,98

Saldo Kas di BLUD terdiri dari:

Tabel 5.3.4 Rincian Kas di BLUD Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
RSUD Dr. Soedirman	23.408.760.440,00	52.325.530.201,00	(28.916.769.761,00)	(55,26)
RSUD Prembun	19.504.619.530,00	30.578.253.474,00	(11.073.633.944,00)	(36,21)
Puskesmas	6.454.129.611,98	4.592.561.339,98	1.861.568.272,00	40,53
Jumlah	49.367.509.581,98	87.496.345.014,98	(38.128.835.433,00)	(43,58)

Pada tahun 2023 terdapat setoran SiLPA BLUD ke RKUD berdasarkan SK Bupati Kebumen Nomor 900/240 Tahun 2023 tanggal 1 Agustus 2023 tentang Perintah Penyetoran Dana SiLPA pada BLUD Kabupaten Kebumen TA 2022, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.3.5 Perhitungan Kas di BLUD Tahun 2023

Uraian	Saldo SP3BP (Rp)	Setoran SiLPA ke RKUD		Saldo Kas di BLUD (Rp)
		(Rp)	Tanggal	
RSUD Dr. Soedirman	45.409.160.440,00	22.000.400.000,00	18 Sept 2023	23.408.760.440,00
RSUD Prembun	20.787.816.530,00	1.283.197.000,00	15 Sept 2023	19.504.619.530,00
Puskesmas	6.454.129.611,98	0,00	-	6.454.129.611,98
Jumlah	72.651.106.581,98	23.283.597.000,00		49.367.509.581,98

Mutasi Kas di BLUD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Saldo awal 1 Jan 2023:	Rp87.496.345.014,98
Mutasi tambah:	
Penerimaan	Rp266.431.178.288,00
Mutasi kurang:	
Pengeluaran/Belanja	(Rp281.276.416.721,00)
Setoran SiLPA ke RKUD	(Rp23.283.597.000,00)
Saldo akhir 31 Des 2023:	<u>Rp49.367.509.581,98</u>

Rincian saldo Kas di BLUD dijelaskan sebagai berikut:

- Saldo Kas di BLUD RSUD dr Soedirman per 31 Desember 2023 sebesar Rp23.408.760.440,00 terdiri dari:

Tabel 5.3.6 Rincian Kas di BLUD RSUD dr. Soedirman Tahun 2023

Uraian	Nama Bank & Nomor Rekening	Saldo per 31 Des 2023 (Rp)
Tunai (Kas di Bendahara Penerimaan BLUD atas pendapatan tanggal 31 Desember 2023 yang baru disetorkan ke rekening BLUD pada tanggal 2 Januari 2024.		29.309.916,00
Rekening Pengeluaran BLUD (Kas Bendahara Pengeluaran dimana sisa belanja UP/GU telah disetor kembali ke kas BLUD)	Bank Jateng 1-008-00288-2	0,00
Rekening Operasional Penerimaan BLUD	BRI 0032-01002104-30-8	0,00
	Bank Jateng 1-008-00850-3	0,00
	BNI 112-004-3155	10.228,00
Rekening Operasional BLUD	Bank Jateng 1.008.00287.4	23.379.440.296,00
Jumlah		23.408.760.440,00

- Saldo Kas di BLUD RSUD Prembun per 31 Desember 2023 sebesar Rp19.504.619.530,00 terdiri dari:

Tabel 5.3.7 Rincian Kas di BLUD RSUD Prembun Tahun 2023

Uraian	Nama Bank & Nomor Rekening	Saldo per 31 Des 2023 (Rp)
Tunai (Kas di Bendahara Penerimaan BLUD atas pendapatan tanggal 31 Desember 2023 , yang baru disetorkan ke rekening BLUD tanggal 2 Januari 2024)		26.159.718,00
Rekening Pengeluaran BLUD (merupakan Kas Bendahara Pengeluaran dimana sisa belanja UP/GU telah disetor kembali ke kas BLUD)	Bank Jateng 1-008-00977-1	0,00
Rekening Operasional Penerimaan BLUD	Bank Jateng 1-008-00838-4	0,00
Rekening Operasional BLUD	Bank Jateng 1.008.00729.9	19.478.459.812,00
Jumlah		19.504.619.530,00

- Saldo Kas di BLUD Puskesmas per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.454.129.611,98 terdiri dari:

Tabel 5.3.8 Rincian Kas di BLUD Puskesmas Tahun 2023

No	Puskesmas	Kas di Bank Jateng		Kas Tunai (Rp)	Utang PFK (Rp)	Saldo Kas di BLUD (Rp)
		Nomor Rekening	Nilai (Rp)			
1	Puskesmas Adimulyo	1.100.00126.4	215.187.099,00	0,00	0,00	215.187.099,00
2	Puskesmas Alian	1.008.00624.1	170.051.216,00	0,00	0,00	170.051.216,00
3	Puskesmas Ambal I	1.115.00090.6	297.418.471,00	0,00	0,00	297.418.471,00
4	Puskesmas Ambal II	1.115.00091.4	214.754.349,00	0,00	0,00	214.754.349,00
5	Puskesmas Ayah I	1.066.00121.7	68.090.386,00	0,00	0,00	68.090.386,00
6	Puskesmas Ayah II	1.066.00120.9	9.155.847,00	0,00	0,00	9.155.847,00
7	Puskesmas Bonorowo	1.071.00137.3	91.349.642,00	0,00	0,00	91.349.642,00
8	Puskesmas Buayan	1.066.00124.1	367.037.048,00	0,00	0,00	367.857.048,00
9	Puskesmas Buluspesantren I	1.115.00092.2	98.167.693,00	0,00	0,00	98.167.693,00
10	Puskesmas Buluspesantren II	1.008.00622.5	157.037.003,00	0,00	0,00	157.037.003,00
11	Puskesmas Gombang I	1.006.00125.0	121.344.260,00	1.842.000,00	0,00	123.186.260,00
12	Puskesmas Gombang II	1.006.00126.8	33.791.728,00	0,00	0,00	33.791.728,00
13	Puskesmas Karanganyar	1.100.00123.0	146.794.456,00	880.000,00	0,00	147.674.456,00
14	Puskesmas Karanggayam I	1.100.00124.8	185.222.584,00	0,00	0,00	185.222.584,00
15	Puskesmas Karanggayam II	1.100.00125.6	139.658.286,00	0,00	0,00	139.658.286,00
16	Puskesmas Karangsambung	1.008.00625.0	594.543.971,00	2.305.000,00	0,00	596.848.971,00
17	Puskesmas Kebumen I	1.008.00623.3	229.297.168,00	0,00	0,00	229.297.168,00

No	Puskesmas	Kas di Bank Jateng		Kas Tunai (Rp)	Utang PFK (Rp)	Saldo Kas di BLUD (Rp)
		Nomor Rekening	Nilai (Rp)			
18	Puskesmas Kebumen II	1.008.00619.5	50.661.649,54	375.000,00	0,00	51.036.649,54
19	Puskesmas Kebumen III	1.008.00621.7	138.129.307,00	0,00	0,00	138.129.307,00
20	Puskesmas Klirong I	1.008.00626.8	357.174.188,00	0,00	0,00	357.174.188,00
21	Puskesmas Klirong II	1.008.00628.4	183.023.228,00	0,00	0,00	183.023.228,00
22	Puskesmas Kutowinangun	1.115.00093.1	284.691.423,00	660.000,00	0,00	285.351.423,00
23	Puskesmas Kuwarasan	1.066.00122.5	74.795.993,44	0,00	0,00	74.795.993,44
24	Puskesmas Mirit	1.071.00136.5	138.710.653,00	885.225,00	0,00	139.595.878,00
25	Puskesmas Padureso	1.071.00134.9	131.815.590,00	0,00	0,00	131.815.590,00
26	Puskesmas Pejagoan	1.008.00617.9	121.805.549,00	0,00	0,00	121.805.549,00
27	Puskesmas Petanahan	1.008.00618.7	106.600.280,00	0,00	0,00	106.600.280,00
28	Puskesmas Poncowarno	1.115.00094.9	223.745.774,00	9.766.721,00	0,00	233.512.495,00
29	Puskesmas Prembun	1.071.00135.7	157.279.620,00	0,00	0,00	157.279.620,00
30	Puskesmas Puring	1.066.00115.2	530.066.288,00	0,00	0,00	530.066.288,00
31	Puskesmas Rowokele	1.066.00123.3	92.645.148,00	0,00	0,00	92.645.148,00
32	Puskesmas Sadang	1.008.00627.6	451.991.608,00	0,00	0,00	451.991.608,00
33	Puskesmas Sempor I	1.066.00118.7	111.136.180,00	0,00	0,00	111.136.180,00
34	Puskesmas Sempor II	1.066.00119.5	11.473.385,00	0,00	0,00	11.473.385,00
35	Puskesmas Sruweng	1.008.00620.9	131.373.595,00	575.000,00	0,00	131.948.595,00
		Jumlah	6.436.020.665,98	18.108.946,00	0,00	6.454.129.611,98

5.3.1.1.5 Kas Dana BOS

31 Desember 2023

31 Desember 2022

Rp893.163.639,00

Rp1.037.127.884,00

Dana BOS merupakan dana yang diterima langsung ke rekening BOS Satuan Pendidikan dan dilaporkan ke Bupati untuk diakui sebagai pendapatan dan belanja dan disajikan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Saldo Kas Dana BOS per 31 Desember 2023 sebesar Rp893.163.639,00 merupakan sisa dana BOS pada 724 Bendahara BOS SD Negeri dan 59 Bendahara BOS SMP Negeri se-Kabupaten Kebumen, dengan mutasi Kas Dana BOS Tahun 2023 sebagai berikut:

Saldo awal 1 Jan 2023:	Rp1.037.127.884,00
Mutasi tambah:	
Penerimaan DAK Non Fisik - BOS	Rp129.630.683.440,00
Penerimaan Bunga Bank	Rp1.251,00
Penerimaan atas Temuan LHP Inspektorat	Rp185.411.483,00
Penerimaan potongan PFK TA 2023	Rp956.123.986,00
Mutasi kurang:	
Pengeluaran/Belanja (SP3B)	(Rp129.932.943.389,00)
Pengembalian lebih salur ke RKUN	(Rp24.229.458,00)
Penyetoran potongan PFK TA 2023	(Rp949.685.256,00)
Penyetoran potongan PFK TA 2022	(Rp9.326.302,00)
Saldo akhir 31 Des 2023:	<u><u>Rp893.163.639,00</u></u>

5.3.1.1.6 Kas Lainnya

31 Desember 2023

31 Desember 2022

Rp1.208.402.886,00

Rp0,00

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.208.402.886,00 merupakan sisa Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas pada 35 Bendahara BOK Puskesmas se-Kabupaten Kebumen.

Dana BOK Puskesmas merupakan dana yang diterima langsung ke rekening BLUD Puskesmas dan dilaporkan ke Bupati untuk diakui sebagai pendapatan dan belanja serta disajikan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Mutasi Kas Lainnya (Dana BOK) Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Saldo awal 1 Jan 2023:	Rp0,00
Mutasi tambah:	
Penerimaan	Rp25.698.961.000,00
Mutasi kurang:	
Pengeluaran/Belanja	(Rp24.490.558.114,00)
Saldo akhir 31 Des 2023:	<u>Rp1.208.402.886,00</u>

Rincian saldo Kas Lainnya di masing masing Puskesmas adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.9 Rincian Kas Lainnya - Dana BOK Puskesmas Tahun 2023

No	Puskesmas	Kas di BNI	
		Nomor Rekening	Nilai (Rp)
1	Puskesmas Adimulyo	1590032043	5.790.608,00
2	Puskesmas Alian	1590032214	7.905.449,00
3	Puskesmas Ambal I	1590031979	8.601.575,00
4	Puskesmas Ambal II	1590032010	17.891.505,00
5	Puskesmas Ayah I	1590031968	37.932.856,00
6	Puskesmas Ayah II	1590031935	26.966.233,00
7	Puskesmas Bonorowo	1590032009	16.180.580,00
8	Puskesmas Buayan	1590032203	16.383.427,00
9	Puskesmas Buluspesantren I	1590031957	52.602.500,00
10	Puskesmas Buluspesantren II	1590031946	58.131.182,00
11	Puskesmas Gombang I	1590031855	10.225.393,00
12	Puskesmas Gombang II	1590031980	27.225.104,00
13	Puskesmas Karanganyar	1590032065	29.085.123,00
14	Puskesmas Karangayam I	1590031866	17.585.597,00
15	Puskesmas Karangayam II	1590031913	21.617.594,00
16	Puskesmas Karangsambung	1590032101	54.166.467,00
17	Puskesmas Kebumen I	1590032112	3.098.057,00
18	Puskesmas Kebumen II	1590032145	34.254.307,00
19	Puskesmas Kebumen III	1590031924	2.579.868,00
20	Puskesmas Klirong I	1590032021	34.512.985,00
21	Puskesmas Klirong II	1590031991	24.666.310,00
22	Puskesmas Kutowinangun	1590032123	62.434.075,00
23	Puskesmas Kuwarasan	1590032098	38.731.206,00
24	Puskesmas Mirit	1590032156	40.323.859,00
25	Puskesmas Padureso	1590031902	3.380.151
26	Puskesmas Pejagoan	1590032167	31.681.333,00
27	Puskesmas Petanahan	1590032190	49.720.826,00
28	Puskesmas Poncowarno	1590031899	3.863.538,00
29	Puskesmas Prembun	1590032076	90.476.580,00
30	Puskesmas Puring	1590032178	1.529.701,00
31	Puskesmas Rowokele	1590032087	152.513.165,00
32	Puskesmas Sadang	1590032054	121.345.557,00
33	Puskesmas Sempor I	1590032032	65.378.585,00
34	Puskesmas Sempor II	1590031888	27.462.548,00
35	Puskesmas Sruweng	1590032189	12.159.042,00
		Jumlah	1.208.402.886,00

5.3.1.1.7 Piutang Pajak

31 Desember 2023	31 Desember 2022
Rp9.358.194.241,00	Rp7.980.512.527,00

Piutang Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang s.d. 31 Desember 2023 belum dibayarkan oleh wajib pajak.

Piutang Pajak per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp1.377.681.714,00 atau 17,26% dari tahun 2022. Piutang Pajak seluruhnya dikelola oleh BPKPD dengan rincian saldo pada tabel berikut.

Tabel 5.3.10 Rincian Piutang Pajak Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Piutang Pajak Hotel	100.000,00	4.790.000,00	(4.690.000,00)	(97,91)
Piutang Pajak Restoran	11.203.485,00	27.837.993,00	(16.634.508,00)	(59,75)
Piutang Pajak Hiburan	7.185.929,00	2.400.000,00	4.785.929,00	199,41
Piutang Pajak Reklame	69.630.797,00	46.236.750,00	23.394.047,00	50,60
Piutang Pajak Parkir	2.347.200,00	4.790.000,00	(2.442.800,00)	(51,00)
Piutang Pajak Air Tanah	9.425.122,00	10.533.100,00	(1.107.978,00)	(10,52)
Piutang Pajak MBLB	2.187.500,00	12.860.000,00	(10.672.500,00)	(82,99)
Piutang PBBP2	9.232.614.208,00	7.870.564.684,00	1.362.049.524,00	17,31
Piutang BPHTB	23.500.000,00	500.000,00	23.000.000,00	4.600,00
Jumlah	9.358.194.241,00	7.980.512.527,00	1.377.681.714,00	17,26

Rincian saldo Piutang Pajak dijelaskan sebagai berikut:

1. Piutang Pajak Hotel

Merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, yang s.d. 31 Desember belum dibayarkan oleh Wajib Pajak.

Saldo Piutang Pajak Hotel per 31 Desember 2023 sebesar Rp100.000,00 dengan mutasi sebagai berikut:

Saldo awal 1 Jan 2023:	Rp4.790.000,00
Mutasi tambah:	
Penetapan SKPD Tahun 2023	Rp2.915.773.634,00
Mutasi kurang:	
Pelunasan atas SKPD Tahun 2023	(Rp2.915.673.634,00)
Pelunasan atas SKPD < Tahun 2023	(Rp4.790.000,00)
Saldo akhir 31 Des 2023:	<u>Rp100.000,00</u>

2. Piutang Pajak Restoran

Merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, yang s.d. 31 Desember belum dibayarkan oleh Wajib Pajak.

Saldo Piutang Pajak Restoran per 31 Desember 2023 sebesar Rp11.203.485,00 dengan mutasi sebagai berikut:

Saldo awal 1 Jan 2023:	Rp27.837.993,00
Mutasi tambah:	
Penetapan SKPD Tahun 2023	Rp2.955.171.946,00
Mutasi kurang:	
Pelunasan atas SKPD Tahun 2023	(Rp2.947.532.326,00)
Pelunasan atas SKPD < Tahun 2023	(Rp24.274.128,00)
Saldo akhir 31 Des 2023:	<u>Rp11.203.485,00</u>

3. Piutang Pajak Hiburan

Merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan atas penyelenggaraan hiburan, yang s.d. 31 Desember belum dibayarkan oleh Wajib Pajak.

Saldo Piutang Pajak Hiburan per 31 Desember 2023 sebesar Rp7.185.929,00 dengan mutasi sebagai berikut :

Saldo awal 1 Jan 2023:	Rp2.400.000,00
Mutasi tambah:	
Penetapan SKPD Tahun 2023	Rp1.134.676.744,00
Mutasi kurang:	
Pelunasan atas SKPD Tahun 2023	(Rp1.127.490.815,00)
Pelunasan atas SKPD < Tahun 2023	(Rp2.400.000,00)
Saldo akhir 31 Des 2023:	<u>Rp7.185.929,00</u>

4. Piutang Pajak Reklame

Merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan atas penyelenggaraan reklame, yang s.d. 31 Desember belum dibayarkan oleh Wajib Pajak.

Saldo Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2023 sebesar Rp69.630.797,00 dengan mutasi sebagai berikut :

Saldo awal 1 Jan 2023:	Rp46.236.750,00
Mutasi tambah:	
Penetapan SKPD Tahun 2023	Rp2.347.637.547,00
Mutasi kurang:	
Pelunasan atas SKPD Tahun 2023	(Rp2.300.319.700,00)
Pelunasan atas SKPD < Tahun 2023	(Rp23.923.800,00)
Saldo akhir 31 Des 2023:	<u>Rp69.630.797,00</u>

5. Piutang Pajak Parkir

Merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor yang s.d. 31 Desember belum dibayarkan oleh Wajib Pajak.

Saldo Piutang Pajak Parkir per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.347.200,00 dengan mutasi sebagai berikut:

Saldo awal 1 Jan 2023:	Rp4.790.000,00
Mutasi tambah:	
Penetapan SKPD Tahun 2023	Rp741.916.899,00
Mutasi kurang:	
Pelunasan atas SKPD Tahun 2023	(Rp740.169.699,00)
Pelunasan atas SKPD < Tahun 2023	(Rp4.190.000,00)
Saldo akhir 31 Des 2023:	<u>Rp2.347.200,00</u>

6. Piutang Pajak Air Tanah

Merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah, yang s.d. 31 Desember belum dibayarkan oleh Wajib Pajak.

Saldo Piutang Pajak Air Tanah per 31 Desember 2023 sebesar Rp9.425.122,00 dengan mutasi sebagai berikut:

Saldo awal 1 Jan 2023:	Rp10.533.100,00
Mutasi tambah:	
Penetapan SKPD Tahun 2023	Rp404.636.500,00
Mutasi kurang:	
Pelunasan atas SKPD Tahun 2023	(Rp397.116.178,00)
Pelunasan atas SKPD < Tahun 2023	(Rp8.628.300,00)
Saldo akhir 31 Des 2023:	<u>Rp9.425.122,00</u>

7. **Piutang Pajak MBLB**
Merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di alam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan, yang s.d. 31 Desember belum dibayarkan oleh Wajib Pajak.
Saldo Piutang Pajak MBLB per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.187.500,00 dengan mutasi sebagai berikut:
- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Saldo awal 1 Jan 2023: | Rp12.860.000,00 |
| Mutasi tambah: | |
| Penetapan SKPD Tahun 2023 | Rp582.341.674,00 |
| Mutasi kurang: | |
| Pelunasan atas SKPD Tahun 2023 | (Rp580.154.174,00) |
| Pelunasan atas SKPD < Tahun 2023 | (Rp12.860.000,00) |
| Saldo akhir 31 Des 2023: | <u>Rp2.187.500,00</u> |
8. **Piutang PBBP2**
Merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan, yang s.d. 31 Desember belum dibayarkan oleh Wajib Pajak.
Saldo Piutang PBBP2 per 31 Desember 2023 sebesar Rp9.228.513.185,00 dengan mutasi sebagai berikut :
- | | |
|----------------------------------|---------------------------|
| Saldo awal 1 Jan 2023: | Rp7.870.564.684,00 |
| Mutasi tambah: | |
| Penetapan SKPD Tahun 2023 | Rp58.347.321.046,00 |
| Mutasi kurang: | |
| Pelunasan atas SKPD Tahun 2023 | (Rp55.860.931.402,00) |
| Pelunasan atas SKPD < Tahun 2023 | (Rp1.124.340.120,00) |
| Saldo akhir 31 Des 2023: | <u>Rp9.232.614.208,00</u> |
9. **Piutang BPHTB**
Merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan untuk pemanfaatan, yang s.d. 31 Desember belum dibayarkan oleh Wajib Pajak.
Saldo Piutang BPHTB per 31 Desember 2023 sebesar Rp23.500.000,00 dengan mutasi sebagai berikut.
- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| Saldo awal 1 Jan 2023: | Rp500.000,00 |
| Mutasi tambah: | |
| Penetapan SKPD Tahun 2023 | Rp16.623.152.046,00 |
| Mutasi kurang: | |
| Pelunasan atas SKPD Tahun 2023 | (Rp16.599.652.046,00) |
| Pelunasan atas SKPD < Tahun 2023 | (Rp500.000,00) |
| Saldo akhir 31 Des 2023: | <u>Rp23.500.000,00</u> |

5.3.1.1.8 Piutang Retribusi

31 Desember 2023	31 Desember 2022
Rp4.359.106.740,00	Rp4.079.655.400,00

Piutang Retribusi merupakan hak Pemkab Kebumen yang berasal dari retribusi daerah, berupa tunggakan retribusi yang belum dibayarkan per 31 Desember 2023 oleh Wajib Retribusi.

Piutang Retribusi per 31 Desember 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp279.451.340,00 atau 6,85% dari tahun 2022. Rincian saldo Piutang Retribusi pada tabel berikut.

Tabel 5.3.11 Rincian Piutang Retribusi Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan				
Dinkes PPKB	24.650.000,00	0,00	24.650.000,00	0,00
Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum				
Disperkimhub	1.072.365.000,00	1.072.365.000,00	0,00	0,00
Piutang Retribusi Pelayanan Pasar				
Disperindag KUKM	1.405.403.636,00	1.083.826.850,00	321.576.786,00	29,67
Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				
Disparbud	1.219.296.750,00	1.160.102.550,00	59.194.200,00	5,10
Kec. Kebumen	49.891.354,00	0,00	49.891.354,00	0,00
Disperkimhub	587.500.000,00	587.500.000,00	0,00	0,00
Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan				
DPUPR	0,00	175.861.000,00	(175.861.000,00)	(100,00)
Jumlah	4.359.106.740,00	4.079.655.400,00	279.451.340,00	6,85

Rincian saldo Piutang Retribusi dijelaskan sebagai berikut:

1. Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan

Merupakan tunggakan retribusi atas pelayanan laboratorium kesehatan oleh Puskesmas pada Dinkes PPKB sebesar Rp24.650.000,00 yang sampai dengan tanggal jatuh tempo pada 31 Desember 2023 belum terbayarkan dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.3.12 Rincian Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun 2023

No	Wajib Retribusi	Masa Retribusi	Tanggal Penetapan	Nilai Piutang (Rp)	Denda (Rp)	Jumlah Piutang (Rp)
1	PDAM Purworejo	April 2023	14/4/2023	6.080.000,00	0,00	6.080.000,00
		Desember 2023	29/12/2023	6.400.000,00	0,00	6.400.000,00
		Desember 2023	29/12/2023	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
		Desember 2023	29/12/2023	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
2	RS PKU Muhammadiyah Petanahan	Desember 2023	7/12/2023	730.000,00	0,00	730.000,00
3	RS PKU Muhammadiyah Sruweng	Desember 2023	28/12/2023	345.000,00	0,00	345.000,00
4	RS PKU Muhammadiyah Gombong	Desember 2023	28/12/2023	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00
5	RS Palang Biru Gombong	Desember 2023	28/12/2023	3.380.000,00	0,00	3.380.000,00
6	RSU Purbowangi	Desember 2023	28/12/2023	1.325.000,00	0,00	1.325.000,00
7	RS Permata Medika	Desember 2023	28/12/2023	540.000,00	0,00	540.000,00
			Jumlah	24.650.000,00	0,00	24.650.000,00

2. Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Merupakan tunggakan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang pengelolaannya dikerjasamakan dengan pihak ketiga yaitu KSU Jalan Persaudaraan berdasarkan Perjanjian Nomor 551.2/0614/II/2019.

Piutang tersebut merupakan tunggakan tahun 2019 sebesar Rp348.735.000,00 dan tunggakan tahun 2020 sebesar Rp723.630.000,00 yang s.d. tanggal 31 Desember 2023 belum dibayarkan.

Saldo Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.072.365.000,00 dengan mutasi sebagai berikut.

Saldo awal 1 Jan 2023: Rp1.072.365.000,00

Mutasi tambah:

Penetapan SKRD Tahun 2023 Rp0,00

Mutasi kurang:

Pelunasan atas SRPD Tahun 2023	(Rp0,00)
Pelunasan atas SKRD < Tahun 2023	(Rp0,00)
Saldo akhir 31 Des 2023:	<u>Rp1.072.365.000,00</u>

3. Piutang Retribusi Pelayanan Pasar
Merupakan tunggakan atas pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar pada Disperindag KUKM, yang s.d. tanggal 31 Desember 2023 belum dibayarkan dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.3.13 Rincian Piutang Pelayanan Pasar Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
UPTD Pasar I				
Tahun 2021	138.718.650,00	171.990.900,00	(33.272.250,00)	(19,35)
Tahun 2022	121.715.750,00	184.777.000,00	(63.061.250,00)	(34,13)
Tahun 2023	195.477.750,00	0,00	195.477.750,00	0,00
UPTD Pasar II				
Tahun 2021	20.676.600,00	28.395.000,00	(7.718.400,00)	(27,18)
Tahun 2022	54.964.200,00	106.783.300,00	(51.819.100,00)	(48,53)
Tahun 2023	97.102.850,00	0,00	97.102.850,00	0,00
UPTD Pasar III				
Tahun 2021	253.060.500,00	253.060.500,00	-	0,00
Tahun 2022	225.344.600,00	314.373.350,00	(89.028.750,00)	(28,32)
Tahun 2023	252.582.500,00	0,00	252.582.500,00	0,00
UPTD Pasar IV				
Tahun 2021	0,00	0,00	-	0,00
Tahun 2022	0,00	24.446.800,00	(24.446.800,00)	(100,00)
Tahun 2023	45.760.236,00	0,00	45.760.236,00	0,00
Jumlah	1.405.403.636,00	1.083.826.850,00	321.576.786,00	29,67

Saldo Piutang Retribusi Pelayanan Pasar per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.405.403.636,00 dengan mutasi sebagai berikut.

Saldo awal 1 Jan 2023:	Rp1.083.826.850,00
Mutasi tambah:	
Penetapan SKRD Tahun 2023	Rp590.923.336,00
Mutasi kurang:	
Pelunasan atas SRPD Tahun 2023	(Rp0,00)
Pelunasan atas SKRD < Tahun 2023	(Rp269.346.550,00)
Saldo akhir 31 Des 2023:	<u>Rp1.405.403.636,00</u>

4. Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Merupakan tunggakan atas pengelolaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada tiga SKPD dengan penjelasan sebagai berikut:
- a. Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan pada Disparbud
Merupakan tunggakan retribusi atas atas sewa kios pada tujuh obyek wisata yang s.d. tanggal 31 Desember 2023 belum terbayarkan dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.3.14 Rincian Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan pada Disparbud Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Goa Jatijajar	142.063.790,00	125.026.590,00	17.037.200,00	13,63
Pantai Logending	104.544.000,00	95.716.000,00	8.828.000,00	9,22
Pantai Karangbolong	5.320.000,00	5.656.000,00	(336.000,00)	(5,94)
Pantai Petanahan	211.718.000,00	190.506.000,00	21.212.000,00	11,13
Pantai Suwuk	749.870.960,00	734.896.960,00	14.974.000,00	2,04
PAP Krakal	3.510.000,00	8.013.000,00	(4.503.000,00)	(56,20)
Waduk Sempor	2.270.000,00	288.000,00	1.982.000,00	688,19
Jumlah	1.219.296.750,00	1.160.102.550,00	59.194.200,00	5,10

Saldo Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan pada Disparbud per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.219.296.750,00 dengan mutasi sebagai berikut.

Saldo awal 1 Jan 2023:	Rp1.160.102.550,00
Mutasi tambah:	
Penetapan SKRD Tahun 2023	Rp270.939.000,00
Mutasi kurang:	
Pelunasan atas SRPD Tahun 2023	(Rp154.481.400,00)
Pelunasan atas SKRD < Tahun 2023	(Rp57.263.400,00)
Saldo akhir 31 Des 2023:	<u>Rp1.219.296.750,00</u>

- b. Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan pada Kec. Kebumen
Merupakan tunggakan retribusi atas sewa tanah eks bengkok kelurahan yang berada di wilayah Kec. Kebumen yang s.d. tanggal 31 Desember 2023 belum terbayarkan dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.3.15 Rincian Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan pada Kec. Kebumen Tahun 2023 dan 2022

No	Kelurahan	Nilai Sewa (Rp)	Pembayaran Tahun 2023		Piutang (Rp)
			Nilai (Rp)	Tanggal	
1	Bumirejo	31.429.000,00	20.000.000,00	12-Sep-23	3.429.000,00
			8.000.000,00	20-Nov-23	
2	Panjer	25.652.650,00	5.025.000,00	31-Dec-23	20.627.650,00
3	Selang	35.834.704,00	10.000.000,00	30-Oct-23	25.834.704,00
	Jumlah	92.916.354,00	43.025.000,00		49.891.354,00

- c. Retribusi Penyewaan Bangunan pada Disperkimhub
Merupakan tunggakan retribusi atas sewa Kios Terminal Tipe A yang s.d. tanggal 31 Desember 2023 belum terbayarkan dengan mutasi sebagai berikut.

Saldo awal 1 Jan 2023:	Rp587.500.000,00
Mutasi tambah:	
Penetapan SKRD Tahun 2023	Rp0,00
Mutasi kurang:	
Pelunasan atas SRPD Tahun 2023	(Rp0,00)
Pelunasan atas SKRD < Tahun 2023	(Rp0,00)
Saldo akhir 31 Des 2023:	<u>Rp587.500.000,00</u>

5.3.1.1.9 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

31 Desember 2023	31 Desember 2022
------------------	------------------

Rp21.073.792.846,36	Rp20.390.647.936,94
----------------------------	----------------------------

Piutang Lain-lain PAD yang Sah merupakan hak Pemkab Kebumen yang belum diterima karena telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihannya namun s.d akhir periode pelaporan belum dilunasi.

Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp683.144.909,42 atau 3,35% dari tahun 2022. Rincian saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah pada tabel berikut.

Tabel 5.3.16 Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	598.750.401,00	624.230.401,00	(25.480.000,00)	(4,08)
Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	3.300.708.525,36	2.665.717.308,94	634.991.216,42	23,82
Piutang Pendapatan BLUD	17.174.333.920,00	17.100.700.227,00	73.633.693,00	0,43
Jumlah	21.073.792.846,36	20.390.647.936,94	683.144.909,42	3,35

Rincian saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah dijelaskan sebagai berikut:

1. Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

Merupakan Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.3.17 Rincian Piutang Pengelolaan Dana Bergulir Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Piutang dari Jasa Investasi Dana Bergulir (Pengguliran 2005-2008)	24.178.000,00	24.178.000,00	0,00	0,00
Piutang Dana Bergulir Eks Disperindagkop	574.572.401,00	600.052.401,00	(25.480.000,00)	(4,25)
Jumlah	598.750.401,00	624.230.401,00	(25.480.000,00)	(4,08)

- a. Piutang dari Jasa Investasi Dana Bergulir (Pengguliran 2005-2008) sebesar Rp24.178.000,00 dikelola oleh Distapang dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.3.18 Rincian Piutang dari Jasa Investasi Dana Bergulir Tahun 2023

No	Tahun Perguliran	Sisa Pinjaman per 31 Desember 2023		
		Pokok (Rp)	Jasa (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2005	1.000.000,00	1.600.000,00	2.600.000,00
2	2006	94.487.000,00	7.278.000,00	101.765.000,00
3	2007	70.500.000,00	3.000.000,00	73.500.000,00
4	2008	161.945.000,00	12.300.000,00	174.245.000,00
	Jumlah	327.932.000,00	24.178.000,00	352.110.000,00

Atas piutang pokok disajikan pada catatan nomor 5.3.1.2.1 akun Investasi Jangka Panjang Non Permanen yaitu sebesar Rp327.932.000,00 dan telah disisihkan sebesar 100% sehingga disajikan sebesar nilai bersih (NRV) yaitu Rp0,00.

- b. Piutang Dana Bergulir Eks Disperindagkop sebesar Rp574.572.401,00 merupakan piutang yang pada tahun 2012 telah dilimpahkan pengurusannya ke Kantor Pengurusan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto. Perkembangan per 31 Desember 2023, dari 112 debitur terdapat 71 debitur dinyatakan tidak aktif dan 41 debitur aktif. Pada Tahun 2023 terdapat pelunasan dari tiga debitur yang difasilitasi oleh KPKNL dengan kegiatan *Crash Program* Keringanan Utang Tahun 2023 sebesar Rp25.480.000,00 yang terdiri dari pokok pembayaran sebesar Rp6.739.744,00 dan keringanan sebesar Rp18.740.256,00, dengan rincian pelunasan pada tabel berikut.

Tabel 5.3.19 Rincian Pelunasan Piutang Dana Bergulir Eks Disperindagkop Tahun 2023

No	Nama Debitur	SP3N (Rp)	Pelunasan (Rp)		
			Pembayaran	Keringanan	Jumlah
1	Suwarno	8.830.000,00	1.795.200,00	7.034.800,00	8.830.000,00
2	Pipit Sutiyah	11.200.000,00	2.400.000,00	8.800.000,00	11.200.000,00
3	Kel. Masyarakat Khoirul Umur (Ketua : Munajat)	5.450.000,00	2.544.544,00	2.905.456,00	5.450.000,00
	Jumlah	25.480.000,00	6.739.744,00	18.740.256,00	25.480.000,00

Berdasarkan pelunasan atas tiga debitur tersebut maka nilai Piutang Dana Bergulir eks. Disperindagkop per 31 Desember 2023 menjadi sebesar Rp574.572.501,00 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.3.20 Rincian Piutang Dana Bergulir Eks Disperindagkop per 31 Desember 2023

No.	Tahun Pengguliran	Saldo (Rp)			
		Pokok	Jasa Pinjaman	Pelunasan	Jumlah
I	Perguliran				
1	Tahun 2000	116.674.500,00	11.711.500,00	25.480.000,00	102.906.000,00
2	Tahun 2002	45.434.500,00	4.719.500,00	0,00	50.154.000,00
3	Tahun 2003	120.474.700,00	13.730.000,00	0,00	134.204.700,00
5	Tahun 2005	41.313.455,00	7.179.000,00	0,00	48.492.455,00
6	Tahun 2006	37.263.409,00	6.993.700,00	0,00	44.257.109,00
7	Tahun 2007	60.633.137,00	7.950.000,00	0,00	68.583.137,00
	Sub Jumlah I	421.793.701,00	52.283.700,00	25.480.000,00	448.597.401,00
II	Digulirkan Kembali				
1	Tahun 2001	34.005.000,00	3.345.000,00	0,00	37.350.000,00
2	Tahun 2002	33.481.000,00	3.350.000,00	0,00	36.831.000,00
3	Tahun 2005	8.990.000,00	1.050.000,00	0,00	10.040.000,00

No.	Tahun Penggulfiran	Saldo (Rp)			
		Pokok	Jasa Pinjaman	Pelunasan	Jumlah
5	Tahun 2006	11.435.000,00	1.129.000,00	0,00	12.564.000,00
6	Tahun 2007	7.450.000,00	1.840.000,00	0,00	9.290.000,00
7	Tahun 2008	16.100.000,00	3.800.000,00	0,00	19.900.000,00
	Sub Jumlah II	111.461.000,00	14.514.000,00	0,00	125.975.000,00
	Jumlah	533.254.701,00	66.797.700,00	25.480.000,00	574.572.401,00

2. Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah
Merupakan piutang yang dikelola oleh BPKPD, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.3.21 Rincian Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Piutang Pendapatan Denda Pajak Hotel	2.000,00	12.000,00	(10.000,00)	(83,33)
Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran	2.256.159,00	1.670.280,00	585.879,00	35,08
Piutang Pendapatan Denda Pajak Hiburan	1.269.467,22	48.000,00	1.221.467,22	2.544,72
Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame	10.502.548,86	6.852.813,00	3.649.735,86	53,26
Piutang Pendapatan Denda Pajak Parkir	386.888,00	397.000,00	(10.112,00)	(2,55)
Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	1.304.219,00	1.034.614,00	269.605,00	26,06
Piutang Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	43.750,00	159.300,00	(115.550,00)	(72,54)
Piutang Pendapatan Denda PBBP2	3.282.313.493,28	2.655.523.301,94	626.790.191,34	23,60
Piutang Pendapatan Denda BPHTB	2.630.000,00	20.000,00	2.610.000,00	13.050,00
Jumlah	3.300.708.525,36	2.665.717.308,94	634.991.216,42	23,82

3. Piutang Pendapatan BLUD
Piutang Pendapatan BLUD merupakan tagihan jasa pelayanan kesehatan terhadap pasien yang telah mendapatkan pelayanan yang dapat dijadikan kas namun sampai dengan tanggal neraca belum diterima dan diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun.

Tabel 5.3.22 Rincian Piutang Pendapatan BLUD Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
RSUD Dr. Soedirman	11.091.782.647,00	12.049.027.394,00	(957.244.747,00)	(7,94)
RSUD Prembun	5.420.489.548,00	4.533.360.233,00	887.129.315,00	19,57
Puskesmas	662.061.725,00	518.312.600,00	143.749.125,00	27,73
Jumlah	17.174.333.920,00	17.100.700.227,00	73.633.693,00	0,43

Rincian saldo Piutang Pendapatan BLUD dijelaskan sebagai berikut:

- a. Piutang Pendapatan BLUD RSUD dr. Soedirman
Rincian Piutang Pendapatan BLUD RSUD dr. Soedirman disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.23 Rincian Piutang Pendapatan BLUD RSUD dr. Soedirman Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Piutang Umum	2.121.748.456,00	2.204.871.630,00	(83.123.174,00)	(3,77)
BPJS	8.565.774.946,00	8.218.011.029,00	347.763.917,00	4,23
KEMENKES	99.160.200,00	1.307.368.900,00	(1.208.208.700,00)	(92,42)
Piutang Jasa Raharja	12.945.620,00	629.366,00	12.316.254,00	1.956,93
Piutang Jamkesda	0,00	166.327.610,00	(166.327.610,00)	(100,00)
Piutang Radiologi dan Laboratorium	102.816.000,00	75.763.683,00	27.052.317,00	35,71
Piutang Jampersal	65.559.900,00	0,00	65.559.900,00	0,00

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Piutang Sewa	20.178.781,00	29.628.033,00	(9.449.252,00)	(31,89)
Piutang TCM	11.200.000,00	25.500.000,00	(14.300.000,00)	(56,08)
Piutang Obat	1.964.435,00	4.374.366,00	(2.409.931,00)	(55,09)
Piutang JKK	90.434.309,00	16.552.777,00	73.881.532,00	446,34
Jumlah	13.213.531.103,00	14.253.899.024,00	(1.040.367.921,00)	(7,30)

Piutang BPJS dan Piutang Kemenkes yang disajikan merupakan piutang atas data/klaim yang sudah terverifikasi.

b. Piutang Pendapatan BLUD RSUD Prembun

Rincian Piutang Pendapatan BLUD RSUD Prembun disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.24 Rincian Piutang Pendapatan BLUD RSUD Prembun Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Piutang Klaim Covid / Kemenkes	47.169.000,00	555.555.900,00	(508.386.900,00)	(91,51)
Piutang BPJS	5.154.947.127,00	3.767.196.252,00	1.387.750.875,00	36,84
Piutang Jasa Raharja	5.329.599,00	10.011.896,00	(4.682.297,00)	(46,77)
Piutang KB Implan	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
Piutang Umum	186.118.822,00	162.846.185,00	23.272.637,00	14,29
Piutang TCM Laboratorium	26.425.000,00	37.750.000,00	(11.325.000,00)	(30,00)
Jumlah	5.420.489.548,00	4.533.360.233,00	887.129.315,00	19,57

Piutang BPJS dan Piutang Kemenkes yang disajikan merupakan piutang atas data/klaim yang sudah terverifikasi.

c. Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas

Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas yang disajikan merupakan Piutang BPJS yang sudah terverifikasi, dengan rincian per Puskesmas pada tabel berikut.

Tabel 5.3.25 Rincian Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Puskesmas Adimulyo	9.865.000,00	6.200.000,00	3.665.000,00	59,11
Puskesmas Alian	42.854.900,00	25.192.000,00	17.662.900,00	70,11
Puskesmas Ambal I	52.000.875,00	20.744.400,00	31.256.475,00	150,67
Puskesmas Ambal II	6.410.000,00	7.000.000,00	(590.000,00)	(8,43)
Puskesmas Ayah I	58.270.000,00	47.230.000,00	11.040.000,00	23,37
Puskesmas Ayah II	9.030.000,00	4.605.000,00	4.425.000,00	96,09
Puskesmas Bonorowo	8.110.000,00	6.560.000,00	1.550.000,00	23,63
Puskesmas Buayan	13.725.000,00	27.425.000,00	(13.700.000,00)	(49,95)
Puskesmas Buluspesantren I	5.482.100,00	3.415.000,00	2.067.100,00	60,53
Puskesmas Buluspesantren II	11.230.000,00	10.665.000,00	565.000,00	5,30
Puskesmas Gombang I	14.340.000,00	12.035.000,00	2.305.000,00	19,15
Puskesmas Gombang II	1.785.000,00	3.230.000,00	(1.445.000,00)	(44,74)
Puskesmas Karanganyar	64.140.000,00	51.926.200,00	12.213.800,00	23,52
Puskesmas Karanggayam I	12.080.000,00	7.130.000,00	4.950.000,00	69,42
Puskesmas Karanggayam II	14.020.000,00	3.785.000,00	10.235.000,00	270,41
Puskesmas Karangsambung	63.750.000,00	52.920.000,00	10.830.000,00	20,46
Puskesmas Kebumen I	8.315.000,00	5.415.000,00	2.900.000,00	53,55
Puskesmas Kebumen II	18.630.000,00	15.315.000,00	3.315.000,00	21,65
Puskesmas Kebumen III	11.000.000,00	13.715.000,00	(2.715.000,00)	(19,80)
Puskesmas Klirong I	9.509.000,00	6.125.000,00	3.384.000,00	55,25
Puskesmas Klirong II	12.081.000,00	10.805.000,00	1.276.000,00	11,81
Puskesmas Kutowinangun	44.160.000,00	45.518.000,00	(1.358.000,00)	(2,98)
Puskesmas Kuwarasan	4.695.000,00	5.710.000,00	(1.015.000,00)	(17,78)
Puskesmas Mirit	35.863.850,00	24.655.000,00	11.028.850,00	44,73
Puskesmas Padureso	10.800.000,00	11.925.000,00	(1.125.000,00)	(9,43)
Puskesmas Pejagoan	35.525.000,00	31.190.000,00	4.335.000,00	13,90
Puskesmas Petanahan	34.410.000,00	19.267.000,00	15.143.000,00	78,60
Puskesmas Poncowarno	4.445.000,00	6.595.000,00	(2.150.000,00)	(32,60)

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Puskesmas Prembun	2.875.000,00	1.580.000,00	1.295.000,00	81,96
Puskesmas Puring	8.870.000,00	6.290.000,00	2.580.000,00	41,02
Puskesmas Rowokele	9.945.000,00	3.300.000,00	6.645.000,00	201,36
Puskesmas Sadang	5.355.000,00	5.650.000,00	(295.000,00)	(5,22)
Puskesmas Sempor I	7.500.000,00	6.895.000,00	605.000,00	8,77
Puskesmas Sempor II	4.290.000,00	5.010.000,00	(720.000,00)	(14,37)
Puskesmas Sruweng	6.880.000,00	3.290.000,00	3.590.000,00	109,12
Jumlah	662.061.725	518.312.600,00	143.749.125,00	27,73

5.3.1.1.10 Piutang Transfer Pemerintah Pusat

31 Desember 2023 31 Desember 2022

Rp0,00

Rp0,00

Berdasarkan PMK Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2022, diketahui bahwa Kabupaten Kebumen terdapat Kurang Bayar dan Lebih bayar DBH dengan rincian sebagai berikut:

1. Kurang Bayar DBH sebesar Rp687.551.921,00 yang terdiri dari DBH Pajak sebesar Rp584.969,00 dan DBH SDA sebesar Rp686.966.952,00;
2. Lebih Bayar DBH s.d. TA 2021 sebesar Rp1.224.665.922,00 yang terdiri dari DBH Pajak sebesar Rp884.878.188,00 dan DBH SDA sebesar Rp339.787.734,00;
3. Lebih Bayar DBH TA 2022 sebesar Rp2.750.270.177,00 yang terdiri dari DBH Pajak sebesar Rp2.279.133.535,00 dan DBH SDA sebesar Rp471.136.642,00.

Namun, nilai tersebut tidak dicantumkan dalam perhitungan pada Laporan Keuangan Pemkab Kebumen.

5.3.1.1.11 Piutang Transfer Antar Daerah

31 Desember 2023 31 Desember 2022

Rp6.047.212.575,00

Rp3.437.968.245,00

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya merupakan Alokasi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dari Provinsi yang s.d. tanggal 31 Desember 2023 belum diterima Pemkab Kebumen berdasarkan Surat Kepala Bapenda Provinsi Jawa Tengah tanggal 31 Januari 2024 Nomor 971.1/01585 kepada Kepala BPKAD/BAKEUDA/BKD/BPPKAD se-Provinsi Jawa Tengah tentang Pemberitahuan Kurang/Lebih Salur Bagi Hasil Pajak Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah TA 2023.

Berdasarkan hasil rekonsiliasi dengan Pemprov Jawa Tengah sesuai Berita Acara Rekonsiliasi Nomor 24/BA-RKN/KAB-KOTA/I/2024, diketahui nilai Piutang Bagi Hasil Pajak sebesar Rp6.047.212.575,00

Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp2.609.244.330,00 atau 75,89% dari tahun 2022, dengan rincian saldo pada tabel berikut.

Tabel 5.3.26 Rincian Piutang Transfer Antar Daerah Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
PKB	1.551.509.353,00	1.161.536.538,00	389.972.815,00	33,57
BBNKB	569.895.323,00	521.965.387,00	47.929.936,00	9,18
PBBKB	3.902.884.689,00	1.673.572.649,00	2.229.312.040,00	133,21
PAP	22.923.210,00	80.893.671,00	(57.970.461,00)	(71,66)
Jumlah	6.047.212.575,00	3.437.968.245,00	2.609.244.330,00	75,89

5.3.1.1.12 Penyisihan Piutang

31 Desember 2023

31 Desember 2022

(Rp10.866.464.784,45)

(Rp9.170.645.322,50)

Penyisihan Piutang merupakan estimasi atas jumlah piutang yang diperkirakan tak tertagih berdasarkan metode penghitungan penyisihan menurut umur piutang (*aging schedule*). Besarnya Penyisihan Piutang pada tiap akhir tahun ditentukan berdasarkan umur piutang sesuai jenisnya.

Penyisihan Piutang per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar (Rp1.695.819.461,95) atau 18,49% dari tahun 2022. Rincian saldo Penyisihan Piutang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.3.27 Rincian Penyisihan Piutang Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Penyisihan Piutang Pajak	(3.156.357.708,57)	(2.245.713.234,00)	(910.644.474,57)	40,55
Penyisihan Piutang Retribusi	(3.930.759.507,88)	(3.505.327.431,50)	(425.432.076,38)	12,14
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(3.779.347.568,00)	(3.419.604.657,00)	(359.742.911,00)	10,52
Jumlah	(10.866.464.784,45)	(9.170.645.322,50)	(1.695.819.461,95)	18,49

Rincian saldo Penyisihan Piutang dijelaskan sebagai berikut:

1. Penyisihan Piutang Pajak

Besaran Penyisihan Piutang Pajak Daerah diatur dalam Perbup Kebumen Nomor 89 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perbup Kebumen Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemkab Kebumen yaitu:

- Kualitas Lancar: umur piutang kurang dari 1 tahun, nilai penyisihan piutangnya sebesar 0,5% dari nilai piutang dengan kualitas lancar;
- Kualitas Kurang Lancar: umur piutang 1 s.d. 2 tahun, nilai penyisihan piutangnya sebesar 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar;
- Kualitas Diragukan: umur piutang 2 s.d. 5 tahun, nilai penyisihan piutangnya sebesar 50% dari piutang dengan kualitas diragukan; dan
- Kualitas Macet: umur piutang lebih dari 5 tahun, nilai penyisihan piutangnya sebesar 100% dari piutang dengan kualitas macet.

Saldo Piutang, Penyisihan Piutang, dan NRV Piutang per jenis Piutang Pajak disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.3.28 Rincian Saldo Piutang, Penyisihan Piutang, dan NRV Piutang per Jenis Piutang Pajak Tahun 2023

Uraian	Nilai Piutang (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	NRV Piutang (Rp)
Piutang Pajak Hotel	100.000,00	500,00	99.500,00
Piutang Pajak Restoran	11.203.485,00	1.526.584,60	9.676.900,40
Piutang Pajak Hiburan	7.185.929,00	35.929,65	7.149.999,36
Piutang Pajak Reklame	69.630.797,00	6.864.144,24	62.766.652,77
Piutang Pajak Parkir	2.347.200,00	608.736,00	1.738.464,00
Piutang Pajak Air Tanah	9.425.122,00	935.241,61	8.489.880,39
Piutang Pajak MBLB	2.187.500,00	10.937,50	2.176.562,50
Piutang PBBP2	9.232.614.208,00	3.146.258.133,82	6.086.356.074,18
Piutang BPHTB	23.500.000,00	117.500,00	23.382.500,00
Jumlah	9.358.194.241,00	3.156.357.707,41	6.201.836.533,59

Perhitungan Penyisihan Piutang Pajak Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.29 Rincian Perhitungan Penyisihan Piutang Pajak Tahun 2023

Uraian	Saldo Piutang Tahun 2023 (Rp)	Kualitas Piutang			
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
Piutang Pajak Hotel	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Pajak Restoran	11.203.485,00	7.639.620,00	733.865,00	2.830.000,00	0,00

Uraian	Saldo Piutang Tahun 2023 (Rp)	Kualitas Piutang			
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
Piutang Pajak Hiburan	7.185.929,00	7.185.929,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Pajak Reklame	69.630.797,00	47.317.847,00	11.322.300,00	10.990.650,00	0,00
Piutang Pajak Parkir	2.347.200,00	1.747.200,00	0,00	0,00	600.000,00
Piutang Pajak Air Tanah	9.425.122,00	7.520.322,00	136900,00	1.767.900,00	0,00
Piutang Pajak MBLB	2.187.500,00	2.187.500,00	0,00	0,00	0,00
Piutang PBBP2	9.232.614.208,00	2.486.389.644,00	1.460.825.091,00	4.595.311.593,00	690.087.880,00
Piutang BPHTB	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	9.358.194.241,00	2.583.588.062,00	1.473.018.156,00	4.610.900.143,00	690.687.880,00
% Penyisihan Piutang		0,5%	10%	50%	100%
Nilai Penyisihan Piutang	3.156.357.707,41	12.917.940,31	147.301.815,60	2.305.450.071,50	690.687.880,00
Net Realizable Value (NRV)	6.201.836.533,59	2.570.670.121,69	1.325.716.340,40	2.305.450.071,50	0,00

2. Penyisihan Piutang Retribusi

Besaran Penyisihan Piutang Retribusi berdasarkan Perbup Kebumen Nomor 89 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perbup Kebumen Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemkab Kebumen, yaitu:

- Kualitas Lancar: umur piutang kurang dari 0 s.d. 1 bulan, nilai penyisihan piutangnya sebesar 0,5% dari piutang dengan kualitas lancar;
- Kualitas Kurang Lancar: umur piutang 1 s.d. 3 bulan, nilai penyisihan piutangnya sebesar 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar;
- Kualitas Diragukan: umur piutang 3 s.d. 12 bulan, nilai penyisihan piutangnya sebesar 50% dari piutang dengan kualitas diragukan; dan
- Kualitas Macet: umur piutang lebih dari 12 bulan, nilai penyisihan piutangnya sebesar 100% dari piutang dengan kualitas macet.

Saldo Piutang, Penyisihan Piutang, dan NRV Piutang per jenis Piutang Retribusi disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.3.30 Rincian Saldo Piutang, Penyisihan Piutang, dan NRV Piutang per Jenis Piutang Retribusi Tahun 2023

Uraian	Nilai Piutang (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	NRV Piutang (Rp)
Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan			
Dinkes PPKB	24.650.000,00	123.250,00	24.526.750,00
Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum			
Disperkimhub	1.072.365.000,00	1.072.365.000,00	0,00
Piutang Retribusi Pelayanan Pasar			
Disperindag KUKM	1.405.403.636,00	1.092.067.972,88	313.335.663,12
Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah			
Disparbud	1.219.296.750,00	1.161.067.950,00	58.228.800,00
Kec. Kebumen	49.891.354,00	17.635.335,00	32.256.019,00
Disperkimhub	587.500.000,00	587.500.000,00	0,00
Jumlah	4.359.106.740,00	3.930.759.507,88	428.347.232,12

Perhitungan Penyisihan Piutang Retribusi Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.31 Rincian Perhitungan Penyisihan Piutang Pajak Tahun 2023

Uraian	Saldo Piutang Tahun 2023 (Rp)	Kualitas Piutang			
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan					
Dinkes PPKB	24.650.000,00	24.650.000,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum					
Disperkimhub	1.072.365.000,00	0,00	0,00	0,00	1.072.365.000,00
Piutang Retribusi Pelayanan Pasar - Disperindag KUKM					
UPTD Pasar I	195.477.750,00	4.502.000,00	13.646.250,00	177.329.500,00	0,00
UPTD Pasar II	97.102.850,00	1.983.600,00	10.205.850,00	84.913.400,00	0,00

Uraian	Saldo Piutang Tahun 2023 (Rp)	Kualitas Piutang			
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
UPTD Pasar III	1.067.062.800,00	8.031.000,00	12.850.500,00	217.036.000,00	829.145.300,00
UPTD Pasar IV	45.760.236,00	2.910.936,00	4.747.062,00	38.102.238,00	0,00
Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah					
Disparbud					
- Goa Jatijajar	142.063.790,00	0,00	0,00	32.403.600,00	109.660.190,00
- Pantai Logending	104.544.000,00	0,00	0,00	16.284.000,00	88.260.000,00
- Pantai Karangbolong	5.320.000,00	0,00	0,00	0,00	5.320.000,00
- Pantai Petanahan	211.718.000,00	0,00	0,00	37.728.000,00	173.990.000,00
- Pantai Suwuk	749.870.960,00	0,00	0,00	25.612.000,00	724.258.960,00
- PAP Krakal	3.510.000,00	0,00	0,00	2.160.000,00	1.350.000,00
- Waduk Sempor	2.270.000,00	0,00	0,00	2.270.000,00	0,00
Kec. Kebumen					
- Kel. Bumirejo	3.429.000,00	2.259.000,00	0,00	1.170.000,00	0,00
- Kel. Panjer	20.627.650,00	4.643.100,00	4.477.800,00	11.506.750,00	0,00
- Kel. Selang	25.834.704,00	4.247.845,00	0,00	21.586.859,00	0,00
Disperkimhub	587.500.000,00	0,00	0,00	0,00	587.500.000,00
Jumlah	4.359.106.740,00	53.227.481,00	45.927.462,00	668.102.347,00	3.591.849.450,00
% Penyisihan Piutang		0,5%	10%	50%	100%
Nilai Penyisihan Piutang	3.930.759.507,11	266.137,41	4.592.746,20	334.051.173,50	3.591.849.450,00
Net Realizable Value (NRV)	428.347.232,90	52.961.343,60	41.334.715,80	334.051.173,50	0,00

3. Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Saldo Piutang, Penyisihan Piutang, dan NRV Piutang per jenis Piutang Lain-lain PAD yang Sah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.3.32 Rincian Saldo Piutang, Penyisihan Piutang, dan NRV Piutang per Jenis Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2023

Uraian	Nilai Piutang (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	NRV Piutang (Rp)
Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	598.750.501,00	598.750.401,00	100,00
Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	3.300.708.525,36	1.489.438.562,00	1.811.269.963,36
Piutang Pendapatan BLUD	17.172.253.920,00	1.691.158.605,00	15.481.095.315,00
Jumlah	21.071.712.946,36	3.779.347.568,00	17.292.365.378,36

Perhitungan Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.33 Rincian Perhitungan Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2023

Uraian	Saldo Piutang Tahun 2023 (Rp)	Kualitas Piutang			
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir					
<i>Piutang dari Jasa Investasi Dana Bergulir (Pengguliran 2005-2008)</i>					
- 2005	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
- 2006	7.278.000,00	0,00	0,00	0,00	7.278.000,00
- 2007	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
- 2008	12.300.000,00	0,00	0,00	0,00	12.300.000,00
<i>Piutang Dana Bergulir Eks Disperindagkop</i>					
- Perguliran 2000	102.906.000,00	0,00	0,00	0,00	102.906.000,00
- Perguliran 2002	50.154.000,00	0,00	0,00	0,00	50.154.000,00
- Perguliran 2003	134.204.700,00	0,00	0,00	0,00	134.204.700,00
- Perguliran 2005	48.492.455,00	0,00	0,00	0,00	48.492.455,00
- Perguliran 2006	44.257.109,00	0,00	0,00	0,00	44.257.109,00
- Perguliran 2007	68.583.137,00	0,00	0,00	0,00	68.583.137,00
- Digulirkan Kembali 2001	37.350.000,00	0,00	0,00	0,00	37.350.000,00

Uraian	Saldo Piutang Tahun 2023 (Rp)	Kualitas Piutang			
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
- Digulirkan Kembali 2002	36.831.000,00	0,00	0,00	0,00	36.831.000,00
- Digulirkan Kembali 2005	10.040.000,00	0,00	0,00	0,00	10.040.000,00
- Digulirkan Kembali 2006	12.564.000,00	0,00	0,00	0,00	12.564.000,00
- Digulirkan Kembali 2007	9.290.000,00	0,00	0,00	0,00	9.290.000,00
- Digulirkan Kembali 2008	19.900.000,00	0,00	0,00	0,00	19.900.000,00
Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah					
Piutang Denda Pajak Hotel	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Denda Pajak Restoran	2.256.159,20	545.504,00	352.255,00	1.358.400,00	0,00
Piutang Denda Pajak Hiburan	1.269.467,22	1.269.467,22	0,00	0,00	0,00
Piutang Denda Pajak Reklame	10.502.548,86	2.163.317,86	3.063.720,00	5.275.512,00	0,00
Piutang Denda Pajak Parkir	386.888,00	98.888,00	0,00	0,00	288.000,00
Piutang Denda Pajak Air Tanah	1.304.218,60	420.033,00	35.594,00	848.592,00	0,00
Piutang Denda Pajak MBLB	43.750,00	43.750,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Denda PBBP2	3.282.313.493,28	248.640.836,00	496.680.828,00	2.205.749.656,00	331.242.173,28
Piutang Denda BPHTB	2.630.000,00	2.630.000,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Pendapatan BLUD					
Piutang Umum RSUD dr. Soedirman	2.121.748.456,00	27.207.484,00	276.579.201,00	489.549.885,00	1.328.411.886,00
Piutang Umum RSUD Prembun	186.118.822,00	13.402.592,00	40.463.629,00	92.376.316,00	92.376.316,00
Jumlah	5.632.753.803,16	296.423.872,08	817.175.227,00	2.795.158.361,00	2.351.068.776,28
% Penyisihan Piutang		0,5%	10%	50%	100%
Nilai Penyisihan Piutang		1.482.119,36	81.717.522,70	1.397.579.180,50	2.351.068.776,28
Net Realizable Value (NRV)		294.941.752,72	735.457.704,30	1.397.579.180,50	0,00

Piutang Pendapatan BLUD yang diperhitungkan penyisihan piutangnya hanya piutang umum.

5.3.1.1.13 Beban Dibayar Dimuka

31 Desember 2023

31 Desember 2022

Rp33.705.587,11

Rp63.096.715,00

Beban Dibayar DiMuka adalah biaya yang dibayar sebelum aset tersebut digunakan di masa mendatang atau sebelum jatuh tempo. Biaya tersebut tidak dibebankan secara langsung pada periode bersangkutan karena belum menjadi beban untuk periode tersebut.

Beban Dibayar DiMuka per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp29.391.127,89 atau 46,58% dari tahun 2022. Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp33.705.587,11 seluruhnya atas asuransi kendaraan dinas pada BPKPD dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.3.34 Rincian Beban Dibayar Dimuka TA 2023

Uraian Beban	No. & Tanggal Dokumen Bukti Pengeluaran	Nilai Beban (Rp)	Jangka Waktu	Masa Manfaat (bulan)	Sisa Masa Manfaat (bulan)	Nilai Beban Dibayar Dimuka (Rp)
Beban Jasa Premi Kendaraan Dinas (5 unit)	12.200.0025.32483 4/7/2022	49.868.240,00	23-04-2022 s.d 23-04-2024	24	4	8.311.373,33
Beban Jasa Premi Kendaraan Dinas (2 unit)	12.200.006.355.461 8/25/2022	29.837.640,00	23-08-2022 s.d 23-08-2025	36	20	16.576.466,67
Beban Jasa Premi Kendaraan Dinas (2 unit)	12.300.000.887.408 3/28/2023	19.839.931,00	24-03-2023 s.d 20-09-2024	18	8	8.817.747,11
	Jumlah	99.545.811,00				33.705.587,11

5.3.1.1.14 Persediaan

31 Desember 2023

31 Desember 2022

Rp51.568.005.606,60

Rp59.569.450.839,32

Saldo Persediaan menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat pakai habis dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemda. Saldo Persediaan terdiri dari barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di SKPD.

Sesuai Perbup Kebumen Nomor 89 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perbup Kebumen Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemkab Kebumen, Persediaan dicatat dengan metode periodik, yang artinya akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan.

Persediaan per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp8.001.445.232,72 atau 13,43% dari tahun 2022. Seluruh saldo Persediaan merupakan Persediaan Bahan Pakai Habis dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.3.35 Rincian Persediaan Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Bahan				
Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.222.980.552,41	221.930.655,00	1.001.049.897,41	451,06
Bahan Kimia	3.287.271.282,00	3.480.687.148,00	(193.415.866,00)	(5,56)
Bahan Bakar dan Pelumas	-	23.630.000,00	(23.630.000,00)	(100,00)
Bahan Baku	293.644.000,00	364.983.434,00	(71.339.434,00)	(19,55)
Isi Tabung Pemadam Kebakaran	-	825.000,00	(825.000,00)	(100,00)
Isi Tabung Gas	60.996.000,00	53.814.000,00	7.182.000,00	13,35
Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	900.000,00	900.000,00	-	0,00
Bahan Lainnya	1.754.085.534,51	2.937.503.844,73	(1.183.418.310,22)	(40,29)
Suku Cadang				
Suku Cadang Alat Kedokteran	2.208.583.993,52	230.707.019,00	1.977.876.974,52	857,31
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor				
Alat Tulis Kantor	976.751.592,01	863.478.764,50	113.272.827,51	13,12
Kertas dan Cover	451.373.887,49	86.103.576,00	365.270.311,49	424,22
Bahan Cetak	1.153.779.366,22	1.802.377.517,00	(648.598.150,78)	(35,99)
Benda Pos	38.988.140,00	26.507.052,00	12.481.088,00	47,09
Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	-	3.412.800,00	(3.412.800,00)	(100,00)

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Bahan Komputer	314.800.842,72	822.165.425,00	(507.364.582,28)	(61,71)
Perabot Kantor	265.214.170,00	74.291.529,00	190.922.641,00	256,99
Alat Listrik	758.478.524,52	1.527.480.784,00	(769.002.259,48)	(50,34)
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	159.626.391,66	467.686.025,00	(308.059.633,34)	(65,87)
Obat-obatan				
Obat	35.547.000.768,99	44.349.712.244,19	(8.802.711.475,20)	(19,85)
Obat-obatan Lainnya	2.637.218.861,55	1.385.257.660,00	1.251.961.201,55	90,38
Natura dan Pakan				
Natura	436.311.699,00	845.996.361,90	(409.684.662,90)	(48,43)
Jumlah	51.568.005.606,60	59.569.450.839,32	(8.001.445.232,72)	(13,43)

Persediaan dalam Neraca tidak mencatat persediaan barang kedaluwarsa sebesar Rp2.071.446.245,63 yang belum dimusnahkan.

Dalam rangka penanggulangan anemia pada remaja yang berdampak pada kualitas kesehatan dan prestasi belajar serta berkontribusi dalam penurunan stunting, AKI dan AKB, Pemerintah telah melaksanakan program suplementasi TTD pada remaja putri di tingkat SMP/SMA/ sederajat. Kementerian Kesehatan dan Pemprov Jawa Tengah memberikan bantuan berupa *Gerlink Antropometri* kepada Dinkes PPKB Kabupaten Kebumen sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor BJ.01.04./PPK4.1/176/2023 tanggal 7 September 2023 dan Nomor 028/10591 tanggal 21 Juli 2023 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.3.36 Daftar Persediaan Hibah dari Kementerian Kesehatan dan Pemprov Jawa Tengah TA 2023

Pemberi Hibah	Nama Barang	Penerimaan			Pengeluaran (unit)	Persediaan Tahun 2023 (Rp)
		Jumlah Barang (unit)	Harga Satuan (Rp)	Nilai Persediaan (Rp0)		
Kementerian Kesehatan	Gerlink Antropometri	396	7.900.000,00	3.128.400.000,00	396	0,00
Pemprov Jawa Tengah	Antropometri	20	8.650.179,00	173.003.580,00	20	0,00

Penerimaan Antropometri tersebut telah dicatatkan pada Dinkes PPKB dan seluruhnya telah didistribusikan ke masing-masing UPT Puskesmas Dinkes PPKB sehingga saldo Persediaan Antropometri per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00.

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

31 Desember 2023

31 Desember 2022

Rp204.963.341.996,07

Rp168.191.138.468,15

Investasi Jangka Panjang adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah melakukan investasi dengan beberapa alasan antara lain memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas. Investasi Jangka Panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan non permanen. Investasi Jangka Panjang Permanen adalah Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan Investasi Jangka Panjang Non Permanen adalah Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp36.772.203.527,92 atau 21,86% dari tahun 2022. Rincian Investasi Jangka Panjang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.3.37 Rincian Investasi Jangka Panjang Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen	204.963.341.996,07	168.191.138.468,15	36.772.203.527,92	21,86
Jumlah	204.963.341.996,07	168.191.138.468,15	36.772.203.527,92	21,86

5.3.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen

31 Desember 2023

31 Desember 2022

Rp0,00

Rp0,00

Investasi Jangka Panjang Non Permanen pada Pemkab Kebumen berupa Investasi Non Permanen Lainnya dalam bentuk dana bergulir yaitu dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

Investasi Non Permanen Lainnya dalam bentuk dana bergulir ini dikelola oleh Distapang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan atau *Net Realizable Value* (NRV) setelah dikurangi dengan penyisihan investasi tidak tertagih dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.3.38 Rincian Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Dana Bergulir (perguliran 2006-2008)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Talangan Pembiayaan TA 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Dana Bergulir pada Distapang (perguliran 2006-2008) per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 dengan mutasi sebagai berikut.

Saldo awal 1 Jan 2023: Rp327.932.000,00

Mutasi tambah:
- Rp0,00

Mutasi kurang:
Penerimaan kembali pokok pinjaman pada Tahun 2023 (Rp0,00)

Saldo akhir 31 Des 2023: Rp327.932.000,00

Penyisihan 100% (tahun ke-10) (Rp327.932.000,00)

NRV per 31 Des 2023 Rp0,00

2. Dana Talangan Pembiayaan TA 2023 merupakan dana talangan pengadaan pangan yang disalurkan kepada Kelompok Tani dan pemberian pinjaman kepada Rukun Nelayan sebesar Rp2.100.000.000,00 yang s.d. akhir TA 2023 seluruhnya telah dikembalikan oleh kelompok penerima sehingga saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 dengan mutasi sebagai berikut.

Saldo awal 1 Jan 2023: Rp0,00

Mutasi tambah:
Pemberian Pinjaman melalui Pengeluaran Pembiayaan TA 2023 Rp2.100.000.000,00

Mutasi kurang:
Penerimaan kembali pinjaman atas Pengeluaran Pembiayaan TA 2023 (Rp2.100.000.000,00)

Saldo akhir 31 Des 2023: Rp0,00

5.3.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Permanen

31 Desember 2023

31 Desember 2022

Rp204.963.341.996,07

Rp168.191.138.468,15

Investasi Jangka Panjang adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah melakukan investasi dengan beberapa alasan antara lain memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas. Investasi Jangka Panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan non permanen. Investasi permanen adalah Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan investasi non permanen adalah Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kebumen menjelaskan bahwa:

1. Penilaian investasi permanen menggunakan metode biaya (*cost method*) untuk investasi permanen pada perusahaan daerah yang kepemilikannya dibawah 20%;
2. Penilaian investasi permanen menggunakan metode ekuitas (*equity method*) untuk investasi permanen pada perusahaan daerah yang kepemilikannya diatas 20%

Saldo Investasi Jangka Panjang Permanen tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp36.772.203.527,92 atau 21,86% dari tahun 2022 seluruhnya merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada tujuh BUMD dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.3.39 Rincian Investasi Jangka Panjang Permanen Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Bidang Perbankan				
PT BPR BKK Kebumen (Perseroda)	35.818.622.143,07	30.394.200.257,15	5.424.421.885,92	17,85
PT BPR BKK Jateng (Perseroda)	3.020.000.000,00	2.520.000.000,00	500.000.000,00	19,84
PT BPR Bank Kebumen (Perseroda)	23.413.201.515,00	17.558.540.871,00	5.854.660.644,00	33,34
PT BPD Jateng	66.710.000.000,00	55.979.000.000,00	10.731.000.000,00	19,17
Bidang Pelayanan Air Minum				
Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa	69.371.895.535,00	58.996.442.800,00	10.375.452.735,00	17,59
Bidang Aneka Usaha				
PT LUK ULO FARMA (Perseroda)	3.837.769.500,00	2.591.954.540,00	1.245.814.960,00	48,06
PT PRPP Jateng (Perseroda)	151.000.000,00	151.000.000,00	0,00	0,00
PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda)	2.640.853.303,00	0,00	2.640.853.303,00	0,00
Jumlah	204.963.341.996,07	168.191.138.468,15	36.772.203.527,92	21,86

Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang disajikan pada Laporan Keuangan Pemkab Kebumen dihitung dengan dua metode penilaian yaitu:

1. Metode Biaya diterapkan pada PT BPR BKK Jateng (Perseroda), PT BPD Jateng dan PT Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP) Jateng (Perseroda) karena kepemilikan saham Pemkab Kebumen < 20%,;
2. Metode Ekuitas diterapkan pada PT BPR BKK Kebumen (Perseroda), PT BPR Bank Kebumen (Perseroda), PDAM Tirta Bumi Sentosa, dan PT Luk Ulo Farma (Perseroda).

Nilai Investasi dengan metode ekuitas diperoleh dari data Laporan Keuangan Perusahaan Daerah untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 sehingga penyajian Penyertaan Modal Pemkab Kebumen berdasarkan kedua metode tersebut dilihat dari nilai ekuitas yang tersaji pada Laporan Keuangan BUMD.

Ikhtisar delapan Laporan Keuangan BUMD (*audited*) disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.40 Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD (*audited*)

Nama BUMD Nama KAP	Opini	Basis Opini	Aset (Rp)	Kewajiban (Rp)	Ekuitas (Rp)
Bidang Perbankan					
PT BPR BKK Kebumen (Perseroda) KAP Arnestesa	WTP	-	544.806.016.213,00	476.954.866.103,00	67.851.150.110,00
PT BPR BKK Jateng (Perseroda) KAP Darsono dan Budi Cahyo Santoso	WTP	-	2.474.014.023.755,00	2.024.857.509.675,00	449.156.514.080,00
PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) KAP Darsono dan Budi Cahyo Santoso	WTP	-	136.305.285.570,00	112.892.084.055,00	23.413.201.515,00
PT BPD Jateng KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan	WTP	-	88.453.611.779.000,00	77.764.326.570.000,00	10.689.285.209.000,00
Bidang Pelayanan Air Minum					
Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa KAP Darsono dan Budi Cahyo Santoso	WTP	-	70.822.107.978,00	1.450.212.443,00	69.371.895.535,00
Bidang Aneka Usaha					
PT Luk Ulo Farma (Perseroda) KAP Drs. Henry dan Sugeng	WTP	-	4.875.378.263,00	1.037.608.763,00	3.837.769.500,00
PT PRPP Jateng (Perseroda) KAP Arnestesa	WTP	-	57.737.807.756,00	1.835.645.879,00	55.902.161.877,00
PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) KAP Darsono dan Budi Cahyo Santoso	WTP	-	2.653.588.588,00	12.735.285,00	2.640.853.303,00

Nilai perolehan investasi menggunakan metode ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp204.963.341.996,07,00 dijelaskan secara rinci per BUMD sebagai berikut:

1. Metode Biaya

Perhitungan investasi dengan menggunakan metode biaya karena kepemilikan modal Pemkab Kebumen kurang dari 20% pada tiga BUMD yaitu PT BPR BKK Jateng (Perseroda), PT BPD Jateng, dan PT PRPP Jateng (Perseroda).

Perhitungan Investasi Jangka Panjang Permanen Pemkab Kebumen per 31 Desember 2023 yang disajikan dengan menggunakan metode biaya sebesar Rp69.881.000.000,00 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.3.41 Investasi Permanen Menggunakan Metode Biaya

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
PT BPR BKK Jateng (Perseroda) – 0,73%	3.020.000.000,00	2.520.000.000,00	500.000.000,00	19,84
PT BPD Jateng – 1,27%	66.710.000.000,00	55.979.000.000,00	10.731.000.000,00	19,17
PT PRPP Jateng (Perseroda) – 0,20%	151.000.000,00	151.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah	69.881.000.000,00	58.650.000.000,00	11.231.000.000,00	19,15

Sesuai dengan Perda Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kebumen, pada Tahun 2023 terdapat penambahan modal pada PT BPR BKK Jateng (Perseroda) sebesar Rp500.000.000,00; PT BPD Jateng sebesar Rp10.731.000.000,00; dan PT PRPP Jateng (Perseroda) tidak terdapat penambahan modal.

Nilai perolehan investasi menggunakan metode biaya per 31 Desember 2023 sebesar Rp69.881.000.000,00 rinci per BUMD sebagai berikut:

- a. PT BPR BKK Jateng (Perseroda)
PT BPR BKK Jateng (Perseroda) dibentuk berdasarkan Perda Provinsi Jateng Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda Provinsi Jateng Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah.
Kepemilikan modal Pemkab Kebumen pada PT BPR BKK Jateng (Perseroda) sebesar 0,73% sehingga pencatatan penilaian investasinya menggunakan metode biaya karena kepemilikan modalnya kurang dari 20%. Jumlah investasi yang dimiliki Pemkab Kebumen tahun 2023 untuk PT PRPP Jateng (Perseroda) sebesar Rp3.020.000.000,00.
- b. PT BPD Jateng
PT BPD Jateng dibentuk berdasarkan Perda Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999 tanggal 12 Maret 1999 tentang Perubahan Bentuk badan hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.
Kepemilikan modal Pemkab ke PT BPD Jateng sebesar 1,27% sehingga pencatatan penilaian investasinya menggunakan metode biaya karena kepemilikan modalnya kurang dari 20%. Jumlah investasi yang dimiliki Pemkab Kebumen Tahun 2023 pada PT BPD Jateng sebesar Rp66.710.000.000,00.
- c. PT PRPP Jateng (Perseroda)
PT PRPP Jateng (Perseroda) dibentuk berdasarkan Perda Provinsi Jateng Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah.
Kepemilikan modal Pemkab Kebumen ke PT PRPP Jateng (Perseroda) sebesar 0,20% sehingga pencatatan penilaian investasinya menggunakan metode biaya karena kepemilikan modalnya kurang dari 20%. Jumlah investasi yang dimiliki Pemkab Kebumen tahun 2023 untuk PT PRPP Jateng (Perseroda) sebesar Rp151.000.000,00.

2. Metode Ekuitas

- a. PT BPR BKK Kebumen (Perseroda)
PT BPR BKK Kebumen (Perseroda) dibentuk berdasarkan Perda Provinsi Jateng Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda Provinsi Jateng Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah.
Kepemilikan modal Pemkab Kebumen ke PT BPR BKK Kebumen (Perseroda) sebesar 52,79% sehingga pencatatan penilaian investasi menggunakan metode ekuitas.
Nilai Investasi pada PT BPR BKK Kebumen (Perseroda) yang tersaji sebesar Rp35.818.622.143,07,00 merupakan nilai yang telah diaudit. Rincian saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT BPR BKK Kebumen (Perseroda) adalah sebagai berikut:

Saldo awal 1 Jan 2023:	Rp30.394.200.257,15
Mutasi tahun berjalan:	
Penambahan Investasi	
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	Rp15.762.191.521,00
Setoran Deviden Tahun 2022	(Rp12.309.360.785,00)
Mutasi Ekuitas Tahun Berjalan	
Koreksi	<u>Rp1.971.591.149,92</u>
Saldo akhir 31 Des 2023:	<u><u>Rp35.818.622.143,07</u></u>
- b. PT BPR Bank Kebumen (Perseroda)
PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Kebumen

Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kebumen Kabupaten Kebumen.

Kepemilikan modal Pemkab Kebumen ke PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) adalah 100% sehingga pencatatan penilaian investasi menggunakan metode ekuitas. Nilai Investasi pada PT BPR BKK Kebumen (Perseroda) yang tersaji sebesar Rp23.413.201.515,00,00 merupakan nilai yang telah diaudit. Rincian saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT BPR Bank Kebumen (Perserod) adalah sebagai berikut:

Saldo awal 1 Jan 2023:	Rp17.558.540.871,00
Mutasi tahun berjalan:	
Penambahan Investasi	Rp3.000.000.000,00
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	Rp2.214.922.133,00
Setoran Deviden Tahun 2022	(Rp583.206.099,00)
Mutasi Ekuitas Tahun Berjalan	(Rp265.093.646,00)
Koreksi	Rp1.488.038.256,00
Saldo akhir 31 Des 2023:	<u>Rp23.413.201.515,00</u>

Penambahan investasi sebesar Rp3.000.000.000,00 merupakan penambahan modal Pemkab Kebumen sebesar Rp1.500.000.000,00 dan penambahan modal hibah sebesar Rp1.500.000.000,00. Mutasi pengurang ekuitas tahun berjalan per 31 Desember 2023 sebesar Rp265.093.646,00 merupakan penggunaan laba untuk Tantiem sebesar Rp42.414.989,00, CSR sebesar Rp31.811.242,00, Dana Kesejahteraan Pegawai sebesar Rp106.037.437,00, dan Jasa Produksi sebesar Rp84.829.978,00.

c. Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa

Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Sentosa.

Kepemilikan modal Pemkab Kebumen ke Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa adalah 100% sehingga pencatatan penilaian investasi menggunakan metode ekuitas. Nilai Investasi pada Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa yang tersaji sebesar Rp69.371.895.535,00 merupakan nilai yang telah diaudit. Rincian saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa adalah sebagai berikut:

Saldo awal 1 Jan 2023:	Rp58.996.442.800,00
Mutasi tahun berjalan:	
Penambahan Investasi	Rp4.000.000.000,00
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	Rp6.603.545.166,00
Setoran Deviden Tahun 2022	Rp0,00
Mutasi Ekuitas Tahun Berjalan	(Rp975.642.238,00)
Koreksi	Rp747.549.807,00
Saldo akhir 31 Des 2023:	<u>Rp69.371.895.535,00</u>

Penambahan investasi sebesar Rp4.000.000.000,00 seluruhnya merupakan penambahan modal dari Pemkab Kebumen. Mutasi pengurang ekuitas tahun berjalan per 31 Desember 2023 sebesar Rp975.642.238,00 merupakan penggunaan laba untuk CSR sebesar Rp195.128448,00, Dana Kesejahteraan Pegawai sebesar Rp312.205.00,00, Jasa Tantiem sebesar Rp156.102.758,00 dan Jasa Produksi sebesar Rp312.205.516,00.

d. PT Luk Ulo Farma (Perseroda)

PT Luk Ulo Farma (Perseroda) dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Luk Ulo Farma.

Kepemilikan Modal Pemkab Kebumen ke PT Luk Ulo Farma (Perseroda) adalah 100% sehingga pencatatan penilaian investasi menggunakan metode ekuitas.

Nilai Investasi pada PT Luk Ulo Farma (Perseroda) yang tersaji sebesar Rp3.837.769.500,00 merupakan nilai yang telah diaudit. Rincian saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Luk Ulo Farma (Perseroda) adalah sebagai berikut:

Saldo awal 1 Jan 2023:	Rp2.591.954.540,00
Mutasi tahun berjalan:	
Penambahan Investasi	Rp1.000.000.000,00
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	Rp345.251.173,00
Setoran Deviden Tahun 2022	(Rp199.212.900,00)
Mutasi Ekuitas Tahun Berjalan	(Rp90.560.160,00)
Koreksi	Rp190.336.847,00
Saldo akhir 31 Des 2023:	<u>Rp3.837.769.500,00</u>

Penambahan investasi sebesar Rp1.000.000.000,00 seluruhnya merupakan penambahan modal dari Pemkab Kebumen. Mutasi pengurang ekuitas tahun berjalan per 31 Desember 2023 sebesar Rp90.560.160,00 merupakan penggunaan laba untuk Tantiem sebesar Rp14.488.211,00, CSR sebesar Rp10.875.000,00, Dana Kesejahteraan Pegawai sebesar Rp36.220.527,00, dan Jasa Produksi sebesar Rp28.976.211,00.

e. PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda)

PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kebumen Jaya.

Kepemilikan Modal Pemkab Kebumen ke PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) adalah 100% sehingga pencatatan penilaian investasi menggunakan metode ekuitas.

Nilai Investasi pada PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) yang tersaji sebesar Rp2.640.853.303,00 merupakan nilai yang telah diaudit. Rincian saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) adalah sebagai berikut:

Saldo awal 1 Jan 2023:	Rp0,00
Mutasi tahun berjalan:	
Penambahan Investasi	Rp2.500.000.000,00
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	Rp140.853.302,00
Setoran Deviden Tahun 2022	Rp0,00
Mutasi Ekuitas Tahun Berjalan	Rp0,00
Koreksi	Rp0,00
Saldo akhir 31 Des 2023:	<u>Rp2.640.853.303,00</u>

Penyertaan Modal Pemkab Kebumen pada Tahun 2023 sebesar Rp2.500.000.000,00 dengan nilai investasi pada 31 Desember 2023 sebesar Rp2.640.853.303,00 dengan penambahan dari laba tahun berjalan sebesar Rp140.853.302,00.

5.3.1.3 Aset Tetap

31 Desember 2023	31 Desember 2022
Rp3.936.149.530.596,51	Rp3.959.242.372.635,76

Saldo Aset Tetap terdiri dari:

Tabel 5.3.42 Rincian Aset Tetap Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Tanah	811.434.718.585,55	794.019.449.045,55	17.415.269.540,00	2,19
Peralatan dan Mesin	1.136.839.523.231,00	1.094.696.731.234,00	42.142.791.997,00	3,85
Gedung dan Bangunan	1.741.811.783.185,00	1.664.430.735.238,00	77.381.047.947,00	4,65
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.917.657.832.729,25	2.787.621.602.000,25	130.036.230.729,00	4,66
Aset Tetap Lainnya	111.986.224.096,00	143.266.418.481,00	(31.280.194.385,00)	(21,83)
Konstruksi dalam Pengerjaan	9.455.386.708,00	8.911.032.658,00	544.354.050,00	6,11
Akumulasi Penyusutan	(2.793.035.937.938,29)	(2.533.703.596.021,04)	(259.332.341.917,25)	10,24
Jumlah	3.936.149.530.596,51	3.959.242.372.635,76	(23.092.842.039,25)	(0,58)

Selain itu Aset Tetap, terdapat saldo Aset Tetap *extracomptable* tahun 2023 sebesar Rp53.363.408.748,00 yang tidak disajikan sebagai saldo Aset Tetap.

Penjelasan lebih rinci per jenis Aset Tetap disajikan sebagai berikut.

5.3.1.3.1 Tanah

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp811.434.718.585,55	Rp794.019.449.045,55

Saldo Tanah tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp17.415.269.540,00 atau 2,19% dari tahun 2022 dengan rincian per rincian obyek pada tabel berikut:

Tabel 5.3.43 Rincian Tanah Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Tanah Persil	241.544.317.155,00	238.964.290.540,00	2.580.026.615,00	1,08
Tanah Non Persil	94.132.579.896,00	88.332.165.096,00	5.800.414.800,00	6,57
Lapangan	475.757.821.534,55	466.722.993.409,55	9.034.828.125,00	1,94
Jumlah	811.434.718.585,55	794.019.449.045,55	17.415.269.540,00	2,19

Perhitungan mutasi Tanah tahun 2023 sebagai berikut.

Saldo awal 1 Jan 2023:	Rp794.019.449.045,55
Mutasi tambah:	
Belanja Modal Tanah TA 2023	Rp1.400.551.240,00
Penerimaan Hibah	Rp2.522.709.500,00
Hasil Inventarisasi	Rp13.758.587.552,00
Koreksi Pencatatan	Rp1.196.042.622,00
Mutasi antar SKPD	Rp9.194.073.460,00
Mutasi kurang:	
Pemberian Hibah	(Rp168.900.000,00)
Koreksi Pencatatan	(Rp1.293.721.374,00)
Mutasi antar SKPD	(Rp9.194.073.460,00)
Saldo akhir 31 Des 2023:	<u>Rp811.434.718.585,55</u>

Penjelasan mutasi tambah dan kurang saldo Aset Tetap Tanah dijelaskan sebagai berikut.

1. Penambahan dari Belanja Modal Tanah sebesar Rp1.400.551.240,00 merupakan Belanja Modal Tanah pada DPUPR berupa pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Kejayan-Pantai di Desa Ayamputih Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen.
2. Penambahan dari Hibah sebesar Rp2.522.709.500,00 terdiri dari:
 - a. Pada Disperkimhub atas perolehan hibah tanah berupa Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) pada Perumahan Mega Permai, Perumahan Mega Biru 1, dan Perumahan Gading Permai dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.3.44 Rincian Hibah Masuk Tanah berupa PSU Tahun 2023

Lokasi Nomor BAST	Nama Barang	Nilai Perolehan (Rp)
Perumahan Mega Biru 1 413.3/3884.2/BAST/VII/2023	Tanah untuk Jalan Lainnya	267.435.000,00
	Tanah untuk Bangunan Jaringan Lainnya	150.675.000,00
	Tanah Lapangan Taman Lainnya	273.997.500,00
Perumahan Gading Permai 413.3/3884.3/BAST/VII/2023	Tanah untuk Bangunan Jaringan Lainnya	186.900.000,00
Perumahan Mega Permai 413.3/3884.4/BAST/VII/2023	Tanah untuk Bangunan Masjid	279.840.000,00
	Tanah untuk Bangunan Jaringan Lainnya	241.815.000,00
	Jumlah	1.400.662.500,00

- b. Pada BPKPD (PPKD) atas perolehan hibah dari Kementerian Agama berupa Tanah Kampung Lainnya yang terletak di Kelurahan Panjer seluas 206m² sebesar Rp1.122.047.000,00 sesuai Berita Acara Nomor 8102/Kk.11.05/1/KS.01.1/09/2023 tanggal 29 September 2023.
3. Penambahan dari Hasil Inventarisasi sebesar Rp13.758.587.552,00 terdiri dari:
 - a. Pada DLHKP berupa Tanah Tambak seluas 344.687m² yang terletak di Desa Tambakmulyo Kecamatan Puring sebesar Rp12.408.732.000,00 merupakan tanah Negara sesuai Surat Keterangan Desa Tambakmulyo Nomor 001/360/IX/2023;
 - b. Pada Kelurahan Tamanwinangun Kecamatan Kebumen berupa satu bidang tanah seluas 2.776m² sebesar Rp97.678.752,00 yang merupakan hasil dari tukar menukar tanah dengan RSUD Muhammadiyah Gombong;
 - c. Kelurahan Kebumen Kecamatan Kebumen berupa dua bidang tanah seluas 429m² sebesar Rp393.696.800,00 dan seluas 365m² sebesar Rp858.480.000,00 untuk jalan.
4. Penambahan dari Koreksi Pencatatan sebesar Rp1.196.042.622,00 terdiri dari:
 - a. Pada DPUPR sebesar Rp636.005.374,00 merupakan penggabungan pencatatan atas D.I Jatinegara/Bd.Karet sebesar Rp550.555.874,00, dan penggabungan Tanah Waduk Embung Giritirto sebesar Rp85.449.500,00;
 - b. Pada Kelurahan Wonokriyo Kecamatan Gombong berupa koreksi pencatatan pada lima bidang Tanah Sawah Irigasi dari hasil tukar menukar dengan RSUD Muhammadiyah Gombong sebesar Rp391.137.248,00 sesuai Berita Acara Nomor 500.17/4091 tanggal 5 September 2023;
 - c. Pada Bagian Umum Setda sebesar Rp168.900.000,00 berupa koreksi pemecahan satu bidang tanah dengan Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 43 menjadi dua bidang tanah dengan SHP Nomor 161 dan SHP Nomor 162 pada Tanah untuk Bangunan Ibadah Lainnya yang terletak di Jalan Tentara Pelajar Kebumen (Kompleks *Islamic Center*).
5. Pengurangan dari Pemberian Hibah sebesar Rp168.900.000,00 merupakan hibah satu bidang tanah kepada Kementerian Agama Kebumen seluas 400m² yang terletak di Jalan Tentara Pelajar Kelurahan Panjer Kebumen dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 161 sebagaimana Naskah Perjanjian Hibah Nomor 20 Tahun 2023 tanggal 29 september 2023.
6. Pengurangan dari Koreksi Pencatatan sebesar Rp1.293.721.374,00 terdiri dari:
 - a. Pada Bagian Umum Setda sebesar Rp168.900.000,00 berupa pemecahan satu bidang tanah sesuai SHP Nomor 43 menjadi dua bidang tanah dengan SHP Nomor 161 dan SHP Nomor 162 pada Tanah untuk Bangunan Ibadah Lainnya yang terletak di Jalan Tentara Pelajar Kebumen (Kompleks *Islamic Center*);
 - b. Pada Kelurahan Wonokriyo sebanyak tujuh bidang tanah dengana nilai total sebesar Rp488.816.000,00 karena proses tukar menukar dengan RSUD Muhammadiyah Gombong sesuai Berita Acara Nomor 500.17/4091 tanggal 5 September 2023;
 - c. Pada DPUPR sebesar Rp636.005.374,00 merupakan penggabungan pencatatan atas D.I Jatinegara/Bd.Karet sebesar Rp550.555.874,00 dan penggabungan Tanah Waduk Embung Giritirto sebesar Rp85.449.500,00.

7. Penambahan dan pengurangan dari Mutasi antar SKPD sebesar Rp9.194.073.460,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.3.45 Rincian Mutasi Antar SKP atas Tanah Tahun 2023

SKPD Asal	SKPD Penerima	Harga Perolehan (Rp)	Keterangan
Disdikpora	Distapang	100.000.000,00	Tanah eks Korwil Buayan
	BPKPD (PPKD)	11.060.000,00	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I (eks Korwil Karanggayam)
		615.000.000,00	Tanah Bangunan Terminal Darat (eks Korwil Petanahan)
		9.040.000,00	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (eks Korwil Bonorowo)
		16.540.000,00	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (eks Korwil Mirit)
		118.560.000,00	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (eks Korwil Kutowinangun)
		254.600.000,00	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (eks Korwil Kebumen)
		94.724.000,00	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (eks Korwil Poncowarno)
		25.000.000,00	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (eks Korwil Padureso)
		26.810.000,00	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (eks Korwil Mirit)
Dinkes PPKB	Puskesmas Bonorowo	457.045.000,00	Tanah Bangunan Posyandu/Puskesmas Bonorowo
DPUPR	Disperkimhub	1.352.882.115,00	Tanah Kampung Lainnya terletak di Dukuh Tinatah Desa Wonokromo Alian yang digunakan untuk relokasi bencana
	DLHKP	1.177.309.000,00	Tanah untuk Tugu Batas Wilayah
		4.078.126.085,00	
Disperkimhub	BPKPD (PPKD)	788.977.260,00	Tanah Bangunan Terminal Darat (tanah untuk Terminal Karangsembung)
Kel. Bumirejo	Dinkes PPKB	68.400.000,00	Tanah Sawah Irigasi (Sertifikat HP No.40) yang digunakan untuk Pembangunan Labkesda
Jumlah		9.194.073.460,00	

Pada Tahun 2023, Pemkab Kebumen melakukan pertukaran Aset Tetap Tanah yang berada di Kelurahan Wonokriyo Kecamatan Gombang dengan tanah milik RSUD Muhammadiyah Gombang yang terletak di Kelurahan Wonokriyo Kecamatan Gombang dan Kelurahan Tamanwinangun Kecamatan Kebumen. Aset Tetap Tanah yang diserahkan berupa tujuh bidang tanah usaha dengan luas total 12.993m² sebesar Rp488.816.000,00 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.3.46 Rincian Tanah Pemkab Kebumen Yang Ditukar

Nama Barang	Lokasi	Luas (m ²)	Nilai Perolehan (Rp)
Tanah Usaha	Sertifikat HP No 16/ Kelurahan Wonokriyo	1.310	47.160.000,00
Tanah Usaha	Sertifikat HP No 24/ Kelurahan Wonokriyo	695	25.020.000,00
Tanah Usaha	Sertifikat HP No 36/ Kelurahan Wonokriyo	5.858	129.600.000,00
Tanah Usaha	Sertifikat HP No 46/ Kelurahan Wonokriyo	674	32.400.000,00
Tanah Usaha	Sertifikat HP No 89/ Kelurahan Wonokriyo	2.656	88.400.000,00
Tanah Usaha	Letter C Blok Dadap Persil S 37/ Kelurahan Wonokriyo	400	114.000.000,00
Tanah Usaha	Letter C Blok Dadap Persil S 42/ Kelurahan Wonokriyo	1.400	52.236.000,00
Jumlah		12.993	488.816.000,00

Aset Tetap Tanah RSUD Muhammadiyah Gombang yang diserahkan berupa delapan bidang tanah sawah dengan luas total 13.892m² sebesar Rp6.157.400.000,00 sesuai hasil penilaian KJPP Johnny Farel dan Rekan dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.3.47 Rincian Tanah RSU PKU Muhammadiyah Gombong Yang Ditukar

Nama Barang	Lokasi	Luas (m ²)	Nilai Appraisal (Rp)
Tanah Sawah	Sertifikat HM No 1.665 / Kelurahan Wonokriyo	5.340	1.602.000.000,00
Tanah Sawah	Sertifikat HM No.1.140/ Kelurahan Wonokriyo	914	274.200.000,00
Tanah Sawah	Sertifikat HM No.94/ Kelurahan Wonokriyo	717	215.100.000,00
Tanah Sawah	Sertifikat HM No. 1.120/ Kelurahan Wonokriyo	3.010	903.000.000,00
Tanah Sawah	Sertifikat Hm No. 1.563/ Kelurahan Wonokriyo	1.135	340.500.000,00
Tanah Sawah	Letter C No.3529 / Kelurahan Tamanwinangun	1.770	2.017.800.000,00
Tanah Sawah	Letter C No.1517 / Kelurahan Tamanwinangun	503	402.400.000,00
Tanah Sawah	Letter C No.3378 / Kelurahan Tamanwinangun	503	402.400.000,00
	Jumlah	13.892	6.157.400.000,00

Sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Pernyataan No. 07 yang menyatakan bahwa suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas secara proporsional luas tanah.

Berdasarkan hal tersebut, rincian perhitungan aset tetap yang diterima (aset baru) sebagaimana perhitungan berikut:

Tabel 5.3.48 Perhitungan Proporsional Nilai Aset Tetap Tanah Yang Diterima

Nama Barang	Lokasi	Luas (m ²)	Nilai Appraisal (Rp)	Nilai Tercatat (Rp)
Tanah Sawah	Sertifikat HM 1.665 / Wonokriyo	5.340	1.602.000.000,00	187.897.887,00
Tanah Sawah	Sertifikat HM 1.140 / Wonokriyo	914	274.200.000,00	32.160.799,00
Tanah Sawah	Sertifikat HM 904 / Wonokriyo	717	215.100.000,00	25.228.986,00
Tanah Sawah	Sertifikat HM 1.120/ Wonokriyo	3.010	903.000.000,00	105.912.479,00
Tanah Sawah	Sertifikat HM 1.563 / Wonokriyo	1.135	340.500.000,00	39.937.097,00
Tanah Sawah	Letter C No. 3529/ Tamanwinangun	1.770	2.017.800.000,00	62.280.760,00
Tanah Sawah	Letter C No. 1517/ Tamanwinangun	503	402.400.000,00	17.698.996,00
Tanah Sawah	Letter C No. 3378/ Tamanwinangun	503	402.400.000,00	17.698.996,00
	Jumlah	13.892	6.157.400.000,00	488.816.000,00

Pemkab Kebumen memiliki Aset Tetap Tanah yang menghasilkan pendapatan sewa yang sesuai PMK Nomor 85/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 17 Properti Investasi, termasuk kategori Properti Investasi.

Hasil identifikasi dan inventarisasi, tanah dimaksud berupa tanah eks bengkok yang berlokasi pada 11 kelurahan dan tanah yang disewa oleh PT. JJ Spotecindo sebanyak 350 bidang tanah dengan total luas tanah 1.045.373m².

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

31 Desember 2023	31 Desember 2022
Rp1.136.839.523.231,00	Rp1.094.696.731.234,00

Saldo Peralatan dan Mesin tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp42.142.791.997,00 atau 3,85% dari tahun 2022.

Perhitungan mutasi Peralatan dan Mesin tahun 2023 sebagai berikut.

Saldo awal 1 Jan 2023:	Rp1.094.696.731.234,00
Mutasi tambah:	
Belanja Modal PM TA 2023	
- Belanja Modal SKPD	Rp40.860.971.250,00
- Belanja Modal BOS	Rp21.392.317.357,00
- Belanja Modal BLUD	Rp3.546.108.026,00
Kapitalisasi dari Belanja Barjas TA 2023	Rp1.557.553.423,00

Penerimaan Hibah	Rp4.006.825.000,00
Reklasifikasi dari:	
- AT-Gedung dan Bangunan	Rp5.572.714.000,00
- AT-Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp3.480.000,00
- AT Lainnya	Rp748.828.780,00
- Aset Lainnya-Aset Lain-lain	Rp11.000.000,00
Hasil Inventarisasi	Rp212.124.623,00
Koreksi Pencatatan	Rp16.250.000,00
Mutasi antar SKPD	Rp39.747.075.738,00
Mutasi kurang:	
Pemberian Hibah	(Rp538.565.000,00)
Reklasifikasi ke:	
- AT Lainnya	(Rp274.582.350,00)
- Aset Lainnya-Aset Lain-lain	(Rp34.343.038.980,00)
- <i>Extracomptable</i>	(Rp85.856.872,00)
- Antar Sub Akun (Ubah Kode Aset)	(Rp85.314.000,00)
Koreksi Pencatatan	(Rp458.023.260,00)
Mutasi antar SKPD	(Rp39.747.075.738,00)
Saldo akhir 31 Des 2023:	<u>Rp1.136.839.523.231,00</u>

Penjelasan mutasi tambah dan kurang saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin dijelaskan sebagai berikut.

1. Penambahan dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp65.799.396.633,00.
2. Penambahan dari Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2023 sebesar Rp1.557.553.423,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.3.49 Rincian Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa per SKPD TA 2023

SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
Disdikpora		
- SMP Negeri 2 Adimulyo	2.273.000,00	Belanja Barang Jasa BOS
- SMP Negeri 2 Buayan	13.181.200,00	
- SD Negeri 2 Kalibening	428.000,00	
RSUD dr. Soedirman	1.387.251.323,00	Belanja Pemeliharaan
Disparbud	4.250.000,00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor
BPKPSDM	106.496.000,00	Belanja Suku Cadang
Kec. Ayah	3.600.000,00	Belanja Bahan Lainnya
Kec. Buayan	12.000.000,00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor
Kec. Klirong	8.500.000,00	Belanja Barang yang Diserahkan
Kec. Kutowinangun	2.123.900,00	Pembayaran Belanja Bahan Perabot (TV)
Kec. Mirit	8.500.000,00	Belanja Barang yang Diserahkan
Kec. Puring	450.000,00	Belanja Barang yang Diserahkan
Kec. Sadang	8.500.000,00	Belanja Barang yang Diserahkan
Jumlah	1.557.553.423,00	

3. Penambahan dari Penerimaan Hibah sebesar Rp4.006.825.000,00.
4. Penambahan dari Reklasifikasi jenis Aset Tetap yang lain sebesar Rp6.336.022.780,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.3.50 Rincian Reklasifikasi dari jenis Aset Tetap yang lain per SKPD TA 2023

SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
Reklasifikasi dari AT-Gedung dan Bangunan		
Puskesmas Prembun	57.350.000,00	Reklas dari AT-Gedung dan Bangunan
Disparbud	5.515.364.000,00	Reklas dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Sub Jumlah	5.572.714.000,00	

SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
Reklasifikasi dari AT-Jalan, Jaringan dan Irigasi		
Puskesmas Petanahan	3.480.000,00	Reklas dari belanja Jalan Irigasi Jaringan
Sub Jumlah	3.480.000,00	
Reklasifikasi dari AT-Lainnya		
Disdikpora	748.828.780,00	Reklasifikasi dari Belanja BOS (ATL)
Sub Jumlah	748.828.780,00	
Reklasifikasi dari Aset Lainnya		
Dinkes PPKB	7.000.000,00	Reklasifikasi dari Aset Lain-lain (ARB)
Puskesmas Gombang II	4.000.000,00	
Sub Jumlah	11.000.000,00	
Jumlah	6.336.022.780,00	

5. Penambahan dari Hasil Inventarisasi sebesar Rp212.124.623,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.3.51 Rincian Hasil Inventarisasi per SKPD TA 2023

SKPD	Nilai (Rp)
Puskesmas Klirong II	9.860.000,00
Puskesmas Sempor I	93.780.760,00
Disperkimhub	80.705.000,00
Bagian Humas Setda	9.076.500,00
Bappeda	3.728.363,00
Kec. Padureso	3.078.000,00
Kec. Puring	11.896.000,00
Jumlah	212.124.623,00

6. Penambahan dari Koreksi Pencatatan sebesar Rp16.250.000,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.3.52 Rincian Koreksi Pencatatan per SKPD TA 2023

SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
Disdikpora (SDN 3 Plarangan dan SMPN 1 Karanganyar)	9.900.000,00	koreksi pencatatan kode barang
Kec. Karanganyar	1.650.000,00	koreksi nilai pencatatan
Kec. Puring	4.700.000,00	koreksi nilai pencatatan
Jumlah	16.250.000,00	

7. Pengurangan dari Pemberian Hibah sebesar Rp538.565.000,00 merupakan hibah kepada Kepolisian Resort Kebumen berupa satu unit Kendaraan Roda 4 sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tanggal 9 Januari 2023.
8. Pengurangan berupa Reklasifikasi ke jenis Aset Tetap yang lain sebesar Rp34.788.792.202,00 terdiri dari:
- Reklasifikasi ke AT Lainnya sebesar Rp274.582.350,00 pada Disdikpora;
 - Reklasifikasi ke Aset Lainnya-Aset Lain-lain sebesar Rp34.343.038.980,00 merupakan usulan penghapusan yang diajukan oleh SKPD terhadap barang-barang dengan kondisi rusak berat.
 - Reklasifikasi ke *Extracomptable* sebesar Rp85.856.872,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.3.53 Rincian Reklasifikasi ke Extracomptable per SKPD TA 2023

SKPD	Nilai (Rp)
Disdikpora	48.744.000,00
Dinkes PPKB	8.264.000,00
RSUD Prembun	1.460.327,00
Puskesmas Adimulyo	1.820.000,00
Puskesmas Ayah II	1.080.000,00
Puskesmas Gombang II	252.000,00
Puskesmas Kuwarasan	650.000,00

SKPD	Nilai (Rp)
Puskesmas Mirit	1.185.480,00
Puskesmas Pejagoan	284.000,00
Puskesmas Puring	360.000,00
Puskesmas Rowokele	360.000,00
Puskesmas Sadang	653.000,00
Puskesmas Sruweng	3.060.065,00
Distapang	2.300.000,00
Dinas PMD	656.000,00
Diskominfo	13.728.000,00
Bagian Umum Setda	1.000.000,00
Jumlah	85.856.872,00

- d. Reklasifikasi ke Antar Sub Akun (Ubah Kode Aset) sebesar Rp85.314.000,00 pada Disparbud.
9. Pengurangan dari Koreksi Pencatatan sebesar Rp458.023.260,00 karena pengadaan belanja modal yang tidak memenuhi kategori aset tetap sebesar Rp323.300.730,00, koreksi double catat sebesar Rp113.390.530,00, koreksi bukan milik Pemkab Kebumen sebesar Rp5.292.000,00 dan koreksi nilai perolehan/pencatatan sebesar Rp16.040.000,00.
10. Penambahan dan pengurangan dari Mutasi antar SKPD sebesar Rp39.747.075.738,00.

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

31 Desember 2023

31 Desember 2022

Rp1.741.811.783.185,00

Rp1.664.430.735.238,00

Saldo Gedung dan Bangunan tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp77.381.047.947,00 atau 4,65% dari tahun 2022 dengan rincian per rincian obyek pada tabel berikut:

Tabel 5.3.54 Rincian Gedung dan Bangunan Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.704.560.120.041,00	1.627.607.480.094,00	76.952.639.947,00	4,73
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	12.742.342.830,00	12.401.902.830,00	340.440.000,00	2,75
Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	19.553.869.971,00	19.553.869.971,00	0,00	0,00
Bangunan Menara Perambuan	351.202.000,00	397.077.000,00	(45.875.000,00)	(11,55)
Tugu/Tanda Batas	4.604.248.343,00	4.470.405.343,00	133.843.000,00	2,99
Jumlah	1.741.811.783.185,00	1.664.430.735.238,00	77.381.047.947,00	4,65

Perhitungan mutasi Gedung dan Bangunan tahun 2023 sebagai berikut.

Saldo awal 1 Jan 2023: Rp1.664.430.735.238,00

Mutasi tambah:

Belanja Modal GB TA 2023

- Belanja Modal SKPD Rp74.851.696.901,00

- Belanja Modal BLUD Rp413.512.000,00

Kapitalisasi dari Belanja Barjas TA 2023 Rp14.398.020.637,00

Reklasifikasi dari:

- AT-Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp156.132.000,00

- *Extracomptable* Rp505.000,00

Hasil Inventarisasi Rp123.450.000,00

Mutasi antar SKPD Rp22.295.240.479,00

Mutasi kurang:

Pemberian Hibah (Rp2.407.881.500,00)

Reklasifikasi ke:

- AT-Peralatan dan Mesin (Rp5.487.400.000,00)

- AT-Jalan, Jaringan dan Irigasi	(Rp853.869.097,00)
- Aset Lainnya-Aset Lain-lain	(Rp3.692.487.376,00)
- <i>Extracomptable</i>	(Rp9.000.000,00)
Koreksi Pencatatan	(Rp111.630.618,00)
Mutasi antar SKPD	(Rp22.295.240.479,00)
Saldo akhir 31 Des 2023:	<u>Rp1.741.811.783.185,00</u>

Penjelasan mutasi tambah dan kurang saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan dijelaskan sebagai berikut.

1. Penambahan dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp75.265.208.901,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.3.55 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023

SKPD	SKPD (Rp)	BLUD (Rp)
Disdikpora	17.645.859.232,00	
Dinkes PPKB	20.280.421.580,00	
Puskesmas Ambal II (pembangunan kanopi dan pagar)		50.000.000,00
Puskesmas Ayah I (pembangunan toilet)		9.000.000,00
Puskesmas Klirong I (pembangunan ruang TB dan pojok batuk)		46.500.000,00
Puskesmas Karangsambung (pembangunan ruang ramah anak dan ruang TB)		68.872.000,00
Puskesmas Rowokele (pembangunan ruang tindakan, ruang arsip dan kepegawaian)		239.140.000,00
DPUPR	1.860.320.600,00	
Distapang	738.694.500,00	
DLHKP	2.056.619.160,00	
Disperindag KUKM	12.386.224.500,00	
Disparbud	19.727.648.829,00	
Kec. Pejagoan	57.954.500,00	
Kec. Sadang	12.500.000,00	
Kel. Panjatan	85.454.000,00	
Sub Jumlah	74.851.696.901,00	413.512.000,00
Jumlah		75.265.208.901,00

2. Penambahan dari Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2023 sebesar Rp14.398.020.637,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.3.56 Rincian Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa per SKPD TA 2023

SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
Disdikpora	9.817.938.332,00	revitalisasi alun-alun Pancasila
	2.195.817.260,00	pemeliharaan GOR Panjer
	192.640.000,00	rehabilitasi SDN 1 Kemangguan Kec. Alian
	99.419.000,00	rehabilitasi SDN 2 Setrojenar Kec. Buluspesantren
	40.635.000,00	rehabilitasi SMPN 1 Karangsambung
	102.566.000,00	rehabilitasi SMPN 1 Sadang
RSUD dr. Soedirman	194.416.265,00	rehabilitasi ruang Rawat Inap Gedung C
	199.000.000,00	rehabilitasi ruang Rawat Inap Gedung D
	95.500.000,00	rehabilitasi rumah dinas dokter
	490.500.000,00	rehabilitasi gedung A IGD
	248.003.780,00	rehabilitasi gedung B klinik dan laboratorium
DPUPR	444.936.000,00	pekerjaan pembangunan rehab ruang pelayanan Disdukcapil
	155.198.000,00	pekerjaan paving pendopo dan rehabilitasi saluran di lingkungan pendopo Kabumian
	61.656.000,00	Pemeliharaan gedung kantor di lingkungan Kecamatan Padureso
	59.795.000,00	Pembangunan Polsek Poncowarno (Jasa Konsultan)
Jumlah	14.398.020.637,00	

3. Penambahan dari Reklasifikasi jenis Aset Tetap yang lain sebesar Rp156.637.000,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.3.57 Rincian Reklasifikasi dari jenis Aset Tetap yang lain per SKPD TA 2023

SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
Reklasifikasi dari AT-Konstruksi Dalam Pengerjaan		
Dinkes PPKB	58.674.000,00	Reklas dari KDP Bangunan Puskesmas Alian
Disperindag KUKM	97.458.000,00	Reklas dari KDP Bangunan Pusat Kuliner Jalan Merdeka (Mendoan)
Sub Jumlah	156.132.000,00	
Reklasifikasi dari <i>Extracomptable</i>		
Disdikpora (SD Argopeni)	505.000,00	Reklas dari <i>Ekstrakomptabel</i>
Sub Jumlah	505.000,00	
Jumlah	156.637.000,00	

4. Penambahan dari Hasil Inventarisasi sebesar Rp123.450.000,00 berupa Eks Gedung Pramuka yang tercatat pada PPKD.
5. Pengurangan dari Pemberian Hibah sebesar Rp2.407.881.500,00 berupa Bangunan Tempat Pendidikan eks SD *Regrouping* yang diserahkan ke pemerintah desa, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.3.58 Rincian Hibah Keluar Aset Tetap Gedung dan Bangunan TA 2023

Sekolah	Penerima Hibah	No NPHD	Nilai (Rp)
SDN 3 Giripurno Kec. Karanganyar	Desa Giripurno	No. 1 Tahun 2023	645.064.000,00
SDN 1 Sawangan Kec. Kuwarasan	Desa Sawangan	No. 13 Tahun 2024	344.811.460,00
SDN 2 Kedungpuji Kec. Gombong	Desa Kedungpuji	No. 6 Tahun 2025	1.006.763.500,00
SDN 2 Semondo Kec. Gombong	Desa Semondo	No. 2 Tahun 2026	411.242.540,00
		Jumlah	2.407.881.500,00

6. Pengurangan berupa Reklasifikasi ke jenis Aset Tetap yang lain sebesar Rp10.042.756.473,00 terdiri dari:
- Reklasifikasi ke AT Peralatan dan Mesin sebesar Rp5.487.400.000,00 pada Puskesmas Prembun sebesar Rp57.350.000,00 dan Disparbud sebesar Rp5.430.050.000,00;
 - Reklasifikasi ke AT Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp853.869.097,00 pada SDN Kalipuru Kec. Karangasambung sebesar Rp352.538.000,00; SMPN 2 Sruweng sebesar Rp63.574.097,00; dan Disparbud sebesar Rp437.757.000,00.
 - Reklasifikasi ke Aset Lainnya-Aset Lain-lain sebesar Rp3.692.487.376,00 merupakan usulan penghapusan yang diajukan oleh SKPD terhadap barang-barang dengan kondisi rusak berat dengan rincian per SKPD pada tabel berikut.

Tabel 5.3.59 Rincian Reklasifikasi ke Aset Lain-lain atas Aset Rusak Berat per SKPD TA 2023

SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
Disdikpora	2.310.034.826,00	Bangunan pada Dinas Pendidikan dan Sekolah (SDN 2 Giripurno Karanganyar, SDN Wetonkulon Puring, SMPN 1 Klirong, SMPN 1 Buayan)
Puskesmas Adimulyo	37.875.000,00	Bangunan Klinik/Puskesmas
Puskesmas Gombong I	54.850.000,00	Bangunan Klinik/Puskesmas
Puskesmas Kebumen I	13.400.000,00	Bangunan Klinik/Puskesmas
Puskesmas Kebumen III	84.823.000,00	Bangunan Klinik/Puskesmas
Puskesmas Padureso	258.400.000,00	Rumah Negara Golongan III Tipe C Permanen dan Bangunan Klinik/Puskesmas
Puskesmas Petanahan	32.320.000,00	Bangunan Klinik/Puskesmas
Puskesmas Poncowarno	410.929.000,00	Bangunan Gedung Kantor Permanen
Puskesmas Sadang	105.363.000,00	Bangunan Klinik/Puskesmas
Puskesmas Sempor I	77.014.800,00	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen
Disperkimhub	11.797.750,00	Gedung Pos Jaga Permanen (Halte)
BPBD	45.875.000,00	Bangunan Menara Perambuan Penerang Pantai Lain-lain
Distapang	221.305.000,00	Bangunan Gedung Permanen

SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
Bagian Humas Setda	28.500.000,00	Tugu Peringatan (Papan Baliho)
Jumlah	3.692.487.376,00	

- d. Reklasifikasi ke *Extracomtable* sebesar Rp9.000.000,00 merupakan pemeliharaan gedung dan bangunan yang tidak memenuhi batas kapitalisasi pada Puskesmas Ayah.
7. Pengurangan dari Koreksi Pencatatan sebesar Rp111.630.618,00 pada DPUPR berupa lima unit Bangunan Gedung Kantor di Desa Jlegiwinangun Kec. Kutowinangun dan Desa Karangduwur Petanahan dan Bangunan Pos Jaga di Desa Mangunranan Kec. Mirit, Desa Giwangretno Kec. Sruweng, dan Desa Tersobo Kec. Prembun yang bukan merupakan kewenangan Pemkab Kebumen tetapi milik BBWSO Yogyakarta.
8. Penambahan dan pengurangan dari Mutasi antar SKPD sebesar Rp22.295.240.479,00.

5.3.1.3.4 Jalan, Jaringan dan Irigasi

31 Desember 2023

31 Desember 2022

Rp2.917.657.832.729,25

Rp2.787.621.602.000,25

Saldo Jalan, Jaringan, dan Irigasi tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp130.036.230.729,00 atau 4,66% dari tahun 2022 dengan rincian per rincian obyek pada tabel berikut:

Tabel 5.3.60 Rincian Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Jalan	1.730.092.095.984,05	1.650.977.723.884,05	79.114.372.100,00	4,79
Jembatan	326.566.861.846,00	318.302.800.546,00	8.264.061.300,00	2,60
Bangunan Air Irigasi	241.788.124.363,20	235.454.541.318,20	6.333.583.045,00	2,69
Bangunan Pengairan Pasang Surut	8.668.277.612,00	8.668.277.612,00	0,00	0,00
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	1.086.524.000,00	1.086.524.000,00	0,00	0,00
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	259.897.880.669,00	259.630.323.669,00	267.557.000,00	0,10
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	9.453.281.060,00	7.474.445.571,00	1.978.835.489,00	26,47
Bangunan Air Bersih/Air Baku	119.829.371.734,00	109.204.356.281,00	10.625.015.453,00	9,73
Bangunan Air Kotor	12.434.351.850,00	10.640.174.140,00	1.794.177.710,00	16,86
Instalasi Air Bersih/Air Baku	16.123.958.815,00	16.045.014.815,00	78.944.000,00	0,49
Instalasi Air Kotor	22.771.903.645,00	22.033.235.645,00	738.668.000,00	3,35
Instalasi Pengolahan Sampah	15.159.109.611,00	14.842.925.611,00	316.184.000,00	2,13
Instalasi Pembangkit Listrik	1.653.358.452,00	1.653.358.452,00	0,00	0,00
Instalasi Gardu Listrik	47.103.183.537,00	47.103.183.537,00	0,00	0,00
Instalasi Gas	6.890.207.500,00	6.890.207.500,00	0,00	0,00
Instalasi Pengaman	48.455.008,00	32.980.008,00	15.475.000,00	46,92
Jaringan Air Minum	5.124.984.780,00	5.122.759.780,00	2.225.000,00	0,04
Jaringan Listrik	89.756.356.759,00	69.249.224.127,00	20.507.132.632,00	29,61
Jaringan Telepon	3.209.545.504,00	3.209.545.504,00	0,00	0,00
Jumlah	2.917.657.832.729,25	2.787.621.602.000,25	130.036.230.729,00	4,66

Perhitungan mutasi Jalan, Jaringan, dan Irigasi tahun 2023 sebagai berikut.

Saldo awal 1 Jan 2023:

Rp2.787.621.602.000,25

Mutasi tambah:

Belanja Modal JJI TA 2023

- Belanja Modal SKPD

Rp124.843.092.732,00

- Belanja Modal BLUD

Rp78.468.000,00

Kapitalisasi dari Belanja Barjas TA 2023

Rp650.328.868,00

Penerimaan Hibah

Rp3.748.558.100,00

Reklasifikasi dari:	
- AT-Gedung dan Bangunan	Rp853.869.097,00
- AT-Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp187.966.000,00
Koreksi Pencatatan	Rp418.126.989,00
Mutasi antar SKPD	Rp1.037.516.319,00
Mutasi kurang:	
Reklasifikasi ke:	
- AT-Gedung dan Bangunan	(Rp3.480.000,00)
- Aset Lainnya-Aset Lain-lain	(Rp281.883.428,00)
Koreksi Pencatatan	(Rp458.815.629,00)
Mutasi antar SKPD	(Rp1.037.516.319,00)
Saldo akhir 31 Des 2023:	<u>Rp2.917.657.832.729,25</u>

Penjelasan mutasi tambah dan kurang saldo Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi dijelaskan sebagai berikut.

1. Penambahan dari Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp124.921.560.732,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.3.61 Rincian Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2023

SKPD	SKPD (Rp)	BLUD (Rp)
Dinkes PPKB	1.894.934.633,00	
Puskesmas Alian		49.950.000,00
Puskesmas Klirong I		5.313.000,00
Puskesmas Petanahan		3.480.000,00
Puskesmas Poncowarno		7.000.000,00
Puskesmas Sadang		10.500.000,00
Puskesmas Sruweng		2.225.000,00
DPUPR	103.443.572.497,00	
Disperkimhub	17.046.932.102,00	
DLHKP	316.184.000,00	
Disperindag KUKM	1.787.500.000,00	
Itda	78.944.000,00	
Kel. Panjatan	74.425.500,00	
Kel. Plarangan	200.600.000,00	
Sub Jumlah	124.843.092.732,00	78.468.000,00
Jumlah		124.921.560.732,00

2. Penambahan dari Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2023 sebesar Rp650.328.868,00 pada DPUPR sebesar Rp491.083.000,00 berupa penambahan dari belanja jasa konsultan konstruksi dan pada Disdikpora sebesar Rp159.245.868,00 berupa penambahan belanja pemeliharaan revitalisasi alun-alun Pancasila.
3. Penambahan dari Penerimaan Hibah sebesar Rp3.748.558.100,00 pada Disperkimhub berupa sarana jalan dan bangunan drainase PSU Perumahan dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.3.62 Rincian Hibah Masuk Jalan, Jaringan dan Irigasi berupa PSU Tahun 2023

Lokasi Nomor BAST	Nilai Jalan (Rp)	Nilai Drainase (Rp)
Perumahan Mega Biru 1 413.3/3884.2/BAST/VII/2023 Tgl 27 Juli 2023	684.187.500,00	45.100.000,00
Perumahan Gading Permai 413.3/3884.3/BAST/VII/2023 Tgl 23 Juli 2023	1.386.543.200,00	72.380.000,00
Perumahan Mega Permai 413.3/3884.4/BAST/VII/2023 Tgl 27 Juli 2023	1.442.867.400,00	117.480.000,00
Sub Jumlah	3.513.598.100,00	234.960.000,00
Jumlah		3.748.558.100,00

4. Penambahan dari Reklasifikasi jenis Aset Tetap yang lain sebesar Rp1.041.835.097,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.3.63 Rincian Reklasifikasi dari jenis Aset Tetap yang lain per SKPD TA 2023

SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
Reklasifikasi dari AT-Gedung dan Bangunan		
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	416.112.097,00	Gedung dan Bangunan (pembangunan talud pada SDN Kalipuru Karangsembung dan SMPN 2 Sruweng)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	437.757.000,00	Gedung dan Bangunan (jaringan listrik dan drainase pada Pandan Kuning Park)
Sub Jumlah	853.869.097,00	
Reklasifikasi dari AT-Konstruksi Dalam Pengerjaan		
DPUPR	187.966.000,00	Konstruksi dalam Pengerjaan (DED)
Sub Jumlah	187.966.000,00	
Jumlah	1.041.835.097,00	

5. Penambahan dari Koreksi Pencatatan sebesar Rp418.126.989,00 terdiri dari:
 - a. Pada DPUPR sebesar Rp296.328.789,00 berupa koreksi penggabungan Reg. No. 217 (SPAM Desa Wonotirto Kecamatan Karanggayam);
 - b. BKPSDM sebesar Rp121.798.200,00 berupa penggabungan nilai jaringan distribusi (jaringan listrik).
6. Pengurangan berupa Reklasifikasi ke jenis Aset Tetap yang lain sebesar Rp285.363.428,00 terdiri dari:
 - a. Reklasifikasi ke AT Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.480.000,00 berupa kanopi pada Puskesmas Petanahan;
 - b. Reklasifikasi ke Aset Lainnya-Aset Lain-lain sebesar Rp281.883.428,00 merupakan usulan penghapusan yang diajukan oleh SKPD terhadap barang-barang dengan kondisi rusak berat pada Disdikpora (SDN 1 Kalipuru Kec. Karangsembung) berupa bangunan penguat tebing sebesar Rp215.257.428,00 dan pada DPMPTSP berupa jaringan distribusi lain sebesar Rp66.626.000,00.
7. Pengurangan dari Koreksi Pencatatan sebesar Rp458.815.629,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.3.64 Rincian Koreksi Pencatatan per SKPD TA 2023

SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
Puskesmas Klirong I	338.000,00	koreksi bukan aset tetap (suku cadang peralatan jaringan)
DPUPR	296.328.789,00	Koreksi penggabungan Reg. No.158 (SPAM Desa Wonotirto Kec.Karanggayam)
Dinsos P3A	38.350.640,00	koreksi bukan aset tetap (tambah daya listrik)
BKPSDM	121.798.200,00	koreksi penggabungan pencatatan jaringan listrik
Kel. Plarangan	2.000.000,00	koreksi bukan aset tetap (tambah daya listrik)
Jumlah	458.815.629,00	

8. Penambahan dan pengurangan dari Mutasi antar SKPD sebesar Rp1.037.516.319,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.3.65 Rincian Mutasi antar SKPD TA 2023

No	SKPD Asal	SKPD Penerima	Harga Perolehan (Rp)	Keterangan
1	DPUPR	Kel. Bumirejo	8.720.319,00	Jalan Desa (Gang Lawu)
2	Kec. Karanganyar	Kel. Panjatan	147.191.000,00	Jalan Desa
		Kel. Karanganyar	178.783.000,00	Jalan Desa
		Kel. Jatiluhur	702.822.000,00	Jalan Desa
Jumlah			1.037.516.319,00	

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

31 Desember 2023

31 Desember 2022

Rp111.986.224.096,00**Rp143.266.418.481,00**

Saldo Aset Tetap Lainnya tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp31.280.194.385,00 atau 21,83% dari tahun 2022 dengan rincian per rincian obyek pada tabel berikut:

Tabel 5.3.66 Rincian Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Bahan Perpustakaan Tercetak	91.679.667.515,00	123.130.754.615,00	(31.451.087.100,00)	(25,54)
Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	351.660.815,00	351.660.815,00	0,00	0,00
Kartografi Naskah dan Lukisan	777.846.134,00	777.896.134,00	(50.000,00)	(0,01)
Musik	82.816.192,00	82.816.192,00	0,00	0,00
Karya Grafika (<i>Graphic Material</i>)	36.910.851,00	36.910.851,00	0,00	0,00
<i>Three Dimensional Artifacts and Realita</i>	24.078.797,00	24.078.797,00	0,00	0,00
Tarscalt	67.713.177,00	67.713.177,00	0,00	0,00
Barang Bercorak Kesenian	13.697.081.107,00	13.552.340.674,00	144.740.433,00	1,07
Alat Bercorak Kebudayaan	1.521.058.250,00	1.494.855.968,00	26.202.282,00	1,75
Tanda Penghargaan	55.078.118,00	55.078.118,00	0,00	0,00
Tanaman	3.691.543.140,00	3.691.543.140,00	0,00	0,00
Barang Koleksi Non Budaya	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00
	111.986.224.096,00	143.266.418.481,00	(31.280.194.385,00)	(21,83)

Perhitungan mutasi Aset Tetap Lainnya tahun 2023 sebagai berikut.

Saldo awal 1 Jan 2023:	143.266.418.481,00
Mutasi tambah:	
Belanja Modal ATL TA 2023	
- Belanja Modal SKPD	Rp583.035.380,00
- Belanja Modal BOS	Rp10.873.160.652,00
Kapitalisasi dari Belanja Barjas TA 2023	Rp251.652.700,00
Penerimaan Hibah	Rp16.200.000,00
Reklasifikasi dari AT-Peralatan dan Mesin	Rp281.415.350,00
Hasil Inventarisasi	Rp4.099.712,00
Koreksi Pencatatan	Rp950.943,00
Mutasi antar SKPD	Rp272.648.043,00
Mutasi kurang:	
Reklasifikasi ke:	
- AT-Peralatan dan Mesin	(Rp755.661.780,00)
- Aset Lainnya-Aset Lain-lain	(Rp41.600.952.036,00)
Koreksi Pencatatan	(Rp934.095.306,00)
Mutasi antar SKPD	(Rp272.648.043,00)
Saldo akhir 31 Des 2023:	<u>Rp111.986.224.096,00</u>

Penjelasan mutasi tambah dan kurang saldo Aset Tetap Lainnya dijelaskan sebagai berikut.

1. Penambahan dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp11.456.196.032,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.3.67 Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2023

SKPD	SKPD (Rp)	BOS (Rp)
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	460.905.000,00	
Sekolah Dasar Negeri		6.928.161.381,00
Sekolah Menengah Pertama Negeri		3.944.999.271,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	516.000,00	
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	116.614.380,00	
Bagian Hukum	5.000.000,00	
Sub Jumlah	583.035.380,00	10.873.160.652,00
Jumlah		11.456.196.032,00

2. Penambahan dari Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2023 sebesar Rp251.652.700,00 berupa buku dari Belanja Barang dan Jasa BOS pada Disdikpora dengan rincian per satuan pendidikan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.68 Rincian Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2023

Satuan Pendidikan	Nilai (Rp)
SMPN 1 Prembun	1.496.000,00
SMPN 2 Kutowinangun	1.496.000,00
SMPN 3 Kutowinangun	6.316.800,00
SMPN 1 Ambal	8.060.000,00
SMPN 2 Buluspesantren	10.682.000,00
SMPN 1 Klirong	5.000.000,00
SMPN 1 Petanahan	17.600.000,00
SMPN 2 Adimulyo	46.983.600,00
SMPN 1 Puring	26.469.000,00
SMPN 2 Puring	25.763.600,00
SMPN 1 Ayah	36.486.000,00
SMPN 3 Satu Atap Ayah	37.419.700,00
SMPN 2 Buayan	27.880.000,00
Jumlah	251.652.700,00

3. Penambahan dari Penerimaan Hibah sebesar Rp16.200.000,00 berupa hibah alat musik dari komite pada SMPN 1 Kebumen sesuai BAST Nomor 020/11/2023 tanggal 30 Juni 2023.
4. Penambahan dari Reklasifikasi AT Peralatan dan Mesin sebesar Rp281.415.350,00 pada Disdikpora (dari Belanja Dana BOS pada SDN dan SMPN).
5. Penambahan dari Hasil Inventarisasi sebesar Rp4.099.712,00 berupa buku pada Disdikpora dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.3.69 Rincian Hasil Inventarisasi Aset Tetap Lainnya TA 2023

Satuan Pendidikan	Nilai (Rp)
SDN 1 Gunungmujil Kecamatan Kuwarasan	7.301,00
SDN Rowosari Kecamatan Bonorowo	1.843.400,00
SMPN 2 Prembun	792.000,00
SMPN 3 Satu Atap Ayah	1.457.011,00
Jumlah	4.099.712,00

6. Penambahan dari Koreksi Pencatatan sebesar Rp950.943,00 pada SDN 1 Krandegan Kec. Puring sebesar Rp305,00, SDN 2 Sidoharum Kec. Sempor sebesar Rp900.000,00 dan SMPN 1 Karangayam sebesar Rp50.638,00.
7. Pengurangan berupa Reklasifikasi ke jenis Aset Tetap yang lain sebesar Rp42.356.613.816,00 terdiri dari:
- Reklasifikasi ke AT Peralatan dan Mesin sebesar Rp755.661.780,00 pada Disdikpora dari Belanja Dana BOS.
 - Reklasifikasi ke Aset Lainnya-Aset Lain-lain sebesar Rp41.600.952.036,00 merupakan usulan penghapusan yang diajukan oleh SKPD terhadap barang-barang dengan kondisi rusak berat dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.3.70 Rincian Reklasifikasi ke Aset Lain-lain per SKPD TA 2023

SKPD	Nilai (Rp)
Disdikpora	41.528.606.160,00
Puskesmas Kuwarasan	50.000,00
Puskesmas Prembun	307.536,00
Puskesmas Rowokele	500.016,00
Disarpus	53.686.000,00
Bagian Pembangunan Setda	14.521.500,00
Bappeda	280.824,00

SKPD	Nilai (Rp)
Kel. Jatiluhur	3.000.000,00
Jumlah	41.600.952.036,00

8. Pengurangan dari Koreksi Pencatatan sebesar Rp934.095.306,00 karena tidak memenuhi kriteria aset tetap pada Disdikpora.
9. Penambahan dan pengurangan dari Mutasi antar SKPD sebesar Rp272.648.043,00 pada Disdikpora yaitu mutasi ke UPT Sanggar Kegiatan Belajar berupa alat kesenian senilai Rp2.300.000,00 dan *regrouping* SDN dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.3.71 Rincian Reklasifikasi ke Aset Lain-lain per SKPD TA 2023

Sekolah Asal	Sekolah Penerima	Harga Perolehan (Rp)	Keterangan
SDN 1 Sedayu	SDN 2 Sedayu	47.255.034,00	Kecamatan Gombong
SDN 1 Sempor	SDN 3 Sempor	129.135.900,00	Kecamatan Sempor
SDN 3 Jatinegara	SDN 2 Jatinegara	29.183.000,00	Kecamatan Sempor
SDN 1 Seboro	SDN 2 Seboro	64.774.109,00	Kecamatan Sadang
	Jumlah	270.348.043,00	

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

31 Desember 2023

31 Desember 2022

Rp9.455.386.708,00

Rp8.911.032.658,00

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp544.354.050,00 atau 6,11% dari tahun 2022 dengan rincian per rincian obyek pada tabel berikut:

Tabel 5.3.72 Rincian KDP Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	8.664.392.658,00	117.036.147,00	8.547.356.511,00	7.303,18
Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung	133.039.050,00	7.612.294.511,00	(7.479.255.461,00)	(98,25)
Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan dan Jembatan	657.955.000,00	1.181.702.000,00	(523.747.000,00)	(44,32)
Jumlah	9.455.386.708,00	8.911.032.658,00	544.354.050,00	6,11

Rincian saldo KDP per SKPD Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.3.73 Rincian KDP per SKPD Tahun 2023

SKPD	Nilai (Rp)	eterangan
Disdikpora	88.023.000,00	DED Gedung Eks Korwil Alian
Dinkes PPKB	72.594.000,00	DED RSUD Gombong
RSUD dr. Soedirman	415.646.000,00	DED dan Bangunan Gedung
RSUD Prembun	5.809.294.500,00	DED dan Bangunan Gedung
DPUPR	1.967.155.147,00	DED
DLHKP	98.829.000,00	DED Tugu Batas Kota, DED IPAL
Disperindag KUKM	692.892.011,00	DED Bangunan Pasar, IPAL, dan Shelter
Disparbud	310.953.050,00	DED Gedung Pusat Informasi Geopark
Jumlah	9.455.386.708,00	

Perhitungan mutasi KDP tahun 2023 sebagai berikut.

Saldo awal 1 Jan 2023:	Rp8.911.032.658,00
Mutasi tambah:	
Kapitalisasi dari Belanja Barjas TA 2023	Rp888.452.050,00
Mutasi kurang:	
Reklasifikasi ke:	
- AT-Gedung dan Bangunan	Rp156.132.000,00
- AT-Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp187.966.000,00
Saldo akhir 31 Des 2023:	<u>Rp9.455.386.708,00</u>

Penjelasan mutasi tambah dan kurang saldo KDP dijelaskan sebagai berikut.

1. Penambahan dari Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2023 sebesar Rp888.452.050,00 merupakan belanja jasa konsultan konstruksi berupa DED dengan rincian per SKPD pada tabel berikut:

Tabel 5.3.74 Rincian Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2023

SKPD	Nilai (Rp)
Disdikpora	88.023.000,00
Dinkes PPKB	72.594.000,00
DPUPR	657.955.000,00
Disparbud	69.880.050,00
Jumlah	888.452.050,00

2. Pengurangan berupa Reklasifikasi ke jenis Aset Tetap yang lain sebesar Rp344.098.000,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.3.75 Rincian Reklasifikasi ke jenis Aset Tetap yang lain per SKPD TA 2023

SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
Reklasifikasi ke AT-Gedung dan Bangunan		
Dinkes PPKB	58.674.000,00	Bangunan PKM Alian
Disperindag KUKM	97.458.000,00	Pusat Kuliner Kapal Mendoan
Sub Jumlah	156.132.000,00	
Reklasifikasi ke AT-Jalan, Jaringan dan Irigasi		
DPUPR	49.501.000,00	Jembatan Kabupaten Lain-lain (ruas Jl Meles - Banjareja Jembatan Serut 2)
	19.840.000,00	Bangunan Pembawa Air Irigasi D.I. Giyanti I
	69.047.000,00	Bangunan Pembawa Air Irigasi D.I. Kebaturan Ds. Sitiadi Kec.Puring
	24.817.000,00	Bangunan Pembawa Air Bersih Lain-lain (SPAM Ds.Adiwarno Kecamatan Buayan)
	24.761.000,00	Bangunan Pembawa Air Bersih Lain-lain (SPAM Ds.Kedungweru Kec.Ayah)
Sub Jumlah	187.966.000,00	
Jumlah	344.098.000,00	

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan

31 Desember 2023

31 Desember 2022

(Rp2.793.035.937.938,29) (Rp2.533.703.596.021,04)

Saldo Akumulasi Penyusutan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp259.332.341.917,25 atau 10,24% dari tahun 2022 dengan rincian per obyek pada tabel berikut:

Tabel 5.3.76 Rincian Akumulasi Penyusutan Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(888.026.934.255,00)	(824.733.775.708,00)	(63.293.158.547,00)	7,67
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(416.458.140.208,00)	(385.414.199.331,00)	(31.043.940.877,00)	8,05
Akumulasi Penyusutan Jalan Jaringan, dan Irigasi	(1.488.550.863.475,29)	(1.323.555.620.982,04)	(164.995.242.493,25)	12,47
Jumlah	(2.793.035.937.938,29)	(2.533.703.596.021,04)	(259.332.341.917,25)	10,24

Perhitungan mutasi Akumulasi Penyusutan tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel 5.3.77 Perhitungan Mutasi Akumulasi Penyusutan Tahun 2023

Uraian	Saldo Awal (Rp)	Beban (Rp)	Penambahan (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
			Pengurangan (Rp)	
Peralatan Mesin	(824.733.775.708,00)	(96.451.969.232,00)	(12.968.576.550,00)	(888.026.934.255,00)

Uraian	Saldo Awal (Rp)	Beban (Rp)	Penambahan (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
			Pengurangan (Rp)	
			(46.127.387.235,00)	
Gedung dan Bangunan	(385.414.199.331,00)	(33.086.146.261,00)	(3.055.893.143,00)	(416.458.140.208,00)
			(5.098.098.527,00)	
Jalan Irigasi dan Jaringan	(1.323.555.620.982,04)	(165.191.627.821,87)	(84.165.116,10)	(1.488.550.863.475,29)
			(280.550.444,72)	
Jumlah	(2.533.703.596.021,04)	(294.729.743.314,87)	(16.108.634.809,10)	(2.793.035.937.938,29)
			(51.506.036.206,72)	

Penjelasan mutasi tambah dan kurang saldo Akumulasi Penyusutan dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.3.78 Perhitungan Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan Tahun 2023

Uraian	Peralatan dan Mesin (Rp)	Gedung dan Bangunan (Rp)	Jalan, Jaringan dan Irigasi (Rp)
Mutasi Masuk	(12.359.553.461,00)	(3.031.203.143,00)	(57.545.327,00)
Mutasi Masuk Karena Kapitalisasi	0,00	0,00	(26.619.789,10)
Hibah	(240.157.500,00)	0,00	0,00
Hasil Inventarisasi	(100.539.008,00)	(24.690.000,00)	0,00
Koreksi Nilai	(940.000,00)	0,00	0,00
Reklasifikasi antar KIB	(57.350.000,00)	0,00	0,00
Batal Hapus	(4.000.000,00)	0,00	0,00
Koreksi Tahun	(159.483.900,00)	0,00	0,00
Ubah Kode	(46.552.681,00)	0,00	0,00
Sub Jumlah	(12.968.576.550,00)	(3.055.893.143,00)	(84.165.116,10)
Jumlah			(16.108.634.809,10)

Tabel 5.3.79 Perhitungan Mutasi Kurang Akumulasi Penyusutan Tahun 2023

Uraian	Peralatan dan Mesin (Rp)	Gedung dan Bangunan (Rp)	Jalan, Jaringan dan Irigasi (Rp)
Reklasifikasi ke Aset Lainnya (RB)	(33.454.204.168,00)	(1.035.816.470,00)	(165.671.050,00)
Koreksi Perhitungan Ulang	(946,00)	(3,00)	(9,72)
Mutasi Keluar	(12.359.553.461,00)	(3.031.203.143,00)	(57.545.327,00)
Mutasi Keluar Karena Kapitalisasi	0,00	0,00	(36.084.000,00)
Hibah	(215.426.000,00)	(983.974.714,00)	0,00
Pencatatan Ganda	(39.124.410,00)	0,00	0,00
Hasil Inventarisasi	-	(39.075.197,00)	0,00
Tidak Memenuhi Kategori Aset Tetap	(40.916.250,00)	0,00	0,00
Koreksi Nilai	(9.898.000,00)	0,00	(21.250.058,00)
Reklasifikasi antar KIB	(8.264.000,00)	(8.029.000,00)	0,00
Sub Jumlah	(46.127.387.235,00)	(5.098.098.527,00)	(280.550.444,72)
Jumlah			(51.506.036.206,72)

5.3.1.4 Dana Cadangan

31 Desember 2023

31 Desember 2022

Rp12.774.460.000,00

Rp15.000.000.000,00

Dana Cadangan per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp2.225.540.000,00 atau 14,84% dari tahun 2022, dengan mutasi sebagai berikut.

Saldo awal 1 Jan 2023:	Rp15.000.000.000,00
Mutasi tambah:	
Pengeluaran Pembiayaan –	
Pembentukan Dana Cadangan TA	Rp20.000.000.000,00
2023	

Mutasi kurang:	
Penerimaan Pembiayaan – Pencairan Dana Cadangan TA 2023	(Rp22.225.540.000,00)
Saldo akhir 31 Des 2023:	<u>Rp12.774.460.000,00</u>

Dalam rangka pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024 diperlukan biaya yang cukup besar dan tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran maka dibentuklah Dana Cadangan. Ketentuan Dana Cadangan berdasarkan Perda Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024. Penyisihan atas penerimaan daerah untuk Dana Cadangan dilakukan setiap tahun anggaran selama dua tahun anggaran, terhitung mulai TA 2022 s.d. TA 2023. Besaran Dana Cadangan ditetapkan sebesar Rp35.000.000.000,00 dengan rincian anggaran yang disisihkan pada TA 2022 sebesar Rp15.000.000.000,00 dan TA 2023 sebesar Rp20.000.000.000,00.

Pembentukan Dana Cadangan dianggarkan pada rekening Pengeluaran Pembiayaan dan telah dicairkan pada TA 2022 dengan SP2D Nomor 01789/LS-PEMBY/DAU/2022 tanggal 13 Desember 2022 sebesar Rp15.000.000.000,00 dan pada TA 2023 dengan SP2D Nomor 00107/LS-PEMBY/DAU/2023 tanggal 1 Maret 2023 sebesar Rp20.000.000.000,00.

Dana Cadangan tersebut tersimpan pada Rekening Dana Cadangan pada Bank Jateng Cabang Kebumen Nomor 1-008-01018-4. Atas Rekening Dana Cadangan tersebut, Pemkab Kebumen memperoleh jasa giro/bunga yang setiap bulan dilimpahkan ke RKUD pada Bank Jateng Cabang Kebumen Nomor 1-008-01372-9 dengan nilai keseluruhan selama TA 2022 sebesar Rp9.246.576,00 dan TA 2023 sebesar Rp980.018.170,00.

Pencairan Dana Cadangan TA 2023 sebesar Rp22.225.540.000,00 berdasarkan SE Mendagri Nomor 900.1.9.1/5252/SJ tanggal 29 September 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan NPHD antara Pemkab Kebumen dengan:

1. KPU Kabupaten Kebumen Nomor 26 Tahun 2023 dan 551/KU07-50/3305/2023 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024;
2. Bawaslu Kabupaten Kebumen Nomor 27 Tahun 2023 dan 1179/HK.02.00/K.JT-12/11/2023 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024.

Pencairan Dana Cadangan TA 2023 sebesar 40% disalurkan ke KPU sebesar Rp18.157.708.000,00 dan Bawaslu sebesar Rp4.067.832.000,00.

Sehingga sisa Dana Cadangan yang tersimpan pada rekening Bank Jateng Cabang Kebumen Nomor 1-008-01018-4 per 31 Desember 2023 sebesar Rp12.774.460.000,00.

5.3.1.5 Aset Lainnya

<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Rp116.722.478.191,44	Rp141.213.492.244,00

Saldo Aset Lainnya tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp24.491.014.052,56 atau 17,34% dari tahun 2022 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.3.80 Rincian Aset Lainnya Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	16.134.562.688,00	16.134.562.688,00	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	5.922.595.030,00	5.873.323.030,00	49.272.000,00	0,84
Aset Lain-lain	132.099.376.769,44	121.819.628.982,00	10.279.747.787,44	8,44
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(3.301.923.144,00)	(2.614.022.456,00)	(687.900.688,00)	26,32

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(34.132.133.152,00)	0,00	(34.132.133.152,00)	0,00
Jumlah	116.722.478.191,44	141.213.492.244,00	(24.491.014.052,56)	(17,34)

5.3.1.5.1 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

31 Desember 2023

31 Desember 2022

Rp16.134.562.688,00

Rp16.134.562.688,00

Kemitraan dengan Pihak Ketiga berupa aset Bangun Guna Serah atau *Built Operate Transfer* (BOT). Aktiva lain-lain BOT adalah penyertaan Pemkab Kebumen dalam kemitraannya dengan pihak ketiga. Adapun nilai penyertaan s.d. tahun 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.3.81 Rincian Kemitraan dengan Pihak Ketiga Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Tanah Pemkab HPL No.2, seluas 34.877m ² , di Pasar Gombong Wonokriyo	15.379.170.688,00	15.379.170.688,00	0,00	0,00
Tanah Pemkab HPL No.3, seluas 1.628m ² , di Pasar Gombong Wonokriyo	755.392.000,00	755.392.000,00	0,00	0,00
Jumlah	16.134.562.688,00	16.134.562.688,00	0,00	0,00

Nilai BOT di atas merupakan nilai pembangunan pasar Wonokriyo Gombong pada Tahun 1995, sesuai Surat Perjanjian Nomor 511.2.1336 dan 081.KBBP-SI/X/1995 tanggal 10 Oktober 1995 yang dikuatkan dengan Keputusan Kementerian Dalam Negeri nomor 644.133-166 tanggal 5 Maret 1996 antara Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan PT Karsa Bayu Bangun Perkasa. Dalam pembangunan pasar Wonokriyo Gombong, Pemerintah Kabupaten Kebumen menyertakan modal berupa tanah Milik Pemerintah Kabupaten Kebumen seluas 39.805m² (tiga puluh sembilan ribu delapan ratus lima meter persegi) senilai Rp4.962.112.500,00. Atas perjanjian kerjasama tersebut tidak diperoleh data nilai pembangunan Pasar Wonokriyo Gombong. Kemitraan ini disepakati sesuai dengan masa perjanjian adalah 30 (tiga puluh) tahun.

Pada tahun 2011 dilakukan koreksi penilaian atas tanah yang diserahkan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak tahun penyusunan neraca awal yaitu sebesar Rp17.552.192.000,00. Hal ini dilakukan karena tanah diserahkan sebelum neraca awal. Tahun 2014 dilakukan koreksi tambah atas aset tanah yang dimitrakan sebesar Rp755.392.000,00 sehingga total nilai kemitraan dengan pihak ketiga menjadi sebesar Rp18.307.584.000,00.

Pada tahun 2018, aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dikoreksi kurang seluas 4.928m² atau senilai Rp2.173.021.312,00 direklasifikasikan ke Aset Tetap Tanah, dengan adanya pelepasan hak pengelolaan yang dilakukan oleh PT Karsa Bayu Bangun Perkasa atas tanah untuk Pasar Wonokriyo Blok J, K, dan L akibat kebakaran yang terjadi pada tahun 2017.

5.3.1.5.2 Aset Tidak Berwujud

31 Desember 2023

31 Desember 2022

Rp5.922.595.030,00

Rp5.873.323.030,00

Saldo Aset Tidak Berwujud (ATB) tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp49.272.000,00 atau 0,84% dari tahun 2022 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.3.82 Rincian ATB Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
DED	1.560.440.000,00	1.511.168.000,00	49.272.000,00	3,26

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Software	4.362.155.030,00	4.362.155.030,00	0,00	0,00
Jumlah	5.922.595.030,00	5.873.323.030,00	49.272.000,00	0,84

Rincian ATB per SKPD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.83 Rincian ATB per SKPD Tahun 2023

SKPD	DED/Kajian (Rp)	Software (Rp)	Jumlah (Rp)
Disdikpora		69.025.600,00	69.025.600,00
Dinkes PPKB		15.690.000,00	15.690.000,00
RSUD dr. Soedirman		1.713.943.000,00	1.713.943.000,00
RSUD Prembun		33.000.000,00	33.000.000,00
Puskesmas Karanggayam II		4.000.000,00	4.000.000,00
Puskesmas Petanahan		79.600.000,00	79.600.000,00
DPUPR	1.335.506.000,00	7.900.000,00	1.343.406.000,00
Disperkimhub	224.934.000,00	181.945.900,00	406.879.900,00
BPBD		173.998.000,00	173.998.000,00
Diskominfo		350.317.150,00	350.317.150,00
Disperindag KUKM		259.148.180,00	259.148.180,00
Disparbud		121.110.000,00	121.110.000,00
Disarpus		194.258.100,00	194.258.100,00
Disnaker		96.765.000,00	96.765.000,00
Bagian Hukum Setda		80.473.300,00	80.473.300,00
Bagian Pembangunan Setda		82.809.000,00	82.809.000,00
Bagian Organisasi Setda		54.340.000,00	54.340.000,00
Bagian Pengadaan Barang Setda dan Jasa		122.658.800,00	122.658.800,00
Bappeda		105.862.000,00	105.862.000,00
BPKPD		575.311.000,00	575.311.000,00
BKPSDM		35.000.000,00	35.000.000,00
Kecamatan Kutowinangun		5.000.000,00	5.000.000,00
Jumlah	1.560.440.000,00	4.362.155.030,00	5.922.595.030,00

Perhitungan mutasi ATB tahun 2023 sebagai berikut.

Saldo awal 1 Jan 2023:	Rp5.873.323.030,00
Mutasi tambah:	
Kapitalisasi dari Belanja Barjas TA 2023	Rp49.272.000,00
Koreksi Pencatatan	Rp47.932.500,00
Mutasi kurang:	
Koreksi Pencatatan	(Rp47.932.500,00)
Saldo akhir 31 Des 2023:	<u><u>Rp5.922.595.030,00</u></u>

Penjelasan mutasi tambah dan kurang saldo ATB dijelaskan sebagai berikut.

1. Penambahan dari Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2023 sebesar Rp49.272.000,00 berupa kajian pada Disperkimhub;
2. Penambahan dan pengurangan dari Koreksi Pencatatan sebesar Rp47.932.500,00 atas *software* aplikasi pada Disarpus.

5.3.1.5.3 Aset Lain-lain

31 Desember 2023	31 Desember 2022
Rp132.099.376.769,44	Rp121.819.628.982,00

Saldo Aset Lain-lain tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp10.279.747.787,44 atau 8,44% dari tahun 2022 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.3.84 Rincian Aset Lain-lain Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Aset Rusak Berat/Usang	43.601.148.271,00	26.396.457.524,00	17.204.690.747,00	65,18
Aset Tetap yang Tidak Digunakan Operasional Pemerintah	84.268.931.423,00	95.423.171.458,00	(11.154.240.035,00)	(11,69)
TDF	4.229.297.075,44	0,00	4.229.297.075,44	100,00
Jumlah	132.099.376.769,44	121.819.628.982,00	10.279.747.787,44	8,44

1. Aset Rusak Berat/Usang

Perhitungan mutasi Aset Lain-lain tahun 2023 sebagai berikut.

Saldo awal 1 Jan 2023:	Rp26.396.457.524,00
Mutasi tambah:	
Penambahan Aset Rusak Berat/Usang	Rp79.979.333.173,00
Mutasi kurang:	
Penghapusan sesuai SK	(Rp62.758.742.121,00)
Reklasifikasi	(Rp11.000.000,00)
Koreksi Pencatatan	(Rp4.900.305,00)
Saldo akhir 31 Des 2023:	<u>Rp43.601.148.271,00</u>

Penjelasan mutasi tambah dan kurang saldo Aset Lain-lain dijelaskan sebagai berikut.

- a. Pengurangan karena Penghapusan sesuai SK sebesar Rp62.758.742.121,00 merupakan Aset Rusak Berat yang telah ditetapkan dalam SK tentang Penghapusan BMD dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.3.85 Rincian SK Penghapusan Aset Rusak Berat Tahun 2023

Nomor SK	Tanggal SK	Nilai (Rp)
Tahun 2023		
028/3668/KEP/2023	8 Juni 2023	10.796.719.681,00
000.2.4/3841/KEP/2023	12 Juli 2023	1.163.902.051,00
028/4312/KEP/2023	31 Oktober 2023	10.221.544.027,00
028/4685/KEP/2023	29 Desember 2023	28.456.386.528,00
028/4674/KEP/2023	29 Desember 2023	6.474.693.713,00
028/4673/KEP/2023	29 Desember 2023	5.406.092.621,00
	Sub Jumlah	62.519.338.621,00
Sebelum Tahun 2023		
028/353/KEP/2019	14 Agustus 2019	100.000.000,00
028/118/KEP/2021	23 Juni 2021	69.417.500,00
028/040.1/KEP/2022	12 Januari 2022	9.650.000,00
028/050/KEP/2022	21 November 2022	58.886.000,00
2161.2/2022	28 Desember 2022	1.450.000,00
	Sub Jumlah	239.403.500,00
	Jumlah	62.758.742.121,00

- c. Pengurangan karena reklasifikasi sebesar Rp11.000.000,00 merupakan reklasifikasi ke aset tetap pada Dinkes PPKB.
- d. Pengurangan karena Koreksi Pencatatan sebesar Rp4.900.305,00 pada Disdikpora dan Disnaker.

2. Aset Tetap yang Tidak Digunakan Operasional Pemerintah

- a. Aset berupa tanah pada Jalan Jalur Lingkar Selatan (JJLS) dan jalan desa pada DPUPR yang belum diserahkan ke Pemerintah Pusat dan ke Pemerintah Desa sebesar Rp83.804.781.923,00.

Tidak terdapat mutasi tambah tetapi terdapat mutasi kurang sebesar Rp11.154.240.035,00 karena diserahkan ke desa dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.3.86 Rincian Jalan Desa pada DPUPR yang Diserahkan ke Desa Tahun 2023

Nama Barang	Nilai (Rp)
Jalan Desa (JP. Kajoran - Clapar)	4.350.000,00
Jalan Desa (JP. Jatimulyo - Kritik)	15.183.000,00
Jalan Desa (JP. Tembus Ds. Kenteng - Semali)	17.021.702,00
Drainase Dk Gunungmujil	24.211.250,00
Jalan Desa (JP. Karangkemiri - Grenggeng)	31.977.292,00
Jalan Desa (JP. Candi)	31.978.315,00
Jalan Desa (JP. Jatimulyo - Menganti)	34.953.726,00
Jalan Desa (JP. Kaliwungo-Klegenwonosari)	39.421.932,00
Jalan Desa (JP. Jintung - Argosari)	44.850.232,00
Jalan Desa (JP. Widoro-SMPN 1 Alian)	44.893.038,00
Jalan Desa (Plat Deuker Dukuh Jengklok Desa Semanding)	47.695.927,00
Jalan Desa (JP. Surotrunan- Soka)	49.934.039,00
Jalan Desa (JP. Sempor - Jatinegara)	99.099.000,00
Drainase dorowati	112.166.950,00
Drainase Pasar Unggas Petanahan	118.309.100,00
Drainase Dk. Pekandangan Sidomoro Kec Buluspesantren	144.616.500,00
Jalan Desa (JP. Karangsari - Pesalakan)	149.510.414,00
Drainase Dk Wanasari Ds Jatimulyo Kuwarasan	149.814.350,00
Jalan Desa (Jl. Ds Bener Wetan)	151.511.608,00
Jalan Desa (JP. Pasarkubang - seling)	199.595.000,00
Jalan Desa (jl. kuwayuhan-kebulusan)	252.982.700,00
Jalan Desa (jl. karanggedang-sruweng)	405.492.992,00
Jalan Desa (jl. kembaran-gondangllegi)	516.324.016,00
Jalan Desa (jl. sodor-kuwayuhan)	549.344.792,00
Jalan Desa (jl. grenggeng-klopogodo)	1.054.852.224,00
Jalan Desa (jl. meles-banyuroto)	1.248.576.417,00
Jalan Desa (jl. candiwulan-pagutan)	1.638.229.675,00
Jalan Desa (jl. bonjok kidul-pujodadi)	1.858.213.348,00
Jalan Desa (jl. sitireja-tanjungsari)	2.119.130.496,00
Jumlah	11.154.240.035,00

- b. Aset berupa DED (*Detail Engineering Design*) milik pihak lain yang belum diserahkan sebesar Rp464.149.500 yang terdiri dari:
- DED jembatan jalan desa pada BPBD sebesar Rp61.473.000,00;
 - DED Desa Wisata Seboro, Karangsembung, Desa Pasir, Desa Tirtomoyo pada Disparbud sebesar Rp83.526.000,00;
 - DED GOR Desa Ambalresmi, Jembatan Ambalkliwonan, Gedung Mapolres Kebumen, Jaringan Irigasi pedesaan, Jalan Desa Gemeksekti, dan DED perbaikan tebing tanggul sungai pada DPUPR sebesar Rp319.150.500,00.

3. Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF)

TDF adalah fasilitas yang disediakan oleh bendahara umum Negara bagi pemerintah daerah untuk menyimpan uang ke bendahara umum Negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia.

Pada tahun 2023, Pemkab Kebumen telah mendapatkan salur atas TDF dari Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah senilai Rp4.229.297.075,44 sesuai surat dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah Nomor S-802/WPB.14/2023 tanggal 15 Februari 2023 tentang Penyampaian Data Saldo dan Remunerasi *Treasury Deposit Facility* Transfer ke Daerah (TDF-TKD) Tahun 2022 dan Surat Edaran dari Direktur Bina Keuangan Daerah nomor 900.1.14.1/7481/Keuda tanggal 15 Maret 2023 tentang Pengelolaan DBH dan/atau DAU Melalui Fasilitas TDF.

5.3.1.5.4 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

31 Desember 2023

31 Desember 2022

(Rp3.301.923.144,00)

(Rp2.614.022.456,00)

Saldo Akumulasi Amortisasi ATB tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp687.900.688,00 atau 26,32% dari tahun 2022 dengan rincian per SKPD pada tabel berikut:

Tabel 5.3.87 Rincian Akumulasi Amortisasi ATB per SKPD Tahun 2023

SKPD	Nilai Perolehan (Rp)	Amortisasi (Rp)	Nilai Buku (Rp)
Disdikpora	69.025.600,00	(36.711.940,00)	32.313.660,00
Dinkes PPKB	15.690.000,00	(5.757.000,00)	9.933.000,00
RSUD dr. Soedirman	1.713.943.000,00	(954.656.400,00)	759.286.600,00
RSUD Prembun	33.000.000,00	(16.500.000,00)	16.500.000,00
Puskesmas Karanggayam II	4.000.000,00	(2.000.000,00)	2.000.000,00
Puskesmas Petanahan	79.600.000,00	(23.880.000,00)	55.720.000,00
DPUPR	1.343.406.000,00	(513.702.800,00)	829.703.200,00
Disperkimhub	406.879.900,00	(149.227.140,00)	257.652.760,00
BPBD	173.998.000,00	(34.799.600,00)	139.198.400,00
Diskominfo	350.317.150,00	(254.410.900,00)	95.906.250,00
Disperindag KUKM	259.148.180,00	(188.619.144,00)	70.529.036,00
Disparbud	121.110.000,00	(91.938.000,00)	29.172.000,00
Disarpus	194.258.100,00	(110.563.600,00)	83.694.500,00
Disnaker	96.765.000,00	(61.255.000,00)	35.510.000,00
Bagian Hukum Setda	80.473.300,00	(64.378.640,00)	16.094.660,00
Bagian Pembangunan Setda	82.809.000,00	(82.809.000,00)	0,00
Bagian Organisasi Setda	54.340.000,00	(43.472.000,00)	10.868.000,00
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda	122.658.800,00	(73.595.280,00)	49.063.520,00
Bappeda	105.862.000,00	(80.174.200,00)	25.687.800,00
BPKPD	575.311.000,00	(478.972.500,00)	96.338.500,00
BKPSDM	35.000.000,00	(31.500.000,00)	3.500.000,00
Kecamatan Kutowinangun	5.000.000,00	(3.000.000,00)	2.000.000,00
Jumlah	5.922.595.030,00	(3.301.923.144,00)	2.620.671.886,00

5.3.1.5.5 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

31 Desember 2023

31 Desember 2022

(Rp34.132.133.152,00)

Rp0,00

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp34.132.133.152,00 atau 100% dari tahun 2022.

5.3.2 Kewajiban

31 Desember 2023

31 Desember 2022

Rp58.789.647.975,97

Rp36.584.708.422,94

Kewajiban merupakan kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat dari transaksi keuangan masa lalu. Kewajiban dibagi dua yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang, secara rinci disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.3.88 Rincian Kewajiban Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Kewajiban Jangka Pendek	58.789.647.975,97	36.584.708.422,94	22.204.939.553,03	60,69
Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	58.789.647.975,97	36.584.708.422,94	22.204.939.553,03	60,69

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

31 Desember 2023

31 Desember 2022

Rp58.789.647.975,97

Rp36.584.708.422,94

Kewajiban Jangka Pendek menggambarkan jumlah kewajiban daerah yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun sejak tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Saldo Kewajiban Jangka Pendek tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp22.204.939.553,03 atau 60,69% dari tahun 2022 dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.3.89 Rincian Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	6.438.730,00	9.326.302,00	(2.887.572,00)	(30,96)
Pendapatan Diterima Dimuka	2.002.249.183,97	1.109.331.028,94	892.918.155,03	80,49
Utang Belanja	56.780.960.062,00	35.466.051.092,00	21.314.908.970,00	60,10
Jumlah	58.789.647.975,97	36.584.708.422,94	22.204.939.553,03	60,69

5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

31 Desember 2023

31 Desember 2022

Rp6.438.730,00

Rp9.326.302,00

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.438.730,00 merupakan utang pajak yang sudah dipungut oleh Bendahara Dana BOS namun s.d. tanggal 31 Desember 2023 belum disetor ke RKUN, dengan perhitungan mutasi sebagai berikut.

Saldo awal 1 Jan 2023:	Rp9.326.302,00
Mutasi tambah:	
Penerimaan potongan PFK TA 2023	Rp956.123.986,00
Mutasi kurang:	
Penyetoran potongan PFK TA 2023	(Rp949.685.256,00)
Penyetoran potongan PFK TA 2022	(Rp9.326.302,00)
Saldo akhir 31 Des 2023:	<u>Rp6.438.730,00</u>

5.3.2.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka

31 Desember 2023

31 Desember 2022

Rp2.002.249.183,97

Rp1.109.331.028,94

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang sudah diterima oleh Pemerintah Daerah namun belum sepenuhnya merupakan hak Pemerintah Daerah, karena menyangkut pendapatan atas periode berikutnya.

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp892.918.155,03 atau 80,49% dari tahun 2022. Rincian saldo Pendapatan Diterima Dimuka disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.3.90 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Pendapatan Diterima Dimuka lainnya	0,00	1.109.331.028,94	(1.109.331.028,94)	(100,00)
Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	406.482.862,83	0,00	406.482.862,83	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	972.165.639,17	0,00	972.165.639,17	0,00

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	53.326.800,00	0,00	53.326.800,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	529.519.849,83	0,00	529.519.849,83	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Reklame Kain	40.754.032,14	0,00	40.754.032,14	0,00
Jumlah	2.002.249.183,97	1.109.331.028,94	892.918.155,03	80,49

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal sebesar Rp406.482.862,83 dikelola oleh:
 - a. Kecamatan Kebumen sebesar Rp66.776.987,00, Kecamatan Karanganyar sebesar Rp192.610.775,00 dan Kecamatan Gombong sebesar Rp92.647.450,00 yang berasal dari pendapatan sewa tanah eks bengkok kelurahan.
 - b. RSUD dr Soedirman sebesar Rp54.354.270,83 yang berasal dari pendapatan kerja sama dengan pihak ketiga, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.3.91 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka RSUD dr Soedirman Tahun 2023

Nomor & Nama Subyek Perjanjian	Nilai Perjanjian	Jangka Waktu	Masa Manfaat (bulan)	Sisa Masa Manfaat (bulan)	Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka
026/MSD/ADD-RSUDDSK/XII/2015 PT MAC SARANA DJAYA	275.000.000,00	1 Apr 2015 s.d. 1 Apr 2025	120	15	34.375.000,00
445/0459a/PKS/XII/2019 STIKES MADANI YOGYAKARTA	5.000.000,00	23 Des 2019 s.d. 22 Des 2024	60	12	1.000.000,00
007/B/MoU/UAA/II/2020 UNIVERSITAS ALMA ATA	7.500.000,00	21 Feb 2020 s.d. 20 Feb 2025	60	14	1.750.000,00
KBM/SEWA/003 BNI CABANG KEBUMEN	50.000.000,00	1 Apr 2020 s.d. 31 Mar 2025	60	15	12.500.000,00
445/2181/PKS/VI/2021 AKPER PURWOREJO	750.000,00	2021 s.d. 2023	36	0	0,00
445/3187/PKS/IX/2020 STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA	1.500.000,00	2021 s.d. 2023	36	0	0,00
011/1574.23/PKS/IV/2023 KOPERASI SEHAT RSUD Dr.SOEDIRMAN	16.333.750,00	1 Apr 2023 s.d. 31 Mar 2028	12	3	4.083.437,50
445/3110/PKS/VII/2023 POLITEKNIK KESEHATAN BHAKTI SETYA I	750.000,00	17 Jul 2023 s.d. 16 Jul 2026	36	31	645.833,33
Jumlah	356.833.750,00				54.354.270,83

2. Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan sebesar Rp972.165.639,17 dikelola oleh:
 - a. Disperindag KUKM sebesar Rp742.368.116,67 yang berasal dari Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir di wilayah pasar Kabupaten Kebumen dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.3.92 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka - Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan pada Disperindag KUKM Tahun 2023

Nomor Perjanjian Nama Pihak Ketiga Obyek Perjanjian	Jangka Waktu	Masa Manfaat (bulan)	Sisa Masa Manfaat (bulan)	Nilai Sewa (Rp)	Nilai Pendapatan Diterima Dimuka (Rp)
510.7.2/3334.4/2023 Agan Suhari Lahan Parkir Pasar Ayah, Candirenggo, Demangsari	16/03/2023 s.d 15/03/2024	12	3	82.800.200,00	20.700.050,00
510.7.2/3334.5/2023 Akif Fatwal Amin Pasar Burung dan Klitikan	16/03/2023 s.d. 15/03/2024	12	3	101.101.100,00	25.275.275,00
510.7.2/3228/2023 Lufi Al Hakim Pasar Giwangretno dan Pasar Puring	1/03/2023 s.d. 29/02/2024	12	2	72.099.900,00	12.016.650,00
510.7.2/3334.7/2023 Agan Suhari Pasar Jtaisari dan Pasar Kabekelen	16/03/2023 s.d. 15/03/2024	12	3	80.437.000,00	20.109.250,00
510.7.2/3334/3/2023 Heksa Heri Sukarno Pasar Karanganyar dan pasar hewan karanganyar	16/03/2023 s.d 15/03/2024	12	3	165.500.000,00	41.375.000,00
510.7.2/32299/2023 Agan Suhari Pasar Tumenggungan	1/03/2023 s.d. 29/02/2024	12	2	1.606.000.000,00	267.666.666,67
510.7.2/3334.6/2023 Fahmi Aziz Muslim Pasar Wonokriyo dan Pasar Unggas Gombong	16/03/2023 s.d. 15/03/2024	12	3	1.420.900.900,00	355.225.225,00
				Jumlah	742.368.116,67

b. BPKPD sebesar Rp229.797.522,50 yang berasal dari Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan dalam bentuk sewa.

- Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan sebesar Rp53.326.800,00 dikelola oleh Bagian Umum Setda berasal dari sewa tempat untuk Kantin, Koperasi dan ATM Bank Jateng di kompleks Setda Kebumen, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.93 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka - Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Tahun 2023

Nomor & Nama Subyek Perjanjian	Nilai Perjanjian (Rp)	Jangka Waktu	Masa Manfaat (bulan)	Sisa Masa Manfaat (bulan)	Nilai Pendapatan Diterima Dimuka (Rp)
030/4118.2 Ketua Koperasi Sumber Agung (SAGU) Kebumen	4.428.000,00	16 Sept 2023 s.d. 15 Sept 2024	12	9	3.321.000,00
030/4118.1 Ketua Koperasi Sumber Agung (SAGU) Kebumen	5.940.000,00	16 Sept 2023 s.d. 15 Sept 2024	12	9	4.455.000,00
030/4118.4 Ketua Dharma Wanita Persatuan Kab Kebumen	5.184.000,00	16 Sept 2023 s.d. 15 Sept 2024	12	9	3.888.000,00
030/4118.3 Ketua Dharma Wanita Persatuan Setda Kebumen	3.780.000,00	16 Sept 2023 s.d. 15 Sept 2024	12	9	2.835.000,00
030/3900 Sewa lahan rumah ATM	32.670.000,00	30 Juni 2023 s.d. 30 Juni 2028	60	54	29.403.000,00
030/1192.1 PT.Bank Jateng Cabang Kebumen	33.264.000,00	1 April 2020 s.d. 31 Mei 2025	60	17	9.424.800,00
Jumlah	85.266.000,00				53.326.800,00

- Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron sebesar Rp529.519.849,83 dikelola oleh BPKPD.
- Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Reklame Kain sebesar Rp40.754.032,14 dikelola oleh BPKPD.

5.3.2.1.3 Utang Belanja

31 Desember 2023

31 Desember 2022

Rp56.780.960.062,00

Rp35.466.051.092,00

Utang Belanja merupakan kewajiban-kewajiban yang masih harus dibayar yang s.d. 31 Desember 2023 belum dibayar oleh SKPD.

Saldo Utang Belanja tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp21.314.908.970,00 atau 60,10% dari tahun 2022 dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.3.94 Rincian Utang Pemda Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Utang Belanja Pegawai				
Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	8.343.188.156,00	8.745.576.801,00	(402.388.645,00)	(4,60)
Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN-Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	18.937.176.800,00	1.515.000.099,00	17.422.176.701,00	1.149,98
Utang Belanja Pegawai BLUD	0,00	13.500.000,00	(13.500.000,00)	(100,00)
Utang Belanja Jasa			-	0,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan	0,00	1.333.571.561,00	(1.333.571.561,00)	(100,00)
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	6.697.600,00	182.664.432,00	(175.966.832,00)	(96,33)
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	20.560.524,00	13.976.969,00	6.583.555,00	47,10
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	31.104.800,00	26.010.150,00	5.094.650,00	19,59
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	1.140.625.026,00	1.356.288.461,00	(215.663.435,00)	(15,90)
Utang Belanja Jasa Kantor-Langgan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	0,00	1.151.000,00	(1.151.000,00)	(100,00)
Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	30.312.726,00	46.902.412,00	(16.589.686,00)	(35,37)
Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi- Kontribusi Jaminan Kesehatan PBI	0,00	8.519.100,00	(8.519.100,00)	(100,00)
Utang Belanja Barjas BLUD			-	0,00
Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	28.271.294.430,00	22.222.890.107,00	6.048.404.323,00	27,22
Jumlah	56.780.960.062,00	35.466.051.092,00	21.314.908.970,00	60,10

Rincian Utang Belanja tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Utang Belanja Pegawai

Merupakan Tambahan Penghasilan PNS bulan Desember 2023 dan Utang Belanja Tunjangan Hari Raya (THR) 50% dan Gaji ke-13 50% Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD yang belum dibayarkan.

Utang Belanja THR 50% dan Gaji ke-13 – 50% berdasarkan PP Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian THR dan Gaji Ke-13 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 pada Pasal 6 angka (4) yang menyatakan bahwa dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari APBD tidak menerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dapat diberikan paling banyak 50% (lima puluh persen) TPG atau paling banyak 50% (lima puluh persen) TPG Aparatur Sipil Negara yang diterima dalam 1 (satu) bulan dan PMK Nomor 39 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian THR dan Gaji Ke-13

kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 yang Bersumber dari APBN.

2. Utang Belanja Barjas BLUD

Merupakan beban atas pemakaian daya dan jasa kantor/jasa lainnya pada SKPD yang belum dibayarkan.

3. Utang Belanja Jasa

Merupakan jasa pelayanan yang belum direalisasikan oleh Puskesmas dan RSUD s.d. 31 Desember 2023.

5.3.3 Ekuitas

31 Desember 2023	31 Desember 2022
Rp4.458.091.640.119,65	Rp4.592.239.658.445,71

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban pemerintah daerah pada tanggal pelaporan.

Saldo Ekuitas tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp134.148.018.326,06 atau 2,92% dari tahun 2022 yang berasal dari Saldo Akhir Ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

5.4. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode laporan.

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam:

1. Pendapatan Operasional adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
2. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
3. Kegiatan Non Operasional menyajikan surplus dan defisit kegiatan non operasional;
4. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan; dan
5. Surplus/Defisit-LO.

Berikut Laporan Operasional Pemkab Kebumen pada Tahun 2023:

Tabel 5.4.1 Penjelasan Laporan Operasional

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Pendapatan - LO	2.443.408.168.436,75	2.325.032.220.885,83	118.375.947.550,92	5,09
Beban - LO	2.514.165.363.863,43	2.370.418.850.768,09	143.746.513.095,34	6,06
Surplus/Defisit dari Operasi	(70.757.195.426,68)	(45.386.629.882,26)	(25.370.565.544,42)	55,90
Kegiatan Non Operasional	(61.892.277.453,00)	(15.006.573.830,00)	(46.885.703.623,00)	312,43
Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	(132.649.472.879,68)	(60.393.203.712,26)	(72.256.269.167,42)	119,64
Pos Luar Biasa	(409.940.801,00)	(1.295.204.500,00)	885.263.699,00	(68,35)
Surplus/Defisit - LO	(133.059.413.680,68)	(61.688.408.212,26)	(71.371.005.468,42)	115,70

Penjelasan atas Laporan Operasional Pemkab Kebumen disajikan sebagai berikut.

5.4.1 Pendapatan - LO

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp2.443.408.168.436,75	Rp2.325.032.220.885,83

Pendapatan – LO merupakan pendapatan yang menjadi hak Pemkab Kebumen Tahun 2023 dan telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.4.2 Rincian Pendapatan - LO

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Pendapatan Asli Daerah - LO	481.542.295.383,31	439.947.986.564,83	41.594.308.818,48	9,45
Pendapatan Transfer - LO	1.946.750.067.311,44	1.879.833.663.558,00	66.916.403.753,44	3,56
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO	15.115.805.742,00	5.250.570.763,00	9.865.234.979,00	187,89
Jumlah	2.443.408.168.436,75	2.325.032.220.885,83	118.375.947.550,92	5,09

Pendapatan – LO Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp118.375.947.550,92 atau 5,09% dari Tahun 2022.

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp481.542.295.383,31	Rp439.947.986.564,83

PAD - LO Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar sebesar Rp41.594.308.818,48 atau 9,45% dari Tahun 2022, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.4.3 Rincian PAD - LO

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Pajak Daerah - LO	138.433.022.893,88	129.947.088.731,15	8.485.934.162,73	6,53
Retribusi Daerah - LO	28.398.881.530,25	29.168.471.204,41	(769.589.674,16)	(2,64)
Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah Yang Dipisahkan - LO	35.664.544.215,92	17.640.585.052,00	18.023.959.163,92	102,17
Lain-lain PAD Yang Sah - LO	279.045.846.743,26	263.191.841.577,27	15.854.005.165,99	6,02
Jumlah	481.542.295.383,31	439.947.986.564,83	41.594.308.818,48	9,45

5.4.1.1.1 Pajak Daerah - LO

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp138.433.022.893,88	Rp129.947.088.731,15

Pendapatan Pajak Daerah - LO Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar sebesar Rp8.485.934.162,73 atau 6,53% dari Tahun 2022 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.4.4 Rincian Pajak Daerah - LO

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Pajak Hotel-LO	2.910.983.634,00	2.460.004.956,00	450.978.678,00	18,33
Pajak Restoran - LO	13.238.021.599,00	11.176.837.800,00	2.061.183.799,00	18,44
Pajak Hiburan-LO	1.134.676.744,00	545.284.159,00	589.392.585,00	108,09
Pajak Reklame-LO	2.180.273.224,88	1.599.115.143,15	581.158.081,73	36,34
PPJ-LO	42.269.699.527,00	39.261.189.956,00	3.008.509.571,00	7,66
Pajak Parkir-LO	741.916.899,00	635.175.253,00	106.741.646,00	16,81
Pajak Air Tanah-LO	404.636.500,00	454.150.360,00	(49.513.860,00)	(10,90)
Pajak Sarang Burung Walet-LO	0,00	5.100.000,00	(5.100.000,00)	(100,00)
Pajak MBLB-LO	582.341.674,00	715.667.750,00	(133.326.076,00)	(18,63)
PBBP2-LO	58.347.321.046,00	57.110.930.395,00	1.236.390.651,00	2,16
BPHTB-LO	16.623.152.046,00	15.983.632.959,00	639.519.087,00	4,00
Jumlah	138.433.022.893,88	129.947.088.731,15	8.485.934.162,73	6,53

Perbandingan Pendapatan Pajak Daerah - LO dengan LRA Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.5 Perbandingan Pendapatan Pajak Daerah - LO dengan LRA Tahun 2023

Uraian	LO Tahun 2023 (Rp)	LRA Tahun 2023 (Rp)	Selisih (Rp)
Pajak Hotel	2.910.983.634,00	2.915.673.634,00	(4.690.000,00)
Pajak Restoran	13.238.021.599,00	13.254.656.107,00	(16.634.508,00)
Pajak Hiburan	1.134.676.744,00	1.129.890.815,00	4.785.929,00
Pajak Reklame	2.180.273.224,88	2.324.243.500,00	(143.970.275,12)
PPJ	42.269.699.527,00	42.269.699.527,00	0,00
Pajak Parkir	741.916.899,00	744.359.699,00	(2.442.800,00)
Pajak Air Tanah	404.636.500,00	405.744.478,00	(1.107.978,00)
Pajak MBLB	582.341.674,00	593.014.174,00	(10.672.500,00)
PBBP2	58.347.321.046,00	56.985.271.522,00	1.362.049.524,00
BPHTB	16.623.152.046,00	16.600.152.046,00	23.000.000,00
Jumlah	138.433.022.893,88	137.222.705.502,00	1.210.317.391,88

Selisih atas Pendapatan Pajak Daerah – LO dengan LRA tersebut dijelaskan sebagai berikut.

1. Selisih Pendapatan Pajak Hotel sebesar Rp4.690.000,00 merupakan selisih antara saldo Piutang Pajak Hotel per 31 Desember 2023 sebesar Rp100.000,00 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.790.000,00;
2. Selisih Pajak Restoran sebesar Rp16.634.508,00 merupakan selisih antara saldo Piutang Pajak Restoran per 31 Desember 2023 sebesar Rp27.837.993,00 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp11.203.485,00;
3. Selisih Pajak Hiburan sebesar Rp4.785.929,00 merupakan selisih antara saldo Piutang pajak hiburan per 31 Desember 2023 sebesar Rp7.185.929,00 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.400.000,00;

4. Selisih Pajak Reklame sebesar Rp143.970.275,12 merupakan selisih antara saldo Piutang Reklame per 31 Desember 2023 sebesar Rp69.630.797,00 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp46.236.750,00 dikurangi selisih antara saldo Pendapatan Diterima DiMuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp570.273.881,97 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp402.909.559,85;
5. Selisih Pajak Parkir sebesar Rp2.442.800,00 merupakan selisih antara saldo Piutang Pajak Parkir per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.347.200,00 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.790.000,00;
6. Selisih Pajak Air Tanah sebesar Rp1.107.978,00 merupakan selisih antara saldo Piutang Pajak Air Tanah per 31 Desember 2023 sebesar Rp9.425.122,00 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp10.533.100,00;
7. Selisih Pajak MBLB sebesar Rp10.672.500,00 merupakan selisih antara saldo Piutang MBLB per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.187.500,00 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp12.860.000,00;
8. Selisih PBB-P2 sebesar Rp1.362.049.524,00 merupakan selisih antara saldo Piutang PBBP2 per 31 Desember 2023 sebesar Rp9.232.614.208,00 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp7.870.564.684,00;
9. Selisih BPHTB sebesar Rp23.000.000,00 merupakan selisih antara saldo Piutang BPHTB per 31 Desember 2023 sebesar Rp23.500.000,00 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp500.000,00.

5.4.1.1.2 Retribusi Daerah - LO

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp28.398.881.530,25	Rp29.168.471.204,41

Pendapatan Retribusi Daerah - LO Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp769.589.674,16 atau 2,64% dari tahun 2022 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.4.6 Rincian Retribusi Daerah - LO

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO	820.166.300,00	1.305.252.800,00	(485.086.500,00)	(37,16)
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan – LO	1.441.471.300,00	1.363.595.100,00	77.876.200,00	5,71
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO	1.170.762.700,00	1.259.225.000,00	(88.462.300,00)	(7,03)
Retribusi Pelayanan Pasar – LO	6.568.171.801,00	6.612.857.639,00	(44.685.838,00)	(0,68)
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor – LO	548.336.000,00	621.044.000,00	(72.708.000,00)	(11,71)
Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang - LO	140.955.500,00	117.611.500,00	23.344.000,00	0,00
Retribusi Pelayanan Pendidikan – LO	84.120.000,00	85.128.000,00	(1.008.000,00)	(1,18)
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi – LO	1.271.616.000,00	1.808.616.000,00	(537.000.000,00)	(29,69)
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO	4.746.141.674,92	3.903.130.772,41	843.010.902,51	21,60
Retribusi Tempat Pelelangan – LO	1.438.639.484,00	893.216.161,00	545.423.323,00	61,06
Retribusi Terminal – LO	94.461.000,00	97.994.200,00	(3.533.200,00)	(3,61)
Retribusi Tempat Khusus Parkir – LO	4.279.152.483,33	4.183.632.300,00	95.520.183,33	2,28
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesangrahan/ Villa – LO	27.610.000,00	26.740.000,00	870.000,00	3,25
Retribusi Rumah Potong Hewan – LO	37.877.500,00	25.950.000,00	11.927.500,00	45,96
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO	4.720.282.500,00	4.973.498.300,00	(253.215.800,00)	(5,09)

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Retribusi IMB – LO	997.687.287,00	1.863.794.432,00	(866.107.145,00)	(46,47)
Retribusi Izin Trayek – LO	11.430.000,00	27.185.000,00	(15.755.000,00)	(57,95)
Jumlah	28.398.881.530,25	29.168.471.204,41	(769.589.674,16)	(2,64)

Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LO per SKPD disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.7 Rincian Retribusi Daerah – LO per SKPD

SKPD	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Disdikpora	220.117.000,00	115.435.400,00	104.681.600,00	90,68
Dinkes PPKB	820.166.300,00	1.305.252.800,00	(485.086.500,00)	(37,16)
DPUPR	1.623.837.287,00	2.516.194.432,00	(892.357.145,00)	(35,46)
Disperkimhub	2.206.555.200,00	2.327.999.450,00	(121.444.250,00)	(5,22)
DLHKP	2.843.396.494,00	2.070.635.911,00	772.760.583,00	37,32
Diskominfo	363.279.835,00	247.158.692,00	116.121.143,00	46,98
Disperindag KUKM	11.456.254.544,33	11.286.958.939,00	169.295.605,33	1,50
DPMPTSP	1.543.956.730,00	1.808.616.000,00	(264.659.270,00)	(14,63)
Disparbud	5.730.635.329,00	5.664.696.104,00	65.939.225,00	1,16
Distapang	117.557.500,00	117.283.000,00	274.500,00	0,23
Disnaker	84.120.000,00	85.128.000,00	(1.008.000,00)	(1,18)
Setda	135.929.000,00	64.849.800,00	71.079.200,00	109,61
BPKPD	294.236.377,67	720.497.372,66	(426.260.994,99)	(59,16)
Kecamatan dan Kelurahan	958.839.933,25	837.765.303,75	121.074.629,50	14,45
Jumlah	28.398.881.530,25	29.168.471.204,41	(769.589.674,16)	(2,64)

Perbandingan Pendapatan Retribusi Daerah - LO dengan LRA Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.8 Perbandingan Pendapatan Retribusi Daerah - LO dengan LRA Tahun 2023

Uraian	LO Tahun 2023 (Rp)	LRA Tahun 2023 (Rp)	Selisih (Rp)
Retribusi Pelayanan Kesehatan	820.166.300,00	795.516.300,00	24.650.000,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.441.471.300,00	1.441.471.300,00	0,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.170.762.700,00	1.170.762.700,00	0,00
Retribusi Pelayanan Pasar	6.568.171.801,00	6.246.595.015,00	321.576.786,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	548.336.000,00	548.336.000,00	0,00
Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang	140.955.500,00	140.955.500,00	0,00
Retribusi Pelayanan Pendidikan	84.120.000,00	84.120.000,00	0,00
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.271.616.000,00	1.271.616.000,00	0,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	4.746.141.674,92	4.656.304.233,00	89.837.441,92
Retribusi Tempat Pelelangan	1.438.639.484,00	1.438.639.484,00	0,00
Retribusi Terminal	94.461.000,00	94.461.000,00	0,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir	4.279.152.483,33	5.021.520.600,00	(742.368.116,67)
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa	27.610.000,00	27.610.000,00	0,00
Retribusi Rumah Potong Hewan	37.877.500,00	37.877.500,00	0,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga-	4.720.282.500,00	4.720.282.500,00	0,00
Retribusi IMB	997.687.287,00	1.190.657.797,00	(192.970.510,00)
Retribusi Izin Trayek	11.430.000,00	11.430.000,00	0,00
Jumlah	28.398.881.530,25	28.898.155.929,00	(499.274.398,75)

Selisih atas Pendapatan Retribusi Daerah – LO dengan LRA tersebut dijelaskan sebagai berikut.

1. Selisih Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp24.650.000,00 merupakan saldo Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan per 31 Desember 2023 sebesar Rp24.650.000,00;

2. Selisih Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp321.576.786,00 merupakan selisih antara saldo Piutang Retribusi Pelayanan Pasar per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.405.403.636,00 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.083.826.850,00;
3. Selisih Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp89.837.441,92 merupakan selisih antara saldo Pendapatan Diterima Dimuka dan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp616.004.802,42 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp526.167.360,50;
4. Selisih Retribusi Tempat Khusus Parkir sebesar Rp742.368.116,67 merupakan penyesuaian Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp742.368.116,67;
5. Selisih Retribusi IMB sebesar Rp192.970.510,00 merupakan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi IMB Tahun 2023 a.n. Nurhilal Riyadi sebesar Rp17.109.510,00 dan saldo Piutang Retribusi IMB per 31 Desember 2022 sebesar Rp175.861.000,00.

5.4.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan- LO

	Tahun 2023	Tahun 2022
	Rp35.664.544.215,92	Rp17.640.585.052,00

Pendapatan merupakan pendapatan dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemkab Kebumen pada Perusahaan Daerah atau BUMD.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (HPKDYD) – LO Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp18.023.959.163,92 atau 102,17% dari Tahun 2022 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.4.9 Rincian HPKDYD - LO

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD - LO"				
PT BPR BKK JATENG (PERSERODA)	12.782.353.955,00	10.332.638.637,00	2.449.715.318,00	23,71
PT BPR BKK KEBUMEN (PERSERODA)	8.836.576.694,92	3.602.748.954,00	5.233.827.740,92	145,27
PT BPR BANK KEBUMEN (PERSERODA)	4.937.866.743,00	1.488.038.292,00	3.449.828.451,00	231,84
PERUMDA AIR MINUM TIRTA BUMI SANTOSA	8.521.865.660,00	2.026.822.323,00	6.495.043.337,00	320,45
PT LUK ULO FARMA (PERSERODA)	585.881.163,00	190.336.846,00	395.544.317,00	207,81
Jumlah	35.664.544.215,92	17.640.585.052,00	18.023.959.163,92	102,17

Perbandingan Pendapatan HPKDYD - LO dengan LRA Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.10 Perbandingan Pendapatan HPKDYD - LO dengan LRA Tahun 2023

Uraian	LO Tahun 2023 (Rp)	LRA Tahun 2023 (Rp)	Selisih (Rp)
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD			
PT BPR BKK JATENG (PERSERODA)	12.782.353.955,00	12.782.353.955,00	0,00
PT BPR BKK KEBUMEN (PERSERODA)	8.836.576.694,92	3.412.154.809,00	5.424.421.885,92
PT BPR BANK KEBUMEN (PERSERODA)	4.937.866.743,00	583.206.099,00	4.354.660.644,00
PERUMDA AIR MINUM TIRTA BUMI SANTOSA	8.521.865.660,00	2.146.412.925,00	6.375.452.735,00
PT LUK ULO FARMA (PERSERODA)	585.881.163,00	199.212.900,00	386.668.263,00
Jumlah	35.664.544.215,92	19.123.340.688,00	16.541.203.527,92

Selisih atas Pendapatan HPKDYD – LO dengan LRA tersebut merupakan selisih perhitungan nilai Investasi Jangka Panjang Permanen tahun 2023.

5.4.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah- LO

Tahun 2023

Tahun 2022

Rp279.045.846.743,26

Rp263.191.841.577,27

Lain-lain PAD yang Sah – LO Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp15.854.005.165,99 atau 6,02% dari Tahun 2022 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.4.11 Rincian Lain-lain PAD yang Sah - LO

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LO	1.695.109.747,00	0,00	1.695.109.747,0	0,00
Hasil Kerjasama Daerah – LO	0,00	11.204.594,00	(11.204.594,00)	(100,00)
Penerimaan Jasa Giro – LO	1.941.444.932,00	2.205.784.880,00	(264.339.948,00)	(11,98)
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir – LO	47.250.000,00	41.875.000,00	5.375.000,00	12,84
Pendapatan Bunga – LO	5.411.536.170,00	9.845.890.393,00	(4.434.354.223,00)	(45,04)
Pendapatan Denda Pajak – LO	1.038.876.278,42	188.643.433,94	850.232.844,48	450,71
Pendapatan Denda Retribusi – LO	22.317.520,00	372.197.893,00	(349.880.373,00)	(94,00)
Pendapatan dari Pengembalian – LO	355.217.506,00	302.104.274,00	53.113.232,00	17,58
Pendapatan BLUD – LO	266.540.874.376,84	248.909.893.495,33	17.630.980.881,51	7,08
Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (<i>Inkracht</i>) – LO	1.993.220.213,00	978.602.614,00	1.014.617.599,00	103,68
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah - LO	0,00	335.645.000	(335.645.000,00)	(100,00)
Jumlah	279.045.846.743,26	263.191.841.577,27	15.854.005.165,99	6,02

Rincian Lain-lain PAD yang Sah – LO per SKPD disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.12 Rincian Lain-lain PAD yang Sah – LO per SKPD

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Dinkes PPKB	266.540.874.376,84	248.909.893.495,33	17.630.980.881,51	7,08
Disperkimhub	22.317.520,00	30.499.860,00	(8.182.340,00)	(26,83)
DLHKP	64.200.000,00	58.200.000,00	6.000.000,00	10,31
Disdukcapil	0,00	335.645.000,00	(335.645.000,00)	(100,00)
DPMPSTP	0,00	341.698.033,00	(341.698.033,00)	(100,00)
Disperindag KUKMK	121.716.438,50	0,00	121.716.438,50	#DIV/0!
Disparbud	0,00	11.204.594,00	(11.204.594,00)	(100,00)
Distapang	674.010.000,00	661.525.000,00	12.485.000,00	1,89
BPKPD	11.622.728.407,92	12.843.175.594,94	(1.220.447.187,02)	(9,50)
Jumlah	279.045.846.743,26	263.191.841.577,27	15.854.005.165,99	6,02

Pendapatan BLUD-LO merupakan pendapatan dari entitas yang telah menerapkan PPK-BLUD.

Perbandingan Lain-lain PAD yang Sah - LO dengan LRA Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.13 Perbandingan Lain-lain PAD yang Sah - LO dengan LRA Tahun 2023

Uraian	LO Tahun 2023 (Rp)	LRA Tahun 2023 (Rp)	Selisih (Rp)
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	1.695.109.747,00	2.038.015.879,00	(342.906.132,00)
Penerimaan Jasa Giro	1.941.444.932,00	1.941.444.932,00	0,00
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	47.250.000,00	47.250.000,00	0,00
Pendapatan Bunga	5.411.536.170,00	5.411.536.170,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak	1.038.876.278,42	403.885.062,00	634.991.216,42
Pendapatan Denda Retribusi	22.317.520,00	22.317.520,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian	355.217.506,00	355.217.506,00	0,00
Pendapatan BLUD	266.540.874.376,84	266.431.178.288,00	109.696.088,84

Uraian	LO Tahun 2023 (Rp)	LRA Tahun 2023 (Rp)	Selisih (Rp)
Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (<i>Inkracht</i>)	1.993.220.213,00	1.772.569.194,00	220.651.019,00
Jumlah	279.045.846.743,26	278.423.414.551,00	622.432.192,26

Selisih atas Lain-lain PAD yang Sah – LO dengan LRA tersebut dijelaskan sebagai berikut.

1. Selisih Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp342.906.132,00 merupakan hasil penjualan aset rusak berat kendaraan Tahun 2023 yang telah diperhitungkan sebagai surplus/defisit penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
2. Selisih Pendapatan Denda Pajak sebesar Rp634.991.216,42 merupakan selisih antara saldo Piutang Denda Pajak per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.300.708.525,36 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.665.717.308,94;
4. Selisih Pendapatan BLUD sebesar Rp109.696.088,84 merupakan selisih antara saldo Piutang BLUD per 31 Desember 2023 sebesar Rp17.174.333.920,00 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp17.100.700.227,00 serta selisih antara Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2023 sebesar Rp54.354.270,83 dan Tahun 2022 sebesar Rp90.416.666,67;
5. Selisih Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (*Inkracht*) sebesar Rp220.651.019,00 merupakan pendapatan atas piutang yang telah disisihkan.

5.4.1.2 Pendapatan Transfer - LO

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp1.946.750.067.311,44	Rp1.879.833.663.558,00

Pendapatan Transfer – LO Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp66.916.403.753,44 atau 3,56% dari Tahun 2022 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.4.14 Rincian Pendapatan Transfer - LO

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan – LO	1.747.451.879.790,44	1.674.759.689.978,00	72.692.189.812,44	4,34
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya -LO	11.805.728.000,00	0,00	11.805.728.000,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - LO	187.492.459.521,00	205.073.973.580,00	(17.581.514.059,00)	(8,57)
Jumlah	1.946.750.067.311,44	1.879.833.663.558,00	66.916.403.753,44	3,56

5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan - LO

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp1.747.451.879.790,44	Rp1.674.759.689.978,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan - LO Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp72.692.189.812,44 atau 4,34% dari Tahun 2022 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.4.15 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan - LO

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Dana Bagi Hasil (DBH)	40.353.020.666,44	38.220.093.261,00	2.132.927.405,44	5,58
Dana Alokasi Umum (DAU)	1.239.930.914.430,00	1.176.172.068.800,00	63.758.845.630,00	5,42
Dana Alokasi Khusus (DAK)	467.167.944.694,00	460.367.527.917,00	6.800.416.777,00	1,48
Jumlah	1.747.451.879.790,44	1.674.759.689.978,00	72.692.189.812,44	4,34

5.4.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil - LO

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp40.353.020.666,44	Rp38.220.093.261,00

DBH - LO Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp2.132.927.405,44 atau 5,58% dari Tahun 2022 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.4.16 Rincian DBH - LO

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
DBH PBB - LO	3.585.351.950,00	7.280.169.217,00	(3.694.817.267,00)	(50,75)
DBH PPh Pasal 21-LO	14.486.092.027,00	15.598.200.774,00	(1.112.108.747,00)	0,00
DBH CHT-LO	19.526.228.927,44	11.006.705.380,00	8.519.523.547,44	77,40
DBH SDA Minyak Bumi-LO	408.856.946,00	1.630.978.982,00	(1.222.122.036,00)	(74,93)
DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi-LO	104.757.255,00	265.591.359,00	(160.834.104,00)	(60,56)
DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	1.010.933,00	2.629.718,00	(1.618.785,00)	(61,56)
DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	389.207.417,00	477.506.831,00	(88.299.414,00)	(18,49)
DBH SDA Perikanan-LO	1.851.515.211,00	1.958.311.000,00	(106.795.789,00)	(5,45)
Jumlah	40.353.020.666,44	38.220.093.261,00	2.132.927.405,44	5,58

Perbandingan DBH - LO dengan LRA Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.17 Perbandingan DBH - LO dengan LRA Tahun 2023

Uraian	LO Tahun 2023 (Rp)	LRA Tahun 2023 (Rp)	Selisih (Rp)
DBH PBB - LO	3.585.351.950,00	3.585.351.950,00	0,00
DBH PPh Pasal 21-LO	14.486.092.027,00	14.486.092.027,00	0,00
DBH CHT-LO	19.526.228.927,44	15.296.931.852,00	4.229.297.075,44
DBH SDA Minyak Bumi-LO	408.856.946,00	408.856.946,00	0,00
DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi-LO	104.757.255,00	104.757.255,00	0,00
DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	1.010.933,00	1.010.933,00	0,00
DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	389.207.417,00	389.207.417,00	0,00
DBH SDA Perikanan-LO	1.851.515.211,00	1.851.515.211,00	0,00
Jumlah	40.353.020.666,44	36.123.723.591,00	4.229.297.075,44

Selisih atas DBH-CHT – LO dengan LRA sebesar Rp4.229.297.075,44 merupakan selisih atas penyesuaian salur dana TDF pada Tahun 2023.

5.4.1.2.1.2 Dana Alokasi Umum- LO

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp1.239.930.914.430,00	Rp1.176.172.068.800,00

DAU - LO Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp63.758.845.630,00 atau 5,42% dari Tahun 2022 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.4.18 Rincian DAU - LO

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
DAU-LO	1.186.862.866.430,00	1.176.172.068.800,00	10.690.797.630,00	0,91
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan-LO	2.200.000.000,00	0,00	2.200.000.000,00	0,00
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja-LO	50.868.048.000,00	0,00	50.868.048.000,00	0,00
Jumlah	1.239.930.914.430,00	1.176.172.068.800,00	63.758.845.630,00	5,42

Perbandingan DAU - LO dengan LRA Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.19 Perbandingan DAU - LO dengan LRA Tahun 2023

Uraian	LO Tahun 2023 (Rp)	LRA Tahun 2023 (Rp)	Selisih (Rp)
DAU-LO	1.186.862.866.430,00	1.186.862.866.430,00	0,00
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan-LO	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00	0,00
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja-LO	50.868.048.000,00	50.868.048.000,00	0,00
Jumlah	1.239.930.914.430,00	1.239.930.914.430,00	0,00

Tidak terdapat selisih atas DAU – LO dengan LRA pada Tahun 2023.

5.4.1.2.1.3 Dana Alokasi Khusus - LO

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp467.167.944.694,00	Rp460.367.527.917,00

DAK - LO Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar sebesar Rp6.800.416.777,00 atau 1,48% dari Tahun 2022 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.4.20 Rincian DAK - LO

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
DAK Fisik				
Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD- LO	770.873.000,00	316.854.000,00	454.019.000,00	143,29
Bidang Pendidikan-Reguler-SD-LO	5.998.942.000,00	6.713.257.861,00	(714.315.861,00)	(10,64)
Bidang Pendidikan-Reguler-SMP-LO	1.851.669.000,00	6.056.749.980,00	(4.205.080.980,00)	(69,43)
Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian-LO	0,00	5.768.620.724,00	(5.768.620.724,00)	(100,00)
Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB-LO	14.704.680.000,00	6.583.293.434,00	8.121.386.566,00	123,36
Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting-LO	0,00	115.500.000,00	(115.500.000,00)	(100,00)
Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat-LO	1.064.033.018,00	5.348.304.044,00	(4.284.271.026,00)	(80,11)
Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- KB-LO	1.862.092.415,00	3.492.418.900,00	(1.630.326.485,00)	(46,68)
Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya-LO	0,00	526.000.000,00	(526.000.000,00)	(100,00)
Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian-LO	0,00	10.561.461.500,00	(10.561.461.500,00)	(100,00)
Bidang Jalan-Reguler-Jalan-LO	0,00	14.148.748.000,00	(14.148.748.000,00)	(100,00)
Bidang Air Minum-Reguler-LO	7.975.940.700,00	5.140.983.000,00	2.834.957.700,00	55,14
Bidang Sanitasi-Reguler-LO	0,00	3.811.795.000,00	5.962.205.000,00	156,41
Bidang Irigasi-Penugasan-LO	9.774.000.000,00	1.691.283.300,00	(1.691.283.300,00)	(100,00)
Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan -LO	5.507.843.857,00		5.507.843.857,00	
DAK Non Fisik				
BOS Reguler-LO	123.746.866.716,00	122.242.773.400,00	1.504.093.316,00	1,23
BOS Kinerja-LO	6.045.000.000,00	2.960.000.000,00	3.085.000.000,00	104,22
TPG PNSD-LO	231.955.661.000,00	216.287.801.152,00	15.667.859.848,00	7,24

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Tamsil Guru PNSD-LO	5.785.588.906,00	4.761.850.000,00	1.023.738.906,00	21,50
BOKKB-BOK-LO	35.734.225.762,00	29.772.384.472,00	5.961.841.290,00	20,02
BOKKB-BOKB-LO	12.024.935.024,00	13.004.653.041,00	(979.718.017,00)	(7,53)
PK2UKM-LO	392.270.577,00	328.151.752,00	64.118.825,00	19,54
Fasilitasi Penanaman Modal-LO	351.746.159,00	308.843.155,00	42.903.004,00	13,89
Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak-LO	0,00	143.088.202,00	(143.088.202,00)	(100,00)
Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian-LO	1.621.576.560,00	282.713.000,00	1.338.863.560,00	473,58
Jumlah	467.167.944.694,00	460.367.527.917,00	6.800.416.777,00	1,48

Perbandingan DAK - LO dengan LRA Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.21 Perbandingan DAK - LO dengan LRA Tahun 2023

Uraian	LO Tahun 2023 (Rp)	LRA Tahun 2023 (Rp)	Selisih (Rp)
DAK Fisik			
Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD- LO	770.873.000,00	770.873.000,00	0,00
Bidang Pendidikan-Reguler-SD-LO	5.998.942.000,00	5.998.942.000,00	0,00
Bidang Pendidikan-Reguler-SMP-LO	1.851.669.000,00	1.851.669.000,00	0,00
Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan- Penurunan AKI dan AKB-LO	14.704.680.000,00	14.704.680.000,00	0,00
Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan- Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat-LO	1.064.033.018,00	1.064.033.018,00	0,00
Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- KB-LO	1.862.092.415,00	1.862.092.415,00	0,00
Bidang Air Minum-Reguler-LO	7.975.940.700,00	7.975.940.700,00	0,00
Bidang Irigasi-Penugasan-LO	9.774.000.000,00	9.774.000.000,00	0,00
Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan - LO	5.507.843.857,00	5.507.843.857,00	0,00
DAK Non Fisik			
BOS Reguler-LO	123.746.866.716,00	139.200.858.297,00	(15.453.991.581,00)
BOS Kinerja-LO	6.045.000.000,00	6.835.000.000,00	(790.000.000,00)
TPG PNSD-LO	231.955.661.000,00	231.955.661.000,00	0,00
Tamsil Guru PNSD-LO	5.785.588.906,00	5.785.588.906,00	0,00
BOP PAUD	0,00	21.421.708.000,00	(21.421.708.000,00)
BOP Pendidikan Kesetaraan	0,00	2.294.711.000,00	(2.294.711.000,00)
BOKKB-BOK-LO	35.734.225.762,00	35.734.225.762,00	0,00
BOKKB-BOKB-LO	12.024.935.024,00	12.024.935.024,00	0,00
PK2UKM-LO	392.270.577,00	392.270.577,00	0,00
Fasilitasi Penanaman Modal-LO	351.746.159,00	351.746.159,00	0,00
Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian-LO	1.621.576.560,00	1.621.576.560,00	0,00
Jumlah	467.167.944.694,00	507.146.964.042,00	(39.979.019.348,00)

Selisih atas DAK – LO dengan LRA sebesar Rp39.979.019.348,00 merupakan pendapatan transfer berupa Dana BOS Satuan Pendidikan Swasta, BOP PAUD, dan BOP Pendidikan Kesetaraan yang tidak disajikan dalam Laporan Operasional karena bukan merupakan beban operasional Pemkab Kebumen.

5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya - LO

Tahun 2023

Tahun 2022

Rp11.805.728.000,00

Rp0,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya - LO Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp11.805.728.000,00 atau 100% dari Tahun 2022 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.4.22 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya - LO

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Dana Insentif Daerah (DID)	11.805.728.000,00	0,00	11.805.728.000,00	0,00
Dana Desa - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	11.805.728.000,00	0,00	11.805.728.000,00	0,00

5.4.1.2.2.1 Dana Insentif Daerah - LO

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp11.805.728.000,00	Rp0,00

DID - LO Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp11.805.728.000,00 atau 100% dari Tahun 2022.

Realisasi DID - LO Tahun 2023 sama dengan nilai realisasi DID LRA TA 2023 yaitu sebesar Rp11.805.728.000,00 sehingga tidak terdapat selisih atas DID – LO dengan LRA pada Tahun 2023.

5.4.1.2.2.2 Dana Desa - LO

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp0,00	Rp0,00

Dana Desa - LO Tahun 2023 tidak mengalami kenaikan/penurunan saldo dari Tahun 2022.

Realisasi Dana Desa - LO Tahun 2023 jika dibandingkan dengan nilai realisasi Dana Desa LRA TA 2023 sebesar Rp455.959.893.200,00 sehingga terdapat selisih atas Dana Desa – LO dengan LRA pada Tahun 2023 sebesar Rp455.959.893.200,00. Hal ini karena pendapatan transfer berupa Dana Desa tidak disajikan dalam Laporan Operasional karena bukan merupakan beban operasional Pemkab Kebumen.

5.4.1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - LO

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp187.492.459.521,00	Rp205.073.973.580,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - LO Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp17.581.514.059,00 atau 8,57% dari Tahun 2022 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.4.23 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - LO

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO	176.853.178.521,00	174.430.162.580,00	2.423.015.941,00	1,39
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LO	10.639.281.000,00	30.643.811.000,00	(20.004.530.000,00)	(65,28)
Jumlah	187.492.459.521,00	205.073.973.580,00	(17.581.514.059,00)	(8,57)

5.4.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp176.853.178.521,00	Rp174.430.162.580,00

Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp2.423.015.941,00 atau 1,39% dari Tahun 2022 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.4.24 Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Bagi Hasil dari PKB	65.534.131.004,00	63.772.323.610,00	1.761.807.394,00	2,76
Bagi Hasil dari BBNKB	47.929.936,00	(175.466.888,00)	223.396.824,00	(127,32)

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Bagi Hasil dari PBBKB	47.142.092.645,00	39.770.398.873,00	7.371.693.772,00	18,54
Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	348.662.105,00	377.838.619,00	(29.176.514,00)	(7,72)
Bagi Hasil dari Pajak Rokok	63.780.362.831,00	70.685.068.366,00	(6.904.705.535,00)	(9,77)
Jumlah	176.853.178.521,00	174.430.162.580,00	2.423.015.941,00	1,39

Perbandingan Bagi Hasil Pajak - LO dengan LRA Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.25 Perbandingan Bagi Hasil Pajak - LO dengan LRA Tahun 2023

Uraian	LO Tahun 2023 (Rp)	LRA Tahun 2023 (Rp)	Selisih (Rp)
Bagi Hasil dari PKB	65.534.131.004,00	43.781.141.043,00	21.752.989.961,00
Bagi Hasil dari Pajak BBNKB	47.929.936,00	21.363.017.146,00	(21.315.087.210,00)
Bagi Hasil dari PBBKB	47.142.092.645,00	44.912.780.605,00	2.229.312.040,00
Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	348.662.105,00	406.632.566,00	(57.970.461,00)
Bagi Hasil dari Pajak Rokok	63.780.362.831,00	63.780.362.831,00	-
Jumlah	176.853.178.521,00	174.243.934.191,00	2.609.244.330,00

Selisih atas Bagi Hasil Pajak – LO dengan LRA sebesar Rp2.609.244.330,00 merupakan selisih antara saldo Piutang Transfer Pemerintah Provinsi per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.047.212.575,00 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.437.968.245,00.

5.4.1.2.3.2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LO

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp10.639.281.000,00	Rp30.643.811.000,00

Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LO Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar sebesar Rp20.004.530.000,00 atau 65,28% dari Tahun 2022.

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LO Tahun 2023 sama dengan nilai realisasi Pendapatan Bagi Hasil Lainnya LRA TA 2023 yaitu sebesar Rp10.639.281.000,00 sehingga tidak terdapat selisih atas Pendapatan Bagi Hasil Lainnya – LO dengan LRA pada Tahun 2023.

5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp15.115.805.742,00	Rp5.250.570.763,00

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp9.865.234.979,00 atau 187,89% dari Tahun 2022 merupakan Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO.

5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah - LO

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp15.115.805.742,00	Rp5.250.570.763,00

Pendapatan Hibah - LO Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp9.865.234.979,00 atau 187,89% dari Tahun 2022 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.4.26 Rincian Pendapatan Hibah - LO

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Hibah Air Minum	1.396.312.500,00	2.285.500.000,00	(889.187.500,00)	0,00
Hibah IPDMIP	123.797.062,00	2.860.499.988,00	(2.736.702.926,00)	(95,67)
Hibah Lainnya	13.595.696.180,00	104.570.775,00	13.491.125.405,00	12.901,43
Jumlah	15.115.805.742,00	5.250.570.763,00	9.865.234.979,00	187,89

Perbandingan Pendapatan Hibah - LO dengan LRA Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.27 Perbandingan Pendapatan Hibah - LO dengan LRA Tahun 2023

Uraian	LO Tahun 2023 (Rp)	LRA Tahun 2023 (Rp)	Selisih (Rp)
Hibah Air Minum	1.396.312.500,00	1.396.312.500,00	0,00
Hibah IPDMIP	123.797.062,00	123.797.062,00	0,00
Hibah Lainnya	13.595.696.180,00	0,00	13.595.696.180,00
Jumlah	15.115.805.742,00	1.520.109.562,00	13.595.696.180,00

Selisih atas Pendapatan Hibah – LO dengan LRA sebesar Rp13.595.696.180,00 merupakan pendapatan atas hibah berupa Aset Tetap dari entitas di luar Pemkab Kebumen.

5.4.2 Beban - LO

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp2.514.165.363.863,43	Rp2.370.418.850.768,09

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban - LO Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp143.746.513.095,34 atau 6,06% dari Tahun 2022 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.4.28 Rincian Beban - LO

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Beban Pegawai	1.170.781.732.921,00	1.143.541.014.988,00	27.240.717.933,00	2,38
Beban Persediaan	120.440.703.262,04	129.227.982.839,05	(8.787.279.577,01)	(6,80)
Beban Jasa	511.700.525.549,57	438.028.568.766,54	73.671.956.783,03	16,82
Beban Pemeliharaan	41.801.795.747,00	36.243.110.638,00	5.558.685.109,00	15,34
Beban Perjalanan Dinas	50.636.739.096,00	47.731.989.155,00	2.904.749.941,00	6,09
Beban Subsidi	675.656.402,00	313.864.348,00	361.792.054,00	115,27
Beban Hibah	88.719.045.255,00	37.491.422.414,00	51.227.622.841,00	136,64
Beban Bantuan Sosial	11.040.168.523,00	11.088.807.122,00	(48.638.599,00)	(0,44)
Beban Penyisihan Piutang	1.941.495.935,95	1.426.171.211,00	515.324.724,95	36,13
Beban Penyusutan dan Amortisasi	295.412.850.752,87	309.591.026.986,50	(14.178.176.233,63)	(4,58)
Beban Transfer	221.014.650.419,00	215.734.892.300,00	5.279.758.119,00	2,45
Jumlah	2.514.165.363.863,43	2.370.418.850.768,09	143.746.513.095,34	6,06

5.4.2.1 Beban Pegawai

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp1.170.781.732.921,00	Rp1.143.541.014.988,00

Beban Pegawai Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp27.240.717.933,00 atau sebesar 2,38% dari Tahun 2022 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.4.29 Rincian Beban Pegawai

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	750.484.534.791,00	728.066.126.907,00	22.418.407.884,00	3,08
Beban Tambahan Penghasilan ASN	107.729.794.251,00	110.938.520.115,00	(3.208.725.864,00)	(2,89)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	261.788.061.175,00	246.113.135.845,00	15.674.925.330,00	6,37
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	33.256.897.740,00	30.583.723.917,00	2.673.173.823,00	8,74
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	539.554.364,00	510.222.879,00	29.331.485,00	5,75

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.027.401.000,00	966.170.000,00	61.231.000,00	6,34
Beban Pegawai BOS	15.389.395.600,00	25.914.114.000,00	(10.524.718.400,00)	(40,61)
Beban Pegawai BLUD	566.094.000,00	449.001.325,00	117.092.675,00	26,08
Jumlah	1.170.781.732.921,00	1.143.541.014.988,00	27.240.717.933,00	2,38

Rincian Beban Pegawai per SKPD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.4.30 Rincian Beban Pegawai per SKPD

SKPD	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Disdikpora	781.403.537.776,00	765.609.611.451,00	15.793.926.325,00	2,06
Dinkes PPKB	132.319.771.048,00	131.838.058.135,00	481.712.913,00	0,37
DPUPR	18.625.115.614,00	19.576.908.740,00	(951.793.126,00)	(4,86)
Disperkimhub	5.194.378.721,00	5.987.386.157,00	(793.007.436,00)	(13,24)
Satpol PP	5.156.958.908,00	5.979.716.001,00	(822.757.093,00)	(13,76)
BPBD	2.549.511.790,00	2.734.666.441,00	(185.154.651,00)	(6,77)
Dinsos P3A	3.224.031.038,00	3.442.029.598,00	(217.998.560,00)	(6,33)
Distapang	17.177.424.018,00	17.432.157.331,00	(254.733.313,00)	(1,46)
DLHKP	10.853.612.660,00	10.954.508.534,00	(100.895.874,00)	(0,92)
Disdukcapil	3.768.147.942,00	4.071.559.104,00	(303.411.162,00)	(7,45)
Dinas PMD	3.587.219.496,00	3.752.366.723,00	(165.147.227,00)	(4,40)
Diskominfo	3.494.173.886,00	3.733.429.421,00	(239.255.535,00)	(6,41)
Disperindag KUKM	9.375.627.044,00	10.399.613.628,00	(1.023.986.584,00)	(9,85)
DPMPSTSP	2.786.843.825,00	3.166.879.121,00	(380.035.296,00)	(12,00)
Disparbud	5.221.867.361,00	5.568.850.163,00	(346.982.802,00)	(6,23)
Disarpus	2.337.645.457,00	2.602.833.009,00	(265.187.552,00)	(10,19)
Disnaker	5.158.702.147,00	5.266.716.870,00	(108.014.723,00)	(2,05)
Setda	19.906.308.942,00	19.561.904.791,00	344.404.151,00	1,00
Setwan	37.122.772.464,00	34.617.225.334,00	2.505.547.130,00	7,24
Bappeda	4.339.669.512,00	4.847.557.832,00	(507.888.320,00)	(10,48)
BPKPD	14.409.036.740,00	14.865.896.435,00	(456.859.695,00)	(3,07)
BKPSDM	17.807.163.643,00	5.625.991.907,00	12.181.171.736,00	216,52
Itda	7.597.156.646,00	6.882.962.338,00	714.194.308,00	10,38
Kecamatan dan Kelurahan	54.421.247.194,00	52.137.529.891,00	2.283.717.303,00	4,38
Bakesbangpol	2.943.809.049,00	2.884.656.033,00	59.153.016,00	2,05
Jumlah	1.170.781.732.921,00	1.143.541.014.988,00	27.240.717.933,00	2,38

Perbandingan Beban Pegawai LO dengan LRA Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.31 Perbandingan Beban Pegawai - LO dengan LRA Tahun 2023

Uraian	LO Tahun 2023 (Rp)	LRA Tahun 2023 (Rp)	Selisih (Rp)
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	750.484.534.791,00	750.484.534.791,00	0,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	107.729.794.251,00	108.132.182.896,00	(402.388.645,00)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	261.788.061.175,00	244.365.884.474,00	17.422.176.701,00
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	33.256.897.740,00	33.256.897.740,00	0,00
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	539.554.364,00	539.554.364,00	0,00
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.027.401.000,00	1.027.401.000,00	0,00
Beban Pegawai BOS	15.389.395.600,00	15.389.395.600,00	0,00
Beban Pegawai BLUD	566.094.000,00	579.594.000,00	(13.500.000,00)
Jumlah	1.170.781.732.921,00	1.153.775.444.865,00	17.006.288.056,00

Selisih atas Beban Pegawai – LO dengan LRA tersebut dijelaskan sebagai berikut.

1. Selisih Beban Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp402.388.645,00 merupakan selisih antara Utang Pegawai - Tambahan Penghasilan ASN per 31 Desember 2023 sebesar Rp8.343.188.156,00 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp8.745.576.801,00;

2. Selisih Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN sebesar Rp17.422.176.701,00 merupakan selisih antara Utang Pegawai – Tambahan Penghasilan berdasarkan Obyektif Lainnya ASN per 31 Desember 2023 sebesar Rp18.937.176.800,00 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.515.000.099,00;
3. Selisih Beban Pegawai BLUD sebesar Rp13.500.000,00 merupakan Beban Pegawai BLUD Tahun 2022.

5.4.2.2 Beban Persediaan

	Tahun 2023	Tahun 2022
	Rp120.440.703.262,04	Rp129.227.982.839,05

Beban Persediaan Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp8.787.279.577,01 atau 6,80% dari Tahun 2022 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.4.32 Rincian Beban Persediaan

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Beban Barang Pakai Habis	120.281.505.031,04	128.872.080.197,05	(8.590.575.166,01)	(6,67)
Beban Barang Tak Habis Pakai	159.198.231,00	355.902.642,00	(196.704.411,00)	(55,27)
Jumlah	120.440.703.262,04	129.227.982.839,05	(8.787.279.577,01)	(6,80)

Rincian Beban Persediaan per SKPD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.4.33 Rincian Beban Persediaan per SKPD

SKPD	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Disdikpora	5.034.613.523,32	5.416.156.497,00	(381.542.973,68)	(7,04)
Dinkes PPKB	50.288.777.939,00	57.446.021.875,00	(7.157.243.936,00)	(12,46)
DPUPR	1.945.194.868,79	3.008.101.240,00	(1.062.906.371,21)	(35,33)
Disperkimhub	3.807.873.421,00	3.160.358.149,00	647.515.272,00	20,49
Satpol PP	2.425.718.709,00	1.321.436.125,00	1.104.282.584,00	83,57
BPBD	2.505.290.269,00	3.915.606.545,00	(1.410.316.276,00)	(36,02)
Dinsos P3A	2.397.329.702,00	2.216.614.560,00	180.715.142,00	8,15
DLHKP	6.372.018.732,00	7.560.371.750,00	(1.188.353.018,00)	(15,72)
Disdukcapil	2.117.259.445,00	2.055.307.242,00	61.952.203,00	3,01
Dinas PMD	3.322.286.829,00	2.673.782.034,00	648.504.795,00	24,25
Diskominfo	968.773.019,00	685.464.529,00	283.308.490,00	41,33
Disperindag KUKM	2.186.341.578,00	2.452.909.441,00	(266.567.863,00)	(10,87)
DPMPSTSP	680.195.012,00	1.037.590.741,00	(357.395.729,00)	(34,44)
Disparbud	1.756.114.754,06	1.477.976.896,00	278.137.858,06	18,82
Disarpus	377.434.959,00	296.909.450,00	80.525.509,00	27,12
Distapang	6.195.051.370,00	10.057.554.355,00	(3.862.502.985,00)	(38,40)
Disnaker	690.495.035,00	1.320.511.178,00	(630.016.143,00)	(47,71)
Setda	7.179.874.057,00	5.114.551.466,00	2.065.322.591,00	40,38
Setwan	3.362.077.624,00	2.647.620.393,00	714.457.231,00	26,98
Bappeda	1.206.310.467,00	1.044.045.156,00	162.265.311,00	15,54
BPKPD	3.653.200.093,87	4.135.979.424,00	(482.779.330,13)	(11,67)
BKPSDM	884.260.988,00	678.659.457,00	205.601.531,00	30,30
Itda	1.302.345.224,00	557.697.662,00	744.647.562,00	133,52
Kecamatan dan Kelurahan	8.179.142.330,00	7.862.039.865,00	317.102.465,00	4,03
Bakesbangpol	1.602.723.313,00	1.084.716.809,00	518.006.504,00	47,75
Jumlah	120.440.703.262,04	129.227.982.839,00	(8.787.279.576,96)	(6,80)

Perbandingan Beban Persediaan LO dengan LRA Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.34 Perbandingan Beban Persediaan - LO dengan LRA Tahun 2023

Uraian	LO Tahun 2023 (Rp)	LRA Tahun 2023 (Rp)	Selisih (Rp)
Beban Barang Pakai Habis	120.281.505.031,04	113.360.711.922,00	6.920.793.109,04

Uraian	LO Tahun 2023 (Rp)	LRA Tahun 2023 (Rp)	Selisih (Rp)
Beban Barang Tak Habis Pakai	159.198.231,00	159.198.231,00	0,00
Jumlah	120.440.703.262,04	113.519.910.153,00	6.920.793.109,04

Selisih atas Beban Persediaan – LO dengan LRA sebesar Rp6.920.793.109,04 merupakan:

1. Selisih antara saldo Persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp51.568.005.606,60 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp59.569.450.839,32;
2. Nilai penyaluran atas penerimaan hibah berupa persediaan Antropometri sebesar Rp3.301.403.580,00;
3. Realisasi Belanja Barang Tahun 2023 yang dikapitalisasi sebagai penambah nilai Aset Tetap Tahun 2023 sebesar Rp154.419.900,00;
4. Nilai Beban Persediaan yang bersumber dari Belanja Barjas BLUD sebesar Rp4.236.635.803,6790;
5. Selisih yang tidak dapat dijelaskan sebesar Rp12.973.900,00.

5.4.2.3 Beban Jasa

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp511.700.525.549,57	Rp438.028.568.766,54

Beban Jasa Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp73.671.956.783,03 atau 16,82% dari Tahun 2022 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.4.35 Rincian Beban Jasa

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Beban Jasa Kantor	98.008.762.251,00	110.468.041.836,00	(12.459.279.585,00)	(11,28)
Beban luran Jaminan/Asuransi	34.407.664.038,89	27.084.693.649,86	7.322.970.389,03	27,04
Beban Sewa Tanah	3.250.000,00	3.900.000,00	(650.000,00)	(16,67)
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	4.848.941.300,00	3.496.673.742,00	1.352.267.558,00	38,67
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	1.903.406.655,00	1.460.564.782,00	442.841.873,00	30,32
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	116.000.000,00	247.364.000,00	(131.364.000,00)	(53,11)
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	1.919.648.600,00	4.558.492.500,00	(2.638.843.900,00)	(57,89)
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	3.657.082.206,00	3.680.475.290,00	(23.393.084,00)	(0,64)
Beban Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>)	299.328.150,00	356.591.600,00	(57.263.450,00)	(16,06)
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	0,00	12.000.000,00	(12.000.000,00)	(100,00)
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.311.266.530,00	4.273.321.400,00	37.945.130,00	0,89
Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	0,00	2.666.480.000,00	(2.666.480.000,00)	(100,00)
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.030.445.000,00	5.422.897.000,00	(1.392.452.000,00)	(25,68)
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.195.000,00	0,00	6.195.000,00	#DIV/0!
Beban Barang dan Jasa BOS	84.974.216.209,00	75.015.922.915,00	9.958.293.294,00	13,27
Beban Barang dan Jasa BLUD	273.214.319.609,68	199.281.150.051,68	73.933.169.558,00	37,10
Jumlah	511.700.525.549,57	438.028.568.766,54	73.671.956.783,03	16,82

Rincian Beban Jasa per SKPD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.4.36 Rincian Beban Jasa per SKPD

SKPD	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Disdikpora	106.553.521.651,00	97.821.553.237,00	8.731.968.414,00	8,93
Dinkes PPKB	317.049.209.704,68	245.538.326.406,68	71.510.883.298,00	29,12
DPUPR	5.121.458.828,00	8.138.436.405,00	(3.016.977.577,00)	(37,07)
Disperkimhub	12.398.069.884,00	12.396.086.328,00	1.983.556,00	0,02
Satpol PP	6.325.424.884,00	3.817.766.718,00	2.507.658.166,00	65,68
BPBD	1.371.354.705,00	1.099.564.127,00	271.790.578,00	24,72
Dinsos P3A	1.230.786.203,00	1.452.624.531,00	(221.838.328,00)	(15,27)
Distapang	4.145.935.787,00	7.551.234.051,00	(3.405.298.264,00)	(45,10)
DLHKP	8.779.296.703,00	9.022.773.246,00	(243.476.543,00)	(2,70)
Disdukcapil	1.188.859.740,00	1.385.460.718,00	(196.600.978,00)	(14,19)
Dinas PMD	970.499.054,00	5.771.072.004,00	(4.800.572.950,00)	(83,18)
Diskominfo	7.402.200.225,00	4.354.841.463,00	3.047.358.762,00	69,98
Disperindag KUKM	4.861.407.570,00	5.047.207.025,00	(185.799.455,00)	(3,68)
DPMPTSP	890.065.394,00	902.814.030,00	(12.748.636,00)	(1,41)
Disparbud	4.934.942.983,00	3.976.628.668,00	958.314.315,00	24,10
Disarpus	751.454.645,00	762.095.777,00	(10.641.132,00)	(1,40)
Disnaker	797.513.890,00	1.393.891.630,00	(596.377.740,00)	(42,79)
Setda	6.294.207.431,00	4.169.131.155,00	2.125.076.276,00	50,97
Setwan	4.002.689.186,00	3.618.607.330,00	384.081.856,00	10,61
Bappeda	1.314.319.105,00	1.042.446.283,00	271.872.822,00	26,08
BPKPD	6.286.793.690,89	9.304.584.695,86	(3.017.791.004,97)	(32,43)
BKPSDM	2.106.483.541,00	2.876.051.113,00	(769.567.572,00)	(26,76)
Itda	470.264.134,00	319.434.773,00	150.829.361,00	47,22
Kecamatan dan Kelurahan	3.934.906.934,00	4.152.308.702,00	(217.401.768,00)	(5,24)
Bakesbangpol	2.518.859.677,00	2.113.628.350,00	405.231.327,00	19,17
Jumlah	511.700.525.549,57	438.028.568.766,54	73.671.956.783,03	16,82

Perbandingan Beban Jasa LO dengan LRA Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.37 Perbandingan Beban Jasa - LO dengan LRA Tahun 2023

Uraian	LO Tahun 2023 (Rp)	LRA Tahun 2023 (Rp)	Selisih (Rp)
Beban Jasa Kantor	98.008.762.251,00	99.740.026.560,00	(1.731.264.309,00)
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	34.407.664.038,89	34.386.792.011,00	20.872.027,89
Beban Sewa Tanah	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	4.848.941.300,00	4.848.941.300,00	0,00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	1.903.406.655,00	1.903.406.655,00	0,00
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	116.000.000,00	116.000.000,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	1.919.648.600,00	3.748.547.650,00	(1.828.899.050,00)
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	3.657.082.206,00	3.657.082.206,00	0,00
Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	299.328.150,00	299.328.150,00	0,00
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.311.266.530,00	4.311.266.530,00	0,00
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.030.445.000,00	4.030.445.000,00	0,00
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.195.000,00	6195000,00	0,00
Beban Barang dan Jasa BOS	84.974.216.209,00	85.241.751.109,00	(267.534.900,00)
Beban Barang dan Jasa BLUD	273.214.319.609,68	265.543.950.851,00	7.670.368.758,68
Jumlah	511.700.525.549,57	507.836.983.022,00	3.863.542.527,57

Selisih atas Beban Jasa – LO dengan LRA sebesar Rp3.863.542.527,57 merupakan:

1. Selisih antara saldo Utang Belanja Jasa per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.229.300.676,00 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.969.084.085,00;
2. Selisih antara saldo Utang Belanja Barjas BLUD per 31 Desember 2023 sebesar Rp28.271.294.430,00 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp22.222.890.107,00;

- Selisih antara saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp8.817.747,11 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp38.208.875,00;
- Realisasi Belanja Jasa Tahun 2023 yang dikapitalisasi sebagai penambah nilai Aset Tetap Tahun 2023 sebesar Rp4.711.105.318,00;
- Nilai Belanja Barjas BLUD yang disajikan sebagai Beban Persediaan sebesar Rp4.236.635.803,6790.

5.4.2.4 Beban Pemeliharaan

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp41.801.795.747,00	Rp36.243.110.638,00

Beban Pemeliharaan Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp5.558.685.109,00 atau 15,34% dari Tahun 2022 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.4.38 Rincian Beban Pemeliharaan

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Beban Pemeliharaan Tanah	109.300.000,00	0,00	109.300.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.150.857.032,00	3.788.741.090,00	362.115.942,00	9,56
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7.834.322.762,00	9.110.735.443,00	(1.276.412.681,00)	(14,01)
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	29.703.915.953,00	23.342.344.605,00	6.361.571.348,00	27,25
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	3.400.000,00	1.289.500,00	2.110.500,00	163,67
Jumlah	41.801.795.747,00	36.243.110.638,00	5.558.685.109,00	15,34

Rincian Beban Pemeliharaan per SKPD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.4.39 Rincian Beban Pemeliharaan per SKPD

SKPD	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Disdikpora	873.262.138,00	108.262.163,00	764.999.975,00	1,00
Dinkes PPKB	347.697.700,00	746.895.500,00	(399.197.800,00)	(53,45)
DPUPR	26.289.534.593,00	23.390.099.881,00	2.899.434.712,00	12,40
Disperkimhub	1.128.381.111,00	629.346.517,00	499.034.594,00	79,29
Satpol PP	154.850.000,00	49.833.700,00	105.016.300,00	210,73
BPBD	494.658.574,00	230.975.427,00	263.683.147,00	114,16
Dinsos P3A	167.718.800,00	77.463.000,00	90.255.800,00	116,51
Distapang	307.360.735,00	360.086.270,00	(52.725.535,00)	(14,64)
DLHKP	547.402.345,00	564.290.427,00	(16.888.082,00)	(2,99)
Disdukcapil	95.775.500,00	209.355.030,00	(113.579.530,00)	(54,25)
Dinas PMD	72.144.000,00	42.483.000,00	29.661.000,00	69,82
Diskominfo	257.386.285,00	174.702.000,00	82.684.285,00	47,33
Disperindagkop KUKM	766.414.699,00	1.332.666.362,00	(566.251.663,00)	(42,49)
DPMPSTSP	192.323.344,00	108.999.800,00	83.323.544,00	76,44
Disparbud	512.343.850,00	551.387.321,00	(39.043.471,00)	(7,08)
Disarpus	138.985.000,00	79.350.000,00	59.635.000,00	75,15
Disnaker	71.816.354,00	148.014.539,00	(76.198.185,00)	(51,48)
Setda	2.910.682.415,00	2.520.295.908,00	390.386.507,00	15,49
Setwan	552.480.650,00	353.462.605,00	199.018.045,00	56,31
Bappeda	62.523.796,00	95.117.338,00	(32.593.542,00)	(34,27)
BPKPD	75.695.500,00	104.940.980,00	(29.245.480,00)	(27,87)
BKPSDM	51.345.000,00	36.048.532,00	15.296.468,00	42,43
Itda	171.041.314,00	54.168.192,00	116.873.122,00	215,76
Kecamatan dan Kelurahan	5.531.587.194,00	4.263.431.146,00	1.268.156.048,00	29,74
Bakesbangpol	28.384.850,00	11.435.000,00	16.949.850,00	148,23
Jumlah	41.801.795.747,00	36.243.110.638,00	5.558.685.109,00	15,34

Perbandingan Beban Pemeliharaan LO dengan LRA Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.40 Perbandingan Beban Pemeliharaan - LO dengan LRA Tahun 2023

Uraian	LO Tahun 2023 (Rp)	LRA Tahun 2023 (Rp)	Selisih (Rp)
Beban Pemeliharaan Tanah	109.300.000,00	109.300.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.150.857.032,00	4.150.857.032,00	0,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7.834.322.762,00	20.764.077.222,00	(12.929.754.460,00)
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	29.703.915.953,00	29.703.915.953,00	0,00
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00
Jumlah	41.801.795.747,00	54.731.550.207,00	(12.929.754.460,00)

Selisih atas Beban Pemeliharaan – LO dengan LRA sebesar Rp12.929.754.460,00 merupakan nilai realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun 2023 yang dikapitalisasi sebagai penambah nilai Aset Tetap Tahun 2023 yaitu pada Disdikpora Rp12.326.649.460,00 dan DPUPR sebesar Rp603.105.000,00.

5.4.2.5 Beban Perjalanan Dinas

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp50.636.739.096,00	Rp47.731.989.155,00

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp2.904.749.941,00 atau 6,09% dari Tahun 2022 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.4.41 Rincian Beban Perjalanan Dinas

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.254.846.296,00	47.669.295.768,00	2.585.550.528,00	5,42
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	381.892.800,00	62.693.387,00	319.199.413,00	509,14
Jumlah	50.636.739.096,00	47.731.989.155,00	2.904.749.941,00	6,09

Rincian Beban Perjalanan Dinas per SKPD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.4.42 Rincian Beban Perjalanan Dinas per SKPD

SKPD	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Disdikpora	1.377.180.829,00	984.574.204,00	392.606.625,00	39,88
Dinkes PPKB	19.625.464.084,00	20.027.621.364,00	(402.157.280,00)	(2,01)
DPUPR	774.567.562,00	700.455.883,00	74.111.679,00	10,58
Disperkimhub	496.146.669,00	535.655.694,00	(39.509.025,00)	(7,38)
Satpol PP	1.404.929.524,00	1.120.067.728,00	284.861.796,00	25,43
BPBD	601.066.801,00	686.271.519,00	(85.204.718,00)	(12,42)
Dinsos P3A	655.211.316,00	587.308.997,00	67.902.319,00	11,56
Distapang	2.310.344.587,00	1.904.634.019,00	405.710.568,00	21,30
DLHKP	593.408.814,00	956.343.858,00	(362.935.044,00)	(37,95)
Disdukcapil	201.323.618,00	266.138.970,00	(64.815.352,00)	(24,35)
Dinas PMD	903.059.226,00	1.121.742.102,00	(218.682.876,00)	(19,49)
Diskominfo	565.010.094,00	383.669.668,00	181.340.426,00	47,26
Disperindag KKUKM	994.263.310,00	1.248.253.556,00	(253.990.246,00)	(20,35)
Dinas PMPTSP	198.190.378,00	215.458.828,00	(17.268.450,00)	(8,01)
Disparbud	705.138.797,00	596.081.161,00	109.057.636,00	18,30
Disarpus	118.069.264,00	67.909.541,00	50.159.723,00	73,86
Disnaker	415.164.179,00	711.547.135,00	(296.382.956,00)	(41,65)
Setda	3.022.834.300,00	1.748.001.803,00	1.274.832.497,00	72,93
Setwan	10.541.590.853,00	9.264.077.285,00	1.277.513.568,00	13,79
Bappeda	494.173.512,00	445.940.107,00	48.233.405,00	10,82
BPKPD	953.341.186,00	1.115.624.939,00	(162.283.753,00)	(14,55)
BPKPSDM	536.179.658,00	456.963.355,00	79.216.303,00	17,34
Itda	595.555.887,00	431.240.529,00	164.315.358,00	38,10
Kecamatan dan Kelurahan	1.612.444.000,00	1.401.482.117,00	210.961.883,00	15,05

SKPD	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Bakesbangpol	942.080.648,00	754.924.793,00	187.155.855,00	24,79
Jumlah	50.636.739.096,00	47.731.989.155,00	2.904.749.941,00	6,09

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas LO dengan LRA Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.43 Perbandingan Beban Perjalanan Dinas - LO dengan LRA Tahun 2023

Uraian	LO Tahun 2023 (Rp)	LRA Tahun 2023 (Rp)	Selisih (Rp)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.254.846.296,00	50.254.846.296,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	381.892.800,00	381.892.800,00	0,00
Jumlah	50.636.739.096,00	50.636.739.096,00	0,00

Tidak terdapat selisih atas Beban Perjalanan Dinas LO dengan LRA pada Tahun 2023.

5.4.2.6 Beban Subsidi

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp675.656.402,00	Rp313.864.348,00

Beban Subsidi Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp361.792.054,00 atau 115,27% dari Tahun 2022 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.4.44 Rincian Beban Subsidi

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Beban Subsidi kepada BUMD				
PT BPR BKK Kebumen (PESERODA)	300.000.000,00	225.000.000,00	75.000.000,00	33,33
PT BPR Bank Kebumen (PESERODA)	173.263.827,00	51.357.057,00	121.906.769,00	237,37
PT BPR BKK Jateng (PESERODA)	72.409.584,00	37.507.291,00	34.902.293,00	93,05
PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (PESERODA)	129.982.991,00	0,00	129.982.991,00	-
Jumlah	675.656.402,00	313.864.348,00	361.792.053,00	115,27

Realisasi Beban Subsidi - LO Tahun 2023 sama dengan nilai realisasi Belanja Subsidi LRA TA 2023 yaitu sebesar Rp675.656.402,00 sehingga tidak terdapat selisih atas Beban Subsidi - LO dengan LRA pada Tahun 2023.

Tabel 5.4.45 Rincian Belanja Subsidi Tahun 2023

Nama Penyalur	No. & Tanggal SP2D	Nilai SP2D (Rp)	Tanggal Pengembalian	Pengembalian (Rp)	Realisasi (Rp)
PT BPR BKK Kebumen (PESERODA)	00177/LS/DAU/2023 28 Mar 2023	300.000.000,00	-	0,00	300.000.000,00
PT BPR Bank Kebumen (PESERODA)		200.000.000,00	12 Des 2023	26.736.173,00	173.263.827,00
PT BPR BKK Jateng (PESERODA)		100.000.000,00	4 Des 2023	27.590.416,00	72.409.584,00
PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (PESERODA)	01406/LS/DAU/2023 17 Okt2023	130.000.000,00	15 Des 2023	17.009,00	129.982.991,00
Jumlah		730.000.000,00	-	54.343.598,00	675.656.402,00

5.4.2.7 Beban Hibah

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp88.719.045.255,00	Rp37.491.422.414,00

Beban Hibah Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp51.227.622.841,00 atau 136,64% dari Tahun 2022 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.4.46 Rincian Beban Hibah

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	22.225.540.000,00	0,00	22.225.540.000,00	0,00
Hibah kepada Badan. Lembaga, Organisasi Kemsyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	64.428.629.255,00	35.426.546.414,00	29.002.082.841,00	81,87
Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.064.876.000,00	2.064.876.000,00	0,00	0,00
Jumlah	88.719.045.255,00	37.491.422.414,00	51.227.622.841,00	136,64

Rincian Beban Hibah per SKPD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.4.47 Rincian Beban Hibah per SKPD

SKPD	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Disdikpora	5.362.541.270,00	4.097.829.520,00	1.264.711.750,00	30,86
Dinkes PPKB	232.840.000,00	304.000.000,00	71.160.000,00	-23,41
DPUPR	8.757.767.500,00	3.038.296.475,00	5.719.471.025,00	188,25
Disperkimhub	9.390.000.000,00	4.026.000.000,00	5.364.000.000,00	133,23
Dinsos P3A	75.000.000,00	20.000.000,00	55.000.000,00	275,00
Distapang	19.732.610.040,00	12.533.260.045,00	7.199.349.995,00	57,44
DLHKP	2.552.088.225,00	3.637.688.514,00	1.085.600.289,00	-29,84
Disperindag KKUKM	593.987.220,00	448.471.860,00	145.515.360,00	32,45
Disparbud	2.440.500.000,00	948.000.000,00	1.492.500.000,00	157,44
Setda	15.091.295.000,00	6.373.000.000,00	8.718.295.000,00	136,80
Bakesbangpol	24.490.416.000,00	2.064.876.000,00	22.425.540.000,00	1086,05
Jumlah	88.719.045.255,00	37.491.422.414,00	51.227.622.841,00	136,64

Perbandingan Beban Hibah LO dengan LRA Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.48 Perbandingan Beban Hibah - LO dengan LRA Tahun 2023

Uraian	LO Tahun 2023 (Rp)	LRA Tahun 2023 (Rp)	Selisih (Rp)
Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	22.225.540.000,00	22.225.540.000,00	0,00
Hibah kepada Badan. Lembaga, Organisasi Kemsyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	64.428.629.255,00	104.022.648.603,00	(39.594.019.348,00)
Hibah Dana BOS	0,00	385.000.000,00	(385.000.000,00)
Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.064.876.000,00	2.064.876.000,00	0,00
Jumlah	88.719.045.255,00	128.698.064.603,00	(39.979.019.348,00)

Selisih atas Beban Hibah – LO dengan LRA sebesar Rp39.979.019.348,00 merupakan dana BOP PAUD sebesar Rp19.731.047.000,00; BOP Peendidikan Kesetaraan sebesar Rp1.441.000.000,00; Dana BOS SD Swasta sebesar Rp5.644.092.948,00; Dana BOS SMP Swasta sebesar Rp10.618.507.400,00; dan Dana BOS Kinerja SMP Swasta sebesar Rp385.000.000,00 tidak disajikan dalam Laporan Operasional karena bukan merupakan beban operasional Pemkab Kebumen.

5.4.2.8 Beban Bantuan Sosial

	Tahun 2023	Tahun 2022
	Rp11.040.168.523,00	Rp11.088.807.122,00

Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp48.638.599,00 atau 0,44% dari Tahun 2022 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.4.49 Rincian Beban Bantuan Sosial

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Uang yang Direncanakan kepada Individu	8.157.000.000,00	7.280.620.000,00	876.380.000,00	12,04

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Barang yang Direncanakan kepada Individu	865.309.473,00	1.350.717.772,00	(485.408.299,00)	(35,94)
Barang kepada Keluarga	546.900.150,00	2.127.879.350,00	(1.580.979.200,00)	(74,30)
Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0,00	300.000.000,00	(300.000.000,00)	(100,00)
Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	1.470.958.900,00	29.590.000,00	1.441.368.900,00	4871,14
Jumlah	11.040.168.523,00	11.088.807.122,00	(48.638.599,00)	(0,44)

Rincian Beban Bantuan Sosial per SKPD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.4.50 Rincian Beban Bantuan Sosial per SKPD

SKPD	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Disdikpora	1.530.000.000,00	1.492.570.000,00	37.430.000,00	2,51
Dinkes PPKB	156.336.150,00	1.809.490.550,00	(1.653.154.400,00)	(91,36)
DPUPR	0,00	300.000.000,00	(300.000.000,00)	(100,00)
Disperkimhub	1.815.000.000,00	2.990.609.672,00	(1.175.609.672,00)	(39,31)
Satpol PP	40.000.000,00	68.000.000,00	(28.000.000,00)	(41,18)
Dinsos P3A	3.731.823.473,00	1.977.696.900,00	1.754.126.573,00	88,70
DLHKP	0,00	448.050.000,00	(448.050.000,00)	(100,00)
Disperindag KKUKM	1.772.008.900,00	592.990.000,00	1.179.018.900,00	198,83
Setda	1.995.000.000,00	1.409.400.000,00	585.600.000,00	41,55
Jumlah	11.040.168.523,00	11.088.807.122,00	(48.638.599,00)	(0,44)

Perbandingan Beban Bantuan Sosial LO dengan LRA Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.51 Perbandingan Beban Bantuan Sosial - LO dengan LRA Tahun 2023

Uraian	LO Tahun 2023 (Rp)	LRA Tahun 2023 (Rp)	Selisih (Rp)
Uang yang Direncanakan kepada Individu	8.157.000.000,00	8.157.000.000,00	0,00
Barang yang Direncanakan kepada Individu	865.309.473,00	865.309.473,00	0,00
Barang kepada Keluarga	546.900.150,00	546.900.150,00	0,00
Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00
Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	1.470.958.900,00	1.470.958.900,00	0,00
Jumlah	11.040.168.523,00	11.040.168.523,00	0,00

Tidak terdapat selisih atas Beban Bantuan Sosial – LO dengan LRA pada Tahun 2023.

5.4.2.9 Beban Penyisihan Piutang

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp1.941.495.935,95	Rp1.426.171.211,00

Beban Penyisihan Piutang Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp515.324.724,95 atau 36,13% dari Tahun 2022 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.4.52 Rincian Beban Penyisihan Piutang

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	1.009.124.510,07	(95.368.995,90)	1.104.493.505,97	(1.158,13)
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	547.148.514,88	1.709.160.150,50	(1.162.011.635,62)	(67,99)
Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	385.222.911,00	(187.619.943,60)	572.842.854,60	(305,32)
Jumlah	1.941.495.935,95	1.426.171.211,00	515.324.724,95	(1.531,43)

Perbandingan Beban Penyisihan Piutang LO dengan kenaikan/penurunan Penyisihan Piutang Neraca Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.53 Perbandingan Beban Penyisihan Piutang LO dengan Kenaikan/Penurunan Penyisihan Piutang Neraca Tahun 2023

Uraian	LO Tahun 2023 (Rp)	Neraca Tahun 2023 (Rp)	Selisih (Rp)
Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	1.009.124.510,07	910.644.474,57	98.480.035,50
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	547.148.514,88	425.432.076,38	121.716.438,50
Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	385.222.911,00	359.742.911,00	25.480.000,00
Jumlah	1.941.495.935,95	1.695.819.461,95	245.676.474,00

Selisih atas Beban Penyisihan Piutang LO dengan kenaikan/penurunan Penyisihan Piutang Neraca sebesar Rp245.676.474,00 merupakan pendapatan atas piutang yang telah disisihkan sebesar Rp220.651.019,00 dan pemberian keringanan piutang sebesar Rp25.480.000,00.

5.4.2.10 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp295.412.850.752,87	Rp309.591.026.986,50

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp14.178.176.233,63 atau 4,58% dari Tahun 2022 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.4.54 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	96.451.969.232,00	112.223.012.603,00	(15.771.043.371,00)	(14,05)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	33.086.146.261,00	32.534.401.059,00	551.745.202,00	1,70
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	165.191.627.821,87	164.260.560.121,50	931.067.700,37	0,57
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	683.107.438,00	573.053.203,00	110.054.235,00	19,20
Jumlah	295.412.850.752,87	309.591.026.986,50	(14.178.176.233,63)	(4,58)

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi LO dengan kenaikan/penurunan Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi Aset Tidak Berwujud Neraca Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.55 Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi LO dengan Kenaikan/Penurunan Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi Aset Tidak Berwujud Neraca Tahun 2023

Uraian	LO Tahun 2023 (Rp)	Neraca Tahun 2023 (Rp)	Selisih (Rp)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	96.451.969.232,00	63.293.158.547,00	33.158.810.685,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	33.086.146.261,00	31.043.940.877,00	2.042.205.384,00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	165.191.627.821,87	164.995.242.493,25	196.385.328,62
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	683.107.438,00	687.900.688,00	(4.793.250,00)
Jumlah	295.412.850.752,87	260.020.242.605,25	35.392.608.147,62

Selisih atas Beban Penyusutan dan Amortisasi LO dengan kenaikan/penurunan Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi Aset Tidak Berwujud Neraca sebesar Rp35.392.608.147,62 merupakan reklasifikasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap ke Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain atas Aset Rusak Berat sebesar Rp34.132.133.152,00 dan koreksi sebesar Rp1.260.474.995,62.

5.4.2.11 Beban Transfer

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp221.014.650.419,00	Rp215.734.892.300,00

Beban Transfer Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp5.279.758.119,00 atau sebesar 2,45% dari Tahun 2022 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.4.56 Rincian Beban Transfer

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Beban Bagi Hasil				
Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	11.224.696.000,00	10.087.758.000,00	1.136.938.000,00	11,27
Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.518.470.881,00	2.314.857.800,00	203.613.081,00	8,80
Beban Bantuan Keuangan				
Umum Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	0,00	200.000.000,00	(200.000.000,00)	(100,00)
Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	178.887.305.538,00	169.946.366.500,00	8.940.939.038,00	5,26
Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	28.384.178.000,00	33.185.910.000,00	(4.801.732.000,00)	(14,47)
Jumlah	221.014.650.419,00	215.734.892.300,00	5.279.758.119,00	2,45

Perbandingan Beban Transfer LO dengan LRA Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.57 Perbandingan Beban Transfer - LO dengan LRA Tahun 2023

Uraian	LO Tahun 2023 (Rp)	LRA Tahun 2023 (Rp)	Selisih (Rp)
Beban Bagi Hasil			
Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	11.224.696.000,00	11.224.696.000,00	0,00
Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.518.470.881,00	2.518.470.881,00	0,00
Beban Bantuan Keuangan			
Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	178.887.305.538,00	634.847.198.738,00	(455.959.893.200,00)
Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	28.384.178.000,00	28.384.178.000,00	0,00
Jumlah	221.014.650.419,00	676.974.543.619,00	(455.959.893.200,00)

Selisih antara Beban Transfer LO dengan LRA sebesar Rp455.959.893.200,00 merupakan Dana Desa tidak disajikan dalam Laporan Operasional karena bukan merupakan beban operasional Pemkab Kebumen.

5.4.3 Surplus/Defisit dari Operasi

Tahun 2023	Tahun 2022
(Rp70.757.195.426,68)	(Rp45.386.629.882,26)

Surplus/Defisit dari Operasi merupakan selisih antara Pendapatan-LO dan Beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi.

Defisit dari Operasi Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp25.713.471.676,42 atau 56,65% dari Tahun 2022.

5.4.4 Kegiatan Non Operasional

Tahun 2023	Tahun 2022
(Rp61.892.277.453,00)	(Rp15.006.573.830,00)

Kegiatan Non Operasional merupakan kegiatan yang bersumber dari surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp46.885.703.623,00 atau 312,43% dari Tahun 2022 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.4.58 Rincian Kegiatan Non Operasional

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	1.829.716.362,00	(1.829.716.362,00)	(100,00)
Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	61.892.277.453,00	16.836.290.192,00	45055987261,00	267,61
Surplus / Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	(61.892.277.453,00)	(15.006.573.830,00)	(46.885.703.623,00)	312,43

5.4.4.1 Surplus Penjualan Aset Non Lancar

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp0,00	Rp1.829.716.362,00

Surplus Penjualan Aset Non Lancar Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp1.829.716.362,00 atau 100 % dari Tahun 2022 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.4.59 Rincian Surplus Penjualan Aset Non Lancar

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Surplus Penjualan Alat Angkutan	0,00	1.521.719.362,00	(1.521.719.362,00)	(100,00)
Surplus Penjualan Bangunan Gedung	0,00	249.797.000,00	(249.797.000,00)	(100,00)
Surplus Penjualan Biota Perairan	0,00	58.200.000,00	(58.200.000,00)	(100,00)
Jumlah	0,00	1.829.716.362,00	(1.829.716.362,00)	(100,00)

5.4.4.2 Defisit Penjualan Aset Non Lancar

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp61.892.277.453,00	Rp16.836.290.192,00

Defisit Penjualan Aset Non Lancar – LO Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp45.055.987.261,00 atau 267,61% dari Tahun 2022. Defisit ini seluruhnya berasal dari penghapusan Aset Lain-lain berupa Aset Rusak Berat/Usang dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.4.60 Daftar SK Penghapusan Aset Lain-lain Tahun 2023

No	Nomer SK	Uraian	Jumlah (Rp)
1	028/353/KEP/2019	Penghapusan BMD Daerah dari Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna (Kendaraan)	100.000.000,00
2	028/118/KEP/2021	Penghapusan BMD Daerah dari Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna (Kendaraan)	69.417.500,00
3	028/2161.2/KEP/2022	Penghapusan BMD Daerah dari Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna (Alat Kesehatan)	1.450.000,00
4	028/050/KEP/2022	Penghapusan BMD Daerah dari Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna (Kendaraan)	58.886.000,00
5	028/040.1/KEP/2022	Penghapusan BMD Daerah Berupa Pelatan dan Mesin (Kendaraan Dinas Bermotor) dari Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna	9.650.000,00
6	000.2.4/3841	Penghapusan BMD Daerah dari Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna (Kendaraan)	820.995.919,00
7	028/4673/KEP/2023	Penghapusan BMD Daerah dari Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna (Aset Tetap Lainnya) Sekolah Menengah Pertama	5.406.092.621,00
8	028/4674/KEP/2023	Penghapusan BMD Daerah dari Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna (Aset Tetap Lainnya) Sekolah Dasar Negeri	6.474.693.713,00
9	028/4685	Penghapusan BMD Daerah dari Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna	27.932.827.992,00
10	028/3668/KEP/2023	Penghapusan BMD Daerah dari Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna (Kendaraan)	10.796.719.681,00

No	Nomer SK	Uraian	Jumlah (Rp)
11	028/4312/KEP/2023	Penghapusan BMD Daerah dari Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna	10.221.544.027,00
		Jumlah	61.892.277.453,00

5.4.5 Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa

Tahun 2023	Tahun 2022
(Rp132.649.472.879,68)	(Rp60.393.203.712,26)

Defisit Sebelum Pos Luar Biasa Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp72.256.269.167,42 atau 119,64% dari Tahun 2022.

5.4.6 Pos Luar Biasa

Tahun 2023	Tahun 2022
(Rp409.940.801,00)	(Rp1.295.204.500,00)

Pos Luar Biasa merupakan rekening yang menampung peristiwa atau kejadian luar biasa Tahun 2023 yang mempunyai karakteristik kejadian tidak normal dan jarang terjadi serta di luar kendali entitas pemerintah daerah.

Pos Luar Biasa Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp885.263.699,00 atau 68,35% dari Tahun 2022 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.4.61 Rincian Pos Luar Biasa

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Pendapatan Luar Biasa - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Luar Biasa	409.940.801,00	1.295.204.500,00	(885.263.699,00)	(68,35)
Jumlah	409.940.801,00	1.295.204.500,00	(885.263.699,00)	(68,35)

5.4.6.1 Beban Luar Biasa

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp409.940.801,00	Rp1.295.204.500,00

Beban Luar Biasa merupakan beban atas bantuan untuk korban bencana alam, bantuan korban kebakaran, bantuan Migran Korban Tindak kekerasan, bantuan orang kehabisan bekal/PMKS, Bantuan kepada Korban Kebakaran.

Beban Luar Biasa Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp885.263.699,00 atau 68,35% dari Tahun 2022.

Realisasi Beban Luar Biasa - LO Tahun 2023 sama dengan nilai realisasi Belanja Tidak Terduga LRA TA 2023 yaitu sebesar Rp409.940.801,00 sehingga tidak terdapat selisih atas Beban Luar Biasa – LO dengan LRA pada Tahun 2023.

5.4.7 Surplus/Defisit - LO

Tahun 2023	Tahun 2022
(Rp133.059.413.680,68)	(Rp61.688.408.212,26)

Surplus/Defisit – LO merupakan selisih antara Pendapatan - LO dan Beban - LO selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa.

Pada Laporan Operasional Tahun 2023, Pemkab Kebumen mengalami defisit sebesar Rp133.059.413.680,68 dan Tahun 2022 mengalami defisit sebesar Rp61.688.408.212,26. Hal ini menunjukkan terjadi penambahan defisit sebesar Rp71.371.005.468,42 atau 115,70%.

5.5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas (LAK) menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode Tahun 2023 Kabupaten Kebumen. Mendasari PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP, LAK Kabupaten Kebumen merupakan konsolidasi Arus Kas yang dikelola BUD dan BLUD baik pendapatan maupun belanjanya, serta Pendapatan dan Belanja yang berasal dari Dana BOS. LAK dikelompokkan berdasarkan aktivitasnya yaitu:

1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi
2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi
3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Informasi ini bertujuan untuk:

1. Menilai pengaruh dari masing-masing aktivitas terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah daerah
2. Mengevaluasi hubungan antara masing-masing aktivitas

Saldo Awal Kas atau saldo Kas per 31 Desember 2022 sebesar Rp258.826.677.113,98 mengalami penurunan selama tahun 2023 sebesar Rp94.128.752.680,00 sehingga Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2023 sebesar Rp164.697.924.499,98, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.5.1 LAK TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	200.684.492.551,00	293.309.607.181,00	(92.625.114.630,00)	(31,58)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(294.810.357.659,00)	(303.671.883.502,00)	8.861.525.843,00	(2,92)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(2.887.572,00)	9.326.302,00	(12.213.874,00)	(130,96)
Kenaikan/Penurunan Kas	(94.128.752.680,00)	(10.352.950.019,00)	(83.775.802.661,00)	809,20
Saldo Awal Kas	258.826.677.179,98	269.179.627.198,98	(10.352.950.019,00)	(3,85)
Saldo Akhir Kas	164.697.924.499,98	258.826.677.179,98	(94.128.752.680,00)	(36,37)

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemkab Kebumen dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi diikhtisarkan pada tabel berikut.

Tabel 5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Operasi TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Arus Kas Masuk	2.898.983.493.842,00	2.845.366.301.042,00	53.617.192.800,00	1,88
Arus Kas Keluar	2.698.299.001.291,00	2.552.056.693.861,00	146.242.307.430,00	5,73
Arus Kas Bersih	200.684.492.551,00	293.309.607.181,00	(92.625.114.630,00)	(31,58)

5.5.1.1 Arus Kas Masuk

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi terdiri dari :

Tabel 5.5.3 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Penerimaan Pajak Daerah	137.222.705.502,00	129.843.875.322,00	7.378.830.180,00	5,68
Penerimaan Retribusi Daerah	28.881.046.419,00	28.375.110.419,00	505.936.000,00	1,78
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19.123.340.688,00	17.640.585.052,00	1.482.755.636,00	8,41

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	276.385.853.217,00	334.657.088.320,00	(58.271.235.103,00)	(17,41)
Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat	0,00	2.123.296.694.941,00	(2.123.296.694.941,00)	(100,00)
Penerimaan Dana Bagi Hasil	36.123.723.591,00	0,00	36.123.723.591,00	0,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	1.239.930.914.430,00	0,00	1.239.930.914.430,00	0,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	507.146.964.042,00	0,00	507.146.964.042,00	0,00
Penerimaan Dana Insentif	11.805.728.000,00	0,00	11.805.728.000,00	0,00
Penerimaan Dana Desa	455.959.893.200,00	0,00	455.959.893.200,00	0,00
Penerimaan Transfer Antar Daerah	0,00	206.406.947.000,00	(206.406.947.000,00)	(100,00)
Penerimaan Bagi Hasil Pajak	174.243.934.191,00	0,00	174.243.934.191,00	0,00
Penerimaan Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	10.639.281.000,00	0,00	10.639.281.000,00	0,00
Penerimaan Hibah	1.520.109.562,00	5.145.999.988,00	(3.625.890.426,00)	(70,46)
Arus Kas Masuk	2.898.983.493.842,00	2.845.366.301.042,00	53.617.192.800,00	1,88

Arus Kas Masuk tersebut termasuk pendapatan yang diterima BLUD dan pendapatan dari Dana BOS yang diterima langsung sekolah, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.5.4 Rincian Pendapatan BLUD dan Dana BOS TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Pendapatan BLUD				
RSUD Dr. Soedirman	23.408.760.440,00	52.325.530.201,00	(28.916.769.761,00)	(55,26)
RSUD Prembun	19.504.619.530,00	30.578.253.474,00	(11.073.633.944,00)	(36,21)
Puskesmas	6.454.129.611,98	4.592.561.339,98	1.861.568.272,00	40,53
Pendapatan BOS	868.116.142,00	1.027.801.582,00	(159.685.440,00)	(15,54)
Jumlah	50.235.625.723,98	88.524.146.596,98	(38.288.520.873,00)	(43,25)

5.5.1.2 Arus Kas Keluar

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi terdiri dari :

Tabel 5.5.5 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Pembayaran Pegawai	1.153.775.444.865,00	1.142.207.137.167,00	11.568.307.698,00	1,01
Pembayaran Barang dan Jasa	726.725.182.478,00	704.907.763.493,00	21.817.418.985,00	3,10
Pembayaran Subsidi	675.656.402,00	313.864.348,00	361.792.054,00	115,27
Pembayaran Hibah	128.698.064.603,00	59.752.651.931,00	68.945.412.672,00	115,38
Pembayaran Bantuan Sosial	11.040.168.523,00	11.088.807.122,00	(48.638.599,00)	(0,44)
Pembayaran Tak Terduga	409.940.801,00	1.295.204.500,00	(885.263.699,00)	(68,35)
Pembayaran Transfer Belanja Bagi Hasil	0,00	12.402.615.800,00	(12.402.615.800,00)	(100,00)
Pembayaran Bagi Hasil Pajak	11.224.696.000,00	0,00	11.224.696.000,00	0,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	2.518.470.881,00	0,00	2.518.470.881,00	0,00
Pembayaran Transfer Belanja Bantuan Keuangan	0,00	620.088.649.500,00	(620.088.649.500,00)	(100,00)
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	663.231.376.738,00	0,00	663.231.376.738,00	0,00
Arus Kas Keluar	2.698.299.001.291,00	2.552.056.693.861,00	146.242.307.430,00	5,73

Arus Kas Keluar tersebut termasuk belanja operasi pada BLUD dan belanja yang bersumber dari Dana BOS, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.5.6 Rincian Belanja BLUD dan Dana BOS TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Belanja BLUD				
Belanja Pegawai BLUD	579.594.000,00	469.241.325,00	110.352.675,00	23,52
Belanja Barang dan Jasa BLUD	265.543.950.851,00	259.968.977.911,00	5.574.972.940,00	2,14
Belanja BOS				
Belanja Pegawai BOS	15.389.395.600,00	25.914.114.000,00	(10.524.718.400,00)	(40,61)
Belanja Barang dan Jasa BOS	85.241.331.861,00	87.002.325.361,00	(1.760.993.500,00)	(2,02)
Jumlah	366.754.272.312,00	373.354.658.597,00	(6.600.386.285,00)	(1,77)

5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Aktivitas Investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset non-keuangan lainnya. Arus Kas dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi diikhtisarkan pada tabel berikut.

Tabel 5.5.7 Arus Kas dari Aktivitas Investasi TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Arus Kas Masuk	24.263.555.879,00	1.829.716.362,00	22.433.839.517,00	1.226,08
Arus Kas Keluar	319.073.913.538,00	305.501.599.864,00	13.572.313.674,00	4,44
Arus Kas Bersih	(294.810.357.659,00)	(303.671.883.502,00)	8.861.525.843,00	(2,92)

Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi bertambah sebesar Rp8.861.525.843,00 menunjukkan bahwa selama Tahun 2023 dari Aktivitas Investasi mengurangi saldo kas sebesar Rp294.810.357.659,00.

5.5.2.1 Arus Kas Masuk

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi merupakan hasil pencairan Dana Cadangan dan penjualan BMD yang sudah dihapus dari daftar barang inventaris berupa Peralatan Mesin, Bangunan Gedung dan Aset Tetap Lainnya. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi terdiri dari :

Tabel 5.5.8 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Pencairan Dana Cadangan	22.225.540.000,00	0,00	22.225.540.000,00	0,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	1.769.454.879,00	1.521.719.362,00	247.735.517,00	16,28
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	204.361.000,00	249.797.000,00	(45.436.000,00)	(18,19)
Penjualan Aset Tetap Lainnya	64.200.000,00	58.200.000,00	6.000.000,00	10,31
Arus Kas Masuk	24.263.555.879,00	1.829.716.362,00	22.433.839.517,00	1.226,08

5.5.2.2 Arus Kas Keluar

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi terdiri dari Belanja Modal termasuk didalamnya Belanja Modal pada BLUD dan Belanja Modal yang bersumber Dana BOS, Penyertaan Modal Daerah serta pembentukan Dana Cadangan. Arus Kas Keluar Aktivitas Investasi terdiri dari.

Tabel 5.5.9 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000.000,00	15.000.000.000,00	5.000.000.000,00	33,33
Perolehan Tanah	1.400.551.240,00	1.387.839.580,00	12.711.660,00	0,92

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Perolehan Peralatan dan Mesin	65.799.396.633,00	102.152.506.285,00	(36.353.109.652,00)	(35,59)
Perolehan Gedung dan Bangunan	75.265.208.901,00	34.758.067.305,00	40.507.141.596,00	116,54
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	124.921.560.732,00	126.620.498.535,00	(1.698.937.803,00)	(1,34)
Perolehan Aset Tetap Lainnya	11.456.196.032,00	6.894.828.159,00	4.561.367.873,00	66,16
Perolehan Aset Lainnya	-	487.860.000,00	(487.860.000,00)	(100,00)
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	20.231.000.000,00	18.200.000.000,00	2.031.000.000,00	11,16
Arus Kas Keluar	319.073.913.538,00	305.501.599.864,00	13.572.313.674,00	4,44

Arus kas keluar aktivitas investasi dari Belanja Modal yang bersumber Dana Badan Layanan Umum Daerah dirinci sebagai berikut:

Arus Kas Keluar tersebut termasuk Belanja Modal yang bersumber dari dana BLUD dan Belanja Modal yang bersumber dari Dana BOS, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.5.10 Rincian Belanja Modal BLUD dan Dana BOS TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Belanja Modal BLUD				
Belanja Modal Tanah	0,00	22.427.550,00	(22.427.550,00)	(100,00)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.720.122.340,00	49.662.806.698,00	(33.942.684.358,00)	(68,35)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	413.512.000,00	8.549.381.811,00	(8.135.869.811,00)	(95,16)
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	78.468.000,00	221.692.260,00	(143.224.260,00)	(64,60)
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	311.987.000,00	(311.987.000,00)	(100,00)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	5.400.000,00	(5.400.000,00)	(100,00)
Belanja Modal BOS				
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.428.636.028,00	21.372.682.269,00	(2.944.046.241,00)	(13,77)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.873.160.652,00	6.796.646.659,00	(4.076.513.993,00)	59,98
Jumlah	45.513.899.020,00	86.943.024.247,00	(41.429.125.227,00)	(47,65)

5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Aktivitas Pendanaan adalah penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi investasi jangka panjang, piutang jangka panjang dan utang pemerintah daerah sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah daerah dan klaim pemerintah daerah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi diikhtisarkan pada tabel berikut.

Tabel 5.5.11 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Arus Kas Masuk	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	0,00	0,00
Arus Kas Keluar	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	0,00	0,00
Arus Kas Bersih	0,00	0,00	0,00	0,00

5.5.3.1 Arus Kas Masuk

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan merupakan penerimaan kembali pokok pinjaman dana talangan yang dikelola oleh Distapang dan DLHKP. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan terdiri dari :

Tabel 5.5.12 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	0,00	0,00
Arus Kas Masuk	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	0,00	0,00

5.5.3.3 Arus Kas Keluar

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan merupakan Pemberian Pinjaman Daerah berupa Dana Talangan Pengadaan Pangan Kepada Gapoktan dan Rukun Nelayan. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan terdiri dari :

Tabel 5.5.13 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Pemberian Pinjaman Daerah	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	0,00	0,00
Arus Kas Masuk	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	0,00	0,00

5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris mencerminkan saldo penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris diikhtisarkan pada tabel berikut.

Tabel 5.5.14 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Arus Kas Masuk	168.451.375.647,01	154.521.795.983,00	13.929.579.664,01	9,01
Arus Kas Keluar	168.454.263.219,01	154.512.469.681,00	13.941.793.538,01	9,02
Arus Kas Bersih	(2.887.572,00)	9.326.302,00	(12.213.874,00)	(130,96)

5.5.4.1 Arus Kas Masuk

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris merupakan penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) pada BUD dan Bendahara Dana BOS. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris terdiri dari :

Tabel 5.5.15 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Penerimaan PFK				
BUD	167.495.251.661,01	154.512.469.681,00	12.982.781.980,01	8,40
Bendahara Dana BOS	956.123.986,00	9.326.302,00	946.797.684,00	10151,91
Arus Kas Masuk	168.451.375.647,01	154.521.795.983,00	13.929.579.664,01	9,01

5.5.4.4 Arus Kas Keluar

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris merupakan pengeluaran PFK pada BUD dan Bendahara BOS. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris terdiri dari :

Tabel 5.5.16 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Penerimaan PFK				
BUD	167.495.251.661,01	154.512.469.681,00	12.982.781.980,01	8,40

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Bendahara Dana BOS	959.011.558,00	0,00	959.011.558,00	0,00
Arus Kas Masuk	168.454.263.219,01	154.512.469.681,00	13.941.793.538,01	9,02

5.5.5 Kenaikan/Penurunan Kas

Terdapat penurunan kas selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2023 sebesar Rp94.128.752.680,00 yang merupakan penjumlahan dari Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan dan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris yang dikelola oleh BUD, Bendahara SKPD, BLUD dan BOS.

5.5.5.1 Saldo Awal Kas

Saldo Awal Kas TA 2023 adalah Saldo Akhir Kas TA 2022 sebesar Rp258.826.677.179,98 yang merupakan penjumlahan dari penurunan kas sebesar Rp10.352.950.019,00 dan Saldo Awal Kas sebesar Rp269.179.627.198,98, dengan rician sebagai berikut.

Kas di Kas Daerah	Rp170.249.980.751,00
Kas di Bendahara Penerimaan	Rp41.794.313,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp1.429.217,00
Kas di BLUD	Rp87.496.345.014,98
Kas BOS	Rp1.037.127.884,00
Saldo Awal Kas 2023	Rp258.826.677.179,98

5.5.5.2 Saldo Akhir Kas

Saldo Akhir Kas TA 2023 sebesar Rp164.697.924.499,98 merupakan penjumlahan dari penurunan kas sebesar Rp94.128.752.680,00 dan Saldo Awal Kas sebesar Rp258.826.677.179,98.

Saldo Akhir Kas sebesar Rp164.697.924.499,98 terdiri dari:

Kas di Kas Daerah	Rp113.015.912.113,00
Kas di Bendahara Penerimaan	Rp212.936.280,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp0,00
Kas di BLUD	Rp49.367.509.581,98
Kas BOS	Rp893.163.639,00
Kas Lainnya	Rp1.208.402.886,00
Saldo Akhir Kas 2023	Rp164.697.924.499,98

Terdapat selisih sebesar Rp6.438.730,00 antara Saldo Akhir Kas TA 2023 dengan SiLPA per 31 Desember 2023 yang merupakan Utang PFK pada Bendahara BOS per 31 Desember 2023.

5.6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas dan aktivitas operasional pada tahun pelaporan.

Tabel 5.6.1 Perubahan Ekuitas Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
EKUITAS AWAL	4.592.239.658.445,71	4.614.349.431.228,11
SURPLUS/DEFISIT-LO	(133.059.413.680,68)	(61.688.408.212,26)
DAMPAK KUMULATIF KESALAHAN MENDASAR:	(1.088.604.645,38)	39.578.635.429,86
Koreksi Nilai Persediaan		
Selisih Revaluasi Aset Tetap		
Lain-lain		
Koreksi Piutang	0,00	2.283.077.472,50
Koreksi Investasi	0,00	(6.637.838.044,46)
Koreksi Aset Tetap	10.013.457.286,62	8.440.561.681,00
Koreksi Aset Lainnya	(11.102.061.932,00)	35.492.834.320,82
EKUITAS AKHIR	4.458.091.640.119,65	4.592.239.658.445,71

5.6.1 Ekuitas Awal

Saldo Ekuitas Awal Tahun 2023 sebesar Rp4.592.239.658.445,71 merupakan Saldo Ekuitas Tahun 2022 pada Neraca. Ekuitas Awal Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp22.109.772.782,40 atau 0,48%.

5.6.2 Surplus/Defisit-LO

Saldo Surplus/Defisit-LO merupakan selisih antara Pendapatan-LO dengan Beban pada Laporan Operasional. Untuk tahun yang berakhir s.d. 31 Desember 2023 terdapat Defisit-LO sebesar Rp133.059.413.680,68. Defisit -LO Tahun 2023 bertambah sebesar Rp71.371.005.468,42 atau 115,70% dari Defisit -LO Tahun 2022 yang hanya sebesar Rp61.688.408.212,26.

5.6.3 Dampak Kumulatif Kesalahan Mendasar

Saldo Dampak Kumulatif Kesalahan Mendasar Tahun 2023 sebesar (Rp1.088.604.645,38) mengalami penurunan sebesar Rp40.667.240.075,24 atau 102,75% dari Tahun 2022. Dampak Kumulatif Kesalahan Mendasar yang mempengaruhi saldo akun Ekuitas Akhir adalah Lain-lain.

5.6.3.1 Lain-lain

Dampak Kumulatif Kesalahan – Lain-lain(Rp1.088.604.645,38) dapat dijelaskan sebagai berikut.

Dampak Kumulatif Kesalahan – Lain-lain Tahun 2023 terdiri dari Koreksi Aset Tetap sebesar Rp10.013.457.286,62 dan Koreksi Aset Lainnya sebesar (Rp11.102.061.932,00) dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.6.2 Rincian Dampak Kumulatif Kesalahan – Lain-lain Tahun 2023

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Koreksi Aset Tetap	
	Tanah	
1.1	Penambahan Aset Tetap Tanah dari hasil inventarisasi pada DLHKP berupa tambak seluas 344.687m ² yang terletak di Desa Tambakmulyo Kec. Puring yang merupakan tanah Negara sesuai Surat Keterangan Desa Tambakmulyo Nomor 001/360/IX/2023.	12.408.732.000,00

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.2	Penambahan Aset Tetap Tanah dari hasil inventarisasi pada Kel. Kebumen yang merupakan tanah untuk jalan.	1.252.176.800,00
1.3	Pengurangan Aset Tetap Tanah karena dihibahkan kepada Kementerian Agama Kebumen seluas 400m ² yang terletak di Jalan Tentara Pelajar Kelurahan Panjer Kebumen	(168.900.000,00)
	Peralatan dan Mesin	
1.4	Penambahan Aset Tetap - Peralatan dan Mesin karena koreksi pencatatan pada: a. Disdikpora (SDN 3 Plarangan dan SMPN 1 Karanganyar) senilai Rp9.900,00; b. Kecamatan Karanganyar senilai Rp1.650.000,00; c. Kecamatan Puring senilai Rp4.700.000,00.	16.250.000,00
1.5	Penambahan Aset Tetap - Peralatan dan Mesin dari hasil inventarisasi pada: a. Puskesmas Klirong II senilai Rp9.860.000,00; b. Puskesmas Sempor I senilai Rp93.780.760,00; c. Disperkimhub senilai Rp80.705.000,00; d. Bappeda senilai Rp3.728.363,00; e. Bagian Humas Setda senilai Rp9.076.500,00; f. Kecamatan Puring senilai Rp11.896.000,00, dan g. Kecamatan Padureso senilai Rp3.078.000,00.	212.124.623,00
1.6	Pengurangan Aset Tetap - Peralatan dan Mesin karena koreksi pencatatan yang disebabkan: a. Pengadaan Belanja Modal yang tidak memenuhi kategori Aset Tetap senilai Rp323.300.730,00; b. Dobel catat senilai Rp113.390.530,00; c. Aset bukan milik Pemkab Kebumen senilai Rp5.292.000,00; dan d. Koreksi nilai perolehan/pencatatan senilai Rp16.040.000,00.	(458.023.260,00)
1.7	Pengurangan Aset Tetap - Peralatan dan Mesin yang dihibahkan kepada Kepolisian Resort Kebumen berupa satu unit Kendaraan Roda 4 sesuai NPHD Nomor 12 Tahun 2003 tanggal 9 Januari 2023.	(538.565.000,00)
1.8	Pengurangan Aset Tetap - Peralatan dan Mesin yang direklasifikasi ke <i>Extrakompatable</i>	(98.438.672,00)
	Gedung dan Bangunan	
1.9	Penambahan Aset Tetap - Gedung dan Bangunan dari hasil inventarisasi berupa Gedung Eks Pramuka yang tercatat pada PPKD.	123.450.000,00
1.10	Penambahan Aset Tetap - Gedung dan Bangunan yang direklasifikasi dari <i>Extrakompatable</i> pada SDN Argopeni Kecamatan Ayah	505.000,00
1.11	Pengurangan Aset Tetap - Gedung dan Bangunan yang dihibahkan ke Pemerintah Desa berupa Bangunan Tempat Pendidikan eks SD yang di- <i>regrouping</i> .	(2.407.881.500,00)
1.12	Pengurangan Aset Tetap - Gedung dan Bangunan karena koreksi pencatatan pada DPUPR berupa lima unit Bangunan Gedung Kantor di Desa Jlegiwinangun Kecamatan Kutowinangun dan Desa Karangduwur Petanahan dan Bangunan Pos Jaga di Desa Mangunranan Kecamatan Mirit, Desa Giwangretno Kecamatan Sruweng, dan Desa Tersobo Kecamatan Prembun yang bukan merupakan kewenangan Pemkab Kebumen tetapi milik BBWSO Yogyakarta.	(111.630.618,00)
	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	
1.13	Penambahan Aset Tetap - Jalan, Jaringan, dan Irigasi karena koreksi yang disebabkan penggabungan Reg. No. 217 (SPAM Desa Wonotirto Kecamatan Karanggayam) pada DPUPR.	296.328.789,00
1.14	Pengurangan Aset Tetap - Jalan, Jaringan, dan Irigasi karena koreksi pada: b. Puskesmas Klirong I senilai Rp338.000,00; b. DPUPR senilai Rp296.328.789,00; c. Dinsos P3A senilai Rp38.350.640,00; dan d. Kelurahan Plarangan senilai Rp2.000.000,00.	(337.017.429,00)
	Aset Tetap Lainnya	
1.15	Penambahan Aset Tetap Lainnya dari hasil inventarisasi berupa buku pada Disdikpora (SDN Rowosari Kec. Bonorowo dan SMPN 2 Prembun).	2.635.400,00
1.16	Penambahan Aset Tetap Lainnya dari hasil inventrisasi berupa buku umum	1.514.950,00
1.17	Pengurangan Aset Tetap Lainnya karena tidak memenuhi kriteria aset tetap pada Disdikpora.	(921.513.506,00)
	Akumulasi Penyusutan	
1.18	Penyesuaian atas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Peralatan dan Mesin	(295.393.483,00)

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.19	Penyesuaian atas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Gedung dan Bangunan	1.006.388.914,00
1.20	Penyesuaian atas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi	30.714.278,62
	Sub Jumlah	10.013.457.286,62
2	Koreksi Aset Lainnya	
2.1	Penambahan Aset Lain Lain – Aset Rusak Berat dari hasil inventarisasi	60.971.353,00
2.2	Pengurangan Aset Lain-lain pada: a. DPUPR senilai Rp11.154.240.035,00 merupakan jalan desa yang telah diserahkan; dan b. Disnaker senilai Rp4.000.000,00 berupa koreksi pencatatan; dan	(11.158.240.035,00)
2.3	Penyesuaian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud - Software pada Disarpus	(4.793.250,00)
	Sub Jumlah	(11.102.061.932,00)
	Jumlah	(1.088.604.645,38)

5.6.4 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir merupakan saldo Ekuitas Awal ditambah Surplus/Defisit-LO dan ditambah Dampak Kumulatif Kesalahan Mendasar. Saldo Ekuitas Akhir akan dicatat dan disajikan pada Neraca. Saldo Ekuitas Akhir tahun 2023 sebesar Rp4.458.091.640.119,65 mengalami penurunan sebesar Rp134.148.018.326,06 atau 2,92% dari tahun 2022.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Susunan Perangkat Daerah

Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan otonomi daerah yang termaktub dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perda Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Laporan Keuangan Kabupaten Kebumen disusun dengan memperhatikan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah dan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diberlakukan di Indonesia yaitu Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan konsolidasi dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah, maka ditetapkan Perda Kabupaten Kebumen Nomor 2 tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perda Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, agar substansinya dapat selaras dengan tujuan otonomi yang didasarkan pada asas kewenangan, intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah, efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas dan fleksibilitas. Susunan Perangkat Daerah tersebut terdiri atas:

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektorat;
4. Dinas;
5. Badan; dan
6. Kecamatan.

Perangkat Daerah dibentuk dengan susunan sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah tipe A;
2. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD tipe A;
3. Inspektorat merupakan Inspektorat tipe A; dan
4. Dinas dengan tipe sebagai berikut:
 - a. Dinas Kesehatan tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
 - b. Dinas Pendidikan tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan;
 - d. Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan, serta sub urusan persampahan pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sub urusan kebakaran;
 - f. Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang sosial dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - g. Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja, bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, dan bidang transmigrasi;

- h. Dinas Pertanian dan Pangan tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan;
 - i. Dinas Perindustrian dan Perdagangan tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
 - j. Dinas Perhubungan tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan;
 - k. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan bidang energi dan sumber daya mineral;
 - l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - m. Dinas Komunikasi Dan Informatika tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
 - n. Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga dan bidang pariwisata;
 - o. Dinas Kelautan Dan Perikanan tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
 - p. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan; dan
 - q. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
5. Badan dengan tipe sebagai berikut:
- a. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
 - b. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tipe B melaksanakan fungsi penunjang keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah; dan
 - d. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah tipe B melaksanakan fungsi penunjang keuangan sub fungsi pendapatan daerah.
6. Kecamatan terdiri dari 26 Kecamatan tipe A.

Nomenklatur SKPD pada penyusunan LKPD TA 2023 disajikan sesuai tabel berikut.

Tabel 6.1 Nomenklatur SKPD pada Penyusunan LKPD TA 2023

No	Kode SKPD	Nama SKPD
1	1.01.2.19.0.00.01	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga
2	1.02.2.14.0.00.01	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
3	1.03.2.10.0.00.01	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
4	1.04.2.15.0.00.01	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan
5	1.05.0.00.0.00.01	Satuan Polisi Pamong Praja
6	1.05.0.00.0.00.02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7	1.06.2.08.0.00.01	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
8	2.09.3.27.0.00.01	Dinas Pertanian Dan Pangan
9	2.11.3.28.3.25.01	Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan Dan Perikanan
10	2.12.0.00.0.00.01	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
11	2.13.0.00.0.00.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
12	2.16.2.20.2.21.01	Dinas Komunikasi Dan Informatika
13	2.17.3.31.3.30.01	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
14	2.18.0.00.0.00.01	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
15	2.22.3.26.0.00.01	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
16	2.23.2.24.0.00.01	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
17	3.29.3.32.2.07.01	Dinas Tenaga Kerja
18	4.01.0.00.0.00.01	Sekretariat Daerah

No	Kode SKPD	Nama SKPD
19	4.02.0.00.0.00.01	Sekretariat Dprd
20	5.01.5.05.0.00.01	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
21	5.02.0.00.0.00.01	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
22	5.03.5.04.0.00.01	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
23	6.01.0.00.0.00.01	Inspektorat Daerah
24	7.01.0.00.0.00.01	Kecamatan Ayah
25	7.01.0.00.0.00.02	Kecamatan Buayan
26	7.01.0.00.0.00.03	Kecamatan Puring
27	7.01.0.00.0.00.04	Kecamatan Petanahan
28	7.01.0.00.0.00.05	Kecamatan Klirong
29	7.01.0.00.0.00.06	Kecamatan Buluspesantren
30	7.01.0.00.0.00.07	Kecamatan Ambal
31	7.01.0.00.0.00.08	Kecamatan Mirit
32	7.01.0.00.0.00.09	Kecamatan Bonorowo
33	7.01.0.00.0.00.10	Kecamatan Prembun
34	7.01.0.00.0.00.11	Kecamatan Padureso
35	7.01.0.00.0.00.12	Kecamatan Kutowinangun
36	7.01.0.00.0.00.13	Kecamatan Alian
37	7.01.0.00.0.00.14	Kecamatan Poncowarno
38	7.01.0.00.0.00.15	Kecamatan Kebumen
39	7.01.0.00.0.00.16	Kecamatan Pejagoan
40	7.01.0.00.0.00.17	Kecamatan Sruweng
41	7.01.0.00.0.00.18	Kecamatan Adimulyo
42	7.01.0.00.0.00.19	Kecamatan Kuwarasan
43	7.01.0.00.0.00.20	Kecamatan Rowokele
44	7.01.0.00.0.00.21	Kecamatan Sempor
45	7.01.0.00.0.00.22	Kecamatan Gombong
46	7.01.0.00.0.00.23	Kecamatan Karanganyar
47	7.01.0.00.0.00.24	Kecamatan Karanggayam
48	7.01.0.00.0.00.25	Kecamatan Sadang
49	7.01.0.00.0.00.26	Kecamatan Karangsambung
50	8.01.0.00.0.00.01	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Pada TA 2023 terdapat 37 entitas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yaitu 35 Puskesmas dan dua Rumah Sakit Umum Daerah yang merupakan UPT Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6.2 Entitas yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD

No	BLUD
1	UPTD RSUD Dr. Soedirman
2	UPTD RSUD Prembun
3	UPTD Puskesmas Adimulyo
4	UPTD Puskesmas Alian
5	UPTD Puskesmas Ambal I
6	UPTD Puskesmas Ambal II
7	UPTD Puskesmas Ayah I
8	UPTD Puskesmas Ayah II
9	UPTD Puskesmas Bonorowo
10	UPTD Puskesmas Buayan
11	UPTD Puskesmas Buluspesantren I
12	UPTD Puskesmas Buluspesantren II
13	UPTD Puskesmas Gombong I
14	UPTD Puskesmas Gombong II
15	UPTD Puskesmas Karanganyar
16	UPTD Puskesmas Karanggayam I
17	UPTD Puskesmas Karanggayam II
18	UPTD Puskesmas Karangsambung
19	UPTD Puskesmas Kebumen I
20	UPTD Puskesmas Kebumen II
21	UPTD Puskesmas Kebumen III

No	BLUD
22	UPTD Puskesmas Klirong I
23	UPTD Puskesmas Klirong II
24	UPTD Puskesmas Kutowinangun
25	UPTD Puskesmas Kuwarasan
26	UPTD Puskesmas Mirit
27	UPTD Puskesmas Padureso
28	UPTD Puskesmas Pejagoan
29	UPTD Puskesmas Petanahan
30	UPTD Puskesmas Poncowarno
31	UPTD Puskesmas Prembun
32	UPTD Puskesmas Puring
33	UPTD Puskesmas Rowokele
34	UPTD Puskesmas Sadang
35	UPTD Puskesmas Sempor I
36	UPTD Puskesmas Sempor II
37	UPTD Puskesmas Sruweng

6.2 Anugerah Adipura

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 263 Tahun 2024 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Penerima Penghargaan Adipura Tahun 2023 Kebumen menjadi salah satu penerima Adipura Tahun 2023 Kategori Kota Sedang. Penetapan Adipura untuk melaksanakan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau yang telah dilakukan pemantauan dan penilaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Kriteria Penilaian Adipura berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf f, Pasal 24 huruf c, Pasal 26 huruf c, dan Pasal 28 huruf c Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Adipura. Aspek penilaian meliputi Pemaparan inovasi Pengelolaan Sampah, Ruang Terbuka Hijau, dan Kota Berkelanjutan.

BAB VII PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023 merupakan bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan peraturan terkait lainnya, untuk memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) guna meningkatkan *good governance*.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023 secara keseluruhan.

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
 NOMOR 8 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
 DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2023

NO	SKPD	JENIS PIUTANG	SALDO AWAL PIUTANG	PENAMBAHAN PIUTANG	PENGURANGAN PIUTANG	SALDO AKHIR PIUTANG
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6
I. PIUTANG PENDAPATAN						
a. PIUTANG PAJAK DAERAH						
1	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	Pajak Hotel	4.790.000,00	100.000,00	4.790.000,00	100.000,00
2	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	Pajak Restoran	27.837.993,00	11.203.485,00	27.837.993,00	11.203.485,00
3	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	Pajak Hiburan	2.400.000,00	7.185.929,00	2.400.000,00	7.185.929,00
4	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	Pajak Air Tanah	10.533.100,00	9.425.122,00	10.533.100,00	9.425.122,00
5	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	Pajak Reklame	46.236.750,00	69.630.797,00	46.236.750,00	69.630.797,00
6	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	Pajak Parkir	4.790.000,00	2.347.200,00	4.790.000,00	2.347.200,00
7	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan	12.860.000,00	2.187.500,00	12.860.000,00	2.187.500,00
8	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	Pajak BPHTB	500.000,00	23.500.000,00	500.000,00	23.500.000,00
9	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	Piutang PBB	7.870.564.684,00	9.232.614.208,00	7.870.564.684,00	9.232.614.208,00
		Jumlah (a)	7.980.512.527,00	9.358.194.241,00	7.980.512.527,00	9.358.194.241,00
b. PIUTANG RETRIBUSI DAERAH						
1	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	0,00	24.650.000,00	0,00	24.650.000,00
2	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.072.365.000,00	0,00	0,00	1.072.365.000,00
3	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	1.083.826.850,00	1.405.403.636,00	1.083.826.850,00	1.405.403.636,00
4	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.160.102.550,00	1.219.296.750,00	1.160.102.550,00	1.219.296.750,00
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	587.500.000,00	0,00	0,00	587.500.000,00
6	Kecamatan Kebumen	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	49.891.354,00	0,00	49.891.354,00
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	175.861.000,00		175.861.000,00	0,00
		Jumlah (b)	4.079.655.400,00	2.699.241.740,00	2.419.790.400,00	4.359.106.740,00

NO	SKPD	JENIS PIUTANG	SALDO AWAL PIUTANG	PENAMBAHAN PIUTANG	PENGURANGAN PIUTANG	SALDO AKHIR PIUTANG
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6
c.PIUTANG HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN						
1	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		Jumlah (c)	0,00	0,00	0,00	0,00
d. PIUTANG LAIN -LAIN PAD YANG SAH						
1	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	2.665.717.308,94	3.300.708.525,36	2.665.717.308,94	3.300.708.525,36
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Piutang Pendapatan BLUD	17.100.700.227,00	17.174.333.920,00	17.100.700.227,00	17.174.333.920,00
3	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	624.230.401,00	598.750.401,00	624.230.401,00	598.750.401,00
		Jumlah (d)	20.390.647.936,94	21.073.792.846,36	20.390.647.936,94	21.073.792.846,36
e. PIUTANG TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN						
1	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		Jumlah (e)	0,00	0,00	0,00	0,00
f. PIUTANG TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA						
1	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	Piutang Bagi Hasil Pajak	3.437.968.245,00	6.047.212.575,00	3.437.968.245,00	6.047.212.575,00
		Jumlah (e)	3.437.968.245,00	6.047.212.575,00	3.437.968.245,00	6.047.212.575,00
		Jumlah Piutang Pendapatan	35.888.784.108,94	39.178.441.402,36	34.228.919.108,94	40.838.306.402,36
2. PIUTANG LAINNYA						
1	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		Jumlah Piutang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PIUTANG DAERAH	35.888.784.108,94	39.178.441.402,36	34.228.919.108,94	40.838.306.402,36

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

LAMPIRAN IX
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
 NOMOR 8 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
 DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH
 TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	JENIS PIUTANG	JUMLAH PIUTANG	JUMLAH PENYISIHAN	JUMLAH PIUTANG BERSIH
I.	PIUTANG PENDAPATAN			
1.	Piutang Pajak			
a.	Pajak Hotel	100.000,00	500,00	99.500,00
b.	Pajak Restoran	11.203.485,00	1.526.585,46	9.676.899,54
c.	Pajak Hiburan	7.185.929,00	35.929,65	7.149.999,35
d.	Pajak Air Tanah	9.425.122,00	935.241,61	8.489.880,39
e.	Pajak Reklame	69.630.797,00	6.864.144,74	62.766.652,26
f.	Pajak Parkir	2.347.200,00	608.736,00	1.738.464,00
g.	Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan	2.187.500,00	10.937,50	2.176.562,50
h.	Pajak BPHTB	23.500.000,00	117.500,00	23.382.500,00
i.	Piutang PBB	9.232.614.208,00	3.146.258.133,61	6.086.356.074,39
	Jumlah 1	9.358.194.241,00	3.156.357.708,57	6.201.836.532,43
2.	Piutang Retribusi			
	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	24.650.000,00	123.250,00	24.526.750,00
a.	Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.072.365.000,00	1.072.365.000,00	0,00
b.	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	1.405.403.636,00	1.092.067.972,88	313.335.663,12
c.	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.856.688.104,00	1.766.203.285,00	90.484.819,00
	Jumlah 2	4.359.106.740,00	3.930.759.507,88	428.347.232,12
3.	Piutang Lain-lain PAD yang Sah			
a.	Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	3.300.708.525,36	1.691.158.605,00	1.609.549.920,36
c.	Piutang Pendapatan BLUD	17.174.333.920,00	1.489.438.562,00	15.684.895.358,00
d.	Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	598.750.401,00	598.750.401,00	0,00
	Jumlah 3	21.073.792.846,36	3.779.347.568,00	17.294.445.278,36
4.	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya			
a.	Bagi hasil PKB	1.551.509.353,00		1.551.509.353,00
b.	Bagi hasil BBN KB	569.895.323,00		569.895.323,00
c.	Bagi hasil PBBKB	3.902.884.689,00		3.902.884.689,00
d.	Bagi hasil PAP	22.923.210,00		22.923.210,00
	Jumlah 4	6.047.212.575,00	0,00	6.047.212.575,00
	Jumlah Piutang Pendapatan	40.838.306.402,36	10.866.464.784,45	29.971.841.617,91

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	SKPD	JUMLAH DANA BERGULIR	JUMLAH PENYISIHAN DANA BERGULIR	JUMLAH PIUTANG BERSIH
1	2	3	4	5
1	Piutang dari Jasa Investasi Dana Bergulir (Pengguliran 2005-2008)	24.178.000,00	24.178.000,00	0,00
2	Piutang Dana Bergulir Eks Disperindagkop	574.572.401,00	574.572.401,00	0,00
	Jumlah	598.750.401,00	598.750.401,00	0,00

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

LAMPIRAN XI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
 NOMOR 8 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
 DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2023

No	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/Lembaga/Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan	Bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	Jumlah Penyertaan Modal Daerah	Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Dengan Awal Tahun	Penyertaan Modal Tahun Ini	Jumlah Modal Yang Disertakan Sampai Dengan Akhir Tahun Ini	Sisa Modal Yang Belum Disertakan	Hasil Penyertaan Modal Daerah Tahun Ini	Jumlah Modal Yang Diterima Kembali Tahun Ini	Jumlah Sisa Modal Yang Disertakan Sampai Dengan Tahun Ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10=6-9	11	12	13=9-12
1	2021-2025	PT BPR Bank Kebumen (Perseroda)	Perda 13 Tahun 2020	Uang	17.500.000.000,00	14.000.000.000,00	1.500.000.000,00	15.500.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	15.500.000.000,00
2	2021-2025	PT Luk Ulo Farma (Perseroda)	Perda 13 Tahun 2020	Uang	4.106.500.000,00	2.106.500.000,00	1.000.000.000,00	3.106.500.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	3.106.500.000,00
3	2021-2025	PT BPR BKK Kebumen (Perseroda)	Perda 13 Tahun 2020	Uang	26.700.000.000,00	19.200.000.000,00	0,00	19.200.000.000,00	7.500.000.000,00	0,00	0,00	19.200.000.000,00
4	2021-2025	Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa	Perda 13 Tahun 2020	Uang	54.461.647.118,00	45.961.647.118,00	4.000.000.000,00	49.961.647.118,00	4.500.000.000,00	0,00	0,00	49.961.647.118,00
5	2021-2025	PT Bank BPD Jateng	Perda 13 Tahun 2020	Uang	74.481.000.000,00	55.979.000.000,00	10.731.000.000,00	66.710.000.000,00	7.771.000.000,00	0,00	0,00	66.710.000.000,00
6	2021-2025	PT BPR BKK Jateng (Perseroda)	Perda 13 Tahun 2020	Uang	3.770.000.000,00	2.520.000.000,00	500.000.000,00	3.020.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00	3.020.000.000,00
7	2023-2025	PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda)	Perda 9 Tahun 2022	Uang	7.500.000.000,00	0,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	2.500.000.000,00
	Jumlah				188.519.147.118,00	139.767.147.118,00	20.231.000.000,00	159.998.147.118,00	28.521.000.000,00	0,00	0,00	159.998.147.118,00

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	SKPD	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	1.215.180.896.276	71.248.755.111	74.886.253.440	1.211.543.397.947,00
2	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	924.628.466.906	92.756.731.682	54.464.699.022	962.920.499.566,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2.939.674.057.341	110.132.872.500	11.145.579.700	3.038.661.350.141,10
4	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	128.015.493.367	25.267.037.317	869.703.732	152.412.826.952,00
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	16.337.539.325	2.162.511.265	1.146.083.998	17.353.966.592,00
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	31.748.741.410	917.797.500	1.312.615.267	31.353.923.643,00
7	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7.401.958.237	464.765.720	1.157.691.704	6.709.032.253,00
8	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	68.595.823.503	1.907.885.700	1.113.224.508	69.390.484.695,00
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN	172.194.542.467	20.851.222.695	578.969.576	192.466.795.586,00
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	14.562.158.816	937.468.000	445.372.160	15.054.254.656,00
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	7.857.746.396	2.530.172.000	294.454.323	10.093.464.073,00
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	36.006.256.551	1.329.930.500	617.410.342	36.718.776.709,00
13	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	295.544.481.598	15.849.054.150	220.573.600	311.172.962.148,00
14	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	10.921.176.641	17.052.700	828.782.748	10.109.446.593,00
15	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	104.074.314.902	28.152.555.879	6.584.103.000	125.642.767.781,00
16	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	15.792.239.894	470.178.700	380.706.650	15.881.711.944,00
17	DINAS TENAGA KERJA	43.972.620.399	314.940.000	424.186.958	43.863.373.441,00
18	SEKRETARIAT DAERAH	101.870.072.998	2.466.985.650	2.579.371.859	101.757.686.789,00
19	SEKRETARIAT DPRD	35.411.189.270	190.109.000	-	35.601.298.270,00
20	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	4.238.447.361	80.703.363	199.090.324	4.120.060.400,00
21	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	45.914.556.034	19.315.628.918	3.972.959.799	61.257.225.153,00
22	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	4.969.990.967	763.120.200	133.717.200	5.599.393.967,00
23	INSPEKTORAT DAERAH	10.109.020.915	388.632.700	28.653.000	10.469.000.615,00
24	KECAMATAN AYAH	2.287.591.835	13.584.000	26.511.250	2.274.664.585,00
25	KECAMATAN BUAYAN	1.664.293.009	35.207.000	58.063.000	1.641.437.009,00

NO	SKPD	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6=3+4-5
26	KECAMATAN PURING	3.046.213.649	17.046.000	39.574.000	3.023.685.649,00
27	KECAMATAN PETANAHAN	5.042.091.829	74.384.500	22.834.500	5.093.641.829,00
28	KECAMATAN KLIRONG	2.663.184.011	8.500.000	80.490.550	2.591.193.461,00
29	KECAMATAN BULUSPESANTREN	1.878.150.064	42.968.000	84.200.250	1.836.917.814,00
30	KECAMATAN AMBAL	3.854.977.420	9.270.000	77.859.000	3.786.388.420,00
31	KECAMATAN MIRIT	3.346.931.036	32.570.000	70.911.000	3.308.590.036,00
32	KECAMATAN BONOROWO	1.545.179.604	43.961.000	-	1.589.140.604,00
33	KECAMATAN PREMBUN	2.412.753.062	32.295.000	1.375.000	2.443.673.062,00
34	KECAMATAN PADURESO	2.034.582.050	26.285.000	80.941.050	1.979.926.000,00
35	KECAMATAN KUTOWINANGUN	4.137.733.854	19.382.000	8.118.100	4.148.997.754,00
36	KECAMATAN ALIAN	2.219.549.035	10.360.500	48.527.450	2.181.382.085,00
37	KECAMATAN PONCOWARNO	4.159.031.982	22.860.000	93.989.050	4.087.902.932,00
38	KECAMATAN KEBUMEN	80.454.467.077	1.428.785.871	296.782.668	81.586.470.280,43
39	KECAMATAN PEJAGOAN	3.763.135.564	89.172.500	27.007.236	3.825.300.828,00
40	KECAMATAN SRUWENG	7.664.277.462	19.740.000	61.322.250	7.622.695.212,00
41	KECAMATAN ADIMULYO	1.928.173.264	15.889.200	33.019.000	1.911.043.464,00
42	KECAMATAN KUWARASAN	1.653.911.628	-	68.011.250	1.585.900.378,00
43	KECAMATAN ROWOKELE	1.738.500.572	10.290.000	15.444.000	1.733.346.572,00
44	KECAMATAN SEMPOR	1.689.284.717	-	34.914.000	1.654.370.717,00
45	KECAMATAN GOMBONG	45.770.669.479	426.490.248	577.968.600	45.619.191.127,08
46	KECAMATAN KARANGANYAR	53.575.261.859	1.459.981.500	1.100.267.000	53.934.976.359,19
47	KECAMATAN KARANGGAYAM	3.880.664.350	-	88.449.250	3.792.215.100,00
48	KECAMATAN SADANG	1.920.411.813	32.605.903	21.734.150	1.931.283.566,00
49	KECAMATAN KARANGSAMBUNG	8.909.145.396	22.785.000	23.635.750	8.908.294.646,00
50	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4.684.011.461	564.778.750	309.651.080	4.939.139.131,00
	Jumlah	6.492.945.968.656,80	402.975.303.222,00	166.735.803.344,00	6.729.185.468.534,80

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

LAMPIRAN XIII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
 NOMOR 8 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
 DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP
 TAHUN ANGGARAN 2023

NO	URAIAN	NILAI ASET TETAP PER 31 DESEMBER 2022	MUTASI		NILAI ASET TETAP PER 31 DESEMBER 2023
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6
1	Tanah	794.019.449.045,55	28.071.964.374,00	10.656.694.834,00	811.434.718.585,55
2	Peralatan dan Mesin	1.094.696.731.234,00	117.675.248.197,00	75.532.456.200,00	1.136.839.523.231,00
3	Gedung dan Bangunan	1.664.430.735.238,00	112.238.557.017,00	34.857.509.070,00	1.741.811.783.185,00
4	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.787.621.602.000,25	131.817.926.105,00	1.781.695.376,00	2.917.657.832.729,25
5	Aset Tetap Lainnya	143.266.418.481,00	12.283.155.479,00	43.563.349.864,00	111.986.224.096,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	8.911.032.658,00	888.452.050,00	344.098.000,00	9.455.386.708,00
7	Akumulasi Penyusutan				-
	Jumlah	6.492.945.968.656,80	402.975.303.222,00	166.735.803.344,00	6.729.185.468.534,80

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

LAMPIRAN XIV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
 NOMOR 8 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
 DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM PEKERJAAN
 PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI									REKLASIFIKASI/ PENGHAPUSAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2023	
			BERTAMBAH				BERKURANG							
			ASET TETAP LAINNYA	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	PERALATAN DAN MESIN	ASET TETAP LAINNYA	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	PERALATAN DAN MESIN	ASET LAINNYA			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.497.166.147		657.955.000,00									187.966.000,00	1.967.155.147,00
2	Dinas Kesehatan	58.674.000		72.594.000,00									58.674.000	72.594.000,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman	415.646.000												415.646.000,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah Prembun	5.809.294.500												5.809.294.500,00
5	Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan	98.829.000												98.829.000,00
6	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	790.350.011											97.458.000	692.892.011,00
7	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	241.073.000		69.880.050,00										310.953.050,00
8	Dinas Pendidikan			88.023.000,00										88.023.000,00
	Jumlah	8.911.032.658,00	0,00	888.452.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.098.000,00	9.455.386.708,00

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

LAMPIRAN XV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	5	6	7
1	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	3.679.746.303,00	51.497.612.872,00	45.731.498.446,00	9.445.860.729,00
2	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	17.098.435.693,00	16.954.141.504,00	9.420.450.093,00	24.632.127.104,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	96.880.945.068,00	110.567.000,00	11.211.350.645,00	85.780.161.423,00
4	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	366.705.400,00	109.865.472,00		476.570.872,00
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		902.298.998,00	50.000.000,00	852.298.998,00
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	262.868.000,00	1.010.346.267,00	15.150.000,00	1.258.064.267,00
7	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		623.201.064,00		623.201.064,00
8	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	1.429.111.012,00	1.070.924.508,00	780.250.500,00	1.719.785.020,00
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN	14.087.000,00	565.177.576,00	40.663.654,00	538.600.922,00
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		445.372.160,00		445.372.160,00
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		263.333.323,00	108.500.000,00	154.833.323,00
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	350.317.150,00	194.779.022,00	37.076.500,00	508.019.672,00
13	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	16.393.710.868,00	122.820.600,00	117.502.000,00	16.399.029.468,00
14	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		788.830.048,00	9.650.000,00	779.180.048,00
15	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	1.971.551.150,00	630.982.000,00	1.700.915.150,00	901.618.000,00
16	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	194.258.100,00	388.639.150,00	47.932.500,00	534.964.750,00
17	DINAS TENAGA KERJA	100.765.000,00	90.311.958,00	4.000.000,00	187.076.958,00
18	SEKRETARIAT DAERAH	409.677.622,00	1.328.972.359,00	69.396.522,00	1.669.253.459,00
19	SEKRETARIAT DPRD				-
20	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	138.922.000,00	199.090.324,00	17.560.000,00	320.452.324,00
21	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	3.991.523.154,00	5.416.682.209,44	4.118.954.271,00	5.289.251.092,44
23	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	311.943.730,00	11.919.000,00	276.943.730,00	46.919.000,00
24	INSPEKTORAT DAERAH	7.150.000,00	28.653.000,00	7.150.000,00	28.653.000,00

NO	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	5	6	7
25	KECAMATAN AYAH		26.511.250,00		26.511.250,00
26	KECAMATAN BUAYAN		58.063.000,00		58.063.000,00
27	KECAMATAN PURING		35.084.000,00		35.084.000,00
28	KECAMATAN PETANAHAN	2.200.000,00	22.500.000,00	2.200.000,00	22.500.000,00
29	KECAMATAN KLIRONG		80.490.550,00		80.490.550,00
30	KECAMATAN BULUSPESANTREN	29.785.000,00	93.275.250,00	38.860.000,00	84.200.250,00
31	KECAMATAN AMBAL		77.859.000,00		77.859.000,00
32	KECAMATAN MIRIT		70.911.000,00		70.911.000,00
33	KECAMATAN BONOROWO	12.930.750,00		12.930.750,00	-
34	KECAMATAN PREMBUN		1.375.000,00		1.375.000,00
35	KECAMATAN PADURESO		80.941.050,00		80.941.050,00
36	KECAMATAN KUTOWINANGUN	45.339.000,00	7.600.000,00	40.339.000,00	12.600.000,00
37	KECAMATAN ALIAN		47.766.950,00		47.766.950,00
38	KECAMATAN PONCOWARNO	18.001.500,00	93.989.050,00		111.990.550,00
39	KECAMATAN KEBUMEN		227.297.668,00		227.297.668,00
40	KECAMATAN PEJAGOAN	29.785.000,00	27.007.236,00	29.785.000,00	27.007.236,00
41	KECAMATAN SRUWENG	5.593.000,00	61.322.250,00	5.593.000,00	61.322.250,00
42	KECAMATAN ADIMULYO	52.155.200,00	33.019.000,00	52.155.200,00	33.019.000,00
43	KECAMATAN KUWARASAN		68.011.250,00		68.011.250,00
44	KECAMATAN ROWOKELE		15.444.000,00		15.444.000,00
45	KECAMATAN SEMPOR		34.914.000,00		34.914.000,00
46	KECAMATAN GOMBONG	18.593.000,00	89.013.600,00	18.593.000,00	89.013.600,00
47	KECAMATAN KARANGANYAR		64.565.000,00		64.565.000,00
48	KECAMATAN KARANGGAYAM	11.415.000,00	88.449.250,00	11.415.000,00	88.449.250,00
49	KECAMATAN SADANG		21.734.150,00		21.734.150,00
50	KECAMATAN KARANGSAMBUNG		23.635.750,00		23.635.750,00
51	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		100.535.080,00		100.535.080,00
Jumlah		143.827.514.700,00	84.305.834.748,44	73.976.814.961,00	154.156.534.487,44

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

LAMPIRAN XVI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
 NOMOR 8 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
 DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH
 PER 31 DESEMBER 2023

NO	TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIRENCANAKAN (RP)	SALDO AWAL (RP)	TRANSFER DARI KAS DAERAH (RP)	TRANSFER KE KAS DAERAH (RP)	SALDO AKHIR (RP)	SISA DANA YANG BELUM DICADANGKAN (RP)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mendanai kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024	35.000.000.000,00	15.000.000.000,00	20.000.000.000,00	22.225.540.000,00	12.774.460.000,00	0,00
	Jumlah		35.000.000.000,00	15.000.000.000,00	20.000.000.000,00	22.225.540.000,00	12.774.460.000,00	0,00

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

LAMPIRAN XVII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
 NOMOR 8 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
 DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
 PER 31 DESEMBER 2023

NO	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	9.326.302,00	6.438.730,00	9.326.302,00	6.438.730,00
2	Pendapatan diterima Dimuka	1.109.331.028,94	2.002.249.183,97	1.109.331.028,94	2.002.249.183,97
3	Utang Belanja	35.466.051.092,00	56.780.960.062,00	35.466.051.092,00	56.780.960.062,00
Jumlah		36.584.708.422,94	58.789.647.975,97	36.584.708.422,94	58.789.647.975,97

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

LAMPIRAN XVIII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
 NOMOR 8 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
 DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
 PER 31 DESEMBER 2023

NO	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
1	2	3	4	5	6
	N	I	H	I	L

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

LAMPIRAN XIX
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
 NOMOR 8 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
 DAFTAR SUB KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023
 DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA

NO	NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH			%	JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA	DASAR HUKUM
			ANGGARAN**)	REALISASI	TAMBAH/ KURANG			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			N	I	H	I	L	

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (NERACA) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI
 DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

No	BUMD/Perusahaan Daerah Tahun	Sumber a)	Status b)	Aset Lancar	Aset Tidak Lancar	Aset Lainnya	Total Aset	Kewajiban Jangka Pendek	Kewajiban Jangka Panjang	Total Kewajiban	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	BPYDS	Ekuitas Lainnya	Laba Ditahan	Total Ekuitas	% Saham Daerah	Kepemilikan Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5+6+7	9	10	11 = 9+10	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17x18
1.	Bidang Perbankan																	
a.	PT BPR BKK Kebumen (Perseroda)	Audited	S	531.049.213.209	13.604.531.723	152.271.281	544.806.016.213	476.954.866.103	-	476.954.866.103	36.370.000.000	-	19.200.000.000	31.481.150.110	-	67.851.150.110	52,79%	35.818.622.143
b.	PT BKK Jateng (Perseroda)	Audited	S	2.383.632.488.290	41.832.556.740	48.548.978.725	2.474.014.023.755	2.008.490.231.469	16.367.278.205	2.024.857.509.674	924.840.000.000	(556.990.000.000)	-	51.187.055.757	30.119.458.323	449.156.514.080	0,73%	3.278.842.553
c.	PT BPR Bank Kebumen (Perseroda)	Audited	S	132.877.375.827	2.050.982.668	1.376.927.075	136.305.285.570	112.345.323.079	546.760.976	112.892.084.055	50.000.000.000	15.500.000.000	-	5.608.279.383	2.304.922.133	23.413.201.516	100,00%	23.413.201.516
d.	PT BPD Bank Jateng (Perseroda)	Audited	S	85.360.339.047.000	2.947.553.827.000	145.718.905.000	88.453.611.779.000	77.764.326.570.000		77.764.326.570.000	4.407.355.000.000	102.753.000.000	55.979.000.000	4.405.597.585.000	1.773.579.624.000	10.689.285.209.000	1,27%	55.979.000.000
2.	Bidang Pelayanan Air Minum																	
	Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa	Audited	S	16.743.781.625	49.609.613.724	4.468.712.629	70.822.107.978	740.171.678	710.040.765	1.450.212.443	41.180.672.486		18.631.077.831	3.642.942.291	5.917.202.927	69.371.895.535	100,00%	69.371.895.535
3.	Bidang Kesehatan																	
	PT Luk Ulo Farma (Perseroda)	Audited	S	4.271.115.350	101.873.662	502.389.251	4.875.378.263	1.009.753.479	27.855.284	1.037.608.763	2.106.500.000	1.000.000.000	3.106.500.000	386.018.327	345.251.173	3.837.769.500	100,00%	3.837.769.500
4.	Bidang Pariwisata																	
	PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda)	Audited	KS	276.154.054	56.237.953.702	1.223.700.000	57.737.807.756	528.875.386	1.306.770.493,0	1.835.645.879	75.000.000.000	30.536.400	151.000.000	448.665.622	(19.577.040.145)	55.902.161.877	0,20%	151.000.000
5.	Bidang Aneka Usaha																	
	PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda)	Audited	S	2.122.641.355	458.129.052	72.818.180	2.653.588.587	12.735.285		12.735.285	10.000.000.000	(7.500.000.000)			140.853.303	2.640.853.303	100%	2.640.853.303
	Jumlah			88.431.311.816.710,00	3.111.449.468.271,00	202.064.702.141,00	91.744.825.987.122,00	80.364.408.526.479,00	18.958.705.723,00	80.383.367.232.202,00	5.546.852.172.486,00	-445.206.463.600,00	97.067.577.831,00	4.498.351.696.490,00	1.792.830.271.714,00	11.361.458.754.921,00		194.491.184.549,85

- a) 1) telah diaudit (audited), 2) Lap. Tahunan belum diaudit (unaudited); 3) Lap. Semester; 4) Lap. Triwulan 5) Prognosa; 6) RKAP=Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan
 b) S = Sehat, KS = Kurang Sehat, TS = Tidak Sehat
 c) BPYDS = Bagian Pemerintah yang Disetor

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

LAMPIRAN XX.2
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
 NOMOR 8 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2023

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (LAPORAN LABA/RUGI) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH UNTUK TAHUN YANG
 BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

NO.	BUMD/Perusahaan Daerah Tahun	Sumber a)	Status b)	Pendapatan	Beban	Laba (Rugi) Kotor	Pendapatan di luar usaha	Beban di luar usaha	Laba (Rugi) Sebelum Pajak	PKLB	PAJAK PENGHASILAN	LABA (RUGI) BERSIH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Bidang Perbankan											
	a. PT BPR BKK Kebumen (Perseroda)	Audited	S	66.286.044.761,00	49.433.838.379,00	16.852.206.382,00	707.395.249,00	242.961.404,00	17.316.640.227,00		3.915.633.665,00	13.401.006.562,00
	b. PT BKK Jateng (Perseroda)	Audited	S	254.131.740.430,00	190.896.981.037,00	63.234.759.392,00	1.499.718.772,00	2.767.784.392,00	61.966.693.772,00		11.162.351.640,00	50.804.342.132,00
	c. PT BPR Bank Kebumen (Perseroda)	Audited	S	12.901.252.702,00	9.737.616.866,00	3.163.635.835,00	-	389.364.400,00	2.774.271.435,00		559.349.303,00	2.214.922.132,00
	d. PT BPD Bank Jateng (Perseroda)	Audited	S	4.798.177.888.000,00	3.230.553.730.000,00	1.567.624.158.000,00	532.051.012.000,00	25.189.269.000,00	2.074.485.901.000,00		487.637.852.000,00	1.586.848.049.000,00
2.	Bidang Pelayanan Air Minum								-			-
	Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa	Audited	S	44.023.998.621,00	36.801.523.141,00	7.222.475.480,00	256.807.218,00	22.492.471,00	7.456.790.227,00		1.539.587.299,00	5.917.202.928,00
3.	Bidang Kesehatan					-			-			-
	PT Luk Ulo Farma (Perseroda)	Audited	S	1.911.832.618,47	1.576.486.749,00	335.345.869,47	107.340.058,00	26.031.549,00	416.654.378,47		71.403.205,44	345.251.173,04
4.	Bidang Pariwisata					-			-			-
	PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda)	Audited	KS	6.493.377.953,00	7.557.417.541,00	(1.064.039.588,00)	1.091.960,00	83.822.499,00	(1.146.770.127,00)		-	(1.146.770.127)
5.	Bidang Aneka Usaha											-
	PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda)	Audited	S	765.309.674,00	627.361.007,00	137.948.667,00	13.838.135,00	10.933.500,00	140.853.302,00		-	140.853.302,00
	Jumlah			5.184.691.444.759,47	3.527.184.954.720,00	1.657.506.490.037,47	534.637.203.392,00	28.732.659.215,00	2.163.411.034.214,47	-	504.886.177.112,44	1.658.524.857.102,03

- b) S = Sehat, KS = Kurang Sehat, TS = Tidak Sehat
 c) PKLB = Pos Kejadian Luar Biasa

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO